RPJMD
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025 - 2029

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 atau RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pengejawantahan dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2025-2030. Penjobaran visi dan misi daerah mendasarkan pada filosofi cita-cita Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk "**NGOPENI. NGLAKONI. Jateng**".

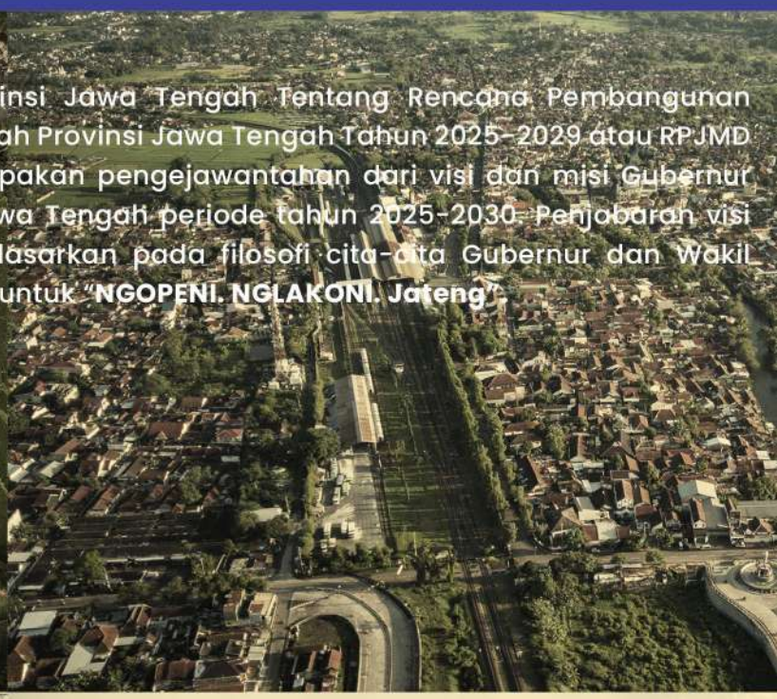

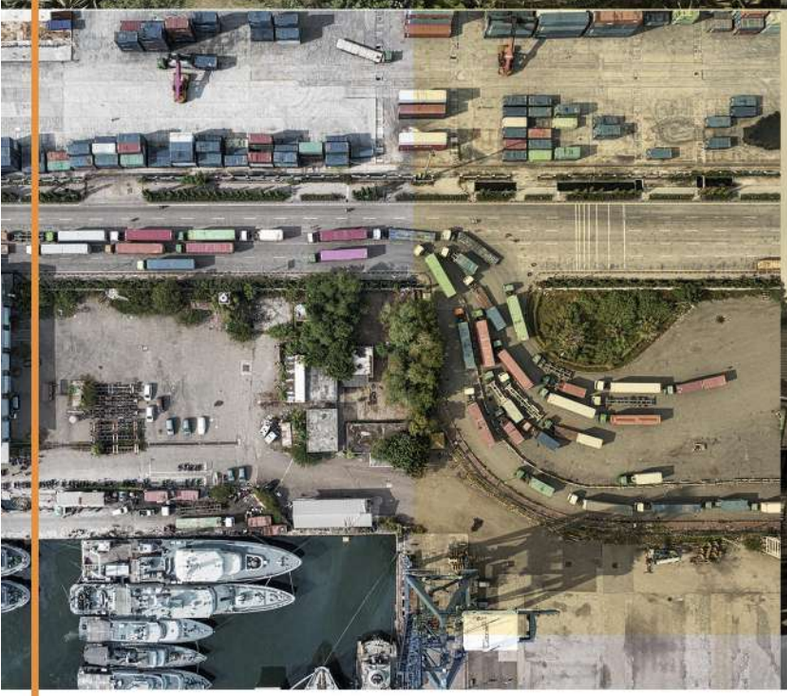

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NGOPENI. NGLAKONI. Jateng

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Jl. Pahlawan No.9, Mugassari, Semarang Selatan,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50249
E-Mail ppid@jatengprov.go.id
Telepon 024-8415548 / 024-8453676

SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang dijabarkan ke dalam perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang menghasilkan sasaran pokok dan arah kebijakan daerah;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum pada semua pihak yang terlibat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 maka diperlukan pengaturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi Daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan Daerah untuk mewujudkan Visi.
14. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya Visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD dan RPJMN.
15. Sasaran RPJMD adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan Daerah menuju tercapainya Tujuan.
16. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai Tujuan/Sasaran.
17. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran Misi yang selaras dengan Strategi dalam rangka mencapai target Tujuan dan Sasaran.
18. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.
19. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
20. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
21. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapaianya target secara efektif dan efisien.

BAB II

MATERI MUATAN DAN FUNGSI RPJMD

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029, yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Program Perangkat Daerah.

(2) RPJMD sebagaimana disebut pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
b. pedoman dalam penyusunan RKPD;
c. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;
d. instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dan
e. pedoman penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

(1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Gambaran Umum Daerah;
c. BAB III : Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
d. BAB IV : Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah;
e. BAB V : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
f. BAB VI : Penutup

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 5

(1) Gubernur bertanggungjawab dalam proses pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan

b. evaluasi terhadap hasil RPJMD.

(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah secara berkala.

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Agustus 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 25 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 7-98/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Haerudin, S.H., M.H.
Kepala Biro Hukum
197007291996031001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025–2029

I. UMUM

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan hal tersebut, daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan untuk meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah tersebut, maka disusun rencana pembangunan daerah yang dihasilkan dari proses perencanaan pembangunan daerah dimana perencanaan pembangunan daerah merupakan satu rangkaian dengan perencanaan pembangunan nasional dalam satu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah dan perangkat daerah. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang dijabarkan dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dan Renstra Perangkat Daerah, selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, maka Daerah wajib Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah tahap pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas pembangunan daerah dan keuangan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun ke depan yang terhitung mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan perencanaan pembangunan Daerah tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 menjadi sangat penting dalam keberlanjutan pelaksanaan pembangunan Daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 perlu untuk ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud pedoman dalam penyusunan RKPD termasuk juga sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Sistematika RPJMD berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dengan penambahan 1 (satu) bab terkait Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 170

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

Daftar Isi ii
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar vii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum I-2
1.3. Hubungan Antardokumen I-3
1.4. Maksud dan Tujuan I-5
1.5. Sistematika I-5
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-25
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah II-42
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum II-65
2.1.5 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Jawa Tengah II-88
2.2 Gambaran Keuangan Daerah II-136
2.2.1 Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2020-2024 ..... II-136
2.2.2 Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030 ..... II-152
2.2.3 Alternatif Sumber Pendanaan Lain II-163
2.3 Permasalahan dan Isu Strategis II-164
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah II-164
2.3.2 Isu Strategis II-177
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-1
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran III-1
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan III-15
3.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah III-59
3.3.1 Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur III-59
3.3.2 Dukungan dan Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah Terhadap Rencana Pembangunan Nasional III-82
3.3.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah III-90
BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH IV-1
4.1 Kebijakan Umum Pengembangan Wilayah IV-1
4.2 Arahan Kebijakan Pembangunan Per Wilayah Pengembangan Tahun 2025-2029 ..... IV-4
4.2.1 WP Cibalingmas IV-8
4.2.2 WP Wonobanjar IV-14
4.2.3 WP Keburejo IV-19
4.2.4 WP Gelangmanggung IV-24
4.2.5 WP Subosukowonosraten IV-28
4.2.6 WP Jekuti IV-35
4.2.7 WP Banglor IV-39
4.2.8 WP Kedungsepur IV-44

4.2.9 WP Petanglong..... IV-51
4.2.10 WP Bregasmalang..... IV-56
BAB V PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH..... V-1
5.1 Program Perangkat Daerah V-1
5.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah V-89
BAB VI PENUTUP..... VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Proyeksi Status Daya Dukung dan Daya Tampung di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2029 ..... II-7
Tabel 2.2 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (NTE-KTH) Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024 ..... II-15
Tabel 2.3 Perkembangan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Provinsi Jawa TengahTahun 2019-2024 ..... II-15
Tabel 2.4 Perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 ..... II-15
Tabel 2.5 Persentase Pengelolaan Sampah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024 ..... II-16
Tabel 2.6 Tingkat Risiko Bencana di Provinsi Jawa Tengah II-18
Tabel 2.7 Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan 2030 ..... II-24
Tabel 2.8 Karakteristik Pengangguran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 (Persen) II-31
Tabel 2.9 Capaian IUP Lingkup Pendidikan Jawa Tengah Tahun 2021-2024 ..... II-34
Tabel 2.10 Perkembangan Komponen IPG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024 ..... II-39
Tabel 2.11 Perkembangan Komponen Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024 ..... II-40
Tabel 2.12 Kondisi Permukaan Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-53
Tabel 2.13 Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-54
Tabel 2.14 Jumlah Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024..... ..... II-55
Tabel 2.15 Perkembangan Layanan Trans Jateng Tahun 2020 - 2024..... II-56
Tabel 2.16 Indeks Pelayanan Transportasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024 ..... II-57
Tabel 2.17 Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024..... II-58
Tabel 2.18 Penanganan Rumah Terdampak Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 melalui APBD Provinsi II-58
Tabel 2.19 Capaian Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 ..... II-72
Tabel 2.20 Daftar Indikator pada seluruh Gatra di Indeks Ketahanan Nasional yang tergolong Kurang Tangguh dan Rawan II-73
Tabel 2.21 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2024 ..... II-88
Tabel 2.22 Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2020-2023..... ..... II-97

Tabel 2.23 Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun Sampai Dengan Tahun 2024 Berdasarkan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 ..... II-126
Tabel 2.24 Otonomi Fiskal Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-136
Tabel 2.25 Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-137
Tabel 2.26 Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-141
Tabel 2.27 Neraca Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024 ..... II-146
Tabel 2.28 *Current Ratio* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-148
Tabel 2.29 *Cash Ratio* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-149
Tabel 2.30 *Quick Ratio* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-150
Tabel 2.31 Rasio *Solvabilitas* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-151
Tabel 2.32 *Debt to Equity Ratio* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-152
Tabel 2.33 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 – 2030 ..... II-153
Tabel 2.34 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 – 2030 ..... II-158
Tabel 2.35 Proyeksi Target Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 – 2030 ..... II-160
Tabel 2.36 Proyeksi Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026-2030 ..... II-161
Tabel 2.37 Realisasi Pelaksanaan CSR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 ..... II-164
Tabel 2.38 Isu Strategis Global, Nasional, dan Daerah Dalam Kurun Lima (5) Tahun ke Depan II-177
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Tahun 2026–2030 ..... III-9
Tabel 3.2 Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah III-11
Tabel 3.3 Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah III-16
Tabel 3.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah III-46
Tabel 3.5 Penjabaran Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah III-66
Tabel 3.6 Dukungan Program Daerah Jawa Tengah Terhadap Asta Cita/Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025-2029 ..... III-82
Tabel 3.7 Dukungan Program Prioritas Daerah Jawa Tengah Terhadap Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029 ..... III-87
Tabel 3.8 Penjabaran Tujuan dan Sasaran Daerah Dalam Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah III-91

Tabel	4.1	Program Unggulan dan Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi pada Setiap Wilayah Pengembangan (WP)	IV-6
Tabel	4.2	Target Kinerja Makro WP Cibalingmas	IV-13
Tabel	4.3	Target Kinerja Makro WP Wonobanjar.....	IV-18
Tabel	4.4	Target Kinerja Makro WP Keburejo.....	IV-23
Tabel	4.5	Target Kinerja Makro WP Gelangmanggung.....	IV-27
Tabel	4.6	Target Kinerja Makro WP Subosukawonosraten	IV-33
Tabel	4.7	Target Kinerja Makro WP Jekuti.....	IV-38
Tabel	4.8	Target Kinerja Makro WP Banglor	IV-43
Tabel	4.9	Target Kinerja Makro WP Kedungsepur.....	IV-49
Tabel	4.10	Target Kinerja Makro WP Petanglong	IV-55
Tabel	4.11	Target Kinerja Makro WP Bregasmalang.....	IV-60
Tabel	5.1	Program Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	V-27
Tabel	5.2	Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	V-91
Tabel	5.3	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Jawa Tengah	V-92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Lainnya I-4
Gambar 2.1 Letak dan Peran Strategis Provinsi Jawa Tengah II-2
Gambar 2.2 Prakiraan Daya Dukung Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2029 *Business as Usual* (BAU) II-5
Gambar 2.3 Prakiraan Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2029 *Business as Usual* (BAU) II-6
Gambar 2.4 Potensi Teknis Energi Baru Terbarukan Provinsi Jawa Tengah.... II-8
Gambar 2.5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024..... II-13
Gambar 2.6 Peta Risiko Multi Bahaya Provinsi Jawa Tengah..... II-18
Gambar 2.7 Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2024 II-19
Gambar 2.8 Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2024 ..... II-19
Gambar 2.9 Tren Kenaikan Suhu Udara Rata-Rata Tahunan Provinsi Jawa Tengah..... II-20
Gambar 2.10 Tren Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2023 ..... II-21
Gambar 2.11 Peta Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim Provinsi Jawa Tengah..... II-22
Gambar 2.12 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-23
Gambar 2.13 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Persen)..... II-26
Gambar 2.14 Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024 ..... II-27
Gambar 2.15 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 - 2024 (Persen)..... II-28
Gambar 2.16 PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2019–2024 (Juta Rupiah)..... II-29
Gambar 2.17 Rasio Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024..... II-29
Gambar 2.18 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2024 (Persen)..... II-30
Gambar 2.19 Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun) II-31
Gambar 2.20 Kondisi Ketenagakerjaan Disabilitas di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 ..... II-36
Gambar 2.21 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023..... II-37
Gambar 2.22 Capaian IKUB Jawa Tengah Beserta Dimensinya Tahun 2021 - 2024 ..... II-38
Gambar 2.23 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010-2024..... II-42

Gambar 2.24 Karakteristik Penduduk Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024 ..... II-43
Gambar 2.25 Struktur Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 1975-2024 (Persen)..... II-43
Gambar 2.26 Kontribusi Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan Provinsi Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2010-2023 (Persen)..... II-44
Gambar 2.27 Peta Potensi Industri Pengolahan Makanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 ..... II-44
Gambar 2.28 Peta Potensi Industri Pengolahan Tekstil dan Pakaian Jadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037..... II-45
Gambar 2.29 Peta Potensi Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ..... II-45
Gambar 2.30 Produksi Padi, Jagung,dan Kedelai Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ..... II-46
Gambar 2.31 Produksi Daging, Telur, dan Susu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-46
Gambar 2.32 Produksi Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 (Ton/Tahun) II-47
Gambar 2.33 Nilai Aset, Laba Bersih dan *Return On Assets* (ROA) BUMD di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023 ..... II-48
Gambar 2.34 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024 (Juta Rupiah) II-48
Gambar 2.35 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi se-Pulau Jawa Tahun 2024 (Juta Rupiah) II-49
Gambar 2.36 Jumlah Produk Tersertifikasi Halal di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024 ..... II-50
Gambar 2.37 Aset Perbankan Syariah/PDRB di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-50
Gambar 2.38 Kontribusi PMTB terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 ..... II-51
Gambar 2.39 Ruas Jalan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Menurut Statusnya II-52
Gambar 2.40 Klasifikasi Tingkat Kemandirian Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 (Persen) II-59
Gambar 2.41 Rata-Rata Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 (Persen)..... II-60
Gambar 2.42 Klasifikasi Perkembangan BUMDes Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dan 2024 (Persen) II-61
Gambar 2.43 Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 ..... II-62
Gambar 2.44 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-62
Gambar 2.45 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 - 2024 (Persen) II-63
Gambar 2.46 Total Dana Pihak Ketiga dan Kredit Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024..... II-64
Gambar 2.47 Aset Dana Pensiun Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-64

Gambar 2.48 Nilai Transaksi Saham Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 ..... II-64
Gambar 2.49 Indeks Inklusi Keuangan Tahun 2016-2024..... II-65
Gambar 2.50 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2024 ..... II-66
Gambar 2.51 Indeks SPBE Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024..... II-67
Gambar 2.52 Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024 ..... II-69
Gambar 2.53 Survey Penilaian Integritas (SPI)/Indeks Integritas Nasional (IIN) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 - 2024..... II-69
Gambar 2.54 Nilai SAKIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2024..... II-70
Gambar 2.55 Indeks Daya Saing Daerah Provinsi di Pulau Jawa-Bali Tahun 2024 ..... II-75
Gambar 2.56 Skor Pilar IDSD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 - 2024 ..... II-75
Gambar 2.57 Skor Pilar 1 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) – Kapasitas Institusi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 – 2024..... II-76
Gambar 2.58 Perbandingan Rasio Likuiditas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024..... II-150
Gambar 3.1 Visi Misi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 ..... III-2
Gambar 3.2 Keterkaitan Visi dan Pokok Visi, Misi, dan Fokus Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 . III-3
Gambar 3.3 *Logframe* Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029 ..... III-4
Gambar 3.4 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029..... III-8
Gambar 3.5 Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026-2030 ..... III-23
Gambar 3.6 Keterkaitan Visi Misi Daerah dengan Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029 ..... III-82
Gambar 4.1 Pembagian Wilayah Pengembangan (WP) di Provinsi Jawa Tengah..... IV-2
Gambar 4.2 Pengembangan Kewilayahan di Jawa Tengah Pada RPJMN 2025-2029 ..... IV-4
Gambar 4.3 Arahan Kebijakan WP Cibalingmas IV-14
Gambar 4.4 Arahan Kebijakan WP Wonobanjar..... IV-19
Gambar 4.5 Arahan Kebijakan WP Keburejo..... IV-23
Gambar 4.6 Arahan Kebijakan WP Gelangmanggung..... IV-28
Gambar 4.7 Arahan Kebijakan WP Subosukawonosraten IV-34
Gambar 4.8 Arahan Kebijakan WP Jekuti..... IV-39
Gambar 4.9 Arahan Kebijakan WP Banglor IV-44
Gambar 4.10 Arahan Kebijakan WP Kedungsepur..... IV-50
Gambar 4.11 Arahan Kebijakan WP Petanglong IV-56
Gambar 4.12 Arahan Kebijakan WP Bregasmalang..... IV-61

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas pembangunan daerah, program perangkat daerah, dan kebijakan keuangan daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Pada tahun 2024, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan secara serentak untuk menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Periode 2025-2030. Periode pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dimulai sejak dilantiknya Gubenur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K dan Wakil Gubernur Jawa Tengah H. Taj. Yasin Maimoen pada tanggal 20 Februari 2025. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahap pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah "**Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045**". Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan menjadi 6 (enam) misi, yaitu: 1) Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global; 2) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri dan berkelanjutan; 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas; 4) Mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif; 5) Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan; serta 6) Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Secara substansi, penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 memperhatikan kebijakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 dan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, serta memperhatikan prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD ini juga menjadi panduan bagi kabupaten/kota untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan dunia usaha maupun masyarakat dalam ikut serta bersama membangun Jawa Tengah selama lima tahun ke depan.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 155);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. HUBUNGAN ANTARDOKUMEN

RPJMD Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMN yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional Asta Cita, sesuai dengan kewenangan dan kondisi Provinsi Jawa Tengah. RPJMD juga berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, serta RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044.

Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 juga memperhatikan:

1. Hasil evaluasi capaian pembangunan daerah tahun 2020-2024 terutama pada tingkat ketercapaian kinerja daerah dan rekomendasi;

2. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029 terutama pada substansi isu strategis, dan arah kebijakan;
3. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) Tahun 2025-2029 yang secara substansi berisi mengenai ekosistem riset inovasi untuk perumusan permasalahan pembangunan daerah dan penguatan sektor unggulan;
4. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional di Daerah; serta
5. Rencana sektoral lainnya yang secara substansi berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, holistik tematik, integratif, serta spasial.

RPJMD Tahun 2025-2029 yang disusun akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rancangan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

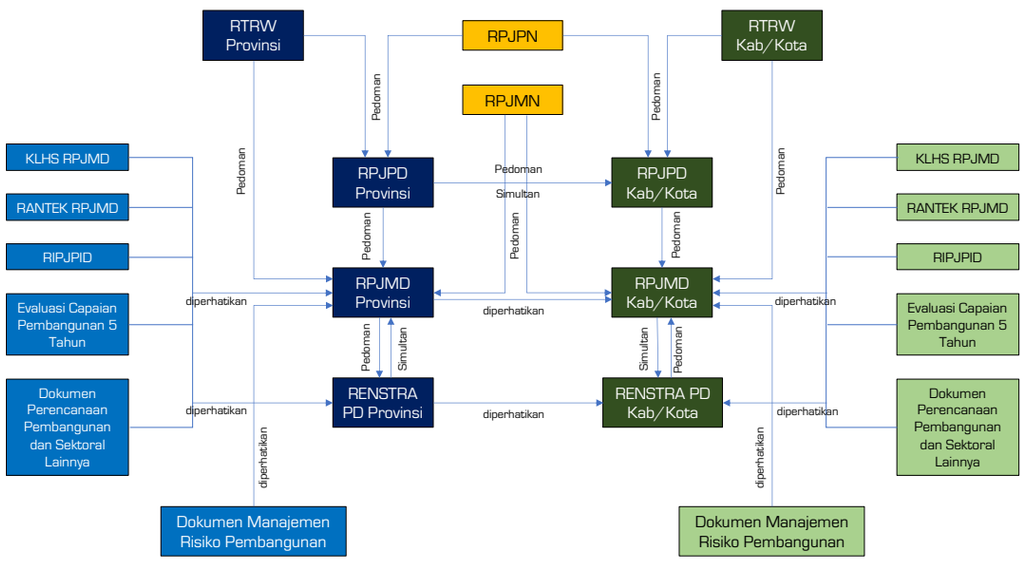

Gambar 1.1.
Keterkaitan RPJMD Dengan Dokumen Lainnya

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

a. Maksud

   Maksud penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas disertai indikator kinerja pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 yang akan digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2029, serta menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD periode tahun 2025-2029.

b. Tujuan

   Tujuan penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 adalah:

   1. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2025-2029;
   2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi berbatasan, dan Pemerintah Pusat;
   3. Sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; serta
   4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5. SISTEMATIKA

Sistematika dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Daerah

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Provinsi Jawa Tengah meliputi gambaran dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, termasuk kinerja setiap urusan pemerintahan; gambaran keuangan daerah meliputi realisasi dan proyeksi keuangan daerah; serta permasalahan dan isu strategis daerah.

Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab ini menjelaskan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah disertai indikator kinerja dan targetnya; serta strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah.

Bab IV Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Pada bab ini diuraikan tentang arah kebijakan pengembangan kewilayahan Jawa Tengah berbasis 10 wilayah pengembangan.

Bab V Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini memuat seluruh program perangkat daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab; serta penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah dan indikator kinerja daerah (IKD).

Bab VI Penutup

Bab ini menguraikan diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

a. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak antara 5°40'–8°30' Lintang Selatan dan 108°30'–111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa), dengan luas daratan ±3.433.732 Ha atau ±25 persen dari luas Pulau Jawa. Secara administratif, letak Jawa Tengah berada di tengah Pulau Jawa yang berbatasan dengan tiga provinsi, Provinsi Jawa Barat sebelah barat, Provinsi Jawa Timur sebelah timur, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan. Wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten, 6 kota, 576 kecamatan, 753 kelurahan, dan 7.810 desa.

Letak wilayah Jawa Tengah yang berada di tengah Pulau Jawa, memiliki peran dan posisi strategis dalam konteks pembangunan nasional maupun regional. Secara makro, peran Pulau Jawa dalam pembangunan nasional untuk 20 tahun ke depan adalah sebagai wilayah megapolis yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dan Provinsi Jawa Tengah diarahkan untuk menjadi wilayah Jawa Tengah sebagai penumpu ketahanan pangan dan rantai nilai industri nasional untuk 20 tahun ke depan (RPJPN Tahun 2025-2045). Kebijakan nasional tersebut, dipertegas dalam visi pembangunan Jawa Tengah 20 tahun ke depan yaitu Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan (RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045). Kebijakan tersebut juga sejalan dengan kebijakan pembangunan tata ruang Jawa Tengah yang mengarahkan Jawa Tengah menjadi Provinsi Jawa Tengah yang maju, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata dalam keterpaduan pengelolaan alam darat dan laut pesisir (RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044).

Secara kewilayahan, Provinsi Jawa Tengah memiliki peran strategis karena berada di antara dua kutub pintu gerbang ekonomi nasional (Jakarta dan Surabaya). Wilayah Jawa Tengah memiliki prasarana strategis pendukung perekonomian Pulau Jawa bagian utara dan selatan (arteri primer, kereta api, bandara, dan pelabuhan), memiliki tiga Pusat Kegiatan Nasional dan 11 Pusat Kegiatan Wilayah yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, serta memiliki empat sektor strategis yaitu pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata.

Gambar 2.1.
Letak dan Peran Strategis Provinsi Jawa Tengah

b. Potensi Sumber Daya Alam

Wilayah Jawa Tengah memiliki potensi sumber daya alam melimpah yang menjadi potensi produk dan komoditas unggulan untuk dikembangkan dan dijadikan potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan dalam memajukan daerah. Hal ini didukung dengan kondisi topografi Jawa Tengah yang terbagi menjadi tiga wilayah meliputi ketinggian 0-100 m di atas permukaan laut (dpl) di sepanjang pantai utara (53,3 persen), 100-500 m dpl di bagian tengah (27,4 persen), 500-1.000 m dpl (14,7 persen), di atas 1.000 m dpl (4,6 persen) di bagian tengah. Jawa Tengah dengan topografi yang berbeda-beda menjadi potensi keindahan alam sebagai destinasi wisata seperti wilayah di Kabupaten Wonosobo yang dikenal sebagai wilayah tertinggi di Jawa Tengah atau wilayah pesisir seperti Kabupaten Jepara.

Kondisi tersebut didukung pula dengan kondisi iklim Jawa Tengah yang termasuk kategori iklim tropis basah yang cukup berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah di wilayah Jawa Tengah. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Suhu udara di Jawa Tengah berdasarkan data tahun 2023 berkisar antara 26,7°C sampai dengan 30,4°C. Tempat-tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. Untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 67 persen sampai dengan 87 persen. Curah hujan tertinggi sebesar 2.799 mm dan hari hujan terbanyak sebanyak 161 hari.

Potensi sumber daya alam Jawa Tengah juga salah satunya tergambar dari kondisi geologi di wilayah Jawa Tengah. Kondisi geologi Jawa Tengah ditunjukkan dengan jenis tanah yang meliputi organosol, alluvial, planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, podsolik, dan didominasi jenis tanah latosol, aluvial, serta grumosol, yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburan cukup tinggi.

Secara fungsional ekologis berdasarkan wilayah sungai, daerah aliran sungai (DAS), dan cekungan air tanah (CAT), wilayah Jawa Tengah dapat digambarkan sebagai berikut. Wilayah sungai di Jawa Tengah terbagi menjadi 10 wilayah yaitu Cimanuk Cisanggarung, Jratun Seluna, Bengawan Solo, Progo Opak Serang, Serayu Bogowonto, Citanduy, Pemali Comal, Bodri Kuto, Wiso Gelis, dan Kepulauan Karimunjawa. DAS di Jawa Tengah cukup banyak dengan 18 DAS di

antaranya menjadi DAS prioritas untuk dipulihkan daya dukungnya dengan luas ±2.334.700,35 ha atau sekitar ±71 persen dari total luas Jawa Tengah meliputi DAS Serayu, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Progo (Jawa Tengah, DIY), DAS Bengawan Solo (Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY), DAS Citanduy (Jawa Barat, Jawa Tengah), DAS Bodri, DAS Bogowonto (Jawa Tengah, DIY), DAS Garang, DAS Serang, DAS Babakan, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Comal, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Luk Ulo, dan DAS Wawar Medono.

Wilayah Jawa Tengah juga memiliki potensi CAT sebanyak 31 CAT, terbagi menjadi 6 CAT dalam wilayah satu kabupaten/kota, 19 CAT lintas kabupaten/kota, dan 6 CAT lintas kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah dan provinsi lain. Potensi air tanah bebas CAT lintas provinsi sebesar 411,15 juta m^3/tahun, CAT lintas kabupaten/kota sebesar 6.575,64 juta m^3/tahun, dan CAT dalam kabupaten sebesar 355,20 juta m^3/tahun. Merujuk pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah Nomor 544/29 Tahun 2024 tentang Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada CAT di Wilayah Sungai Pemali Comal Dan Bodri Kuto, serta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, bahwa kewenangan pengelolaan CAT diatur sesuai dengan kewenangan wilayah sungai. Dari 31 CAT yang ada di Jawa Tengah hanya 4 CAT yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah yaitu CAT Kendal, CAT Subah, CAT Pekalongan-Pemalang, dafn CAT Bumiayu.

Penggunaan lahan di Jawa Tengah berdasarkan data tahun 2021 didominasi oleh pertanian baik lahan basah maupun pertanian lahan kering dengan rincian lahan basah totalnya mencapai 47,96 persen dari total wilayah. Untuk lahan terbangun saat ini mencapai 19,39 persen atau seluas 665.708 ha. Selain itu lahan dengan tutupan vegetasi hutan mencapai 18,86 persen dari total wilayah.

Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah menjadikan beragam potensi produk dan komoditas unggulan yang dapat dikembangkan dan dijadikan potensi ekonomi daerah untuk memajukan perekonomian daerah Jawa Tengah. Hal tersebut dapat ditunjukkan dari hasil analisis potensi sektor-sektor potensial dan unggulan daerah Jawa Tengah yang digambarkan sebagai berikut: 1) sektor potensial meliputi sektor industri pengolahan; pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; konstruksi; serta jasa pendidikan; 2) sektor unggulan meliputi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; 3) sektor berkembang meliputi sektor transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; serta 4) sektor lainnya yang menjadi sektor terbelakang.

Selain itu, wilayah Provinsi Jawa Tengah yang kaya akan keanekaragaman budaya, sumber daya alam, dan potensi ekonomi yang melimpah. Dari hulu hingga hilir, setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki keunikan sendiri dalam menghasilkan produk unggulan. Produk unggulan daerah adalah produk yang memiliki ciri khas dan keunikan yang tidak dimiliki daerah lain serta berdaya saing handal dan dapat memberikan peluang kesempatan kerja kepada masyarakat lokal. Sebaran produk unggulan di setiap kabupaten/kota berbasis 10 wilayah pengembangan Jawa Tengah meliputi:

1) WP Kedungsepur, dengan produk unggulan yang menggunakan bahan baku lokal beragam seperti kayu, logam, keramik, dan hasil pertanian, dengan potensi besar untuk pengembangan industri kreatif dan pertanian dengan memanfaatkan sumber daya alam dan keahlian lokal;
2) WP Bregasmalang, memiliki keunggulan dalam bahan baku lokal yang digunakan untuk memproduksi produk unggulan;
3) WP Jekuti, memiliki keunggulan produk unggulan yang berasal dari bahan baku lokal antardaerah dan berbahan baku kayu;
4) WP Banglor, memiliki potensi ekonomi yang besar di sektor industri pengolahan kayu;
5) WP Subosukawonosraten, memiliki produk unggulan yang bervariasi dari makanan, kerajinan tangan, hingga barang-barang rumah tangga;
6) WP Gelangmanggung, memiliki produk unggulan dari bahan baku lokal dengan inovasi dan variasi produk terutama produk makanan, minuman, variasi produk dari industri tembakau lokal, dan produk kerajinan;
7) WP Wonobanjar, memiliki potensi produk unggulan dalam industri makanan lokal dengan memanfaatkan sumber daya alam setempat serta menggali inovasi pengolahan bahan pangan seperti tepung mokaf;
8) WP Keburejo, memiliki potensi produk unggulan dari bahan baku lokal yang bervariasi terutama produk makan, minuman, dan kerajinan alam;
9) WP Petanglong, memiliki potensi keragaman industri lokal dengan inovasi pemanfaatan sumber daya alam lokal serta bahan daur ulang;
10) WP Cibalingmas, memiliki potensi produk unggulan yang berasal dari keragaman industri lokal dengan pemanfaatan bahan baku lokal yang beragam untuk menghasilkan produk berkualitas.

c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Selanjutnya, terkait dengan daya dukung dan daya tampung di Jawa Tengah digambarkan dengan kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) yang diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Kelangkaan pangan disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk, meningkatnya kualitas hidup manusia, dan berkembangnya industri yang memanfaatkan lahan produktif. Sementara itu, krisis air bersih menjadi fenomena yang disebabkan penanganan lingkungan dan aset alam yang tidak terkendali. Pengelolaan sumber-sumber air bersih yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya penurunan kualitas dan ketersediaan sumber air bersih.

Daya dukung air mengalami tren penurunan menuju kelangkaan pada sejumlah wilayah di Jawa Tengah dengan rasio daya dukung air pada tahun 2022 sebesar 0,95 dan diperkirakan menjadi sebesar 0,82 pada tahun 2029. Apabila dilihat dari distribusi wilayah, dari total wilayah Jawa Tengah status daya dukung dan daya tampung air pada tahun 2022 yang sudah terlampaui mencapai 47,55 persen dan yang belum terlampaui sebesar 52,45 persen, dengan defisit sebesar 1.686.637.322,01 m^3/tahun. Sedangkan pada tahun 2029, status daya dukung dan daya tampung air diproyeksikan terlampaui mencapai 55,31 persen dan yang belum terlampaui sebesar 44,69 persen dari total wilayah Jawa Tengah dengan defisit sebesar 6.372.532.528,05 m^3/tahun. Berdasarkan pemetaan daya dukung dan daya tampung air Jawa Tengah, pada tahun 2022 terdapat 20 kabupaten/kota

dengan status agregat daya dukung dan daya tampung air terlampaui, dan diproyeksikan akan bertambah menjadi 25 kabupaten/kota pada tahun 2029.

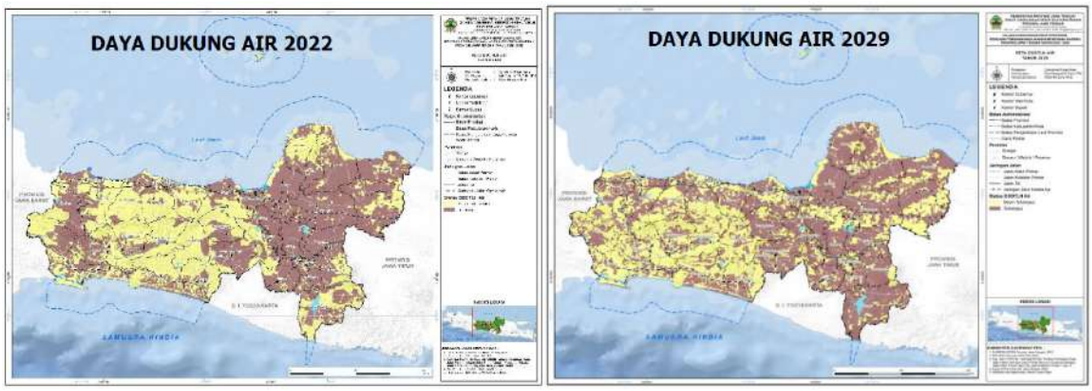

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.2.
Prakiraan Daya Dukung Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2029
***Business as Usual* (BAU)**

Konservasi air tanah juga terus diupayakan di tengah tingginya eksploitasi air tanah baik oleh sektor industri, pertanian maupun rumah tangga. Air tanah memiliki peran yang penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Kondisi yang belum seimbang antara pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan ketersediaan air baku yang belum memadai mengakibatkan potensi air tanah semakin terancam. Pengelolaan air tanah saat ini berbasis Cekungan Air Tanah (CAT) pada Wilayah Sungai (WS) karena prinsip pengelolaan sumber daya air harus ada keterpaduan antara air permukaan dan air tanah. Air tanah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari ekosistem dan berinteraksi dengan air permukaan.

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa pemanfaatan air tanah yang berlebihan dapat berdampak pada terjadinya *land subsidence* atau amblesan tanah. Kondisi tersebut saat ini telah terjadi di Jawa Tengah terutama pada wilayah pesisir pantai utara Jawa Tengah. Mengacu pada hasil evaluasi zona pemanfaatan dan konservasi di CAT Jawa Tengah tahun 2023, CAT Semarang-Demak dan CAT Pekalongan-Pemalang terdapat zona rusak. Kejadian *land subsidence* juga tercatat terjadi di kabupaten/kota di wilayah pesisir pantai utara di antaranya Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kota Semarang, dan Kabupaten Demak. Amblesan tanah yang terjadi bervariasi dengan laju penurunan 1-20 cm per tahun berdasarkan hasil pengukuran geodetik, geo-hidrologi, geoteknik, dan lain-lain. Meskipun demikian, kejadian *land subsidence* ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang perlu dikaji secara komprehensif untuk mengetahui faktor utama yang berperan dengan mempertimbangkan kondisi geologi permukaan maupun bawah permukaan. Baik disebabkan oleh faktor antropogenik (aktivitas manusia) seperti pengambilan air tanah yang berlebihan, efek pembebanan (*loading effect*), maupun faktor penyebab lain yang sifatnya *non*-antropogenik, yaitu kompaksi alamiah dari jenis tanah lunak dan efek *tectonic subsidence* akibat dari pergerakan patahan bumi. Hampir semua kota di pesisir utara Jawa Tengah terbentuk di atas tanah aluvial yang rapuh.

Kondisi air tanah di Jawa Tengah saat ini ditunjukkan dengan Indeks Ketersediaan Air Tanah yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari sebesar 3,08

pada tahun 2019 menjadi 3,65 pada tahun 2024. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dalam hal konservasi air tanah dengan menjaga ketersediaan air tanah (indeks batas minimum aman konservasi air tanah di atas 1,67). Capaian ketersediaan air tanah diintervensi melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah sesuai kewenangan serta pembangunan sarana prasarana/infrastruktur konservasi air tanah. Selama kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2023, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah telah membangun sebanyak 503 infrastruktur air tanah di tersebar di 35 kabupaten/kota, sehingga meningkatkan infiltrasi air hujan ke dalam tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah. Pelaksanaan pembangunan sumur resapan dangkal sejak tahun 2019 dilaksanakan secara padat karya melibatkan masyarakat setempat.

Selanjutnya, berdasarkan proyeksi pertumbuhan populasi penduduk dan juga ketersediaan lahan pertanian yang dikendalikan melalui RTRW Provinsi Jawa Tengah, diperkirakan daya dukung pangan pada tahun 2029 belum terlampaui atau surplus. Diperkirakan pada tahun 2029, rasio daya dukung pangan akan naik dari 1,97 menjadi 2,01 (naik sebesar 2,03 persen). Selain itu daya dukung pangan juga semakin menurun dikarenakan meningkatnya alih fungsi lahan pangan ke penggunaan lain. Hal tersebut diperparah dengan adanya dampak dari perubahan iklim yang berakibat meningkatnya serangan hama, penyakit, dan kekeringan yang dapat mengakibatkan gagal panen. Daya dukung pangan juga dipengaruhi oleh ketersediaan dan pasokan air yang juga semakin menurun terutama akibat persaingan dengan penggunaan lain. Kondisi ini memberikan dampak buruk bagi Jawa Tengah khususnya pada ketersediaan dan keterjangkauan atau akses pangan. Selain itu, menurunnya keanekaragaman hayati juga berdampak pada penurunan keragaman sumber pangan.

Daya dukung pangan Jawa Tengah pada tahun 2029 diproyeksikan memiliki total ketersediaan 5.998.603,24 ton beras dan kebutuhan mencapai 2.977.399,72 ton beras, sehingga kondisinya surplus sebesar 3.021.203,52 ton beras. Apabila dilihat berdasarkan wilayahnya dari hasil pemetaan dengan sistem grid, terdapat 17,20 persen wilayah dengan daya dukung pangan sudah terlampaui dan 82,80 persen wilayah dalam kondisi daya dukung pangan belum terlampaui. Kondisi daya dukung pangan di setiap kabupaten/kota berbeda sesuai kondisi wilayah tersebut terutama penggunaan lahan dan jumlah penduduk. Apabila dilihat di masing-masing kabupaten/kota maka seluruh kota daya dukung pangannya terlampaui.

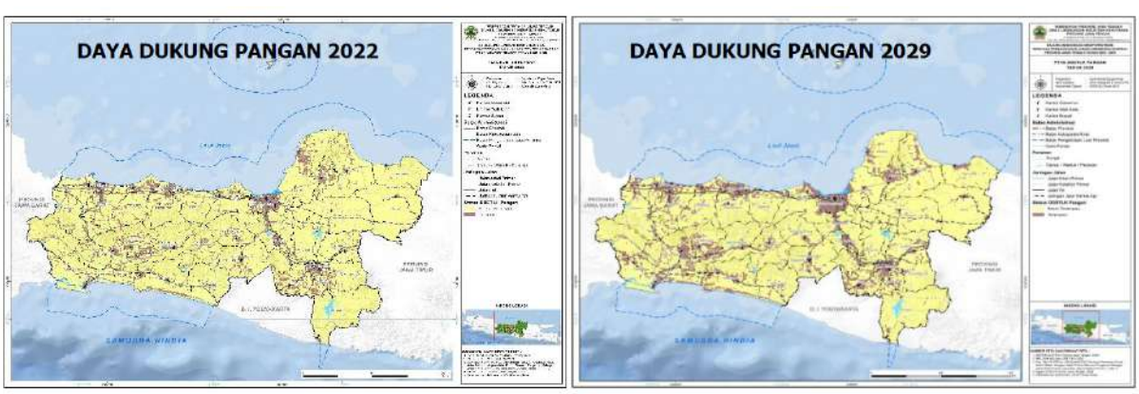

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.3.
Prakiraan Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2029
***Business as Usual* (BAU)**

Lebih lanjut rincian status daya dukung dan daya tampung air dan pangan di Jawa Tengah pada tahun 2022 dan 2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
Proyeksi Status Daya Dukung dan Daya Tampung di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2029

Uraian	2022	2029
Air		
Ketersediaan Air (m^3/tahun)	31.032.527.608,75	29.400.411.285,16
Kebutuhan Air (m^3/tahun)	32.719.164.930,76	35.772.943.813,21
Selisih (m^3/tahun)	-1.686.637.322,01	-6.372.532.528,05
Status	**Terlampaui**	**Terlampaui**
Rasio (ketersediaan/kebutuhan)	0,95	0,82
Pangan		
Ketersediaan Pangan Beras (ton/tahun)	5.508.531,00	6.998.603,24
Kebutuhan Pangan Beras (ton/tahun)	2.792.243,71	2.977.399,72
Selisih (m^3/tahun)	2.716.287,29	3.021.203,52
Status	**Belum Terlampaui**	**Belum Terlampaui**
Rasio (ketersediaan/kebutuhan)	1,97	2,01

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jawa Tengah, 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Nomor 916 Tahun 2025 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional dan Pulau/Kepulauan ditetapkan bahwa Provinsi Jawa Tengah berada dalam **status daya dukung telah terlampaui**. Dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya air, lahan dan laut, maka Jawa Tengah hanya mampu mendukung dan menampung jumlah penduduk hingga 14.551.803 jiwa, sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2023 sudah mencapai 37.540.962 jiwa. Perhitungan ini didasarkan pada ketersediaan air yang layak digunakan (metode perhitungan lama hanya pada ketersediaan air), ketersediaan lahan di luar kawasan konservasi, dan produktivitas pangan hasil dari laut. Rincian jumlah pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya air, lahan dan laut tersebut adalah sebagai berikut:

1. Total kebutuhan/pemanfaatan air pada tahun 2023 sebesar 31.985.642.761 m^3/tahun, sementara ketersediaan air layak hanya mencapai 21.218.551.226 m^3/tahun dengan jumlah penduduk yang dapat didukung sumber daya air sebanyak 24.963.001 jiwa;
2. Total kebutuhan lahan pada tahun 2023 untuk pemenuhan pangan dan tempat tinggal sebesar 4.152.359 ha, sedangkan ketersediaan lahan untuk pemenuhan pangan dan tempat tinggal hanya sebesar 2.868.612 ha dengan jumlah penduduk yang dapat didukung sumber daya lahan sebanyak 25.934.763 jiwa;
3. Total kebutuhan produk pangan hasil dari laut pada tahun 2022 sebesar 917.845.154 kg/tahun, namun ketersediaan produk pangan dari laut hanya mencapai 194.326.858 kg/tahun dengan jumlah penduduk yang dapat didukung sumber daya laut sebanyak 7.840.527 jiwa.

d. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Selanjutnya, gambaran kondisi **ketahanan energi** di Jawa Tengah sebagai berikut. Selain air dan pangan, kebutuhan akan energi di Jawa Tengah juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penduduk, laju perkembangan

industri, serta semakin tingginya arus lalu lintas barang dan jasa, menyebabkan tingginya tingkat kebutuhan energi. Dengan semakin berkurangnya sumber-sumber energi dan belum efektifnya upaya diversifikasi sumber energi, diperkirakan minyak dan gas bumi menjadi sumber daya strategis yang semakin diperebutkan. Di sisi lain porsi EBT dalam bauran energi Jawa Tengah sebesar 18,55 persen (2024). Meskipun persentase porsi EBT dalam bauran energi terus meningkat secara bertahap namun persentasenya masih dibawah energi fosil yang masih mendominasi di atas 80 persen. Hal ini menunjukan masih tingginya ketergantungan terhadap energi fosil.

Sementara itu, jika mencermati data intensitas energi primer di Provinsi Jawa Tengah menggambarkan angka yang cukup baik jika dibandingkan dengan capaian Nasional. Capaian intensitas energi primer Provinsi Jawa Tengah (2024) yaitu sebesar 131 Setara Barel Minyak (SBM)/miliar rupiah. Perhitungan intensitas energi berdasarkan PDRB harga konstan. Sedangkan capaian intensitas energi primer nasional pada tahun 2024 sebesar 133 SBM/miliar rupiah. Artinya untuk menghasilkan satu miliar rupiah Jawa Tengah harus mengonsumsi 131 SBM. Sedangkan nasional untuk menghasilkan satu miliar rupiah harus mengonsumsi 133 SBM. Berdasarkan data tersebut menandakan bahwa konsumsi energi Jawa Tengah lebih efisien jika dibandingkan dengan konsumsi energi nasional. Energi pada dasarnya memiliki harga yang mahal karena cadangan yang ada akan semakin menipis. Namun karena adanya subsidi dari Pemerintah Pusat, masyarakat merasa bahwa energi sangat murah dan belum memiliki pola pikir untuk berhemat energi. Sehingga perlu adanya program konservasi energi agar energi dapat dimanfaatkan secara efisien dan mengurangi potensi krisis energi.

Jawa Tengah memiliki banyak potensi energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif pengganti energi fosil. Sumber energi baru terbarukan yang banyak dikembangkan di Jawa Tengah berupa energi surya, terjunan air, panas bumi, *bioethanol*, *biofuel*, biomassa, biogas, dan gas rawa. Selain itu juga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dalam pemanfaatan sumber EBT dengan mengembangkan dan memanfaatkan energi baru terbarukan. Berikut potensi EBT di Jawa Tengah berdasarkan data dari Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah.

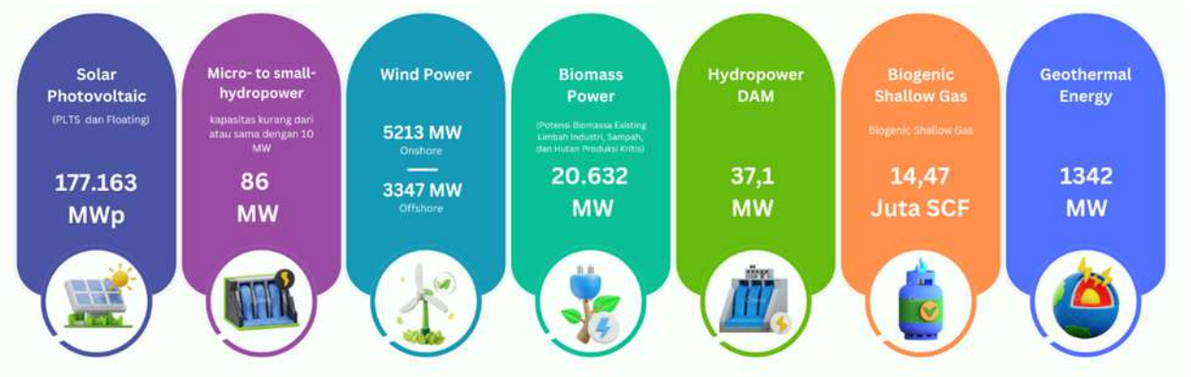

Kementerian ESDM dan Laporan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.4.
Potensi Teknis Energi Baru Terbarukan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan gambar diatas Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk pengembangan energi baru terbarukan, khususnya dari tenaga surya, *hydro*,

tenaga angin, biomassa, geothermal, dan gas rawa dengan total potensi teknis sebesar 207,8 GW. Berdasarkan data Kementerian ESDM, potensi teknis tenaga surya di Jawa Tengah mencapai sekitar 177 GWp atau sebesar ±85 persen dari total potensi EBT di Jawa Tengah. Selain itu, terdapat potensi mikrohidro dengan kapasitas teknis sekitar 86 MW yang dapat dimanfaatkan pada aliran-aliran sungai kecil yang tidak berpotensi mengganggu ekosistem sungai. Sumber energi biomassa juga menjanjikan, terutama dari limbah sampah, pertanian seperti sekam padi, kayu yang dapat diolah menjadi energi melalui pembangkit listrik berbasis biomassa. Kemudian potensi teknis tenaga angin *onshore* di Jawa Tengah mencapai 5.213 MW dan 3347 MW pada *offshore*. Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk pengembangan energi panas bumi mencapai 1342 MW. Potensi ini tersebar di beberapa wilayah dengan karakteristik geothermal yang mendukung, seperti Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Dieng, WKP Gunung Ungaran, WKP Umbul Telomoyo, WKP Baturaden, WKP Guci, dan WKP Gunung Lawu/Jenawi. Saat ini, PLTP Dieng telah beroperasi dengan kapasitas sekitar ±60 MW dan masih memiliki potensi pengembangan lebih lanjut hingga lebih dari 400 Mwe. Dengan pemanfaatan potensi panas bumi yang optimal, Jawa Tengah dapat menjadi salah satu pusat pembangkit listrik panas bumi terbesar di Indonesia, mendukung keberlanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan memanfaatkan sumber daya ini, Jawa Tengah memiliki peluang untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan kontribusi energi terbarukan berbasis pada potensi lokal yang dimiliki.

Selain kegiatan pembangunan infrastruktur EBT, upaya lain yang dilakukan di Jawa Tengah adalah mewujudkan kemandirian energi dengan melibatkan peran aktif masyarakat antara lain melalui pengembangan Desa Mandiri Energi (DME). Capaian kinerja DME di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2024 sejumlah 2.330 desa, yang kemudian berdasarkan tingkat pemanfaatan energi baru terbarukan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yakni DME Inisiatif dengan kondisi eksisting sejumlah 2.137 desa, DME Berkembang dengan kondisi eksisting sejumlah 165 desa, dan DME Mapan sejumlah 28 desa. Desa mandiri energi di Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi pemerintah desa dan masyarakat secara luas dalam melaksanakan transisi energi dan pengembangan teknologi baru berbasis energi baru terbarukan menuju kemandirian energi di Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah memiliki infrastruktur energi yang cukup beragam mencakup pembangkit listrik berbasis fosil dan nonfosil. Dominasi energi fosil khususnya melalui PLTU berbahan bakar batubara masih besar dengan kapasitas besar yang terpusat di beberapa pembangkit besar seperti PLTU Tanjung Jati (2.644 MW), PLTU Batang (2.000 MW), PLTU IPP Cilacap (1.176 MW), PLTU Jawa 8 (1.000 MW), PLTU Adipala (615 MW), PLTU Rembang (560 MW), dan PLTU Tambak Lorok (110 MW), yang saat ini mengambil porsi 12 persen dari total kebutuhan listrik Jawa – Bali.

Selain itu, pembangkit listrik tenaga air juga berperan penting dalam memenuhi kebutuhan listrik, terutama di daerah-daerah terpencil. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Jawa Tengah diantaranya PLTA Mrica (3x60 MW), PLTA Wadaslintang (2x8,2 MW), PLTA Ketenger (2x3,52 MW), PLTA Garung (2x13,2 MW), PLTA Kedungombo (23 MW), dan PLTA Gajah Mungkur (12,4 MW). Keberadaan PLTA di

Jawa Tengah tidak hanya membantu dalam penyediaan listrik yang ramah lingkungan tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan melibatkan komunitas lokal dan mengadopsi teknologi terbaru, potensi PLTA di Jawa Tengah dapat dimaksimalkan untuk mendukung keberlanjutan energi dan kesejahteraan masyarakat.

Infrastruktur gas bumi juga memainkan peran penting dalam perekonomian dan sektor energi Jawa Tengah. Upaya penyediaan gas bumi di Jawa Tengah bervariasi, dari *Compressed Natural Gas* (CNG) *Truck*, *Liquefied Natural Gas* (LNG), sampai dengan pipa gas. Jaringan gas rumah tangga sudah berkembang di Jawa Tengah, utamanya di Kota Semarang dan Kabupaten Blora. Total pemanfaatan jaringan gas rumah tangga di Jawa Tengah saat ini mencapai ±17.500 SR (Sambungan Rumah). Jaringan pipa gas transmisi yang baru diresmikan pada November 2023 yaitu Cisem Tahap I (Semarang-Batang) telah mendukung industri di Pantura Jawa Tengah. Selanjutnya, direncanakan pembangunan jaringan pipa transmisi gas Cisem Tahap II (Batang-Cirebon), dengan total panjang ruas pipa Batang sampai dengan Kandang Haur Timur sekitar 245 km yang dibangun tahun 2024 hingga 2025.

Meskipun jaringan pipa gas telah dibangun, truk CNG dan terminal LNG tetap diperlukan dalam jangka panjang untuk melayani masyarakat yang berada di daerah terpencil atau di tempat yang belum atau tidak memiliki pipa transmisi dan distribusi. LNG menawarkan fleksibilitas dan jaminan pasokan gas. Jaringan pipa gas juga telah mendukung pembangkit listrik. PLTGU Tambak Lorok Blok 3 (779 MW) di Semarang menjadi contoh penggunaan gas bumi yang efisien untuk pembangkitan listrik. Dengan integrasi infrastruktur Pipa Gresem (Gresik-Semarang), Pipa Cisem I (Semarang-Batang), dan Pipa Cisem II (Batang-Cirebon), dapat memberikan layanan gas bumi yang semakin baik dan telah dipersiapkan secara desain untuk menunjang kebutuhan permintaan gas yang besar di Jawa Tengah. Kombinasi ini memperkuat fondasi energi provinsi dalam menghadapi tantangan energi di masa depan.

Keandalan sistem listrik di Jawa Tengah jika melihat dari angka *reserve margin* RUPTL 2025, menjadi sangat tinggi mencapai 113,34% pada tahun 2024. Paling tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain pada sistem Jawa-Bali. Berdasarkan angka tersebut dapat dilihat bahwa kapasitas pembangkit di Jawa Tengah jauh melebihi beban puncak. Hal ini memberikan beberapa keuntungan strategis, seperti jaminan pasokan listrik yang sangat aman dan stabil, bahkan saat terjadi gangguan pembangkit atau lonjakan konsumsi. *Reserve margin* yang terjadi diharapkan dapat menjadi sentimen positif dalam menarik tumbuhnya industri baru skala besar dan ekspansi industri eksisting agar pertumbuhan ekonomi meningkat dan mengurangi tingkat pengangguran di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah siap untuk menerima investasi baru khususnya di kawasan industri yang telah tersedia di Jawa Tengah diantaranya Batang *Industrial Park* (KI Segayung), *Grand* Batang *City* (KIT Batang), KI Kendal (KEK Kendal), KI Wijayakusuma, Tanjung Emas *Export Processing Zone* (Lamicitra Nusantara), Bukit Semarang Baru *Industrial Park*, Jatengland *Industrial Park* Sayung, Aviarna *Industrial Estate*, KI Candi, dan KI Cilacap. Selain itu cadangan daya yang besar memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan untuk mendorong elektrifikasi sektor-sektor baru seperti

pertanian, transportasi listrik, sehingga mendukung pemerataan energi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Tantangan ketenagalistrikan bukan lagi tentang ketersediaan tetapi terkait keandalan mutu layanan untuk mengurangi keluhan dari sisi distribusinya dan dorongan transisi energi dari sisi produksi energi listriknya. Dominasi oleh energi fosil pada pembangkit listrik di Jawa Tengah dapat menghambat pertumbuhan energi terbarukan.

Seiring dengan peningkatan ketersediaan daya listrik di Jawa Tengah, berbanding lurus dengan tingkat energi terjual listrik di Jawa Tengah. Energi terjual listrik di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Kenaikan tersebut dapat dilihat dari data Buku Statistik PLN. Selama kurun waktu 2014 hingga 2024 menunjukkan peningkatan energi terjual dari 19.631 GWh pada tahun 2014 menjadi 30.391 GWh pada tahun 2024. Kenaikan tersebut sekitar 54,8 persen dibanding tahun 2014. Kenaikan penjualan listrik menjadi sinyal bahwa perekonomian Jawa Tengah tumbuh dengan baik. Setelah terkontraksi dengan peristiwa Covid-19, aktivitas masyarakat kembali pulih sehingga mendorong peningkatan konsumsi listrik terutama di sektor industri dan retail.

Selama kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2024 konsumsi listrik per kapita Jawa Tengah mengalami tren peningkatan dari 585,62 kWh per kapita menjadi 802,05 kWh per kapita. Meskipun demikian kondisi tersebut masih di bawah provinsi tetangga di Pulau Jawa seperti Jawa Barat (1.410 kWh/kapita), Jawa Timur (1.131 kWh/kapita), DKI Jakarta (3.138 kWh/kapita), dan Banten (3.037 kWh/kapita). Konsumsi listrik per kapita erat kaitanya dengan peningkatan kesejahteraan. Semakin tinggi konsumsi listrik perkapita di suatu daerah maka semakin tinggi juga potensi kesejahteraan di daerah tersebut. Kenaikan konsumsi listrik salah satunya didorong oleh peningkatan rasio elektrifikasi di Jawa Tengah.

Rasio elektrifikasi di Jawa Tengah saat ini telah mendekati 100 persen. Rasio elektrifikasi ini menunjukan bahwa hampir seluruh masyarakat Jawa Tengah sudah menikmati layanan energi listrik. Rasio elektrifikasi menggambarkan ketahanan energi yang terjangkau dan inklusif melalui pemerataan dan keterjangkauan akses untuk masyarakat terhadap energi listrik. Tahun 2014 rasio elektrifikasi Jawa Tengah baru mencapai 88,37 persen. Kemudian sampai dengan tahun 2024 rasio elektrifikasi Jawa Tengah telah mencapai 99,99 persen.

Pada sektor pertambangan, praktik baik pertambangan di Jawa Tengah terus didorong melalui penilaian dan penghargaan *Good Mining Practice* (GMP) pada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Provinsi Jawa Tengah telah meningkatkan kualitas pengelolaan pertambangan yang berdampak terhadap pengelolaan lingkungan hidup sekitar yang lebih baik. Persentase GMP tahun 2019 sebesar 85 persen sedangkan tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 63,37 persen karena penilaian tahun 2024 dan seterusnya menggunakan penilaian baru yang lebih detail berdasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Praktik pengelolaan pertambangan baik terus didorong mengingat potensi mineral dan batuan di Jawa Tengah yang cukup tinggi dan tersebar di 35 kabupaten/kota agar pemanfaatannya tidak merusak lingkungan. Potensi mineral dan batuan dapat digunakan sebagai bahan konstruksi pembangunan, baik untuk proyek infrastruktur Jawa Tengah maupun

proyek strategis nasional yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Perkiraan kebutuhan material untuk proyek strategis nasional di Jawa Tengah adalah sebesar ±113 juta m^3, akan tetapi Jawa Tengah hanya mampu memenuhi ±31 juta m^3. Potensi mineral dan batuan harus dipetakan dengan detail berdasarkan depositnya sehingga diharapkan penambangan yang dilakukan tidak berdampak besar pada kerusakan lingkungan hidup.

Selanjutnya, kondisi **ketahanan pangan** Jawa Tengah dapat ditunjukkan dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mulai dilakukan pengukurannya oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional mulai tahun 2019. IKP merupakan indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Indeks ketahanan pangan Jawa Tengah menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun sejak tahun 2019 hingga tahun 2024. Pada tahun 2019, indeks ketahanan pangan Jawa Tengah sebesar 78,85, dan pada tahun 2024 menjadi 85,34, yang mengindikasikan wilayah dengan tingkat ketahanan pangan sangat tahan. Selanjutnya, ketahanan pangan pada level individu diukur dengan indikator *Prevalence of Undernourisment* (*PoU*) atau prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur oleh BPS Pusat mulai tahun 2019. Kondisi PoU Jawa Tengah mengalami perbaikan cukup signifikan yang ditunjukkan dari penurunan nilai PoU yaitu sebesar 11,61 persen pada tahun 2019 menjadi 10,44 persen pada tahun 2023. Hal ini artinya jumlah populasi penduduk yang mengonsumsi pangan di bawah jumlah minimum kebutuhan energi semakin menurun.

Gambaran terkait **ketahanan air** di Jawa Tengah ditunjukkan dengan ketersediaan air khususnya untuk air baku. Kapasitas air baku di Jawa Tengah sebesar 484,4 juta m^3/tahun atau 15,36 m^3/detik pada tahun 2024. Kondisi ketersediaan air di Jawa Tengah ini dipengaruhi oleh jumlah bangunan bendungan/waduk. Sampai saat ini terdapat 44 bangunan bendungan/waduk (11 waduk besar dan 33 waduk kecil), sehingga pemenuhan kebutuhan air minum di Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 50,12 persen menjadi 62,5 persen di tahun 2024. Selain itu, kinerja irigasi di Jawa Tengah ditunjukkan dengan Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) kewenangan Provinsi yang telah mencapai 75,95 pada tahun 2021, kemudian terdampak realokasi anggaran akibat Covid-19 sehingga menurun menjadi 68,27 pada tahun 2022 namun kembali mengalami peningkatan menjadi 69,11 pada tahun 2024. Kondisi sungai baik kewenangan provinsi juga mengalami peningkatan dari 53,16 persen pada tahun 2018 menjadi 52,37 persen pada tahun 2024.

Selanjutnya cakupan akses air minum yang dikelola secara aman hingga tahun 2024 telah mencapai 40,86 persen, meningkat setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir dimana pada tahun 2020 cakupan sebesar 32,24 persen. Hal tersebut selaras dengan meningkatnya cakupan akses jaringan perpipaan yang hingga tahun 2024 telah mencapai 52,48 persen, mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir dimana pada tahun 2020 cakupan sebesar 43,74 persen. Angka capaian tersebut berdasarkan data Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah melalui pengumpulan data dari pemerintah kabupaten/kota setiap tahunnya. Selanjutnya, menindaklanjuti Surat Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Nomor CK 0501-Ca/131 tanggal 12 Juni 2025 perihal penyampaian angka *baseline* target indikator

RPJMN Air Minum untuk Provinsi Jawa Tengah, maka data capaian akses air minum mulai tahun 2025 akan merujuk data Direktorat Air Minum DJCK Kementerian PU.

e. Lingkungan Hidup Berkualitas

Keberlanjutan pembangunan didukung dengan terjaganya sumber daya alam dan lingkungan hidup. Gambaran **kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup** ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Terjadi kecenderungan peningkatan IKLH Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2020-2024 sebesar 1,84 poin, dan pada tahun 2024 IKLH Provinsi Jawa Tengah mencapai 69,46 (angka capaian sementara). Meski terus mengalami peningkatan, kondisi IKLH Provinsi Jawa Tengah masih berada di bawah IKLH nasional setiap tahunnya, dengan capaian terendah pada komponen Indeks Kualitas Lahan (IKL) dikarenakan peningkatan alih fungsi atau perubahan tata guna lahan.

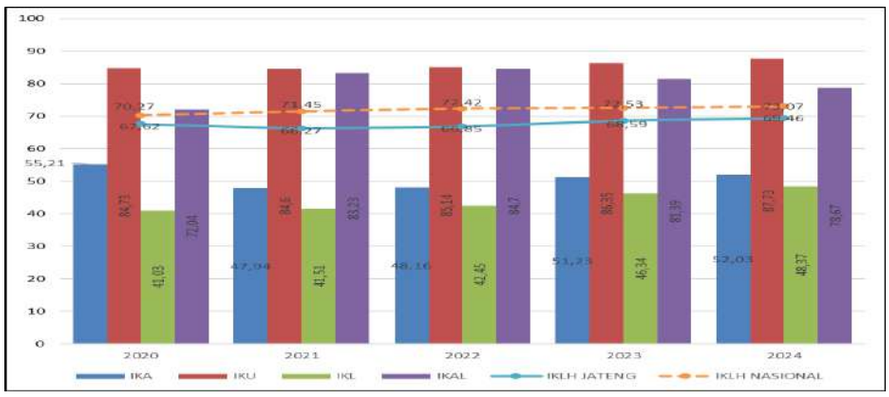

Sumber: KLHK, 2025
**Capaian IKLH 2024 Provinsi dan Nasional adalah angka sementara*

Gambar 2.5.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2020 – 2024

Keanekaragaman hayati di Jawa Tengah meliputi keanekaragaman hayati ekosistem, keanekaragaman hayati spesies dan keanekaragaman hayati genetik. Keanekaragaman hayati memberikan manfaat ekologi, ekonomi, dan budaya. Masyarakat memanfaatkan flora dan fauna dalam pertanian dan pengobatan tradisional, mendukung kesejahteraan komunitas. Jawa Tengah memiliki ***keanekaragaman hayati ekosistem*** yang terdiri dari ekosistem alami dan buatan, sebagai berikut:

- Ekosistem Hutan Pegunungan: Taman Nasional Gunung Merapi, yang menyediakan cadangan air dan habitat endemik. Gunung Merbabu dan Gunung Slamet juga merupakan lokasi penting untuk konservasi hutan.
- Ekosistem Karst: Karst Gombong dan Karst Gunung Sewu adalah kawasan penting yang berperan dalam penyerapan air dan habitat unik untuk spesies goa.
- Ekosistem Mangrove: Segara Anakan, Cilacap, dan pesisir utara Jawa Tengah mendukung perlindungan pesisir dan cadangan karbon.
- Ekosistem Terumbu Karang: Karimunjawa terkenal dengan keindahan bawah laut dan spesies terumbu karangnya yang beragam.
- Ekosistem Lamun: Tersebar di Kabupaten Jepara, TN Karimunjawa, Rembang, dan Cilacap, berperan penting sebagai habitat biota laut.

- Ekosistem Rawa: Rawa di Kebumen, Demak, dan Pati penting dalam siklus hidrologi dan habitat bagi flora dan fauna.
- Ekosistem Sungai: Sungai Serayu dan Sungai Bengawan Solo berfungsi dalam irigasi pertanian dan sebagai sumber kekuatan air.
- Ekosistem Danau: Rawa Pening di Kabupaten Semarang adalah danau terbesar dan berfungsi sebagai sumber air dan habitat akuatik.
- Ekosistem Buatan: Sawah, tambak, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seperti di Kabupaten Grobogan mendukung keberlanjutan pertanian dan ekonomi lokal.

Keanekaragaman Hayati Spesies, Jawa Tengah memiliki 1.177 spesies tumbuhan, termasuk pteridofit, lumut, spermatofit, fungi, mangrove, dan lamun. Keanekaragaman flora ini mendukung ekonomi lokal melalui sumber pangan, obat obatan, dan industri hayati, serta berkontribusi pada pelestarian lingkungan nasional. Spesies ikoniknya meliputi Saninten, Acung jangkung, Edelweiss Jawa, Kantong Semar, dan Pinang Jawa. Terdapat 3.134 spesies satwa di Jawa Tengah yang mencakup mamalia, burung, amfibi, reptil, dan ikan. Satwa ini penting untuk keseimbangan ekosistem dan memberikan manfaat ekologis serta budaya. Spesies ikonik termasuk Trenggiling jawa, Elang jawa, Macan tutul jawa, Lutung Budeng, Owa jawa, dan Sidat. ***Keanekaragaman Hayati Genetik*** di Jawa Tengah diatur oleh Peraturan Gubernur No. 74 Tahun 2017 untuk memastikan pemanfaatan dan pelestarian tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang berkelanjutan. *Keanekaragaman Genetik Tanaman*, Jawa Tengah memiliki berbagai varietas tanaman lokal dan introduksi. Tanaman pangan seperti padi (*Oryza sativa*), ubi kayu (*Cassava*), talas (*Colocasia esculenta*), dan umbi minor dianggap penting karena produktivitas dan adaptabilitasnya terhadap kondisi lingkungan setempat. *Keanekaragaman Genetik Hewan*, Jawa Tengah dikenal dengan ternak lokal seperti Sapi Jabres, Dombos, Itik Tegal, dan Ayam Kedu. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2014 menekankan pelestarian ternak lokal sebagai bagian dari budaya lokal. *Keanekaragaman Genetik Mikroba,* mikroba seperti *Rhizobium* digunakan dalam pertanian dan memiliki potensi besar untuk aplikasi bioteknologi dan industri pangan. Tanah vulkanik Gunung Merapi dan pesisir Pantura merupakan sumber mikroba potensial. *Potensi Bioprospeksi*, Jawa Tengah memiliki potensi bioprospeksi antara lain berupa metabolit dari fauna dan flora di Karimunjawa untuk kesehatan, serta mikroorganisme sedimen mangrove untuk antioksidan, yang memiliki peluang inovasi dan potensi komersialisasi. Di Jawa Tengah, pengetahuan tradisional membantu pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan. Masyarakat Kalisalak menggunakan *Zingiberaceae* untuk pengobatan, sementara wedang uwuh dan jamu diwariskan sebagai obat tradisional. Praktik "matun" dan "nyabuk gunung" diterapkan untuk menjaga tanah dan konservasi lahan. Masyarakat Adat Jalawastu mempertahankan tradisi pertanian dan menghadapi modernisasi dengan inovasi.

Jawa Tengah memiliki kawasan hutan/hutan negara seluas ±767.026,21 ha (termasuk Taman Nasional Laut seluas ±117.033,97 ha) dan hutan rakyat seluas ±682.425,64 ha, sehingga keseluruhan hutan di Jawa Tengah seluas ±1.332.417,89 ha. Hutan di Jawa Tengah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan lingkungan baik manfaat ekologi, ekonomi dan sosial. Manfaat ekonomi salah satunya diukur melalui Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani

Hutan (NTE-KTH). Perkembangan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) dalam pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai berikut.

Tabel 2.2.
Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (NTE-KTH)
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024

Tahun	Kelompok Tani Hutan/KTH (Unit)	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan/NTE KTH (Rp)
2022	200	29.625.748.907
2023	563	90.778.196.837
2024	604	136.466.504.150

Sumber: www.simluh.bp2sdm.menlhk.go.id (KLHK) (per waktu akses 13 Januari 2025)
Keterangan: Inisiasi penghitungan NTE KTH dimulai tahun 2022

NTE-KTH saat ini masih berdasarkan partisipasi KTH untuk melakukan pemutakhiran data. Selain KTH, terdapat Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sebagai unit usaha masyarakat dalam pengelolaan Perhutanan Sosial di Jawa Tengah.

Tabel 2.3.
Perkembangan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024

Kategori	Jenjang	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
KTH	Pemula	3.794	3.794	3.794	4.148	4.539	4.610
	Madya	349	-	49	-	49	369
	Utama	-	9	-	9	-	27
	Jumlah	**4.152**	**4.152**	**4.152**	**4.517**	**4.940**	**5.006**
KUPS	Blue	-	-	-	-	167	210
	Silver	-	-	-	-	58	57
	Gold	-	-	-	-	11	11
	Platinum	-	-	-	-	-	2
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**	**236**	**280**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) merupakan kelompok masyarakat yang diberikan akses legal untuk mengelola hutan negara secara lestari melalui program Perhutanan Sosial. Program ini bertujuan untuk memberikan keadilan akses kelola hutan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian sumberdaya hutan. Perkembangan program perhutanan sosial di Jawa Tengah sebagaiman tabel berikut.

Tabel 2.4.
Perkembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019-2024

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Luas akses kelola (Ha)	35.173,63	35.828,84	79.461,49	79.461,49	93.426,09	104.198,00
Kelompok Perhutanan Sosial yang didampingi (Kelompok)	79	81	90	90	119	160
Kepala Keluarga yang terlibat (KK)	17.358	17.508	19.579	19.579	23.327	34.452

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Kondisi kualitas lingkungan hidup juga digambarkan dari tingkat pencemaran, baik pencemaran air, udara, maupun akibat sampah. Kualitas air di Jawa Tengah dominan berada pada kategori tercemar ringan dengan nilai indeks pencemaran pada tahun 2023 sebesar 3,39. Dari 25 sungai di Jawa Tengah yang dilakukan pemantauan seluruhnya berada pada status tercemar ringan-sedang. Sebanyak 24 sungai berada dalam kondisi cemar ringan dan 1 sungai berada pada status cemar sedang yaitu Sungai Palur. Sementara itu tingkat pencemaran air laut dalam kondisi baik dengan nilai indeks kualitas air laut tahun 2023 sebesar 81,39. Demikian juga tingkat pencemaran udara di Jawa Tengah dinilai masih dalam kategori baik, yang ditunjukkan dengan indeks kualitas udara tahun 2023 sebesar 86,35.

Adapun dalam hal **pengelolaan sampah,** timbulan sampah di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan seiring pertumbuhan jumlah penduduk. Pada tahun 2024 timbulan sampah tercatat sebesar 6.339.820,21 ton/tahun, meningkat 0,03 persen dibandingkan tahun 2023. Upaya pengelolaan sampah yang meliputi pengurangan maupun penanganan, baru mencapai 2.606.065,76 ton per tahun atau sekitar 41,11 persen dari total timbulan sampah, yang terbagi atas pengurangan sebesar 1.270.292,09 (20,04 persen), penanganan sebesar 1.335.773,67 (21,07 persen), dan yang tidak terkelola sebesar 3.733.754,46 pada tahun 2024. Penurunan capaian pengelolaan sampah secara signifikan pada tahun 2024 disebabkan adanya 18 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Jawa Tengah yang mendapatkan pengawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup karena masih mengoperasionalkan TPA dengan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor S.62/A/G/PLB.2/B/12/2024).

Tabel 2.5.
Persentase Pengelolaan Sampah di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Timbunan Sampah (ton)	6.055.617,05	6.152.654,76	6.363.805,99	6.338.109,37	6.339.820,21
2	Sampah yang dikurangi (ton)	1.175.675,24	1.128.400,92	1.320.900,64	1.321.899,86	1.270.292,09
	Persentase Pengurangan Sampah (%)	**19,41**	**18,34**	**20,71**	**20,86**	**20,04**
3	Sampah yang tertangani (ton)	2.626.441,58	2.408.372,35	2.590.829,95	2.590.431,31	1.335.773,67
	Persentase Penanganan Sampah (%)	**43,37**	**39,14**	**40,71**	**40,87**	**21,07**
4	Total Pengelolaan Sampah (ton)	3.802.116,82	3.536.773	3.911.730,59	3.912.331,17	2.606.065,76
	Persentase Pengelolaan Sampah (%)	**62,79**	**57,48**	**61,47**	**61,73**	**41,11**
5	Sampah Tidak Terkelola (ton)	2.253.500,23	2.615.881,76	2.452.075,40	2.425.778,20	3.733.754,46
	Persentase Sampah yang Tidak Terkelola(%)	**37,21**	**42,52**	**38,53**	**38,27**	**58,89**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah terjadi peningkatan upaya pengurangan dan penanganan sampah di Jawa Tengah. Meskipun demikian, capaian pengolahan sampah yang meliputi komponen pengolahan sampah organik dan daur ulang materi (*material recovery*) masih tergolong rendah yaitu 16,51 persen pada tahun 2022 (SEB Bappenas-Kemendagri, 2024). Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup, capaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 49 poin. Sedangkan capaian indikator Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah pada tahun 2022 baru mencapai 25 persen (SEB Bappenas-Kemendagri, 2024).

Berdasarkan data pada SIPSN Kementerian LH, terdapat 46 unit TPA/TPST yang masih beroperasi di Jawa Tengah. Secara umum, pengelolaan TPA/TPST di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 3 jenis, yaitu *open dumping* (18 unit), *controlled landfill* (25 unit), *sanitary landfill* (1 unit). Selain itu, terdapat satu unit TPST yang telah dilengkapi dengan fasilitas *controlled landfill* dan satu unit TPST tanpa fasilitas *landfill*. Penerapan sistem *open dumping* menunjukkan bahwa sebagian besar pengelolaan sampah belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman pengelolaan sampah di TPA. Dari segi pengurangan sampah, telah dilakukan pengelolaan sampah melalui bank sampah maupun TPS3R yang tersebar di kabupaten/kota. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang masuk ke TPA, terutama sampah yang masih memiliki nilai ekonomi tinggi. Pada tahun 2024, jumlah bank sampah di Jawa Tengah mencapai 4.468 unit, sedangkan jumlah TPS3R sebanyak 590 unit.

Pengendalian pencemaran dari air limbah domestik juga terus diupayakan. Meskipun demikian berdasarkan data Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya Provinsi Jawa Tengah hingga tahun 2024 persentase rumah tangga di Jawa Tengah yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman masih rendah yaitu 9,72 persen.

f. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Jawa Tengah merupakan daerah **rawan bencana**. Berdasarkan data sejarah kejadian bencana menunjukkan bahaya yang ada di Jawa Tengah meliputi banjir dan banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, tanah longsor, tsunami, serta epidemi dan wabah penyakit.

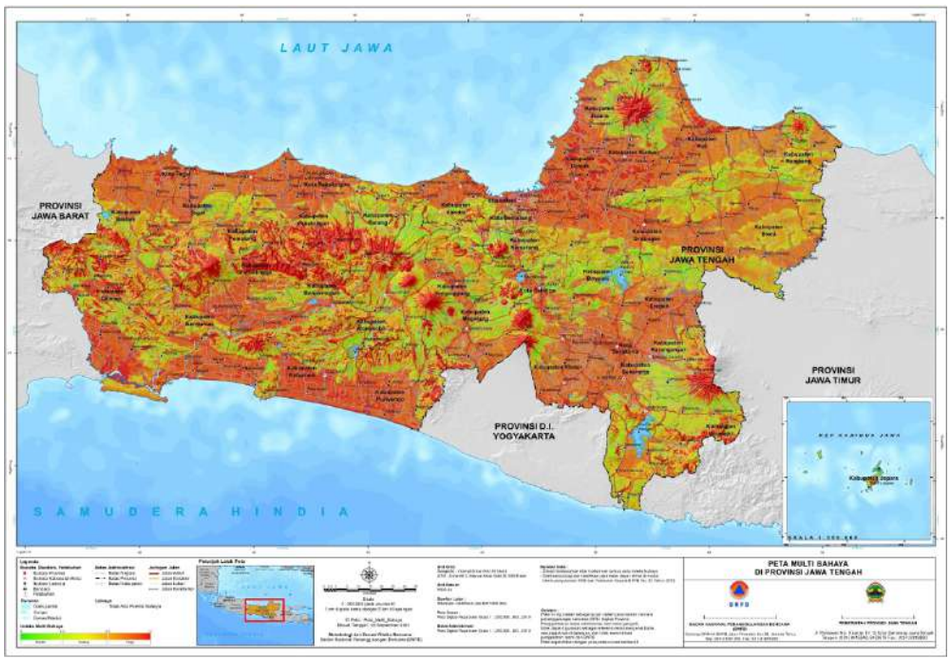

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Tengah 2022 - 2026

Gambar 2.6.
Peta Risiko Multi Bahaya Provinsi Jawa Tengah

Tingkat risiko setiap bencana di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tabel di bawah menunjukkan tingkat risiko rendah, sedang, dan tinggi. Untuk tingkat risiko rendah adalah Covid-19 serta epidemi dan wabah penyakit. Tingkat risiko sedang untuk bencana kegagalan teknologi, gelombang ekstrim dan abrasi, letusan Gunungapi Lawu, dan letusan Gunungapi Sumbing. Sementara itu, untuk bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan Gunungapi Dieng, letusan Gunungapi Merapi, letusan Gunungapi Slamet, letusan Gunungapi Merbabu, letusan Gunungapi Sundoro, letusan Gunungapi Ungaran, likuefaksi, tanah longsor, dan tsunami memiliki tingkat risiko tinggi.

Tabel 2.6.
Tingkat Risiko Bencana di Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Bahaya	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1	Banjir	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
2	Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
3	Covid-19	Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah
4	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
5	Epidemi dan Wabah Penyakit	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah
6	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang
7	Gempa Bumi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
9	Kegagalan Teknologi	Sedang	Sedang	Tinggi	Sedang
10	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
11	Letusan Gunungapi Dieng	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
12	Letusan Gunungapi Lawu	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
13	Letusan Gunungapi Merapi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
14	Letusan Gunungapi Merbabu	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
15	Letusan Gunungapi Slamet	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi

No	Jenis Bahaya	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
16	Letusan Gunungapi Sumbing	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang
17	Letusan Gunungapi Sindoro	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
18	Letusan Gunungapi Ungaran	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi
19	Likuefaksi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
20	Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
21	Tsunami	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Tengah 2022 – 2026

Dalam enam tahun terakhir Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan menurun dari 144,91 atau kategori tinggi pada tahun 2019 dengan 17 kabupaten/kota pada kategori risiko tinggi menjadi 99,61 atau kategori sedang pada tahun 2024 dengan 35 kabupaten/kota pada tingkat risiko kategori sedang.

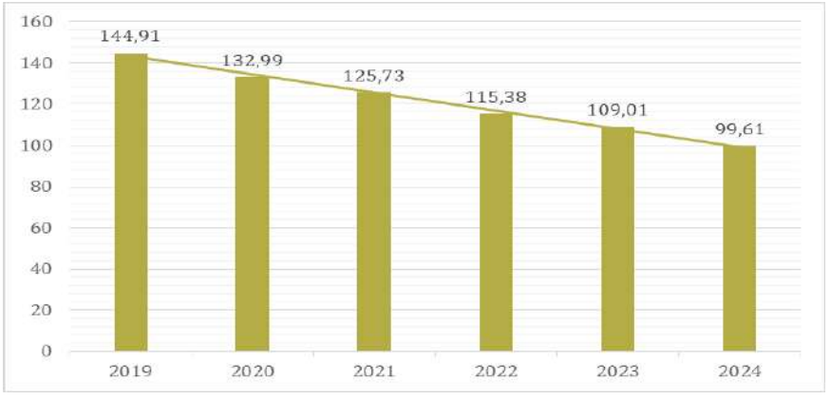

Sumber: BNPB, 2024

Gambar 2.7.
Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2024

Tren penurunan IRB sejalan dengan meningkatnya kapasitas daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana yang diukur melalui Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD dihitung berdasarkan 7 prioritas, yakni: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. IKD Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren positif yaitu sebesar 0,704 pada tahun 2019 menjadi 0,75 pada tahun 2024.

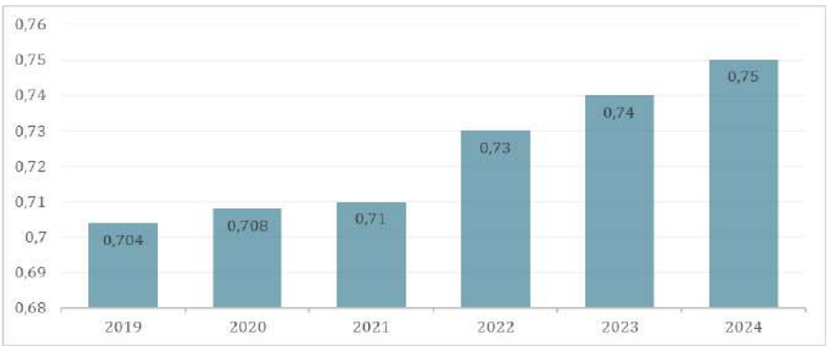

Sumber: BPBD, 2024

Gambar 2.8.
Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2024

Pertumbuhan pusat–pusat ekonomi baru sangat mempengaruhi pembukaan lahan baru dan alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman dan fasilitas pendukung lainnya. Hal ini menyebabkan meningkatnya potensi terjadinya bencana, diantaranya banjir maupun banjir bandang, longsor dan kebakaran hutan serta lahan. Diperlukan berbagai upaya untuk memitigasi risiko yang berpotensi terjadi di wilayah pertumbuhan ekonomi baru, baik melalui mitigasi struktural maupun non struktural untuk menjawab tantangan ke depan akibat alih fungsi lahan maupun fenomena perubahan iklim. Pemanfaatan teknologi untuk menyebarluaskan literasi mengenai kebencanaan, maupun peringatan dini saat akan terjadi bencana memainkan peran yang sangat penting saat ini untuk mengurangi korban jiwa maupun kerugian ekonomi akibat dampak bencana.

Selain itu, adanya fenomena perubahan iklim secara global juga berpengaruh terhadap kondisi sumber daya alam bahkan menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Fenomena pemanasan global di mana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Di Jawa Tengah, tren kenaikan suhu dalam kurun waktu panjang menjadi indikasi adanya perubahan iklim. Berdasarkan pengamatan data historis suhu udara rata-rata yang dimiliki yaitu selama periode 1901-2022 menunjukkan suhu udara rata-rata di Jawa Tengah telah mengalami peningkatan dengan laju sekitar 0,01°C per tahun selama periode historis. Dengan kata lain di Provinsi Jawa Tengah telah terjadi peningkatan suhu udara rata-rata lebih kurang sebesar 1°C selama pengamatan 120 tahun terakhir.

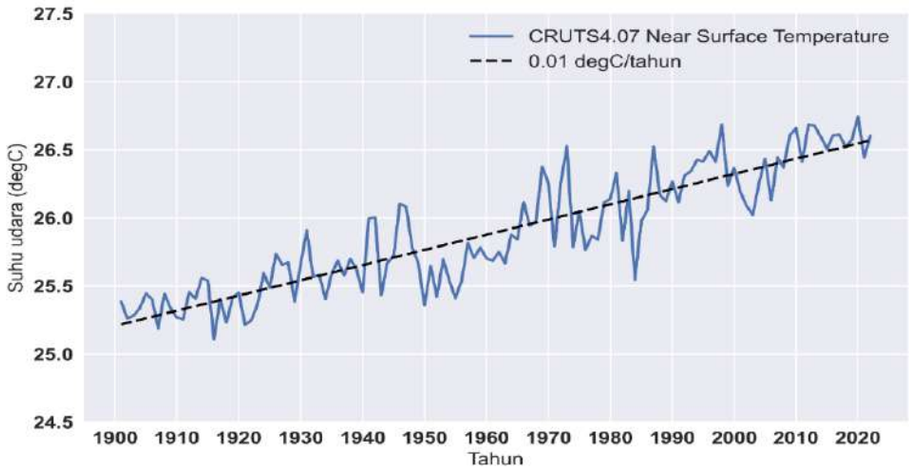

Sumber: Dokumen Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.9.
Tren Kenaikan Suhu Udara Rata-Rata Tahunan Provinsi Jawa Tengah

Terjadinya perubahan iklim berkaitan dengan emisi gas rumah kaca (GRK). Berdasarkan *Signsmart* KLH, emisi GRK di Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 118.738,93 $GgCO_2e$. Pada tahun 2023, sektor energi menjadi penyumbang terbesar emisi GRK di Jawa Tengah dengan total emisi sebesar 95.577,87 $GgCO_2e$ (80,49 persen), dan disusul sektor pertanian sebesar 20.890,54 $GgCO_2e$ (17,59 persen). Peningkatan emisi dari sektor energi salah satunya disebabkan oleh beroperasionalnya PLTU Batang pada tahun 2022.

Peningkatan emisi GRK pada periode 2010-2023 tersebut didominasi oleh peningkatan emisi pada sektor energi. Selama periode tersebut, sektor energi meningkat 219,71 persen dari 29.895,59 $GgCO_2e$ pada tahun 2010 menjadi

95.577,87 $GgCO_2e$ pada tahun 2023. Emisi GRK sektor energi ini didominasi oleh pembakaran bahan bakar di pembangkit listrik dan transportasi yang terus meningkat.

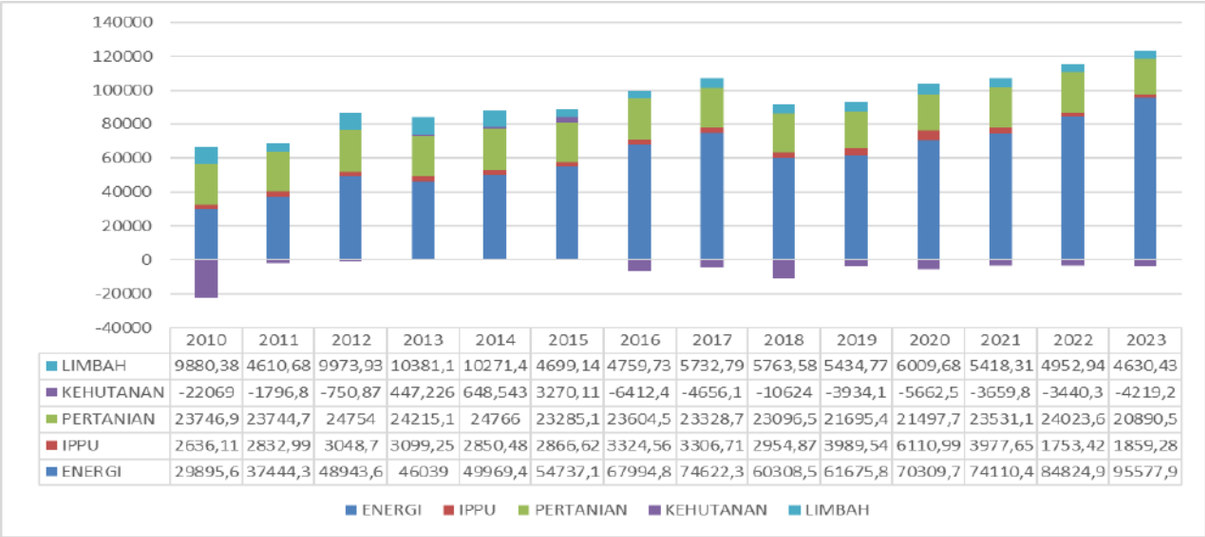

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
LIMBAH	9880,38	4610,68	9973,93	10381,1	10271,4	4699,14	4759,73	5732,79	5763,58	5434,77	6009,68	5418,31	4952,94	4630,43
KEHUTANAN	-22069	-1796,8	-750,87	447,226	648,543	3270,11	-6412,4	-4656,1	-10624	-3934,1	-5662,5	-3659,8	-3440,3	-4219,2
PERTANIAN	23746,9	23744,7	24754	24215,1	24766	23285,1	23604,5	23328,7	23096,5	21695,4	21497,7	23531,1	24023,6	20890,5
IPPU	2636,11	2832,99	3048,7	3099,25	2850,48	2866,62	3324,56	3306,71	2954,87	3989,54	6110,99	3977,65	1753,42	1859,28
ENERGI	29895,6	37444,3	48943,6	46039	49969,4	54737,1	67994,8	74622,3	60308,5	61675,8	70309,7	74110,4	84824,9	95577,9

Sumber: Laporan IGRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (data diolah dari Signsmart KLH)

Gambar 2.10.
Tren Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010–2023

Secara akumulasi, berdasarkan AKSARA BAPPENAS, total capaian penurunan emisi GRK di Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2010 hingga tahun 2024 mencapai 14,13 juta ton CO_2e (data *cut off* 26 Juni 2025, status disetujui dan final). Angka ini mencerminkan kinerja penurunan emisi GRK yang dilaporkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota serta pihak nonpemerintah di Jawa Tengah melalui pelaksanaan 4.481 kegiatan mitigasi di berbagai sektor. Dari sisi intensitas emisi, saat ini intensitas emisi GRK di Jawa Tengah sebesar 1,74 ton CO_2e/miliar, yang mengindikasikan bahwa setiap satu miliar rupiah dari aktivitas pembangunan berpotensi menghasilkan emisi GRK sebesar 1,74 ton CO_2e. Penurunan emisi terdiri dari 8 (delapan) sektor yaitu air limbah, *blue carbon*, energi, industri (IPPU), kehutanan dan lahan gambut, persampahan, pertanian, dan transportasi.

Selama periode tahun 2021-2024, beberapa sektor berperan dalam penurunan emisi GRK di Jawa Tengah. Penurunan emisi paling tinggi berasal dari sektor kehutanan dan lahan gambut sebesar 7.345.492,75 ton CO_2e atau 53,77 persen, sektor pertanian sebesar 3.576.340,10 ton CO_2e atau 26,18 persen, dan sektor transportasi sebesar 1.223.837,84 ton CO_2e atau 8,96 persen. Sedangkan kontribusi paling rendah adalah *blue carbon* sebesar 51.179,073 ton CO_2e atau 0,37 persen.

Perubahan iklim berdampak terjadinya bencana. Risiko bencana yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah juga disebabkan oleh adanya perubahan iklim seperti curah hujan yang tinggi, kenaikan muka air laut di wilayah Pantai Utara Jawa, dan cuaca ekstrem. Dampak dari perubahan iklim sangat dirasakan oleh wilayah Pantai Utara Jawa terutama Tanjung Emas, Demak, Pekalongan yang merupakan wilayah terdampak rob. Adanya pertumbuhan industri di Pantai Utara Jawa Pekalongan, Batang, Demak, Kota Semarang juga akan memperparah kondisi rob di wilayah tersebut. Sehingga perlu adanya kebijakan terkait pembatasan kegiatan industri

di wilayah pesisir Pantai Utara Jawa. Dampak lain adanya perubahan iklim yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah meliputi:

- Terjadinya kenaikan permukaan air laut disebabkan oleh pemanasan global menyebabkan kerusakan tambak di daerah pesisir;
- Ekosistem laut, pesisir dan pantai memburuk;
- Peningkatan intensitas cuaca ekstrem, memanasnya cuaca yang menyebabkan terjadinya kekeringan berkepanjangan, kebakaran hutan dan lahan, banjir, longsor, gagal panen, dan gelombang tinggi, serta meningkatnya penyakit Demam Berdarah *Dengue* (DBD) dan malaria;
- Pemanasan global mempengaruhi keanekaragaman hayati, perubahan distribusi, jumlah populasi, kepadatan populasi dan kebiasan flora dan fauna.

Berdasarkan *Indonesian Journal of Oceanography* (2021), terjadi peningkatan nilai muka air laut sejak tahun 1993 sekitar 37,545 mm per tahun. Tren kenaikan tercepat muka air laut di Laut Jawa mencapai nilai 72,313 mm pada tahun 2015-2016, sedangkan tren paling lambat terjadi pada tahun 2002-2005 sekitar 16,7 mm. Perubahan tren muka air laut yang ekstrim terjadi pada tahun 1996-1998 dan pada tahun 2010-2016 dikarenakan terjadinya fenomena El Nino dan La Nina. Kenaikan muka air laut akan berdampak pada terjadinya intrusi air laut atau rob. Penyebab peningkatan kenaikan muka air laut, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, dipengaruhi oleh perubahan iklim serta amblesan tanah dampak dari penyedotan air tanah. Hasil kajian kerentanan iklim Jawa Tengah menyebutkan bahwa dari 576 kecamatan di Jawa Tengah terdapat 23 kecamatan (4 persen) di Jawa Tengah berada pada kategori kerentanan sangat tinggi dan 24 kecamatan (4 persen) berada pada kategori kerentanan tinggi. Sedangkan mayoritas kecamatan berada pada kategori kerentanan sedang sebanyak 442 kecamatan (77 persen).

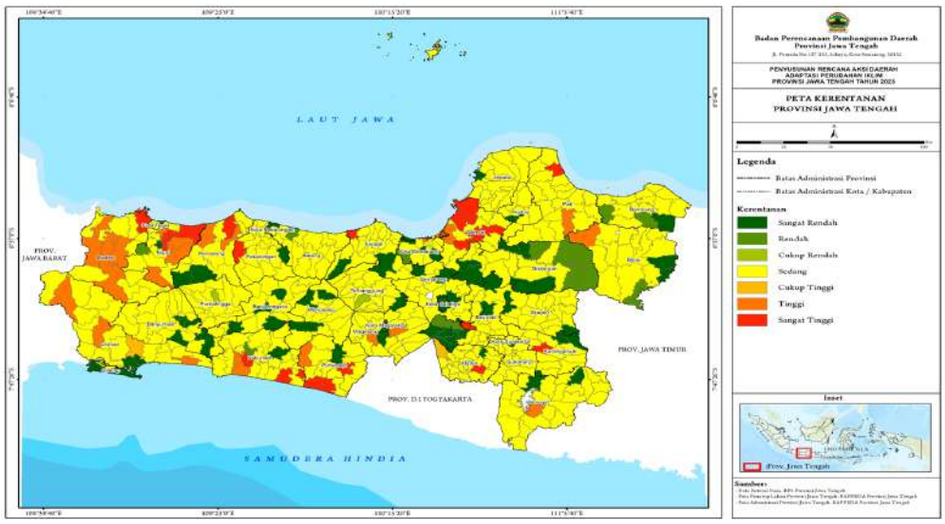

Sumber: Dokumen Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.11.
Peta Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim Provinsi Jawa Tengah

g. Demografi

Kondisi demografi ditunjukkan dengan jumlah penduduk Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Tahun 2020, jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 36.516.035 jiwa, dan tahun 2024 sebanyak 37.892.283 jiwa atau mengalami penambahan penduduk sebanyak 1.376.248 jiwa

atau 3,77 persen. Dari sisi komposisi penduduk, Jawa Tengah masih didominasi penduduk laki-laki dengan rasio kelamin rata-rata diatas 50 persen selama kurun waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan kelompok umur didominasi oleh penduduk kelompok umur produktif dengan angka ketergantungan mengalami tren meningkat dari 43,16 pada tahun 2020 menjadi 44,50 pada tahun 2024. Peningkatan angka ketergantungan ini disumbang oleh jumlah penduduk lansia yang kian meningkat yaitu dari 7,72 persen pada tahun 2020 menjadi 9,05 persen pada tahun 2024.

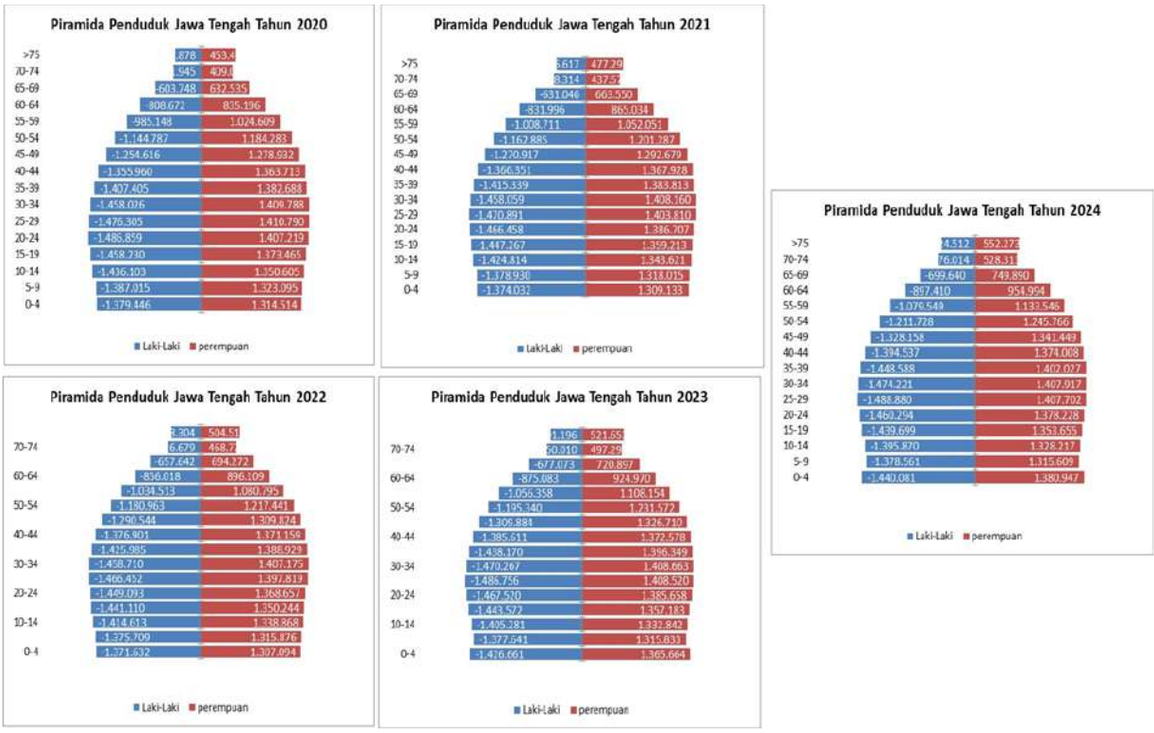

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah

Gambar 2.12.
Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024

Kondisi demografi Jawa Tengah didukung dengan **kinerja kependudukan** yang digambarkan dari beberapa indikator kependudukan antara lain *Total Fertility Rate* (TFR), modern *Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR), *Unmetneed* KB, dan *Age Specific Fertility Rate* (ASFR). TFR Jawa Tengah berdasarkan Sistem Informasi Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (Siperindu) periode 2021-2024 mengalami tren makin menurun sejak tahun 2022 setelah mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang sebesar 1,91 menjadi 2,09 dan tahun 2024 TFR menjadi sebesar 2,03. Kondisi ini menggambarkan kebijakan pengendalian penduduk berhasil bahkan melampaui *replacement level* 2,1. Namun kondisi ini sekaligus menjadi peringatan jika TFR terus menurun akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan pasokan sumber daya manusia produktif Jawa Tengah di masa yang akan datang. Pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) di Jawa Tengah turut berperan penting dalam keberhasilan pengendalian penduduk di Jawa Tengah sehingga perlu untuk terus didorong. Capaian mCPR Jawa Tengah selama tahun 2021-2024 tercatat mengalami peningkatan dari 53,8 tahun 2021 menjadi 65,5 di tahun 2024. Seiring dengan makin meningkatnya mCPR perlu juga diwaspadai masih banyak pula pasangan usia subur yang tidak menggunakan alat kontrasepsi meski tidak ingin memiliki anak atau menjarangkan kelahiran (*unmetneed*) yang tentu akan

berpotensi pada meningkatnya kelahiran sewaktu-waktu. Perkembangan *unmetneed* KB tercatat tahun 2022 sebesar 11,05 naik dari tahun 2017 yang sebesar 10,8, namun pada tahun 2023 turun menjadi sebesar 8,58 dan naik kembali menjadi 9,3. Selain itu terkait dengan perkembangan penduduk, tingginya kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15-19 tahun) juga berpengaruh bagi kondisi kependudukan. Tidak hanya dari sisi kuantitas (menambah jumlah penduduk) tetapi juga kualitas. Dari sisi kualitas, kelahiran di usia 15-19 tahun (usia dini) dapat meningkatkan risiko kematian ibu melahirkan, anak yang dilahirkan prematur, berpotensi *stunting* dan beban psikologis bagi perempuan. Capain ASFR 15-19 tahun Jawa Tengah periode 2021-2024 mengalami perkembangan tren yang meningkat jika diukur dari tahun 2021. Tercatat tahun 2021 sebesar 9,1 dan tahun 2024 sebesar 13,7. Meski masih tinggi capaian tahun 2024, namun dua tahun terakhir telah mengalami perbaikan dari kondisi tertinggi pada tahun 2022 yang sebesar 23,09.

Penduduk Jawa Tengah pada tahun 2025 **diproyeksikan** sebanyak 38.233.933 jiwa dan menjadi sebanyak 39.771.480 jiwa pada tahun 2030. Dari komposisi jenis kelamin, proporsi jumlah penduduk laki-laki di Jawa Tengah pada tahun 2030 diproyeksikan menurun dibandingkan tahun 2025, dimana proporsi jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2025 sebesar 50,23 persen menjadi 50,13 persen pada tahun 2030. Sementara itu, angka ketergantungan penduduk Jawa Tengah pada tahun 2025 sebesar 44,93 dan sampai dengan tahun 2030 diproyeksikan akan semakin meningkat, seiring dengan semakin meningkatnya penduduk usia lansia menjadi sebesar 47,42. Proporsi penduduk lansia pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 9,41 persen, meningkat menjadi 11,26 persen pada tahun 2030. Gambaran proyeksi ini menunjukkan bahwa dengan membaiknya kualitas hidup masyarakat, usia harapan hidup masyarakat Jawa Tengah juga semakin meningkat yang berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk lansia. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa Jawa Tengah ke depan harus mempersiapkan diri untuk memasuki masa transisi menuju *ageing population.*

Tabel 2.7.
Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan 2030

Kelompok Umur (Tahun)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)					
	2025			2030		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	1.453.486	1.395.492	2.848.978	1.408.270	1.351.868	2.760.138
5 - 9	1.378.005	1.314.670	2.692.675	1.455.469	1.398.905	2.854.374
10 - 14	1.388.617	1.324.616	2.713.233	1.382.845	1.319.212	2.702.057
15 - 19	1.434.037	1.349.663	2.783.700	1.389.903	1.326.796	2.716.699
20 - 24	1.453.872	1.371.580	2.825.452	1.433.103	1.350.987	2.784.090
25 - 29	1.488.450	1.405.197	2.893.647	1.458.787	1.372.888	2.831.675
30 - 34	1.478.667	1.407.466	2.886.133	1.494.237	1.405.302	2.899.539
35 - 39	1.457.127	1.406.076	2.863.203	1.481.196	1.407.377	2.888.573
40 - 44	1.404.285	1.376.799	2.781.084	1.457.376	1.403.843	2.861.219
45 - 49	1.344.073	1.352.647	2.696.720	1.395.601	1.369.682	2.765.283
50 - 54	1.229.032	1.260.829	2.489.861	1.320.628	1.337.974	2.658.602
55 - 59	1.100.859	1.156.162	2.257.021	1.186.339	1.235.901	2.422.240
60 - 64	920.100	984.473	1.904.573	1.032.957	1.116.620	2.149.577

Kelompok Umur (Tahun)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)					
	2025			2030		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
65 - 69	721.747	779.311	1.501.058	826.391	925.632	1.752.023
70 - 74	500.418	558.377	1.058.795	603.383	696.590	1.299.973
> 75	450.659	587.141	1.037.800	611.345	814.073	1.425.418
Total	**19.203.434**	**19.030.499**	**38.233.933**	**19.937.830**	**19.833.650**	**39.771.480**

Sumber: BPS, 2025

Karakteristik penduduk Jawa Tengah dikenal beragam. Berbagai macam suku tinggal di wilayah Jawa Tengah dengan segala perbedaan yang cukup beragam. Suku terbanyak yang tinggal di Jawa Tengah adalah suku Jawa yang mendiami sebagian besar wilayah Jawa Tengah. Suku lainnya antara lain suku Sunda Priangan yang sebagian besar tinggal di wilayah perbatasan dengan Jawa Barat (Cilacap dan Brebes), suku Cina yang cukup banyak tinggal di Kota Semarang, suku Batak, Madura, Arab, Betawi, Melayu, dan suku lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Dari kepercayaan atau agama, sebagian besar penduduk Jawa Tengah memeluk agama Islam, diikuti dengan agama Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan lainnya. Di wilayah Jawa Tengah juga tercatat ada sebagian kecil penduduk yang menganut penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa wilayah tercatat memiliki kelompok penduduk tersebut antara lain di Kota Semarang dan Kabupaten Wonogiri.

Jawa Tengah juga masih memiliki kelompok masyarakat adat yang masih memiliki dan berpegang pada hukum adat. Terdapat beberapa kelompok masyarakat adat yang masih eksis di Jawa Tengah salah satunya adalah kelompok masyarakat adat *sedulur sikep* atau yang juga dikenal dengan "Wong Samin". Masyarakat adat tersebut masih mempertahankan dan menjalankan ajaran Samin yang mengembangkan ajaran hidup dilandaskan pada nilai-nilai kesetaraan/kesamaan (egaliter), kejujuran/polos, kesederhanaan, dan kearifan dalam bingkai filosofi kebersamaan dan gotong royong. Kelompok masyarakat adat lain yang masih eksis antara lain masyarakat adat kampung dan hutan adat Jalawastu Brebes yang memiliki adat istiadat *ngasa* dan hukum adat, masyarakat Kalang yang memiliki ritual Kalang Obong, dan masyarakat Bonokeling Banyuman yang memiliki adat istiadat *unggah-unggahan* dan *jamasan* pusaka serta hukum adat.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Kesejahteraan Ekonomi

Kondisi kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah digambarkan salah satunya dengan **kondisi kemiskinan**. Persentase penduduk miskin September 2024 menurun 0,89 persen poin menjadi 9,58 persen dibanding Maret 2024 yang sebesar 10,47 persen dengan jumlah penduduk miskin 3.396,34 ribu orang, turun sebesar 307,99 ribu orang terhadap Maret 2024. Berdasarkan wilayah, kemiskinan di Jawa Tengah periode September 2024 masih dominan di perdesaan yaitu sebesar 10,45 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 8,83 persen. Jumlah penduduk miskin di perkotaan berkurang sebanyak 151,76 ribu orang dari 1.835,51 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 1.683,75 ribu orang pada September 2024, sedangkan di perdesaan berkurang sebanyak 156,23 ribu orang dari

1.868,82 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 1.712,59 ribu orang pada September 2024.

Jika dibandingkan dengan nasional, kondisi tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih berada di atas nasional. Namun dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan tingkat kemiskinan Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejalan dengan tingkat kemiskinan Nasional. Dengan demikian pada periode tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sudah mendukung upaya penurunan kemiskinan Nasional sebagaimana gambar di bawah ini.

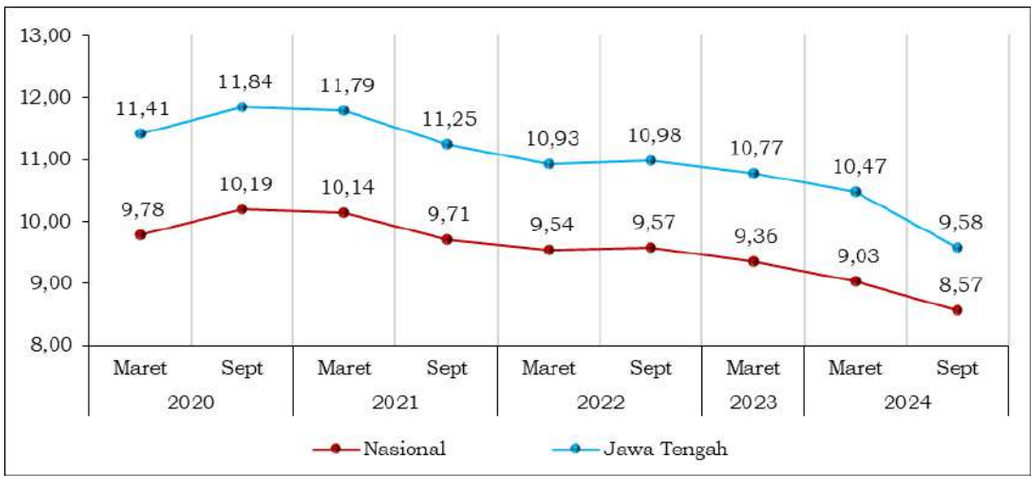

Sumber: BPS, 2024
Catatan: Angka kemiskinan periode September 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode Maret

Gambar 2.13.
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024 (Persen)

Garis kemiskinan adalah nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan yang dipergunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan di Jawa Tengah periode September 2024 sebesar Rp521.093 per kapita per bulan, meningkat 2,78 persen dibandingkan dengan Maret 2024 yang sebesar Rp507.093 per kapita per bulan.

Garis kemiskinan September 2024 meliputi komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp392.697 per kapita per bulan sebesar 75,36 persen dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp128.396 per kapita per bulan sebesar 24,64 persen. Pada periode September 2024 rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Jawa Tengah memiliki 4,45 orang anggota rumah tangga. Dengan kata lain, besarnya garis kemiskinan rumah tangga di Jawa Tengah secara rata-rata senilai Rp2.318.864 per rumah tangga miskin per bulan. Sementara pada Maret 2024 rumah tangga miskin memiliki rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak 4,50 orang, dengan besaran garis kemiskinan per rumah tangga pada Maret 2024 sebesar Rp2.281.505 per rumah tangga miskin per bulan.

Garis kemiskinan di wilayah perkotaan periode September 2024 sebesar Rp532.913 per kapita per bulan atau naik 3,00 persen dari kondisi Maret 2024 yang sebesar Rp517.415 per kapita per bulan. Sedangkan garis kemiskinan di perdesaan periode September 2024 juga mengalami peningkatan sebesar 2,56

persen menjadi sebesar Rp508.298 per kapita per bulan dibandingkan dengan Maret 2024 yang sebesar Rp495.627 per kapita per bulan sebagaimana gambar di bawah ini.

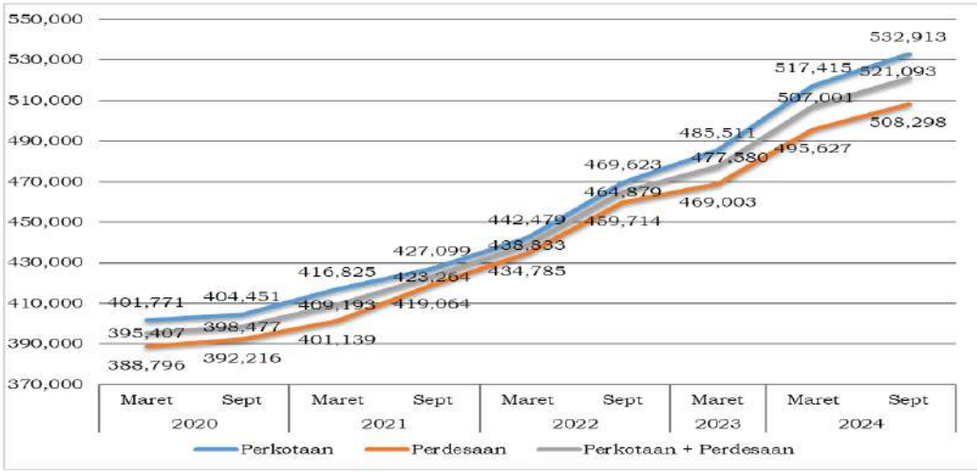

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024
Catatan: Angka kemiskinan periode September 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode Maret

Gambar 2.14.
Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Menurut Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P1 Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2020–2021 mengalami peningkatan dari 1,835 pada tahun 2020 menjadi 1,938 pada tahun 2021, tetapi menurun menjadi 1,753 pada tahun 2022 dan mengalami penurunan kembali menjadi 1,749 pada tahun 2023. P1 pada September 2024 sebesar 1,601, turun sebesar 0,039 dibandingkan Maret 2024. Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) perdesaan cenderung lebih tinggi daripada perkotaan. Pada September 2024, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 1,497, sedangkan di perdesaan mencapai 1,723. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan.

Selain dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), gambaran kemiskinan juga dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2020–2021 meningkat dari 0,431 pada tahun 2020 menjadi 0,459 pada tahun 2021, tetapi menurun menjadi 0,422 pada tahun 2022 dan mengalami penurunan kembali menjadi 0,415 pada tahun 2023. P2 pada September 2024 sebesar 0,365, turun sebesar 0,009 dibandingkan Maret 2024. Jika dilihat dari wilayah perkotaan dan perdesaan, nilai P2 pada periode September 2024 di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Periode September 2024, nilai P2 untuk daerah perkotaan sebesar 0,347 turun 0,002 poin dibandingkan Maret 2024. Sedangkan pada periode yang sama nilai P2 untuk daerah perdesaan mencapai sebesar 0,386 turun 0,017 poin dibandingkan Maret 2024.

Dari gambaran kemiskinan di atas, kondisi kemiskinan di Jawa Tengah mengalami perbaikan namun masih diperlukan upaya strategis dalam penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif.

Perekonomian Jawa Tengah dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang stabil, tumbuh positif, dan berhasil menghadapi ancaman dan tekanan global, meskipun pada tahun 2020-2021 mengalami kontraksi -2,65 persen dan 3,33 persen akibat terkena dampak pandemi Covid-19. Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah telah pulih seperti sebelum adanya pandemi Covid-19 yaitu tumbuh sebesar 4,97 persen, meskipun melambat jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 5,31 persen. Pelambatan ini terjadi dikarenakan adanya pelambatan ekonomi global akibat konflik geopolitik yang belum berakhir dan adanya fenomena *el nino* yang menyebabkan turunnya beberapa hasil komoditas pertanian. Pada tahun 2024, ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 4,95 persen di tengah ketidakpastian global walaupun masih di bawah nasional sebesar 5,03 persen. Ekonomi Jawa Tengah memiliki kontribusi sebesar 14,36 persen terhadap perekonomian di Pulau Jawa dan penyumbang empat terbesar pada perekonomian nasional. Struktur ekonomi Jawa Tengah tertinggi dari sisi pengeluaran berasal dari konsumsi rumah tangga, ekspor dan investasi. dari sisi lapangan usaha, menjadi kontributor tertinggi yang berasal dari sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan konstruksi.

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.15.
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2019-2024 (Persen)

PDRB per kapita Jawa Tengah dari tahun ke tahun semakin meningkat, meskipun masih lebih rendah dari PDRB per kapita nasional. Tahun 2024 PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah sebesar 47,97 juta rupiah, meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 39,39 juta rupiah. Stabilnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, serta percepatan pemulihan ekonomi Jawa Tengah pasca pandemi Covid-19 berimbas pada kenaikan pendapatan per kapita Jawa Tengah.

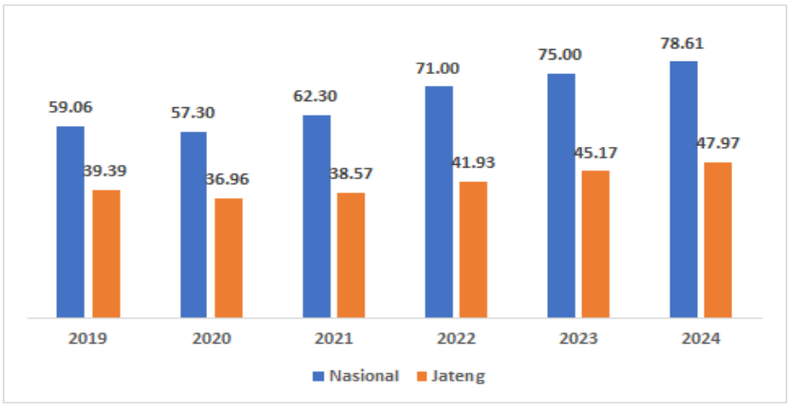

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.16.
PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional
Tahun 2019–2024 (Juta Rupiah)

Rasio Gini. Perekonomian daerah Jawa Tengah selain mampu tumbuh stabil, juga tumbuh merata dan berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan pendapatan yang dapat dilihat dari Rasio Gini. Kondisi ketimpangan di Jawa Tengah menunjukan tren turun. Ketimpangan tertinggi terjadi pada Maret 2022 yaitu sebesar 0,374 dikarenakan pandemi Covid-19 dan kemudian berangsur turun menjadi sebesar 0,364 pada September tahun 2024. Adanya kebijakan pemerintah daerah dalam mengurangi ketimpangan seperti pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi khususnya untuk masyarakat berpendapatan rendah sangat membantu dalam mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan kemampuan dan pendapatan.

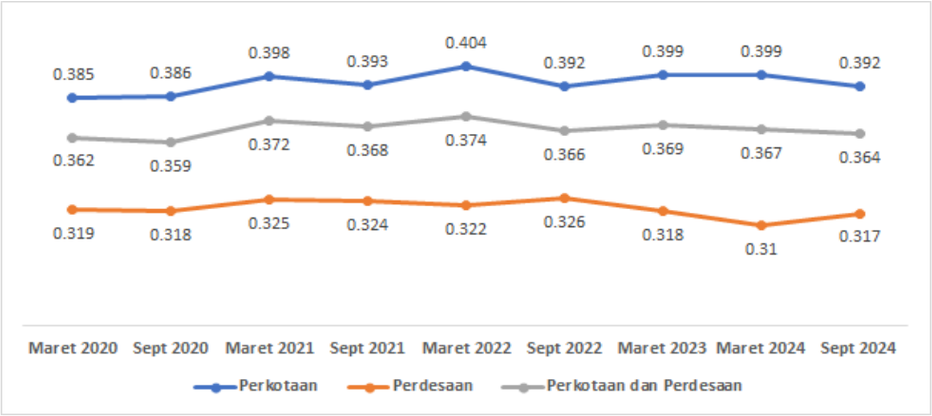

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.17.
Rasio Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024

Berdasarkan tempat tinggal, ketimpangan pengeluaran penduduk di kawasan perkotaan lebih tinggi jika dibandingkan ketimpangan di kawasan perdesaan. Pada September 2024 tercatat bahwa ketimpangan di wilayah perkotaan adalah sebesar 0,392, dimana angka ini menurun jika dibandingkan capaian Maret 2024. Sedangkan pada wilayah perdesaan, angka rasio gini September 2024 adalah sebesar 0,317 menurun dibandingkan Maret 2023 dengan capaian sebesar 0,318. Fenomena ketimpangan yang tinggi di kawasan perkotaan juga berlangsung pada tingkat nasional. Hal ini mencerminkan bahwa golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di kawasan perkotaan lebih mudah terpapar dampak pelemahan ekonomi dibandingkan dengan kelompok masyarakat

berpenghasilan menengah ke atas. Rendahnya kapasitas tabungan/dana darurat serta menurunnya penghasilan di tengah penurunan aktivitas produksi menjadi penyebab rentannya golongan masyarakat berpenghasilan rendah.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil juga berpengaruh terhadap menurunnya pengangguran di Jawa Tengah yang diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka. TPT Jawa Tengah pada bulan Agustus 2024 mencapai angka 4,78 persen yang berarti diantara 100 orang angkatan kerja ditemukan sekitar 4 (empat) orang penganggur. TPT Agustus 2024 turun sebesar 0,35 persen poin dibandingkan Agustus 2023. TPT nasional bulan Agustus 2024 lebih besar dibandingkan Jawa Tengah.

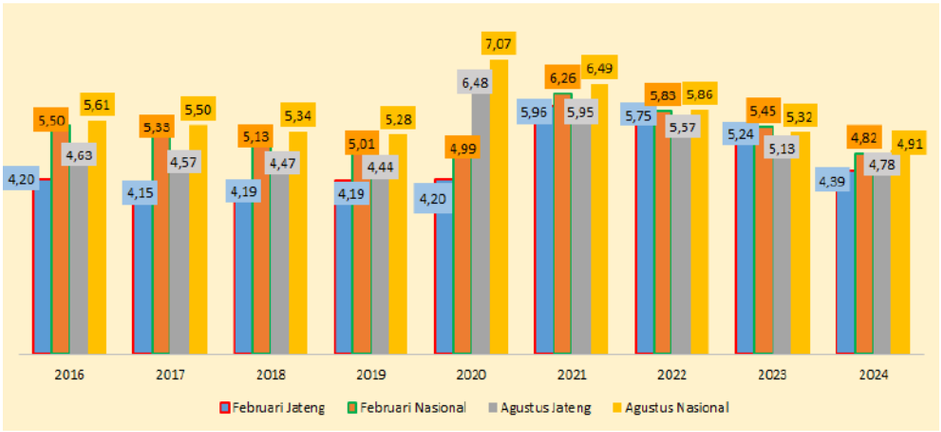

Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.18.
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016-2024 (Persen)

Pada Agustus 2024, TPT laki-laki sebesar 4,83 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 4,71 persen. Dibandingkan Agustus 2023, TPT laki-laki turun sebesar 0,60 persen poin, sedangkan TPT perempuan naik sebesar 0,02 persen poin. Menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan sebesar 5,19 persen, lebih tinggi dibanding TPT daerah perdesaan yang sebesar 4,29 persen. Dibandingkan Agustus 2023, baik TPT daerah perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,27 persen poin dan 0,46 persen poin.

TPT menurut kategori pendidikan mempunyai pola yang tidak jauh berbeda, baik pada Agustus 2024 maupun pada periode sebelumnya. Pada Agustus 2024, TPT dari tamatan SMA Kejuruan masih menjadi yang tertinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 9,52 persen. Sedangkan TPT yang paling rendah tercatat bagi mereka yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah, yaitu sebesar 2,59 persen.

Tabel 2.8.
Karakteristik Pengangguran Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019-2024 (Persen)

Karakteristik Pengangguran	Agustus 2019 persen	Agustus 2020 persen	Agustus 2021 persen	Agustus 2022 persen	Agustus 2023 persen	Agustus 2024 persen	Perubahan Ags 2023-Ags 2024 persen poin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,44	6,48	5,95	5,57	5,13	4,78	-0,35
TPT Menurut Jenis Kelamin							
- Laki-Laki	4,74	7,13	6,54	5,75	5,43	4,83	-0,60
- Perempuan	4,02	5,57	5,14	5,31	4,69	4,71	0,02
TPT Menurut Daerah Tempat Tinggal							
- Perkotaan	5,09	7,73	7,06	7,39	5,46	5,19	-0,27
- Perdesaan	3,77	5,19	4,75	3,63	4,75	4,29	-0,46
TPT Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan							
SD ke Bawah	2,09	3,70	3,70	4,59	2,74	2,59	-0,15
Sekolah Menengah Pertama	4,64	6,40	6,87	5,55	5,04	4,11	-0,92
Sekolah Menengah Atas	6,26	8,41	7,32	7,21	7,09	6,41	-0,68
Sekolah Menengah Kejuruan	9,92	13,20	10,00	8,42	9,89	9,52	-0,37
Diploma I/II/III	3,59	6,46	5,66	2,95	5,09	4,74	-0,35
Diploma IV, S1, S2, S3	5,44	7,01	5,62	4,02	5,60	5,35	-0,25

Sumber: BPS, 2025

b. Kesehatan untuk Semua

Kondisi kesehatan untuk semua di Jawa Tengah diukur dengan kinerja Usia Harapan Hidup (UHH) yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH juga dapat digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Capaian UHH Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan angka yang terus membaik sebesar 74,93 tahun pada tahun 2024.

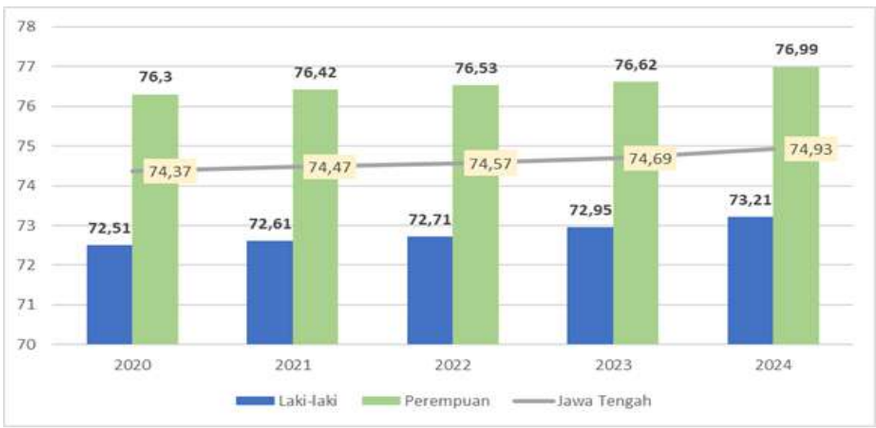

Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.19.
Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024 (Tahun)

Angka Kematian Ibu (AKI) secara umum terjadi penurunan selama periode 2021-2024 dari 199 menjadi 74,73 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini hampir mencapai target RPJMN 2024 sebesar 183 per 100.000 kelahiran hidup. Walaupun terjadi kecenderungan penurunan angka kematian ibu, masih diperlukan upaya dalam percepatan penurunan AKI untuk mencapai target SGD's yaitu sebesar 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan jumlah kasus kematian ibu tertinggi adalah Kabupaten Brebes sebanyak 54 kasus, dan terendah adalah Kota Tegal dengan 1 (satu) kasus, diikuti Kota

Magelang dan Kota Salatiga dengan 2 (dua) kasus. Sebesar 71,66 persen kematian maternal di Provinsi Jawa Tengah terjadi pada waktu nifas. Penyebab kematian ibu antara lain karena perdarahan sebesar 15,5 persen; gangguan hipertensi sebesar 30 persen; infeksi sebesar 5,6 persen; komplikasi pasca keguguran (abortus) sebesar 0,7 persen; serta lain-lain sebesar 48,2 persen.

Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami tren yang fluktuatif selama periode 2021-2024 dari 7,8 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2021 meningkat menjadi 8,0 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2023, lalu turun kembali pada tahun 2024 menjadi sebesar 7,6 per 1.000 kelahiran hidup. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Apabila AKB di suatu wilayah tinggi berarti status kesehatan di wilayah tersebut rendah. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan AKB terendah pada tahun 2024 adalah Kabupaten Cilacap sebesar 3,3 per 1.000 kelahiran hidup, dan tertinggi adalah Kabupaten Rembang sebesar 13 per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Balita (AKABA) di Jawa Tengah tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sangat fluktuatif. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan tren AKABA dari 9,0 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2021 meningkat menjadi 9,30 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2023, kemudian menurun pada tahun 2024 menjadi sebesar 8,6 per 1.000 kelahiran hidup. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dengan AKABA tertinggi pada tahun 2024 adalah Kabupaten Rembang sebesar 14,5 per 1000 kelahiran hidup, dan terendah adalah Kabupaten Cilacap sebesar 3,5 per 1000 kelahiran hidup. Jumlah kematian balita pada tahun 2024 sebanyak 4.898 kematian balita, menurun dibandingkan tahun 2023 yang sebanyak 5.339 kematian. Dari seluruh kematian balita, 67,84 persen diantaranya terjadi pada masa *neonatal* (3.323 kematian). Sementara itu, kematian pada masa *post neonatal* (usia 29 hari-11 bulan) sebesar 20,48 persen (1.003 kematian), dan kematian anak balita (usia 12-59 bulan) sebesar 11,68 persen (572 kematian). Penyebab kematian *neonatal* terbanyak di Jawa Tengah pada tahun 2024 adalah kondisi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan *prematuritas* sebesar 37,61 persen dan asfiksia sebesar 23,70 persen. Penyebab kematian lain di antaranya kelainan kongenital, infeksi, kelainan *cardiofaskular* dan *respiratori*, COVID-19, dan penyebab lain-lain.

Prevalensi balita dengan *stunting* di Jawa Tengah berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023-2024 mengalami penurunan kasus sebanyak 3,7 persen, dengan prevalensi *stunting* pada tahun 2023 sebesar 20,7 persen menjadi 17,1 persen pada tahun 2024. Hal ini dipengaruhi peningkatan capaian indikator pemantauan tumbuh-kembang, imunisasi dasar lengkap, dan distribusi Tablet Tambah Darah (TTD) untuk ibu hamil pada tahun 2024. Beberapa faktor yang menjadi penyebab gizi buruk yang berdampak pada kasus *stunting* antara lain masalah ekonomi, sanitasi, pendidikan orang tua, dan perilaku orang tua. Faktor ekonomi terutama kemiskinan menjadi salah satu determinan yang menjadi akar penyebab ketiadaan pangan, tempat mukim yang yang berjejalan dan tidak sehat, serta ketidakmampuan mengakses fasilitas kesehatan.

Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis (TBC) dan Angka Keberhasilan Pengobatan TB. Pada tahun 2024, cakupan penemuan kasus TBC di Jawa Tengah mampu melebihi target nasional yaitu sebesar 90,5 persen dari target nasional 90 persen (87.706 kasus TBC ditemukan dari target 96.917 kasus TBC). Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain tim TBC provinsi mengirimkan umpan balik capaian program TBC setiap triwulan dilanjutkan dengan *virtual meeting* yang mengundang kepala bidang, subkoordinator dan tim TBC kabupaten/kota; pelaksanaan kegiatan sisir data kasus TBC di rumah sakit yang dilakukan oleh tim TBC kabupaten/kota dengan dukungan dana *Global Fund* (GF) TB Jawa Tengah; validasi data TBC tingkat kabupaten/kota dan provinsi dengan dukungan dana GF TB Jawa Tengah; mendorong pelibatan klinik/Tempat Praktek Mandiri Dokter (TPMD) untuk melaporkan secara mandiri melalui Sistem Informasi Tuberkulosis. Sedangkan angka *treatment success rate* (TSR) Provinsi Jawa Tengah sebesar 85,9 persen, belum mencapai target sebesar 90 persen (kasus ditemukan pada tahun 2023 sebanyak 79.526; sembuh sebanyak 18.905; pengobatan lengkap sebanyak 49.428). Angka keberhasilan pengobatan pasien TBC menggambarkan kualitas pengobatan tuberkulosis untuk masyarakat. Keberhasilan pengobatan pasien TBC dipengaruhi beberapa faktor antara lain masih terdapatnya stigma di masyarakat yang dapat menyebabkan keengganan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan TBC. Selain itu, pengobatan TBC yang relatif lama (6–9 bulan) menyebabkan pasien frustasi atau bosan minum obat sehingga menyebabkan pengobatan tidak sesuai anjuran yang akan mengakibatkan pasien menjadi resisten, serta rendahnya kepatuhan masyarakat untuk minum obat. Kepatuhan pengobatan apabila kurang dari 90 persen maka akan mempengaruhi kesembuhan. Faktor lainnya disebabkan juga oleh *delay reporting* oleh petugas TBC di fasilitas kesehatan.

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) Jawa Tengah tahun 2024 mencapai angka 98,83 persen atau sejumlah 37.831.220 peserta. Berdasarkan status kepesertaan, persentase peserta aktif sebesar 73,65 persen atau sejumlah 28.194.196 peserta dan peserta nonaktif 74,53 persen atau sejumlah 9.637.024 peserta. Cakupan kepesertaan JKN diharapkan dapat mencakup minimal 95 persen dari total jumlah penduduk yang sifatnya inklusif, untuk semua segmen masyarakat termasuk kelompok disabilitas, kelompok rentan dan kelompok yang terabaikan, tidak bias gender, serta mencakup semua kebutuhan pelayanan dasar yang merata bagi semua individu masyarakat Jawa Tengah.

c. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung penuh terhadap kebijakan Wajib Belajar (WAJAR) 13 tahun yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat. Namun demikian tantangan yang dihadapi cukup berat, dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah belum ada satupun yang mampu mencapai WAJAR 12 tahun atau 13 tahun. Kondisi tersebut dapat dilihat dari pencapaian kinerja **Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia di atas 15 tahun** hanya sebesar 8,47 tahun atau setara kelas 2 SMP. Dari tahun ke tahun baik **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)** maupun **Harapan Lama Sekolah (HLS)** Jawa Tengah selalu meningkat, namun untuk HLS sedikit mengalami perlambatan sejak tahun 2014.

Selain itu, jika dibandingkan Nasional, RLS dan HLS Jawa Tengah masih berada di bawah Nasional. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh masih banyaknya **Anak Tidak Sekolah (ATS) di Jawa Tengah sejumlah 329.748 jiwa.**

RLS penduduk usia di atas 15 tahun dan HLS merupakan indikator yang merepresentasikan partisipasi dan sistem pendidikan, namun belum sepenuhnya menggambarkan kualitas pendidikan. Untuk kualitas pendidikan, dapat digunakan hasil Asesmen Nasional (AN) yang memiliki AKM (Asesmen Kompetensi Minimum), Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar dalam bentuk *platform* Rapor Pendidikan yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) setiap tahun. Rapor pendidikan menghasilkan capaian 29 indikator yang meliputi literasi, numerasi, karakter dan lingkungan belajar yang juga digunakan sebagai kinerja SPM pendidikan.

Tabel berikut merupakan perkembangan kinerja Indikator Utama Pembangunan (IUP) lingkup pendidikan selama tahun 2021-2024.

Tabel 2.9.
Capaian IUP Lingkup Pendidikan Jawa Tengah Tahun 2021-2024

Indikator	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun (Tahun)	8,26	8,38	8,44	8,47
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,77	12,81	12,85	12,86
Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada sesmen nasional untuk:				
a) Literasi Membaca	8,57	45,71	77,14	85,71
b) Numerasi	0,00	0,00	34,29	20,00
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional untuk:				
a) Literasi Membaca	32,87	48,67	64,89	68,50
b) Numerasi	6,15	19,87	48,02	62,69
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	7,16	7,37	7,63	7,82

Sumber: BPS dan Rapor Pendidikan Kemendikdasmen, 2025

Capaian numerasi Jawa Tengah berada di bawah capaian literasi, hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan siswa dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan masih kurang. Tantangan lain adalah tingkat pendidikan masyarakat Jawa Tengah masih rendah, terlihat dari pendidikan tinggi yang ditamatkan. Persentase penduduk 15 tahun ke atas dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi tamatan SD, SMP dan SMA. Sedangkan untuk tamatan perguruan tinggi baik S1 maupun D4 sangat kecil yaitu 7 persen.

Untuk mengetahui kondisi proses pembelajaran yang ramah disabilitas; menjunjung tinggi toleransi dan kesetaraan agama/kepercayaan dan budaya; memperkuat nasionalisme; psikologis yang baik; serta rendahnya perundungan, narkoba dan kekerasan seksual ditunjukkan melalui **Indeks Inklusivitas, Indeks Kebhinekaan dan Indeks Keamanan**. Dari tahun 2021 hingga 2024 capaian rata-

rata untuk jenjang pendidikan menengah dan khusus sebagaimana kewenangan provinsi cenderung fluktuatif, namun untuk **aspek inklusivitas dan keamanan mengalami perkembangan positif.** Hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran sekolah terhadap lingkungan aman dan inklusif serta penguatan regulasi dan kebijakan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan dalam satuan pendidikan.

d. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Kondisi **perlindungan sosial** di Jawa Tengah masih dihadapkan belum akuratnya penerima manfaat dan belum menjangkau seluruh penduduk rentan. Hal ini dikarenakan data belum mutakhir dan belum adanya sistem yang terintegrasi, meskipun dari sisi cakupan telah memadai jika diakumulasikan baik yang berasal dari sumber pembiayaan APBN antara lain Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Sembako, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Jaminan Perlindungan Sosial Ketenagakerjaan, maupun dari APBD antara lain Program Kartu Jateng Sejahtera. Ke depan diharapkan perlindungan sosial dapat menjangkau seluruh penduduk rentan dan secara adaptif saat kondisi darurat dapat menjangkau penduduk terdampak.

Selain itu permasalahan sosial lainnya yang membutuhkan perhatian serius di Jawa Tengah yaitu masih tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Data menunjukkan bahwa periode tahun 2020-2024, PPKS mengalami pasang surut. Tercatat pada tahun 2021, PPKS mencapai puncak tertinggi sebesar 4.654.151 jiwa akibat dampak pandemi Covid-19 naik dari tahun 2020 yang sebesar 4.056.054 jiwa. Namun seiring dengan pulihnya dampak pandemi, PPKS berangsur mengalami penurunan hingga tahun 2024 menjadi sebesar 4.007.316 jiwa. Tantangan penanganan PPKS di Jawa Tengah dihadapkan pada masih terbatasnya kapasitas panti milik provinsi. Tercatat panti sosial dan rumah pelayanan sosial (rumpel) milik provinsi saat ini berjumlah 56 unit (27 panti dan 29 rumpel) dengan total kapasitas 4.610 orang. Kondisi ini tentu masih belum sebanding dengan jumlah populasi PPKS yang ada saat ini. Ke depan perlu untuk terus didorong pelibatan lintas sektor baik pemerintah pusat, kabupaten/kota maupun swasta untuk ikut terlibat dalam penanganan PPKS di Jawa Tengah sesuai kewenangan masing-masing.

Disisi lain, penyandang disabilitas yang memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan, seringkali menghadapi hambatan dalam mengakses pasar kerja. Jumlah angkatan kerja disabilitas Jawa Tengah pada tahun 2024 sebanyak 156.676 orang, dimana yang bekerja di sektor formal sebanyak 22.306 orang, 124.964 orang bekerja di sektor informal, dan 9.406 orang tidak bekerja atau menganggur. Tantangan bagi penyandang disabilitas untuk masuk ke pasar kerja karena masih terbatasnya data disabilitas yang akurat, terbatasnya jumlah pelatihan kerja, serta masih kurangnya kesadaran dunia usaha untuk memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Penguatan kelembagaan dan kapasitas dari Unit Layanan Disabilitas dan kolaborasi lintas sektor perlu dilakukan sebagai upaya mendorong penyandang disabilitas dapat masuk ke pasar kerja.

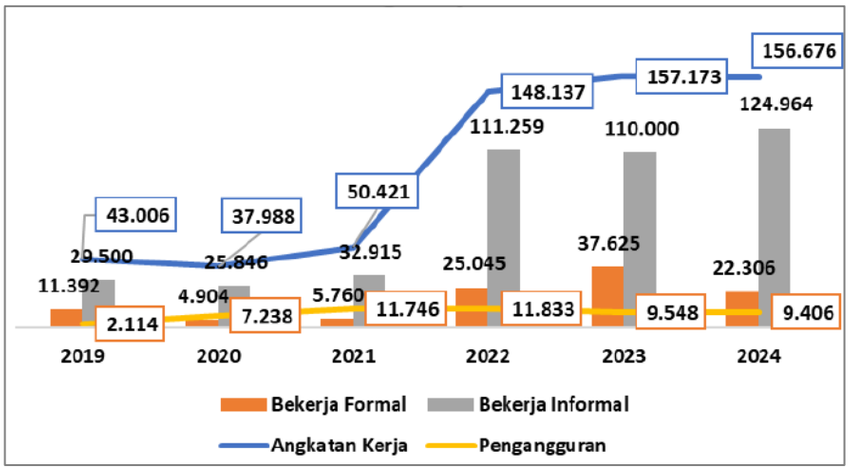

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.20.
Kondisi Ketenagakerjaan Disabilitas di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019-2024

Jaminan sosial ketenagakerjaan juga merupakan instrumen yang penting dalam perlindungan sosial tenaga kerja dari risiko sosial dan ekonomi yang timbul akibat hubungan kerja seperti kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, dan hari tua. Kondisi saat ini realisasi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Jawa Tengah masih rendah yaitu baru sebesar 38,59 persen atau sebanyak 5.284.326 orang dari total 13.693.459 semesta penduduk bekerja. Rendahnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan terutama pada pekerja sektor informal, UMKM, dan pekerja rentan. Kelompok pekerja rentan seperti buruh tani, nelayan, pekerja harian lepas, pedagang kaki lima, ojek *online*, pekerja rumah tangga dan lain sebagainya merupakan kelompok dengan risiko kerja yang tinggi namun kurang tersentuh oleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Rendahnya cakupan ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat Jamsostek dan keterbatasan finansial untuk membayar iuran mandiri. Memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja rentan akan menjadi fokus utama kedepannya serta penguatan kolaborasi lintas sektor terutama dengan pemerintah kabupaten/kota dan perangkat daerah terkait, serta LSM dan asosiasi pengusaha.

e. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter

Kebudayaan menjadi investasi dalam pembangunan masa depan dan peradaban bangsa, sehingga diharapkan dapat memperkukuh jati diri dan karakter bangsa, mempererat persatuan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kinerja **pembangunan kebudayaan** diukur melalui **Indeks Pembangunan Kebudayaan** (IPK). IPK merupakan indikator yang relatif baru dan dirilis pertama kali tahun 2018, memiliki 7 dimensi komprehensif yaitu ekonomi budaya, pendidikan, warisan budaya, ketahanan sosial budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Perkembangan IPK di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2018 hingga 2023 cenderung fluktuatif dan berada di atas capaian nasional. Dari ke-7 dimensi IPK, dimensi budaya literasi cenderung stagnan pada posisi ke-3 atau empat terbawah, menandakan bahwa budaya literasi di Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan.

Demikian pula dengan kinerja aspek ekspresi budaya dan ekonomi budaya di Jawa Tengah yang belum mencapai angka 50 dari rentang nilai 0 hingga 100, meskipun

Jawa Tengah sudah berada di atas capaian nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa wadah atau media untuk mengekspresikan budaya masih terbatas. Selain itu, aspek ekonomi budaya yang masih rendah salah satunya disebabkan karena pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat belum optimal. Pada tahun 2024, sebanyak 21 objek cagar budaya di Jawa Tengah telah dimanfaatkan dari total 242 objek cagar budaya yang telah ditetapkan. Selain cagar budaya, dari 10 jenis Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Jawa Tengah sebanyak 7 (tujuh) jenis OPK yang telah ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) tingkat Nasional dan UNESCO, antara lain 5 (lima) tradisi lisan, 48 adat istiadat, 1 (satu) permainan rakyat, 31 pengetahuan tradisional, 19 teknologi tradisional, 60 seni, dan 1 (satu) ritus.

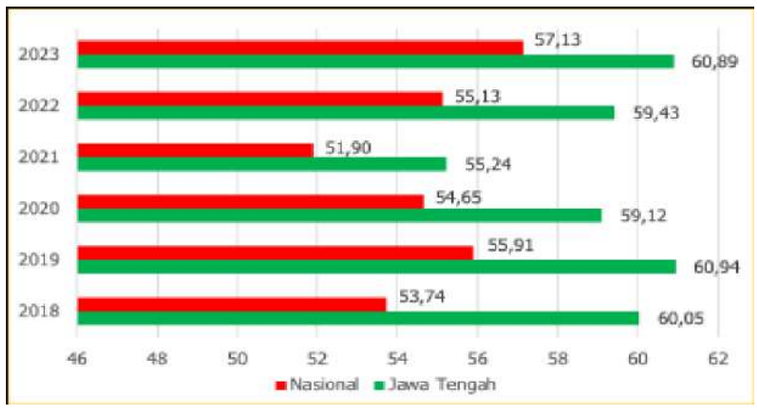

Sumber: ipk.kemendikbud.go.id

Gambar 2.21.
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023

Perwujudan nilai dan karakter masyarakat dimulai dari usia dini melalui keluarga maupun pendidikan formal. Selain skor literasi dan numerasi yang digunakan untuk menunjukkan kualitas pendidikan, Kemendikdasmen melalui Rapor Pendidikan juga menghitung skor **nilai karakter** yang merupakan pengejawantahan internalisasi nilai agama dan budaya dalam membentuk karakter peserta didik. Nilai karakter tersebut menggambarkan tentang bagaimana peserta didik dalam bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai pelajar Pancasila yang mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, gotong-royong, kreativitas, nalar kritis, kebhinekaan global, serta kemandirian. Pada tahun 2022 dan 2023 rata-rata skor nilai karakter tertinggi di jenjang pendidikan menengah umum (SMA) sebesar 58,51 dan terendah di jenjang pendidikan dasar (SD) sebesar 53,96.

Salah satu upaya untuk memperkuat karakter masyarakat adalah dengan memperkuat landasan spiritual, etika, dan moral yang diharapkan akan memberikan dampak pada terciptanya kerukunan umat beragama. Gambaran kerukunan umat beragama di masyarakat Jawa Tengah dilihat dari indikator **Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)**. Dari tahun ke tahun, IKUB Provinsi Jawa Tengah semakin meningkat. Tahun 2021, IKUB Jawa Tengah sebesar 75,12 meningkat menjadi sebesar 78,98 pada tahun 2024. Dari tiga aspek IKUB, aspek kesetaraan cukup tinggi nilainya dibandingkan aspek lainnya. Namun demikian,

aspek kesetaraan mengalami penurunan pada tahun 2024 dengan nilai 80,04 dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 80,09.

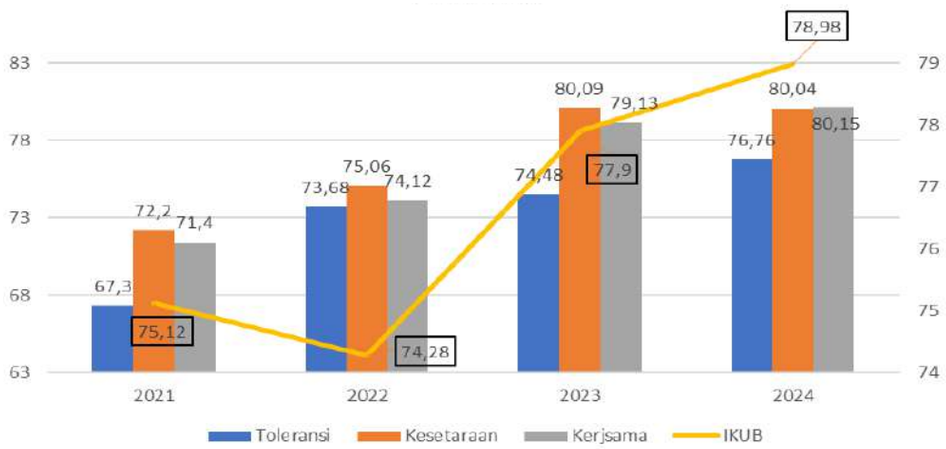

Sumber: Kementerian Agama, 2025

Gambar 2.22.
Capaian IKUB Jawa Tengah Beserta Dimensinya Tahun 2021-2024

f. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Salah satu pendekatan penting dalam pembentukan sumber daya manusia berkarakter adalah pendekatan keluarga. Kinerja **pembangunan keluarga** di Jawa Tengah ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang menunjukan peningkatan dari angka 56,10 pada 2021 menjadi 63,9 pada 2024 atau termasuk kategori cukup baik/berkembang dan lebih baik dari nasional. Pembangunan keluarga sebagai unit terkecil dan pintu masuk bagi pembangunan sumber daya manusia menghadapi kondisi yang perlu untuk terus mendapat perhatian.

Pembangunan sumber daya manusia yang berwawasan gender dan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif. Pembangunan gender pada satu dekade terakhir menunjukkan kemajuan yang dicerminkan dari indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang meningkat dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang semakin kecil. **Indeks Pembangunan Gender** (IPG) meningkat dari 92,58 pada tahun 2020 menjadi 93,44 pada tahun 2024 dan lebih baik dibanding nasional. Dari nilai IPG selama tahun 2020-2024, komponen Usia Harapan Hidup (UHH) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan lebih baik dibandingkan laki-laki. Sedangkan, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, perempuan selalu tertinggal dibandingkan laki-laki. Atas kondisi tersebut maka aspek pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesadaran di sektor pendidikan bagi perempuan menjadi kunci agar tercipta kesetaraan gender. Sementara itu bagi laki-laki, pola/gaya hidup yang kurang sehat perlu untuk direduksi agar laki-laki memiliki harapan hidup yang lebih berimbang dibanding perempuan.

Tabel 2.10.
Perkembangan Komponen IPG Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024

Komponen IPG	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)					
Laki-Laki	8,16	8,17	8,31	8,42	8,43
Perempuan	7,24	7,34	7,55	7,62	7,63
Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)					
Laki-Laki	12,70	12,71	12,72	12,76	12,77
Perempuan	12,79	12,93	12,99	13,03	13,04
Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)					
Laki-Laki	72,51	72,61	72,71	72,95	73,13
Perempuan	76,3	76,42	76,53	77,40	77,68
Pengeluaran Per Kapita (Rp Juta)					
Laki-Laki	15,031	15,253	15,606	16,102	16,690
Perempuan	9,274	9,805	10,098	10,513	10,92

Sumber: BPS, 2024

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menyempit dari 0,370 pada tahun 2020 menjadi 0,308 pada tahun 2024. Pada komponen pembentuk IKG dimensi kesehatan mengalami perkembangan yang membaik yaitu proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) menurun dari 0,041 pada tahun 2020 menjadi 0,018 pada tahun 2024 dan proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20) juga menurun dari 0,254 di tahun 2020 menjadi 0,249 pada tahun 2024. Dari sisi pemberdayaan, keterwakilan legislatif perempuan mengalami perkembangan pasang surut pada rentang yang masih di kategori rendah yaitu dibawah 30 persen. Tercatat persentase keterwakilan perempuan di legislatif tahun 2024 sebesar 17,65 persen, mengalami penurunan dibanding tahun 2023 (22 persen). Hasil pemilu legislatif tahun 2024 ternyata belum mampu meningkatkan katerwakilan perempuan di legislatif, meskipun upaya sosialisasi dan peningkatan literasi pentingnya keterwakilan perempuan di parlemen terus dilakukan dewasa ini, Sedangkan persentase penduduk dengan minimal SMA ke atas, perempuan masih tertinggal dibanding laki-laki. Tercatat tahun 2024, laki-laki sebesar 35,72 persen sedangkan perempuan 29,61 persen. Namun dari sisi perkembangannya tercatat kontribusi perempuan mengalami peningkatan sebesar 2,23 persen yaitu dari 26,97 persen pada tahun 2020 meningkat menjadi 29,61 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini melebihi laki-laki yang hanya meningkat sebesar 1,97 persen dari 32,85 persen pada tahun 2020 menjadi 35,72 persen pada tahun 2024. Peningkatan pada kontribusi perempuan tersebut menyiratkan akan harapan bahwa perempuan pelan tapi pasti akan mulai mengejar ketertinggalannya dengan laki-laki di sektor pendidikan. Sementara itu pada dimensi pasar tenaga kerja, perkembangan angka TPAK Perempuan meskipun naik namun masih tetap tertinggal dibanding laki-laki. TPAK Perempuan naik sebesar 1,38 persen dari 57,54 persen pada tahun 2020 menjadi 61,82 persen pada tahun 2024. Sedangkan laki-laki naik 2,84 persen dari 81,68 persen pada tahun 2020 menjadi 85,66 persen pada tahun 2024. TPAK perempuan baik nilai maupun peningkatannya masih tertinggal dibanding laki-laki. Hal ini

menunjukkan perempuan di sektor ketenagakerjaan masih sulit untuk bersaing dengan laki-laki.

Tabel 2.11.
Perkembangan Komponen Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Komponen IKG		2020	2021	2022	2023	2024
Dimensi Kesehatan Reproduksi						
Proporsi perempuan yang melahirkan anak lahir hidup tidak di fasilitasi kesehatan (MTF) (%)		0,041	0,042	0,042	0,027	0,018
Proporsi 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berusia <20 tahun (MHPK20) (%)		0,254	0,267	0,264	0,260	0,249
Dimensi Pemberdayaan						
Persentase penduduk dengan pendidikan minimal SMA (%)	laki-laki	32,85	32,26	34,14	34,82	35,72
	perempuan	26,97	26,82	28,79	29,20	29,61
Persentase anggota legislatif (%)	laki-laki	81,2	81,67	80	78	82,35
	perempuan	18,8	18,33	20	22	17,65
Dimensi Ekonomi						
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) (%)	laki-laki	81,68	81,94	83,74	84,52	85,66
	perempuan	57,54	57,58	58,31	58,92	61,82

Sumber: BPS, 2024

Meskipun IPG dan IKG telah menunjukkan kinerja yang membaik namun masih terjadi kesenjangan dalam hal akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan utamanya pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta keterwakilan pada posisi strategis. Prasyarat mewujudkan kesetaraan gender yang ideal dimana perempuan menjadi berdaya di Jawa Tengah menghadapi fakta yang cukup pelik jika melihat berbagai isu yang melingkupi perempuan seperti diskriminasi, kekerasan, budaya patriarki, beban ganda, ketimpangan pendapatan dan posisi lemah lainnya dibanding laki-laki. Data menunjukkan bahwa korban kekerasan perempuan sejak tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu dari 809 korban menjadi 1.019 pada tahun 2024. Tentu hal ini perlu menjadi perhatian ke depan utamanya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan serta melakukan berbagai upaya untuk mereduksi posisi lemah perempuan.

Pembangunan **kualitas hidup anak** dihadapkan pada kondisi yang belum sepenuhnya ideal dengan masih tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak, perkawinan usia anak, *bullying*, pekerja anak, keterlantaran, anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan perilaku salah lainnya. Data menunjukkan bahwa korban kekerasan anak kurun waktu 2020-2024 mengalami peningkatan yaitu dari 1.197 korban tahun 2020 menjadi 1.349 anak di tahun 2024, dimana kasus terbesar yang dialami anak adalah korban kekerasan seksual (48,9 persen), psikis (20,3 persen), fisik (17,7 persen), dan penelantaran (6,6 persen). Sementara itu dilansir dari data Pengadilan Tinggi Agama Semarang, angka perkawinan usia dibawah 19 tahun masih terus terjadi di Jawa Tengah meskipun dalam

perkembangannya selama periode 2020-2024 mulai menurun seiring dengan kampanye "*Jo Kawin Bocah*". Tercatat tahun 2020, angka pernikahan dibawah 19 tahun sebesar 12.972 pernikahan, meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 13.595 pernikahan dan berangsur menurun hingga pada tahun 2024 menjadi sebesar 7.903 pernikahan. Pernikahan usia di bawah 19 tahun dominan dilakukan oleh perempuan yang mengambil porsi 90an persen dibanding laki-laki. Tentu ini mengindikasikan posisi lemah perempuan dan dampak yang diakibatkan akan lebih berat bagi perempuan karena mereka harus melahirkan dan beban psikologis lainnya. Selaras dengan kondisi data di atas maka perkembangan Indeks Perlindungan Anak (IPA) juga mengalami perkembangan yang pasang surut selama periode 2019 hingga 2023. Tercatat tahun 2019 IPA sebesar 70,23 menurun menjadi 64,34 di tahun 2023. Meskipun masih rendah dari capain tahun 2019, IPA tahun 2023 telah mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 63,20. Dari sisi pemenuhan hak nak, tergambar dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dimana capaian tahun 2019 sebesar 68,71 menurun pada tahun 2023 menjadi sebesar 60,76. Sedangkan pada Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) tercatat tahun 2019 sebesar 78,34 menurun menjadi 77,86 pada tahun 2023.

Selain itu juga, kondisi **pembangunan kualitas hidup pemuda** dapat ditunjukkan dari capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Terdapat 5 (lima) domain IPP yaitu pendidikan; kesehatan dan kesejahteraan; lapangan dan kesempatan kerja; partisipasi dan kepemimpinan; serta gender dan diskriminasi. IPP Jawa Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 55,50 dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 53,83. Namun capaian tahun 2023 tersebut masih berada di bawah angka IPP Nasional yang sebesar 56,33.

Dari lima domain IPP, kontribusi nilai IPP Jawa Tengah ditopang oleh domain kesehatan dan kesejahteraan yang mengalami peningkatan sebesar 5 poin dibandingkan tahun 2022. Selain itu, domain partisipasi dan kepemimpinan juga mengalami kenaikan yaitu 46,66 pada tahun 2023 (43,33 pada tahun 2022). Domain lainnya seperti domain pendidikan, domain lapangan dan kesempatan kerja serta domain gender dan diskriminasi mengalami stagnasi. Hal ini menjadi perhatian lebih untuk pemerintah daerah.

Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai IPP yang bervariasi pada setiap domain jika dibandingkan dengan IPP nasional pada tahun 2023. Domain yang memiliki nilai rata-rata di bawah nasional yaitu domain kesehatan dan kesejahteraan yaitu 62,5 sedangkan rata-rata nasional sebesar 70. Domain partisipasi dan kepemimpinan mendapatkan nilai lebih tinggi yaitu 46,67 dibandingkan dengan rata-rata nasional hanya 43,33. Domain yang nilainya sama dengan rata-rata nasional yaitu domain pendidikan, domain lapangan dan kesempatan kerja serta domain gender dan diskriminasi. Secara umum, meskipun perolehan domain kesehatan dan kesejahteraan mengalami kenaikan namun masih perlu diperhatikan oleh pemerintah karena nilai tersebut masih di bawah capaian nasional.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

a. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kinerja pembangunan manusia secara umum saat ini diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM direpresentasikan dengan tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Usia Harapan Hidup (UHH) serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Namun dalam perkembangannya, IPM dianggap belum dapat menggambarkan tingkat produktivitas SDM masa depan dari anak yang lahir hari ini relatif terhadap patokan kesehatan penuh dan pendidikan lengkap. Untuk itu, salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur hal tersebut adalah Indeks Modal Manusia (IMM) yang merupakan pendekatan dari *Human Capital Index* (HCI) yang bersumber dari *World Bank*. **Capaian IMM** Jawa Tengah tahun 2020 berada di atas nasional dengan nilai sebesar 0,55, sementara untuk nasional sebesar 0,54. Dalam indikator IMM, terdapat salah satu komponen yang juga merupakan komponen IPM yaitu HLS. Sedangkan untuk faktor pembentuk IMM dari ketahanan hidup dan kesehatan diukur dari indikator AKBA (Angka Kematian Balita), angka kematian pada 15 hingga 16 tahun, dan prevalensi *stunting*.

Capaian **IPM** Jawa Tengah sejak tahun 2010 hingga tahun 2024 terus membaik, meskipun masih dibawah angka nasional. Namun demikian rata-rata pertumbuhannya lebih baik jika dibandingkan nasional.

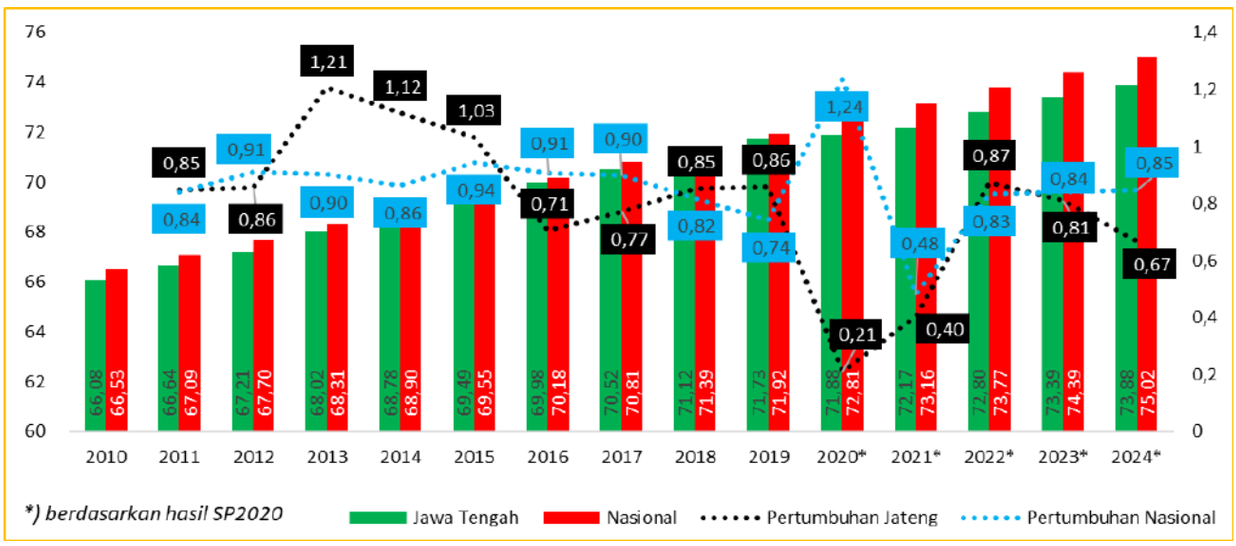

Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.23.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010-2024

Tingkat pendidikan dapat menunjukkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Karakteristik **penduduk bekerja** di Jawa Tengah, lebih dari 61 persen merupakan lulusan SMP ke bawah. Hal ini menunjukkan kualitas penduduk bekerja yang masih rendah atau *low skill*.

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.24.
Karakteristik Penduduk Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024

b. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Struktur ekonomi Jawa Tengah dari tahun 1993 didominasi oleh sektor industri pengolahan sebagai penyumbang perekonomian terbesar di Jawa Tengah. Sektor berikutnya adalah perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Pergeseran struktur ekonomi Jawa Tengah terjadi sejak tahun 1992 yang mana sektor industri pengolahan menjadi sektor utama dalam struktur ekonomi Jawa Tengah menggeser sektor pertanian. Sektor pertanian meskipun mengalami penurunan namun masih menduduki peringkat kedua dan masih berkontribusi di kisaran 13 persen.

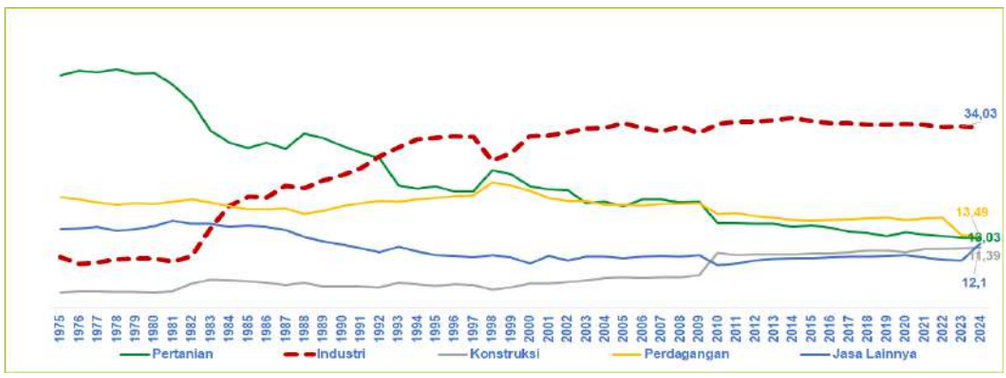

Sumber: BPS, 2025

Gambar 2.25.
Struktur Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 1975-2024 (Persen)

Hingga tahun 2023 dapat dilihat kontribusi sektor pertanian terhadap nasional dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2013-2023) terus mengalami kenaikan yang menunjukkan peran Jawa Tengah dalam mendukung ketahanan pangan nasional menjadi penting. Sejalan dengan kebijakan pusat, Jawa Tengah akan terus mengembangkan pertanian termasuk industri pengolahan pangan. Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang sangat penting dalam struktur perekonomian Jawa Tengah, dimana rata-rata kontribusi yang diberikan oleh sektor ini selama 10 tahun terakhir mencapai sekitar 34 persen per tahun. Oleh karenanya kinerja sektor industri pengolahan sangat menentukan kinerja perekonomian Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Jika dibandingkan

dengan sektor industri pengolahan nasional, kontribusi sektor industri pengolahan Jawa Tengah baru sekitar 0,6 persen.

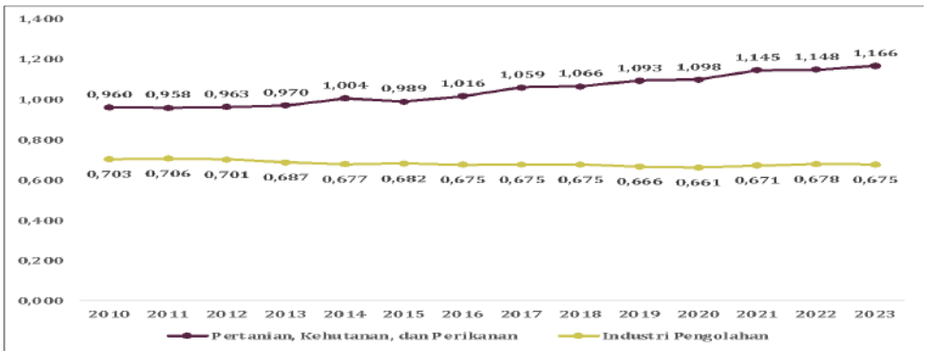

Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.26.
Kontribusi Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan Provinsi Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2010-2023 (Persen)

Kebijakan pengembangan industri pengolahan di Jawa Tengah dilakukan sejalan dengan arah kebijakan nasional. Kebijakan nasional untuk mengembangkan kawasan strategis industri Pantura Jawa Tengah (klaster industri alat angkutan dan kendaraan, industri tekstil dan pakaian jadi, industri pengolahan tembakau, industri *furniture*, industri kayu dan barang dari kayu, industri makanan dan minuman, industri kriya dan ekonomi kreatif dan menjadikan Jawa Tengah sebagai bagian dari rantai nilai industri nasional, maka kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke depan perlu dilakukan optimalisasi pengembangan industri pengolahan di Jawa Tengah sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki untuk meningkatkan kontribusi industri pengolahan baik di Provinsi maupun Nasional. Berdasarkan pengategoriannya, nilai PDRB sektor industri pengolahan terbesar tahun 2023 adalah industri makanan dan minuman sebesar 43,68 persen, disusul industri tembakau sebesar 18,97 persen, industri tekstil dan pakaian jadi 7,64 persen. Berikut adalah pemetaan potensi industri pengolahan makanan dan tekstil serta pakaian jadi di Jawa Tengah.

Sumber: RPIP Jawa Tengah Tahun 2017-2037, 2025 (diolah)

Gambar 2.27.
Peta Potensi Industri Pengolahan Makanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 - 2037

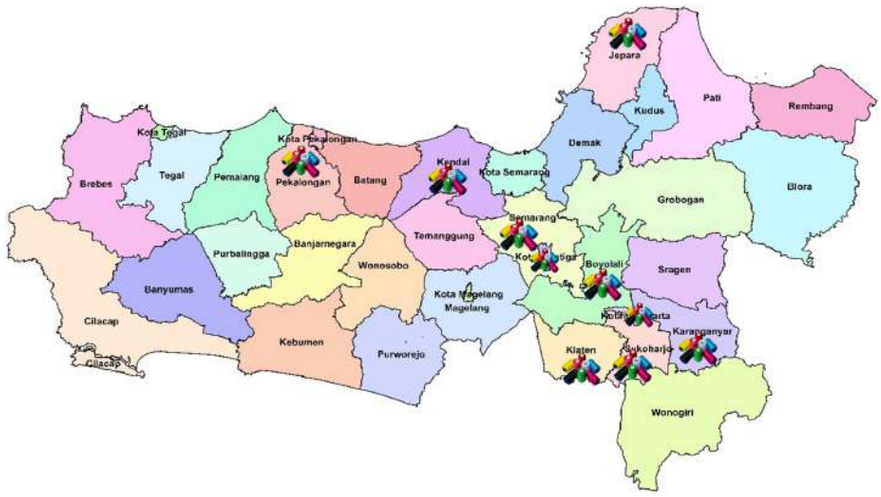

Sumber: RPIP Jawa Tengah Tahun 2017-2037, 2025 (diolah)

Gambar 2.28.
Peta Potensi Industri Pengolahan Tekstil dan Pakaian Jadi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037

Jika dilihat dari sektor pertanian secara luas, hampir seluruh wilayah Jawa Tengah memiliki komoditas unggulan yang dapat dilihat dari jumlah produksinya pada tahun 2023. Hal ini mendukung arah kebijakan Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dimana komoditas unggulan tersebut dapat diintervensi melalui kebijakan hilirisasi industri pengolahan pangan yang lebih mengutamakan potensi lokal. Berikut adalah peta potensi pertanian secara geografis di Jawa Tengah pada tahun 2023.

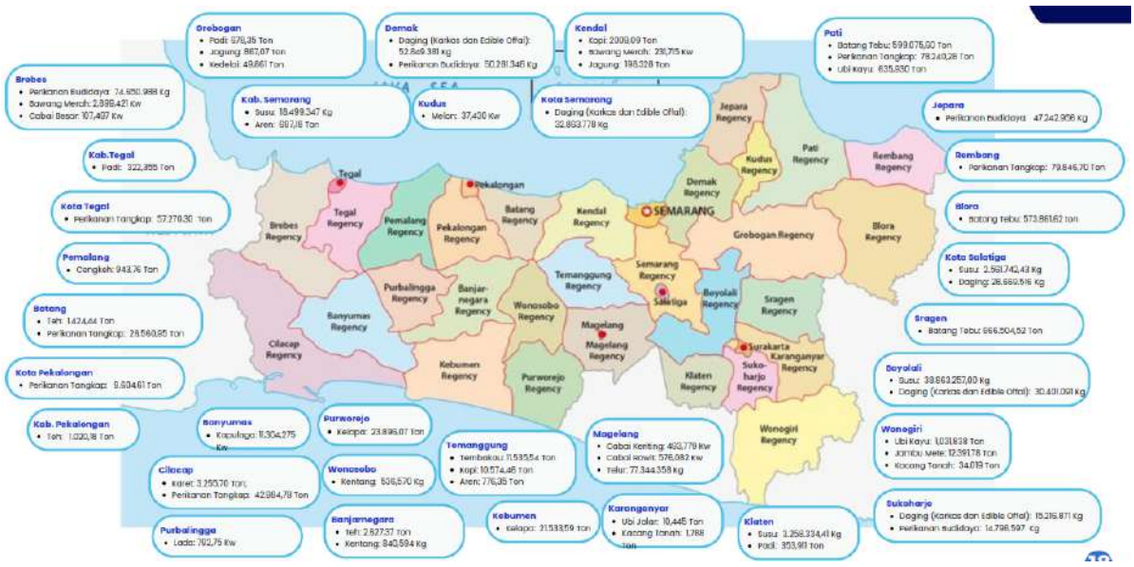

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2024 (diolah)

Gambar 2.29.
Peta Potensi Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Komoditas utama sektor pertanian yaitu subsektor tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai). Pada periode tahun 2018-2023, komoditas tanaman pangan cenderung mengalami penurunan. Produksi komoditas padi mengalami penurunan dikarenakan adanya penurunan lahan dan perubahan standar pengukuran produksi komoditas padi. Produksi komoditas jagung mengalami fluktuasi tergantung pada iklim, ketersediaan air, dan benih. Produksi komoditas

kedelai mengalami tren menurun dikarenakan menurunnya minat petani terkait daya saing kedelai di pasar karena adanya kedelai impor sehingga menyebabkan menurunnya luas tanam kedelai.

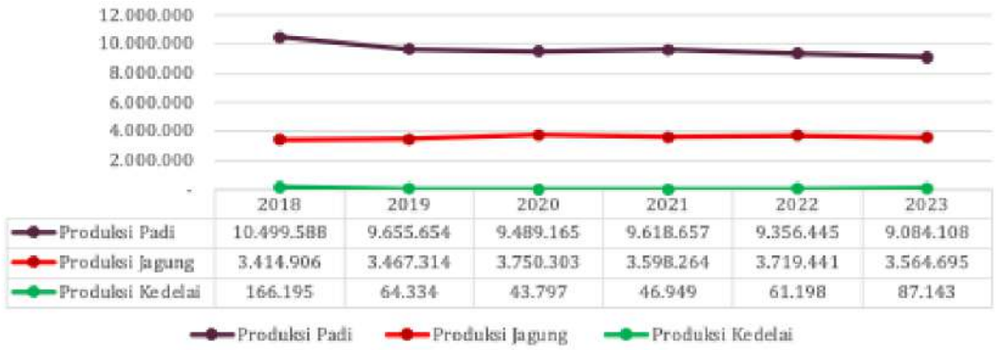

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi Padi	10.499.588	9.655.654	9.489.165	9.618.657	9.356.445	9.084.108
Produksi Jagung	3.414.906	3.467.314	3.750.303	3.598.264	3.719.441	3.564.695
Produksi Kedelai	166.195	64.334	43.797	46.949	61.198	87.143

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.30.
Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Pada subsektor peternakan, produksi daging mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023-2024 dibandingkan tahun 2022. Produksi telur juga mengalami peningkatan pada tahun 2023, namun turun pada tahun 2024. Sedangkan produksi susu mengalami penurunan pada tahun 2023, dan kembali naik pada tahun 2024. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kondisi adanya serangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak terutama sapi perah. Perkembangan produksi daging, telur, dan susu ditunjukan pada gambar berikut.

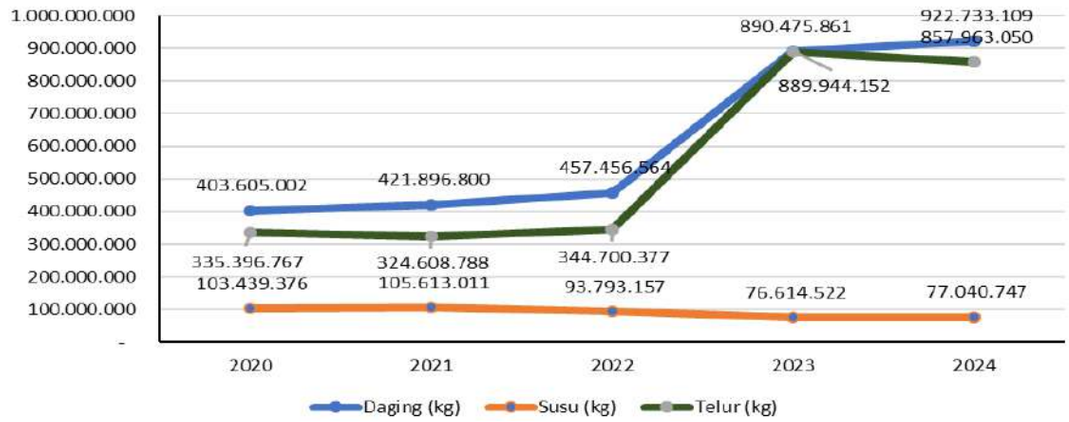

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.31.
Produksi Daging, Telur, dan Susu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Pada subsektor perikanan, produksi perikanan yang merupakan akumulasi dari produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya menunjukkan gambaran produksi pada tahun 2020-2024 cukup fluktuatif tapi cenderung meningkat. Produksi perikanan budidaya menunjukkan tren meningkat pada tahun 2020-2024, sedangkan produksi perikanan tangkap cenderung fluktuatif. Perkembangan produksi perikanan ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

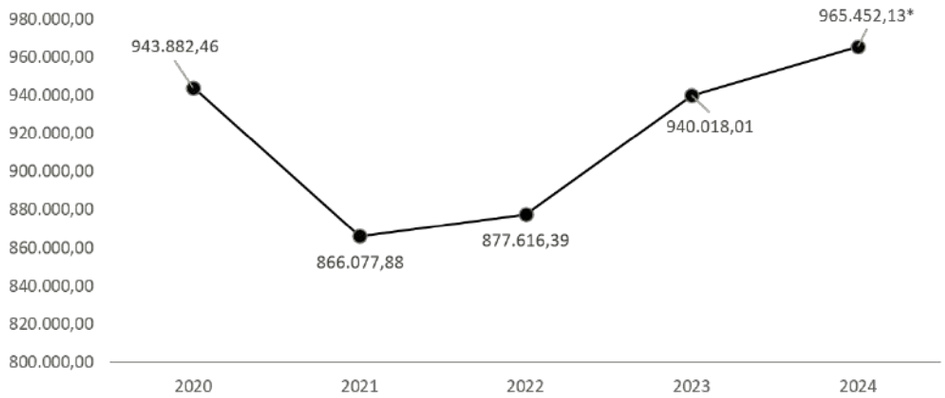

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.32.
Produksi Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 (Ton/Tahun)

Produk/sektor unggulan daerah perlu mendapatkan perhatian lebih banyak melalui riset dan inovasi. Pemetaan sektor unggulan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta rantai pasok dan pasarnya sudah dilakukan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing, antara lain melalui pembinaan klaster produk unggulan kolaborasi pemda dan pihak penunjang/ pakar/perguruan tinggi dalam bentuk Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Di sisi lain, penentuan produk unggulan antar daerah belum sinkron, dan rencana aksi penguatan sektor unggulan daerah yang sistematis juga belum tersusun. Jawa Tengah memerlukan kolaborasi inovasi produk unggulan daerah antara pemangku kepentingan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi, bisnis, dan lembaga penunjang lainnya menjadi penting.

Capaian kapabilitas inovasi (komposit Indeks Daya Saing Daerah/IDSD) Jawa Tengah sebagai salah satu ukuran kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah, mengalami peningkatan cukup baik dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, nilai kapabilitas inovasi Jawa Tengah sebesar 4,64 meningkat 0,13 dari tahun sebelumnya.

Selain itu, produktivitas sektor-sektor ekonomi salah satunya juga didorong melalui peningkatan **produktivitas BUMN dan BUMD**. Produktivitas BUMN dan BUMD diharapkan meningkat dan dapat berperan sebagai *value creator* maupun *agent development*. Salah satu indikator untuk mengukur produktivitas BUMN dan BUMD adalah *Return on Asset* (ROA). ROA dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Pada kurun waktu 2020–2023, ROA seluruh BUMD di wilayah Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, nilai ROA BUMD berada pada nilai 1,89 persen, dan kemudian pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi -4,37 persen karena adanya penurunan signifikan pada aset dan laba bersih. ROA BUMD kembali meningkat menjadi 3,19 persen pada tahun 2022 dan 3,29 persen pada tahun 2023 seiring dengan peningkatan aset dan laba bersih pada tahun tersebut. Perkembangan ROA BUMD di Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.

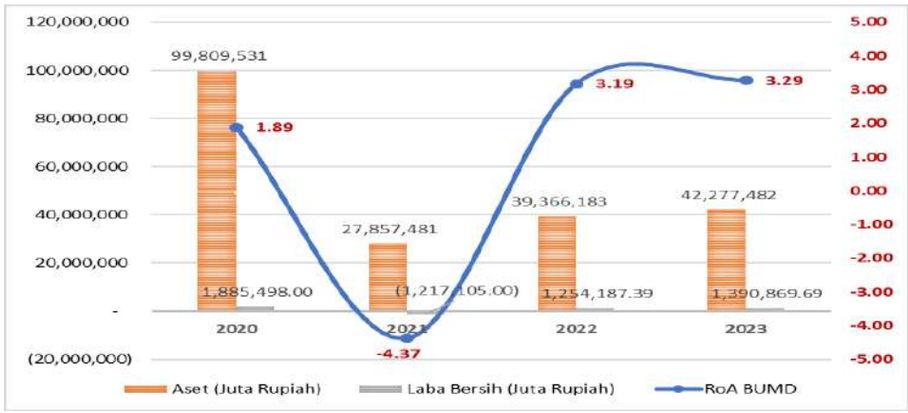

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020-2023

Gambar 2.33.
Nilai Aset, Laba Bersih, dan *Return on Assets* (ROA) BUMD di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2023

Tingkat produktivitas tenaga kerja Jawa Tengah tahun 2024 sebesar 55,46 juta rupiah naik jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 55,16 juta rupiah. Peningkatan produktivitas tenaga kerja merupakan hal yang penting karena menunjukkan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk yang menjadi sumber keunggulan kompetitif suatu perusahaan atau daerah, serta memungkinkan perusahaan menghasilkan lebih banyak *output* dengan jumlah tenaga kerja yang sama, sehingga keuntungan perusahaan lebih besar. Jika produktivitas tenaga kerja suatu sektor tinggi akan diikuti oleh pendapatan pekerja yang semakin tinggi, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Produktivitas tenaga kerja yang tinggi juga dapat berdampak pada peningkatan perekonomian suatu daerah, karena *output* yang dihasilkan akan semakin tinggi. Selain itu, sektor dengan produktivitas yang tinggi akan menarik investasi (bisnis baru/ekspansi) sehingga lapangan pekerjaan akan semakin meningkat.

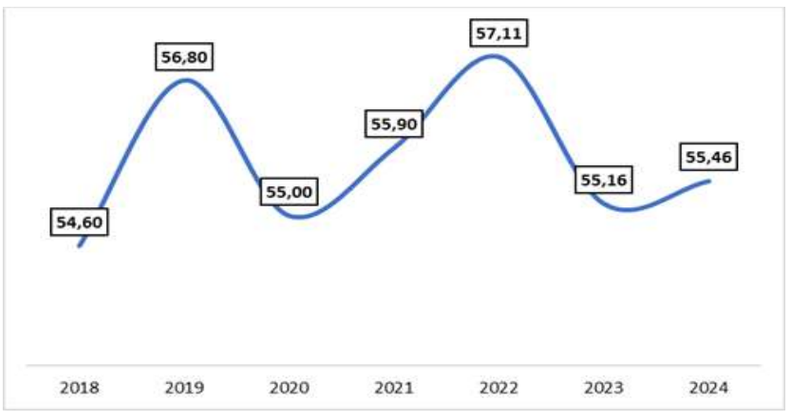

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.34.
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024 (Juta Rupiah)

Apabila dibandingkan dengan tingkat produktivitas tenaga kerja provinsi lain di Pulau Jawa pada tahun 2024, tingkat produktivitas Jawa Tengah berada di urutan terbawah dari enam provinsi. Tingkat produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 421,13 juta rupiah atau sebanyak enam kali lipat lebih besar dibanding dengan Jawa Tengah.

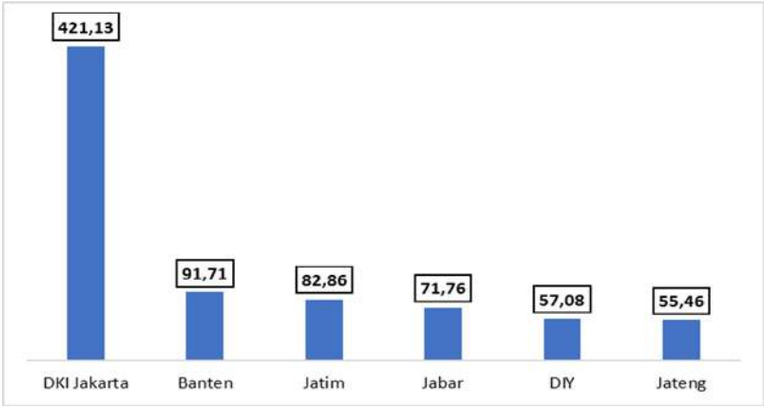

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.35.
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi se-Pulau Jawa
Tahun 2024 (Juta Rupiah)

Salah satu upaya untuk peningkatan produktivitas ekonomi adalah dengan penguatan **ekonomi dan keuangan syariah**. Kebijakan penguatan ekonomi dan keuangan syariah diarahkan dengan mengakomodasi keseluruhan aspek ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Secara nasional, kebijakan pembangunan ekonomi dan keuangan syariah dilakukan melalui antara lain peningkatan posisi keuangan syariah Indonesia di tingkat global, peningkatan peran keuangan sosial syariah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi, penguatan ekosistem industri halal utamanya makanan minuman, fesyen muslim, industri kosmetik dan obat-obatan, pariwisata dan ekonomi kreatif, penguatan rantai nilai industri, kewirausahaan dan UMKM industri halal, penguatan regulasi, kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah, serta infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.

Implementasi ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Tengah masih mengalami berbagai hambatan yaitu diantaranya rendahnya sertifikasi halal di kalangan UMKM, keterbatasan fasilitas pendukung, implementasi kebijakan yang belum merata, dan lemahnya sinergi dan literasi masyarakat. Berbagai program dan kegiatan dilakukan untuk terus mendukung penguatan ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya industri halal, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi pesantren, peningkatan literasi dan edukasi keuangan syariah, pemanfaatan keuangan sosial syariah, pelatihan juru sembelih halal, rumah potong hewan halal, dan sertifikasi produk halal.

Sertifikasi produk halal merupakan proses verifikasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk makanan, minuman, atau lainnya memenuhi standar halal sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya sertifikat halal maka dapat meningkatkan kepercayaan konsumen muslim terhadap produk yang mereka konsumsi, meningkatkan kualitas produk dengan memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar yang ketat, dan membuka peluang pasar yang lebih luas, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim.

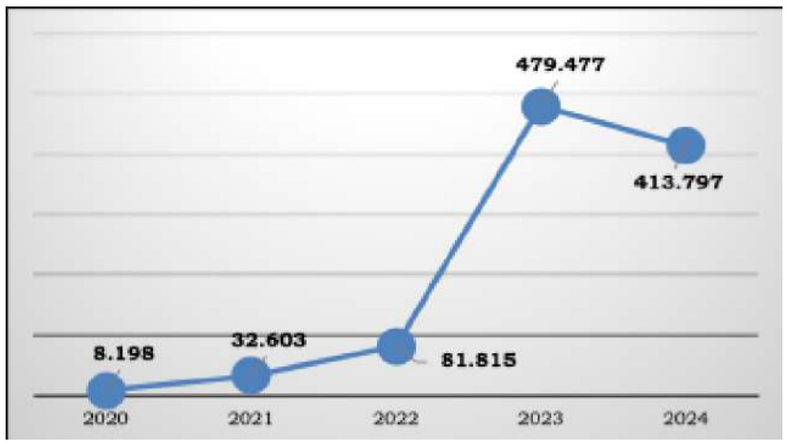

Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), 2020-2024

Gambar 2.36.
Jumlah Produk Tersertifikasi Halal
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Sejak tahun 2020 jumlah produk yang tersertifikasi halal di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan, bahkan Jawa Tengah menjadi provinsi kedua dengan jumlah produk halal terbanyak se-Indonesia. Data tersebut mencakup total jumlah produk yang tersertifikasi halal di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah baik yang melakukan pendaftaran secara reguler maupun *selfdeclare*, serta meliputi skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro.

Selanjutnya, perkembangan penguatan keuangan syariah di Jawa Tengah dapat dilihat melalui perkembangan aset perbankan syariah dan pemanfaatan dana sosial di Jawa Tengah. Aset perbankan syariah diharapkan dapat sebagai *enabler* pengembangan industri dan UMKM halal.

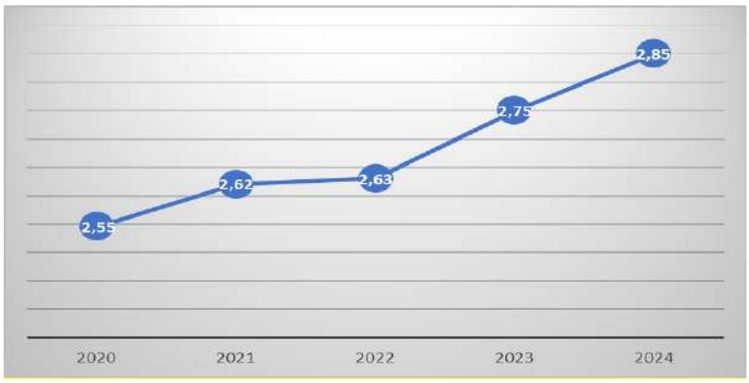

Sumber: OJK, BPS, diolah oleh Bappenas, 2020-2024

Gambar 2.37.
Aset Perbankan Syariah/PDRB di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2024

Aset perbankan syariah di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan, menunjukkan tingkat penetrasi dan kontribusi perbankan syariah dalam perekonomian daerah semakin membaik. Peningkatan rasio aset perbankan syariah membutuhkan dukungan multipihak melalui program peningkatan inklusi dan literasi keuangan syariah, intervensi terhadap BUMD sektor keuangan syariah dan lainnya.

Pemanfaatan dana sosial diukur melalui Indeks Zakat Nasional (IZN). IZN bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai pengelolaan zakat,

membantu BAZNAS dalam merancang kebijakan, dan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan zakat secara nasional. IZN Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 dalam kategori stabil pada angka indeks 0,59.

c. Penerapan Ekonomi Hijau

Pembangunan ekonomi Jawa Tengah sejauh ini sudah mengarah pada prinsip-prinsip ekonomi hijau. Jika dilihat dari indeks **ekonomi hijau** yang meliputi pilar lingkungan, ekonomi, dan sosial, capaian indeks ekonomi hijau Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2020-2023 berada pada kategori Baik Tier 1 meski dari sisi indeksnya mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, capaian indeks ekonomi hijau Jawa Tengah sebesar 51,39 meningkat pada tahun 2021 menjadi 54,79 dan menurun pada tahun 2022 menjadi 51,44 dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 52,17.

d. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memerlukan peningkatan produktivitas sektor-sektor produktif serta penguatan peran sektor eksternal yang dilakukan melalui perdagangan domestik, antar wilayah, dan ekspor untuk meningkatkan partisipasi Jawa Tengah dalam rantai nilai global. Integrasi ekonomi domestik dan global tersebut salah satunya tergambar melalui indikator **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).**

Dari sisi nominal, PMTB Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan dari Rp417,82 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp555,01 triliun pada tahun 2024. Meski demikian dari sisi pertumbuhan PMTB mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yang mencapai 6,84 persen sempat melambat pada tahun 2022 menjadi 1,99 persen kemudian berturut-turut meningkat pada tahun 2023 dan tahun 2024 menjadi 4,23 persen dan 6,55 persen. Dalam konteks perannya terhadap PDRB, kontribusi PMTB pada tahun 2020 sebesar 31,01 persen, sedikit mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 31,78 persen namun mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi sebesar 30,69 persen dan tahun 2023 menjadi sebesar 29,99 persen. Kontribusi PMTB terhadap PDRB tersebut kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi sebesar 30,53 persen.

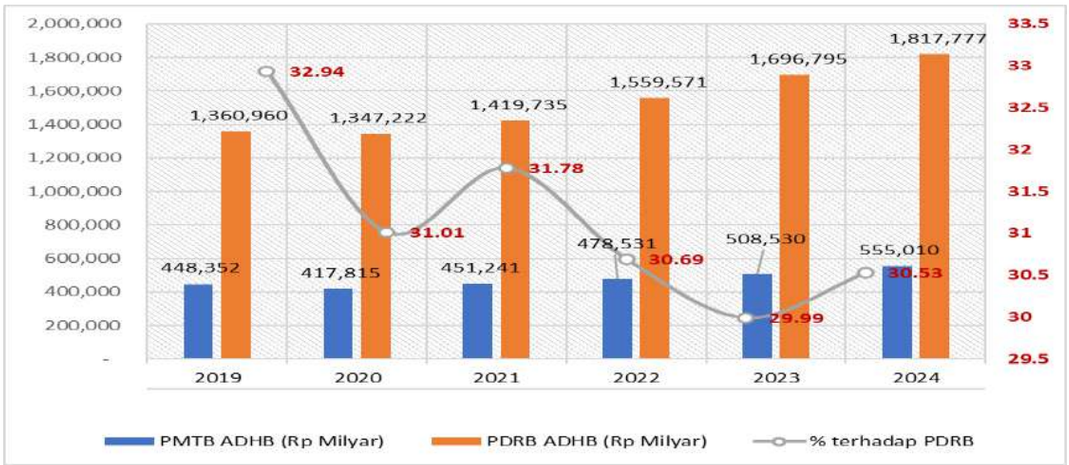

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 2.38.
Kontribusi PMTB Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019–2024 (Persen)

Selain itu, kondisi tersebut ditunjukkan dengan **nilai Ekspor Barang dan Jasa** di Jawa Tengah. Selama lima tahun, nilai ekspor barang dan jasa meningkat kecuali pada tahun 2020 yang menurun karena pengaruh dari pandemi Covid-19 dan pada tahun 2023 dikarenakan terjadi perlambatan ekonomi di negara-negara tujuan utama ekspor. Nilai ekspor tahun 2022 tercatat sebesar US$11.777,91 juta, menurun menjadi sebesar US$10.229,18 juta pada tahun 2023, dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi sebesar US$11.181,64 juta. Ekspor Jawa Tengah terdiri dari ekspor migas dan nonmigas dengan proporsi lebih besar pada ekspor nonmigas, yang selama kurun waktu tahun 2018-2020 trennya sejalan dengan tren nilai ekspor total di Jawa Tengah. Nilai ekspor nonmigas Jawa Tengah pada tahun 2022 tercatat sebesar US$8.11.210,92 juta, menurun menjadi sebesar US$9.868,62 juta pada tahun 2023, dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi sebesar US$10.763,68 juta.

e. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi infrastruktur Jawa Tengah semakin membaik dari tahun ke tahun didukung dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung aktivitas masyarakat, dan memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Total panjang jalan kewenangan provinsi adalah 2.440,12 km sesuai SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/2 Tahun 2023. Kondisi jalan sesuai standar (lebar 7 meter dengan MST 8 ton) sampai dengan tahun 2024 adalah 47,09 persen. Sementara kondisi permukaan jalan mantap sebesar 91,46 persen yang ditunjukkan dari kondisi permukaan jalan baik 64,94 persen, sedang 26,53 persen, rusak ringan sebesar 5,41 persen, dan rusak berat sebesar 3,12 persen.

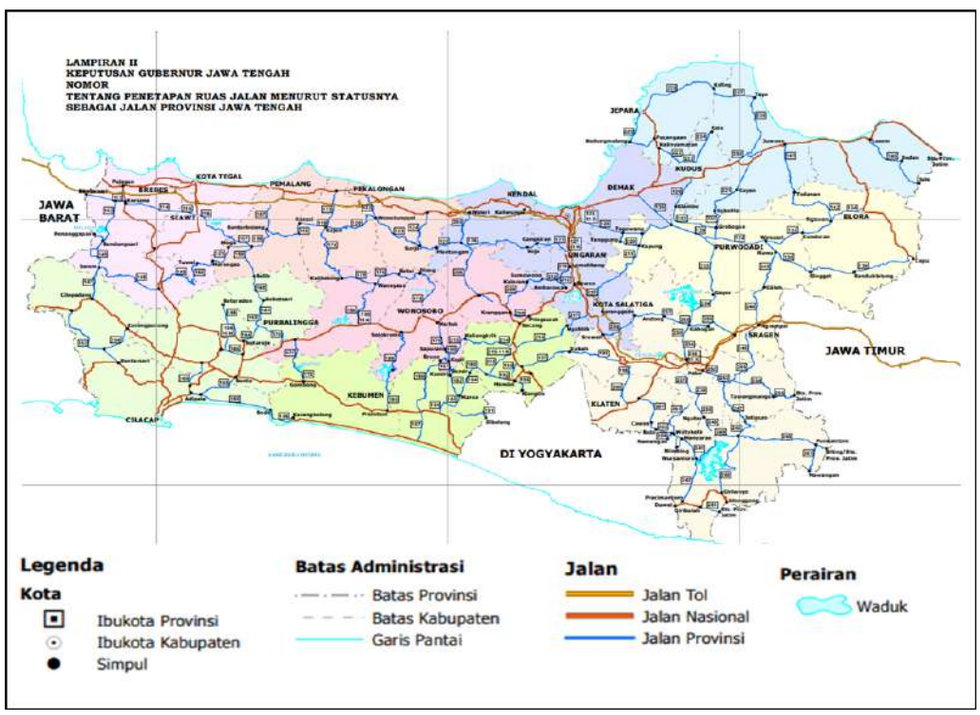

Sumber: Dinas PU BMCK Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.39.
Ruas Jalan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Menurut Statusnya

Tabel 2.12.
Kondisi Permukaan Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024

Tahun	Kondisi								Panjang Jalan Provinsi
	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km
2020	1.869,69	77,75	312,13	12,98	222,93	9,27	0,000	0,00	2.404,74
2021	1.871,61	77,83	313,45	13,03	219,682	9,14	0,000	0,00	2.404,74
2022	2.010,27	83,60	213,89	8,89	68,33	2,84	112,25	4,67	2.404,74
2023	1.716,04	70,33	487,79	19,99	124,32	5,09	111,97	4,59	2.440,12
2024	1.584,63	64,94	647,33	26,52	131,92	5,40	76,24	3,12	2.440,12

Sumber: Dinas PU BMCK Provinsi Jawa Tengah, 2024

Konektivitas jaringan transportasi Jawa Tengah dipengaruhi oleh keberadaan simpul transportasi. Untuk simpul transportasi udara, sampai dengan tahun 2024 berdasarkan Tatanan Kebandarudaraan Nasional terdapat 6 bandara yang terdiri dari 2 bandara pengumpul skala pelayanan sekunder (Jenderal Ahmad Yani Semarang dan Adi Soemarmo Boyolali) dan 4 bandara pengumpan (JB. Soedirman Purbalingga, Dewadaru Karimunjawa Jepara, Ngloram Cepu Blora dan Tunggul Wulung Cilacap). Pada tahun 2024, Bandara Jenderal Ahmad Yani dan Adi Soemarmo tidak lagi ditetapkan menjadi Bandara Internasional, namun Bandara Jenderal Ahmad Yani masih bisa melayani penerbangan luar negeri untuk kepentingan menunjang industri perdagangan (kargo internasional) dan Bandara Adi Soemarmo masih bisa melayani penerbangan untuk kepentingan ibadah umroh. Hasil upaya pendorongan pengembalian status internasional, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 26 Tahun 2025 tanggal 25 April 2025 Bandara Ahmad Yani Semarang kembali ditetapkan sebagai Bandara Internasional.

Sementara untuk simpul transportasi laut, terdapat 14 pelabuhan yang terdiri dari 1 pelabuhan utama (Tanjung Emas Semarang), 2 pelabuhan pengumpul (Tanjung Intan Cilacap dan Tegal), 8 pelabuhan pengumpan regional (Batang, Kendal, Jepara, Karimunjawa, Legon Bajak, Juwana, Tasik Agung dan Sluke) dan 3 pelabuhan lokal (Brebes, Pemalang dan Pekalongan). Sebagian besar pelabuhan di pantai utara kondisinya kurang baik karena mengalami amblesan tanah (*land subsidence*), kenaikan air laut (rob) serta pendangkalan kolam dan alur pelayaran karena sedimentasi. Terdapat potensi Pelabuhan Sluke Rembang yang dapat dikembangkan menjadi pelabuhan pengumpul karena secara alamiah (kedalaman laut) mendukung dan potensi keberadaan infrastruktur lain yang menunjang. Pada tahun 2024 arus peti kemas di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang mencapai 894.168 terus yang mengalami peningkatan dibandingkan angka 2023 sebesar 781.841 terus. Jika dibandingkan dengan kapasitas (1,5 juta teus), tahun 2024 mencapai 59,61 persen yang mengalami meningkat 7,49 persen dibanding tahun 2023 sebesar 52,12 persen. Permasalahan yang mempengaruhi kinerja dan daya saing Pelabuhan Tanjung Emas diantaranya penurunan tanah, banjir rob, jumlah dermaga, kedalaman kolam dan alur pelayaran yang tidak sama serta keterbatasan rute pelayaran langsung (*direct service*) internasional. Untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik diperlukan pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas dan pelabuhan lainnya untuk mengantisipasi pertumbuhan volume peti kemas dengan adanya pengembangan kawasan industri, yang di dalamnya termasuk integrasi

dengan *dryport* dan fasilitas bongkar muat dari kereta api ke kapal secara langsung. Potensi lain terkait pelabuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan adanya pembangunan Pelabuhan Batang yang terintegrasi dengan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan rencana pembangunan Kendal *Seaport* yang berpotensi mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal.

Selanjutnya, untuk simpul jaringan perkeretaapian, sampai dengan tahun 2024 terdapat 116 buah stasiun dan jalur rel sepanjang 1.657,74 km/sp terdiri dari 902,5 km/sp rel aktif (288,5 km/sp jalur tunggal dan 614 km/sp jalur ganda) dan 755,24 km/sp rel nonaktif. Total panjang rel kereta api yang melebihi jalan nasional (1.518,09 km) dan menjangkau sebagian besar wilayah Jawa Tengah, serta sistem jaringan rel yang "*looping*" berpotensi tinggi sebagai angkutan umum massal aglomerasi perkotaan (pengembangan kereta api komuter yang terintegrasi dengan angkutan umum perkotaan berbasis jalan) untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang melalui reaktivasi rel nonaktif, integrasi rel kereta api dengan kawasan industri, pemanfaatan teknologi integrasi dengan moda angkutan berbasis jalan dan kereta api cepat. Potensi implementasi konsep *Transit Oriented Development* (TOD) sebagai solusi perwujudan efektivitas pergerakan yang dapat memanfaatkan keberadaan stasiun dan terminal. Selain itu potensi pengembangan *multi-infrastructure backbone* dan *maritime backbone* yang menginterkoneksikan antara kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan aksesibilitas dan konektivitas yang mendukung pertumbuhan perekonomian dan pengembangan wilayah di Jawa Tengah.

Untuk simpul utama transportasi darat, terdapat 220 terminal yang terdiri dari 19 tipe A, 23 tipe B dan 178 tipe C. Berdasarkank tata ruang masih dibutuhkan penyebaran dan pemerataan terminal yang sampai dengan tahun 2024 terdapat kebutuhan enam terminal tipe A dan enam terminal tipe B. Terminal sebagai simpul transportasi berpotensi dikembangkan sebagai simpul ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Keselamatan perjalanan menjadi salah satu isu permasalahan yang sangat penting di sektor transportasi. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas mengalami trend kenaikan dari tahun ke tahun, namun untuk jumlah korban meninggal dunia (MD) mengalami penurunan.

Tabel 2.13.
Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas di Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024

Indikator	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Jumlah Kecelakaan Lalulintas	Kejadian	21.396	22.521	30.730	31.425	31.444
2. Korban Meninggal dunia	Jiwa	3.508	3.750	4.409	4.302	4.130
3. Tingkat Fatalitas / 100.000 penduduk	Angka	9,61	10,21	11,91	11,62	10,89
4. Korban Luka Berat	Orang	48	77	77	60	63
5. Korban Luka Ringan	Orang	24.495	25.847	35.869	36.915	37.275
6. Kerugian Materiil	Rp.Miliar	14,746	16,836	24,819	44,763	37,369

Sumber: Direktorat Lalu-lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, 2025

Angka tersebut sangat besar, karena selain yang terbesar kedua setelah Jawa Timur juga terhitung rata-rata hampir 1 jiwa per 2 jam melayang sia-sia dijalan. Berdasarkan data dari Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah tahun 2025, korban MD dimaksud didominasi profesinya karyawan/swasta, usia 17-35 tahun dan pengguna sepeda motor. Melihat karakteristik data korban, berpotensi kejadian kecelakaan dimaksud berkontribusi terhadap penurunan kesejahteraan apalagi jika korban juga merupakan kepala rumah tangga dan tulang punggung keluarga.

Tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan provinsi pada tahun 2023 mencapai 38,66 persen dan pada perlintasan sebidang kereta api mencapai 17,88 persen. Pada tahun 2024, terdapat 1.369 perlintasan dengan rel kereta api yang terdiri dari 109 tidak sebidang dan 1.260 sebidang (371 perlintasan sudah berpalang pintu dan 889 belum dilengkapi dengan palang pintu). Dimana dari total 1.369 perlintasan dimaksud hanya 27 perlintasan yang berada di ruas jalan provinsi, terdiri dari 25 perlintasan sebidang dan dua perlintasan sudah tidak sebidang (*fly over* dan *underpass*), dari 25 perlintasan sebidang terdapat 24 perlintasan sudah berpalang pintu dan dijaga, namun masih ada satu perlintasan yang belum dilengkapi dengan palang pintu. Ke depan diperlukan peningkatan upaya pemenuhan kelengkapan jalan terpasang terhadap kondisi ideal dan pengurangan perlintasan sebidang dengan jalan sebagai upaya untuk mengurangi kejadian kecelakaan transportasi.

Faktor yang paling berpengaruh terhadap permasalahan transportasi darat adalah pertumbuhan jumlah kendaraan. Seiring peningkatan penduduk, jumlah kendaraan bermotor juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 2.14.
Jumlah Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah Tahun 2020 - 2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Mobil Penumpang	Unit	1.363. 756	1.405.334	1.450.700	1.600.074	1.705.416
2. Bus	Unit	33.787	34.208	34.779	35.739	38.301
3. Truk	Unit	570.347	589.100	605.671	667.136	688.647
4. Sepeda Motor	Unit	16.131. 478	16.800.333	17.443.730	18.411.641	18.803.423

Sumber: BPS, 2025

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor berpotensi menyebabkan peningkatan kemacetan, kecelakaan lalu lintas, konsumsi energi dan emisi gas yang dihasilkan. Disisi lainya pertumbuhan kapasitas jalan tidak sepesat laju pertumbuhan kendaraan bermotor. Diperlukan upaya untuk mengendalikan jumlah kendaraan di jalan, diantaranya melalui penyediaan angkutan umum yang merata, terjangkau dan berkualitas.

Terkait dengan pelayanan angkutan umum, sejak tahun 2024 belum terdapat penambahan jumlah koridor layanan Trans Jateng yang melayani kawasan aglomerasi perkotaan. Koridor ke-7 Trans Jateng yang terakhir yang dibuka adalah Surakarta - Sukoharjo - Wonogiri yang operasional pada Agustus 2023. Sehingga baru terlayani 5 dari 10 Wilayah Pengembangan (WP), yaitu WP Kedungsepur (3 koridor), WP Subosukawonosraten (2 koridor), WP Cibalingmas (1 koridor), dan WP

Gelangmanggung-Keburejo (1 koridor Kutoarjo-Borobudur). Untuk mendukung pengembangan kawasan industri dan perkotaan masih diperlukan pengembangan koridor Trans Jateng dan *feeder* yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota yang saat ini baru terdapat tiga kabupaten/kota yang memiliki layanan angkutan umum perkotaan (Trans Semarang, Batik Solo Trans dan Trans Banyumas). Masih diperlukan peningkatan upaya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyediakan layanan angkutan umum yang tidak hanya melayani kawasan perkotaan tapi juga pedesaan.

Total jumlah penumpang yang dilayani Trans Jateng terus mengalami peningkatan, sejak pertama kali dibuka pada tahun 2017, kecuali pada saat pandemi pada tahun 2020, jumlah penumpang mulai pulih pada tahun 2021 dan relatif normal kembali pada tahun 2022.

Tabel 2.15.
Perkembangan Layanan Trans Jateng Tahun 2020 - 2024

Uraian	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Koridor Operasional	Koridor	5	6	6	7	7
Penumpang Terlayani	Penumpang	2.421.872	3.439.532	6.506.462	8.034.005	9.499.742
Rerata *Loadfactor*	%	33,64	41,62	68,74	82,40	88,60
Rerata *Moda Shifting*	%	n/a	46,39	48,16	50,12	52,22
Proporsi Nilai Manfaat	%	n/a	n/a	76,78	83,20	91,33

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025
Catatan: Perhitungan Moda Shifting baru dilakukan mulai tahun 2021 dan perhitungan nilai manfaat baru dilakukan mulai tahun 2022

Kenaikan jumlah penumpang Trans Jateng seiring dengan penambahan jumlah koridor, dan perpindahan pengguna kendaraan pribadi ke Bus Trans Jateng (*moda shifting*). Layanan Trans Jateng ini mendukung *Sustainable Developement Goals* (SDG's) pada tujuan *Sustainable Cities and Communities* pada Target 11.2 terkait: "Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan orang tua".

Perhitungan nilai manfaat Trans Jateng dilakukan dengan memperbandingkan antara anggaran Trans Jateng yang dikeluarkan dibandingkan dengan nilai manfaat yang sudah dikonversikan ke rupiah. Manfaat yang dapat "dirupiahkan" meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), estimasi penghematan masyarakat untuk biaya perjalanan dan estimasi penghematan negara dari subsidi BBM kendaraan pribadi (karena beralih ke transportasi umum). Masih banyak manfaat yang belum diperhitungkan, diantaranya peningkatan kualitas udara, penurunan kerugian ekonomi akibat kemacetan, kerugian akibat kecelakaan (terutama jiwa) dan manfaat terkait bangkitan ekonomi (pendukung pariwisata, perindustrian dan lain-lain).

Selain itu pada tahun 2024 terdapat 272 trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang dilayani oleh 3.550 bus dengan kebutuhan armada sejumlah 6.442 bus. Jumlah armada bus AKDP mengalami penurunan sangat siginifikan, yang pada tahun 2019 sejumlah 4.854 bus. Penurunan jumlah bus AKDP utamanya terjadi

pada saat pandemi Covid-19 dan seiring turunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum serta mudahnya akses kepemilikan kendaraan pribadi. Berdasarkan data BPS pada tahun 2022 terdapat 629.317 armada angkutan barang di Jawa Tengah yang mengalami kenaikan jumlah armada dibandingkan dengan data kondisi tahun 2020 yang sejumlah 472.942 armada. Pertumbuhan jumlah kendaraan barang di satu sisi merupakan indikator potensi peningkatan volume logistik namun berpotensi semakin meningkatkan permasalahan (kemacetan, kecelakaan, kontribusi polusi) di sektor transportasi utamanya di moda jalan raya.

Secara keseluruhan, kinerja infrastruktur perhubungan di Jawa Tengah diukur dengan Indeks Pelayanan Transportasi yang sudah memperhitungkan aspek konektivitas jaringan transportasi (rasio konektivitas provinsi), tingkat keselamatan perjalanan transportasi (rasio kecelakaan bus AKDP per 1 juta keberangkatan), dan kualitas pelayanan angkutan umum (*On Time Performance*/ OTP layanan transportasi). Capaian Indeks Pelayanan Transportasi Provinsi Jawa Tengah secara rinci sebagai berikut.

Tabel 2.16.
Indeks Pelayanan Transportasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 - 2024

Indikator	Satuan	Tahun		
		2022	2023	2024
INDEKS PELAYANAN TRANSPORTASI	**Angka**	**5,767**	**5,997**	**6,050**
1. Rasio Konektivitas Provinsi	Angka	0,299	0,373	0,400
a. Rasio Konektivitas Transportasi Darat	Angka	0,283	0,340	0,360
b. Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan	Angka	0,389	0,501	0,510
c. Rasio Konektivitas Transportasi ASDP	Angka	0,230	0,310	0,330
2. Rasio Kecelakaan Bus AKDP (per 1 Juta Keberangkatan)	Angka	16,906	16,698	16,090
3. *On Time Performance* (OTP) Layanan Transportasi	%	82,21	84,19	84,60
a. OTP Angkutan Aglomerasi Perkotaan (Trans Jateng)	%	86,60	88,20	89,79
b. OTP Kereta Api Masa Lebaran dan Nataru	%	90,00	90,39	91,01
c. OTP Pesawat Masa Lebaran dan Nataru	%	70,00	74,00	73,01

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2025
Catatan :
- *Indeks Pelayanan Transportasi di Jawa Tengah mulai dihitung pada Tahun 2022;*
- *Rasio Konektivitas Nasional Tahun 2022 = 0,696, 2023 = 0,763 dan 2024 = 0,777 ;*
- *Rasio Kecelakaan Nasional Tahun 2022 = 19,936, 2023 = 17,64 dan 2024 = ; 19,24;*
- *On Time Performance (OTP) Nasional Tahun 2022 = 74,146, 2023 = 72,592 dan 2024 = 75,304.*

Kinerja infrastruktur perhubungan Provinsi Jawa Tengah dari aspek keselamatan dan pelayanan transportasi umum sudah lebih baik dibandingkan capaian tingkat nasional. Yang masih perlu pembenahan dari aspek konektivitas provinsi yang capaiannya di bawah capaian nasional, terutama dari hal pemerataan simpul transportasi (terminal dan dermaga penyeberangan ASDP) dan pemenuhan trayek layanan angkutan umum.

Rumah tangga dengan akses hunian layak di Jawa Tengah dari tahun ke tahun juga semakin meningkat. Data asumsi jumlah rumah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 sebanyak 9.261.697 unit dan berdasarkan data BPS tahun 2024

sebesar 71,76 persen rumah tangga yang memiliki akses hunian layak. Capaian ini meningkat 2,91 persen dari tahun 2023 yang sebesar 68,85 persen.

Tabel 2.17.
Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024

Tahun	Jumlah (Unit)	Persentase (%)
2020	5.818.483	67,93
2021	5.771.336	66,47
2022	5.847.609	67,02
2023	6.029.999	68,85
2024	6.646.194	71,76

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Jumlah keluarga dengan status kepemilikan rumah milik sendiri yang tidak layak huni (*backlog* kelayakan) pada akhir tahun 2024 tercatat sebanyak 1.002.113 unit rumah, sedangkan jumlah keluarga dengan status kepemilikan rumah bukan milik sendiri dan tidak memiliki rumah di tempat lain (*backlog* kepemilikan) kategori keluarga miskin pada akhir tahun 2024 sebanyak 310.855 unit.

Peningkatan jumlah hunian layak di Jawa Tengah ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah provinsi, pusat, kabupaten/kota, desa, dan peran swasta melalui CSR dan BAZNAS. Program yang dilakukan meliputi perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dan pembangunan baru rumah.

Selanjutnya terkait dengan kawasan permukiman kumuh di Jawa Tengah, kondisinya semakin menurun dari tahun ke tahun. Hasil verifikasi dan validasi penetapan kawasan permukiman kumuh melalui SK bupati/walikota, sampai dengan 31 Desember 2024 total kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah seluas 5.203,43 ha yang terdiri dari 1.609,84 ha kewenangan kabupaten/kota, 805,40 ha kewenangan provinsi, dan 2.788,19 ha kewenangan pusat.

Selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan intervensi terhadap pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat korban bencana provinsi. Melalui bantuan sosial pembangunan baru rumah dan peningkatan kualitas rumah terdampak bencana, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan. Adapun penanganan rumah korban bencana pemerintah provinsi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18.
Penanganan Rumah Terdampak Bencana di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019-2024 melalui APBD Provinsi

No	Jenis Penanganan	2020	2021	2022	2023	2024
1	PK Bencana	105	118	51	345	175
2	PB Bencana	11	23	19	122	35
	Jumlah	**116**	**141**	**70**	**467**	**210**

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, 2024

Dalam rangka pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga perlu difokuskan pada pembangunan di wilayah perdesaan. **Pembangunan desa** dilakukan untuk dapat meningkatkan kemandirian desa. Desa Mandiri merupakan desa yang memiliki kapasitas dalam mengelola aset dan sumber daya lokal yang sesuai dengan kewenangannya secara berkelanjutan baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sampai dengan tahun 2024, capaian tingkat kemandirian desa di Jawa Tengah diukur dengan Indeks Desa Membangun (IDM) yang mengklasifikasikan tingkat kemandirian desa menjadi 5 (lima) tingkatan, yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Tahun 2020-2024, capaian kemandirian desa di Jawa tengah terus mengalami peningkatan yang diukur melalui peningkatan rata-rata nilai IDM Jawa Tengah dan peningkatan persentase jumlah desa mandiri. Sampai dengan tahun 2024, terdapat total 1,530 Desa Mandiri (19,59 persen), 3.816 Desa Maju (48,86 persen), 2.456 Desa Berkembang (31,45 persen), dan 8 Desa Tertinggal (0,10 persen). Berdasarkan capaian tersebut kenaikan jumlah Desa Mandiri cukup signifikan apabila dibandingkan tahun sebelumnya pada 2023, yaitu 825 Desa Mandiri (10,56 persen). Beberapa aspek menjadi faktor yang mendorong meningkatnya capaian kemandirian desa di Jawa Tengah, diantaranya adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintah, peningkatan perekonomian lokal melalui optimalisasi potensi lokal dan penguatan peran lembaga keuangan, peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat, peningkatan penyediaan kebutuhan layanan dasar di desa, dan beberapa faktor lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pembangunan desa. Meski begitu, capaian tersebut belum bisa dikatakan optimal mengingat masih adanya Desa Tertinggal di Jawa tengah pada tahun 2024, yaitu 8 (delapan) Desa Tertinggal yang tersebar di Kabupaten Demak dan Kabupaten Tegal. Beberapa kendala yang dihadapi pada desa-desa tertinggal di Jawa Tengah adalah permasalahan pada kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur pendukung aksesibilitas yang belum optimal.

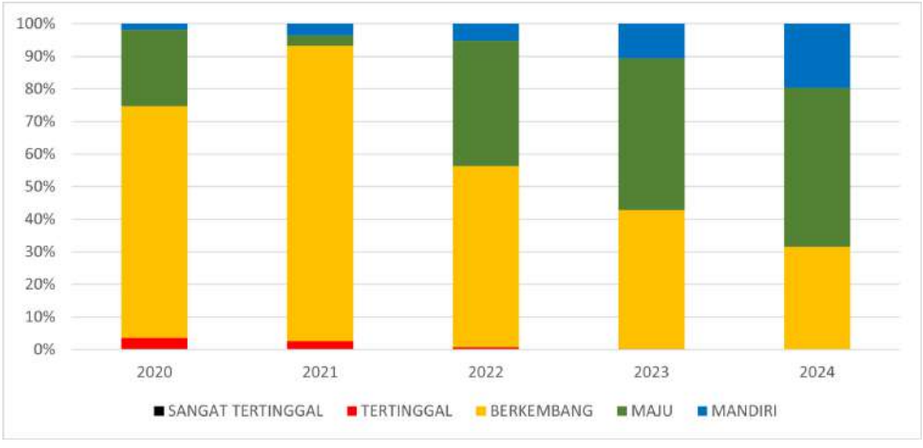

Sumber: Kemendes PDTT, 2024

Gambar 2.40.
Klasifikasi Tingkat Kemandirian Desa
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024 (Persen)

Sementara itu, secara keseluruhan wilayah, perkembangan tingkat kemandirian desa di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, rata-rata nilai IDM Jawa tengah adalah 0,749 dengan kategori maju, sedangkan pada tahun 2020 rata-rata nilai IDM adalah 0,682 dengan kategori berkembang. Peningkatan terjadi secara konsisten setiap tahunnya dipengaruhi oleh berbagai faktor selaras dengan peningkatan persentase jumlah desa mandiri.

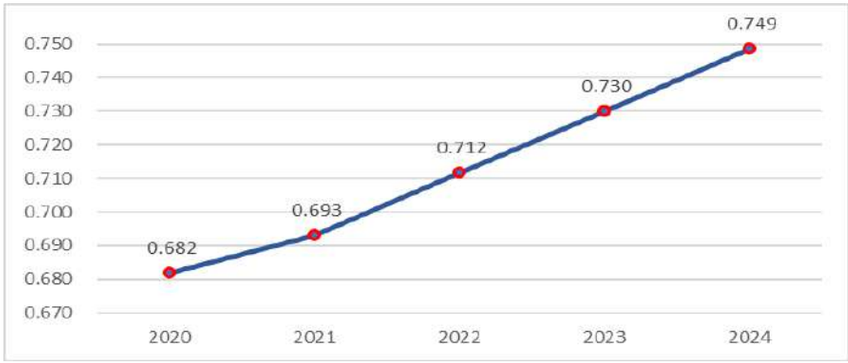

Sumber: Kemendes PDTT, 2024

Gambar 2.41.
Rata-Rata Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Pada tahun 2025, sesuai dengan Perda Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Tahun 2025-2045 maka pengukuran capaian kemandirian desa di Jawa Tengah akan diukur dengan menggunakan Indeks Desa (ID) yang juga mengklasifikasikan tingkat kemandirian desa menjadi 5 (lima) tingkatan, yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Namun terdapat perbedaan dimensi pengukuran antara IDM dan ID. Dimensi pengukuran IDM terdiri atas 3 (tiga) dimensi, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Sedangkan pengukuran ID terdiri atas 6 (enam) dimensi, yaitu layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.

Selain dengan mengukur tingkat kemandiriannya, dukungan terhadap pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan juga didukung melalui perekonomian desa yang di dalamnya terdapat upaya peningkatan kualitas hasil produksi desa, penguatan peran lembaga ekonomi desa, peningkatan penyediaan sarana dan prasarana perekonomian desa, dan dukungan pemerintah desa terhadap perkembangan perekonomian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan ekonomi dan penetapan kebijakan-kebijakan yang mendukung penguatan ekonomi masyarakat. Salah satu faktor yang masih perlu upaya keras dalam peningkatan ekonomi desa adalah peningkatan kualitas lembaga ekonomi desa, yaitu BUMDes yang sampai dengan tahun 2024 capaian perkembangannya masih relatif rendah ditandai dengan mayoritas BUMDes masih ada di kelas berkembang dan perintis.

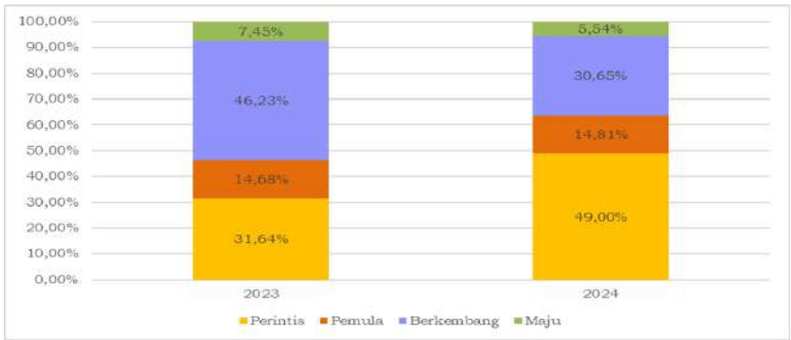

Sumber: Dispermasdesdukcapil, 2024

Gambar 2.42.
Klasifikasi Perkembangan BUMDes
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dan 2024 (Persen)

Selain upaya peningkatan perekonomian, dalam rangka meningkatkan kemandirian desa sebagaimana disebutkan dalam Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2024 juga didukung oleh berbagai aspek (dimensi) yaitu pemenuhan kebutuhan layanan dasar, kondisi sosial, kualitas lingkungan, ketersediaan aksesibilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan. Pemenuhan kebutuhan layanan dasar di desa meliputi ketersediaan dan kemudahan akses terhadap berbagai sarana dan prasarana. Integrasi upaya pemenuhan layanan dasar juga didukung dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial. Saat ini ke-6 bidang SPM tersebut telah diintegrasikan dalam penyelenggaraan program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang berperan sebagai mitra pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan layanan desa. Penjabaran mengenai hal tersebut diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu. Sementara itu, dimensi sosial diwujudkan melalui upaya pelestarian budaya, gotong royong, penanganan konflik masyarakat, keamanan lingkungan, dan penyediaan fasilitas lainnya. Dimensi lainnya adalah lingkungan yang diwujudkan melalui upaya pelestarian lingkungan, penanggulangan sampah, dan kebencanaan. Selanjutnya, dimensi kemudahan akses diwujudkan melalui penyediaan akses layak di desa termasuk ketersediaan sarana kelistrikan dan telekomunikasi. Sedangkan dimensi terakhir yang mendukung adalah tata kelola pemerintahan desa yang diwujudkan melalui upaya pengelolaan administrasi, aset, dan pengelolaan keuangan desa dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Selain didorong untuk tetap tumbuh, perekonomian daerah juga diarahkan agar merata. Pemerataan pembangunan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi antar wilayah yang ditunjukkan dengan **indeks williamson**. Indeks williamson Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 0,632 membaik dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 0,656.

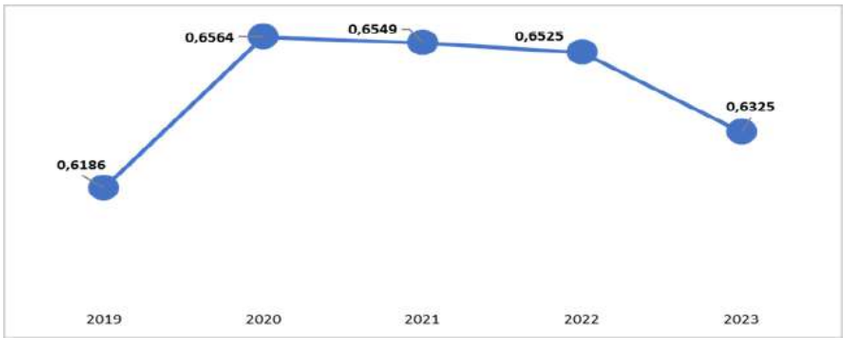

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.43.
Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

f. Stabilitas Ekonomi Makro

Kondisi stabilitas ekonomi makro Jawa Tengah diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro stabilitas, pro pertumbuhan dan pro pemerataan. Gambaran tersebut ditunjukkan dengan data **Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB** yang selama lima tahun cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 karena perkembangan ekonomi nasional yang kurang stabil sebagai imbas dari adanya pandemi Covid-19 sehingga rasio pajak mencapai 1,22. Tahun 2021 merupakan awal masa pemulihan berbagai aspek kehidupan pasca pandemi Covid-19 meskipun demikian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) cukup berdampak pada perekonomian masyarakat sehingga realisasi rasio pajak tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya yaitu mencapai 1,22. Pemulihan ekonomi mulai berdampak pada tahun 2022 dimana rasio pajak tumbuh positif sebesar 7,41 persen menjadi 1,32. Realisasi pajak daerah pada tahun 2023 dan tahun 2024 baik yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota relatif tumbuh positif sebesar 5,87 persen pada tahun 2023 dan 3,23 persen pada tahun 2024. Namun demikian dikarenakan laju pertumbuhan PDRB lebih tinggi yaitu 8 persen pada tahun 2023 dan 7,83 persen pada tahun 2024 sehingga rasio pajak menurun sebesar 1,29 pada tahun 2023 dan 1,23 pada tahun 2024.

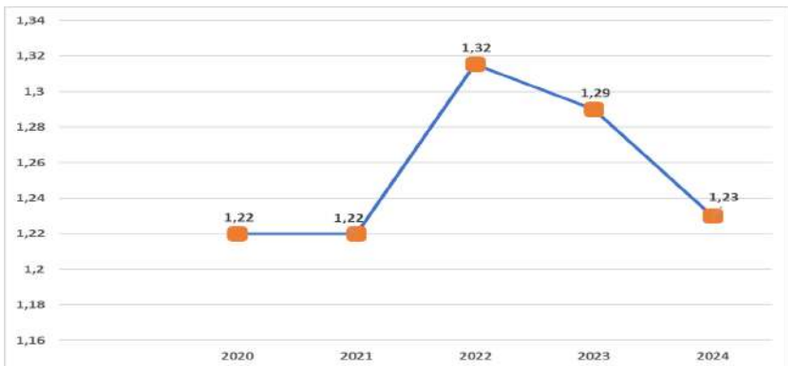

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2025 (diolah)

Gambar 2.44.
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Disamping itu, gambaran kondisi stabilitas ekonomi makro di suatu daerah ditunjukkan melalui angka inflasi. **Inflasi** terjadi dikarenakan adanya kenaikan

harga yang ditunjukkan oleh naiknya 9 (sembilan) indeks kelompok pengeluaran. Tingkat inflasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun mengikuti tren fluktuasi tingkat inflasi nasional dan cenderung terkendali. Kendati demikian, terjadi lonjakan inflasi pada tahun 2022 sebesar 5,63 persen akibat adanya gejolak ekonomi global karena konflik geopolitik dan perang Rusia-Ukraina yang tidak hanya memberikan pengaruh pada inflasi nasional. Kondisi global tersebut menyebabkan gangguan dari sisi *supply* yang memicu lonjakan harga komoditas secara global. Tahun 2023 dan 2024 inflasi dapat terus terkendali yaitu sebesar 1,67 persen di tahun 2024.

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.45.
Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016-2024 (Persen)

Selain itu, jika dilihat dari **pendalaman/intermediasi sektor keuangan** di Jawa Tengah yang merujuk pada peran lembaga keuangan untuk membantu mengalokasikan sumber daya keuangan secara efisien dalam perekonomian terdapat beberapa instrumen keuangan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi stabilitas ekonomi makro daerah. Instrumen keuangan yang dapat menggambarkan kondisi tersebut di atas adalah total dana pihak ketiga/PDRB, aset dana pensiun/PDRB, nilai transaksi saham per kapita per provinsi, dan total kredit/PDRB.

Pada kurun waktu 5 tahun terakhir, total dana pihak ketiga (DPK) dan total kredit yang disalurkan cukup stabil. Penghimpunan DPK dapat berdampak positif maupun negatif terhadap penyaluran kredit, tergantung pada bagaimana bank mengelola risiko dan biaya yang terkait dengan DPK. Portofolio investasi dana pensiun justru terus mengalami penurunan, hal ini dikarenakan penempatannya yang masih cukup besar di instrumen jangka pendek. Oleh karena itu pengelolaan portofolio investasi ke depan perlu lebih mencerminkan *maturity profile* industri dana pensiun. Di sisi lain, nilai transaksi saham per kapita di Provinsi Jawa Tengah cenderung fluktuatif, bahkan terus menurun pada tahun 2021-2023 meskipun dapat kembali bangkit pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena rendahnya literasi dan inkulasi pasar modal yang posisinya jauh di bawah literasi perbankan.

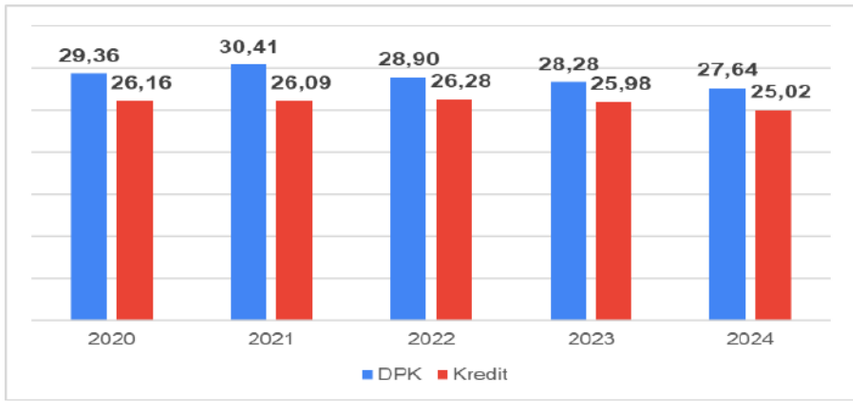

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2025

Gambar 2.46.
Total Dana Pihak Ketiga dan Kredit Terhadap PDRB
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

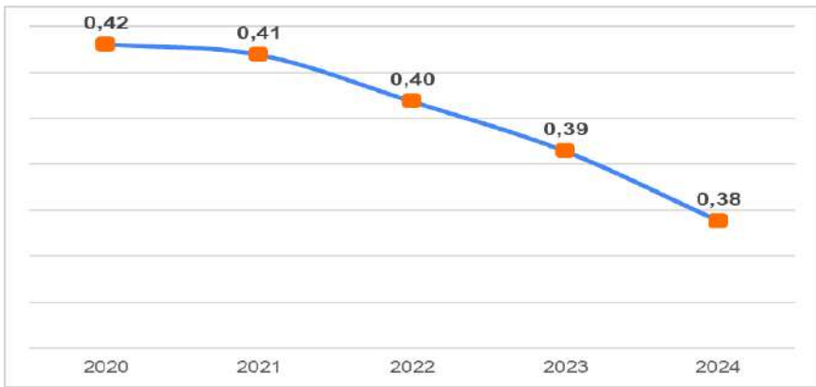

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2025

Gambar 2.47.
Aset Dana Pensiun Terhadap PDRB
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2025

Gambar 2.48.
Nilai Transaksi Saham Per Kapita
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Stabilitas ekonomi makro daerah juga ditunjukkan dari tingkat **inklusi keuangan** masyarakat. Inklusi keuangan menunjukkan ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Peningkatan inklusi keuangan menggambarkan adanya peningkatan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan

formal oleh masyarakat baik dengan tujuan bertransaksi, menabung, melakukan investasi dan lainnya. Tingkat inklusi keuangan yang semakin tinggi akan mendorong pendalaman sektor keuangan dan mengindikasikan semakin luasnya peran jasa keuangan sebagai *enabler* dalam pembangunan daerah. Tingkat indeks inklusi keuangan diukur menggunakan metode survei yang dilakukan pada responden (sampel penduduk) yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Memperhatikan cakupan data sampel yang diambil maka tingkat inklusi keuangan merujuk pada skala nasional karena data sampel yang ada dianggap masih kurang mewakili untuk skala provinsi. Pengambilan data survei dilakukan secara langsung/wawancara tatap muka. Parameter yang digunakan adalah parameter penggunaan (*usage*), dimana masyarakat yang dikatakan inklusif secara keuangan adalah masyarakat yang menggunakan produk dan layanan jasa keuangan dalam kurun waktu 12 bulan terakhir dihitung dari waktu pelaksanaan survei. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) sudah dilakukan pada tahun 2016, 2019, 2022 dan tahun 2024. Indeks inkulasi keuangan pada tahun 2024 sebesar 75,02 persen artinya dari 100 orang umur 15-79 tahun, sebanyak 75 orang yang terinklusi keuangan.

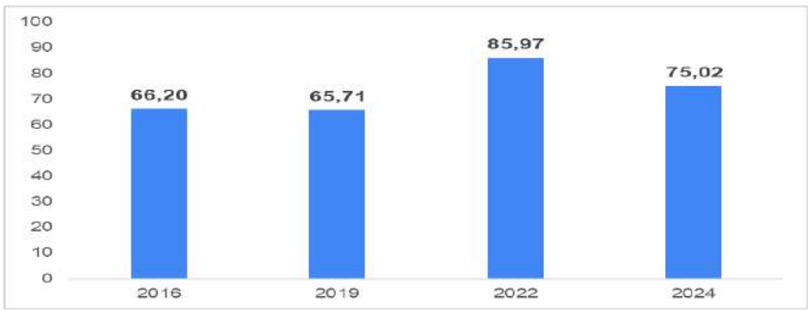

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2025

Gambar 2.49.
Indeks Inklusi Keuangan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016-2024

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum sebagai muara dari penyelenggaraan pemerintahan dapat ditinjau melalui kualitas birokrasi sebagai sistem hulu dan kualitas pelayanan publik sebagai sistem hilir

Kualitas birokrasi diukur melalui **Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)**. Reformasi birokrasi adalah program pemerintah dalam membangun aparatur negara sebagai respon atas tuntutan reformasi pasca krisis tahun 1998 yang dilandasi keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan demokrasi dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Penerapan reformasi birokrasi dimaksudkan sebagai upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good government*) sebagai prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Reformasi birokrasi pada pemerintah daerah menggambarkan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih berkenaan dengan *roadmap* nasional. Kinerja reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2015 hingga tahun 2024 menunjukkan peningkatan yang baik. Capaian tahun 2024 mencapai nilai

91,28 yang menunjukkan capaian tertinggi indeks reformasi birokrasi Provinsi Jawa Tengah. Nilai IRB yang terus meningkat menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Tengah berusaha menerapkan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. Capaian yang tinggi ini tidak lepas dari perubahan metode pengukuran yang menyertakan komponen reformasi birokrasi tematik yang menjadi pengungkit utama. Hal ini menunjukkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berusaha menciptakan dampak dalam upaya reformasi birokrasi.

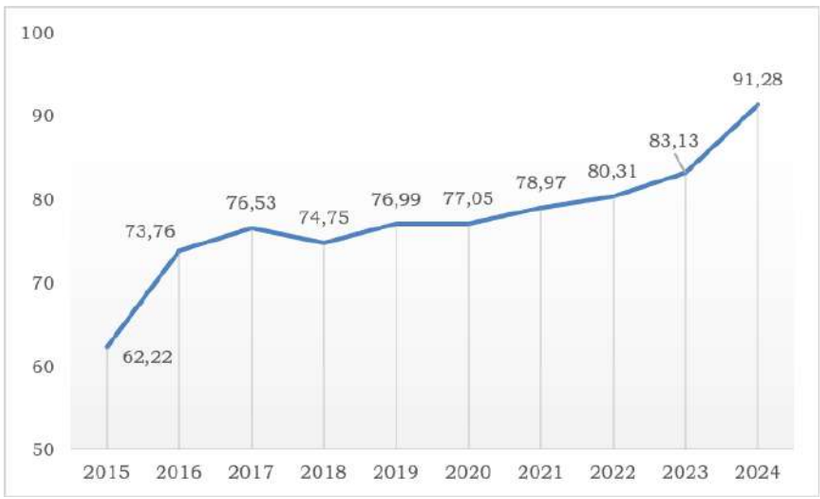

Sumber: KemenPANRB, 2025

Gambar 2.50.
Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015–2024

a. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Salah satu komponen strategis dalam upaya perwujudan reformasi birokrasi adalah penataan regulasi dengan pelaksanaan reformasi hukum. Reformasi hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada pemerintah daerah yang diukur dengan **Indeks Reformasi Hukum** (IRH). Capaian IRH Jawa Tengah secara umum meningkat dari tahun 2022 sebesar 76,25 menjadi 87,62 pada tahun 2023 dengan tambahan nilai apresiasi sebesar 9,52. Pada tahun 2024 kembali meningkat sebesar 10,66 poin menjadi 98,28 dengan tambahan nilai apresiasi sebesar 6,88.

Selain itu, sasaran strategi dalam kebijakan reformasi birokrasi dapat diukur melalui indikator tata kelola pemerintahan berbasis elektronik atau disebut **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**. Peran atau komitmen pimpinan dalam pengembangan layanan *e-Government* memang dibutuhkan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dalam penggunaan *e-Government*/ SPBE sebagai pendukung utama pembangunan. Terkait digitalisasi pemerintahan telah dilakukan pembangunan infrastruktur TIK seperti pembangunan jaringan *Fiber Optic*, pengadaan *server* dan *storage*; pengadaan sarana dan prasarana studio visual - ruang Multi Media Center (MMC), pembangunan pusat data, sewa internet dan sewa aplikasi analisis media, serta sarana prasarana layanan keamanan informasi. Pembangunan infrastruktur di atas antara lain untuk kegiatan operasional komunikasi dan koordinasi pemecahan masalah-masalah pembangunan (*video conference*, iklan layanan, dan layanan aduan) dan penyediaan portal data. Keseriusan pembangunan TIK dan aplikasi

pemanfaatannya telah membuahkan hasil lonjakan capaian Indeks SPBE sepanjang 2020-2024.

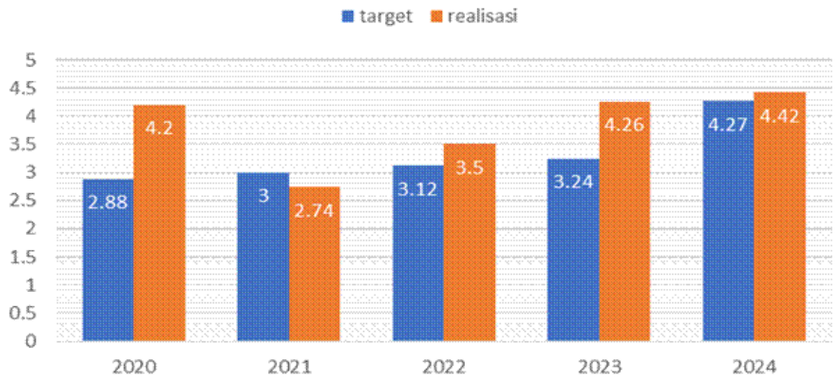

Sumber: KemenPANRB, 2024

Gambar 2.51.
Indeks SPBE Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024

Sepanjang evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Provinsi Jawa Tengah menunjukkan prestasi capaian SPBE. Bahkan, indeks SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan peningkatan, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 (akibat bertambahnya indikator penilaian yaitu Sub Domain Manajemen SPBE). Secara berturut indeks SPBE Jawa Tengah tahun 2020 sebesar 4,20, 2021 sebesar 2,74, kemudian 2022 sebesar 3,34, dan 2023 sebesar 4,26. Hasilnya, berdasarkan Kepmen PANRB Nomor 663 tahun 2024 tentang hasil evaluasi SPBE tahun 2024 menunjukkan capaian indeks SPBE untuk Provinsi Jawa Tengah semakin mantap dari capaian predikat memuaskan (4,42), bahkan menjadi terbaik nasional pada tahun 2024. Capaian ini telah mendapatkan penghargaan tertinggi Nasional SPBE *Summit* 2024 dan Peluncuran *GovTech* Indonesia yang diselenggarakan oleh KemenPANRB.

Selain pembangunan infrastruktur TIK, kemajuan capaian Indeks SPBE juga didukung dengan langkah-langkah penyediaan regulasi terkait penyelenggaraan SPBE (Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas, regulasi teknis lainnya seperti regulasi tentang arsitektur SPBE, peta SPBE, dan penerapan manajemen data di perangkat daerah, Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas Tahun 2020–2024, serta Kebijakan Satu Data Jawa Tengah). Selain itu juga dilakukan peningkatan layanan jaringan intra pemerintah dan pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), integrasi aplikasi berbagi pakai, literasi/sosialisasi terkait keamanan informasi kepada aparatur berupa optimalisasi *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) dan pentest, serta optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melibatkan perangkat daerah terkait, serta peningkatan layanan SPBE seperti peningkatan kualitas pengelolaan aduan masyarakat yang harus segera ditindaklanjuti melalui aplikasi LaporGub.

Portal layanan pemerintah daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini yaitu portal sinaga (sistem kepegawaian daerah), SSO (*single sign on*), dan perizinan. Portal sinaga.jatengprov.go.id merupakan portal layanan internal pemerintah daerah yang berisi informasi kinerja personal, informasi gaji dan TPP, presensi, penilaian PKSP, e-File, pengajuan cuti *online*, informasi *talent*

scouting, profil kepegawaian, jadwal CAT pemetaan, dan tugas belajar/ijin belajar. Portal sso.jatengprov.goid meliputi eplanning, ebudgeting, epenatausahaan, erko, econtrolling, dan eshb. Portal layanan perizinan.jatengprov.go.id (Siap Jateng) meliputi layanan yang terintegrasi pelayanan HGB Pemprov Jateng, pemeriksaan formulir UKL-UPL, perijinan sektor pendidikan, perizinan bidang tata ruang, perizinan sektor kesehatan, perizinan sektor kesatuan bangsa dan politik, perizinan sektor sosial, perizinan sektor PU SDA dan Taru, perizinan sektor LHK, perizinan sektor PU binamarga dan ciptakarya, perizinan sektor perhubungan, perizinan sektor perindag, dan perizinan sektor ESDM. Ke depan akan dikembangkan portal layanan publik untuk masyarakat dalam bentuk superapps yang dinamakan Jateng Ngopeni Nglakoni Super Apps berisi layanan bursa kerja, call center 24 jam, berita Jateng, cek pajak kendaraan, *calender of event* Jateng, info koridor Trans Jateng, dan pendaftaran *online* RS Provinsi.

Penyediaan akses internet yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga dalam rangka mengurangi wilayah *blank spot*. Sampai dengan tahun 2024, teridentifikasi sebanyak 505 desa termasuk wilayah *blank spot* yang akan diintervensi selama lima tahun ke depan.

Selanjutnya terkait dengan penerapan kebijakan dan regulasi terkait Masterplan Provinsi Cerdas (*Smart Province*) Jawa Tengah saat ini juga telah diinternalisasi dalam rencana pembangunan daerah. Masterplan Provinsi Cerdas (*Smart Province*) Jawa Tengah merupakan dokumen strategis yang menempatkan transformasi tata kelola, pelayanan publik, dan pembangunan masyarakat sebagai inti utama pembangunan daerah. Tidak hanya berfokus pada aspek teknologi informasi dan komunikasi (TIK), masterplan ini juga menekankan pentingnya integrasi kelembagaan, penguatan sumber daya manusia, dan kolaborasi antarsektor dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil. Enam dimensi utama meliputi *smart governance, economy, living, environment, society*, dan *branding,* diterjemahkan ke dalam pendekatan sistemik berbasis data, namun tetap memperhatikan kearifan lokal, pemberdayaan komunitas, serta tata kelola pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Internalisasi kebijakan smart province ini ditunjukkan dengan kebijakan digitalisasi secara menyeluruh baik internal pemerintah maupun layanan publik untuk masyarakat termasuk juga transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara menyeluruh. Penerapannya antara lain pada program *Good and Clear Government* mengedepankan tata kelola yang transparan dan akuntabel sejalan dengan penguatan *smart governance*; pesantren obah dan ekonomi syariah memperkuat nilai-nilai religius dan pemberdayaan ekonomi umat; desa maju dan berdaya mendorong pembangunan berbasis potensi lokal; dan taruna karya mandiri yang menciptakan ruang partisipasi produktif generasi muda sejalan dengan penguatan *smart society* dan *smart economy*. Dengan demikian, Masterplan Provinsi Cerdas diharapkan akan menjadi akselerator utama untuk mewujudkan Jawa Tengah yang maju, inklusif, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Pelayanan publik sebagai sistem hilir dapat dilihat kualitasnya melalui **Indeks Pelayanan Publik (IPP)**. Indeks ini mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Nilai IPP Jawa Tengah dari tahun 2018 hingga tahun 2024 mengalami kenaikan dari 4.22 menjadi 4.53. Meski mengalami kenaikan nilai ini belum menunjukkan pemulihan

dari capaian tertinggi di tahun 2022 sebesar 4.54. Meski begitu capaian nilai tahun 2024 menunjukkan upaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik setelah nilai turun di angka 4,11.

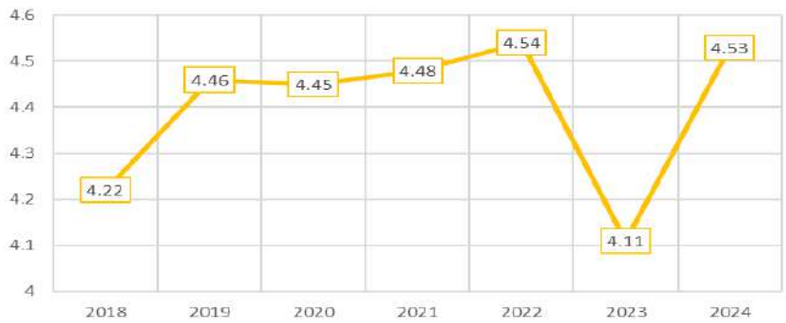

Sumber: Biro Organisasi Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.52.
Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024

Upaya pencapaian reformasi birokrasi perlu manghapus seluruh praktik-praktik korupsi seperti penyuapan, pemerasan gratifikasi, hingga penyalahgunaan wewenang. Untuk menjaga dari perilaku korupsi, maka integritas baik individu dan organisasi menjadi penting untuk diperhatikan. Hasil **Survey Penilaian Integritas (SPI)** digunakan untuk menunjukkan tingkat integritas individu dan organisasi pemerintah. Capaian nilai SPI Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2021-2023 mengalami penurunan dari 80,97 pada tahun 2021 menjadi 77,91 pada tahun 2023. Namun mengalami lonjakan pada tahun 2024 menjadi 79,47 dan mendapatkan nilai provinsi tertinggi di Indonesia. Jika disandingkan dengan Nasional dalam rentang waktu waktu yang sama, nilai capaian Jawa Tengah masih lebih baik dari capaian Nasional yaitu sebesar 72,4 pada tahun 2021 menurun menjadi 71,53 pada tahun 2024. Meskipun mengalami lonjakan dan capaian diatas nasional, capaian tersebut mengindikasikan upaya pencegahan korupsi dan integritas di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu untuk ditingkatkan.

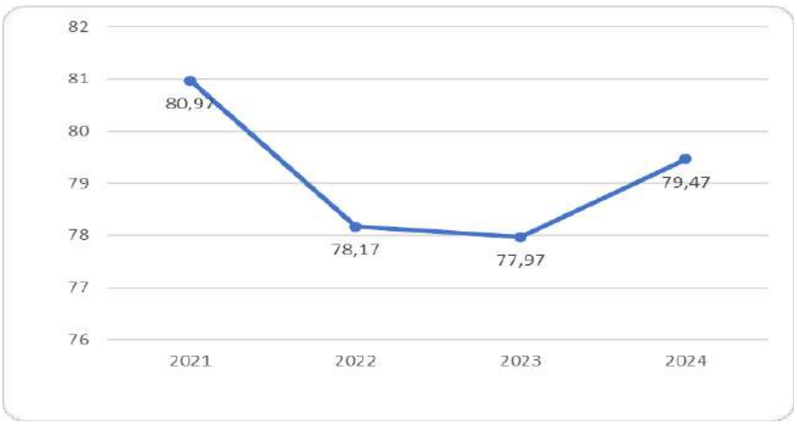

Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, 2024 diolah

Gambar 2.53.
Survey Penilaian Integritas (SPI)/Indeks Integritas Nasional (IIN)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2024

Selain itu, dilaksanakan **pengendalian dan pengawasan** yang bertujuan agar pelaksanaan pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Capaian SPIP Terintegrasi Provinsi Jawa

Tengah menunjukkan kecenderungan peningkatan. Pada tahun 2018, capaian Maturitas SPIP Terintegrasi Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 3,023, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 3,471. Sementara itu, pada tahun 2020, penilaian tidak dilakukan karena adanya perubahan metode penilaian.

Disisi lain, penerapan **manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)** Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berbasis sistem merit konsisten meningkat. Sistem Merit merupakan manajemen ASN berdasarkan kemampuan, kinerja, dan prestasi, bukan berdasarkan faktor-faktor lain seperti afiliasi politik, hubungan pribadi, atau latar belakang sosial. Capaian indeks merit tahun 2020 sebesar 0,7, melonjak signifikan pada tahun 2021 dengan nilai indeks merit 0,81. Hal ini meng-indikasikan adanya peningkatan dalam upaya penerapan sistem merit secara lebih menyeluruh di setiap aspek. Selanjutnya, nilai Indeks Sistem Merit terus meningkat mencapai 0,86 pada tahun 2024. Penerapan sistem merit yang semakin baik diharapkan berpotensi mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, memperbaiki transparansi, serta menciptakan birokrasi yang lebih adil dan akuntabel.

Penyelenggaraan pemerintah dikelola dalam sebuah sistem manajemen kerja yang penilaian kualitasnya dapat dilihat melalui penilaian indeks **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**. SAKIP mencakup penilaian konsep manajemen kinerja yang meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Nilai SAKIP Jawa Tengah dari tahun 2017 hingga 2024 menunjukkan pertumbuhan yang baik dari 75,94 menjadi 82,63. Hal ini menunjukkan upaya perbaikan dan penyesuaian dalam manajemen kinerja. Terdapat beberapa unsur yang perlu dikembangkan yaitu menyempurnakan penjenjangan kinerja, meningkatkan kualitas penetapan target, meningkatkan kualitas indikator, mengoptimalkan pemanfaatan informasi, dan peningkatan upaya tindak lanjut.

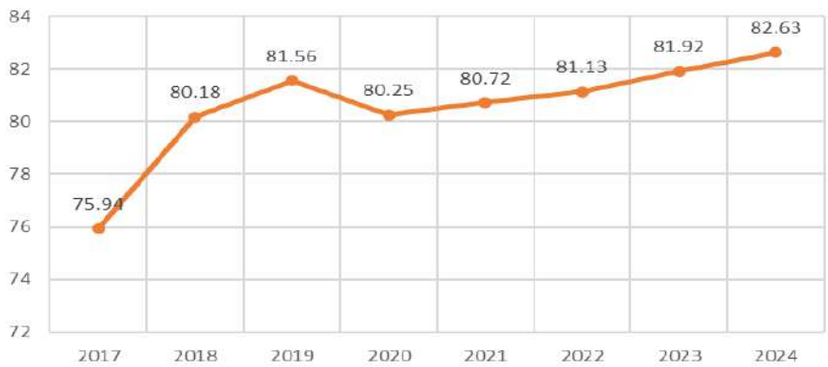

Sumber : KemenPANRB, 2024

Gambar 2.54.
Nilai SAKIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2024

Pelayanan umum yang baik harus didukung oleh perencanaan pembangunan yang berkualitas. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas salah satunya ditunjukkan dengan nilai **Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)**. Nilai IPPN Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 secara umum mencapai predikat sangat baik (93,89). Nilai IPPN tersebut terdiri dari nilai aspek sinergitas keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran antara Daerah-Nasional sebesar 27,53, aspek kualitas perencanaan yaitu keselarasan antara isu strategis

dengan target dan program kegiatan antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan jangka pendek dan inovasi sebesar 56,36, serta aspek keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja sebesar 10,00. Berdasarkan rincian per aspek tersebut masih terdapat substansi penilaian indikator/sub indikator dengan predikat cukup baik, bahkan terdapat substansi yang indikator/sub indikator dengan predikat sangat kurang khususnya pada aspek sinergitas keselarasan antara sasaran dan prioritas pembangunan antara RPJMD dengan RPJMN serta keselarasan antara SPM Daerah dengan Nasional. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah diarahkan berbasis risiko, dan riset guna peningkatan kualitas. Perencanaan berbasis risiko dimaksudkan agar perangkat daerah mampu mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi serta mengendalikan risiko yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Disamping itu, perencanaan juga diarahkan memanfaatkan hasil riset. Kondisi saat ini hasil riset belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu perlu pemanfaatan hasil riset dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data, serta membantu mengindentifikasi masalah dan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam perencanaan.

b. Hukum Berkeadilan, Ketentraman dan Ketertiban, serta Demokrasi Substansial

Salah satu wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam implementasi Hak Asasi Manusia diantaranya mendukung Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dengan melaksanakan dan melaporkan Aksi HAM setiap tahun. RANHAM merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia. Sedangkan Aksi HAM adalah penjabaran lebih lanjut dari RANHAM yang berfokus pada 4 (empat) peningkatan hak-hak kelompok rentan dan marjinal yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.

Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan HAM, **Capaian Aksi HAM** Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi. Tahun 2021 capaian aksi HAM Provinsi Jawa Tengah sebesar 96,7, sempat mengalami penurunan menjadi 52,0 pada tahun 2022 tetapi kembali meningkat menjadi 95,0 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, capaian aksi HAM Provinsi Jawa Tengah meningkat 4,8 poin menjadi 99,8.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat ketenteraman dan ketertiban sebuah wilayah terutama yang dirasakan oleh masyarakat adalah dari seberapa banyak **penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya**. Kondisi tersebut di Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang sebesar 63,5 menjadi sebesar 74,56 pada tahun 2020.

Dari sisi penerapan demokrasi substansial di Jawa Tengah, dapat diukur dengan indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 turun 2,49 poin dari tahun 2023. Variabel berkaitan terjaminnya kesetaraan, dimana partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan publik, khususnya melalui lembaga perwakilan mengalami penurunan yang signifikan. Selain itu terkait dengan aspek kebebasan

berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat antar masyarakat, maupun kebebasan berkeyakinan mengalami penurunan meskipun tidak terlalu banyak.begitu juga pada aspek kebebasan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak pekerja dan pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

c. Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah

Salah satu yang dapat merepresentasikan kondisi umum dalam menjaga kondusivitas wilayah adalah dengan melihat **Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah** dari Lemhannas-RI. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, capaian Provinsi Jawa Tengah kurun waktu 2019 - 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19.
Capaian Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Tren Kinerja
Indeks Ketahanan Nasional Jateng		**2,98**	**3,02**	**3,04**	**3,05**	**3,03**	**Menurun**
1	Gatra Geografi	2,63	3,73	3,33	3,43	3,43	Stagnansi
2	Gatra Demografi	3,12	3,28	3,28	3,29	3,22	Menurun
3	Gatra Kekayaan Alam	2,68	2,76	2,76	2,76	2,74	Menurun
4	Gatra Ideologi	2,92	2,98	2,98	2,98	2,96	Menurun
5	Gatra Politik	3,15	3,14	3,14	3,15	3,08	Menurun
6	Gatra Ekonomi	2,98	2,99	2,99	2,99	2,99	Stagnansi
7	Gatra Sosial Budaya	3,19	2,95	2,95	2,95	2,98	Meningkat
8	Gatra Pertahanan dan Keamanan	2,97	3,02	3,02	3,02	3,02	Stagnansi

Sumber : LEMHANAS, 2024

Indeks ketahanan gatra merupakan agregat dari indeks ketahanan variabel, dan indeks ketahanan variabel merupakan agregat dari indeks ketahanan indikator. Dengan demikian indeks ketahanan nasional dapat ditinjau berdasarkan komposisi variabel maupun indikator pembentuknya. Nilai atas beberapa komposisi variabel dan indikator yang membentuk indeks ketahanan nasional Provinsi Jawa Tengah sebagaimana berikut:

a. 11 variabel dan 107 indikator berada pada posisi Rawan,
b. 20 variabel 57 indikator berada pada posisi Kurang Tangguh,
c. 31 variabel dan 102 indikator berada pada posisi Cukup Tangguh,
d. 24 variabel dan 48 indikator berada pada posisi Tangguh,
e. 11 variabel dan 135 indikator berada pada posisi Sangat Tangguh.

Beberapa indikator yang masuk dalam kategorisasi Rawan dan Kurang Tangguh memiliki implikasi jangka pendek dan menengah. Secara jangka pendek akan menjadi potensi-potensi konflik yang dapat membesar dan menjadi simpul kerawanan, dimana secara jangka menengah menjadikan konflik tersebut meluas dan kompleks. Beberapa indiaktor dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20.
Daftar Indikator pada Seluruh Gatra di Indeks Ketahanan Nasional yang Tergolong Kurang Tangguh dan Rawan

Variabel	Indikator	Capaian Jawa Tengah			Rata-Rata Provinsi Tahun 2023	
		2022	2023	Skor 2023	Nilai 2023	Skor 2023
Ketersediaan Pangan	Persentase produksi gula terhadap kebutuhan	44	44	1	113,54	5
	Persentase produksi kedelai terhadap kebutuhan	20,35	20,35	1	45,43	1
	Persentase produksi daging sapi terhadap kebutuhan	74,98	63,78	1	95,38	4
Sumber daya air	Persentase kebutuhan air untuk rumah tangga yang terpenuhi dari sumber air bersih PDAM	18	18	1	22,43	1
Hutan dan hasil hutan	Persentase luas kawasan hutan terhadap daratan	19,21	19,21	1	41,53	5
Kondisi lingkungan hidup	Keanekaragaman hayati (persentase luas hutan primer terhadap total luas hutan lindung ditambah hutan konservasi)	3,74	3,74	1	8.051,80	5
Toleransi	Frekuensi dialog antar umat beragama tahun terakhir	2	2	1	5,94	1
	Frekuensi konflik fisik antar umat beragama tahun terakhir	2	2	4	1	4
	Frekuensi konflik fisik intra ummat beragama tahun terakhir	1	1	4	0,7	4
Kewajiban Sosial	Persentase anak terlantar terhadap seluruh anak berusia < 15 tahun	0,61	0,61	5	2,96	4
Solidaritas Sosial	Jumlah panti asuhan per 100.000 penduduk berusia < 15 tahun	8,91	8,91	1	8,64	1
	Jumlah panti jompo per 100.000 penduduk berusia > 65 tahun	1,64	1,64	2	4,06	5
	Persentase alokasi dana APBD untuk bantuan sosial	2,08	2,08	1	1,64	1
Kesetaraan (gatra Ideologi)	Rasio Kapasitas Fiskal (Dana Bagi Hasil + Pajak Asli Daerah) terhadap (Dana Alokasi Umum dan Dana	1,47	0,38	1	2,26	3

Variabel	Indikator	Capaian Jawa Tengah			Rata-Rata Provinsi Tahun 2023	
		2022	2023	Skor 2023	Nilai 2023	Skor 2023
	Alokasi Khusus) dalam tahun terakhir					
Kepastian Hukum	Independensi sistem peradilan dari kekuasaan birokrasi	8	8	1	4,94	1
Kelompok Bisnis/Usaha	Pemberdayaan lembaga ekonomi lokal dan UMKM	0,03	0,3	1	58,87	3
Ormas Pemuda	Independensi ormas pemuda dari partai politik	80	80	1	16,77	4
Sandang	Persentase pengeluaran sandang terhadap pengeluaran total perkapita	2,77	2,26	1	2,56	1
Pertambahan Kekayaan	Pertumbuhan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan	-3.27	-3,27	1	-2,67	1
Eksklusi Sosial	Rasio wanita rawan ekonomi per 1.000 penduduk wanita	50,59	48,46	1	8,75	2
Pendidikan	Tingkat kelulusan SLTA	49,79	57,79	1	63,85	1
	Persentase SLTA swasta terhadap seluruh SLTA	72,91	57,55	2	40,72	3
	Rata-rata lama pendidikan (sekolah) yang ditempuh (dalam tahun)	8,19	8,01	1	8,93	1
	Rata-rata lama pendidikan (sekolah) yang ditempuh laki-laki (dalam tahun)	8,45	8,45	1	9,21	2
	Rata-rata lama pendidikan (sekolah) yang ditempuh perempuan (dalam tahun)	7,63	7,63	1	8,71	1
	Akreditasi SD (Persentase SD yang terakreditasi A atau B)	17,78	17,78	1	20,03	1
	Akreditasi SLTP (Persentase SLTP yang terakreditasi A atau B)	19,62	29,57	1	22,51	1
	Akreditasi SLTA (Persentase SLTA yang terakreditasi A atau B)	14,28	26,42	1	31,21	1
Kesehatan	Persentase desa yang memiliki polindes	14,39	14,39	1	18,05	1
Keluarga	Rasio perceraian terhadap 1.000 pasangan suami-isteri	210,71	241,97	1	217,25	1
Kerukunan Sosial	Jumlah konflik fisik masal (antar desa/kampung, suku, ormas dan kelompok masyarakat lain) yang terjadi dalam setahun terakhir	233	233	1	93,5	1
	Jumlah Konflik antara aparat pemerintah dengan masyarakat	251	251	1	31	1

Sumber: LEMHANAS, 2024

Selanjutnya, salah satu indikator daya saing daerah adalah **Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).** Nilai IDSD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 sebesar 3,84, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 3,89. Jika dibandingkan dengan IDSD Nasional yang sebesar 3,43, nilai IDSD Jawa Tengah pada tahun 2024 lebih baik. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan nilai IDSD Provinsi di Pulau Jawa – Bali, nilai IDSD Jawa Tengah tahun 2024 terendah. Dibandingkan dengan daerah lain se Jawa-Bali, Jawa Tengah memiliki keunggulan dalam komponen lingkungan pendukung dan ekosistem inovasi. Di sisi lain, Jawa Tengah lemah dalam komponen pasar dan sumber daya manusia. Dari aspek pilar, Jawa Tengah memiliki keunggulan pada pilar Institusi, Ukuran Pasar dan Kapabilitas Inovasi. Di sisi lain lemah dalam pilar Sistem Keuangan, Pasar Produk, dan Pasar Tenaga Kerja jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa-Bali.

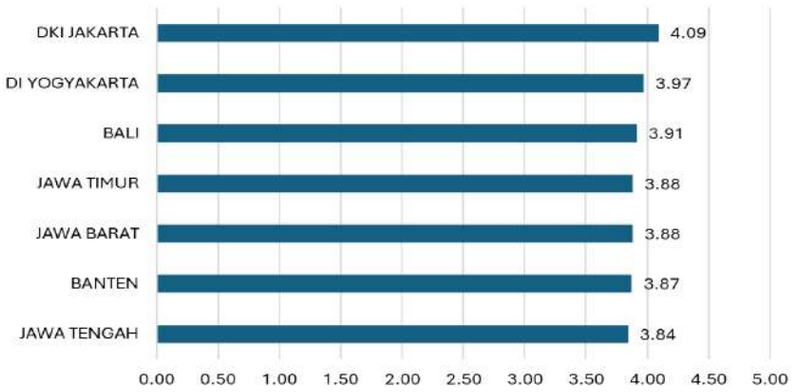

Sumber: BRIN, 2025

Gambar 2.55.
Indeks Daya Saing Daerah Provinsi di Pulau Jawa-Bali Tahun 2024

Berdasarkan skor komponen pembentuk IDSD, capaian pada tahun 2024 pada komponen lingkungan pendukung, komponen sumber daya manusia dan komponen ekosistem inovasi meningkat dari tahun 2023. Sedangkan komponen pasar mengalami penurunan pada tahun 2024. Nilai komponen ekosistem inovasi tertinggi dibandingkan komponen lainnya sebesar 4,52. Hal ini dikarenakan tingginya nilai pilar dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi. Adapun komponen pasar memiliki nilai terendah sebesar 2,88 menurun dibanding 2023 yang sebesar 3,50. Hal ini dikarenakan nilai pilar pasar produk dan sistem keuangan yang rendah.

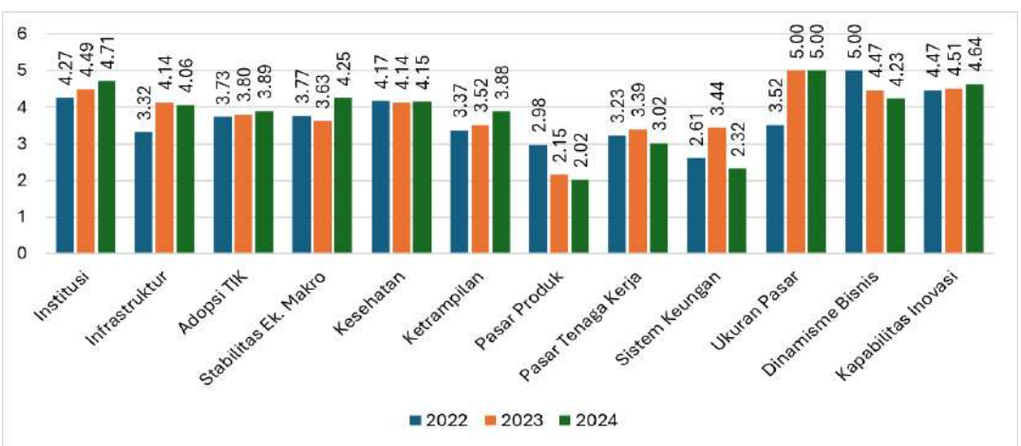

Sumber: BRIN, 2025

Gambar 2.56.
Skor Pilar IDSD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024

Sedangkan dalam rangka memberikan gambaran kepemimpinan daerah di Jawa Tengah, salah satunya dapat dilihat dari pilar pembentuk Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yaitu Pilar 1 **Kapasitas Institusi**. Kapasitas institusi mampu memberikan gambaran bagaimana kepemimpinan kepala daerah dalam mengelola daerah/institusinya sehingga daerah memiliki pengaruh terhadap nasional maupun internasional. Kapasitas institusi merepresentasikan bagaimana daerah mampu mewujudkan keamanan, *check* dan *balance* termasuk kebebasan pers di dalamnya, pencegahan korupsi, hak atas kepemilikan serta orientasi masa depan pemerintah daerah dalam konteks stabilitas kebijakan berbisnis dan pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2024, capaian kapasitas institusi Jawa Tengah sebesar 4,71, meningkat dari capaian tahun 2023 yang sebesar 4,49.

Pada pilar (1) Institusi ini, dari sebanyak 14 indikator, terdapat dua indikator yang memerlukan perhatian karena nilai pada tahun 2024 menurun dari tahun 2023 yaitu jumlah penangkapan terduga teroris yang mengalami penurunan indeks dari 3,18 di 2023 menjadi 2,71 pada 2024; dan kualitas administrasi pertanahan juga menurun dibanding tahun 2023 dari 4,90 menjadi 4,12 pada tahun 2024. Sementara itu, 12 indikator lainnya mengalami peningkatan dan telah mencapai nilai maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas institusi di Jawa Tengah relatif sudah mapan. Indikator yang sudah mendapatkan nilai maksimal adalah keandalan layanan kepolisian, transparansi anggaran, indeks SPBE, kinerja instansi pemerintah, pelaksanaan reformasi birokrasi, dan upaya pencegahan korupsi. Indikator lain yang cukup bagus dan perlu dipertahankan antara lain kejahatan terorganisir, modal sosial, kebebasan pers, hak atas kepemilikan, dan tingkat pengelolaan lingkungan.

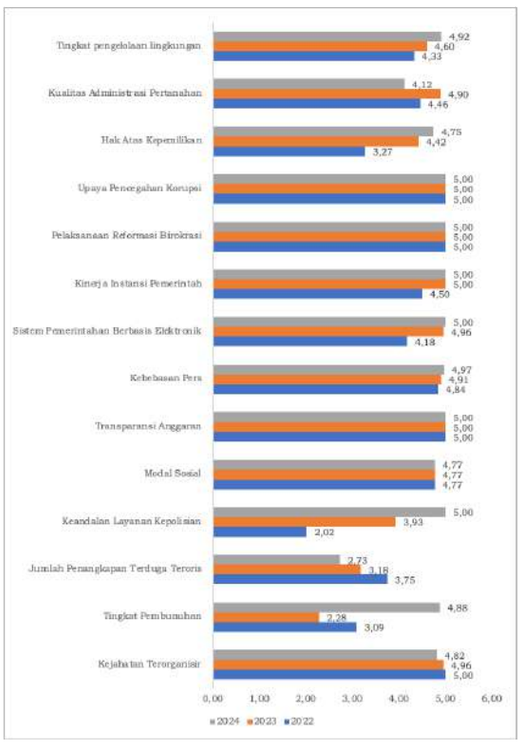

Sumber: BRIN, 2024

Gambar 2.57.
Skor Pilar 1 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) – Kapasitas Institusi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024

d. Kerja Sama Daerah

Penyelenggaraan kerja sama pemerintah daerah meliputi beberapa bentuk antara lain Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD), Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK), Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang terdiri atas Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL). Terkait KSDPL terdiri atas: a) kerja sama sister atau kembar/bersaudara di berbagai level administrasi; dan b) kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat. Sementara itu, KSDLL terdiri atas: a) kerja sama atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat, yaitu dengan organisasi internasional, lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri, dan mitra pembangunan luar negeri; dan b) kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan pemerintah pusat, contohnya pemerintah daerah dengan universitas di luar negeri.

Kerja Sama Dalam Negeri

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama ini telah melaksanakan kerja sama dengan enam provinsi lain di Indonesia. Sinergi lainnya juga dilakukan diantaranya dengan Ombudsman berkaitan dengan Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak berkaitan dengan Percepatan Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Provinsi Jawa Tengah; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum berkaitan dengan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Dan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah; Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah berkaitan dengan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data Induk Pendidikan; serta Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkaitan dengan Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keadilan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan kerja sama dengan pihak ketiga secara intensif, dimana pada tahun 2025 dilakukan kolaborasi dengan 44 perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah.

Potensi Kerja Sama Luar Negeri

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalin hubungan *sister province* dengan 4 (empat) daerah di luar negeri yang difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri melalui perwakilannya di negara tersebut, yaitu Queensland- Australia (sejak tahun 1991), Fujian-Tiongkok (sejak tahun 2003), Chungcheongbuk-do-Korea Selatan (sejak tahun 2004) dan Siem Reap (sejak tahun 2007). Adapun beberapa kerja sama teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM, yaitu IHE Delft- Belanda (2016 – 2020) dalam bentuk kursus *Tailor of Training* bagi tim perumus kebijakan pengelolaan sumber daya air.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan evaluasi terhadap program penerusan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian/ Lembaga) dengan Pihak Luar Negeri melalui NGO maupun INGO, sebagai berikut:

No	Mitra	Bidang Kerjasama
1	ASB Jerman	Peningkatan kapasitas adaptasi komunitas di wilayah desa pesisir dan wilayah rawan bencana melalui tindakan praktis dan pembelajaran berbasis komunitas yang inklusif
2	OISCA INTERNATIONAL Jepang	Peningkatan Kapasitas dan Kemandirian Masyarakat di bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup
3	USAID MADANI Amerika	Peningkatan kapasitas dan keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)
4	CHILD FUND INTERNATIONAL Amerika	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
5	USAID IUWASH Amerika	Peningkatan akses ketersediaan air minum, sanitasi, dan higiene yang dikelola aman di daerah rentan guna mewujudkan permukiman yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan sesuai target SDGs
6	JHPIEGO Amerika	Upaya perluasan dan peningkatan kualitas layanan Keluarga Berencana Pascapersalinan (KBPP) melalui program "KBPP Pilihan"
7	PRISMA Australia	Pengembangan komoditi pertanian perkebunan dan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
8	RIKOLTO Swedia	Peningkatan kapasitas pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa bidang ekonomi dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan
9	KAS Jerman	Promosi nilai - nilai demokrasi
10	AHF (AIDS HEALTHCARE FOUNDATION) Amerika	Pencegahan penularan, mitigasi dampak dan penanganan HIV melalui rehabilitasi sosial bagi ODHIV, Peningkatan akses layanan kesehatan, pendampingan sosial dan psikososial bagi ODHIV
11	Kedutaan Besar Australia	Peningkatan kerja sama bidang pendidikan melalui beasiswa Australia bagi masyarakat Jawa Tengah tahun 2025; Perluasan kerja sama bidang pertanian dan perdagangan yang mendukung program swasembada pangan dan upaya peningkatan ekspor produk asal Jawa Tengah ke Pasar Australia
12	Kedutaan Besar Bulgaria	Peningkatan kinerja perdagangan dan investasi Bulgaria di Jawa Tengah; mempromosikan pariwisata bertema *heritage* seperti Rumah Atsiri Karanganyar; Bulgaria siap bantu Jawa Tengah untuk Pengelolaan sampah berbasis teknologi
13	Zurich Foundation dan Mercy Corps Indonesia (MCI)	Kerja sama proyek pengelolaan kawasan pesisir terpadu di wilayah Pantai Utara (Pantura) sampai dengan tahun 2028

14	AIDS Healthcare Foundation Amerika Serikay	Mitigasi dampak penanganan HIV melalui rehabilitasi sosial bagi individu yang hidup dengan virus HIV atau yang telah terdiagnosis memiliki AIDS (ODHA) dan Peningkatan Akses Layanan Kesehatan ODHA di Jawa Tengah tahun 2025 sampai dengan 2026.
15	FOCUS (*Fisherfolk Empowerment for Climate Resilience and Sustainability*)	Bertujuan untuk membangun pengelolaan pesisir terpadu guna menciptakan sistem pangan berkelanjutan bagi komunitas nelayan, termasuk perempuan, di Jawa Tengah, khususnya di lima kabupaten, yaitu Semarang, Demak, Kendal, Jepara, dan Batang tahun 2023 sampai dengan 2025.
16	SOLUSI (*Solutions for Integrated Land- and Seascape Management in Indonesia*)	Secara resmi dirilis pada 23 Januari 2024 dengan pelaksanaan proyek sampai dengan Desember 2028, kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Jerman melalui Kementerian PPN/ BAPPENAS dan *Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Nuclear Safety and Consumer Protection* (BMUV) dengan komitmen pendanaan dari *International Climate Initiative* (IKI). SOLUSI merupakan inisiatif strategis untuk mengatasi degradasi lahan dan bentang laut di Indonesia, dengan meningkatkan ketahanan ekosistem, serta mendorong mata pencaharian yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan iklim, lokus proyek di Bangka Belitung, Jawa Tengah (Banyumas – Cilacap – Kebumen) dan Sulawesi Tengah

Selanjutnya kerja sama melalui *sister province* antara lain sebagai berikut:

1.	Chungcheongbuk-do	a. KOICA mendukung pembangunan daerah sebagai berikut: - Pengiriman 2 tenaga World Friends Korea di universitas yang ada di Jawa Tengah - Provinsi Jawa Tengah menjadi tamu dalam program ODA Project yaitu Pelatihan *Local Government* bagi ASN pada tahun 2019 b. Beasiswa *Chungbuk Working International Student* yang merupakan implementasi program *Sister Province* Jawa Tengah dengan Chungcheongbuk-do, Korea Selatan dengan target 100 orang/tiap tahun sampai dengan tahun 2028 c. Pemberian bantuan *Solar Street Light System* di Kabupaten Batang

2.	QUEENSLAND	a. Kerja sama peningkatan kualitas pengajar yaitu peningkatan kompetensi guru bahasa baik dari Jawa Tengah dan Queensland, serta mempelajari budaya di masing-masing daerah b. *Link and match* bagi para pelaku usaha/ industri/investasi/pariwisata serta *one-on-one meeting* pada kegiatan yang dilaksanakan di Queensland c. Bantuan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi Jawa Tengah pasca Covid-19
3.	FUJIAN	a. Jawa Tengah berpartisipasi dalam acara Fujian – ASEAN *Friendship Provinces Conference Online*, *Expo China International Fair for Investment and Trade* (CIFT) di Xiamen b. Program pertukaran guru c. Beasiswa kepada mahasiswa di universitas di Jawa Tengah

Kerja sama yang dilakukan tersebut, membuka peluang yang menguntungkan bagi masyarakat Jawa Tengah, antara lain:

1. Alih teknologi

Globalisasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, aliran data digital, serta pariwisata semakin menguat. Hal ini membuka peluang pertumbuhan ekonomi perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (*start-up*), dan UMKM yang mendapat bantuan pendampingan dari pihak luar negeri.

Perwujudan transformasi digital di Indonesia terlihat dari pemberlakuan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) beserta kebijakan dan regulasinya, digitalisasi pelayanan publik, platform digital partisipasi masyarakat, serta keterbukaan informasi. Di samping itu, terjadinya alih teknologi ini bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah jangka panjang tahun 2025 – 2045.

2. Keselamatan/perlindungan masyarakat yang bersifat urgensi dan tidak terduga

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 sampai dengan 2022 memberi pelajaran dan pengalaman dalam menerapkan skema kerja sama yang saling menguntungkan bagi Jawa Tengah dengan mitra *sister province*. Pada saat itu, sama – sama mengalami masa sulit namun tetap membantu masyarakat Jawa Tengah dengan mengirim alat pelindung diri dan bantuan donasi untuk pemulihan ekonomi sejumlah 20 miliar rupiah.

Program lainnya adalah melakukan penanaman mangrove untuk mencegah bencana, mengajari masyarakat (mulai dari sekolah dasar) sigap mengenali bencana alam hingga cara menyelamatkan diri dan bertahan hidup.

Program pendampingan kesehatan untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi baru lahir mulai dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit, termasuk pencegahan penyakit berbahaya dan menular.

Program kerja sama ini didukung oleh Pemerintah Pusat yang bekerja sama dengan *international organization* (pemerintah maupun nonpemerintah) yang selanjutnya diteruskan ke provinsi dan kabupaten/kota sebagai lokasi fokus terpilih. Program ini akan berkelanjutan selama tahun 2025 – 2045.

3. *Peningkatan kesejahteraan masyarakat*

Program *city branding* promosi pariwisata dan budaya untuk menarik turis manca negara datang ke Jawa Tengah, sehingga menghidupkan ekonomi dan kesejahteraan masayarakat sekitar tempat wisata hingga penginapan, transportasi dan tempat belanja. Program *city branding* juga untuk menarik para investor baik PMDN maupun PMA untuk melakukan kegiatan ekonomi di Jawa Tengah.

Saat ini Indonesia merupakan anggota dari 200 organisasi internasional. Pemanfaatan keanggotan pada organisasi internasional tersebut perlu juga dimaksimalkan untuk kepentingan daerah yang selaras dengan kepentingan nasional, dengan mendorong agar kerja sama yang ditawarkan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam berbagai kesempatan mendapatkan undangan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri untuk berperan aktif menghadiri pertemuan bersifat internasional yang bermanfaat bagi daerah, namun belum secara optimal berperan secara aktif.

Program kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terakhir adalah rencana kerja sama dengan Pemerintah Jepang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjajaki kerja sama untuk membangun *sister province* baru dengan Prefektur Hyogo, Jepang pada tahun 2023 dan akan meningkatkan ke tahap yang lebih serius dengan menyusun potensi kerja sama di bidang penanggulangan bencana, pertanian dan kebudayaan pada tahun 2024 kemudian tahap penandatanganan MoU pada tahun 2025 dan pelaksanaan program yang berkelanjutan yang akan disusun setiap 5 tahun.

e. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Tengah telah diklasterisasi menurut *core business* tiap BUMD melalui peraturan daerah perubahan bentuk hukum masing-masing BUMD menjadi persero daerah (perseroda). Adapun perda-perda tersebut yaitu:

1. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2022 untuk PT Bank Jateng (Perseroda);
2. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 untuk PT BPR BKK Jateng (Perseroda);
3. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 untuk PT BPR BKK (Perseroda) se-Jawa Tengah;
4. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2023 untuk PT Jamkrida Jateng (Perseroda);
5. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 untuk PT Jawa Tengah Agro Berdikari/JTAB (Perseroda);
6. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 untuk PT Jateng Petro Energi/JPEN (Perseroda);

7. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2021 untuk PT Pusat Rekreasi Promosi dan Pembangunan/PRPP Jawa Tengah (Perseroda);
8. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2023 untuk PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah/SPJT (Perseroda); dan
9. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2021 untuk PT Tirta Utama Jawa Tengah/TUJT (Perseroda).

Kegiatan utama yang dilaksanakan oleh masing-masing BUMD sebagai berikut:

1. BPR BKK
   a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
   b) Menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
   c) Melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
   d) Melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
   e) Melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
   f) Melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
   g) Melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
   h) Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Jamkrida
   a) Memberikan penjaminan kepada perbankan maupun nonperbankan atas kredit yang diberikan kepada UMKM;
   b) Memberikan jaminan/ganti rugi atas gagal bayar (kolektibilitas macet) yang disalurkan perbankan maupun nonperbankan kepada UMKM.
3. BPD Jateng
   a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
   b) Menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah;
   c) Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
   d) Menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
   e) Menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi surat berharga untuk kepentingan bank dan/atau nasabah;
   f) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
   g) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
   h) Melakukan kegiatan pengalihan piutang;
   i) Melakukan kegiatan penitipan barang dan surat berharga;
   j) Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
4. PT JTAB (Perseroda)
   a) Melakukan kegiatan usaha dalam bidang pangan;

b) Melakukan kegiatan usaha dalam bidang pertanian;
c) Melakukan kegiatan usaha dalam bidang peternakan;
d) Melakukan kegiatan usaha dalam bidang perkebunan; dan
e) Melakukan kegiatan usaha dalam bidang perikanan.

5. PT JPEN (Perseroda)
   a) Melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;
   b) Melakukan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi;
   c) Melakukan kegiatan usaha sektor energi; dan
   d) Melakukan kegiatan usaha sektor mineral.

6. PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda)
   a) Melakukan kegiatan usaha dalam bidang pariwisata;
   b) Melakukan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi kreatif;
   c) Melakukan kegiatan usaha dalam bidang promosi; dan
   d) Melakukan kegiatan usaha dalam bidang Pendidikan.

7. PT SPJT (Perseroda)
   a) Melakukan kegiatan usaha dalam bidang infrastruktur;
   b) Melakukan kegiatan usaha dalam bidang manufaktur/industri pengolahan; dan
   c) Melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa konstruksi beserta sub-sub bidangnya.

8. PT TUJT (Perseroda)
   a) Melakukan kegiatan usaha dalam bidang pengelolaan dan penyediaan air bersih bagi masyarakat;
   b) Memproduksi air bersih dan/atau air minum;
   c) Mendistribusikan air bersih dan/atau air minum kepada pelanggan; dan
   d) Mendirikan, membangun, dan/atau mengelola instalasi pengolahan, serta jaringan distribusi air bersih dan/atau air minum.

Kontribusi masing-masing BUMD untuk pembangunan Jawa Tengah sebagai berikut:

1. BPR BKK
   a) Mendorong pengembangan UMKM Jawa Tengah melalui penyaluran kredit UMKM
      - Pada posisi per 31 Mei 2025, dana yang disalurkan dalam bentuk kredit oleh 33 PT BPR BKK (Perseroda) kepada sektor UMKM adalah sebesar Rp4.694.581.351.281 atau sebesar 51,78 persen dari total keseluruhan kredit;
   b) Mendorong ekonomi digital di Jawa Tengah melalui pemberian layanan perbankan berbasis digital;
   c) Melalui setoran dividen, berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)
      - Pada tahun 2025, dividen yang disalurkan atas Hasil Usaha tahun 2024 dari total 33 PT BPR BKK (Perseroda) se-Jawa Tengah adalah sebesar Rp115.719.194.743, sedangkan untuk PT BPR BKK Jateng (Perseroda) adalah sebesar Rp20.505.417.682;
   d) Penyediaan fasilitas jasa keuangan melalui penyaluran kredit/pembiayaan;
   e) Membuka lapangan pekerjaan secara profesional dan mengikuti ketentuan berlaku;

f) Berpartisipasi aktif dalam peningkatan daya saing dan mendorong perekonomian daerah
   1) Direncanakan 33 PT BPR BKK (Perseroda) se-Jawa Tengah akan melakukan konsolidasi menjadi BPR konvensional atau yang selanjutnya kegiatan usahanya akan menjadi sistem syariah (diubah menjadi BPR Syariah);
   2) Konversi BPR Konsolidasi menjadi BPR Syariah, dengan pertimbangan:
      - Ceruk pasar yang masih terbuka lebar dan kompetisi pasar syariah masih rendah;
      - Jawa Tengah akan memiliki BPR Syariah terbesar di Indonesia;
      - Seluruh segmen masyarakat di Jawa Tengah terlayani oleh BUMD Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Jamkrida
   a) Mendorong peningkatan jumlah UMKM yang dijamin
      - Per 31 Mei 2025, realisasi dari penjaminan kredit sektor UMKM adalah sebesar Rp962.429.624.351 dengan jumlah NOA sebanyak 177.970 UMKM;
   b) Membantu penyediaan fasilitas jasa keuangan melalui penjaminan kredit/pembiayaan
      - Penyaluran penjaminan kredit pada sektor produktif per 31 Mei 2025 terealisasi sebesar Rp1.132.270.146.295 dengan masing-masing terdiri dari sektor pertanian sebesar Rp164.179.171.213 (30.360 orang), sektor UMKM sebesar Rp962.429.624.351 (177.970 orang), dan sektor korporasi sebesar Rp5.661.350.731 (1.047 orang);
      - Penyaluran penjaminan kredit pada sektor nonproduktif sebesar Rp907.383.064.956 dengan nasabah total 221.187;

3. BPD Jateng
   a) Mendorong pengembangan UMKM Jateng dengan penyaluran kredit UMKM
      1) Bank Jateng telah menyalurkan kredit UMKM kepada 103.072 debitur dengan *outstanding* sebesar Rp18,12 triliun; untuk kategori debitur mikro Bank Jateng telah menyalurkan kepada 32.507 debitur dengan *outstanding* Rp1,89 triliun

Kategori	NOA (Debitur)	*Outstanding* (Rp)
Mikro	33.507	1.896.424.171.402
Kecil	66.849	12.399.539.855.741
Menengah	3.716	3.832.393.910.243
UMKM	103.072	18.128.357.937.386
Non UMKM	384.242	41.175.176.567.607
Total	487.314	59.303.534.504.993

      2) Terkait pembiayaan skala ultra mikro (plafon sampai dengan Rp20 juta), Bank Jateng telah menyalurkan kepada total 760 debitur dan *outstanding* sebesar Rp4,47 miliar dengan rincian sebagai berikut:

Ultra Mikro		
Segmen	**NOA**	**OS**
Ritel	138	1.182.482.111
ULM	622	3.290.742.258
Total	760	4.473.224.369

3) KUR BPD per 31 Mei 2025
   - Secara gabungan (konven dan syariah) disalurkan kepada 12.833 debitur dengan penyaluran sebesar Rp2,311 triliun atau 33,03 persen;
   - Untuk konven sudah menyalurkan KUR kepada 11.067 debitur sebesar Rp1,958 triliun atau mencapai 34,58 persen dari target kuota KUR konven;
   - Untuk syariah sudah menyalurkan KUR kepada 1.766 debitur sebesar Rp353 miliar atau mencapai 26,46 persen dari target kuota KUR syariah;
   - Terhadap penyaluran KUR Mikro, telah disalurkan kepada 3.716 debitur sebesar Rp245 miliar atau mencapai 23,15 persen dari target kuota KUR Mikro.

b) Mengembangkan layanan berbasis digital, seperti dengan *Cash Management System* (CMS) untuk Pemda dan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskudes) berbasis CMS yang mendukung transaksi nontunai bagi Pemerintah Desa di Jawa Tengah;

c) Sumbangsih kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan dividen yang dibagikan sebesar Rp560.145.738.164 atau terealisasi sebesar 101,84 persen dari target murni.

4. PT JTAB (Perseroda)

   PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda) memiliki *core business* di bidang pangan, pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. PT JTAB (Perseroda) telah menjalankan program bisnis yang selaras dengan *core business* antara lain unit pangan (SiManis-Mart, Mobil Kendil, Pangan Mart, penugasan Gerakan Pangan Murah/GPM) dan unit Perkebunan Tlogo yang memroduksi komoditas seperti kopi, buah-buahan, serta karet. Adapun pelaksanaan Gerakan Pangan Murah hingga Maret 2025 telah menyalurkan ±700 ton beras, ±3 ton cabai, ±80 ton gula, ±155 ribu liter minyak goreng, ±5 ton bawang putih, ±3,5 ton bawang merah, ±20 ton telur, ±3,5 ton ikan, dan ±3,5 ton daging ayam. Pengembangan program bisnis pangan yang kini sedang dalam proses yaitu program *offtaker* beras (beras ASN dan beras retail) dan Pasar Agro Modern Suropadan di Kabupaten Temanggung. Pengembangan program di sektor pangan dilakukan dalam upaya mendukung program pemerintah terkait dengan penyerapan gabah dari petani lokal di Jawa Tengah dengan harga yang kompetitif dan diproses sehingga menjadi produk beras yang memiliki nilai ekonomi yang baik. Diharapkan selain memberikan manfaat kepada masyarakat, pengembangan bisnis tersebut dapat menopang kinerja PT JTAB (Perseroda) melalui penambahan sumber *recurring income*.

5. PT JPEN (Perseroda)

   PT Jateng Petro Energi (Perseroda) menjalankan bisnis di bidang hulu dan hilir migas, energi, dan mineral. Beberapa kegiatan yang telah berjalan yakni pengelolaan PI Blok Cepu melalui anak perusahaan (PT SPHC), penyediaan energi baru terbarukan dengan PLTS untuk RSJD dr. Amino Gondohutomo Semarang, distribusi CNG retail untuk sektor horeka (hotel, restoran, katering termasuk dapur Makan Bergizi Gratis), serta suplai material untuk proyek-proyek di Jawa Tengah (tol Jogja-Semarang). Adapun dikarenakan PI Blok Cepu telah memasuki fase *natural decline* dan pendapatan ikut menurun, maka

diperlukan terobosan-terobosan dalam jangka pendek dan menengah untuk memastikan kestabilan kinerja serta laba. Oleh karena itu, PT JPEN (Perseroda) akan melakukan ekspansi terhadap cakupan pelanggan CNG Retail (eksisting distribusi sebesar 8.200 m^3 dan akan dikembangkan kapasitas sebesar 22.000 m^3 untuk Horeka, Dapur MBG dan industri furnitur), pengembangan *Mother Station* CNG, pengelolaan PI baru di Alas Dara Kemuning, serta melaksanakan penugasan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendirikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Jawa Tengah serta program Desa Mandiri Energi. Kegiatan-kegiatan bisnis tersebut selaras dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan dapat menjadi kontributor pendapatan.

6. PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda)
   PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) memiliki *core business* di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, promosi, dan pendidikan. Saat ini PT PRPP (Perseroda) mengelola kawasan Grand Maerakaca dengan luas 24,88 Ha yang merupakan kawasan pariwisata dan memberikan pendidikan mengenai budaya tiap daerah di Jawa Tengah. Kawasan PRPP merupakan kawasan dengan luas 15,49 Ha yang dilengkapi dengan 4 gedung pertemuan (Sindoro, Sumbing, Merapi, dan Merbabu) yang digunakan utamanya untuk keperluan *event*, hiburan konser, dan penyelenggaraan Jateng Fair. Untuk segera merealisasikan pendapatan, PT PRPP telah mengkerjasamakan area yang dahulu sirkuit untuk dikembangkan menjadi *driving range* golf. Untuk menarik minat pengunjung kembali serta menjadi sumber *recurring income*, sedang berproses revitalisasi kawasan Grand Maerakaca dengan menggandeng PT SPJT (Perseroda) serta revitalisasi kawasan PRPP untuk pengembangan MICE dengan investor. Diharapkan dengan revitalisasi Kawasan Grand Maerakaca dan PRPP, dapat terealisasi kompleks MICE yang terintegrasi dengan pariwisata, ruang publik, dan *sportshub*, sehingga diharapkan dapat menjadi pusat *event* di Jawa Tengah.

7. PT SPJT (Perseroda)
   PT Sarana Pembangungan Jawa Tengah (Perseroda) merupakan BUMD yang bergerak dalam bidang usaha infrastruktur, manufaktur, dan jasa konstruksi. Saat ini PT SPJT (Perseroda) sedang mengelola Pabrik Garam Pati yang memiliki kapasitas produksi garam industri sebesar 25.000 ton per tahun atau 2.000 ton per bulan dan telah bekerja sama menyalurkan garam industri ke 21 perusahaan. PT SPJT akan menambahkan kapasitas di Pabrik Garam Pati dan mengembangkan Pabrik Garam di Brebes untuk mengoptimalkan potensi produksi garam di Jawa Tengah. Selain manufaktur garam industri, PT SPJT memiliki unit konstruksi yang telah menangani beberapa proyek konstruksi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BUMD Provinsi Jawa Tengah, serta BUMN.

8. PT TUJT (Perseroda)
   PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) merupakan BUMD yang bergerak dalam bidang usaha pengelolaan dan penyediaan air bersih. Saat ini PT TUJT telah mengelola 3 (tiga) SPAM Regional Jawa Tengah, yaitu SPAM Regional Bregas, SPAM Regional Keburejo, dan SPAM Regional Petanglong yang telah menyalurkan 1.150 liter/detik di 8 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan menyalurkan air bersih ke 138.000 sambungan rumah (SR) atau 552.000 orang. Untuk mendukung sumber pendapatan di luar SPAM Regional, sedang

diupayakan penyediaan air bersih untuk kawasan industri khususnya KITB dan Sayung. Penyediaan air bersih di Sayung direncanakan akan melibatkan 3 pihak, yaitu PT TUJT, PDAM Kota Semarang, dan PDAM Kabupaten Demak dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air di wilayah Sayung dan mencegah *land subsidence* lebih lanjut akibat pengambilan air tanah untuk kebutuhan industri. Adapun PT TUJT akan mengelola SPAM Regional baru, yaitu SPAM Regional Wosusokas (Wonogiri, Sukoharjo, Surakarta, Karanganyar) dengan kapasitas tahap I yaitu 750 lps. Meskipun diproyeksi rugi operasional pada tahun pertama, diharapkan dengan adanya komunikasi intens antara PT TUJT dengan *offtaker* penyerapan dapat terakselerasi dan segera membukukan laba.

2.1.5. Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Gambaran capaian kinerja pembangunan daerah dari seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah Jawa Tengah digambarkan dari capaian kinerja:

a. Indikator Kinerja Kunci (IKK) bersumber dari LPPD;
b. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah berdasarkan RPJMD Tahun 2018-2023 dan RPD Tahun 2024-2026.

Berikut dijabarkan capaian kinerja tersebut.

1. **Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

   Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator yang menggambarkan ukuran keberhasilan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang secara rutin dilaporkan melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Berikut gambaran capaian IKK *outcome* Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2021-2024.

Tabel 2.21.

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2024

No. IKK	Urusan	IKK *Outcome*	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar					
1.a.1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	66,25	92,62	94,97	92,71
1.a.2	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	84,22	99,84	86,03	88,53
1.b.1	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1,32	1,42	1,39	1,21
1.b.2	Kesehatan	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	100,00	100,00	100,00	100,00
1.b.3	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100,00	100,00	100,00	100,00
1.b.4	Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100,00	100,00	100,00	100,00
1.c.1.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	18,75	20,62	22,04	22,96

No. IKK	Urusan	IKK *Outcome*	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
1.c.1.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	5,90	9,50	9,50	2,16
1.c.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	82,71	82,80	83,00	84,83
1.c.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	100,00	100,00	100,00	100,00
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPALD Regional	0,00	0,00	0,00	0,00
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kemantapan jalan	90,86	92,49	90,88	91,47
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	100,00	15,81	44,47	95,58
1.d.1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100,00	100,00	99,79	100,00
1.d.2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0,00	100,00	100,00	100,00
1.d.3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentasi Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	61,94	67,80	93,12	35,87
1.d.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	25,90	30,90	35,29	38,33
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	100,00	100,00	100,00	100,00

No. IKK	Urusan	IKK *Outcome*	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
1.e.2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100,00	100,00	100,00	100,00
1.e.3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	66,67	100,00	100,00	100,00
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan pra bencana	100,00	100,00	100,00	100,00
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100,00	100,00	100,00	100,00
1.f.1	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100,00	100,00	100,00	100,00
1.f.2	Sosial	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100,00	100,00	100,00	100,00
1.f.3	Sosial	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100,00	100,00	100,00	100,00
1.f.4	Sosial	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100,00	100,00	100,00	100,00
1.f.5	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100,00	100,00	100,00	100,00
	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
2.a.1.1	Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	97,14	100,00	100,00	100,00
2.a.1.2	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,19	2,91	3,88	9,03
2.a.2	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	5591,67	5711,23	5515,85	5546,64
2.a.3	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	83,98	83,98	89,00	19,07

No. IKK	Urusan	IKK *Outcome*	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
2.a.4	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	50,63	70,52	71,09	73,76
2.a.5	Tenaga Kerja	Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	26,54	20,38	90,50	9,97
2.b.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1,41	13,19	2,78	10,39
2.b.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	1,10	10000,00	0,99	1,11
2.b.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	5,11	4,38	4,64	4,38
2.c.1	Pangan	Persentase cadangan pangan	6,81	10,71	23,67	65,43
2.d.1	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0,00	100,00	100,00	100,00
2.d.2	Pertanahan	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00
2.d.3	Pertanahan	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota	0,00	100,00	0,00	100,00
2.e.1	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	67,48	67,53	68,59	69,46
2.e.2	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatanterhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100,00	26,98	23,08	46,15
2.f.1.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	100,00	100,00	100,00	100,00
2.f.1.2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemanfaatan data kependudukan	100,00	100,00	100,00	27,78

No. IKK	Urusan	IKK *Outcome*	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
2.g.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	45,49	54,79	59,09	71,43
2.g.2	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	6,21	16,21	23,57	25,89
2.h.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,09	2,09	2,04	2,09
2.h.2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	70,35	65,18	64,99	69,24
2.h.3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	14,29	10,31	8,58	7,79
2.i.1	Perhubungan	Rasio konektivitas Provinsi	0,97	0,95	0,96	0,82
2.i.2	Perhubungan	V/C Ratio di Jalan Provinsi	0,28	0,30	0,28	0,23
2.j.1	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100,00	100,00	100,00	100,00
2.j.2	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100,00	100,00	100,00	100,00
2.j.3	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	100,00	100,00	100,00	100,00
2.k.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	21,28	56,90	57,49	43,59
2.k.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	0,61	0,23	0,25	62,30
2.l	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi	6,57	14,39	12,59	14,83
2.m.1	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	19,90	47,02	93,82	50,89
2.m.2	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	100,00	24,03	24,04	24,19
2.m.3	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	363,00	370,00	467,00	1233,00

No. IKK	Urusan	IKK *Outcome*	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
2.n.1	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100,00	100,00	100,00	100,00
2.n.2	Statistik	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100,00	100,00	100,00	100,00
2.o	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100,00	98,29	99,07	98,76
2.p	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100,00	98,67	98,06	100,00
2.q.1	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	68,30	70,96	71,31	73,91
2.q.2	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	11,33	74,36	64,40	70,57
2.r.1	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	100,00	100,00	100,00	51,41
2.r.2	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100,00	100,00	100,00	100,00
	Urusan Pilihan					
3.a.1	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	864706,75	86,30	82,72	104,11
3.a.2	Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	72,30	72,70	100,00	100,00
3.b.1	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-97,71	7969,77	98,30	-99,98
3.b.2	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	-5,73	117,82	15,02	18,25
3.b.3	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	70,56	67,35	70,89	33,54

No. IKK	Urusan	IKK *Outcome*	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
3.b.4	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	294,72	3,39	3,40	3,56
3.c.1	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	644,46	670,88	633,39	632,60
3.c.2	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-54,24	54,41	-42,02	-69,65
3.d.1	Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	100,00	100,00	81,12	100,00
3.d.2	Kehutanan	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi)	0,04	0,04	0,41	0,15
3.d.3	Kehutanan	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	5,96	4,89	4,56	0,97
3.e.1	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	0,00	100,00	100,00	100,00
3.e.2	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	100,00	100,00	100,00	100,00
3.f.1	Perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	33,14	8,90	-11,73	9,09
3.f.2	Perdagangan	Persentase penanganan pengaduan konsumen	100,00	100,00	100,00	100,00
3.f.3	Perdagangan	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	60,24	95,00	85,71	100,00
3.f.4	Perdagangan	Tertib Usaha	0,00	100,00	0,00	0,00
3.f.5	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	86,66	96,15	82,84	73,32
3.f.6	Perdagangan	Persentasebarang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	95,77	98,41	99,44	100,00
3.f.7	Perdagangan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	2,29	1,02	2,49	5,26
3.g.1	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	104,09	22,06	11,11	18,73
3.g.2	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100,00	98,00	95,09	80,73

No. IKK	Urusan	IKK *Outcome*	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
3.g.3	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	83,33	100,00	100,00	100,00
3.g.4	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	53,33	100,00	100,00	100,00
3.g.5	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0,00	100,00	0,00	0,00
3.g.6	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	125,00	100,00	100,00	100,00
3.h	Transmigrasi	Tidak Ada Kewenangan Provinsi	0,00	0,00	100,00	100,00
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					
4.a.1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	10,17	11,56	15,52	64,43
4.a.2	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	6,43	67,30	67,06	66,91
4.a.3	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	51,72	45,75	57,70	48,76
4.a.4	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	10,00	10,00	10,00	10,00
4.a.5	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,12	3,00	3,00	3,00
4.a.6	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,00	3,00	3,00	3,00
4.i.1	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0,00	0,69	1,44	1,15

No. IKK	Urusan	IKK *Outcome*	Capaian			
			2021	2022	2023	2024
4.i.2	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	217,45	79,34	76,90	94,27
4.i.3	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	100,00	52,95	99,95	62,38
4.i.4	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	16,50	441,35	40,69	-20,50
4.j.1	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	210,77	73,95	56,40	69,97
4.j.2	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	17,02	17,81	17,29	21,35
4.j.3	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1,96	92,84	100,00	100,00
4.k.1	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	4,96	2,40	3,60	2,38
4.k.2	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	1,87	0,62	5,01	3,11
4.k.3	Manajemen Keuangan	Assets management	4,00	4,00	4,00	4,00
4.k.4	Manajemen Keuangan	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	3,36	5,56	3,36	3,36
4.l.1	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	100,13	100,00	99,00	99,15
4.l.2	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: LPPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2024

2. Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2020-2024

Evaluasi kinerja pembangunan daerah Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2020-2024 dilihat dari capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD). Untuk capaian periode tahun 2020-2023 bersumber dari hasil evaluasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Sedangkan capaian periode tahun 2024 bersumber dari hasil evaluasi RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Hasil evaluasi tersebut dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 2.22.

Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2020-2023

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satuan	Target					2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		Dibanding T P-2022	Dibanding T 2023	Dibanding T Akhir RPJMD	
			P-2022	P-2023																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**				**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**																
1	Angka Kemiskinan	%	10,49-10,30	9,86-9,05	Angka Kemiskinan	%	11,19	9,81 - 8,81	9,05 - 8,05	8,27 - 7,27	7,48 - 6,48	7,48-6,48	11,84	11,25	10,98	10,77	10,77	97,40	91,55	69,45	Sedang
2	Indeks Gini	Angka	0,35	0,34	Indeks Gini	Angka	0,35	0,34	0,33	0,32	0,3	0,3	0,359	0,368	0,366	0,369	0,369	94,85	92,14	81,30	Tinggi
3	Persentase penduduk miskin perkotaan	%	9,38 - 9,22	8,82-8,09	Persentase penduduk miskin perkotaan	%	9,67	9,44	9,37	9,21	9,17	9,17	10,57	10,16	10,02	9,78	9,78	94,56	88,91	92,44	Sangat Tinggi
4	Persentase penduduk miskin perdesaan	%	11,65-11,45	10,96-10,05	Persentase penduduk miskin perdesaan	%	12,8	12,65	12,35	12,12	11,97	11,97	13,2	12,44	10,98	11,87	11,87	96,76	91,03	99,42	Sangat Tinggi
5	Pengeluaran per kapita per bulan kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Ribu Rupiah	433,38	450,72	Pengeluaran per kapita per bulan kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Ribu Rupiah	451,28	478,76	493,12	507,91	523,15	523,15	396,87	385,532	418,317	420,42	420,42	97,01	93,28	80,36	Tinggi
6	Angka Partisipasi Sekolah jenjang menengah kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Angka	61,5	61,75	Angka Partisipasi Sekolah jenjang menengah kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Angka	60,83	61	61,25	61,5	61,75	61,75	0,359	58,41	63,16	62,59	62,59	101,77	101,36	101,36	Sangat Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satuan	Target															Dibandingg T P-2022	Dibandingg T 2023	Dibandingg T Akhir RPJMD	
			P-2022	P-2023				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7	Persentase kelompok RT 20% berpenghasilan terendah dengan keluhan kesehatan	%	30	29,75	Persentase kelompok RT 20% berpenghasilan terendah dengan keluhan kesehatan	%	30,86	30,5	30,25	30	29,75	29,75	30,47	27,7	31,95	33	33	110,00	110,92	110,92	Sangat Tinggi
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,75 - 5,69	5,48-4,80	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,51	4,33	4,23	4,13	4	4	6,48	5,95	5,57	5,13	5,13	103,23	98,38	77,97	Tinggi
9	Persentase tenaga kerja kelompok RT 20% berpenghasilan terendah yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu	%	7,48	7,26	Persentase tenaga kerja kelompok RT 20% berpenghasilan terendah yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu	%	5,71	5,65	5,6	5,55	5,5	5,5	7,95	5,51	4,1	6,03	6,03	80,61	83,06	109,64	Sangat Tinggi
10	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,20 - 5,20	5,20-5,60	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,32	5,4-5,7	5,4-5,8	5,5-5,8	5,6-6,0	5,6-6,0	-3,34 (y-o-y)	3,32	5,31	4,98	4,98	101,54	94,29	94,29	Sangat Tinggi
11	Inflasi	%	3,0±1	3,0±1	Inflasi	%	2,82	3,0±1	3,0±1	3,0±1	3,0±1	3,0±1	1,56	1,7	5,63	2,89	2,89	50	50	50	Sangat Rendah
12	PDRB per kapita	Juta Rupiah	39,56	40,87	PDRB per kapita	Juta Rupiah	36,78	39,25	41,15	43,2	45,35	45,35	38,6	38,67	42,15	42,15	42,15	106,55	103,13	92,94	Sangat Tinggi
13	Indeks Williamson	Angka	0,57	0,56	Indeks Williamson	Angka	0,6192	0,59	0,58	0,57	0,56	0,56	NA	0,608	0,656	0,656	0,656	86,89024	85,37	85,37	Tinggi
14	Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	%	3	3,1	Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	%	2,63	2,9	3	3	3,1	3,1	2,48	0,35	2,92	2,11	2,11	70,33	68,06	68,06	Sedang
15	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	2,93	5,65	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	4,35	5,1	5,35	5,6	5,65	5,65	-3,74	2,02	3,88	4,35	4,35	148,46	76,99	76,99	Tinggi
16	Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa	%	2,82	5,9	Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa	%	5,7	5,67	5,7	5,7	5,9	5,9	-3,8	5,8	5,87	6,35	6,35	225,18	107,63	107,63	Sangat Tinggi
17	Pertumbuhan kontribusi	%	15,3	3,2	Pertumbuhan kontribusi	%	3	3,15	3,15	3,2	3,2	3,2	2,99	2,88	9,63	9,63	9,63	62,94	300,94	300,94	Sangat Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satuan	Target P-2022	Target P-2023				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		Dibanding T P-2022	Dibanding T 2023	Dibanding T Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	pariwisata pada PAD				pariwisata pada PAD																
18	Pertumbuhan nilai penanaman modal	%	4,00 - 5,00	9,00- 10,00	Pertumbuhan Investasi	%	15	9	9	10	10	10	-5,8	1,76	11,72	0,22	0,22	72,25	32,11	2,20	Sangat Rendah
19	Nilai Tukar Petani	Angka	103,56	104,05	Nilai Tukar Petani	Angka	102,25	102,42	102,72	102,96	103,15	103,15	101,49	103,18	107,27	117,11	117,11	113,08	112,55	113,53	Sangat Tinggi
20	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	72,49	72,88	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,12	72	72,5	72,7	73	73	71,78	72,16	72,79	73,39	73,39	101,24	100,70	100,53	Sangat Tinggi
21	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,82	7,9	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,35	7,34	7,37	7,41	7,45	7,45	7,69	7,75	7,93	8,01	8,01	102,43	101,39	107,52	Sangat Tinggi
22	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,85	12,94	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,63	12,92	13	13,08	13,17	13,17	12,7	12,77	12,81	12,85	12,85	100,00	99,30	97,57	Sangat Tinggi
23	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,59	74,73	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,18	74,09	74,1	74,1	74,1	74,1	74,37	74,47	74,57	74,69	74,69	100,13	99,95	100,80	Sangat Tinggi
24	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	92,18	92,58	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	91,95	92,06	92,12	92,18	92,25	92,25	NA	92,48	92,83	92,87	92,87	100,75	99,94	100,67	Sangat Tinggi
B	**Aspek Pelayanan Umum**				**Aspek Pelayanan Umum**																
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				**URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**																
	PENDIDIKAN				**PENDIDIKAN**																
1	Disparitas APK SMA/SMK/SLB	%	8,76	6,79	Disparitas APK SMA/SMK/SLB	%	7,37	7,25	7,1	7	6,79	6,79	12,92	8,78	8,78	9,95	9,95	88,04	68,24	68,24	Sedang
2	Persentase Sarpras SMA/SMK/SLB sesuai standar	%	83,8	80,43	Persentase Sarpras SMA/SMK/SLB sesuai standar	%	76,01	77,98	78,79	79,59	80,43	80,43	83,48	81,93	83,83	92,78	92,78	110,72	115,35	115,35	Sangat Tinggi
3	Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar pada SMA/SMK/SLB	Angka	0,07	0,08	Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar pada SMA/SMK/SLB	Angka	0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	100,00	87,50	87,50	Tinggi
4	Persentase Guru SMA/SMK/SLB memenuhi	%	99,15	91,55	Persentase Guru SMA/SMK/SLB memenuhi	%	86,5	89,5	90,75	91,5	91,55	91,55	98,85	99,06	99,85	99,5	99,5	100,35	108,68	108,68	Sangat Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satuan	Target															Dibanding T P-2022	Dibanding T 2023	Dibanding T Akhir RPJMD	
			P-2022	P-2023				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	kualifikasi Akademik				kualifikasi Akademik																
	KESEHATAN				**KESEHATAN**																
5	Angka Kematian Ibu	100.000/KH	88	100	Angka Kematian Ibu	100.000/KH	78,6	85,5	84	82,5	81	81	98,6	199	84,6	84,6	84,6	104,02	118,20	95,74	Sangat Tinggi
6	Angka Kematian Balita	1.000/KH	10,45	9,2	Angka Kematian Balita	1.000/KH	8,36	8,1	8	7,9	7,8	7,8	7,79	8,95	8,2	8,2	8,2	127,44	112,20	95,12	Sangat Tinggi
7	Angka Kematian Bayi	1.000/KH	7,9	7,8	Angka Kematian Bayi	1.000/KH	9,48	10,45	10,45	10,45	10,43	10,43	8,99	7,87	7,02	7,02	7,02	112,54	111,11	148,58	Sangat Tinggi
8	Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi	Angka	0,2	0,21	Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi	Angka	0,18	0,23	0,26	0,29	0,32	0,32	0,19	0,2	0,23	0,32	0,32	160,00	152,38	100,00	Sangat Tinggi
9	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	63	69	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	43	51	57	63	69	69	57	57	63	69,47	69,47	110,27	100,68	100,68	Sangat Tinggi
10	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala provinsi	%	100	100	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana skala provinsi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
11	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa	%	74	60	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa	%	45	52	54	57	60	60	65,5	65,5	85,08	91,71	91,71	123,93	152,85	152,85	Sangat Tinggi
12	Persentase ketercapaian upaya pencegahan	%	72	85,71	Persentase ketercapaian upaya pencegahan	%	47	57	62	67	72	72	84,29	84,12	86,43	92,14	92,14	127,97	107,50	127,97	Sangat Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satuan	Target P-2022	Target P-2023				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		Dibanding T P-2022	Dibanding T 2023	Dibanding T Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	dan pengendalian Penyakit Menular				dan pengendalian Penyakit Menular																
13	Persentase Capaian SPM di RSUD Dr. Moewardi	%	83	84	Persentase Capaian SPM di RSUD Dr. Moewardi	%	77,54	81	82	83	84	84	81,43	92,65	84,56	88,97	88,97	107,19	105,92	105,92	Sangat Tinggi
14	Persentase Capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	89	90	Persentase Capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	87,57	87,61	87,63	87,65	87,67	87,67	89,6	89,82	90,26	94,15	94,15	105,79	104,61	107,39	Sangat Tinggi
15	Persentase Capaian SPM di RSUD Tugurejo	%	90	90	Persentase Capaian SPM di RSUD Tugurejo	%	84,44	85	85	90	90	90	85,55	87,78	91,11	91,11	91,11	101,23	101,23	101,23	Sangat Tinggi
16	Persentase Capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Kelet Donorejo	%	85	87	Persentase Capaian SPM (rumah sakit) di RSUD Kelet Donorejo	%	80	80	85	90	95	95	82,3	86,73	86,73	88,49	88,49	104,11	101,71	93,15	Sangat Tinggi
17	Persentase Capaian SPM di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	100	Persentase Capaian SPM di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	99,79	100	100	100	100	100	99,31	99,23	99,62	98,75	98,75	98,75	98,75	98,75	Sangat Tinggi
18	Persentase Capaian SPM di RSJD Surakarta	%	82	97,33	Persentase Capaian SPM di RSJD Surakarta	%	98,06	98,1	98,12	98,15	98,17	98,17	92,07	96,6	98,56	98,08	98,08	119,61	100,77	99,91	Sangat Tinggi
19	Persentase Capaian SPM di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	95	97	Persentase Capaian SPM di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	81,8	85	90	95	100	100	92,03	92,65	98,35	97,9	97,9	103,05	100,93	97,90	Sangat Tinggi
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**																
20	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan	%	14,21	15,23	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan	%	10,15	12,18	13,2	14,21	15,23	15,23	11,37	12,42	14,21	15,23	15,23	107,18	100,00	100,00	Sangat Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satuan	Target															Dibandingg T P-2022	Dibandingg T 2023	Dibandingg T Akhir RPJMD	
			P-2022	P-2023				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	bangunan gedung milik daerah				bangunan gedung milik daerah																
21	Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik	%	41,81	44,24	Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik	%	77,59	39,16	41,12	42,43	44,24	44,24	39,68	41,56	43,5	45,03	45,03	107,70	101,79	101,79	Sangat Tinggi
					Persentase akses aman air aman perkotaan	%	84,15	88,15	90,15	92,15	94,15	94,15	88,23	90,32	90,32	92,45	92,45			98,19	Sangat Tinggi
					Persentase akses aman air aman perdesaan	%	74,55	78,05	79,8	81,55	83,3	83,3	81,98	83,42	83,42	84,08	84,08			100,94	Sangat Tinggi
22	Persentase akses layak air minum Jawa Tengah serta akses sanitasi layak bagi masyarakat	%	87,73	89,65									-	-	88,97	90,17	90,17	102,78	100,58		
23	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan dan bangunan pelengkap baik serta persentase panjang jembatan kondisi baik	%	91,55	92,35	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan dan bangunan pelengkap baik serta persentase panjang jembatan kondisi baik	%	89,6	90,8	91,5	92	92,5	92,5	90,73	90,86	92,49	90,32	90,32	98,66	97,80	97,64	Sangat Tinggi
24	Tingkat pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	%	65,2	66,85	Tingkat pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	%	61,39	63,87	65,14	66,41	67,69	67,69	63,27	64,06	65,81	66,45	66,45	101,92	99,40	98,17	Sangat Tinggi
25	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	%	54,36	54,95	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	%	52,67	54,24	55,04	55,83	56,62	56,62	53,47	53,79	54,43	54,98	54,98	101,14	100,05	97,10	Sangat Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satuan	Target															Dibandingg T P-2022	Dibandingg T 2023	Dibandingg T Akhir RPJMD	
			P-2022	P-2023				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
26	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR	%	76,04	78,75	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR	%	70,12	73,5	75,25	77	78,75	78,75	73,06	74,34	77,19	80,27	80,27	105,56	101,93	101,93	Sangat Tinggi
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																				
27	Persentase peningkatan jumlah Rumah Layak Huni		24,76	46,7	Persentase peningkatan jumlah Rumah Layak Huni	%	NA	5,95	15,35	24,76	34,16	34,16	11,24	39,96	58,54	67,7	67,7	273,42	144,97	198,19	Sangat Tinggi
28	Persentase penurunan kawasan kumuh		25,27	8,1	Persentase penurunan kawasan kumuh	%	NA	71,03	63,97	56,9	49,83	49,83	38,22	21,05	15,75	7,92	7,92	31,34	97,78	316,38	Sangat Tinggi
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																				
29	Persentase penanganan gangguan tramtibum di Jawa Tengah	%	100	100		%							-	-	100	100	100	100,00	100,00		
30	Persentase kepatuhan hukum, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	%	100	100		%							-	-	100	100	100	100,00	100,00		
31	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	%	100	100	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
32	Persentase penambahan kapasitas PB	%	5	12	Persentase penambahan kapasitas PB	%	NA	10	10	10	10	50	10,71	7,29	10,35	1,36	39,77	795,40	331,42	79,54	Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satuan	Target															Dibandingg T P-2022	Dibandingg T 2023	Dibandingg T Akhir RPJMD	
			P-2022	P-2023				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	diwilayah rawan bencana				diwilayah rawan bencana																
33	Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB	%	3	5	Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB	%	NA	5	5	5	5	25	5,1	6,3	12,83	6,7	49,08	1.636,00	981,60	196,32	Sangat Tinggi
34	Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	%	100	100	Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
					Indeks Ketahanan Daerah	%	3,5	3,54	3,56	3,58	3,6	3,6	3,54	3,55	3,65	3,65	3,65			101,3889	Sangat Tinggi
					Persentase kab/kota yang kondusif	%	NA	100	100	100	100	100	100	100			100	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	Sangat Tinggi
	SOSIAL																				
35	Persentase penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	1,9	2,37									-	-	5,55	8,03	8,03	422,63	338,82		
					Persentase Penurunan Jumlah PMKS	%	NA	0,95	1,42	1,9	2,37	2,37	0,95	1,4	5,55	8,24	8,24			347,68	Sangat Tinggi
36	Persentase peningkatan kapasitas bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	%	25,74	34,38									-	-	25,74	36,59	36,59	142,15	106,43		
					Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan yang melaksanakan UKS	%	7851	17,93	26,9	35,87	44,83	44,83	11,99	15,84	25,74		25,74			57,42	Rendah
	URUSAN WAJIB BUKAN																				

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satuan	Target															Dibandingg T P-2022	Dibandingg T 2023	Dibandingg T Akhir RPJMD	
			P-2022	P-2023				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	PELAYANAN DASAR																				
	TENAGA KERJA																				
37	Persentase pengangguran yang ditangani	%	9,86	28,55	Persentase pengangguran yang ditangani	%	20,65	25,86	27,37	28,15	28,55	28,55	10,1	19,7	28,02	8,61	8,61	87,32	30,16	30,16	Sangat Rendah
38	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	70,47	71,01	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	68,5	69,54	70,09	70,47	71,01	71,01	37,07	50,63	70,52	64,24	64,24	91,16	90,47	90,47	Sangat Tinggi
					Persentase Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	92,11	92,5	93	95,5	96	96	91,43	89,74	89,74		89,74			93,48	Sangat Tinggi
					Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	%	86,96	87,26	87,41	87,56	87,7	87,7	96,56	97,6	97,6		97,6			111,29	Sangat Tinggi
39	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	%	90,56	91,67									-	-	90,83	92,04	92,04	101,63	100,40		
40	Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah (Juta Rp)	Juta Rupiah	54,61	54,62	Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah (Juta Rp)	Juta Rupiah	54,57	54,59	54,6	54,61	54,62	54,62	55,01	55,91	57,11	13,92	13,92	25,49	25,49	25,49	Sangat Rendah
41	Persentase Peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	5,68	8,19	Persentase Peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	6,49	7,09	7,39	7,89	8,19	8,19	11,08	5,34	12,2	8,26	8,26	145,42	100,85	100,85	Sangat Tinggi
42	Persentase penurunan pelanggaran	%	91,07	82,97	Persentase penurunan pelanggaran	%	97,56	92,09	89,26	86,21	82,97	82,97	91,92	89,51	88,1	81,58	81,58	89,58	98,32	98,32	Sangat Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satuan	Target P-2022	Target P-2023				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		Dibanding T P-2022	Dibanding T 2023	Dibanding T Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	norma ketenagakerjaan				norma ketenagakerjaan																
					Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	%	53	59	62	65	68	68	40,05	43,42	43,42		43,42			63,85	Rendah
43	Persentase kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	%	28,57	57,14									-	-	34	65,71	65,71	230,00	115,00		
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																				
44	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8,15	8,07	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8,44	8,29	8,22	8,15	8,07	8,07	8,49	8,97	8,1	8,02	8,02	101,62	100,62	100,62	Sangat Tinggi
45	Persentase Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	%	91,43	100	Persentase Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	%	82,86	85,71	88,57	91,43	100	100	91,43	100	100	100	100	109,37	100,00	100,00	Sangat Tinggi
46	Persentase implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan di pemerintah daerah	%	34,27	34,3									-	-	36,11	51,42	51,42	150,04	132,25		
47	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	%	60	62,85	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	%	22,86	25,71	28,57	31,43	34,29	34,29	54,28	62,85	71,42	82,86	82,86	138,10	100,01	241,64	Sangat Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satuan	Target															Dibanding T P-2022	Dibanding T 2023	Dibanding T Akhir RPJMD	
			P-2022	P-2023				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
48	Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	%	80	90									-	-	80	90	90	112,50	100,00		
49	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8,05	8,02	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8,2	8,13	8,09	8,05	8,02	8,02	8,99	8,35	7,47	5,49	5,49	146,63	146,08	146,08	Sangat Tinggi
50	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	72,62	72,7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	75,1	75,14	75,16	75,18	75,2	75,2	NA	71,73	73,78	73,78	73,78	101,60	101,21	98,11	Sangat Tinggi
	PANGAN																				
51	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	88,44	88,8	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	87,3	87,72	88,08	88,44	88,8	88,8	87,1	86,67	94,4	94,2	94,2	106,51	106,08	106,08	Sangat Tinggi
52	Angka Konsumsi Energi	Kkal/kapita/hari	2100	2100											2018	2025	2025	96,43	96,43		
					PPH Ketersediaan	Angka	85,3	82,75	83	83,25	83,5	83,5	82,27	85,84			85,84			102,80	Sangat Tinggi
					Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi)	Kkal/kapita/hari	2.090,17	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2048	2054,43			2054,43			95,55	Sangat Tinggi
					Angka Kecukupan Energi (Angka Konsumsi Protein)	Kkal/kapita/hari	63,7	57	57	57	57	57	59,9	60,24			60,24			105,68	Sangat Tinggi
	PERTANAHAN																				
53	Persentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	%	100	100	Persentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	%	100	100	100	100	100	100	199,72	205,84	321,89	155,16	155,16	155,16	155,16	155,16	Sangat Tinggi
	LINGKUNGAN HIDUP																				
54	Indeks Pencemaran Air	%	3,45	3,45	Indeks Pencemaran Air	%	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,4	3,39	3,17	3,39	3,39	101,77	101,77	101,77	Sangat Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satuan	Target															Dibandingg T P-2022	Dibandingg T 2023	Dibandingg T Akhir RPJMD	
			P-2022	P-2023				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
55	Indeks Pencemar SO2 dan NO2	%	0,2	0,2	Indeks Pencemar SO2 dan NO2	%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
					Indeks Kualitas Air	%	48,47	49,17	49,47	49,77	50,07	50,07	50,52	50,55	50,63	50,55	50,55			100,96	Sangat Tinggi
					Indeks Kualitas Udara	%	84,21	84,71	84,91	85,01	85,11	85,11	84,73	84,6	85,14	84,9	84,9			99,75	Sangat Tinggi
	ADIMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																				
56	Persentase penduduk tertib administrasi kependudukan	%	100	100									-	-	100	100	100	100,00	100,00		
					Cakupan masyarakat yang terlayani administrasi kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	Sangat Tinggi
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																				
57	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	%	50,34	68	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	%	NA	16,3	17,86	18,25	20,35	20,35	48,57	63,82	82,27	91,27	91,27	181,31	134,22	448,50	Sangat Tinggi
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB																				
58	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	2,19	2,2	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	0	2,24	2,22	2,2	2,18	2,18	2,23	2,09	2,15	2,04	2,04	93,15	92,73	93,58	Sangat Tinggi
59	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	Angka	65,17	64,76	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	Angka	73,69	75,1	75,25	75,5	76	76	73,26	70,35	65,18	68,98	68,98	105,85	106,52	90,76	Sangat Tinggi
60	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	56,29	54,38										56,1	58,16	63,07	63,07	112,04	115,98		

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satuan	Target															Dibanding T P-2022	Dibanding T 2023	Dibanding T Akhir RPJMD	
			P-2022	P-2023				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Persentase Keluarga Pra Sejahtera	%	22,14	21,14	20,64	20,14	19,64	19,64	22,25	21,99			21,99			111,97	Sangat Tinggi
					Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%	0	34,21	34,24	34,27	34,3	34,3	34,28	34,29			34,29			99,97	Sangat Tinggi
	PERHUBUNGAN																				
61	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	47,38	60,38	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	30,34	42,12	49,08	54,46	60,38	60,38	37,84	43,38	54,98	73,89	73,89	155,95	122,37	122,37	Sangat Tinggi
62	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	23,49	51,45	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	6,08	21,22	31,36	41,82	51,45	51,45	12,85	21,18	29,19	49,81	49,81	212,05	96,81	96,81	Sangat Tinggi
63	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	46,67	66,67	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	26,67	40	46,67	53,33	66,67	66,67	40	46,67	46,67	66,67	66,67	142,85	100,00	100,00	Sangat Tinggi
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																				
64	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Angka	3,83	3,95	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Angka	2,3	2,51	2,61	2,71	2,82	2,82	3,71	2,5	3,7	2,6	2,6	67,89	65,82	92,20	Sangat Tinggi
65	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Angka	3,53	3,65	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Angka	2,69	2,94	3,06	3,18	3,3	3,3	3,47	2,3	3,5	3,3	3,3	93,48	90,41	100,00	Sangat Tinggi
66	Indeks Domain Layanan SPBE	Angka	4,17	4,3	Indeks Domain Layanan SPBE	Angka	2,93	3,2	3,33	3,46	3,6	3,6	4,67	3,49	4,62	3,94	3,94	94,48	91,63	109,44	Sangat Tinggi
	KOPERASI DAN UKM																				
67	Persentase pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM Jawa Tengah	%	9,88	29,68	Persentase pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM Jawa Tengah	%	16,68	21,08	23,68	26,58	29,68	29,68	-2,58	17,42	9,94	23,28	23,28	235,63	78,44	78,44	Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satuan	Target															Dibandingg T P-2022	Dibandingg T 2023	Dibandingg T Akhir RPJMD	
			P-2022	P-2023				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
68	Persentase pertumbuhan tenaga kerja Koperasi dan UKM Jawa Tengah	%	21,1	29,95	Persentase pertumbuhan tenaga kerja Koperasi dan UKM Jawa Tengah	%	18,22	22,8	25,3	27,7	29,95	29,95	-2,79	28,08	21,19	27,96	27,96	132,51	93,36	93,36	Sangat Tinggi
	PENANAMAN MODAL																				
69	Persentase Realisasi PMA dan PMDN	%	100	100	Persentase Realisasi PMA dan PMDN	%	126	100	100	100	100	100	202	111,71	104,38	117,23	117,23	117,23	117,23	117,23	Sangat Tinggi
70	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	90	90	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	84,65	90	90	90	90	90	89,28	94,23	94,28	94,14	94,14	104,60	104,60	104,60	Sangat Tinggi
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																				
71	Indeks Pembangunan Pemuda	%	55,15	55,15	Indeks Pembangunan Pemuda	%	50,17	50,25	50,28	50,3	50,35	50,35	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	98,82	98,82	108,24	Sangat Tinggi
72	Indeks Pembangunan Keolahragaan	%	0,63	0,65	Indeks Pembangunan Keolahragaan	%	0,55	0,6	0,61	0,63	0,65	0,65	0,6	0,61	0,37	0,37	0,37	58,73	56,92	56,92	Rendah
	STATISTIK																				
73	Laju Pemanfaatan Data Sektoral.	%	81,76	95,65	Laju Pemanfaatan Data Sektoral.	%	8,21	30,36	45,54	60,72	75,9	75,9	176,26	95,71	85,7	95,65	95,65	116,99	100,00	126,02	Sangat Tinggi
	PERSANDIAN																				
74	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI).	Angka	3	3	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI).	Angka	1	1	2	2	3	3	2,9	3	3	3 (637)	3	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
	KEBUDAYAAN																				
75	Persentase Jenis seni budaya yang terlayani	%	6,82	6,2	Persentase Jenis seni budaya yang terlayani	%	3,15	4,7	5,9	6,2	6,82	6,82	4,94	5,68	6,2	6,82	6,82	100,00	110,00	100,00	Sangat Tinggi
	PERPUSTAKAAN																				
76	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	100	72,5	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	NA	48	64	79	100	100	46,94	61,72	83,56	108,67	108,67	108,67	149,89	108,67	Sangat Tinggi
					Persentase Sistem	%	NA	43	64	85	100	100	44	64			64			64,00	Rendah

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satuan	Target P-2022	Target P-2023				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		Dibanding T P-2022	Dibanding T 2023	Dibanding T Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Pengelolaan Kearsipan yang terintegrasi																
	KEARSIPAN																				
77	Nilai Pengelolaan Kearsipan LKD Provinsi	Angka	90	89,82									-	-	91,01	95,07	95,07	105,63	105,85		
	URUSAN PILIHAN																				
	KELAUTAN DAN PERIKANAN																				
78	Produksi Perikanan	Ton	##########	##########	Produksi Perikanan	Ton	956.601,65	900.646,00	945.678,64	992.962,58	1.042.610,71	1.042.610,71	1.013.951,06	864.706,77	890548,84	########	855.734,92	83,99	83,57	82,08	Tinggi
79	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	38,18	37,07	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	30,65	31,27	32,05	32,85	33,67	33,67	33,71	36,74	38,18	38,83	38,83	101,70	104,75	115,33	Sangat Tinggi
	PARIWISATA																				
80	Kontribusi PDRB Bidang Pariwisata	%	3,25	3,23	Kontribusi PDRB Bidang Pariwisata	%	3,19	3,19	3,21	3,23	3,25	3,25	2,99	2,95	3,39	3,57	3,57	109,85	110,53	109,85	Sangat Tinggi
	PERTANIAN																				
81	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	%	11,6	11,6									-	-	9,94	10,58	10,58	91,21	91,21		
					Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (bawang merah)	Ton	391.752	550.276	572.016	593.756	615.495	2.860.080	1.490.106	1.490.106			1.490.106			52,10	Rendah

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satuan	Target															Dibanding T P-2022	Dibanding T 2023	Dibanding T Akhir RPJMD	
			P-2022	P-2023				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (padi)	Ton	11.536.595	11.629.588	11.716.810	11.804.686	11.893.221	58.587.320	9.581.911	9.692.169,30			9.692.169,30			16,54	Sangat Rendah
					Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (cabe besar)	Ton	173.578	209.232	217.628	226.024	234.420	1.088.141	158.321	174.705,04			174.705,04			16,06	Sangat Rendah
					Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (kedelai)	Ton	162.964	104.940	107.201	109.512	111.872	536.251	38.537	46.949			46.949			8,76	Sangat Rendah
					Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (jagung)	Ton	3.433.420	3.675.002	3.689.702	3.704.460	3.719.278	18.448.802	3.766.962	3.598.263,74			3.598.263,74			19,50	Sangat Rendah
					Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan	Ton	148.816	165.069	165.895	166.724	167.558	829.495	168.805	171.926,93			171.926,93			20,73	Sangat Rendah

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satuan	Target P-2022	Target P-2023				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		Dibanding T P-2022	Dibanding T 2023	Dibanding T Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (kelapa)																
					Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (kopi)	Ton	14.216	21.019	21.556	22.093	22.629	107.780	24.065	27.206,39			27.206,39			25,24	Sangat Rendah
					Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (tebu)	Ton	2.757.659	2.948.695	2.963.438	2.978.255	2.993.147	14.817.560	2.854.351	235.757,54			235.757,54			1,59	Sangat Rendah
82	Persentase kenaikan produksi daging, susu, telur	%	3,92	4,06								-	-	-	4,31	6,46	6,46				
					Jumlah Produksi Susu	Kg	98.193.892	101.561.631	101.663.192	101.764.855	101.866.620	101.866.620	103.439.376	102.508.639	93793157	5,4E+07	54.268.570			53,27	Rendah
					Jumlah Produksi Telur	Kg	311.724.854	315.144.165	315.686.596	320.610.319	325.083.370	325.083.370	335.367.125	328.156.975	3,45 E+08	1,8E+08	178.637.895			54,95	Rendah
					Jumlah Produksi Daging	Kg	347.723.159	325.436.369	340.041.606	355.690.105	375.382.386	375.382.386	403.725.408	395.212.501	4,57 E+08	1,9E+08	191.087.513			50,90	Rendah
	KEHUTANAN																				
83	Kontribusi subsektor Kehutanan	%	0,43	0,43	Kontribusi subsektor Kehutanan	%	0,47	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	2,68	0,49	0,43	0,42	0,42	97,67	97,67	97,67	Sangat Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satuan	Target P-2022	Target P-2023				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		Dibanding T P-2022	Dibanding T 2023	Dibanding T Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	terhadap PDRB				terhadap PDRB																
84	Luas Tutupan Lahan (LTV)	km2	10.223,65	16.555,86	Luas Tutupan Lahan (LTV)	km2	16.555,86	16.555,86	16.555,86	16.555,86	16.555,86	16.555,86	10.222,57	10224,57	10224,57	10224,57	10224,57	100,01	61,76	61,76	Rendah
85	Pertumbuhan PDRB Subsektor Kehutanan	%	0,47	0,47	Pertumbuhan PDRB Subsektor Kehutanan	%	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,48	4,61	-3,79	4,15	4,15	882,98	882,98	882,98	Sangat Tinggi
					Indeks Kualitas Tutupn Lahan	%	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	51,13	51,16	51,16	NA	51,16	#DIV/0!	#DIV/0!	76,63	Tinggi
	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																				
86	Persentase izin usaha pertambangan operasi produksi melaksanakan good mining practice (GMP)	%	66,5	67									-	-	80,32	89,79	89,79	135,02	134,01		
					Persentase Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi	%	64,23	65,5	66	66,5	67	67	66,4	66,51			66,51			99,27	Sangat Tinggi
87	Indeks ketersediaan air tanah	Angka	3	2,99	Indeks ketersediaan air tanah	Angka	3,06	3,03	3,02	3	2,99	2,99	3,05	3,61	3,67	3,76	3,76	125,33	125,75	125,75	Sangat Tinggi
88	Rasio ketersediaan daya listrik	Angka	1	1	Rasio ketersediaan daya listrik	Angka	1,12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,28	1,26	1,45	1,52	1,52	152,00	152,00	152,00	Sangat Tinggi
89	Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%	14,85	15,96	Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%	10,8	11,6	12,94	14,85	15,96	15,96	11,89	13,38	15,76	15,98	15,98	107,61	100,13	100,13	Sangat Tinggi
	PERDAGANGAN																				
90	Persentase Laju Pertumbuhan	%	8,2	5,9	Persentase Laju Pertumbuhan	%	5,22	7,32	7,76	8,2	8,64	8,64	-3,8	6,52	4,32	5,9	5,9	71,95	100,00	68,29	Sedang

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satuan	Target																Dibanding T P-2022	Dibanding T 2023	Dibanding T Akhir RPJMD	
			P-2022	P-2023				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Sektor Perdagangan				Sektor Perdagangan																
	PERINDUSTRIAN																				
91	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Industri	%	5,65	5,65	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Industri	%	4,61	5,1	5,35	5,65	5,85	5,85	-3,74	2,62	3,88	4,35	4,35	76,99	76,99	74,36	Sedang
	TRANSMIGRASI																				
92	Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi	%	3,18	3,6									-	-	5,28	4,96	4,96	155,97	137,78	-	
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																				
	SEKRETARIAT DAERAH																				
93	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	85	85	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	NA	81	82	83	84	84		83,77	86,51	63,57	63,57	74,79	74,79	75,68	Tinggi
94	Persentase Kebijakan yang Efektif	%	80	80	Persentase Kebijakan yang Efektif	%	NA	81	82	83	84	84		92,05	80,43	76,54	76,54	95,68	95,68	91,12	Sangat Tinggi
95	Efektifitas kebijakan perekonomian daerah	%	76	78										-	76,92	78,57	78,57	103,38	100,73		
96	Persentase efektivitas penyelesaian masalah hukum	%	95	96										-	100	100	100	105,26	104,17		
97	Persentase efektivitas produk hukum daerah	%	95	96										-	100	100	100	105,26	104,17		
98	Persentase peningkatan kualitas	%	40	45										-	42,86	45	45	112,50	100,00		

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satuan	Target																Dibanding T P-2022	Dibanding T 2023	Dibanding T Akhir RPJMD	
			P-2022	P-2023				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	layanan keagamaan																				
99	Efektivitas kebijakan bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah	%	90	90										-	100	100	100	111,11	111,11		
100	Ketercapaian laba BUMD	%	90	75										-	98,17	98,17	98,17	109,08	130,89		
101	Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang SDA	%	80	82										-	82,61	84	84	105,00	102,44		
102	Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat	%	85	90	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	%	NA	85	85	85	85	85		85	85	90	90	105,88	100,00	105,88	Sangat Tinggi
103	Efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah	%	88	89										-	91,97	93,7	93,7	106,48	105,28		
104	Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	%	85	90	Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	%	NA	63	65	67	70	70		67,22	92,15	92,53	92,53	108,86	102,81	132,19	Sangat Tinggi
105	Persentase OPD yang predikat SAKIP nya A keatas	%	60,98	85,37										-	65,85	90,24	90,24	147,98	105,70		
106	Persentase OPD dengan Nilai PMPRB nya B keatas	%	83,67	87,76										-	91,83	91,83	91,83	109,75	104,64		
107	Persentase OPD dengan Nilai Kematangan	%	75,61	85,37										-	100	100	100	132,26	117,14		

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satuan	Target															Dibandingg T P-2022	Dibandingg T 2023	Dibandingg T Akhir RPJMD	
			P-2022	P-2023				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Organisasi dalam ketegori minimal sedang																				
108	Nilai IKM layanan Biro Umum	%	78	78,5										-	82,22	82,75	82,75	106,09	105,41		
					Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	NA	100	100	100	100	100	100	100			100			100,00	Sangat Tinggi
					Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealiasi	%	NA	85	90	93	96	96	85	90			90			93,75	Sangat Tinggi
					Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	%	NA	91	92	93	94	94	100	100			100			106,38	Sangat Tinggi
					Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	%	NA	87	92	93	94	94	87	100			100			106,38	Sangat Tinggi
					Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	%	NA	82	83	84	85	85	99,47	99,14			99,14			116,64	Sangat Tinggi
					Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan	%	NA	82	83	84	85	85	99	100			100			117,65	Sangat Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satuan	Target P-2022	Target P-2023				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		Dibanding T P-2022	Dibanding T 2023	Dibanding T Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					pembangunan di Kabupaten/ Kota																
					Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	%	NA	81	82	83	84	84	85,13	100			100			119,05	Sangat Tinggi
					Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/ kota	%	NA	91	92	93	94	94	100	100			100			106,38	Sangat Tinggi
					Persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	%	NA	91	92	93	94	94	100	100			100			106,38	Sangat Tinggi
					Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum	%	NA	91	92	93	94	94	100	100			100			106,38	Sangat Tinggi
					Nilai Kematangan Organisasi Daerah	%	NA	22	25	28	31	31	36,1	36,1			36,1			116,45	Sangat Tinggi
					Persentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	%	NA	64,32	76,48	88,64	100	100	93,22	100			100			100,00	Sangat Tinggi
					Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	%	73	78	82	87	92	92	83,67	91,83			91,83			99,82	Sangat Tinggi
					Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya	%	11,4	40	54	70	85	85	30	88,7			88,7			104,35	Sangat Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satuan	Target P-2022	Target P-2023				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		Dibanding T P-2022	Dibanding T 2023	Dibanding T Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	%	NA	84	88	92	96	96	70	90			90			93,75	Sangat Tinggi
					Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	NA	85	85	85	85	85	70	85,71			85,71			100,84	Sangat Tinggi
					Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	%	NA	89	90	93	95	95	89	90			90			94,74	Sangat Tinggi
					Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	%	NA	85	85	85	85	85	100	85,71			85,71			100,84	Sangat Tinggi
					Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	%	NA	84	88	92	96	96	80	87,5			87,5			91,15	Sangat Tinggi
					Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan	%	NA	85	85	85	85	85	80	87,5			87,5			102,94	Sangat Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satuan	Target																Dibanding T P-2022	Dibanding T 2023	Dibanding T Akhir RPJMD	
			P-2022	P-2023				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Rakyat yang direalisasikan																
					Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	%	NA	100	100	100	100	100	100	80			80			80,00	Tinggi
					Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	%	NA	100	100	100	100	100	100	100			100			100,00	Sangat Tinggi
					Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	%	NA	100	100	100	100	100	100	100			100			100,00	Sangat Tinggi
					Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	NA	76	77	78	79	80	77,5	82,75			82,75			103,44	Sangat Tinggi
					Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	%	NA	75	80	85	90	90	70	80			80			88,89	Tinggi
					Persentase Hasil Rekomendasi	%	NA	85	85	85	85	85	100	100			100			117,65	Sangat Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satuan	Target																Dibandingg T P-2022	Dibandingg T 2023	Dibandingg T Akhir RPJMD	
			P-2022	P-2023				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi																
					Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	%	NA	85	85	85	85	85	100	100			100			117,65	Sangat Tinggi
					Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	%	NA	76	77	78	79	80	77,5	82,75			82,75			103,44	Sangat Tinggi
	SEKRETARIAT DPRD																				
109	Indeks Kepuasan Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah.	%	88,5	89	Indeks Kepuasan Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah.	%	NA	72	73	74	75	75	88,18	90,28	90,33	91,23	91,23	103,08	102,51	121,64	Sangat Tinggi
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
	PERENCANAAN																				
110	Persentase perencanaan pembangunan yang berkualitas	%	90	90									-	-	90	90	90	100,00	100,00		
					Persentase hasil	%	NA	90	90	90	90	90	90	90			90			100,00	Sangat Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satuan	Target																Dibandingg T P-2022	Dibandingg T 2023	Dibandingg T Akhir RPJMD	
			P-2022	P-2023				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					kelitbangan iptekin yang sesuai dengan program perencanaan pembangunan daerah																
					Persentase Konsistensi, keselarasan dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah	%	NA	90	90	90	90	90	94,38	90		90	90			100,00	Sangat Tinggi
					Persentase perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	%	NA	90	90	90	90	90	92,19	90			90			100,00	Sangat Tinggi
	KEUANGAN																				
111	Persentase peningkatan pajak daerah	%	8,61	3,58	Persentase peningkatan pajak daerah	%	NA	10,77	9,25	8,82	8,59	8,59	-0,07	5,2	8,51	3,45	3,45	40,07	96,37	40,16	Sangat Rendah
112	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi daerah dan Pendapatan lain yang sah	%	1,06	6,79	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi dan Pendapatan lain	%	NA	1,73	3,3	5,24	10,37	10,37	0,017	17,06	2,65	8,14	8,14	767,92	119,88	78,50	Tinggi
113	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	%	100	100	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah sesuai kaidah perundangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
114	Persentase tata kelola barang milik daerah sesuai kaidah perundangan	%	70	72,5		%							-	-	77,2	68	68	97,14	93,79		

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satuan	Target															Dibandingg T P-2022	Dibandingg T 2023	Dibandingg T Akhir RPJMD	
			P-2022	P-2023				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
					Persentase Pemanfaatan Aset	%	60	65	67,5	70	72,5	72,5		72,84	77,2	64,1	64,1	#DIV/0!	#DIV/0!	88,41	Tinggi
	KEPEGAWAIAN																				
115	Persentase distribusi penempatan PNS dalam Jabatan	%	100	100	Persentase distribusi penempatan PNS dalam Jabatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
116	Persentase pengembangan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	%	100	100	Persentase pengembangan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																				
117	Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi	%	35,92	36,26	Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi	%	35	35,03	35,05	35,06	35,08	35,08	35,42	36,36	38,19	40,33	40,33	112,28	111,22	114,97	Sangat Tinggi
118	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%	25	30				15	20	25	30	30	15,66	25,36	50,97	52,53	52,53	210,12	175,10		
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																				
119	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	67	71		Nilai				70	74		-	-	71,32	71,32	71,32	106,45	100,45		
120	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	4	4,2		Nilai				4	4,2		-	-	4,18	4,23	4,23	105,75	100,71		
	PENGELOLAAN PENGHUBUNG																				
121	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	84	85	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	NA	82	83	84	85	85	83	83,06	85	85,75	85,75	102,08	100,88	100,88	Sangat Tinggi
	PENGAWASAN																				
122	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	Level 3 penuh Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
123	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,18	3,19	Nilai 3,5 Maturitas SPIP	Nilai	3	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5	3,16	3,11	3,26	3,46	3,46	108,81	108,46	98,86	Sangat Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satuan	Target P-2022	Target P-2023				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		Dibanding T P-2022	Dibanding T 2023	Dibanding T Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																				
124	Indeks Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	2,97	3,15									-	-	3,75	3,45	3,45	116,16	109,52		
125	Indeks Ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,12	3,35									-	-	4,1	3,85	3,85	123,40	114,93		
					Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	%	75	81	83	86	90	90	88,61	90,45			90,45			100,50	Sangat Tinggi
					Persentase masyarakat yang paham terhadap politik	%	75	81	83	86	90	90	88,02	90,12			90,12			100,13	Sangat Tinggi
C	**ASPEK DAYA SAING**																				
1	Persentase penurunan konflik SARA	%	15	15	Persentase penurunan konflik SARA	%	17,64	15	15	15	15	15	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	102,53	102,53	102,53	Sangat Tinggi
2	Indeks Toleransi	Angka	75,9	76,6	Indeks Toleransi	Angka	73,9	74,48	75,3	75,9	76,6	76,6	72,5	72,64	73,68	73,68	73,68	97,08	96,19	96,19	Sangat Tinggi
3	Persentase tindak pidana yang tertangani	%	87	90	Persentase tindak pidana yang tertangani	%	NA	83	85	87	90	90	84,49	86,23	92,15	92,15	92,15	105,92	102,39	102,39	Sangat Tinggi
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	79	80	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	74,49	77	78	79	80	80	84,93	84,93	80,31	83,13	83,13	105,23	103,91	103,91	Sangat Tinggi
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	86	88	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81,36	82	84	86	88	88	83,94	84,53	86,5	87,25	87,25	101,45	99,15	99,15	Sangat Tinggi
6	Indeks Sistem Pemerintahan	Angka	3,27	3,33	Indeks Sistem Pemerintahan	Angka	2,64	2,88	3	3,12	3,24	3,24	4,2	2,74	3,98	3,98	3,98	121,71	119,52	122,84	Sangat Tinggi

No	RKPD				Indikator Kinerja Program RPJMD	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target RPJMD Tahun Ke-				Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Target RPJMD Tahun Ke-				Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan	Tingkat Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan (%)			Skala Nilai Peringkat Kinerja
	Indikator Kinerja	Satuan	Target P-2022	Target P-2023				2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023		Dibanding T P-2022	Dibanding T 2023	Dibanding T Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Berbasis Elektronik (SPBE)				Berbasis Elektronik (SPBE)																
7	Nilai SAKIP	Angka	84	85	Nilai SAKIP	Angka	80,18	82	83	84	85	85	81,56	80,25	81,14	81,92	81,92	97,52	96,38	96,38	Sangat Tinggi
8	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	3,49	3,5	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	3,43	3,47	3,48	3,49	3,5	3,5	NA	3,72	3,42	3,4	3,4	97,42	97,14	97,14	Sangat Tinggi
9	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	NA	WTP*	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
10	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Angka	38	39	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Angka	NA	20	23	26	29	29	31,84	37,16	40,55	40,68	40,68	107,05	104,31	140,28	Sangat Tinggi
11	Indeks Sistem Merit	Angka	0,72	0,82	Indeks Sistem Merit	Angka	0,66	0,68	0,69	0,7	0,71	0,71	0,7	0,81	0,82	0,83	0,83	115,28	101,22	116,90	Sangat Tinggi
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,52	67,57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	66,51	66,87	67,02	67,14	67,26	67,26	67,62	66,27	66,85	68,59	68,59	99,57	101,98	101,98	Sangat Tinggi
13	Indeks Kualitas Air	Angka	50,6	50,65	Indeks Kualitas Air	Angka	48,47	49,17	49,47	49,77	50,07	50,07	55,21	47,94	48,16	51,23	51,23	96,77	102,32	102,32	Sangat Tinggi
14	Indeks Kualitas Udara	Angka	84,95	85	Indeks Kualitas Udara	Angka	84,21	84,71	84,91	85,01	85,11	85,11	84,73	84,6	85,14	86,35	86,35	99,25	101,46	101,46	Sangat Tinggi
15	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	51,2	51,25	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	41,03	41,51	42,45	46,34	46,34	63,59	69,41	69,41	Sedang
16	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Angka	3,56	3,6	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Angka	3,5	3,54	3,56	3,58	3,6	3,6	3,54	3,55	3,65	3,65	3,65	102,53	101,39	101,39	Sangat Tinggi

Kesimpulan Evaluasi Tahun 2020-2023

Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah mendasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, didapatkan hasil sebagai berikut. Indikator kinerja daerah terdiri dari 194 indikator. Indikator dengan status capaian sangat tinggi sejumlah 151 indikator, capaian dengan status tinggi sejumlah 15 indikator, capaian dengan status sedang sejumlah 6 indikator, capaian dengan status capaian rendah 9 indikator, capaian dengan status sangat rendah sebanyak 13 indikator.

Rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya

a. Indikator dengan capaian yang sangat tinggi (di atas 100 persen) dan melampaui jauh dari target akhir RPJMD Tahun 2018-2023, agar dicermati kembali dalam penentuan target perencanan tahap selanjutnya agar penentuan target tidak bersifat pesimistis agar pencapaian sasaran pembangunan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas kepada masyakarat.
b. Perubahan kebijakan atau munculnya kebijakan baru sangat berpengaruh pada capaian kinerja suatu program.
c. Perubahan metode perhitungan indikator dari segi peraturan yang berlaku atau adanya perubahan metode hitung yang diakibatkan dari kondisi dalam suatu indikator menjadi penting untuk ketercapaian target indikator tersebut.

Tabel 2.23.
Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun Sampai Dengan Tahun 2024
Berdasarkan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (RPD 2024-2026)	Satuan	Target Akhir RPD	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Terhadap RPD	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
A	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**					
1	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	49,68	45,2	90,98	Sangat Tinggi
2	Angka Kemiskinan	%	8.67-7.28	9,58	101,84	Sangat Tinggi
3	Rasio Gini	Angka	0,36	0,364	98,89	Sangat Tinggi
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.00 - 5.80	4,95	90	Sangat Tinggi
5	Inflasi	%	3.0 ± 1	1,64	145	Sangat Tinggi
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.90 - 4.30	4,78	112,13	Sangat Tinggi
7	Nilai Tukar Petani	Angka	107,68	112,98	104,92	Sangat Tinggi
8	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	74,55	73,87	99,09	Sangat Tinggi
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	58,17	n/a	n/a	n/a
10	Indeks Pembangunan Gender	Angka	93,23	93	97,75	Sangat Tinggi
11	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	59	63,9	108,31	Sangat Tinggi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (RPD 2024-2026)	Satuan	Target Akhir RPD	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Terhadap RPD	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
B	**Aspek Pelayanan Umum**					
	Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar					
	Pendidikan					
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,98	12,86	97,8	Sangat Tinggi
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,2	8,02	156,83	Sangat Tinggi
	Kesehatan					
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,68	74,91	100,31	Sangat Tinggi
2	Persentase penurunan kasus kematian ibu	%	2	2	100	Sangat Tinggi
3	Persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia	%	85,71	71,42	83,33	Sangat Tinggi
4	Persentase ketercapaian intervensi spesifik untuk penurunan stunting	%	90	80	88,89	Sangat Tinggi
5	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menular. penyakit tidak menular. dan kesehatan jiwa	%	86	78,17	90,9	Sangat Tinggi
6	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100	100	Sangat Tinggi
7	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan layanan kesehatan prioritas sesuai standar	%	53,49	49,89	93,27	Sangat Tinggi
8	Persentase capaian SPM di RSUD Moewardi	%	87	88,24	101,43	Sangat Tinggi
9	Persentase capaian SPM di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	90	91,64	101,82	Sangat Tinggi
10	Persentase capaian SPM di RSUD Tugurejo	%	90	91,11	101,23	Sangat Tinggi
11	Persentase capaian SPM di RSUD Kelet Donorejo	%	90	92,03	102,26	Sangat Tinggi
12	Persentase capaian SPM di RSJD Amino Gondohutomo	%	98	98,75	100,77	Sangat Tinggi
13	Persentase capaian SPM di RSJD Surakarta	%	98,25	96,9	98,63	Sangat Tinggi
14	Persentase capaian SPM di RSJD Dr Soedjarwadi	%	100	98,88	98,88	Sangat Tinggi
15	Persentase capaian SPM di RS Mata	%	100	n/a	n/a	n/a
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (RPD 2024-2026)	Satuan	Target Akhir RPD	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Terhadap RPD	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap5)	%	94,35	91,46	96,94	Sangat Tinggi
2	Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor	%	46,24	47,09	101,84	Sangat Tinggi
3	Persentase kondisi jembatan provinsi baik	%	92,33	84,53	91,55	Sangat Tinggi
4	Persentase akses air minum aman	%	44,93	40,86	90,94	Sangat Tinggi
5	Persentase akses air limbah domestik aman	%	12	9,72	81	Sangat Tinggi
6	Persentase jumlah komplek bangunan gedung milik daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	%	72,82	49,42	67,87	Tinggi
7	Persentase tingkat kualitas pengelolaan sumberdaya air	%	66,29	61,78	84,84	Sangat Tinggi
8	Persentase keterwujudan penataan ruang	%	77,56	62,29	80,31	Tinggi
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	%				
1	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat6)	%	42,86	31,76	74,1	Sangat Tinggi
2	Persentase peningkatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat	%	0,55	20,33	3696,36	Sangat Tinggi
3	Persentase penurunan kawasan kumuh6)	%	51,4	36,4	70,82	Tinggi
	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibum	Angka	88	84,07	95,53	Sangat Tinggi
2	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,764	0,75	98,17	Sangat Tinggi
	Sosial					
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kesejahteraan sosialnya	%	1,66	2,46	148,19	Sangat Tinggi
	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
	Tenaga Kerja					
1	Persentase pengangguran yang ditempatkan	%	28,7	29,86	104,04	Sangat Tinggi
2	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja daerah	%	74,28	68,57	92,31	Sangat Tinggi
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah	(Juta Rp)	57	55,47	97,32	Sangat Tinggi
4	Persentase peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	10,53	13,65	129,63	Sangat Tinggi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (RPD 2024-2026)	Satuan	Target Akhir RPD	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Terhadap RPD	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	71,08	73,66	103,63	Sangat Tinggi
6	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB. LKS bipartit. struktur skala upah. dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	92,09	91,07	98,89	Sangat Tinggi
7	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	80,38	81,51	101,41	Sangat Tinggi
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Persentase perempuan yang dilatih pemberdayaan ekonomi menjadi wirausaha	%	40	40	100	Sangat Tinggi
2	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan5)	Per 100.000	4,15	4,38	105,54	Sangat Tinggi
3	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Angka	68	64,34	94,62	Sangat Tinggi
	Pangan					
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	83,1	85,34	102,70	Sangat Tinggi
	Pertanahan					
1	Persentase terselesaikannya penetapan lokasi dan terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
2	Persentase pelaksanaan reforma agraria oleh gugus tugas reforma agraria	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
	Lingkungan Hidup					
1	Indeks Kualitas Air	Angka	50,68	52,03	102,66	Sangat Tinggi
2	Indeks Kualitas Udara	Angka	85,03	87,73	103,18	Sangat Tinggi
3	Indeks Pencemaran Air	Angka	3,33	3,35	100,60	Sangat Tinggi
4	Indeks SO2 dan NO2	Angka	0,37	0,32	86,49	Sangat Tinggi
	Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1	Nilai Level Admindukcapil Provinsi Jawa Tengah	Nilai	4	4	100,00	Sangat Tinggi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (RPD 2024-2026)	Satuan	Target Akhir RPD	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Terhadap RPD	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1	Nilai Indeks Desa Mandiri Provinsi Jawa Tengah	Nilai	0,8	0,75	93,75	Sangat Tinggi
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,11	2,03	96,21	Sangat Tinggi
	Perhubungan					
1	Indeks pelayanan transportasi	Angka	6,53	6,12	93,72	Sangat Tinggi
2	Rasio konektivitas provinsi	Angka	0,46	0,4	86,96	Sangat Tinggi
3	Rasio kejadian kecelakaan transportasi dalam 1 juta keberangkatan	Angka	14,48	16,1	88,81	Sangat Tinggi
4	On Time Performance layanan transportasi	%	86,88	84,6	97,38	Sangat Tinggi
	Komunikasi dan Informatika					
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,77	4,42	117,24	Sangat Tinggi
	Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah					
1	Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB	%	13,41	10,43	77,78	Sangat Tinggi
2	Persentase peningkatan koperasi sehat Jawa Tengah	%	0,46	0,94	204,35	Sangat Tinggi
3	Persentase pertumbuhan omset koperasi dan UMKM Jawa Tengah	%	7,74	7,21	93,15	Sangat Tinggi
	Penanaman Modal					
1	Pertumbuhan nilai penanaman modal	%	4,5	14,83	329,56	Sangat Tinggi
2	Persentase realisasi PMA dan PMDN	%	100	110,41	110,41	Sangat Tinggi
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	92	97,13	105,58	Sangat Tinggi
	Kepemudaan dan Olahraga					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (RPD 2024-2026)	Satuan	Target Akhir RPD	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Terhadap RPD	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
1	Sport Development Index (SDI)	%	0,47	0,41	87,23	Sangat Tinggi
2	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	%	58,54	58,33	99,64	Sangat Tinggi
	Statistik					
1	Laju pemanfaatan data statistik sektoral dan geospasial pembangunan daerah	%	100	32	32,00	Sangat Rendah
	Persandian					
1	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Angka	640	637	99,53	Sangat Tinggi
	Kebudayaan					
1	Angka Melek Budaya	%	55,32	52,61	95,10	Sangat Tinggi
	Perpustakaan					
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	17,5	15,14	86,51	Sangat Tinggi
	Kearsipan					
1	Nilai hasil pengawasan kearsipan Provinsi Jawa Tengah	Nilai	96	96,07	100,07	Sangat Tinggi
	Urusan Pilihan					
	Kelautan dan Perikanan					
1	Produksi perikanan	Ton	2859106,00	968353,8	33,87	Sangat Rendah
2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Angka	106	101,4	95,66	Sangat Tinggi
3	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)	Angka	112	107,35	95,85	Sangat Tinggi
	Pariwisata					
1	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	%	8,5	9,56	112,47	Sangat Tinggi
2	Nilai tambah ekonomi kreatif	Rupiah	1.789.000.000.000	3.630.000000.000	202,91	Sangat Tinggi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (RPD 2024-2026)	Satuan	Target Akhir RPD	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Terhadap RPD	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
	Pertanian					
1	Laju pertumbuhan PDRB ADHK (atas dasar harga konstan) sub sektor peternakan	%	3,15	1,09	34,60	Sedang
2	Nilai Tukar Petani Peternakan	Angka	101	98,93	97,95	Sangat Tinggi
3	Laju pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan. hortikultura dan perkebunan	%	0,13	0,96	738,46	Sangat Tinggi
4	NTP Tanaman Pangan	Angka	105,95	115,29	108,82	Sangat Tinggi
5	NTP Hortikultura	Angka	108,95	117,28	107,65	Sangat Tinggi
6	NTP Perkebunan Rakyat	Angka	101,35	118,07	116,50	Sangat Tinggi
	Kehutanan					
1	Indeks kualitas tutupan lahan	Angka/%	42,47	48,37	113,89	Sangat Tinggi
2	Luas tutupan lahan	Ha/km2	1022457	1022457	100,00	Sangat Tinggi
	Energi dan Sumber Daya Mineral					
1	Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%	21,6	18,55	85,88	Sangat Tinggi
2	Tingkat konsumsi tenaga listrik	kWh/kapita	791,32	802,05	101,36	Sangat Tinggi
3	Indeks Ketersediaan Air Tanah	Angka	3,65	3,65	100,00	Sangat Tinggi
4	Persentase penerapan Good Mining Practice	%	62	63,37	102,21	Sangat Tinggi
	Perdagangan					
1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	5,36	4,05	75,56	Sangat Tinggi
	Perindustrian					
1	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	3,75	3,89	103,73	Sangat Tinggi

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (RPD 2024-2026)	Satuan	Target Akhir RPD	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Terhadap RPD	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
	Sekretariat Daerah					
1	Indeks Kematangan Kebijakan	Angka	38,1	39,93	104,80	Sangat Tinggi
2	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi. organisasi dan pembangunan daerah	%	80	86,3	107,88	Sangat Tinggi
3	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan pelayanan pengadaan barang/jasa	%	90	96,83	107,59	Sangat Tinggi
4	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup pemerintahan. hukum dan kesejahteraan rakyat	%	90	93,72	104,13	Sangat Tinggi
	Sekretariat DPRD					
1	Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Angka	92	91,68	99,65	Sangat Tinggi
2	Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (survei kepuasan DPRD)	%	77	76,87	99,83	Sangat Tinggi
3	Indeks kualitas sarana dan prasarana (survei kepuasan DPRD)	%	77	75	97,40	Sangat Tinggi
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan					
	Perencanaan					
1	Persentase keselarasan dan kesesuaian substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
2	Persentase keterpenuhan substansi dan tahapan penyusunan dokumen perencanaan sesuai regulasi	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
3	Persentase keselarasan program dengan prioritas daerah dan prioritas nasional	%	100	100	100,00	Sangat Tinggi
	Keuangan					
1	Persentase pertumbuhan pendapatan pajak daerah	%	-3,38	13,53	400,30	Sangat Rendah
2	Persentase pertumbuhan pendapatan retribusi dan pendapatan lain	%	-3,47	23,72	683,57	Sangat Rendah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (RPD 2024-2026)	Satuan	Target Akhir RPD	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Terhadap RPD	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
3	Persentase kualitas pengelolaan keuangan daerah	%	98	97,75	99,74	Sangat Tinggi
4	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	%	95,69	84,02	87,80	Sangat Tinggi
	Kepegawaian					
1	Indeks Sistem Merit	Angka	0,87	0,86	98,85	Sangat Tinggi
	Pendidikan dan Pelatihan					
1	Indeks Kompetensi ASN	Angka	3,1	3,29	106,13	Sangat Tinggi
2	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi	%	26,1	65,09	249,39	Sangat Tinggi
3	Persentase ASN yang berkompeten dan tersertifikasi	%	100	100	100	Sangat Tinggi
	Penelitian dan Pengembangan					
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	74	72,85	98,45	Sangat Tinggi
	Pengelolaan Penghubung					
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung	Angka	85	86	101,18	Sangat Tinggi
	Unsur Pengawasan Pemerintahan					
1	Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Level	3	3	100,00	Sangat Tinggi
2	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100,00	Sangat Tinggi
3	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) pemerintah daerah	Level	3	3	100,00	Sangat Tinggi
	Unsur Pemerintahan Umum					
1	Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,07	3,03	98,70	Sangat Tinggi
C	**Aspek Daya Saing**					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	67,57	69,46	102,80	Sangat Tinggi
2	Persentase Penurunan Indeks Risiko Bencana	%	4	8,64	216,00	Sangat Tinggi
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	82,5	85,36	103,47	Sangat Tinggi

Kesimpulan Evaluasi

Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah mendasarkan RPD Provinsi jawa Tengah Tahun 2024-2026, didapatkan hasil sebagai berikut. Indikator kinerja daerah terdiri dari 126 indikator. Indikator dengan status capaian sangat tinggi sejumlah 114 indikator, capaian dengan status tinggi sejumlah 7 indikator, capaian dengan status sedang sejumlah 2 indikator, capaian dengan status sangat rendah sebanyak 1 indikator, serta 2 indikator belum tersedia datanya (n/a).

Rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya

a. Indikator dengan capaian yang sangat tinggi (di atas 100 persen) dan melampaui jauh dari target RPD Tahun 2024-2026, agar dicermati kembali dalam penentuan target perencanan tahap selanjutnya agar penentuan target tidak bersifat pesimistis agar pencapaian sasaran pembangunan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih luas kepada masyakarat.
b. Ada 2 indikator yang ditargetkan dalam RPD yang sifatnya negatif yaitu indikator persentase pertumbuhan pendapatan pajak daerah dan persentase pertumbuhan pendapatan retribusi dan pendapatan lain, agar direformulasi ulang penentuan targetnya. Untuk perencanaan ke depan hendaknya tidak menentuka kinerja yang sifatnya negatif dikarenakan hal ini menunjukkan tidak ada peningkatan kinerja, dan justru memproyeksikan kinerja yang menurun.

2.2. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya menyejahterakan masyarakat memerlukan kemampuan keuangan daerah yang memadai. Gambaran mengenai kemampuan keuangan daerah tersebut dipengaruhi perekonomian global, nasional dan daerah, kinerja keuangan di masa lalu, serta regulasi maupun kebijakan pemerintah. Dengan adanya kebijakan keuangan daerah diharapkan sumber daya ekonomi milik daerah dapat digunakan secara tepat dan setiap rupiah uang daerah digunakan secara efektif dan efisien dalam pembangunan. Memperhatikan kondisi tersebut, maka kerangka pendanaan keuangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026–2030 disusun berdasarkan pada analisis kapasitas fiskal daerah dan kinerja keuangan daerah tahun 2020-2024.

2.2.1. Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2020-2024

Otonomi fiskal daerah diukur melalui seberapa besar peran PAD untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Semakin besar angka rasio PAD maka otonomi fiskal daerah semakin besar. Pada periode tahun 2020-2022 nilai otonomi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 dan 2024 otonomi fiskal daerah menurun dikarenakan kenaikan PAD lebih kecil dari pendapatan transfer.

Tabel 2.24.
Otonomi Fiskal Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024

Tahun	Pendapatan Total (Rp .000)	Pendapatan Asli Daerah (Rp .000)	Otonomi Fiskal Daerah (%)
2020	25.393.735.934	13.668.282.278	53,83
2021	26.632.999.865	14.695.474.898	55,18
2022	24.167.935.634	16.264.618.853	67,30
2023	25.369.733.556	17.012.509.421	67,06
2024	26.378.719.626	17.650.936.913	66,91

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah, 2020–2024

Selain otonomi fiskal daerah, kesehatan keuangan daerah juga tercermin dari **rasio kemampuan mendanai belanja daerah**. Rasio ini membandingkan antara jumlah penerimaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap jumlah belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Rasio kemampuan mendanai belanja daerah menunjukkan fluktuasi dengan peningkatan pada periode tahun 2020-2022, namun mengalami penurunan di tahun 2023-2024 dikarenakan penggunaan sisa kas BLUD pada periode sebelumnya untuk mendanai pembangunan guna mengembangkan pelayanan.

Tabel 2.25.
Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020–2024

Tahun	Total Pendapatan (Rp.000)	Penerimaan Pembiayaan (Rp.000)	Total Penerimaan (Rp.000)	Total Belanja (Rp.000)	Pengeluaran Pembiayaan (Rp.000)	Total Pengeluaran (Rp.000)	Rasio
1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6	8=4/7
2020	25.393.735.934	1.119.348.228	26.513.084.162	25.651.740.349	0	25.651.740.349	1,03
2021	26.632.999.865	861.492.992	27.494.492.857	25.843.800.193	215.000.000	26.058.800.193	1,06
2022	24.167.935.634	1.909.773.865	26.077.709.499	23.950.240.497	891.000.000	24.841.240.497	1,05
2023	25.369.733.556	1.330.794.071	26.700.527.627	25.800.341.207	0	25.800.341.207	1,03
2024	26.378.719.626	1.406.120.547	27.784.840.173	27.187.126.497	20.700.000	27.207.826.497	1,02

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024

Kinerja pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat digambarkan melalui komponen penyusun struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh 2 komponen besar yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah dan Pendapatan Transfer. Hal ini tercermin dari perkembangan komponen pendapatan selama rentang tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 pendapatan daerah mengalami kontraksi 1,8 persen dari 25,859 triliun rupiah menjadi 25,393 triliun rupiah karena perkembangan ekonomi nasional yang kurang stabil sebagai imbas dari adanya pandemi Covid-19. Tahun 2021 merupakan masa pemulihan berbagai aspek kehidupan pasca pandemi Covid-19 yang ditunjukkan dengan realisasi pendapatan daerah yang tumbuh 4,88 persen pada tahun 2021 menjadi 26,633 triliun rupiah. Tahun 2022 pendapatan daerah tumbuh negatif sebesar 9,26 persen menjadi 24,168 triliun rupiah karena adanya perubahan pada kebijakan pendapatan transfer. Pada tahun 2023 pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar 4,97 persen menjadi 25,369 triliun rupiah. Pendapatan daerah pada tahun 2024 secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 1,008 triliun rupiah atau 3,98 persen.

Belanja Daerah merupakan segala penggunaan sumber dana (*use of fund*) dalam pelaksanaan program kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diterima kembali. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengklasifikasikan belanja daerah menjadi empat kategori yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Sejalan dengan pergerakan pendapatan daerah, jumlah belanja daerah dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,63 persen. Penurunan hanya terjadi pada pos belanja tidak terduga setelah tahun 2020 karena penggunaan penanganan Pandemi Covid-19 dan belanja hibah mulai tahun 2022 karena adanya penyesuaian kebijakan pendapatan transfer atas DAK non fisik pendidikan untuk satuan pendidikan dasar.

Belanja dengan proporsi terbesar masih didominasi oleh belanja operasi. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek dengan rata-rata mencapai 60,33 persen dan nilai rata-rata pada kurun waktu 2020 – 2024 sebesar 15,49 triliun rupiah per tahun. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja pegawai merupakan komponen terbesar dari belanja operasi dengan proporsi rata-rata mencapai 40,60 persen dari seluruh belanja operasi. Namun demikian, belanja pegawai masih di bawah ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Penyusunan APBD yang mengatur bahwa belanja pegawai setinggi-tingginya 30 persen dari total belanja yaitu sebesar 24,49 persen per tahun. Komponen terbesar kedua dari belanja operasi adalah belanja barang dan jasa dengan proporsi rata-rata mencapai 34,66 persen dan belanja hibah yang mencapai 24,27 persen.

Proporsi rata-rata belanja transfer mencapai 32,22 persen per tahun. Belanja transfer ini merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Belanja bagi hasil merupakan bagian terbesar dari belanja transfer yang jumlahnya rata-rata mencapai 8,2 triliun rupiah per tahun.

Belanja Modal cenderung stabil di angka rata-rata 5,98 persen. Belanja ini difokuskan pada pemeliharaan, peremajaan dan penambahan aset tetap yang digunakan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal kepada masyarakat. Penggunaan belanja modal paling besar pada belanja modal peralatan dan mesin dengan nilai rata-rata 689,57 miliar rupiah per tahun, kemudian diikuti belanja modal gedung dan bangunan sebesar 364,78 miliar rupiah per tahun dan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar 344,40 miliar rupiah per tahun.

Selain itu, terdapat pos Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk pengeluaran anggaran yang tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, keperluan mendesak, serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Proporsi belanja ini cenderung turun karena *baseline* awal pada tahun 2020 digunakan sebagai penanganan dampak Pandemi Covid-19.

Belanja Pegawai mendominasi pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Kondisi ini merupakan dampak dari adanya pengalihan kewenangan Satdikmen dan Satdiksus (SMA, SMK, dan SLB) ke pemerintah provinsi sehingga jumlah pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertambah secara signifikan. Pada tahun 2020 belanja difokuskan untuk penanganan Covid-19 melalui belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana serta penanganan dampak Covid-19 yang meliputi penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan jaring pengamanan sosial.

Pada tahun 2021 peningkatan pada belanja hibah dan bantuan keuangan kabupaten/kota yang digunakan untuk mempercepat pencapaian indikator kinerja yang berada diluar kewenangan Pemerintah Provinsi utamanya pada pemberian bantuan pendidikan dan bantuan sarana prasarana infrastruktur. Kondisi belanja daerah tahun 2022 dapat terserap secara optimal dengan realisasi serapan mencapai 95,14 persen. Kendala pada pelaksanaan APBD 2022 menyebabkan beberapa kegiatan tidak dilaksanakan maupun tidak selesai dilaksanakan. Beberapa realisasi belanja mengalami kenaikan antara lain Belanja Pegawai dengan mulai dibayarkannya Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanian Kerja (P3K) khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Kenaikan Belanja Barang dan Jasa karena adanya pelonggaran kegiatan masyarakat serta Belanja Subsidi yang digunakan dalam rangka penanganan inflasi. Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan dikarenakan pengadaan lahan yang belum terlaksana karena persyaratan (*readiness criteria*) yang belum lengkap. Selain itu pada Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk penanganan dampak inflasi tidak dapat dicairkan.

Belanja daerah tahun 2023 terserap secara optimal dengan realisasi serapan sebesar 93,85 persen, namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan APBD sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak selesai dilaksanakan. Realisasi belanja pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Pegawai meningkat seiring mulai dibayarkannya Gaji PPPK (Pendidikan dan Kesehatan) dan kenaikan tambahan penghasilan ASN, kegiatan dalam Belanja Barang dan Jasa dapat berjalan maksimal karena aktivitas masyarakat sudah mulai normal, meningkatnya Belanja Subsidi yang diarahkan pada penanganan inflasi melalui stabilisasi harga, dan penyegaran aset tetap sehingga Belanja Modal mengalami kenaikan. Sedangkan realisasi belanja yang kurang optimal dikarenakan sisa hasil pengadaan seperti sisa pengadaan tanah.

Realisasi belanja daerah pada tahun anggaran 2024 sebesar 95 persen, mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Pegawai meningkat seiring penambahan pegawai ASN baik pelayanan dasar (Pendidikan dan Kesehatan) maupun pada dinas teknis melalui PPPK dan dibayarnya tambahan penghasilan PPPK yang telah memenuhi syarat, peningkatan belanja barang dan jasa dari

realisasi belanja BOS, peningkatan belanja Hibah serta realisasi BTT yang meningkat untuk dana kebencanaan serta penyelenggaraan kegiatan Peparnas. Selain itu belum optimalnya realisasi belanja dapat berasal dari efisiensi negosiasi kontrak dan beberapa pekerjaan yang tidak selesai dan/atau putus kontrak.

Pembiayaan Daerah lebih difokuskan pada penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) tahun sebelumnya serta pencadangan untuk kegiatan Pilkada. Penyertaan modal dilaksanakan sebagai bentuk pengembangan usaha BUMD serta penyehatan. Sedangkan penerimaan pembiayaan merupakan divestasi atas salah satu kepemilikan BUMD tahun 2022 serta pengembalian piutang atas program dana bergulir.

Dari sisi pengeluaran, pembentukan dana cadangan mulai dilakukan tahun 2021 untuk pemenuhan kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024. Dalam kurun waktu 2020–2024 penyertaan modal dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, namun pada tahun 2020 tidak dilakukan karena situasi pandemi Covid-19 dan pada tahun 2023 penyertaan modal yang dialokasikan untuk penyehatan BUMD tidak dapat direalisasikan karena perubahan Perda penyehatan BUMD belum selesai. Secara umum penyertaan modal dilakukan dalam rangka pengembangan usaha serta penugasan untuk mendukung program pemerintah kepada BUMD.

Tabel 2.26.
Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024

Uraian	Jumlah (Rp. 000)				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN DAERAH	**25.393.735.934**	**26.633.000.085**	**24.167.935.634**	**25.369.733.556**	**26.378.719.626**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**13.668.282.278**	**14.695.474.898**	**16.264.618.853**	**17.012.509.421**	**17.650.936.913**
Pajak Daerah	11.139.173.309	11.718.378.320	13.484.851.151	13.976.642.716	14.210.241.533
Retribusi Daerah	98.297.991	91.634.269	115.158.014	139.377.038	2.318.821.514
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	530.091.029	508.263.876	546.717.104	638.482.406	687.813.166
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.900.719.948	2.377.198.431	2.117.892.583	2.258.007.259	434.060.698
PENDAPATAN TRANSFER	**11.702.101.655**	**11.871.796.336**	**7.810.882.578**	**8.278.928.086**	**8.701.438.866**
Dana Bagi Hasil Pajak	843.392.119	768.488.755	626.671.963	601.686.290	570.985.609
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	16.888.016	267.356.655	302.028.750	331.425.232	325.246.959
Dana Alokasi Umum	3.438.709.973	3.432.978.859	3.435.718.090	3.558.428.755	3.819.010.791
Dana Alokasi Khusus (fisik)	350.564.240	401.885.567	371.734.785	404.100.292	473.940.472
Dana Alokasi Khusus (non fisik)	6.983.232.690	6.932.375.674	3.013.508.989	3.296.089.570	3.474.257.466
Dana Insentif Daerah	68.212.455	68.710.605	61.352.500	87.197.945	37.997.568
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	1.102.159	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**23.352.000**	**65.728.851**	**92.434.201**	**78.296.049**	**26.343.846**
Pendapatan Hibah	23.352.000	64.882.003	92.161.740	77.972.123	25.600.169
Lain lain pendapatan sesuai Ketentuan Perundang-undangan	-	846.848	272.461	323.925	743.676
Jumlah Pendapatan	**25.393.735.934**	**26.633.000.085**	**24.167.935.634**	**25.369.733.556**	**26.378.719.626**
BELANJA DAERAH	**25.651.740.349**	**25.843.800.193**	**23.950.240.497**	**25.800.341.207**	**27.187.126.497**
BELANJA OPERASI	**16.223.988.285**	**16.826.577.831**	**13.456.887.671**	**14.887.780.012**	**16.083.865.301**

Uraian	Jumlah (Rp. 000)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	6.483.761.623	5.685.925.255	5.902.903.886	6.362.326.855	7.023.084.524
Belanja Barang dan Jasa	4.104.637.788	5.345.399.454	5.377.369.153	5.791.112.760	6.234.228.358
Belanja Subsidi	-	90.482	4.958.884	5.350.753	1.399.999
Belanja Hibah	5.593.181.623	5.728.982.384	2.092.761.564	2.610.303.175	2.780.143.423
Belanja Bantuan Sosial	42.407.250	66.180.255	78.894.181	118.686.467	45.008.996
BELANJA MODAL	**996.994.505**	**1.447.620.411**	**1.713.641.630**	**1.794.862.778**	**1.733.084.096**
Belanja Modal Tanah	14.338.900	79.135.275	17.346.322	67.791.905	12.221.207
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	494.933.371	578.353.949	767.027.589	751.571.586	855.982.713
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	195.773.603	330.679.148	359.726.308	526.682.150	411.044.257
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	177.713.123	351.328.654	475.441.543	351.052.937	366.478.924
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	113.376.388	108.123.383	94.099.866	97.389.078	86.434.858
Belanja Modal Aset Lainnya	859.119	-	-	375.119	922.135
BELANJA TIDAK TERDUGA	**1.783.884.978**	**72.303.305**	**16.545.479**	**740.000**	**10.225.800**
Belanja Tidak Terduga	1.783.884.978	72.303.305	16.545.479	740.000	10.225.800
BELANJA TRANSFER	**6.646.872.581**	**7.497.298.646**	**8.763.165.716**	**9.116.958.416**	**9.359.951.298**
Belanja Bagi Hasil	4.633.245.749	5.735.553.033	6.085.808.822	6.264.046.226	6.334.544.870
Belanja Bantuan Keuangan	2.013.626.831	1.761.745.612	2.677.356.893	2.852.912.190	3.025.406.428
Jumlah Belanja	**25.651.740.349**	**25.843.800.193**	**23.950.240.497**	**25.800.341.207**	**27.187.126.497**
Defisit	**(258.004.415)**	**789.199.892**	**217.695.136**	**(430.607.651)**	**(808.406.871)**
PEMBIAYAAN	**1.119.409.987**	**646.492.992**	**1.018.773.865**	**1.330.794.071**	**1.385.420.547**

Uraian	Jumlah (Rp. 000)				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**1.119.409.987**	**861.492.992**	**1.909.773.865**	**1.330.794.071**	**1.385.420.547**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.119.409.987	861.376.784	1.435.692.146	1.236.470.622	900.186.419
Pencairan dana Cadangan	-	-	-	94.130.600	505.869.400
Penerimaan pengembalian dana bergulir	-	-	-	-	-
Pembiayaan dari Sektor Perbankan	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	252.540	116.207	474.081.719	192.848	64.727
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**-**	**215.000.000**	**891.000.000**	**-**	**20.700.000**
Pembentukan dana cadangan	-	200.000.000	400.000.000	-	-
Penyertaan modal	-	15.000.000	491.000.000	-	20.700.000
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank	-	-	-	-	-
Jumlah Pembiayaan	**1.119.409.987**	**646.492.992**	**1.018.773.865**	**1.330.794.071**	**1.385.420.547**

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah pada suatu periode tertentu. Laporan neraca akan memberikan informasi penting kepada *stakeholder* internal maupun eksternal (manajemen Pemerintahan Daerah, pihak Legislatif Daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah, serta masyarakat luas lainnya), didalamnya adalah jenis akun riil dimana hasil operasional pada periode tersebut akan berpengaruh terhadap nilai neraca seperti besarnya aset, kewajiban yang harus dibayar dan ekuitas yang dimiliki.

Aset merupakan sumberdaya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diharapkan dapat memberikan manfaat baik ekonomi maupun sosial. Aset Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh Aset Tetap, Investasi Jangka Panjang pada kepemilikan saham BUMD/BUMN dan Aset Lancar. Penambahan Aset Tetap di Pemerintah Daerah lebih difokuskan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal terhadap Masyarakat, meskipun ada sebagian kecil yang sedang *idle* dan belum digunakan sehingga masuk ke dalam Properti Investasi. Aset lancar merupakan aset yang paling likuid, namun pada pos ini didominasi oleh Piutang atas Pajak Daerah sehingga kemampuan atas penagihan serta tingkat keterbayaran piutang ini akan berdampak pada perhitungan rasio yang berdasarkan pada Aset Lancar.

Kewajiban daerah lebih didominasi oleh hutang barang jasa di Rumah Sakit Daerah (BLUD) berupa obat dan habis pakai lainnya. Semuanya merupakan kewajiban jangka pendek yang akan dibayar/dilunasi pada tahun anggaran setelahnya. Pada tahun 2024 terdapat perubahan kebijakan atas pengakuan hutang belanja bagi hasil yang menyebabkan menurunnya nilai kewajiban.

Aset lancar mengalami peningkatan pada tahun 2021, namun setelahnya mulai turun dan kembali naik pada tahun 2024. Komponen yang selalu tumbuh positif adalah piutang pajak daerah dengan kenaikan rata-rata 211 juta rupiah, namun demikian penurunan kas dan setara kas terjadi sejak tahun 2021 dengan rata-rata 289 juta rupiah yang dikarenakan semakin optimalnya realisasi belanja dan ketidaktercapaian beberapa target pendapatan serta semakin optimalnya penggunaan persediaan dengan rata-rata 65 juta menyebabkan penurunan aset lancar pada periode tahun 2022 – 2023.

Pada pos investasi jangka panjang, penurunan terjadi pada tahun 2022 karena adanya divestasi dari salah satu BUMD serta penurunan saham kepemilikan di PT KIW karena setoran modal pemerintah pusat ke PT KIW. Seperti halnya pos investasi jangka panjang, aset tetap juga mengalami penurunan pada tahun 2022. Penurunan terjadi pada aset tanah yang berkurang karena pemindahan pengakuan pada aset ekstrakompatable serta beberapa konstruksi dalam pengerjaan yang diajukan proses penghapusan.

Pembentukan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024. Besaran Dana Cadangan sesuai

Peraturan Daerah dimaksud sebesar Rp900 miliar yang dipenuhi dalam 3 (tiga) tahun anggaran, sejak tahun anggaran 2021 sampai dengan 2023.

Aset lainnya didominasi oleh aset dalam kondisi rusak berat dan diajukan proses penghapusan serta aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah. Fluktuasi yang terjadi dipengaruhi oleh banyaknya posisi aset tetap dalam kondisi rusak berat dan diajukan proses penghapusan.

Tabel 2.27.
Neraca Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024

Uraian	Jumlah (Rp. 000)				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
ASET	37.222.304.291	39.291.945.337	40.276.338.752	40.934.354.196	40.261.948.714
ASET LANCAR	3.316.755.368	3.791.840.781	3.561.496.934	3.418.108.280	3.427.967.953
Kas dan Setara Kas	864.937.343	1.436.740.557	1.237.681.108	907.267.200	587.530.474
Piutang Pajak Daerah	2.050.129.305	2.116.395.701	2.212.266.408	2.625.886.012	2.897.664.180
Piutang Retribusi Daerah	977.885	1.188.953	265.512	86.035	111.893.619
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	157.475.313	344.393.176	58.532.786	31.181.471	1.832.728
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	128.148.979	-	14.764.276	4.254	53.079.604
Piutang Lainnya	16.031.691	15.717.526	15.599.471	15.406.623	15.157.041
Penyisihan Piutang	-418.683.863	-642.081.528	-380.010.526	-517.709.600	-560.159.696
Beban Dibayar Dimuka	6.144.929	5.756.838	5.301.065	5.799.321	5.086.493
Persediaan	511.593.784	513.729.554	397.096.831	350.191.210	315.883.508
INVESTASI JANGKA PANJANG	6.424.346.793	7.454.908.269	7.359.256.134	7.761.580.723	7.929.016.426
Investasi Jangka Panjang Permanen	6.424.346.793	7.454.908.269	7.359.256.134	7.761.580.723	7.929.016.426
ASET TETAP	25.972.626.841	26.362.173.533	26.085.962.628	26.589.416.803	26.620.736.197
Tanah	13.483.227.890	13.583.627.731	13.198.047.275	13.069.880.522	12.332.651.846
Peralatan dan Mesin	6.808.241.676	7.529.773.129	8.329.364.755	9.123.265.698	9.528.039.167
Gedung dan Bangunan	7.563.815.353	7.920.921.189	8.861.709.983	9.491.863.080	9.849.541.705
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10.192.168.636	10.585.831.733	11.173.745.673	11.586.304.551	12.507.048.034
Aset Tetap Lainnya	1.365.494.887	1.472.453.852	976.375.566	1.053.571.666	1.056.350.270
Konstruksi dalam Pengerjaan	737.058.609	788.310.129	242.550.742	245.302.753	287.616.819
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-14.177.380.211	-15.518.744.231	-16.695.831.367	-17.980.771.469	-18.940.511.645
DANA CADANGAN	-	200.000.000	600.000.000	505.869.400	-
Dana Cadangan	-	200.000.000	600.000.000	505.869.400	-
ASET LAINNYA	1.508.575.287	1.483.022.752	2.669.623.055	2.659.378.989	2.146.938.213

Uraian	Jumlah (Rp. 000)				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	96.104.229	74.906.991	107.001.525	100.429.933	96.000
Aset Tak Berwujud	7.656.505	28.936.052	36.540.063	39.808.975	45.259.342
Aset Lain-lain	1.404.814.552	1.756.554.545	2.898.167.680	2.955.683.663	3.160.983.940
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-21.190.441	-25.209.487	-30.065.845	-36.070.409
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-356.184.395	-450.364.793	-504.977.410	-1.023.416.071
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	-	-	-	53.958	85.412
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-	103.488.065	98.445.714	-
PROPERTI INVESTASI	-	-	-	-	137.289.923
Properti Investasi Tanah	-	-	-	-	122.427.169
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	35.568.943
Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	-	-20.706.189
KEWAJIBAN	824.663.799	383.270.068	338.699.949	431.330.988	557.443.147
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	824.663.799	383.270.068	338.699.949	431.330.988	557.443.147
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	249.993	281.977	323.256	204.401	28.310
Pendapatan Dibayar Dimuka	37.083.532	39.251.892	38.988.175	44.550.351	34.750.163
Utang Belanja	199.503.881	339.312.280	287.498.121	380.841.449	507.205.974
Utang Jangka Pendek Lainnya	587.826.391	4.423.919	11.890.395	5.734.786	15.458.698
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-	-
EKUITAS	36.397.640.492	38.908.675.268	39.937.638.803	40.503.023.207	39.704.505.567
Ekuitas	36.397.640.492	38.908.675.268	39.937.638.803	40.503.023.207	39.704.505.567
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	37.222.304.291	39.291.945.337	40.276.338.752	40.934.354.196	40.261.948.714

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024

Analisis likuiditas diukur menggunakan rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*), dan rasio cepat (*quick ratio*). *Current ratio* dihitung dengan membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki pemerintah daerah dengan kewajiban lancar (utang jangka pendek). Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi hutang menggunakan aset lancarnya. Aset lancar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagian besar adalah piutang daerah dengan kewajiban yang tercatat yang merupakan kewajiban pada rumah sakit daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kemampuan keuangan Provinsi Jawa Tengah memenuhi kewajiban jangka pendek cukup fluktuatif. Pada tahun 2020 *current ratio* Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencapai nilai 4,02 kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 9,89 dan tahun 2022 mencapai 10,52. Namun demikian rasio tersebut pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 7,92. Rasio ini kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 6,15. Penurunan ini dikarenakan terdapat meningkatnya komponen kewajiban lancar khususnya pada akun Utang Bagi Hasil, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer dan Utang Belanja sedangkan peningkatan aktiva lancar yang disebabkan oleh kenaikan piutang pendapatan tidak signifikan. Penurunan *current ratio* pada 2024 disebabkan karena kenaikan kewajiban lancar lebih tinggi daripada kenaikan aktiva lancar. Kenaikan kewajiban lancar tercermin pada naiknya kurang salur atas bagi hasil kabupaten/kota dan adanya lebih salur atas perhitungan dana transfer pusat pada tahun 2022, sedang pada aktiva lancar kenaikan hanya terjadi pada piutang dan cenderung lebih kecil daripada kenaikan kewajiban lancar tersebut.

Tabel 2.28.
***Current Ratio* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024**

Tahun	Aktiva Lancar (Rp.000)	Kewajiban Lancar (Rp.000)	*Current Ratio*
2020	3.316.755.368	824.663.799	4,02
2021	3.791.840.781	383.270.068	9,89
2022	3.561.496.934	338.699.949	10,52
2023	3.418.108.280	431.330.988	7,92
2024	3.427.967.953	557.443.147	6,15

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024

Rasio Kas (*cash ratio*) dihitung dengan membandingkan antara kas yang tersedia dalam pemerintah daerah ditambah investasi jangka pendek dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio kas bermanfaat untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban yang segera harus dipenuhi dengan kas dan investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah. Pada rasio ini kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada periode 2020-2024 mengalami fluktuasi. Mengalami kenaikan dari 1,05 pada tahun 2020 menjadi 3,75 pada tahun 2021, rasio kas kembali menurun pada tahun 2022 sebesar 3,65;

tahun 2023 sebesar 2,10 dan pada tahun 2024 sebesar 1,05. Kewajiban Lancar pada tahun 2024 mengalami peningkatan sedangkan komponen kas atau setara kas mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan kas yang terjadi pada periode 2022–2024 mencerminkan optimalisasi manajemen kas yang mendasarkan pada ketercapaian pendapatan dan realisasi belanja.

Tabel 2.29.
***Cash Ratio* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024**

Tahun	Kas (Rp)	Kewajiban Lancar (Rp)	*Cash Ratio*
2020	864.937.343	824.663.799	1,05
2021	1.436.740.557	383.270.068	3,75
2022	1.237.681.108	338.699.949	3,65
2023	907.267.200	431.330.988	2,1
2024	587.530.474	557.443.147	1,05

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024

Selain itu Rasio Lancar (*quick ratio*) membandingkan antara aktiva lancar yang telah dikurangi persediaan dibandingkan dengan kewajiban lancar. Rasio Lancar mengindikasikan apakah pemerintah daerah dapat membayar kewajibannya dengan cepat. Semakin tinggi nilai rasio cepat semakin tinggi tingkat likuiditas keuangan pemerintah daerah. Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utang jangka pendek dari aset lancar selain persediaan. Perlu diketahui bahwa aset lancar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh piutang daerah, sehingga rasio ini dipengaruhi oleh kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merealisasikan piutang menjadi kas.

Perhitungan Rasio Lancar menunjukkan likuiditas keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan pada periode 2020 hingga 2022 namun menurun pada tahun 2023. *Quick ratio* pada tahun 2020 sebesar 3,4 terus mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 8,6 dan tahun 2022 menjadi 9,3. Rasio ini mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 7,1 dan pada tahun 2024 sebesar 5,58. Penurunan tersebut juga disebabkan karena meningkatnya komponen kewajiban lancar, walaupun pemakaian persediaan semakin optimal namun peningkatan aktiva lancar lebih kecil daripada peningkatan kewajiban lancar, hal tersebut menyebabkan penurunan pada *quick ratio*.

Tabel 2.30.
***Quick Ratio* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024**

Tahun	Aktiva lancar (Rp.000)	Persediaan (Rp.000)	Kewajiban Lancar (Rp. 000)	*Quick Ratio*
2020	3.316.755.368	511.593.784	824.663.799	3,4
2021	3.791.840.781	513.729.554	383.270.068	8,6
2022	3.561.496.934	397.096.831	338.699.949	9,3
2023	3.418.108.280	350.191.210	431.330.988	7,1
2024	3.427.967.953	315.883.508	557.443.147	5,58

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024

Ketiga rasio baik *current ratio*, *cash ratio*, maupun *quick ratio* menunjukkan kondisi yang berfluktuatif. Penurunan rasio pada tahun 2024 lebih disebabkan karena meningkatnya komponen kewajiban lancar khususnya pada akun Utang Bagi Hasil, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer dan Utang Belanja. Optimalisasi manajemen kas yang mendasarkan pada ketercapaian pendapatan dan realisasi belanja sehingga saldo kas akhir tahun semakin kecil dan adanya lebih salur atas pendapatan transfer menjadi komponen yang berpengaruh pada penurunan rasio likuiditas ditahun 2024.

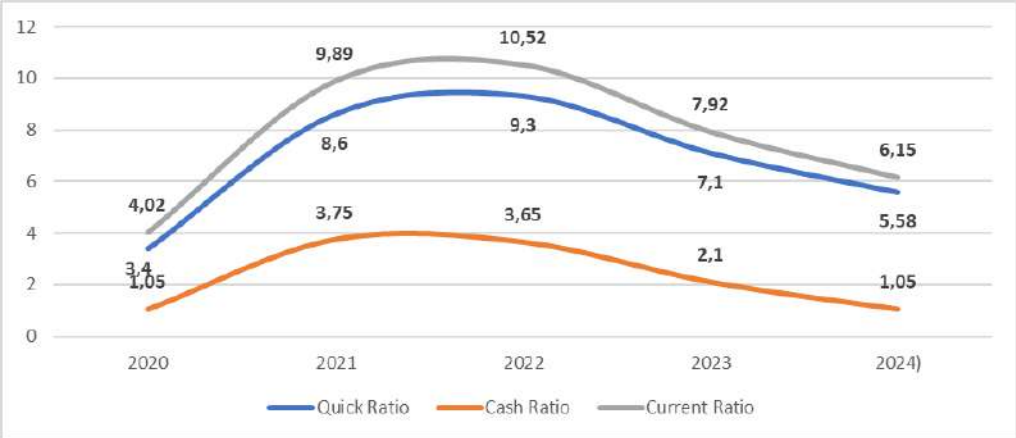

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024

Gambar 2.58.
Perbandingan Rasio Likuiditas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024

Analisis likuiditas tersebut menunjukkan bahwa likuiditas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya dalam upaya memenuhi kewajiban lancar menunjukkan peningkatan pasca tahun pandemi namun kembali menurun pada tahun 2023 dan meningkat kembali pada tahun 2024. Semakin tingginya tingkat likuiditas menunjukkan semakin kecil unsur utang sehingga semakin meningkatnya kemandirian daerah karena tidak terbebani nya daerah dengan sumber dana eksternal dari pinjaman atau utang.

Rasio *Solvabilitas* digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Suatu pemerintah daerah dikatakan *solvabel* apabila pemerintah daerah tersebut mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk

membayar semua hutang-hutangnya. Sebaliknya apabila jumlah aktiva tidak cukup atau lebih kecil daripada jumlah hutang, berarti pemerintah daerah tersebut dalam keadaan *insolvable*. Rasio ini akan menggambarkan kemampuan nilai aset digunakan sebagai alternatif pelunasan hutang apabila terjadi gagal bayar. Oleh karena itu semakin besarnya nilai rasio ini menunjukkan maka semakin kecil kemungkinan pemerintah daerah menghadapi kesulitan keuangan.

Tabel 2.31.
Rasio *Solvabilitas* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024

Tahun	Total Aktiva (Rp.000)	Total Kewajiban (Rp.000)	Rasio Solvabilitas
2020	37.222.304.291	824.663.799	45,14
2021	39.291.945.337	383.270.068	102,52
2022	40.276.338.752	338.699.949	118,91
2023	40.934.354.196	431.330.988	94,9
2024	40.261.948.714	557.443.147	72,23

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024

Rasio solvabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada periode 2020 hingga 2022 menunjukkan peningkatan signifikan dari 45,14 menjadi 118,91. Namun demikian pada tahun 2023 dan 2024 rasio ini mengalami penurunan menjadi 94,90 dan 72,23. Penurunan rasio ini karena terjadi peningkatan signifikan pada kewajiban namun tidak diikuti dengan aktiva. Aktiva turun signifikan karena pada tahun 2021-2023 ada kebijakan untuk memupuk dana cadangan keperluan pilkada dan pada tahun 2024 dana tersebut digunakan. Sementara itu, kewajiban lancar juga meningkat tercermin pada naiknya kurang salur atas bagi hasil kabupaten/kota dan adanya lebih salur atas perhitungan dana transfer pusat pada tahun 2022. Dua komponen diatas menjadi faktor penyebab turunnya rasio solvabilitas.

Rasio Utang (*leverage*) digunakan untuk mengetahui bagaimana beban risiko utang yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat *leverage* yaitu rasio utang terhadap ekuitas (*Total Debt to Equity Ratio*/DER). DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui bagian dari setiap rupiah ekuitas dana yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rasio ini mengindikasikan seberapa besar pemerintah daerah mungkin sudah kelebihan utang (*over–leveraged*) dan harus segera mencari jalan untuk mengurangi utang. Semakin besar rasio ini menunjukkan risiko pemberian utang semakin besar.

Rasio Utang ini sangat penting bagi kreditor dan calon kreditor potensial pemerintah daerah dalam membuat keputusan pemberian kredit. Rasio utang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cenderung menurun pada periode 2020–2024. Rasio *leverage* sempat mencapai 0,023 pada tahun 2020 namun terus menurun pada tahun 2021 dan 2022 hingga mencapai 0,008. Rasio ini sedikit mengalami

peningkatan pada tahun 2023 menjadi sebesar 0,011, dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 0,014. Terjadi peningkatan pada Total Kewajiban pada tahun 2024 khususnya pada akun Utang Bagi Hasil, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer dan Utang Belanja ditambah terjadinya penurunan pada ekuitas atas penggunaan dana cadangan keperluan pilkada.

Tabel 2.32.
***Debt to Equity Ratio* Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024**

Tahun	Total Kewajiban (Rp.000)	Total Ekuitas (Rp.000)	Rasio *Leverage*
2020	824.663.799	36.397.640.492	0,023
2021	383.270.068	38.908.675.268	0,01
2022	338.699.949	39.937.638.803	0,008
2023	431.330.988	40.503.023.207	0,011
2024	557.443.147	39.704.505.567	0,014

Sumber: LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2024

2.2.2. Kerangka Pendanaan Tahun 2026-2030

Pendapatan Daerah tahun 2026-2030 disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, capaian kinerja tahun 2020-2024 dan penetapan tahun 2025. Pendapatan Asli Daerah yang sebagian besar masih ditopang dari sektor pajak daerah diproyeksikan dengan mendasarkan pada realisasi penerimaan tahun 2024, tren realisasi penerimaan 10 tahun terakhir dan asumsi-asumsi yang mendasari perhitungan pertumbuhan ekonomi.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) membawa konsekuensi adanya penurunan PAD pada tahun 2025 khususnya karena adanya ketentuan mengenai opsen PKB dan opsen BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah. Dengan seiring optimisme atas pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional maka pada tahun 2026 pajak daerah kembali diproyeksikan meningkat.

Proyeksi Pendapatan Transfer dihitung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 serta denhan mempertimbangkan pada tren realisasi pendapatan dan tren alokasi dana transfer mulai dari tahun 2021 hingga 2024.

Tabel 2.33.
Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026–2030

Uraian	*Baseline* Tahun 2024* (Rp.000)	Tahun 2025** (Rp.000)	Jumlah (Rp.000)				
			Tahun 2026***	Tahun 2027***	Tahun 2028***	Tahun 2029***	Tahun 2030***
PENDAPATAN DAERAH	**26.378.719.626**	**24.574.934.505**	**24.514.909.659**	**25.643.730.674**	**26.871.698.552**	**28.127.189.204**	**29.405.882.177**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**17.650.936.913**	**15.619.284.656**	**16.112.398.370**	**17.129.686.550**	**18.242.821.585**	**19.380.071.300**	**20.537.003.178**
1 Pajak Daerah	14.210.241.533	12.459.303.870	12.899.838.185	13.709.894.727	14.571.721.831	15.486.898.222	16.457.344.657
2 Retribusi Daerah	2.318.821.514	2.092.596.928	2.174.496.850	2.282.062.424	2.394.228.940	2.510.678.746	2.631.981.622
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	687.813.166	690.155.713	701.832.870	782.124.872	916.702.165	1.032.760.032	1.094.628.383
4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	434.060.698	377.228.145	336.230.465	355.604.527	360.168.649	349.734.300	353.048.516
PENDAPATAN TRANSFER	**8.701.438.866**	**8.792.464.010**	**8.376.911.119**	**8.488.443.954**	**8.603.276.797**	**8.721.517.734**	**8.843.278.829**
1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.701.438.866	8.792.464.010	8.376.911.119	8.488.443.954	8.603.276.797	8.721.517.734	8.843.278.829
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**26.343.846**	**163.185.839**	**25.600.170**	**25.600.170**	**25.600.170**	**25.600.170**	**25.600.170**
JUMLAH PENDAPATAN	**26.378.719.626**	**24.574.934.505**	**24.514.909.659**	**25.643.730.674**	**26.871.698.552**	**28.127.189.204**	**29.405.882.177**

*Sumber: * LKPD Provinsi Jawa Tengah 2024, Audited;*

*** Rancangan Perubahan APBD 2025;*

**** Hasil Rakor Pendapatan Tahun 2025 dan Raker dengan Komisi C Tindaklanjut Rakor Pendapatan 2025.*

Guna pencapaian target PAD tahun 2026-2030 dilakukan upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya yang di tempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

a. Pemetaan dan akurasi data potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pendapatan melalui pelatihan khusus, seperti pemeriksaan, penagihan, dan evaluasi kebijakan;
c. Meningkatkan porsi pembayaran pajak melalui digitalisasi sistem;
d. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak;
e. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan pemerintah pusat, perangkat daerah penghasil, kabupaten dan kota, serta POLRI;
f. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah;
g. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
h. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
i. Penguatan kelembagaan dan sinergi antar BUMD dan perangkat daerah, serta mengembangkan potensi usaha;
j. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah; serta
k. Perlunya menggerakkan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan.

Selain komponen PAD, pembangunan Jawa Tengah juga ditopang oleh komponen Transfer Keuangan Daerah (TKD). Komponen TKD tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa arahan untuk pemanfaatan APBD sejalan dengan arahan dan kebijakan atas belanja pusat. Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 memberikan dampak pada belanja kementerian/lembaga termasuk yang dilaksanakan di daerah sesuai kewenangannya. Kriteria pembatasan dan efisiensi belanja pada tahun 2025 tersebut diperkirakan akan dilaksanakan pula pada pola belanja tahun berikutnya. Kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi proyeksi belanja pada tahun 2026-2030.

Belanja daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026-2030 utamanya diarahkan pada **pencapaian tujuan daerah** yaitu “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial

didukung Tata Kelola Berkelanjutan" dan pencapaian target indikator kinerja utama (IKU) Daerah Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus utama pada:

1. Pencapaian sasaran daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu:
   a. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas Dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah;
   b. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan;
   c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter;
2. Antisipasi terhadap dampak tantangan dinamika geopolitik dan pengetatan kebijakan moneter global, serta kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun nonalam;
3. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
4. Sinergi pembangunan antarwilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Sebagaimana arah kebijakan belanja daerah tersebut diatas, maka struktur belanja daerah Jawa Tengah tahun 2026-2030 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
   a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja perangkat daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; belanja pegawai termasuk belanja pegawai untuk PPPK dan CPNS, memperhitungkan jumlah pegawai yang pensiun serta penyesuaian tambahan penghasilan pegawai ;
   b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas dengan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, manfaat; belanja barang dan jasa diantaranya digunakan untuk operasional pelayanan rumah sakit, penyelenggaraan pendidikan sekolah, jaminan kesehatan masyarakat miskin, dan dukungan pelaksanaan kegiatan;
   c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang

secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; belanja hibah antara lain digunakan untuk dukungan pelaksanaan pilkada serentak, partai politik, instansi vertikal dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah, pembinaan kepemudaan dan olahraga;

d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset; belanja modal diantaranya untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana termasuk yang sifatnya *multi years* (tahun jamak);
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; penganggaran belanja tidak terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
   a. Bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
      1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
      2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
      3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
      4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa) meliputi:

a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergi dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan.

Tabel 2.34.
Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026–2030

Uraian	*Baseline* Tahun 2024* (Rp.000)	Tahun 2025** (Rp.000)	Jumlah (Rp.000)				
			Tahun 2026***	Tahun 2027***	Tahun 2028***	Tahun 2029***	Tahun 2030***
BELANJA DAERAH	**27.187.126.497**	**25.151.948.182**	**24.514.909.659**	**25.243.730.674**	**26.471.698.552**	**28.207.189.204**	**30.125.882.177**
BELANJA OPERASI	**16.083.865.301**	**16.053.711.560**	**15.831.419.433**	**15.157.921.007**	**15.952.371.597**	**17.220.358.791**	**18.111.578.381**
Belanja Pegawai	7.023.084.524	7.436.406.324	7.978.989.564	7.960.989.910	7.918.519.348	7.891.599.802	7.867.182.491
Belanja Barang dan Jasa	6.234.228.358	6.479.243.286	6.063.576.691	5.392.938.549	6.179.873.363	7.019.376.948	7.658.973.035
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	1.399.999	12.413.000	9.000.000	9.450.000	9.922.500	10.418.625	10.939.557
Belanja Hibah	2.780.143.423	2.093.048.950	1.747.253.178	1.760.292.548	1.808.156.386	2.261.413.416	2.535.083.298
Belanja Bantuan Sosial	45.008.996	32.600.000	32.600.000	34.250.000	35.900.000	37.550.000	39.400.000
BELANJA MODAL	**1.733.084.096**	**1.996.418.166**	**1.052.221.998**	**2.106.200.000**	**2.162.776.000**	**2.222.356.500**	**2.743.342.500**
Belanja Modal Tanah	12.221.207	13.932.478					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	855.982.713	688.845.843					
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	411.044.257	295.656.452					
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	366.478.924	869.435.948					
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	86.434.858	127.123.945					
Belanja Modal Aset Lainnya	922.135	1.423.500					
BELANJA TIDAK TERDUGA	**10.225.800**	**25.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**
Belanja Tidak Terduga	10.225.800	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
BELANJA TRANSFER	**9.359.951.298**	**7.076.818.456**	**7.606.268.228**	**7.954.609.667**	**8.331.550.955**	**8.739.473.913**	**9.245.961.296**
Belanja Bagi Hasil	6.334.544.870	4.494.697.452	4.400.368.228	4.748.709.667	5.125.650.955	5.533.573.913	5.975.061.296
Belanja Bantuan Keuangan	3.025.406.428	2.582.121.004	3.205.900.000	3.205.900.000	3.205.900.000	3.205.900.000	3.270.900.000
JUMLAH BELANJA	**27.187.126.497**	**25.151.948.182**	**24.514.909.659**	**25.243.730.674**	**26.471.698.552**	**28.207.189.204**	**30.125.882.177**

*Sumber: * LKPD Provinsi Jawa Tengah 2024 Audited;*

*** Rancangan Perubahan APBD 2025;*

**** TAPD Provinsi Jawa Tengah 2025.*

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Penerimaan pembiayaan daerah pada RPJMD 2025-2029 diproyeksikan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan pencairan dana cadangan Pilkada di tahun 2029 dan 2030. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan Pilkada sampai dengan tahun 2028 dan penyertaan modal yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.35.

Proyeksi Target Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026–2030

Uraian	*Baseline* Tahun 2024* (Rp.000)	Tahun 2025** (Rp.000)	Jumlah (Rp.000)				
			Tahun 2026***	Tahun 2027***	Tahun 2028***	Tahun 2029***	Tahun 2030***
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**1.406.120.547**	**577.013.677**	**100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**	**180.000.000**	**820.000.000**
1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	900.186.419	577.013.677	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
2 Pencairan dana cadangan	505.869.400	-	-	-	-	80.000.000	720.000.000
3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	64.727	-	-	-	-	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**20.700.000**		**100.000.000**	**500.000.000**	**500.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**
1 Pembentukan dana cadangan	-	-	-	400.000.000	400.000.000	-	-
2 Penyertaan modal	20.700.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
PEMBIAYAAN NETTO	**1.385.420.547**	**577.013.677**	**-**	**(400.000.000)**	**(400.000.000)**	**80.000.000**	**720.000.000**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**-**	**-**	-	-	-	-	-

*Sumber: * LKPD Provinsi Jawa Tengah 2024, Audited;*

*** Rancangan Perubahan APBD 2025;*

**** TAPD Provinsi Jawa Tengah 2025.*

Dari uraian tersebut diatas maka **kerangka pendanaan** daerah tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.36.

Proyeksi Kerangka Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026–2030

Uraian	Jumlah (Rp.000)				
	Tahun 2026*	Tahun 2027*	Tahun 2028*	Tahun 2029*	Tahun 2030*
PENDAPATAN	**24.514.909.659**	**25.643.730.674**	**26.871.698.552**	**28.127.189.204**	**29.405.882.177**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**16.112.398.370**	**17.129.686.550**	**18.242.821.585**	**19.380.071.300**	**20.537.003.178**
Pajak daerah	12.899.838.185	13.709.894.727	14.571.721.831	15.486.898.222	16.457.344.657
Retribusi daerah	2.174.496.850	2.282.062.424	2.394.228.940	2.510.678.746	2.631.981.622
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	701.832.870	782.124.872	916.702.165	1.032.760.032	1.094.628.383
Lain-lain PAD yang sah	336.230.465	355.604.527	360.168.649	349.734.300	353.048.516
PENDAPATAN TRANSFER	**8.376.911.119**	**8.488.443.954**	**8.603.276.797**	**8.721.517.734**	**8.843.278.829**
Dana Transfer Pemerintah Pusat	8.376.911.119	8.488.443.954	8.603.276.797	8.721.517.734	8.843.278.829
Dana Transfer antar Daerah	-	-	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**25.600.170**	**25.600.170**	**25.600.170**	**25.600.170**	**25.600.170**
Hibah	25.600.170	25.600.170	25.600.170	25.600.170	25.600.170
Dana Darurat	-	-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan sesuai PUU	-	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan	**24.514.909.659**	**25.643.730.674**	**26.871.698.552**	**28.127.189.204**	**29.405.882.177**
BELANJA	**24.514.909.659**	**25.243.730.674**	**26.471.698.552**	**28.207.189.204**	**30.125.882.177**
BELANJA OPERASI	**15.831.419.433**	**15.157.921.007**	**15.952.371.597**	**17.220.358.791**	**18.111.578.381**
Belanja Pegawai	7.978.989.564	7.960.989.910	7.918.519.348	7.891.599.802	7.867.182.491
Belanja Barang dan Jasa	6.063.576.691	5.392.938.549	6.179.873.363	7.019.376.948	7.658.973.035
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Subsidi	9.000.000	9.450.000	9.922.500	10.418.625	10.939.557
Belanja Hibah	1.747.253.178	1.760.292.548	1.808.156.386	2.261.413.416	2.535.083.298
Belanja Bantuan Sosial	32.600.000	34.250.000	35.900.000	37.550.000	39.400.000

Uraian	Jumlah (Rp.000)				
	Tahun 2026*	Tahun 2027*	Tahun 2028*	Tahun 2029*	Tahun 2030*
BELANJA MODAL	**1.052.221.998**	**2.106.200.000**	**2.162.776.000**	**2.222.356.500**	**2.743.342.500**
BELANJA TIDAK TERDUGA	**25.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**	**25.000.000**
BELANJA TRANSFER	**7.606.268.228**	**7.954.609.667**	**8.331.550.955**	**8.739.473.913**	**9.245.961.296**
Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota	4.400.368.228	4.748.709.667	5.125.650.955	5.533.573.913	5.975.061.296
Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.205.900.000	3.205.900.000	3.205.900.000	3.205.900.000	3.270.900.000
Jumlah Belanja	**24.514.909.659**	**25.243.730.674**	**26.471.698.552**	**28.207.189.204**	**30.125.882.177**
Defisit/Surplus	**-**	**400.000.000**	**400.000.000**	**(80.000.000)**	**(720.000.000)**
PEMBIAYAAN	**-**	**(400.000.000)**	**(400.000.000)**	**80.000.000**	**720.000.000**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**100.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**	**180.000.000**	**820.000.000**
Silpa	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Divestasi	-	-	-	-	-
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	80.000.000	720.000.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**100.000.000**	**500.000.000**	**500.000.000**	**100.000.000**	**100.000.000**
Pembayaran cicilan pokok utang	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Pembentukan Dana Cadangan	-	400.000.000	400.000.000	-	-
Pembiayaan Netto	**-**	**(400.000.000)**	**(400.000.000)**	**80.000.000**	**720.000.000**
SILPA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*Sumber: * TAPD Provinsi Jawa Tengah 2025, Hasil Rakor Pendapatan Tahun 2025 dan Raker dengan Komisi C Tindaklanjut Rakor Pendapatan 2025*

2.2.3. Alternatif Sumber Pendanaan Lain

Pemerintah daerah dalam era otonomi saat ini dituntut untuk dapat mandiri dalam menyelenggarakan keuangan daerahnya. Akan tetapi, daerah masih sering dihadapkan dengan adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Selain itu masih ada kesenjangan pendanaan yang dilihat dari tingginya kebutuhan pendanaan pembangunan dibandingkan dengan ketersediaan dana pembangunan pemerintah. Kebutuhan investasi penyediaan infrastruktur daerah untuk mendorong pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas untuk mengurangi ketimpangan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik masih sangat tinggi, namun ketersediaan APBD masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur yang ada.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pendanaannya, dibutuhkan adanya peningkatan pendapatan daerah serta alternatif pendanaan lain seperti penguatan pembiayaan melalui pendanaan inovatif yang sebaiknya dipenuhi dari sumber dana nonpemerintah. Oleh sebab itu pemerintah daerah dituntut untuk dapat berinovasi dalam pemenuhan potensi pendanaan dan pembiayaan alternatif selain dari APBD dan APBN. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang mengamanatkan implementasi Sinergi Pendanaan serta Pembiayaan Utang Daerah melalui pemanfaatan pinjaman daerah, obligasi dan sukuk daerah, untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam penyediaan infrastruktur.

Adapun beberapa skema pendanaan yang dapat dimanfaatkan diantaranya hibah, pinjaman daerah, KPBU, BUMD, BLUD, CSR, filantropi, ziswaf dan skema pendanaan lainnya. Penggunaan pendanaan alternatif pada pemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pendanaan daerah dalam mengelola pelayanan publik, meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah, serta meningkatkan potensi pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu skema pendanaan alternatif yang telah terlaksana di Provinsi Jawa Tengah adalah CSR. CSR di Jawa Tengah telah terlaksana sejak tahun 2019 dengan gambaran realisasi sebagai berikut.

Tabel 2.37.
Realisasi Pelaksanaan CSR Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019–2024

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perusahaan BUMN, BUMD	25	59	60	63	65	66
Jumlah Program	n/a	1.073	2.225	2.953	3.503	3.641
Realisasi (Rp)	120.903.290.008	89.454.454.856	83.767.555.393	113.561.417.851	119.556.053.739	127.329.158.211

Sumber: Silap CSR online 2019 – 2024

Berdasarkan data tersebut, realisasi CSR mengalami peningkatan dari waktu ke waktu dengan kondisi fluktuatif pada Tahun 2020 yang disebabkan Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa CSR masih potensial untuk dilaksanakan pada tahun selanjutnya.

2.3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Jawa Tengah dalam lima tahun ke depan merupakan hasil analisis gambaran umum daerah Jawa Tengah yang mencakup aspek geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum, serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah selama lima tahun. Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan pembangunan yang sifatnya lintas sektor atau *crosscutting*, makro, dan menjadi kewenangan tingkat daerah. Permasalahan pembangunan daerah Jawa Tengah yang masih relevan dalam lima tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut.

Aspek Geografi

Dari hasil gambaran umum kondisi daerah pada aspek geografi yang telah disajikan pada bab sebelumnya, diidentifikasi permasalahan pembangunan daerah sebagai berikut.

1. Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan

Kebutuhan akan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkualitas semakin meningkat seiring dengan bertambahnya aktivitas penduduk sejalan dengan jumlah penduduk yang juga semakin meningkat. Di sisi lain, ketersediaan sumber daya alam bersifat tetap, bahkan semakin menurun akibat eksploitasi yang tidak berwawasan lingkungan. Kondisi ini yang mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Jawa Tengah semakin menurun, yang salah satunya ditunjukkan dengan terlampauinya daya dukung dan daya tampung air yaitu sebesar 0,95 pada tahun 2022. Indikator lain yang juga dapat menggambarkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup di Jawa Tengah adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di mana IKLH Provinsi

Jawa Tengah pada tahun 2024 sebesar 69,46 di bawah IKLH nasional yang sebesar 73,07.

Di sisi lain, beberapa tekanan lingkungan di Jawa Tengah antara lain seperti perubahan tata guna lahan yang menyebabkan degradasi keanekaragaman hayati, peningkatan produksi limbah domestik padat (sampah) dan cair dengan masih terbatasnya kapasitas pengelolaannya, dan pencemaran lingkungan yang disebabkan antara lain masih rendahnya pengawasan dan pemantauan terhadap industri penghasil limbah, masih rendahnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah, serta masih rendahnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Dampak perubahan iklim juga semakin dirasakan di Jawa Tengah, terutama ditunjukkan dari semakin meningkatnya suhu udara dan anomali cuaca yang tidak dapat diprediksi. Perubahan iklim terjadi sebagai dampak dari meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) akibat aktivitas ekonomi dan penduduk yang belum diimbangi dengan upaya untuk menurunkan emisi GRK secara efektif. Sektor energi menjadi kontributor emisi terbesar akibat pembakaran bahan bakar fosil di pembangkit listrik dan transportasi.

Permasalahan lain terkait kualitas lingkungan hidup adalah penurunan vegetasi tutupan hutan dan peningkatan luasan lahan kritis. Kondisi tersebut yang menyebabkan penurunan daya dukung DAS, ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang disebabkan terganggunya habitat, peningkatan alih fungsi kawasan hutan untuk keperluan non kehutanan, pemanfaatan hutan yang belum optimal (kayu, nonkayu, jasa lingkungan), ancaman kerusakan kawasan hutan (kebakaran hutan dan lahan, pencurian sumber daya hutan dan perambahan kawasan hutan), dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia kehutanan. Wilayah pesisir dan laut di Jawa Tengah juga saat ini mengalami degradasi yang ditunjukkan antara lain kerusakan ekosistem mangrove, terjadinya abrasi, dan rob terutama pada wilayah pesisir dan laut pantai utara Jawa Tengah.

Permasalahan sumber daya air tidak hanya terkait ketersediaan air, namun lebih luas permasalahannya adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air disebabkan kurangnya sarana tampungan air baku, kurangnya Sarpras pengolahan air baku untuk air minum, dan rusaknya jaringan irigasi untuk pertanian. Sementara itu, terkait dengan permasalahan belum optimalnya pengendalian daya rusak air ditunjukkan dengan adanya kerusakan prasarana sarana sungai dan pengendali banjir.

Selain permasalahan sumber daya air permukaan sebagaimana digambarkan sebelumnya, di Jawa Tengah juga terjadi peningkatan pemanfaatan air tanah yang berpotensi mempercepat terjadinya amblesan tanah atau *land subsidence*. Amblesan tanah merupakan salah satu ancaman bencana yang terjadi dalam waktu yang relatif lama (*silent killer*) namun berdampak cukup luas yang

umumnya terjadi di wilayah-wilayah perkotaan, industri, dan pemukiman padat seperti yang telah terjadi di Wilayah Pantura Jawa Tengah. Untuk itu pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah harus tetap dilaksanakan untuk menurunkan laju amblesan tanah utamanya pada wilayah cekungan air tanah (CAT) Zona Rusak.

Penurunan kualitas lahan juga terjadi di Jawa Tengah sebagai akibat belum optimalnya produktivitas pertambangan dan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan. Potensi pertambangan di Jawa Tengah memiliki sebaran komoditas yang beragam dan cukup melimpah. Potensi mineral bukan logam dan batuan harus dipetakan dengan detail berdasarkan depositnya dan perlu mendasari aspek tata ruang karena rangkaian aktivitas pertambangan sering bersinggungan dengan lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan, antara lain, berkurangnya vegetasi hutan, tumbuhan, dan lapisan tanah. Perlu dorongan untuk melaksanakan pertambangan dengan baik (*good mining practice*) agar dapat mewujudkan keseimbangan antara nilai ekonomis dan nilai lingkungan.

2. Belum optimalnya ketahanan pangan

Permasalahan dari aspek geografi lainnya adalah terkait dengan ketahanan pangan. Hasil identifikasi permasalahan ketahanan pangan antara lain yaitu belum optimalnya penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi; pemenuhan hak dasar atas pangan secara berkelanjutan; pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, beragam, seimbang, dan aman; diversifikasi dan hilirisasi pangan lokal; sistem rantai pasok pangan; jaminan keamanan dan mutu pangan; riset, inovasi, dan teknologi pangan; pengendalian harga bahan pangan; serta peran serta masyarakat untuk penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan; dan pencegahan pemborosan pangan *(food waste)*. Selain itu, terdapat kecenderungan penurunan daya dukung pangan yang akan mempengaruhi kecukupan ketersediaan dan keterjangkauan pangan di masa yang akan datang.

3. Belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana

Selain lingkungan hidup, kondisi geografi juga mempengaruhi kondisi kebencanaan. Kondisi geografi Jawa Tengah dengan kemiringan yang bervariasi, kondisi sesar dan patahan, kondisi kegunungapian, serta alur-alur sungai memberikan tantangan dalam penanggulangan bencana khususnya bencana yang terjadi sewaktu-waktu atau bencana yang memiliki waktu evakuasi singkat, seperti gempa, tsunami, gerakan tanah dan banjir bandang. Jumlah dan kepadatan penduduk menyebabkan wilayah konservasi (termasuk wilayah rawan bencana) digunakan sebagai wilayah budidaya sehingga potensi keterpaparan penduduk terhadap ancaman bencana semakin tinggi. Kejadian bencana di Jawa Tengah mengalami penurunan yang masif dari tahun 2020 dengan 2.870 kejadian menjadi 354 kejadian bencana pada tahun 2024, namun masih diperlukan upaya dalam meminimalkan korban jiwa maupun kerugian

ekonomi akibat bencana dengan meningkatkan kapasitas dalam penanggulangan bencana. Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana harus diiringi dengan penguatan tata kelola kebencanaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Peningkatan kapasitas kawasan rawan bencana melalui desa tangguh bencana (destana) baru memfasilitasi 1.620 desa (18,92 persen) dari 8.563 desa/kelurahan di Jawa Tengah. Pemanfaatan teknologi untuk memberikan peringatan dini akan terjadinya bencana melalui pemasangan *Early Warning System* (EWS) di 300 desa dari 2.727 desa rawan longsor tinggi, selain itu perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan literasi masyarakat tentang kebencanaan, serta kapasitas lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah masih menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah meliputi sebagai berikut.

1. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya dilihat dari kemiskinan. Cukup tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah. Kondisi ini ditunjukkan dari persentase penduduk miskin Jawa Tengah masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin Jawa Tengah pada September 2024 sebesar 9,58 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang sebesar 8,57 persen.

Di sisi lain, rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin cukup besar. Kondisi ini menggambarkan bahwa bukan hanya jumlah absolut penduduk miskin yang menjadi permasalahan utama di Jawa Tengah, tetapi juga ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk miskin. Karakteristik rumah tangga miskin di Jawa Tengah sebagian besar jumlah anggota rumah tangganya rata-rata 4-5 orang, usia kepala rumah tangga rata-rata 53,90 tahun, berpendidikan sampai dengan SD atau tidak tamat SD dan penghasilan utama bersumber dari sektor pertanian.

Selain melihat karakteristik umum, kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensi, tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga dari permasalahan sumber daya manusia seperti rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan penduduk miskin yang disebabkan belum optimalnya akses layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kondisi kemiskinan juga ditandai dengan permasalahan pemenuhan infrastruktur dasar seperti penyediaan rumah yang layak huni, layanan air minum dan sanitasi aman.

Di sisi lain, permasalahan infrastruktur dasar serta permasalahan aksesibilitas di daerah dengan tingkat kesulitan geografis yang tinggi masih menjadi tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan kondisi geografis, setiap wilayah memiliki karakteristik yang ditentukan oleh letak geografis, kondisi topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, penggunaan lahan hingga tingkat kerawanan terhadap bencana. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap karakteristik potensi sumber daya alam yang menjadi salah satu modal dalam kegiatan perekonomian masyarakat.

Peran program perlindungan sosial sebagai salah satu instrumen pengelolaan kesejahteraan masyarakat belum menunjukkan kinerja yang optimal. Tata Kelola dan disharmoni kebijakan pusat dan daerah juga masih menjadi hambatan dalam implementasi. Program perlindungan sosial yang memiliki dua skema, yaitu jaminan sosial dan bantuan sosial masih diasosiasikan hanya untuk melindungi penduduk miskin, namun belum secara adaptif digunakan perlindungan terhadap dampak kejadian bencana dan perubahan iklim. Perlindungan sosial pada lingkungan yang belum inklusif masih belum optimal menjangkau kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas dan kelompok lansia. Program jaminan sosial masih dihadapkan pada permasalahan cakupan kepesertaan khususnya pada sektor informal, nilai klaim yang tidak sesuai dengan nilai keekonomian, serta kepatuhan pembayaran premi. Program bantuan sosial masih dihadapkan pada permasalahan cakupan dan kualitas pendataan yang antara lain disebabkan oleh kepemilikan identitas kependudukan, keterbatasan petugas pendataan dibandingkan sasaran, serta tata kelola data yang belum terintegrasi antar sektor.

Sementara itu, rendahnya konsumsi listrik per kapita di Jawa Tengah juga masih menjadi salah satu permasalahan. Konsumsi listrik per kapita Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 baru mencapai 802,05 kWh/kapita yang lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain. Tingkat konsumsi listrik ini erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Potensi konsumsi listrik Jawa Tengah masih harus terus didorong dan ditingkatkan, utamanya mendorong pemanfaatan listrik untuk kegiatan sektor produktif.

2. Terjadinya pergeseran karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat

Membangun Jawa Tengah berbudaya dengan membentuk karakter dan menjaga kearifan lokal Jawa Tengah sebagai warisan leluhur yang adiluhung memiliki tantangan tersendiri. Dalam upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, diperlukan komitmen bersama seluruh *stakeholder* untuk memahamkan budaya tidak hanya sebagai seni namun juga secara menyeluruh diartikan sebagai entitas nilai, laku maupun karya yang dapat ditransmisikan sebagai pedoman dalam berkehidupan, sehingga terbentuk ekosistem kebudayaan yang tangguh sebagai penopang ketahanan budaya sekaligus pemajuan kebudayaan. Belum optimalnya upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan hingga pembinaan objek pemajuan kebudayaan tercermin dari

rendahnya kualitas data kebudayaan, rendahnya komitmen dan sinergi seluruh *stakeholder*, kurangnya peminatan akan pelestarian kesenian tradisional, kurangnya pemanfaatan budaya Jawa, serta keterbatasan pemerintah terhadap upaya pelestarian budaya.

Pergeseran karakter dan budaya akibat pengaruh budaya dari luar juga memberikan pengaruh pada perubahan kondisi lingkungan masyarakat salah satunya adalah potensi terjadinya intoleransi, radikalisme dan ekstremisme yang mengarah pada aksi terorisme. Permasalahan tersebut terjadi juga tidak terlepas dari peran keluarga dan perempuan yang memegang peranan penting sebagai pendidik awal bagi anak dalam proses pembentukan sumber daya manusia yang memiliki karakter dan identitas budaya Jawa sejak usia dini. Kondisi ini dapat tercermin dari kinerja indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah yang pada tahun 2023 sebesar 60,89. Meskipun lebih baik dari IPK nasional yang sebesar 57,13 pada tahun 2023, namun di beberapa dimensi IPK masih menunjukkan kinerja yang rendah yaitu dimensi budaya literasi, ekspresi budaya dan ekonomi budaya.

Aspek Daya Saing

Permasalahan berdasarkan aspek daya saing di Jawa Tengah meliputi sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan mengingat perannya sebagai motor penggerak serta bagian dari proses dan tujuan pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia Jawa Tengah selain memastikan tercukupinya kebutuhan dasar dan kecukupan ekonomi, juga memperhatikan kualitas layanan dasar sehingga tercapai manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Namun demikian kualitas hidup sumber daya manusia Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan mengingat penyediaan layanan kebutuhan dasar masyarakat belum merata dan inklusif, terutama kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah pada tahun 2024 sebesar 73,88 yang masih di bawah angka IPM nasional yang sebesar 75,02. Meskipun demikian, jika dilihat dari indikator Indeks Modal Manusia (IMM) Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar 0,55 lebih baik dibandingkan dengan nasional yang sebesar 0,54.

Selain itu kualitas SDM Jawa Tengah dari sisi pilah gender juga masih perlu mendapatkan perhatian, meskipun secara capaian kinerja yang ditunjukkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) telah membaik. IKG Jawa Tengah bergerak dari tahun 2020 sebesar 0,370 menjadi 0,308 pada tahun 2024 dan IPG bergerak dari 92,58 pada tahun 2020 menjadi 93,44 pada tahun 2024, namun demikian kesenjangan antara laki-laki dan

perempuan masih tetap terjadi baik dalam hal akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaat pembangunan utamanya pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta keterwakilan pada posisi strategis.

Kualitas pendidikan masyarakat ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah dan harapan sekolah yang capaiannya masih di bawah nasional. Rata-rata lama bersekolah di Jawa Tengah yang masih rendah diperkuat dengan masih dijumpainya anak tidak sekolah (ATS) yang mencapai 500.000 jiwa, tertinggi ketiga secara nasional. Sementara harapan lama sekolah yang masih di bawah nasional disebabkan masih belum optimalnya perluasan akses dan kualitas layanan pendidikan di Jawa Tengah, ditandai dengan masih rendahnya tingkat partisipasi pendidikan, adanya kesenjangan layanan pendidikan, dan kurangnya mutu pendidikan.

Permasalahan kesehatan mengalami perubahan pola ke arah semakin kompleks sebagai akibat adanya pengaruh perubahan lingkungan dan perilaku. Usia harapan hidup penduduk Jawa Tengah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun belum diimbangi dengan peningkatan usia harapan sehat. Transisi demografi, perubahan gaya hidup dan serta mobilitas antar wilayah memicu transisi epidemiologi yang mengarah pada peningkatan kasus tidak menular pada usia produktif (termasuk tren meningkatnya masalah kesehatan jiwa), serta masih adanya beban penyakit menular terabaikan dan penyakit menular baru serta *zoonosis*. Masih rendahnya literasi kesehatan yang berdampak pada pemahaman terkait pentingnya kegiatan promotif dan preventif. Pada aspek gizi, beban ganda masalah kelebihan dan kekurangan gizi (*underweight, wasting, stunting, overweight*), pengetahuan dan perilaku pemenuhan kebutuhan gizi, serta ketahanan pangan pada level keluarga masih menjadi faktor determinan yang mempengaruhi status gizi masyarakat.Dari sudut pandang akses dan kualitas masih kurang optimalnya mutu pelayanan kesehatan primer dan lanjutan belum efisiennya pengelolaan fiskal dan pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif serta distribusi tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum merata. Selain itu, pembangunan kesehatan juga dipengaruhi minimnya inovasi dan teknologi kesehatan.

2. Daya saing dan produktivitas perekonomian daerah belum optimal

Perekonomian Jawa Tengah masih harus terus didorong untuk tetap tumbuh positif di tengah tantangan perekonomian global yang tidak pasti. Perekonomian Jawa Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, pertumbuhan sektor-sektor unggulan (pertanian dalam arti luas termasuk pangan, industri pengolahan, perdagangan, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pariwisata), kemudahan investasi, infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan distribusi barang jasa, serta wilayah yang kondusif. Tantangan ke depan adalah mewujudkan perekonomian daerah dengan produktivitas tinggi dengan tetap menerapkan ekonomi hijau. Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dalam rangka menurunkan

kesenjangan pendapatan antarmasyarakat dan antarwilayah. Kondisi tersebut adalah dalam upaya meningkatkan nilai PDRB per kapita Jawa Tengah yang sampai dengan tahun 2024 sebesar 47,97 juta rupiah, jauh dibawah PDRB per kapita nasional yang sebesar 78,61 juta rupiah.

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan perekonomian daerah masih dijumpai berbagai permasalahan yang perlu ditangani, terutama terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian daerah. Permasalahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Belum optimalnya pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan

Permasalahan yang terjadi dalam upaya peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan di Jawa Tengah sebagai berikut:

1) Sektor pertanian (dalam arti luas)

Pertanian adalah salah satu sektor unggulan Jawa Tengah yang mampu berkoṇtribusi secara signifikan terhadap PDRB. Namun demikian, masih terdapat banyak permasalahan diantaranya **belum optimalnya** produksi dan produktivitas sektor pertanian, modernisasi pertanian, integrasi hulu-hilir termasuk sistem distribusi produk pertanian, pengelolaan pertanian secara mandiri dan keterjangkauan biaya produksi pertanian, pengembangan pertanian berbasis korporasi, serta kapasitas dan kompetensi pelaku usaha sektor pertanian. Selain itu permasalahan lain adalah masih tingginya alih fungsi lahan dan rendahnya regenerasi pelaku usaha sektor pertanian. Semua permasalahan tersebut perlu diselesaikan sebagai upaya menjadikan Jawa Tengah salah satu penumpu pangan nasional yang berkelanjutan dan memberikan dampak yang nyata pada kesejahteraan petani.

2) Sektor industri pengolahan

Sektor lain yang menjadi sektor unggulan Jawa Tengah adalah sektor industri pengolahan. Beberapa permasalahan dan tantangan yang mempengaruhi kinerja sektor industri pengolahan antara lain belum optimalnya produktivitas industri, terutama industri kecil dan menengah, rendahnya nilai tambah produk industri, serta masih rendahnya kapasitas pelaku industri. Faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut antara lain **belum optimalnya** kapasitas industri kecil dan menengah untuk mampu menghasilkan produk nilai tambah tinggi, pengembangan industri, kapasitas industri berbahan baku lokal, integrasi rantai pasok antarindustri, kapasitas dan kompetensi pelaku usaha industri pengolahan, digitalisasi industri pengolahan serta masih rendahnya kepedulian akan prinsip keberlanjutan dalam industri.

Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh **belum optimalnya** ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri pengolahan, infrastruktur pendukung industri pengolahan, keterjangkauan teknologi ramah lingkungan, iklim usaha yang kondusif dan iklim kemitraan, serta penumbuhan kawasan industri/kawasan peruntukan industri baru.

3) Sektor perdagangan

Sektor perdagangan juga menjadi salah satu sektor yang berkontribusi cukup besar pada perekonomian daerah Jawa Tengah. Namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan dan tantangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan sektor perdagangan ini, antara lain **belum optimalnya** ekspor unggulan daerah, pengurangan ketergantungan impor, standarisasi produk-produk unggulan daerah, pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi, kapasitas dan kompetensi pelaku sektor perdagangan, iklim kemitraan pasar produk unggulan daerah, serta sistem distribusi produk perdagangan.

4) Sektor koperasi dan UMKM

Sektor lain yang menjadi unggulan perekonomian Jawa Tengah adalah usaha kecil dan menengah, serta koperasi. Tantangan ke depan adalah meningkatkan kontribusi sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap PDRB Jawa Tengah. Beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pengembangan koperasi serta usaha kecil dan menengah di Jawa Tengah, antara lain **belum optimalnya** kualitas produk unggulan UMKM, akses pasar, kemitraan, modal/pembiayaan inovatif, kemasan, standar produk, dan manajemen usaha, digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM, kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM, wirausaha baru, pengawasan dan penjaminan koperasi simpan pinjam, serta kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia koperasi.

5) Sektor pariwisata

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor andalan Jawa Tengah dalam menyokong perekonomian daerah. Sektor pariwisata juga menjadi salah satu sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, penyediaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan menengah pendukung pariwisata. Namun, kontribusi sektor pariwisata pada pendapatan asli daerah dan pada PDRB belum optimal. Kondisi belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah maupun PDRB disebabkan beberapa permasalahan, antara lain, kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara masih belum optimal, rata-rata lama menginap wisatawan relatif rendah dan masih rendahnya pengeluaran wisatawan. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain **belum optimalnya** promosi pariwisata, kondisi destinasi wisata termasuk kondisi sarana prasarana destinasi wisata, diversifikasi daya tarik pariwisata, infrastruktur konektivitas antardestinasi wisata, integrasi antardestinasi wisata, kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata, kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata serta belum beroperasional secara penuh bandara Ahmad Yani dan Bandara Adi Soemarmo sebagai Bandara Internasional yang menjadi Pintu masuk Wisatawan Mancanegara.

6) Sektor ekonomi kreatif

Ekonomi kreatif saat ini menjadi salah satu sektor ekonomi yang mampu menjadi kekuatan baru untuk peningkatan perekonomian daerah Jawa Tengah. Namun demikian saat ini perkembangan ekonomi kreatif di Jawa Tengah belum memperlihatkan hasil yang optimal terutama dalam Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif terhadap Perekonomian daerah. Beberapa faktor penyebabnya hal ini antara lain **belum optimalnya** kualitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, sistem kelembagaan ekonomi kreatif dan jejaringnya sampai tingkat desa, pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif, sistem pembiayaan dan pendanaan bagi pengembangan ekonomi kreatif, infrastruktur fisik dan nonfisik yang memadai dan terjangkau untuk mendukung pengembangan kreativitas, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan warisan budaya lokal sebagai bahan baku usaha ekonomi kreatif, sistem regulasi ekonomi kreatif, apresiasi masyarakat terhadap kreativitas dan perlindungan hak kekayaan intelektual, jejaring kabupaten/kota kreatif, desa kreatif terutama pada produk kreatif unggulan, serta standarisasi produk dan praktek usaha ekonomi kreatif.

b. Rendahnya daya saing tenaga kerja dan pengangguran

Pembangunan ketenagakerjaan yang berdaya saing mencakup kualitas tenaga kerja yang unggul, tingkat produktivitas tenaga kerja yang tinggi, kesempatan kerja yang terbuka luas, hingga adanya perlindungan tenaga kerja. Beberapa faktor penyebab rendahnya daya saing tenaga kerja antara lain masih rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan, belum optimalnya pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, yang disertai dengan penguatan regulasi tentang vokasi, keahlian dan kompetensi digital, riset dan inovasi, sistem perlindungan tenaga kerja, industri masih bersifat padat karya (belum padat modal/teknologi tinggi), iklim ketenagakerjaan termasuk penerapan upah minimum yang berkeadilan, serta informasi pasar kerja. Rendahnya kualitas dan daya saing tenaga kerja yang menyebabkan rendahnya serapan tenaga kerja Jawa Tengah di lapangan kerja yang tersedia. Rendahnya serapan tenaga kerja inilah yang menyebabkan tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah masih cukup tinggi meskipun lebih baik jika dibandingkan dengan nasional.

c. Belum optimalnya riset dan inovasi

Riset dan inovasi menjadi salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi jangka panjang. Namun demikian, kondisi saat ini riset dan inovasi belum optimal dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Beberapa penyebabnya antara lain **belum optimalnya** peran dan kapasitas pusat riset dan inovasi di semua lembaga dan perusahaan, kapasitas dan kualitas sumber daya manusia riset dan inovasi di semua sektor, tata kelola kelembagaan riset dan inovasi, pemanfaatan hasil riset dan inovasi di semua

sektor, kerja sama riset dan inovasi antarpelaku usaha, swasta, dan pemerintah, inkubasi hasil riset dan inovasi, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hak paten atas hasil riset dan inovasi.

d. Ketimpangan ekonomi antarwilayah

Ketimpangan ekonomi antarwilayah di Jawa Tengah masih terjadi. Hal ini terjadi antara lain disebabkan oleh faktor geografis dan demografis, belum meratanya penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, belum meratanya penyediaan prasarana dan sarana pendukung ekonomi, belum optimalnya konektivitas antarwilayah, dan belum optimalnya tingkat kemandirian desa. Permasalahan lainnya antara lain adalah tingkat produktivitas ekonomi antarwilayah perkotaan dan perdesaan yang masih belum merata yang disebabkan beberapa faktor antara lain terkait potensi daerah sebagai sektor unggulan daerah yang belum dioptimalkan, serta ketersediaan sumber daya manusia berkualitas yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Di wilayah perdesaan khususnya, keterbatasan ketersediaan sarpras pendukung ekonomi, minimnya riset dan inovasi pengembangan produk, keterbatasan akses terhadap permodalan, serta belum optimalnya peran lembaga ekonomi Desa menjadi faktor-faktor yang menghambat perkembangan desa dalam upaya pemerataane pembangunan perekonomian perdesaan dan perkotaan.

3. Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah

Ketersediaan prasarana sarana menjadi satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah, terutama dalam hal kelancaran distribusi barang dan jasa. Salah satu permasalahan yang masih dijumpai dalam penyediaan prasarana sarana adalah masih belum meratanya jaringan jalan di Jawa Tengah, belum optimalnya kualitas jalan utamanya jalan provinsi yang belum memenuhi standar jalan kolektor dan masih terdapat ruas jalan yang kondisinya rusak. Selain itu masih terdapat titik rawan longsor di ruas-ruas jalan provinsi yang memerlukan antisipasi maupun penanganan darurat atau khusus saat terjadi bencana.

Kualitas pelayanan transportasi juga masih perlu ditingkatkan terutama dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan keselamatan dan kelancaran perjalanan transportasi (utamanya pada ruas jalan strategis pendukung jaringan distribusi logistik), peningkatan kualitas layanan angkutan umum (jangkauan wilayah dan kapasitas layanan), dan peningkatan pelayanan di simpul transportasi (utamanya kualitas kondisi fisik, pemenuhan utilitas dan persebaran terminal) serta integrasi antarmoda dalam rangka meningkatkan minat Masyarakat menggunakan angkutan umum. Hal lain yang masih perlu dikembangkan terkait peningkatan kelembagaan pengelolaan transportasi yang berbasis kewilayahan dan penataan sistem logistik yang lebih efisien.

Permasalahan lainnya dalam penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air yang disebabkan masih kurangnya sarana tampungan air baku. Air baku selain dimanfaatkan untuk penyediaan air minum dan pertanian juga dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi utamanya kebutuhan industri dan kebutuhan kawasan prioritas (pengembangan pariwisata). Pemenuhan sarana prasarana yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat juga masih perlu didorong untuk ditingkatkan seperti pemenuhan dan pemerataan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, serta penyediaan sarana air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat.

4. Terdapat simpul-simpul kerawanan yang mempengaruhi stabilitas

Kondusivitas wilayah menjadi salah satu tantangan yang harus dijaga dalam mendukung perwujudan daya saing daerah. Menjaga kondusivitas wilayah memiliki tantangan yang rumit karena berbagai persoalan baik ekonomi, sosial maupun budaya dapat dan/atau memiliki masalahnya sendiri-sendiri dan dapat juga menjadi simpul permasalahan yang kompleks. Sejauh ini kerawanan terjadi pada beberapa gatra mencakup:

a. Gatra Sumber Kekayaan Alam, berkaitan dengan ketahanan pangan baik kedelai, gula, dan daging sapi terhadap kebutuhan, kemudian kebutuhan air untuk rumah tangga yang terpenuhi dari sumber air bersih, luas kawasan hutan terhadap daratan, potensi lokal kopi terhadap potensi nasional.
b. Gatra Ideologi, berkaitan dengan toleransi antarmasyarakat perlu diperhatikan untuk meminimalisasi terjadinya konflik, terkait dengan keadilan dimana pemerintah perlu hadir untuk memenuhi hak dengan warga negara berkaitan dengan jumlah panti asuhan, dan jumlah panti jompo masih tergolong rawan dan kurang tangguh, kemudian pada persentase alokasi dana APBD untuk bantuan sosial masih dinilai kurang, termasuk kapasitas fiskal daerah dinilai rawan.
c. Gatra Ekonomi, berkaitan dengan kemakmuran dengan melihat pengeluaran sandang terhadap pengeluaran total perkapita dan pertumbuhan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan masih dinilai rawan pada indikator tersebut.
d. Gatra Sosial Budaya, berkaitan dengan variabel eksklusi sosial ditemukan bahwa wanita masih dikategorikan rawan ekonomi, variabel pendidikan berkaitan dengan tingkat kelulusan SLTA di Jawa Tengah termasuk rawan, termasuk akreditas baik SD, SLTP maupun SLTA masih dinilai rawan. Kejadian konflik baik konflik fisik masal dan konflik antar aparat pemerintah dengan masyarakat tergolong tinggi.

Khusus pada stabilitas politik, permasalahan yang kompleks terjadi pada agenda-agenda khusus berkaitan dengan pelaksanaan pesta demorkasi di daerah, namun beberapa permasalahan dapat juga menjadi simpul kerawanan akibat terabaikannya permasalahan tersebut. Persoalan yang perlu menjadi

perhatian adalah berkaitan dengan pemenuhan HAM, seperti pemenuhan hak-hak pekerja, kemudian berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan pers yang bebas dalam menjalankan tugas maupun fungsinya. Kesetaraan masyarakat dalam partisipasi dalam mempengaruhi kebijakan publik, khususnya melalui lembaga perwakilan. Terakhir berkaitan dengan kapasitas kelembagaan untuk memperhatikan proses penyusunan kebijakan dan pendidikan politik, khususnya bagi kader partai politik.

Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan berdasarkan aspek pelayanan umum di Jawa Tengah adalah **belum optimalnya tata kelola pemerintahan menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan berintegritas**. Kondisi ini ditunjukkan dengan kinerja reformasi birokrasi, SPBE, pengawasan dan pengendalian serta manajemen ASN berbasis sistem merit Provinsi Jawa Tengah yang membaik dari tahun-tahun sebelumnya namun dampak terhadap kualitas pelayanan publik dan capaian pembangunan daerah belum meningkat signifikan. Selain itu, perbaikan integritas ASN dan organisasi masih sangat perlu ditingkatkan mengingat hasil Survey Penilaian Integritas dalam kurun waktu empat tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga mampu menghadirkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan bebas korupsi.

Permasalahan dan tantangan lain yang dihadapi mencakup kelembagaan yang kurang efisen dan tidak adaptif disebabkan lemahnya peran evaluasi kelembagaan, proses bisnis organisasi yang tidak efektif, perencanaan pembangunan belum sepenuhnya menunjukkan keterpaduan dan keselarasan antarlevel pemerintahan serta antardokumen perencanaan. Selain itu, pendekatan berbasis kinerja, manajemen risiko, dan riset kebijakan belum terintegrasi secara optimal dalam proses perencanaan, penjenjangan kinerja organisasi belum berjalan secara fungsional, dan indikator kinerja yang digunakan belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART sehingga efektivitas pemantauan dan evaluasi program belum berjalan optimal. Selain itu, kualitas kebijakan yang dihasilkan belum sepenuhnya mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih terbatasnya pemanfaatan hasil riset dan data yang valid dalam proses perumusan kebijakan, serta adanya regulasi yang saling tumpang tindih dan kurang sinkron antar sektor maupun level pemerintahan. Di samping itu, peran pemerintah sebagai kolaborator belum dioptimalkan dalam membangun ekosistem kerja sama multipihak, baik dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dunia usaha, maupun akademisi, untuk memperkuat sinergi dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Terkait kemampuan keuangan daerah, kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih sangat terbatas. Terlebih dengan penerapan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) menyebabkan ruang fiskal Pemerintah Provinsi semakin sempit khususnya karena adanya ketentuan mengenai opsen PKB dan opsen BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah. Di sisi lain pembiayaan alternatif daerah belum berkembang secara optimal sehingga kapasitas fiskal akan stagnan atau tumbuh lambat yang berdampak pada tingginya ketergantungan pemerintah provinsi terhadap transfer pemerintah pusat.

Hal lain yang masih perlu didorong adalah mewujudkan demokrasi substansial semakin baik ke depan. Demokrasi yang berkembang saat ini masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis kepemiluan dan hubungan formal kelembagaan. Yang perlu didorong ke depan antara lain bagaimana memperkuat peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat, mengarusutamakan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, bebangsa, bernegara, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan; serta memperkuat integritas partai politik.

2.3.2. Isu Strategis

Isu strategis daerah Jawa Tengah diidentifikasi dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya, berbagai isu strategis global, nasional, maupun daerah yang tertuang dalam berbagai dokumen kebijakan pembangunan, serta potensi yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah yang menjadi peluang sekaligus tantangan dalam pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Isu Strategis Global, Nasional, Dan Daerah

Isu yang menjadi pertimbangan dalam penentuan isu strategis daerah Jawa Tengah lima tahun ke depan terkait dengan isu-isu yang ada dalam SDG's, isu nasional dalam RPJPN, isu-isu dalam KLHS, maupun isu RPJPD pada periode sebelumnya. Berbagai isu tersebut tergambarkan dalam tabel isu strategis global, nasional, dan daerah sebagai berikut.

Tabel 2.38.
Isu Strategis Global, Nasional, Dan Daerah
Dalam Kurun Lima (5) Tahun Kedepan

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional	Isu KLHS	Isu Daerah (RPJPD)
1. Kemiskinan 2. Pangan dan Gizi 3. Kesehatan 4. Pendidikan 5. Gender 6. Air bersih dan sanitasi 7. Energi 8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja 9. Infrastruktur	1. **Isu ekonomi:** rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya	1. Ancaman keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup 2. Produktivitas, daya saing dan keberlanjutan sektor unggulan ekonomi masih relatif rendah	1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan 2. Ketahanan pangan yang berkelanjutan 3. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional	Isu KLHS	Isu Daerah (RPJPD)
10. Kesenjangan Kota dan Permukiman 11. Produksi dan konsumsi berkelanjutan 12. Perubahan iklim 13. Sumberdaya kelautan 14. Ekosistem daratan 15. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan 16. Kemitraan global	integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi 2. **Isu sosial**: kemiskinan menuju nol persen, akses dan kualitas belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial 3. **Isu tata kelola pemerintahan:** pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas 4. Isu supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan nasional, stabilitas ekonomi, diplomasi tangguh 5. Isu ketahanan sosial budaya dan ekologi 6. **Ketimpangan** antar wilayah Jawa dan luar Jawa masih tinggi 7. **Isu kesinambungan pembangunan**: konsistensi perencanaan penganggaran, konsisten perencanaan pusat daerah, kapasitas pembiayaan terbatas	3. Ketimpangan Akses dalam Peningkatan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia 4. Belum optimalnya penuntasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif 5. Peningkatan intensitas bencana dan ancaman perubahan iklim 6. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel dan Berbasis Teknologi Informasi	4. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana 5. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia 6. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat 7. Tata kelola pemerintahan yang dinamis

Isu Strategis Daerah

Dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka **isu strategis daerah Jawa Tengah** lima tahun ke depan sebagai berikut.

1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang belum optimal salah satunya disebabkan oleh tingkat produktivitas sektor-sektor ekonomi yang belum optimal, serta belum memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam sebagai sumber produksi ekonomi daerah. Oleh karena itu, isu ke depan adalah bagaimana mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan melakukan transformasi ekonomi untuk memperkuat perekonomian daerah Jawa Tengah. Transformasi ekonomi dilakukan dengan mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dengan menggerakan sektor-sektor unggulan daerah antara lain sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Transformasi ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global. Transformasi ekonomi tersebut dilakukan dengan menerapkan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ekonomi hijau adalah

model pembangunan ekonomi yang menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal yang lebih hijau (*green investment*), infrastruktur hijau, dan pekerjaan yang ramah lingkungan (*green jobs*) untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Ekonomi biru menjadi strategi yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian ekosistem. Transformasi ekonomi akan tercapai juga apabila didukung dengan kondisi lingkungan wilayah yang kondusif yang akan menjamin lancar dan amannya semua pihak dalam proses pembangunan ekonomi Jawa Tengah. Di samping itu, belum optimalnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah salah satunya juga disebabkan oleh belum optimalnya pembangunan desa dan perdesaan yang dapat dioptimalkan melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur, pemberdayaan ekonomi masyarakat termasuk masyarakat miskin, pengembangan ekonomi desa, kualitas lingkungan dan pelayanan dasar, serta penguatan peran supra desa.

2. Penurunan tingkat kemiskinan

Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang masih di atas nasional menjadi salah satu isu dan tantangan yang harus diselesaikan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi, dari permasalahan aspek layanan dasar, kualitas sumber daya manusia hingga ketidakberdayaan ekonomi. Isu ke depan bagaimana menurunkan angka kemiskinan secara efektif dan efisien. Berdasarkan kondisi tersebut, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara utuh mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan pembangunan yang inklusif. Mengacu kepada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan strategi meliputi: 1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil. 3) Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Program dan kegiatan utama harus di desain secara sinergi dan terintegrasi dengan satu *database* yang akurat, sehingga berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Prinsip utama dan strategi tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan pada dasarnya bersifat lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan, sehingga sangat dipengaruhi kualitas perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan dan program di dalamnya.

3. Ketahanan pangan yang berkelanjutan

Jawa Tengah yang selama ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi semua orang dan daerah/wilayah yang tercermin dari ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Ketersediaan pangan yang bersumber dari pertanian, peternakan, dan perikanan harus dapat memenuhi kebutuhan penduduk di suatu wilayah dalam jangka panjang dan lintas generasi. Ketersediaan pangan akan dapat dicapai dan dijamin keberlanjutannya jika pembangunan memperhatikan sarana prasarana pertanian, konversi lahan/alih fungsi lahan yang terkendali, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, dan *up-skilling* SDM pertanian. Faktor penting lainnya adalah memastikan keterjangkauan pangan oleh masyarakat yang dicerminkan oleh distribusi yang lancar dari produsen ke konsumen antarwaktu antarwilayah, stok pangan dan harga yang selalu terjaga. Selain itu perlu upaya yang lebih konkret bahwa pangan yang tersedia dan dapat dijangkau oleh setiap penduduk memiliki manfaat bagi tubuhnya. Hal ini dapat didukung dengan pola konsumsi yang seimbang dan beraneka ragam, kecukupan gizi, keamanan dan mutu pangan serta pengembangan pengolahan pangan lokal. Selain itu diperlukan pengembangan pertanian dalam arti luas sesuai dengan karakteristik dan potensi unggulan masing-masing daerah dalam provinsi yang terintegrasi dalam pengembangan kewilayahan di Jawa Tengah.

4. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Isu strategis lainnya berkaitan dengan upaya memperkuat perekonomian daerah dan mendukung perwujudan kualitas hidup masyarakat adalah penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Pembangunan prasarana dan sarana menjadi salah satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah dalam hal kelancaran dan keselamatan perjalanan, distribusi barang dan jasa (logistik daerah), serta dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Penyelenggaraan Jalan Provinsi dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan menjaga kondisi jalan agar aman dan nyaman Penyediaan prasarana transportasi dan fasilitas publik yang ramah bagi seluruh kelompok masyarakat khususnya kelompok rentan (utamanya anak, pelajar, perempuan dan lansia) dan kelompok berkebutuhan khusus (aksesibilitas disabilitas di simpul dan jaringan transportasi) perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan pembangunan inklusif. Pembangunan prasarana dan sarana tetap berprinsip lebih ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi risiko kerusakan lingkungan, kerugian akibat bencana, serta berpedoman pada rencana tata ruang. Selain dari sisi penyediaan prasarana dan sarana, penggunaan kendaraan pribadi juga menjadi isu yang cukup penting untuk dikendalikan diantara melalui peralihan menggunakan angkutan umum. Selain itu penyediaan prasarana dan sarana bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin adalah suatu kebutuhan yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Salah satunya yaitu akses terhadap

infrastruktur dasar yang memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur dasar seperti perumahan, air bersih, sanitasi aman, energi listrik, dan transportasi.

5. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana

Keberlanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana menjadi salah satu isu strategis pembangunan Jawa Tengah lima tahun ke depan. Isu ini menjadi strategi yang menitikberatkan pada: 1) penanganan dan pengelolaan terhadap kerusakan lingkungan hidup seperti alih fungsi lahan, perubahan iklim, pencemaran lingkungan, kerusakan pesisir, DAS kritis, kawasan lindung/karst, pertambangan, 2) penanggulangan bencana terkait meningkatnya jumlah kejadian banjir, tanah longsor dan kekeringan akibat perubahan iklim, serta 3) isu sampah/limbah yang terus berkembang seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di Jawa Tengah.

Keberlangsungan proses pembangunan dapat terwujud apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dimanfaatkan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung untuk peningkatan kualitas fungsi lingkungan sehingga mampu mengurangi potensi terjadinya bencana alam.

6. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

Isu berikutnya adalah bagaimana mewujudkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang semakin baik dengan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat agar terwujud manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Perwujudan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Jawa Tengah dilakukan dengan mendorong akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin.

7. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat

Isu strategis daerah Jawa Tengah yang juga penting adalah kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat. Membangun kekuatan budaya ini adalah dalam upaya mitigasi dan adaptasi dampak modernisasi dan globalisasi yang masif saat ini. Modernisasi dan globalisasi memiliki dua sisi implikasi terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi, kehidupan modern dan maju perlu direspon agar tidak terjadi ketertinggalan. Di sisi lain, modernisasi dan globalisasi juga memberikan implikasi negatif pada pola pikir dan perilaku masyarakat yang kehilangan identitas dan jati dirinya, sehingga muncul karakter baru yang tidak sejalan dengan budaya asli Jawa Tengah, mengabaikan aspek moral, serta menganggap bahwa nilai spiritual menjadi tidak penting.

Pembangunan kualitas keluarga sebagai komunitas terkecil dalam masyarakat juga masih menjadi isu yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Perubahan tren gaya hidup dan arus informasi yang semakin luas

berpotensi mempengaruhi pola hubungan dan struktur keluarga. Perilaku salah seperti kekerasan, perundungan, dan eksploitasi kelompok perempuan dan anak, ketidaksetaraan gender, serta pergeseran norma dan nilai dalam lingkungan keluarga masih menjadi isu yang dapat mengancam karakter dan jatidiri masyarakat.

Untuk itu budaya menjadi hal penting untuk kemudian akan mampu mengembalikan karakter masyarakat Jawa Tengah pada identitas dan jati diri yang sesuai dengan budaya luhur Jawa. Selain itu, budaya yang kuat diharapkan akan mampu menangkal segala bentuk ancaman yang sifatnya tindak kriminal, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme, sehingga akan tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

8. Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berintegritas

Isu strategis yang tidak bisa diabaikan adalah isu transformasi tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik prima. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan daerah sebagai pengarusutamaan transformasi di Jawa Tengah, sehingga dituntut semakin adaptif dan kolaboratif dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip integritas. Hal tersebut perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi, peningkatan kapabilitas dan integritas sumber daya aparatur, adanya langkah transformatif dalam mewujudkan penerapan *collaborative governance.* Di samping itu, penerapan demokrasi yang lebih substantif perlu terus dikembangkan agar kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik menjadi semakin responsif dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Rencana pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 atau RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pengejawantahan dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2025-2030 yang tertuang dalam *Blue Print* Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Penjabaran visi dan misi daerah berdasarkan pada filosofi cita-cita Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk "**NGOPENI. NGLAKONI. Jateng**". Filosofi tersebut diartikan sebagai berikut:

Ngopeni bermakna ***melayani masyarakat*** *dan memelihara capaian pembangunan yang telah diwujudkan oleh para pemimpin terdahulu.*

Nglakoni *bermakna* ***melaksanakan komiten*** *dengan penuh tanggung jawab, menyelesaikan masalah, dan menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah.*

Ngopeni-Nglakoni Jateng menjadi Perwujudan Semangat Pimpinan Daerah yang menginspirasi pada seluruh Penyelenggara Pemerintahan untuk **RESPONSIF, PEDULI** mencurahkan perhatiannya untuk memelihara dan merawat, dan tidak segan melakukan tindakan **POSITIF** sebagai perwujudan komitmen dan tanggung jawab untuk **Jawa Tengah Maju, Berwibawa dan Berkelanjutan dengan Semangat Kolaboratif dan Responsif.**

Dengan landasan filosofis tersebut, maka ditetapkan **visi pembangunan daerah** Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah:

"JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045"

Makna dari visi tersebut diuraikan sebagai berikut:

MAJU. Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi yang mampu menjawab tantangan global dan sebagai kotributor perekonomian nasional yang berdaya saing, modern, inovatif, mandiri, tangguh, aman, dan Responsif terhadap Lingkungan serta sebagai episentrum lumbung pangan, industri nasional dan magnet perkembangan budaya dan kerukunan umat beragama di Nusantara.

BERKELANJUTAN. Melanjutkan dan Meningkatkan Pembangunan Jawa Tengah yang sudah berjalan dengan baik, melakukan Integrasi Program antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, serta melakukan Kolaborasi pembangunan daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa.

INDONESIA EMAS 2045. Kontribusi Provinsi Jawa Tengah sebagai Episentrum Pembangunan Sumber Daya Manusia Nasional menuju bonus demografi pada tahun 2045, yang menjadi sumber inspirasi bagi dunia dengan generasi yang cerdas serta Ekonomi yang tumbuh berkembang.

Pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui enam **misi pembangunan daerah** yaitu:

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Gambar 3.1.
Visi Misi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Implementasi pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dilaksanakan dengan **tiga fokus kerja** yaitu:

JATENG SIGAP!

Merupakan upaya Pemerintah dalam menghadrikan Pemerintahan yang Responsif dalam menjawab kebutuhan Masyarakat Jawa Tengah. Melalui Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang dapat diwujudkan dengan Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat.

JATENG MAKMUR!

Merupakan langkah Pemerintah dalam menghadirkan kesejahteraan Masyarakat Jawa Tengah melalui Transformasi Ekonomi yang tidak hanya berfokus pada Perekonomian Perkotaan juga Pedesaan, Perencanaan Tata Ruang yang responsif, dengan mengoptimalkan Pemerintahan Partisipatif, Kolaboratif dan Integratif serta dukungan Iklim Investasi.

JATENG NYAMAN!

Menjadi komitmen Pemerintah dalam menghadirkan Transformasi Sosial yang tercermin melalui terwujudnya Stabilitas, Kondusivitas, serta Kenyamanan dalam berkehidupan melalui peningkatan kualitas layanan dasar yang inklusif, pengembangan budaya lokal, aman dan nyaman dalam beribadah serta perlindungan terhadap HAM untuk Kualitas SDM Jawa Tengah yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global.

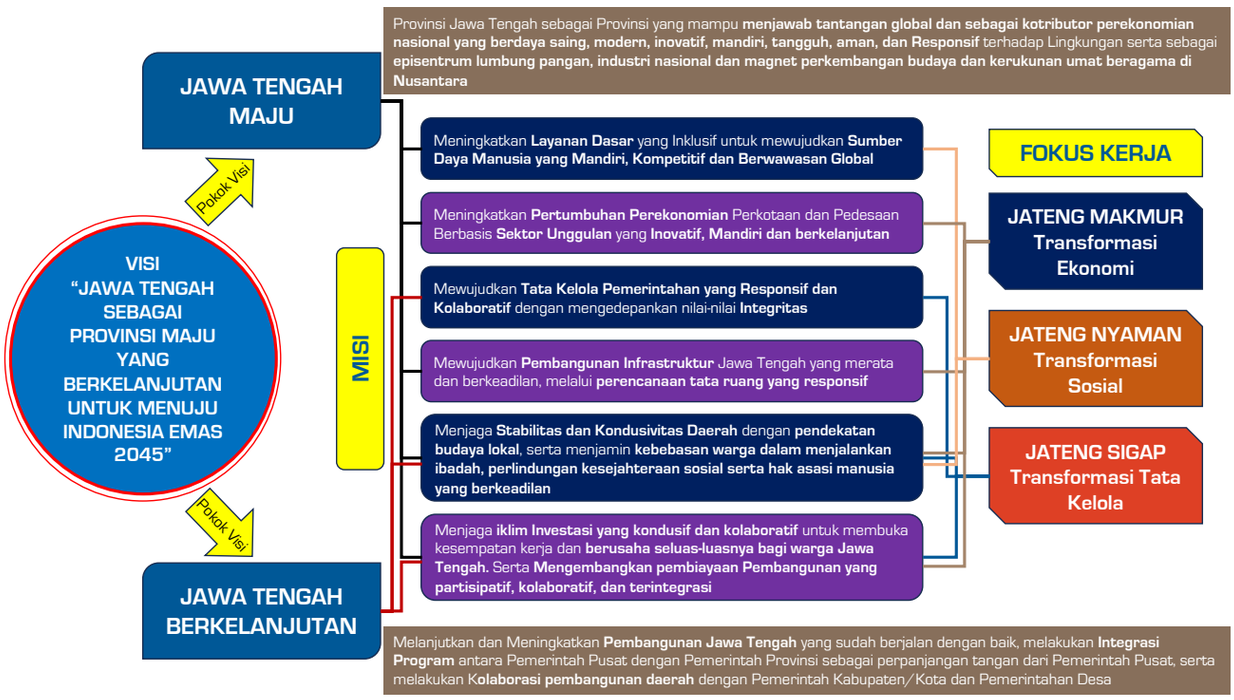

Gambar 3.2.
Keterkaitan Visi dan Pokok Visi, Misi, dan Fokus Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029

Perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 berdasarkan penjabaran pokok-pokok visi, misi dan fokus kerja pembangunan daerah secara teknokratik digambarkan dalam *logframe* atau kerangka berpikir sebagai berikut.

Perwujudan Jawa Tengah yang maju dan berkelanjutan untuk mendukung Indonesia Emas 2045, didukung dengan tiga pilar pembangunan daerah yaitu:

1. transformasi ekonomi, dengan terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan;
2. transformasi sosial, dengan terwujudnya sumber daya manusia Jawa Tengah berdaya saing dan berkarakter;
3. transformasi tata kelola, dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis.

Ketiga pilar tersebut merupakan satu kesatuan, terhubung satu sama lain, dan bersifat *crosscutting performance*. Jawa Tengah maju dan berkelanjutan akan terwujud dilandasi dengan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis guna mendukung perwujudan perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan, dalam rangka mencapai kondisi sosial

masyarakat yang lebih baik ditunjukkan dengan terwujudnya sumber daya manusia Jawa Tengah berdaya saing dan berkarakter.

Gambar 3.3.
***Logframe* Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029**

Keberhasilan pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029 berdasarkan *logframe* tersebut diukur dengan indikator kinerja pembangunan daerah yaitu sebagai berikut:

- Jateng MAJU BERKELANJUTAN, diukur dengan indikator Angka Kemiskinan, PDRB per Kapita, dan Indeks Reformasi Birokrasi;
- Jateng SIGAP (Transformasi Tata Kelola), diukur dengan indikator Indeks Integritas Nasional, Indeks Demokrasi Nasional, dan Otonomi Fiskal Daerah;
- Jateng MAKMUR (Transformasi Ekonomi), diukur dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- Jateng NYAMAN (Transformasi Sosial), diukur dengan indikator Indeks Modal Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Berdasarkan seluruh penjelasan visi, misi, fokus kerja, sampai dengan *logframe* pembangunan daerah sesuai dengan *blue print* perencanaan pembangunan daerah Jawa Tengah, selanjutnya dirumuskan **tujuan dan sasaran** pembangunan daerah sebagai penjabaran operasional dari visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah ini yang kemudian akan dirumuskan lebih lanjut dalam strategi dan arah kebijakan sampai dengan program prioritas yang akan dilaksanakan dalam pembangunan daerah Jawa Tengah selama lima tahun ke depan. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut.

TUJUAN DAERAH

"Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan

SASARAN DAERAH

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah

Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berbasis Lingkungan

Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter

TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH Jawa Tengah yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan adalah **"Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan"**.

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan transformasi ekonomi berbasis lingkungan dan transformasi sosial merupakan penerjemahan dari perwujudan Jawa Tengah yang Maju. Tujuan ini dapat diartikan bahwa Provinsi Jawa Tengah yang mampu menjawab tantangan global dan sebagai kontributor perekonomian yang berdaya saing, modern, inovatif, mandiri, tangguh, aman dan responsif terhadap lingkungan. Selain itu, tujuan juga diarahkan untuk mewujudkan Jawa Tengah sebagai episentrum lumbung pangan, industri nasional dan magnet perkembangan budaya dan kerukunan umat beragama di Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan tujuan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah, didukung dengan tata kelola yang berkelanjutan sebagai bentuk penerjemahan Jawa Tengah yang Berkelanjutan. Tata kelola yang berkelanjutan diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan daerah Jawa Tengah yang melanjutkan dan meningkatkan pembangunan daerah Jawa Tengah yang sudah berjalan dengan baik, melakukan integrasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, serta melakukan kolaborasi pembangunan daerah dengan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa.

Guna mengukur pencapaian tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah selama tahun 2025-2029 digunakan indikator kinerja yaitu Angka Kemiskinan dan PDRB per kapita dan Indeks Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut, ditetapkan **SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH** yang akan diwujudkan sebagai berikut.

Sasaran 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan daerah, sasaran pertama yang ingin diwujudkan adalah tata kelola pemerintahan berintegritas dan kolaboratif sebagai bagian dari transformasi tata kelola di Jawa Tengah. Upaya transformasi tata kelola merupakan arus utama dalam rangka mendorong penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang adaptif, yaitu pemerintahan yang senantiasa mampu menyesuaikan dalam menghadapi gejolak maupun perubahan yang seringkali terjadi lebih cepat melalui regulasi adaptif dan tidak tumpang tindih, sumber daya manusia penyelenggara pemerintahan yang kompeten dan profesional, budaya kerja efektif dan efisien, didukung dengan digitalisasi dan pengawasan pengendalian berbasis risiko yang independen. Selain itu, tata kelola pemerintahan didorong untuk lebih inklusif yaitu terbuka dalam berkolaborasi dengan lintas sektor (*hexahelix*) untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi tujuan pembangunan sehingga dapat mendukung tercapainya pembangunan daerah. Tata kelola pemerintahan juga didorong untuk mengedepankan nilai-nilai integritas dan anti korupsi sehingga dapat memperbaiki pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, efisien, serta penyusunan kebijakan pemerintahan yang lebih akuntabel, sehingga dapat

menghadirkan pelayanan publik yang prima dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Guna mendukung upaya transformatif tersebut, perwujudan stabilitas pembangunan daerah dalam bentuk demokrasi yang lebih substantif menjadi penting, dimana kebebasan dan kesetaraan dalam penyediaan ruang dialog dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik. Demokrasi yang lebih substantif dapat menciptakan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak warga negara sehingga mendorong terwujudnya ketentraman dan kondusivitas wilayah.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha. *Willingness to pay* masyarakat dalam membayar pajak yang semakin tinggi akan mendorong investasi menjadi semakin besar sehingga mendorong peningkatan pendapatan daerah. Di sisi lain, pemerintahan berintegritas dan kolaboratif akan mampu menyesuaikan strategi fiskal dengan dinamika kondisi perekonomian sehingga menghasilkan kapasitas fiskal yang memadai. Dengan kapasitas fiskal yang kuat, daerah memiliki cukup kemampuan untuk melaksanakan program pembangunan yang tepat sasaran, menyediakan layanan publik yang optimal, dan menjalankan pemerintahan dengan efektif dan efisien.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan tiga indikator kinerja yaitu Indeks Integritas Nasional, Indeks Demokrasi Indonesia, dan Otonomi Fiskal Daerah.

Sasaran 2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berbasis Lingkungan

Pencapaian sasaran pembangunan perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan diarahkan dengan fokus pada peningkatan produktivitas di sektor-sektor unggulan daerah didukung dengan produktivitas sumber daya manusia, digitalisasi, serta berbasis riset dan inovasi. Sejalan dengan peningkatan produktivitas di sektor-sektor unggulan tersebut, investasi yang berkualitas diarahkan pada sektor dan aktivitas produktif dengan dampak *multiplier* yang besar terhadap perekonomian. Pengembangan investasi berdasarkan keunggulan daerah diharapkan memiliki *backward* dan *forward linkage* dalam menciptakan nilai tambah serta menjadi bagian rantai pasok domestik yang kuat.

Selain itu juga didorong untuk pengembangan ekonomi kreatif, penguatan ekonomi dan keuangan syariah, serta mulai menerapkan prinsip-prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi sampai ke generasi berikutnya. Berbagai upaya yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tersebut fokus pada pengembangan iptek, inovasi,dan produktivitas ekonomi; penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru; transformasi digital; integrasi ekonomi domestik dan global; serta perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, serta didukung dengan pembangunan infrastruktur (jalan, energi, listrik, air) yang merata dan berwawasan lingkungan. Selain itu, dalam upaya menjaga keberlanjutan dan ketahanan pembangunan, pengelolaan risiko bencana juga menjadi bagian penting, terutama untuk meminimalkan potensi kerugian ekonomi akibat kejadian ekstrem yang dapat menghambat pertumbuhan.

Perekonomian daerah yang berbasis lingkungan harus didukung dengan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber kehidupan dan penghidupan manusia menjadi salah satu kondisi kinerja yang harus diwujudkan. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai modal dasar proses pembangunan hanya dapat terwujud apabila ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup fokus pada ketahanan sumber daya air, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, tutupan lahan, kualitas lingkungan hidup, dan penataan ruang.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan tiga indikator kinerja yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Sasaran 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter

Pencapaian sasaran pembangunan daerah tersebut diarahkan dengan memastikan penyediaan layanan dasar secara merata dan inklusif dalam rangka menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan kecukupan ekonomi masyarakat sehingga tercapai manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Berbagai upaya yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tersebut antara lain fokus pada kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas secara inklusif, perlindungan sosial yang adaptif, pembangunan keluarga, pengurangan ketimpangan gender, serta pengurangan pengangguran. Selain itu, mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter dilakukan dengan upaya memperkuat ketahanan budaya yang terinternalisasi dalam pribadi masyarakat Jawa Tengah dan memajukan kebudayaan di Jawa Tengah sebagai jati diri atau karakter masyarakat Jawa Tengah.

Upaya membentuk ketahanan budaya, nilai agama dan nilai budaya ditanamkan sejak dini melalui pendidikan karakter dari dalam keluarga, sehingga hal ini juga berkaitan dengan pentingnya ketahanan keluarga sebagai pondasi pembentukan karakter masyarakat sejak dini. Setelah itu, penanaman pondasi karakter juga mulai dilakukan di sektor pendidikan untuk melengkapi proses pembentukan karakter anak sejak dini. Penanaman nilai budaya tidak terbatas pada pembelajaran seni, tradisi dan warisan budaya semata, namun juga upaya menumbuhkembangkan budaya untuk hidup sehat, bugar, serta budaya literasi dalam berbagai aspek.

Selanjutnya, upaya membentuk sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter, memerlukan kondisi masyarakat yang bugar. Ketika masyarakat memahami pentingnya aktivitas fisik, mereka lebih termotivasi untuk berolahraga, yang tentu saja berdampak pada peningkatan kebugaran jasmani secara keseluruhan. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai jenis olahraga semakin meningkat menjadi salah satu langkah penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan bugar.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan dua indikator kinerja yaitu Indeks Modal Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Berikut gambaran **keterkaitan tujuan dan sasaran pembangunan daerah** beserta indikator kinerja Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029.

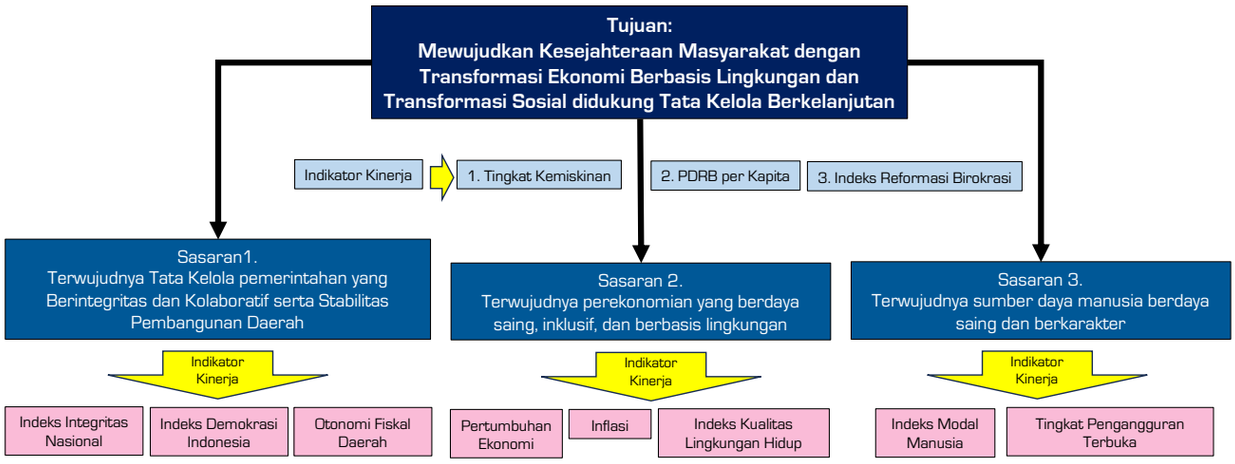

Gambar 3.4.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah kemudian ditetapkan target atau proyeksi untuk menjadi panduan dalam menyusun perencanaan tahunan serta untuk menjadi instrumen evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2026-2030. Penetapan target atau proyeksi per indikator tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Tahun 2026–2030

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan: **Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan**										
	Tingkat Kemiskinan	%	9,58	9,66 - 9,00	8,70 - 8,53	8,51 - 8,17	8,38 - 7,81	8,20 - 7,48	8,00 - 7,13	8,00 - 7,13
	PDRB Per Kapita	Juta Rp	47,97	49,3 - 51,1	52,0 - 55,0	56,0 - 59,8	61,0 - 65,3	67,0 - 71,8	73,0 - 78,4	73,0 - 78,4
	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	91,28	91,50	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00	94,00
Sasaran 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah										
	Indeks Integritas Nasional	Angka	79,47	80,97	80,97	82,25	82,25	84,23	84,23	84,23
	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	n/a	85,81 – 89,07	86,46 - 89,50	86,80 - 90,22	86,91 - 91,95	87,20 – 90,45	88,61 - 90,82	88,61 - 90,82
	Otonomi Fiskal Daerah	%	66,91	63,56	65,72	66,80	67,89	68,90	69,84	69,84
Sasaran 2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan										

Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,95	4,80 - 5,60	5,00 - 6,00	5,30 - 7,00	5,60 - 7,30	6,20 - 7,70	6,40 - 8,00	6,40 - 8,00
	Tingkat Inflasi	%	1,67	1,50 - 3,50	1,50 - 3,50	1,50 - 3,50	1,50 - 3,50	1,50 - 3,50	1,50 - 3,50	1,50 - 3,50
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	69,46	75,68	75,73	75,78	75,83	75,87	75,92	75,92
Sasaran 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter										
	Indeks Modal Manusia	Angka	0,59	0,62	0,62	0,63	0,64	0,65	0,65	0,65
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,78	4,81 - 4,42	4,71 - 4,27	4,65 - 4,08	4,57 - 3,90	4,49 - 3,73	4,41 - 3,56	4,41 - 3,56

Gambaran keterkaitan antara permasalahan, isu strategis daerah, visi, misi, fokus kerja, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 3.2.
Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis Daerah	Visi	Pokok Visi	Misi	Fokus Kerja	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
		JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045				**Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan**	▪ Tingkat Kemiskinan ▪ PDRB Per Kapita ▪ Indeks Reformasi Birokrasi
			JAWA TENGAH MAJU				
					JATENG MAKMUR	Sasaran: Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berbasis Lingkungan	▪ Pertumbuhan Ekonomi ▪ Inflasi ▪ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat - Daya saing dan produktivitas perekonomian daerah belum optimal - Belum optimalnya ketahanan pangan	- Penurunan tingkat kemiskinan - Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan - Ketahanan pangan yang berkelanjutan - Penyediaan			2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan			

Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis Daerah	Visi	Pokok Visi	Misi	Fokus Kerja	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
- Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah - Menurunnya daya dukung dan daya tampung; - Belum optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana	prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan - Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana			6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi			
				4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif			
					JATENG NYAMAN	Sasaran: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	▪ Indeks Modal Manusia ▪ Tingkat Pengangguran Terbuka
- Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia - Terjadinya pergeseran karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat	- Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia - Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat			1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global			

Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis Daerah	Visi	Pokok Visi	Misi	Fokus Kerja	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
				5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan			
			JAWA TENGAH BERKELANJUTAN				
					JATENG SIGAP	Sasaran: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	▪ Indeks Integritas Nasional ▪ Indeks Demokrasi Indonesia ▪ Otonomi Fiskal Daerah
- Belum optimalnya tata kelola pemerintahan menghadirkan pelayanan publik yang adaptif dan berintegritas - Terdapat simpul-simpul kerawanan yang mempengaruhi stabilitas	Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berintegritas			3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas			
				5. Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta			

Permasalahan Pembangunan Daerah	Isu Strategis Daerah	Visi	Pokok Visi	Misi	Fokus Kerja	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
				hak asasi manusia yang berkeadilan			
				6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi			

3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas dan fokus pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah, terutama dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, perumusan strategi dan program pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 diarahkan berbasis pada pengarusutamaan strategi penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem). Penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu:

1. **Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.** Strategi ini diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial yaitu: Bantuan sosial, seperti Bantuan Siswa Miskin (BSM), seragam siswa miskin, Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Kartu Jateng Ngopeni (Kajen), Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas, bantuan instalasi sambungan listrik bagi rumah tangga miskin, bantuan sosial dan jaminan perlindungan sosial adaptif lainnya dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
2. **Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin serta mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.** Strategi ini diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat serta pemberian akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil, diantaranya melalui: Peningkatan akses pekerjaan, melalui program Padat Karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung akses pekerjaan bagi masyarakat miskin, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan, peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan, pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar, pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha mikro dan kecil bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil, peningkatan akses pembiayaan UMKM, melalui peningkatan akses terhadap lembaga keuangan formal baik bank maupun nonbank, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
3. **Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.** Strategi ini adalah sinergi kebijakan untuk pemenuhan infrastruktur dasar mendukung peningkatan produktivitas serta pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui: Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, infrastruktur sanitasi air minum layak, pemberian stimulan jamban serta penanganan rumah sederhana layak huni bagi masyarakat miskin, peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan, program-program lainnya yang baik secara langsung

ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, seperti sinergitas dari dokumen perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi, penguatan database kemiskinan (verifikasi dan validasi database kemiskinan), dan penggunaan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan.

Strategi utama tersebut didukung dengan peningkatan tata kelola penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan validitas dan reliabilitas data dengan infrastruktur teknologi informasi yang memadai serta proses pendataan secara *bottom up*. Ketiga strategi tersebut dilaksanakan melalui pendekatan intervensi berbasis individu dan kelompok. Pendekatan individu menggunakan data mikro yang telah di verifikasi dan validasi serta terintegrasi dalam basis data kemiskinan.

Sedangkan untuk pendekatan kelompok difokuskan pada manfaat kolektif dengan skala kemanfaatan yang lebih luas yang dampaknya bersifat jangka menengah dan panjang. Fokus pendekatan kelompok antara lain: pengembangan potensi lokal melalui pemberdayaan kelompok usaha, pemberdayaan dan peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, serta infrastruktur air minum dan sanitasi layak. Intervensi penanggulangan kemiskinan (termasuk kemiskinan ekstrem) tersebut dilaksanakan secara lintas sektor, terfokus, dan konvergen di wilayah dengan potensi dan permasalahan yang telah diidentifikasi.

Selanjutnya, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada penjabaran misi pembangunan daerah, dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah sebagai berikut.

Tabel 3.3.
Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Misi	Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan
	TUJUAN: **Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan**	
	Sasaran: Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berbasis Lingkungan	
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan		1. Memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah 2. Meningkatkan kemandirian desa 3. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah 4. Meningkatkan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup 5. Pengurangan risiko bencana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap

Misi	Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi		Peningkatan pertumbuhan penanaman modal dengan menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif		Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antardaerah dan kewilayahan dengan pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan selaras dengan perencanaan tata ruang yang responsif
	Sasaran: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	
1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global		1. Meningkatkan akses layanan pendidikan berkualitas 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 3. Meningkatkan kebugaran masyarakat dan daya saing olahraga 4. Meningkatkan budaya literasi 5. Meningkatkan daya saing pemuda 6. Meningkatkan pembangunan berbasis gender 7. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak 8. Meningkatkan kualitas tenaga kerja
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan		1. Memperkuat jati diri dan meningkatkan pemajuan kebudayaan 2. Meningkatkan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
	Sasaran: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas		Meningkatkan birokrasi yang berintegritas dan kolaboratif
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan		Meningkatkan kondusivitas wilayah dan demokrasi substansial

Misi	Tujuan/Sasaran	Arah Kebijakan
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi		Memperkuat otonomi fiskal daerah

Penjabaran strategi lebih rinci dari arah kebijakan pembangunan daerah pada setiap sasaran daerah sebagaimana tabel di atas yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut.

Sasaran 1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas pembangunan daerah sebagai berikut.

1. Meningkatkan birokrasi yang berintegritas dan kolaboratif melalui:
   a. peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan responsif berbasis teknologi informasi;
   b. peningkatan kapabilitas teknologi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi guna mendukung transformasi digital;
   c. peningkatan kualitas perencanaan berbasis data terintegrasi, riset dan risiko serta berorientasi kinerja;
   d. peningkatan penerapan kebijakan data terintegrasi berbasis teknologi informasi;
   e. penguatan manajemen ASN berbasis meritokrasi;
   f. peningkatan kompetensi dan kapabilitas penyelenggara pemerintahan didukung dengan penerapan *reward* dan *punishment* yang proporsional;
   g. penguatan kualitas pengawasan dan pengendalian internal pemerintah berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi;
   h. peningkatan budaya integritas organisasi dan penyelenggara pemerintahan;
   i. peningkatan kualitas kebijakan daerah yang inklusif, responsif dan kolaboratif melalui pelibatan multiaktor;
   j. optimalisasi kelembagaan melalui evaluasi struktur organisasi dan perubahan organisasi perangkat daerah berbasis fungsi dan proses bisnis pembangunan daerah;
   k. penguatan ekosistem riset, IPTEK dan inovasi;
   l. peningkatan partisipasi kepala daerah dalam forum internasional;
   m. peningkatan sinergi pelaksanaan reforma agraria;
   n. peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang inklusif, inovatif, dan terintegrasi, serta meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota untuk mewujudkan data kependudukan yang valid dan termutakhir dalam pembangunan daerah.

2. Meningkatkan kondusivitas wilayah dan demokrasi substansial melalui:
   a. penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas;
   b. peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban;
   c. pemenuhan hak asasi manusia khususnya bagi kelompok rentan yang berkaitan dengan layanan dasar, termasuk penjaminan kesetaraan dan kebebasan sipil sesuai peraturan perundang-undangan;
   d. penguatan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;
   e. pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
   f. peningkatan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi;
   g. penguatan kapabilitas lembaga demokrasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat;
   h. pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional;
   i. penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila;
   j. penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan kriminalisme.
3. Memperkuat otonomi fiskal daerah melalui:
   a. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah;
   b. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;
   c. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
   d. penerapan elektronifikasi keuangan daerah;
   e. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas.

Sasaran 2. Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, Dan Berbasis Lingkungan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan sebagai berikut.

1. Memperkuat pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah melalui:
   a. peningkatan kontribusi dan produktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan;
   b. peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif;
   c. peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM);
   d. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
   e. pengembangan pusat riset pertanian yang mendorong pengembangan varietas unggul, budidaya lokal, peningkatan produktivitas, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian;

f. pengembangan sarana prasarana perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pengolahan perikanan; serta pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya;
g. penguatan hilirisasi pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dengan mendorong keterlibatan petani milenial;
h. peningkatan ketahanan pangan dengan menjaga ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan keberagaman pangan;
i. peningkatan produktivitas pertambangan dengan penerapan *Good Mining Practice*;
j. peningkatan pertumbuhan penanaman modal dengan menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah;
k. pengembangan ekonomi dan keuangan syariah;
l. peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antardaerah dan kewilayahan dengan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan selaras dengan perencanaan tata ruang yang responsif.

2. Meningkatkan kemandirian desa, melalui:
   a. pemenuhan kebutuhan layanan dasar desa sesuai kewenangan;
   b. peningkatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan untuk mendukung kemandirian desa;
   c. penguatan perwujudan standar pelayanan minimal desa berbasis swadaya masyarakat yang terintegrasi dengan program pos pelayanan terpadu;
   d. peningkatan produktivitas perekonomian berbasis potensi lokal unggulan desa dengan upaya diversifikasi produk berbasis riset dan inovasi dan ekonomi kreatif;
   e. penguatan peran BUMDes, BUMDesma, dan lembaga ekonomi desa lainnya yang mendukung kemandirian desa;
   f. peningkatan kerja sama desa dengan pihak ketiga dan kerja sama antardesa;
   g. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

3. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah, melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta peningkatan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas.

4. Meningkatkan ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, melalui:
   a. peningkatan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang mendukung pelestarian keanekaragaman hayati;
   b. peningkatan inisiatif dan upaya adaptasi mitigasi perubahan iklim;
   c. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terintegrasi hulu hilir melalui pengelolaan limbah domestik dan industri baik padat maupun cair;
   d. peningkatan ketahanan sumber daya air dengan penguatan infrastruktur, pengelolaan, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya air secara aman dan berkelanjutan;
   e. peningkatan ketahanan energi berbasis potensi lokal untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif;

f. peningkatan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan;
g. pelaksanaan reforma agraria dan penetapan lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
h. peningkatan keterwujudan penataan ruang.

5. Pengurangan risiko bencana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang mantap, melalui:
   a. penguatan kelembagaan dan kapasitas institusi penanggulangan bencana;
   b. peningkatan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana;
   c. pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk membangun ketahanan masyarakat;
   d. pengelolaan data dan informasi untuk pengambilan keputusan;
   e. pengembangan literasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, dan inklusi sosial dalam penanggulangan bencana;
   f. perluasan jejaring kemitraan serta pendanaan alternatif;
   g. pengembangan riset dan inovasi kebencanaan serta pemanfaatan teknologi.

Sasaran 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter sebagai berikut.

1. Meningkatkan akses layanan pendidikan berkualitas, melalui:
   a. pencapaian Wajib Belajar (WAJAR) 13 tahun dengan pemerataan akses dan keterjangkauan pendidikan dengan fokus pencegahan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS); pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan usia dini, dasar, menengah dan khusus; serta perluasan kesempatan menuju pendidikan tinggi;
   b. peningkatan kualitas layanan pendidikan umum dengan distribusi dan kompetensi guru; revitalisasi prasarana sarana pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP); digitalisasi pendidikan dan pengembangan *Science Technology Engineering Art and Mathematics* (STEAM); penguatan pendidikan karakter; pengembangan kurikulum adaptif berbasis kearifan lokal; serta dukungan peningkatan kualitas pendidikan keagamaan;
   c. peningkatan relevansi pendidikan berorientasi pada kesesuaian kompetensi pendidikan vokasi kebutuhan pasar kerja (*link and match*), penguatan sekolah menengah kejuruan (SMK) berbasis potensi lokal, dan kerja sama multipihak;
   d. perbaikan tata kelola pendidikan berbasis perencanaan, hasil evaluasi, kepemimpinan instruksional, dan manajemen kelembagaan serta penguatan kerjasama antarpemerintah (pusat-provinsi-kabupaten/kota), swasta, dan masyarakat.

2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui:
   a. peningkatan kesehatan siklus hidup dan gizi masyarakat;
   b. pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat;
   c. penguatan kapasitas ketahanan kesehatan;
   d. penguatan pelayanan kesehatan primer dan lanjutan;
   e. peningkatan cakupan pembiayaan kesehatan;
   f. penguatan tata kelola, data, informasi, dan inovasi teknologi kesehatan.

3. Meningkatkan kebugaran masyarakat dan daya saing olahraga melalui:
   a. penyadaran masyarakat dalam berolahraga;
   b. peningkatan literasi masyarakat dalam berolahraga;
   c. penyediaan prasarana sarana olahraga yang terjangkau;
   d. peningkatan prasarana sarana olahraga cabang olahraga unggulan;
   e. pembinaan atlet potensial menuju talenta nasional olahraga;
   f. peningkatan kapasitas tenaga olahraga.
4. Meningkatkan budaya literasi melalui dan kegemaran membaca masyarakat melalui penguatan tata kelola literasi;
5. Meningkatkan daya saing pemuda melalui:
   a. penyadaran pemuda;
   b. pemberdayaan pemuda;
   c. pengembangan pemuda.
6. Memperkuat jati diri dan meningkatkan pemajuan kebudayaan, melalui:
   a. peningkatan ekspresi budaya berbasis nilai kearifan lokal dengan optimalisasi perlindungan dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya guna mendukung diplomasi kebudayaan;
   b. peningkatan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya untuk kesejahteraan masyarakat;
   c. penguatan tata kelola dan ekosistem kebudayaan yang diarahkan pada ketersediaan data/informasi kebudayaan yang berkualitas; peningkatan kerja sama lintas sektor dan multipihak; dan optimalisasi pembinaan SDM dan lembaga kebudayaan guna mewujudkan talenta nasional seni budaya;
   d. meningkatkan fungsi kearsipan sebagai sumber informasi dan jati diri daerah melalui pengelolaan, perlindungan dan penyelamatan arsip.
7. Meningkatkan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial melalui pemenuhan kebutuhan dasar PPKS dalam panti, pemenuhan secara bertahap kebutuhan SDM panti, peningkatan kemandirian PPKS, mendorong peran kabupaten/kota dalam penanganan PPKS luar panti, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
8. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan bagi perempuan, peningkatan kontribusi perempuan dalam kepemimpinan pengambilan keputusan di berbagai aspek, perluasan penyelenggaraan upaya peningkatan produktivitas dan partisipasi aktif ekonomi perempuan dan ketenagakerjaan, penguatan kapasitas dan kemandirian guna peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan, penguatan tata kelola dan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dalam proses pembangunan, serta peningkatan ketersediaan dan kualitas data pilah gender dan anak tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
9. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak.

10. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, disertai dengan penguatan regulasi tentang vokasi; penguatan sistem perlindungan tenaga kerja termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan; penguatan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja yang inklusif termasuk penerapan upah minimum yang berkeadilan; penuntasan pekerja anak; serta penyediaan informasi pasar kerja dalam jangkauan luas berbasis digital terintegrasi dengan dunia usaha dunia industri dan mendorong penyandang disabilitas masuk ke pasar kerja formal.

Selanjutnya, agar arah kebijakan dan strategi dapat diimplementasikan setiap tahun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, ditetapkan penahapan pembangunan. **Penahapan pembangunan** merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Penahapan dan fokus tema pembangunan daerah Jawa Tengah pada tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut.

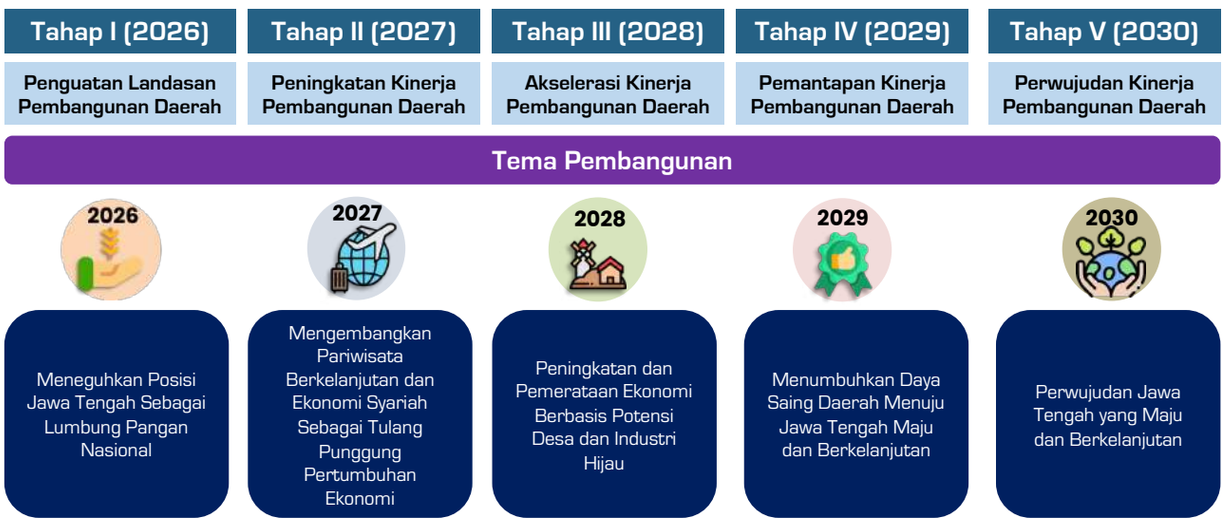

Gambar 3.5.
Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026-2030

Penjabaran arah kebijakan dan strategi pada setiap penahapan pembangunan daerah diuraikan sebagai berikut.

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2026

Tahun 2026 merupakan tahap **"Penguatan Landasan Pembangunan Daerah"** dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah lima tahun ke depan. Tahun pertama ini difokuskan pada tema pembangunan yaitu **"Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional"**. Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tema pembangunan daerah tersebut antara lain:

1. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
2. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan;
3. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
4. penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal;

5. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
6. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
7. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
8. pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
9. penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif;
10. peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan desa;
11. peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi;
12. penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
13. penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
14. penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah;
15. peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal;
16. reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras dengan teknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanian berkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB;
17. penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM, serta perguruan tinggi pertanian;
18. peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal;
19. mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal;
20. mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan;
21. peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah;
22. mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui program inkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap pertama **"Penguatan Landasan Pembangunan Daerah"** ini diarahkan pada prioritas daerah dengan fokus strategi sebagai berikut.

1. Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah, dengan fokus pada:
   a. pelayanan publik yang merata dan inklusif;

b. kapabilitas teknologi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi guna mendukung transformasi digital;
c. penguatan landasan kebijakan perencanaan berbasis data terintegrasi, riset dan risiko serta berorientasi kinerja;
d. penguatan landasan kebijakan data terintegrasi berbasis teknologi informasi;
e. penguatan landasan ekosistem riset dan inovasi, integrasi IPTEK dalam sektor-sektor prioritas daerah, hilirisasi hasil riset, serta kolaborasi dalam pengembangan riset dan inovasi;
f. penguatan manajemen ASN melalui pemetaan kebutuhan jabatan berdasarkan kompetensi dan kinerja didukung dengan peningkatan akurasi data kepegawaian;
g. penguatan pengembangan kompetensi melalui pemetaan kompetensi berbasis tujuan pembangunan daerah;
h. penguatan nilai-nilai anti korupsi dan budaya integritas penyelenggara pemerintahan;
i. penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal serta pemetaan risiko dan titik rawan korupsi didukung dengan peningkatan kapabiltas APIP;
j. penguatan pelaksanaan analisis evaluasi dan pengawasan produk hukum, penguatan dokumentasi hukum, serta dasar peningkatan kualitas penyusunan produk hukum;
k. penguatan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;
l. penguatan kualitas pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan;
m. penguatan kelembagaan agar lebih efektif;
n. penguatan sinergi pelaksanaan reforma agraria;
o. penguatan koordinasi dan pengawasan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta mendorong inovasi layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berbasis digitalisasi sebagai data yang valid dan termutakhir dalam pembangunan daerah;
p. penguatan pelaksanaan pemetaan daerah rawan secara sinergis, serta penguatan penegakan produk hukum daerah, pembinaan PPNS dan perlindungan masyarakat;
q. penguatan pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia bagi kelompok rentan terkait layanan dasar serta penjaminan kesetaraan dan kebebasan sipil;
r. meningkatkan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi;
s. pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional;
t. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah;
u. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;
v. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;

w. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas.

2. Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan, dengan fokus pada:
   a. penguatan pondasi sektor industri pengolahan dengan pemetaan potensi maupun kelembagaan, dan peningkatan kapasitas dasar pelaku industri;
   b. penguatan pondasi sektor perdagangan;
   c. penguatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif;
   d. peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM);
   e. peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan berbasis riset dan inovasi;
   f. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan;
   g. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan;
   h. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF);
   i. pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*);
   j. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air guna mendukung peningkatan produksi pangan;
   k. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
   l. penguatan pembinaan pertambangan dengan penerapan *Good Mining Practice*;
   m. peningkatan pertumbuhan penanaman modal;
   n. pengembangan ekosistem halal, industri halal dan penguatan keuangan syariah;
   o. peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah (utamanya pada jalur logistik sentra kawasan pertanian) dan kewilayahan;
   p. peningkatan produktivitas tanaman pangan desa;
   q. penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa;
   r. penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa;
   s. penguatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan termasuk integrasi kegiatan posyandu untuk mendukung SPM, serta penguatan peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat desa;
   t. penguatan landasan tata kelola pemerintahan desa;
   u. peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah;
   v. pemetaan dan pemutakhiran status sumber daya alam strategis-kelembagaan dan regulasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
   w. penguatan inisiatif skema insentif/disinsentif bagi pelaku usaha serta apresiasi untuk masyarakat yang menerapkan praktik berkelanjutan;

x. penguatan upaya dan inisiatif konservasi berbasis masyarakat dengan pendekatan keterpaduan/integrasi pengelolaan lanskap darat dan laut;
y. identifikasi potensi pendanaan hijau-wilayah strategis/aktivitas yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup;
z. penguatan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
aa. penguatan ketahanan energi berbasis potensi lokal (utamanya mendukung produktivitas pertanian);
bb. peningkatan kapasitas adaptasi perubahan iklim;
cc. harmonisasi kebijakan dan tata kelola lintas sektor penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim;
dd. penguatan upaya reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yang mencakup seluruh rantai layanan yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan;
ee. peningkatan kualitas air melalui pengelolaan limbah industri UMKM;
ff. penguatan infrastruktur sanitasi air limbah domestik;
gg. penguatan infrastruktur akses air minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya air;
hh. penguatan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan;
ii. penguatan perwujudan ruang Jawa Tengah dengan mengintegrasikan rencana pembangunan dengan rencana tata ruang melalui SPPR;
jj. penguatan kelembagaan dan kapasitas institusi penanggulangan bencana;
kk. peningkatan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana;
ll. pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk membangun ketahanan masyarakat;
mm. pengelolaan data dan informasi untuk pengambilan keputusan;
nn. pengembangan literasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, dan inklusi sosial dalam penanggulangan bencana;
oo. perluasan jejaring kemitraan serta pendanaan alternatif;
pp. pengembangan riset dan inovasi kebencanaan serta pemanfaatan teknologi.

3. Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter, dengan fokus pada:
   a. pemantapan identifikasi pemetaan SMK dengan potensi lokal, pengembangan dan penguatan kerjasama DUDI serta rintisan SMK Unggulan;
   b. pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), evaluasi dan pelaksanaan SMK *Boarding* dan Semi *Boarding* serta pemberian bantuan biaya pendidikan (beasiswa);
   c. pemerataan mutu layanan pendidikan dengan pemenuhan biaya operasional sekolah dan revitalisasi prasarana sarana pendidikan;
   d. penguatan pendidikan karakter dan inklusi dengan meningkatkan kapasitas guru dalam pencegahan serta penanganan *bullying*;
   e. penguatan tata kelola pendidikan berbasis perencanaan, hasil evaluasi serta pemantauan perizinan penyelenggaraan pendidikan;

f. pemetaan kebutuhan prasarana dan sarana di pelayanan kesehatan primer dan lanjutan;
g. pengembangan program pemerataan SDM kesehatan;
h. pengembangan keterampilan kader kesehatan;
i. peningkatan kepesertaan aktif untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
j. pengembangan sistem informasi kesehatan terintegrasi;
k. pemetaan seluruh faktor risiko dan determinan kesehatan di setiap kabupaten/kota serta inisiasi penyelesaian faktor risiko;
l. peningkatan dan penguatan literasi masyarakat dibidang kesehatan;
m. peningkatan jejaring pelayanan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional;
n. penyediaan data dan informasi Objek Pemajuan Kebudayaan, cagar budaya yang akurat, serta SDM dan lembaga kebudayaan untuk mewujudkan talenta nasional seni budaya;
o. peningkatan pelindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya;
p. peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kebudayaan;
q. pemetaan kerja sama lintas sektor dan kemitraan potensial dalam pemajuan kebudayaan;
r. penguatan pondasi pembangunan olahraga melalui partisipasi aktif berolahraga di masyarakat dan satuan pendidikan, mobilisasi olahraga masyarakat dan pendidikan secara masif, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pemetaan atlet potensial, pemetaan prasarana sarana olahraga, serta pemetaan cabang olahraga unggulan;
s. penguatan tata kelola literasi melalui koordinasi antar *stakeholder*; pelibatan komunitas literasi dalam penyadaran gemar membaca masyarakat, peningkatan kapasitas SDM perpustakaan, peningkatan prasarana sarana perpustakaan;
t. pemetaan potensi sumber arsip untuk melengkapi khazanah arsip;
u. peningkatan penyadaran, kapasitas pemuda serta penguatan kewirausahaan pemuda;
v. peningkatan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
w. peningkatan pembangunan berbasis gender;
x. peningkatan ketahanan keluarga;
y. pemetaan kompetensi tenaga kerja pada sektor unggulan yang memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah, dan penguatan kapasitas lembaga pelatihan dan kualitas instruktur.

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2027

Tahun 2027 merupakan tahap **"Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah"** dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tahun kedua ini difokuskan pada tema pembangunan yaitu **"Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi"**. Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tema pembangunan daerah tersebut antara lain:

1. pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
2. penguatan promosi pariwisata berbasis digital;

3. peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis klaster dengan perbaikan prasarana sarana destinasi wisata;
4. penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga berbasis digital;
5. peningkatan infrastruktur konektivitas antar destinasi wisata;
6. penguatan integrasi antar destinasi wisata;
7. penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata;
8. penguatan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata;
9. *city beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism*, terutama pada kawasan perkotaan;
10. pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, *ancillary services*, aktivitas, *available packages*) pada kawasan megapolitan/metropolitan (*urban tourism*), serta kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Magelang- Yogyakarta-Surakarta;
11. penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui penguatan *halal value chain*, penguatan keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan penguatan ekonomi digital;
12. penguatan kelembagaan pariwisata dan ekonomi syariah agar lebih efektif;
13. peningkatan pemenuhan sarana prasarana pendukung pariwisata desa;
14. peningkatan pengembangan perekonomian desa berbasis potensi pariwisata berkelanjutan;
15. peningkatan peran BUMDes dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam mendukung pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah;
16. peningkatan kerja sama pengembangan potensi pariwisata desa dan peningkatan pengembangan kawasan perdesaan;
17. penguatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SLB dan SMK bidang keahlian layanan pariwisata, seni, kriya, kuliner, tata boga, busana, perhotelan, dan perbankan syariah termasuk ekonomi kreatif dan kewirausahaan halal;
18. revitalisasi kurikulum SMK seni, kriya, kuliner, tata boga, busana, perhotelan, layanan pariwisata dan perbankan syariah selaras dengan kebutuhan usaha dan industri;
19. penguatan integrasi tema pariwisata, budaya, ekonomi kreatif dan syariah dalam kurikulum SMA dan SLB berbasis *project* integratif dan lintas;
20. penguatan kemitraan DUDI melalui sinkronisasi kompetensi dan penyusunan *Memorandum of Agreement* (MoA) untuk kegiatan spesifik antara lain dengan perusahaan atau hotel syariah, restoran halal, biro perjalanan haji-umrah, bank syariah, UMKM kriya lokal, desa wisata halal, serta perguruan tinggi termasuk dukungan program magang dan sertifikasi halal;
21. peningkatan upaya pelestarian dan pemanfaatan karya budaya dan cagar budaya sebagai salah satu daya tarik wisata melalui pemetaan karya budaya dan cagar budaya potensial, pemeliharaan prasarana sarana kebudayaan, peningkatan upaya diplomasi budaya tingkat nasional/internasional, serta

penguatan SDM/lembaga/komunitas kebudayaan sebagai agen diplomasi budaya;
22. penguatan *event* olahraga pariwisata ramah lingkungan dan berkelanjutan;
23. perluasan literasi berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan dan literasi ekonomi berbasis syariah melalui pelibatan pemangku kepentingan;
24. mengoptimalkan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif berbasis kelestarian lingkungan hidup berkelanjutan;
25. peningkatan partisipasi pemuda dalam bidang pariwisata, wisata kreatif, membangun startup berbasis syariah.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap kedua **"Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah"** ini diarahkan pada prioritas daerah dengan fokus strategi sebagai berikut.

1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah, dengan fokus pada:
   a. peningkatan kinerja pelayanan publik berteknologi tinggi dan integratif;
   b. peningkatan kapabilitas teknologi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi guna mendukung transformasi digital;
   c. pengembangan kualitas perencanaan berbasis data terintegrasi, riset dan risiko serta berorientasi kinerja;
   d. peningkatan kinerja tata kelola data terintegrasi berbasis sistem informasi;
   e. pengembangan ekosistem riset dan inovasi, integrasi IPTEK dalam sektor-sektor prioritas daerah, peningkatan hilirisasi hasil riset, penguatan kolaborasi dalam pengembangan riset dan inovasi;
   f. peningkatan kualitas manajemen ASN dengan pengembangan manajemen kinerja dan talenta disertai *reward and punishment* yang berkeadilan;
   g. pengembangan kompetensi berbasis analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi disertai dengan penguatan nilai integritas;
   h. peningkatan nilai-nilai anti korupsi dan budaya integritas penyelenggara pemerintahan;
   i. peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian berbasis risiko, serta integrasi penguatan integritas dan pencegahan korupsi;
   j. penguatan kualitas analisis evaluasi dan pengawasan produk hukum, jaringan dokumentasi hukum, serta kapasitas penyusunan produk hukum;
   k. peningkatan layanan bantuan hukum dan peningkatan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;
   l. peningkatan kualitas pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan;
   m. penguatan kelembagaan agar lebih efektif;
   n. peningkatan sinergi pelaksanaan reforma agraria;
   o. penguatan koordinasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta peningkatan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam perencanaan pembangunan daerah;
   p. peningkatan kapasitas SDM, penguatan pemetaan daerah rawan, penegakan produk hukum daerah serta pelibatan aktif masyarakat dalam menjaga trantibum;
   q. peningkatan pemenuhan hak asasi manusia bagi kelompok rentan terkait layanan dasar serta penjaminan kesetaraan dan kebebasan sipil;
   r. pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;

s. peningkatan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi;
t. pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional;
u. penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila;
v. penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan kriminalisme;
w. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah;
x. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;
y. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
z. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas.

2. Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan, dengan fokus pada:
   a. peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan dan pemberdayaan pelaku industri lokal;
   b. peningkatan kontribusi sektor perdagangan dengan efisiensi distribusi dan stabilitas harga;
   c. peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis inovasi;
   d. peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM);
   e. peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
   f. peningkatan pembinaan pertambangan dengan penerapan *Good Mining Practice*;
   g. peningkatan pertumbuhan penanaman modal;
   h. pengembangan ekosistem halal, industri halal dan penguatan keuangan syariah;
   i. peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah (utamanya konektivitas antar destinasi wisata unggulan) dan kewilayahan;
   j. peningkatan pengembangan perekonomian desa berbasis potensi pariwisata berkelanjutan;
   k. peningkatan peran BUMDes dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam mendukung pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah;
   l. peningkatan kerja sama pengembangan potensi pariwisata desa dan peningkatan pengembangan kawasan perdesaan;
   m. peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan termasuk integrasi kegiatan posyandu untuk mendukung SPM dan penguatan peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan serta lembaga adat desa;
   n. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa;
   o. peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah;
   p. pemulihan ekosistem dan pelestarian keanekaragaman hayati;
   q. peningkatan produktivitas komoditi sumberdaya alam dan jasa lingkungan dengan prinsip keberlanjutan;

r. peningkatan penerapan inisiatif skema insentif/disinsentif bagi pelaku usaha serta apresiasi untuk masyarakat yang menerapkan praktik berkelanjutan;
s. peningkatan upaya dan inisiatif konservasi berbasis masyarakat dengan pendekatan keterpaduan/integrasi pengelolaan lanskap darat dan laut;
t. inisiasi penerapan pendanaan hijau untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup;
u. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air guna meningkatkan ketersediaan air baku;
v. peningkatan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
w. peningkatan ketahanan energi berbasis potensi lokal (utamanya mendukung kawasan pariwisata);
x. akselerasi dan sinergi antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim;
y. peningkatan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yang mencakup seluruh rantai layanan yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan;
z. peningkatan kualitas air melalui pengelolaan limbah industri UMKM;
aa. peningkatan infrastruktur sanitasi air limbah domestik;
bb. peningkatan akses air minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya air;
cc. peningkatan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan;
dd. penguatan infrastruktur hijau dan penerapan *zero waste tourism* dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan;
ee. peningkatan Integrasi rencana tata ruang dan rencana sektoral melalui penyusunan dokumen SPPR;
ff. penguatan kelembagaan dan kapasitas institusi penanggulangan bencana;
gg. peningkatan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana;
hh. pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk membangun ketahanan masyarakat;
ii. pengelolaan data dan informasi untuk pengambilan keputusan;
jj. pengembangan literasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, dan inklusi sosial dalam penanggulangan bencana;
kk. perluasan jejaring kemitraan serta pendanaan alternatif;
ll. pengembangan riset dan inovasi kebencanaan serta pemanfaatan teknologi.

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter, dengan fokus pada:
   a. peningkatan kompetensi siswa SMK, keahlian guru SMK berbasis industri serta revitalisasi alat praktik kejuruan;
   b. peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan secara bertahap dengan penyediaan layanan pendidikan pada wilayah *blankspot*, penguatan kerjasama pemerintah-swasta, serta evaluasi strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS);

c. peningkatan mutu pendidikan berbasis literasi-numerasi dan digital, STEAM, kualitas pengajaran guru dan pembelajaran siswa, serta pengelolaan SMK *Boarding* dan Semi *Boarding*;
d. peningkatan pendidikan karakter melalui penanaman nilai agama dan budaya, implementasi kurikulum yang adaptif serta penguatan sekolah inklusi;
e. penguatan tata kelola pendidikan berorientasi kepemimpinan instruksional dan berbasis telaah/analisis;
f. pengembangan sarana prasarana layanan kesehatan primer dan lanjutan;
g. pengembangan kompetensi SDM kesehatan untuk mendukung layanan rujukan berbasis kompetensi;
h. pengembangan keterampilan kader kesehatan;
i. peningkatan cakupan kepesertaan aktif;
j. pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi kesehatan terintegrasi;
k. pemerataan sumber daya kesehatan daerah serta tenaga cadangan kesehatan;
l. peningkatan dan penguatan literasi masyarakat dibidang kesehatan;
m. peningkatan jejaring pelayanan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional;
n. peningkatan kualitas data dan informasi kebudayaan;
o. peningkatan pengembangan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang berkelanjutan;
p. peningkatan kualitas SDM dan lembaga kebudayaan untuk mewujudkan talenta nasional seni budaya;
q. pengembangan kerja sama lintas sektor dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan;
r. peningkatan kualitas prasarana sarana kebudayaan;
s. peningkatan literasi masyarakat dalam berolahraga, peningkatan penyadaran masyarakat dalam berolahraga, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pembinaan atlet potensial, pembinaan cabang olahraga unggulan, peningkatan prasarana sarana olahraga masyarakat, peningkatan prasarana sarana olahraga cabor unggulan;
t. perluasan literasi melalui pelibatan pemangku kepentingan;
u. mengoptimalkan akuisisi arsip secara tematis;
v. peningkatan partisipasi pemuda melalui wirausaha muda kreatif dan inovatif;
w. peningkatan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
x. peningkatan pembangunan berbasis gender;
y. peningkatan ketahanan keluarga;
z. pelatihan peningkatan produktivitas, sertifikasi kompetensi dan perluasan kemitraan dengan dunia industri dan dunia usaha.

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2028

Tahun 2028 merupakan tahap **"Akselerasi Kinerja Pembangunan Daerah"** dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tahun ketiga ini difokuskan pada tema pembangunan yaitu **"Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau"**. Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tema pembangunan daerah tersebut antara lain:

1. peningkatan dan percepatan kinerja produktivitas sektor-sektor unggulan Jawa Tengah yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa, koperasi dan UMKM, pertanian dalam arti luas secara merata;
2. peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan;
3. penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru;
4. penerapan sirkular ekonomi dan dekarbonisasi industri melalui penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
5. penerapan standar industri hijau dan produk ramah lingkungan;
6. peningkatan prasarana sarana pendukung perekonomian desa;
7. mendorong produktivitas perekonomian desa berbasis potensi unggulan yang didukung dengan diversifikasi produk berbasis riset dan inovasi serta hilirisasi pertanian;
8. peningkatan kualitas BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya sebagai lembaga ekonomi yang maju dan kompeten dalam mengelola hasil produksi desa;
9. peningkatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi unggulan dan industri hijau;
10. pengembangan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SLB dan SMK dalam ekonomi hijau dan industri hijau;
11. pengembangan kurikulum SMK yang adaptif pada bidang keahlian agribisnis, agroteknologi, energi dan pertambangan, teknologi konstruksi dan rekayasa, TIK, pariwisata, bisnis dan manajemen berbasis ekonomi dan industri hijau selaras standar DUDI;
12. pengembangan kerja sama dan ekosistem kemitraan DUDI seperti industri perkebunan organik, perusahaan energi terbarukan, industri daur ulang, ekowisata, termasuk dalam rekrutmen lulusan oleh mitra DUDI;
13. penguatan kreativitas dan inovasi berbasis ramah lingkungan bagi siswa SMA, SMK dan SLB;
14. pengembangan integrasi kurikulum SMA, SMK dan SLB berbasis lingkungan dengan *project based learning* inovatif dan kolaboratif;
15. peningkatan upaya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya berbasis potensi lokal desa;
16. peningkatan *sport tourism* berbasis potensi desa, dan festival olahraga desa;
17. peningkatan literasi masyarakat melalui penguatan komunitas literasi berbasis desa;
18. mengoptimalkan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif daerah berbasis potensi desa.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap ketiga **"Akselerasi Kinerja Pembangunan Daerah"** ini diarahkan pada prioritas daerah dengan fokus strategi sebagai berikut.

1. Akselerasi Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah, dengan fokus pada:
   a. pelayanan publik berteknologi tinggi dan integratif;
   b. akselerasi penguatan kapabilitas teknologi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi guna mendukung transformasi digital;
   c. penguatan kualitas keselarasan perencanaan berbasis data terintegrasi, riset dan risiko, serta berorientasi kinerja;
   d. penguatan kinerja tata kelola data terintegrasi berbasis sistem informasi;
   e. penguatan ekosistem riset dan inovasi, integrasi IPTEK dalam sektor-sektor prioritas daerah, peningkatan hilirisasi hasil riset, penguatan kolaborasi dalam pengembangan riset dan inovasi;
   f. peningkatan penerapan perlindungan dan penegakan disiplin yang berkeadilan untuk menjamin kesejahteraan ASN yang didukung dengan penguatan manajemen kinerja dan talenta;
   g. peningkatan dan pemerataan pengembangan kompetensi serta internalisasi nilai anti korupsi dan integritas kepada seluruh penyelenggara pemerintahan;
   h. peningkatan kepatuhan pengawasan dan pengendalian berbasis risiko serta upaya pencegahan korupsi melalui kolaborasi lintas sektor;
   i. penguatan kualitas analisis evaluasi, integrasi dokumentasi hukum, serta kualitas penyusunan produk hukum;
   j. penguatan layanan bantuan hukum dan penguatan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;
   k. peningkatan kualitas pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan;
   l. penguatan kelembagaan agar lebih efektif dan berdaya saing;
   m. akselerasi sinergi pelaksanaan reforma agraria;
   n. peningkatan pembinaan dan supervisi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta penguatan keamanan dan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang valid dan termutakhir dalam pembangunan daerah;
   o. penguatan sinergi lintas daerah, pemetaan daerah rawan, penegakan produk hukum daerah, serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan gangguan ketertiban;
   p. penguatan pemenuhan hak asasi manusia bagi kelompok rentan terkait layanan dasar serta penjaminan kesetaraan dan kebebasan sipil;
   q. pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
   r. penguatan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi;
   s. penguatan kapabilitas lembaga demokrasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat;
   t. pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional;
   u. penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila;

v. penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal;
w. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah;
x. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;
y. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
z. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas.

2. Akselerasi Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan, dengan fokus pada:
   a. akselerasi peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan didukung dengan hilirisasi produk berbasis potensi daerah dan ramah lingkungan;
   b. percepatan perluasan akses pasar dan ekspor produk unggulan sektor perdagangan;
   c. percepatan peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif;
   d. akselerasi peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM);
   e. penguatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
   f. optimalisasi produktivitas pertambangan dengan penerapan *Good Mining Practice*;
   g. penguatan pertumbuhan penanaman modal;
   h. percepatan pengembangan ekosistem halal, industri halal dan penguatan keuangan syariah;
   i. penguatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah (utamanya dalam mendukung pengembangan kawasan perindustrian) dan kewilayahan;
   j. peningkatan prasarana sarana pendukung perekonomian desa;
   k. mendorong peningkatan produktivitas perekonomian desa berbasis potensi unggulan yang didukung dengan diversifikasi produk berbasis riset dan inovasi serta hilirisasi pertanian;
   l. peningkatan kualitas BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya sebagai lembaga ekonomi yang maju dan kompeten dalam mengelola hasil produksi desa;
   m. peningkatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi unggulan dan industri hijau;
   n. peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan termasuk integrasi kegiatan posyandu untuk mendukung SPM serta penguatan peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat desa;
   o. akselerasi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa;
   p. penguatan upaya pengendalian inflasi daerah;
   q. optimalisasi produktivitas komoditi sumber daya alam dan jasa lingkungan dengan prinsip keberlanjutan;

r. penguatan kebijakan penerapan inisiatif skema insentif/disinsentif bagi pelaku usaha serta apresiasi untuk masyarakat yang menerapkan praktik berkelanjutan;
s. perluasan upaya dan inisiatif konservasi berbasis masyarakat dengan pendekatan keterpaduan/integrasi pengelolaan lanskap darat dan laut dengan melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat dan dunia usaha;
t. perluasan sumber dan penerapan pendanaan hijau untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup;
u. peningkatan kapasitas adaptasi perubahan iklim;
v. peningkatan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yang mencakup seluruh rantai layanan yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan;
w. peningkatan kualitas air melalui pengelolaan limbah industri UMKM;
x. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air guna meningkatkan layanan air baku;
y. akselerasi pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
z. akselerasi ketahanan energi berbasis potensi lokal (utamanya mendukung pengembangan kawasan perdesaan);
aa. akselerasi akses sanitasi air limbah domestik yang dikelola secara aman;
bb. akselerasi penyediaan akses air minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya air;
cc. akselerasi penyediaan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan;
dd. mendorong percepatan penyusunan dan legalisasi Rencana Tata Ruang Umum dan Detail Kabupaten/Kota;
ee. penguatan kelembagaan dan kapasitas institusi penanggulangan bencana;
ff. peningkatan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana;
gg. pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk membangun ketahanan masyarakat;
hh. pengelolaan data dan informasi kebencanaan untuk pengambilan keputusan;
ii. pengembangan literasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, dan inklusi sosial dalam penanggulangan bencana;
jj. perluasan jejaring kemitraan serta pendanaan alternatif;
kk. pengembangan riset dan inovasi kebencanaan serta pemanfaatan teknologi.

3. Akselerasi Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter, dengan fokus pada:
   a. penguatan dan pengembangan kerja sama SMA dan SMK dengan *stakeholder* (swasta, masyarakat, perguruan tinggi) secara berkelanjutan;
   b. peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan secara bertahap dengan penyediaan layanan pendidikan pada wilayah *blankspot*, penguatan kerja sama pemerintah-swasta serta pengembangan strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS);
   c. peningkatan mutu pendidikan dengan peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan media pembelajaran berbasis digital serta kurikulum berbasis STEAM (*Science, Technology, Engineering, Mathematics* dan *Arts*);

d. peningkatan pendidikan karakter siswa berorientasi potensi, minat dan bakat siswa;
e. penguatan tata kelola pendidikan melalui manajemen kelembagaan sekolah dan penguatan refleksi pembelajaran guru;
f. pengembangan prasarana sarana layanan kesehatan primer dan lanjutan;
g. pengembangan kompetensi SDM kesehatan untuk mendukung layanan rujukan berbasis kompetensi dengan model pengampuan;
h. pengembangan keterampilan kader kesehatan;
i. peningkatan cakupan pembiayaan kesehatan milik pemerintah dan swasta;
j. pengembangan dan pemanfaatan sistem infromasi kesehatan yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi;
k. peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan daerah serta tenaga cadangan kesehatan;
l. peningkatan dan penguatan literasi masyarakat dibidang kesehatan;
m. penguatan jejaring pelayanan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional;
n. pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi kebudayaan untuk pemajuan kebudayaan;
o. penguatan upaya pelindungan dan pengembangan warisan budaya;
p. peningkatan peran SDM dan lembaga kebudayaan dalam pemajuan kebudayaan;
q. peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga, peningkatan prasarana sarana olahraga masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, peningkatan pembinaan atlet potensial, peningkatan prasarana sarana olahraga cabor unggulan;
r. peningkatan literasi masyarakat melalui penguatan komunitas literasi;
s. mengoptimalkan penelusuran sumber sejarah yang tidak terdapat dalam arsip sebagai dukungan mewujudkan memori kolektif bangsa;
t. peningkatan pemberdayaan pemuda dalam mendukung pembangunan daerah;
u. peningkatan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
v. peningkatan pembangunan berbasis gender;
w. peningkatan ketahanan keluarga;
x. akselerasi peningkatan produktivitas tenaga kerja dengan adaptasi teknologi tepat guna, dan digitalisasi proses kerja.

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2029

Tahun 2029 merupakan tahap **“Pemantapan Kinerja Pembangunan Daerah”** dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tahun keempat ini difokuskan pada tema pembangunan yaitu **“Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju Dan Berkelanjutan”**. Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tema pembangunan daerah tersebut antara lain:

1. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter melalui peningkatan akses layanan pendidikan berkualitas, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan kebugaran dan daya

saing olahraga, peningkatan budaya literasi masyarakat, peningkatan daya saing pemuda;
2. peningkatan pemerataan layanan dan perlindungan sosial bagi pemerlu kesejahteraan sosial;
3. peningkatan pembangunan berbasis gender dan ketahanan keluarga;
4. peningkatan kualitas, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja;
5. pemantapan birokrasi yang berintegritas dan kolaboratif melalui pelayanan publik yang responsif dan inklusif, penguatan SDM ASN yang berdaya saing, tranformasi digital, dan perencanaan berbasis data terintegrasi serta inovatif;
6. memaksimalkan sistem ketahanan daerah;
7. memperkokoh kohesi sosial dan kesetaraan di masyarakat;
8. penguatan penerapan ekosistem riset dan inovasi, integrasi IPTEK dalam sektor-sektor prioritas daerah, peningkatan hilirisasi hasil riset, penguatan kolaborasi dalam pengembangan riset dan inovasi;
9. memaksimalkan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap keempat **"Pemantapan Kinerja Pembangunan Daerah"** ini diarahkan pada prioritas daerah dengan fokus strategi sebagai berikut.

1. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah, dengan fokus pada:
   a. pelayanan publik cepat tanggap;
   b. pemantapan kapabilitas teknologi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi guna mendukung transformasi digital;
   c. pemantapan kualitas perencanaan berbasis data terintegrasi, riset dan risiko, serta berorientasi kinerja;
   d. penguatan kinerja tata kelola data terintegrasi berbasis sistem informasi;
   e. penumbuhan inovasi perencanaan mendukung perencanaan berkelanjutan;
   f. penumbuhan daya saing ASN melalui mekanisme mutasi dan promosi yang berbasis manajemen talenta dan kompetensi berdasarkan manajemen kinerja, kompetensi dan integritas;
   g. pengembangan kompetensi diarahkan untuk menumbuhkan daya saing penyelenggara pemerintahan dengan mendorong kemudahan akses belajar dengan mengedepankan nilai-nilai anti korupsi;
   h. penumbuhan kesadaran pengawasan dan pengendalian berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi;
   i. pemantapan penataan regulasi, serta pemantapan kualitas penyusunan produk hukum daerah.
   j. pemantapan kualitas layanan bantuan hukum dan peningkatan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;
   k. perluasan digitalisasi manajemen kearsipan yang berdaya saing;
   l. penguatan kelembagaan berdaya saing, maju dan berkelanjutan;
   m. penguatan kebijakan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, optimalisasi inovasi layanan yang mudah, cepat, dan tepat bagi masyarakat, serta pemanfaatan data yang valid dan termutakhir dalam perencanaan pembangunan daerah;
   n. pemantapan sinergi pelaksanaan reforma agraria;

o. pemantapan kualitas pemetaan daerah rawan, penguatan peran PPNS, efektivitas penegakan perda, serta kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi gangguan;
p. pemantapan pemenuhan hak asasi manusia bagi kelompok rentan terkait layanan dasar serta penjaminan kesetaraan dan kebebasan sipil;
q. pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
r. meningkatkan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi;
s. penguatan kapabilitas lembaga demokrasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat;
t. penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila,
u. penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal;
v. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah;
w. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;
x. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;
y. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas.

2. Pemantapan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan, dengan fokus pada:
   a. pemantapan sektor industri pengolahan berbasis inovasi;
   b. penguatan daya saing sektor perdagangan;
   c. pemantapan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif;
   d. pemantapan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) berbasis inovasi;
   e. pemantapan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
   f. pemantapan produktivitas pertambangan dengan penerapan *Good Mining Practice;*
   g. pemantapan pertumbuhan penanaman modal;
   h. pemantapan pengembangan ekosistem halal, industri halal dan penguatan keuangan syariah;
   i. pemantapan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan;
   j. peningkatan kualitas layanan dasar desa dan sarana prasarana pendukung perekonomian;
   k. penguatan ekonomi desa yang berdaya saing berbasis potensi unggulan, riset, inovasi, dan ekonomi kreatif;
   l. penguatan peran lembaga ekonomi desa dan akses permodalan usaha;
   m. penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan;
   n. peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan termasuk integrasi kegiatan posyandu untuk mendukung SPM serta penguatan peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat desa;

o. pemantapan tata kelola pemerintahan desa;
p. pemantapan upaya pengendalian inflasi daerah;
q. pemantapan produktivitas komoditi sumber daya alam dan jasa lingkungan dengan prinsip keberlanjutan;
r. pemantapan kebijakan insentif dan disinsentif berbasis kelestarian lingkungan hidup serta apresiasi untuk masyarakat yang menerapkan praktik berkelanjutan;
s. pemantapan kebijakan, sistem dan tata kelola lingkungan yang memungkinkan respon cepat terhadap kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup;
t. pemantapan kebijakan dan penerapan pendanaan hijau untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup;
u. pengembangan infrastruktur hijau dan adaptif terhadap perubahan iklim;
v. pemantapan aksi penurunan emisi gas rumah kaca dan pengembangan nilai ekonomi karbon yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah;
w. peningkatan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yang mencakup seluruh rantai layanan yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan;
x. peningkatan kualitas air melalui pengelolaan limbah industri UMKM;
y. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air guna meningkatkan ketahanan air;
z. pemantapan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
aa. pemantapan ketahanan energi berbasis potensi lokal yang berkelanjutan;
bb. pemantapan penyediaan akses sanitasi air limbah domestik yang dikelola secara aman;
cc. pemantapan penyediaan akses air minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya air;
dd. pemantapan penyediaan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan;
ee. penguatan pengendalian penataan ruang sesuai rencana tata ruang;
ff. penguatan kelembagaan dan kapasitas institusi penanggulangan bencana;
gg. peningkatan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana;
hh. pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk membangun ketahanan masyarakat;
ii. pengelolaan data dan informasi untuk pengambilan keputusan;
jj. pengembangan literasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, dan inklusi sosial dalam penanggulangan bencana;
kk. perluasan jejaring kemitraan serta pendanaan alternatif;
ll. pengembangan riset dan inovasi kebencanaan serta pemanfaatan teknologi.

3. Pemantapan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter, dengan fokus pada:
   a. pemanfaatan alternatif layanan pendidikan untuk pencegahan ATS dan penguatan kerja sama pemerintah-swasta-masyarakat dalam pemenuhan biaya personil dan operasional sekolah;
   b. pengembangan SMK dan SMA Unggulan berbasis STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art dan Mathematic*) Kecakapan Abad 21, digital dan teknologi serta memiliki kearifan lokal;

c. peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan SMA dan SLB dalam implementasi kurikulum adaptif berbasis digital dan teknologi;
d. perluasan kurikulum SMA dan SMK sebagai rujukan serta pusat inovasi dan berorientasi global;
e. perluasan ekosistem kemitraan DUDI berkelanjutan melalui kerja sama dengan DUDI skala nasional dan global;
f. penguatan penguasaan bahasa asing bagi siswa SMA, SMK dan SLB;
g. perluasan prasarana sarana pendidikan SMA, SMK dan SLB berbasis digital dan teknologi sebagai pusat rujukan dan jejaring;
h. pengembangan afirmasi pendidikan bagi siswa SMA, SMK dan SLB berorientasi keberlanjutan jenjang pendidikan;
i. pemantapan pengembangan prasarana sarana layanan kesehatan primer dan lanjutan;
j. penguatan kompetensi SDM kesehatan untuk mendukung layanan rujukan berbasis kompetensi dengan model pengampuan;
k. penguatan pengembangan keterampilan kader kesehatan;
l. Peningkatan cakupan pembiayaan kesehatan milik pemerintah dan swasta
m. pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi;
n. peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan daerah serta tenaga cadangan kesehatan;
o. peningkatan dan penguatan literasi masyarakat dibidang kesehatan;
p. penguatan jejaring pelayanan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional;
q. optimalisasi pemanfaatan warisan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
r. optimalisasi peran SDM/lembaga/komunitas kebudayaan dalam pemajuan kebudayaan;
s. penguatan kerja sama dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan;
t. peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga, pemerataan prasarana sarana olahraga masyarakat, peningkatan kualitas SDM keolahragaan, peningkatan pembinaan atlet potensial;
u. peningkatan ekosistem literasi masyarakat melalui pemantapan prasarana sarana literasi dan kualitas SDM perpustakaan yang berdaya saing;
v. peningkatan kualitas arsip memori kolektif daerah sebagai sumber informasi dan pengetahuan;
w. peningkatan daya saing pemuda;
x. peningkatan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
y. peningkatan pembangunan berbasis gender;
z. peningkatan ketahanan keluarga;
aa. pemantapan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, memperluas kerjasama dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga riset untuk meningkatkan produktivitas.

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2030

Tahun 2030 merupakan tahap terakhir dari perencanaan jangka menengah daerah yang diarahkan pada **"Perwujudan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan"** dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Tahap kelima ini diarahkan untuk fokus pada perwujudan dengan prioritas daerah meliputi:

1. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah, dengan fokus pada perwujudan:
   a. pelayanan publik berkualitas prima;
   b. kapabilitas teknologi penyelenggaraan pemerintahan yang optimal guna mendukung transformasi digital;
   c. kualitas perencanaan perencanaan berbasis data terintegrasi, riset dan risiko serta berorientasi kinerja;
   d. tata kelola data terintegrasi berbasis sistem informasi;
   e. ekosistem riset dan inovasi, integrasi IPTEK dalam sektor-sektor prioritas daerah, peningkatan hilirisasi hasil riset, penguatan kolaborasi dalam pengembangan riset dan inovasi;
   f. manajemen ASN berbasis meritokrasi;
   g. kompetensi penyelenggara pemerintahan yang mengedepankan profesionalitas dan nilai-nilai anti korupsi serta integritas;
   h. pengawasan dan pengendalian berbasis risiko yang efektif, efisien serta bebas korupsi yang mendukung Tata Kelola Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan;
   i. digitalisasi manajemen kearsipan sebagai sumber informasi dan pengetahuan yang handal;
   j. regulasi yang inklusif, efektif dan tidak tumpang tindih;
   k. penyelesaian masalah hukum yang berkeadilan, dan berkelanjutan;
   l. kelembagaan daerah yang berdaya saing, maju dan berkelanjutan;
   m. keamanan dan ketertiban yang adaptif dan berkelanjutan;
   n. penjaminan pemenuhan hak asasi manusia bagi kelompok rentan terkait layanan dasar serta kesetaraan dan kebebasan sipil;
   o. kebijakan, inovasi, keamanan, dan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai basis data yang valid dan termutakhir dalam perencanaan pembangunan daerah;
   p. sinergi pelaksanaan reforma agraria;
   q. pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
   r. integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi;
   s. kapabilitas lembaga demokrasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat;
   t. jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional;
   u. nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila;
   v. penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal;
   w. kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah;
   x. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;
   y. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;

z. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas.

2. Perwujudan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan, dengan fokus pada perwujudan:
   a. perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, berbasis potensi dan sektor-sektor unggulan daerah;
   b. aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan yang semakin baik;
   c. keselamatan, kelancaran dan keterhubungan transportasi dalam mendukung pertumbuhan perekonomian dan kemajuan daerah serta keberlanjutan pembangunan;
   d. kemandirian desa melalui peningkatan perekonomian desa, infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, dan kualitas tata kelola pemerintahan desa;
   e. inflasi yang terkendali dan stabil yang semakin memperkuat perekonomian daerah;
   f. perekonomian daerah terintegrasi dengan prinsip keberlanjutan dengan kontribusi signifikan dari sektor-sektor hijau;
   g. penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup berbasis kebijakan insentif dan disinsentif serta apresiasi dalam pengelolaan lingkungan hidup;
   h. Jawa Tengah menjadi daerah dengan perekonomian tangguh, inklusif, serta memiliki daya saing tinggi yang berpijak pada kelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang;
   i. pendanaan hijau yang berkontribusi signifikan dalam mendukung kelestarian lingkungan hidup;
   j. implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim;
   k. reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yang mencakup seluruh rantai layanan yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan;
   l. perwujudan ketahanan sumber daya air;
   m. perwujudan produktivitas pertambangan dengan penerapan *Good Mining Practice*;
   n. ketahanan energi berbasis potensi lokal yang berkelanjutan;
   o. pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
   p. komitmen menuju universal akses sanitasi air limbah domestik yang dikelola secara aman;
   q. komitmen menuju universal akses air minum yang dikelola secara aman dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya air;
   r. pemerataan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan;
   s. kesesuaian penataan ruang Jawa Tengah;
   t. Jawa Tengah sebagai daerah dengan risiko bencana rendah dalam rangka mendukung perekonomian daerah.

3. Perwujudan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter, dengan fokus pada perwujudan:
   a. Wajib Belajar (WAJAR) 13 Tahun;

b. lulusan SMA dan SMK yang berdaya saing nasional dan global memiliki pengetahuan, ketrampilan, berkarakter, kompetitf, berdaya saing nasional dan global;
c. lulusan SLB dengan kemandirian pribadi dan sosial dasar, *lifeskill* dan kewirausahaan inklusif;
d. guru dan tenaga kependidikan yang berkompeten dan memiliki kapasitas, berintegritas, berkarakter sebagai inovator dan *learning facilitator* serta penggerak komunitas belajar;
e. prasarana sarana pendidikan minimal sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai penopang kualitas pembelajaran serta mendukung ekosistem pembelajaran yang inovatif, inklusi dan berdaya saing global;
f. kurikulum SMA, SMK dan SLB yang holistik, adaptif, kontekstual, relevan, inklusif, selaras kebutuhan lokal dan global;
g. pendidikan karakter berbasis nilai agama dan kearifan lokal *(Think Globally, Act Locally)*;
h. tata kelola pendidikan yang akuntabel, transparansi dan berorientasi mutu;
i. prasarana sarana layanan kesehatan primer dan lanjutan yang inklusif;
j. SDM kesehatan yang kompeten untuk mendukung layanan rujukan berbasis kompetensi dengan model pengampuan;
k. kader kesehatan yang memiliki ketrampilan;
l. cakupan pembiayaan kesehatan milik pemerintah dan swasta yang merata
m. sistem informasi kesehatan yang terintegrasi;
n. kapasitas sumber daya kesehatan daerah serta tenaga cadangan kesehatan yang optimal;
o. penguatan literasi masyarakat dibidang kesehatan;
p. kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional;
q. rencana mitigasi, kontingensi dan rencana operasi berbasis ancaman, kerentanan dan kapasitas masyarakat serta pemerintahan daerah;
r. ekosistem kebudayaan yang sehat dan berkelanjutan;
s. warisan budaya termanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
t. kebugaran masyarakat, daya saing, dan prestasi olahraga;
u. budaya literasi masyarakat yang maju;
v. daya saing pemuda;
w. fungsi kearsipan sebagai sumber informasi dan jati diri daerah;
x. pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
y. pembangunan berbasis gender;
z. ketahanan keluarga;
aa. kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing tinggi, adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Tabel 3.4.
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi				
	Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan	**Penguatan Landasan Pembangunan Daerah Fokus Tema "Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional"**	**Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Tema "Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi"**	**Akselerasi Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Tema "Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau"**	**Pemantapan Kinerja Pembangunan Daerah Fokus Tema "Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju Dan Berkelanjutan"**	**Perwujudan Jawa Tengah yang Maju dan Berkelanjutan**
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	**Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah**	**Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah**	**Akselerasi Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah**	**Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah**	**Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah**
	1. pelayanan publik yang merata dan inklusif; 2. kapabilitas teknologi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi guna mendukung transformasi digital; 3. penguatan landasan kebijakan perencanaan berbasis data terintegrasi, riset dan risiko serta berorientasi kinerja; 4. penguatan landasan kebijakan data terintegrasi berbasis teknologi informasi; 5. penguatan landasan ekosistem riset dan inovasi, integrasi IPTEK dalam sektor-sektor prioritas daerah, hilirisasi hasil riset, serta kolaborasi dalam pengembangan riset dan inovasi;	1. peningkatan kinerja pelayanan publik berteknologi tinggi dan integratif; 2. peningkatan kapabilitas teknologi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi guna mendukung transformasi digital; 3. pengembangan kualitas perencanaan berbasis data terintegrasi, riset dan risiko serta berorientasi kinerja; 4. peningkatan kinerja tata kelola data terintegrasi berbasis sistem informasi; 5. pengembangan ekosistem riset dan inovasi, integrasi IPTEK dalam sektor-sektor prioritas daerah, peningkatan hilirisasi hasil riset, penguatan kolaborasi	1. pelayanan publik berteknologi tinggi dan integratif; 2. akselerasi penguatan kapabilitas teknologi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi guna mendukung transformasi digital; 3. penguatan kualitas keselarasan perencanaan berbasis data terintegrasi, riset dan risiko, serta berorientasi kinerja; 4. penguatan kinerja tata kelola data terintegrasi berbasis sistem informasi; 5. penguatan ekosistem riset dan inovasi, integrasi IPTEK dalam sektor-sektor prioritas daerah, peningkatan hilirisasi hasil riset, penguatan kolaborasi dalam pengembangan riset dan inovasi;	1. pelayanan publik cepat tanggap; 2. pemantapan kapabilitas teknologi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi guna mendukung transformasi digital; 3. pemantapan kualitas perencanaan berbasis data terintegrasi, riset dan risiko, serta berorientasi kinerja; 4. penguatan kinerja tata kelola data terintegrasi berbasis sistem informasi; 5. penumbuhan inovasi perencanaan mendukung perencanaan berkelanjutan; 6. penumbuhan daya saing ASN melalui mekanisme mutasi dan promosi yang berbasis manajemen talenta dan kompetensi berdasarkan	1. pelayanan publik berkualitas prima; 2. kapabilitas teknologi penyelenggaraan pemerintahan yang optimal guna mendukung transformasi digital; 3. kualitas perencanaan perencanaan berbasis data terintegrasi, riset dan risiko serta berorientasi kinerja; 4. tata kelola data terintegrasi berbasis sistem informasi; 5. ekosistem riset dan inovasi, integrasi IPTEK dalam sektor-sektor prioritas daerah, peningkatan hilirisasi hasil riset, penguatan kolaborasi dalam pengembangan riset dan inovasi; 6. manajemen ASN berbasis meritokrasi; 7. kompetensi penyelenggara pemerintahan yang

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi				
	Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
	6. penguatan manajemen ASN melalui pemetaan kebutuhan jabatan berdasarkan kompetensi dan kinerja didukung dengan peningkatan akurasi data kepegawaian; 7. penguatan pengembangan kompetensi melalui pemetaan kompetensi berbasis tujuan pembangunan daerah; 8. penguatan nilai-nilai anti korupsi dan budaya integritas penyelenggara pemerintahan; 9. penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal serta pemetaan risiko dan titik rawan korupsi didukung dengan peningkatan kapabiltas APIP; 10. penguatan pelaksanaan analisis evaluasi dan pengawasan produk hukum, penguatan dokumentasi hukum, serta dasar peningkatan kualitas penyusunan produk hukum;	dalam pengembangan riset dan inovasi; 6. peningkatan kualitas manajemen ASN dengan pengembangan manajemen kinerja dan talenta disertai *reward and punishment* yang berkeadilan; 7. pengembangan kompetensi berbasis analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi disertai dengan penguatan nilai integritas; 8. peningkatan nilai-nilai anti korupsi dan budaya integritas penyelenggara pemerintahan; 9. peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian berbasis risiko, serta integrasi penguatan integritas dan pencegahan korupsi; 10. peningkatan kualitas analisis evaluasi dan pengawasan produk hukum, jaringan dokumentasi hukum, serta kapasitas penyusunan produk hukum; 11. peningkatan layanan bantuan hukum dan peningkatan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;	6. peningkatan penerapan perlindungan dan penegakan disiplin yang berkeadilan untuk menjamin kesejahteraan ASN yang didukung dengan penguatan manajemen kinerja dan talenta; 7. peningkatan dan pemerataan pengembangan kompetensi serta internalisasi nilai anti korupsi dan integritas kepada seluruh penyelenggara pemerintahan; 8. peningkatan kepatuhan pengawasan dan pengendalian berbasis risiko serta upaya pencegahan korupsi melalui kolaborasi lintas sektor; 9. penguatan kualitas analisis evaluasi, integrasi dokumentasi hukum, serta kualitas penyusunan produk hukum; 10. penguatan layanan bantuan hukum dan penguatan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum; 11. peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan digitalisasi manajemen kearsipan;	manajemen kinerja, kompetensi dan integritas; 7. pengembangan kompetensi diarahkan untuk menumbuhkan daya saing penyelenggara pemerintahan dengan mendorong kemudahan akses belajar dengan mengedepankan nilai-nilai anti korupsi; 8. penumbuhan kesadaran pengawasan dan pengendalian berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi; 9. pemantapan penataan regulasi, serta pemantapan kualitas penyusunan produk hukum daerah. 10. pemantapan kualitas layanan bantuan hukum dan peningkatan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum;	mengedepankan profesionalitas dan nilai-nilai anti korupsi serta integritas; 8. pengawasan dan pengendalian berbasis risiko yang efektif, efisien serta bebas korupsi yang mendukung Tata Kelola Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan; 9. digitalisasi manajemen kearsipan sebagai sumber informasi dan pengetahuan yang handal; 10. regulasi yang inklusif, efektif dan tidak tumpang tindih; 11. penyelesaian masalah hukum yang berkeadilan, dan berkelanjutan; 12. kelembagaan daerah yang berdaya saing, maju dan berkelanjutan; 13. keamanan dan ketertiban yang adaptif dan berkelanjutan; 14. penjaminan pemenuhan hak asasi manusia bagi kelompok rentan terkait layanan dasar serta kesetaraan dan kebebasan sipil;
	11. penguatan pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum; 12. penguatan kualitas pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan; 13. penguatan kelembagaan agar lebih efektif; 14. penguatan sinergi pelaksanaan reforma agraria; 15. penguatan koordinasi dan pengawasan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta mendorong inovasi layanan administrasi kependudukan dan pencatatan	12. peningkatan kualitas pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan; 13. penguatan kelembagaan agar lebih efektif; 14. peningkatan sinergi pelaksanaan reforma agraria; 15. penguatan koordinasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta peningkatan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam perencanaan pembangunan daerah; 16. peningkatan kapasitas SDM, penguatan pemetaan daerah	12. penguatan kelembagaan agar lebih efektif dan berdaya saing; 13. akselerasi sinergi pelaksanaan reforma agraria; 14. peningkatan pembinaan dan supervisi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta penguatan keamanan dan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang valid dan termutakhir dalam pembangunan daerah; 15. penguatan sinergi lintas daerah, pemetaan daerah rawan, penegakan produk hukum	11. perluasan digitalisasi manajemen kearsipan yang berdaya saing; 12. penguatan kelembagaan berdaya saing, maju dan berkelanjutan; 13. penguatan kebijakan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, optimalisasi inovasi layanan yang mudah, cepat, dan tepat bagi masyarakat, serta pemanfaatan data yang valid dan termutakhir dalam perencanaan pembangunan daerah; 14. pemantapan sinergi pelaksanaan reforma agraria;	15. kebijakan, inovasi, keamanan, dan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai basis data yang valid dan termutakhir dalam perencanaan pembangunan daerah; 16. sinergi pelaksanaan reforma agraria; 17. pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat; 18. integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi;

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi				
	Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
	sipil berbasis digitalisasi sebagai data yang valid dan termutakhir dalam pembangunan daerah; 16. penguatan pelaksanaan pemetaan daerah rawan secara sinergis, serta penguatan penegakan produk hukum daerah, pembinaan PPNS dan perlindungan masyarakat; 17. penguatan pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia bagi kelompok rentan terkait layanan dasar serta penjaminan kesetaraan dan kebebasan sipil; 18. peningkatan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi; 19. pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional; 20. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah; 21. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah; 22. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; 23. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas.	rawan, penegakan produk hukum daerah serta pelibatan aktif masyarakat dalam menjaga trantibum; 17. peningkatan pemenuhan hak asasi manusia bagi kelompok rentan terkait layanan dasar serta penjaminan kesetaraan dan kebebasan sipil; 18. pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat; 19. peningkatan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi; 20. pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional; 21. penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila; 22. penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan kriminalisme; 23. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah; 24. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah; 25. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; 26. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas.	daerah, serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan gangguan ketertiban; 16. penguatan pemenuhan hak asasi manusia bagi kelompok rentan terkait layanan dasar serta penjaminan kesetaraan dan kebebasan sipil; 17. pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat; 18. penguatan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi; 19. penguatan kapabilitas lembaga demokrasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat; 20. pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional; 21. penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila; 22. penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal; 23. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah; 24. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah; 25. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; 26. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas.	15. pemantapan kualitas pemetaan daerah rawan, penguatan peran PPNS, efektivitas penegakan perda, serta kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi gangguan; 16. pemantapan pemenuhan hak asasi manusia bagi kelompok rentan terkait layanan dasar serta penjaminan kesetaraan dan kebebasan sipil; 17. pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat; 18. meningkatkan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi; 19. penguatan kapabilitas lembaga demokrasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat; 20. penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila, 21. penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal; 22. peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah; 23. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah; 24. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; 25. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas.	19. kapabilitas lembaga demokrasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat; 20. jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional; 21. nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila; 22. penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal; 23. kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah; 24. penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah; 25. sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; 26. perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas.

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi				
	Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	**Penguatan Landasan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan**	**Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan**	**Akselerasi Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan**	**Pemantapan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan**	**Perwujudan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan**
	1. penguatan pondasi sektor industri pengolahan dengan pemetaan potensi maupun kelembagaan, dan peningkatan kapasitas dasar pelaku industri; 2. penguatan pondasi sektor perdagangan; 3. penguatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif; 4. peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM); 5. peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan berbasis riset dan inovasi; 6. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan; 7. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan; 8. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF); 9. pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*); 10. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air guna mendukung peningkatan produksi pangan;	1. peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan dan pemberdayaan pelaku industri lokal; 2. peningkatan kontribusi sektor perdagangan dengan efisiensi distribusi dan stabilitas harga; 3. peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis inovasi; 4. peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM); 5. peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan; 6. peningkatan pembinaan pertambangan dengan penerapan *Good Mining Practice*; 7. peningkatan pertumbuhan penanaman modal; 8. pengembangan ekosistem halal, industri halal dan penguatan keuangan syariah; 9. peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antardaerah (utamanya konektivitas antar destinasi wisata unggulan) dan kewilayahan; 10. peningkatan pengembangan perekonomian desa berbasis potensi pariwisata berkelanjutan; 11. peningkatan peran BUMDes dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam mendukung pariwisata	1. akselerasi peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan didukung dengan hilirisasi produk berbasis potensi daerah dan ramah lingkungan; 2. percepatan perluasan akses pasar dan ekspor produk unggulan sektor perdagangan; 3. percepatan peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif; 4. akselerasi peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM); 5. penguatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan; 6. optimalisasi produktivitas pertambangan dengan penerapan *Good Mining Practice*; 7. penguatan pertumbuhan penanaman modal; 8. percepatan pengembangan ekosistem halal, industri halal dan penguatan keuangan syariah; 9. penguatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antardaerah (utamanya dalam mendukung pengembangan kawasan perindustrian) dan kewilayahan; 10. peningkatan prasarana sarana pendukung perekonomian desa; 11. mendorong peningkatan produktivitas perekonomian desa berbasis potensi unggulan yang	1. pemantapan sektor industri pengolahan berbasis inovasi; 2. penguatan daya saing sektor perdagangan; 3. pemantapan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif; 4. pemantapan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) berbasis inovasi; 5. pemantapan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan; 6. pemantapan produktivitas pertambangan dengan penerapan *Good Mining Practice*; 7. pemantapan pertumbuhan penanaman modal; 8. pemantapan pengembangan ekosistem halal, industri halal dan penguatan keuangan syariah; 9. pemantapan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan; 10. penguatan ekonomi desa berbasis potensi unggulan, riset, inovasi, dan ekonomi kreatif; 11. penguatan peran lembaga ekonomi desa dan akses permodalan usaha; 12. penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan; 13. peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat	1. perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, berbasis potensi dan sektor-sektor unggulan daerah; 2. aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah dan kewilayahan yang semakin baik; 3. keselamatan, kelancaran dan keterhubungan transportasi dalam mendukung pertumbuhan perekonomian dan kemajuan daerah serta keberlanjutan pembangunan; 4. kemandirian desa melalui peningkatan perekonomian desa, infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, dan kualitas tata kelola pemerintahan desa; 5. inflasi yang terkendali dan stabil yang semakin memperkuat perekonomian daerah; 6. perekonomian daerah terintegrasi dengan prinsip keberlanjutan dengan kontribusi signifikan dari sektor-sektor hijau; 7. penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup berbasis kebijakan insentif dan disinsentif serta apresiasi dalam pengelolaan lingkungan hidup; 8. Jawa Tengah menjadi daerah dengan perekonomian tangguh, inklusif, serta memiliki daya saing tinggi yang berpijak pada kelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang;

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi				
	Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
	11. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; 12. penguatan pembinaan pertambangan dengan penerapan *Good Mining Practice*; 13. peningkatan pertumbuhan penanaman modal; 14. pengembangan ekosistem halal, industri halal dan penguatan keuangan syariah; 15. peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah (utamanya pada jalur logistik sentra kawasan pertanian) dan kewilayahan; 16. peningkatan produktivitas tanaman pangan desa; 17. penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa; 18. penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa; 19. penguatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan termasuk integrasi kegiatan posyandu untuk mendukung SPM, serta penguatan peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat desa; 20. penguatan landasan tata kelola pemerintahan desa; 21. peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah;	berkelanjutan dan ekonomi syariah; 12. peningkatan kerja sama pengembangan potensi pariwisata desa dan peningkatan pengembangan kawasan perdesaan; 13. peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan termasuk integrasi kegiatan posyandu untuk mendukung SPM dan penguatan peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan serta lembaga adat desa; 14. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa; 15. peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah; 16. pemulihan ekosistem dan pelestarian keanekaragaman hayati; 17. peningkatan produktivitas komoditi sumber daya alam dan jasa lingkungan dengan prinsip keberlanjutan; 18. peningkatan penerapan inisiatif skema insentif/disinsentif bagi pelaku usaha serta apresiasi untuk masyarakat yang menerapkan praktik berkelanjutan; 19. peningkatan upaya dan inisiatif konservasi berbasis masyarakat dengan pendekatan keterpaduan/ integrasi pengelolaan lanskap darat dan laut; 20. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air guna meningkatkan ketersediaan air baku; 21. peningkatan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;	didukung dengan diversifikasi produk berbasis riset dan inovasi serta hilirisasi pertanian; 12. peningkatan kualitas BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya sebagai lembaga ekonomi yang maju dan kompeten dalam mengelola hasil produksi desa; 13. peningkatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi unggulan dan industri hijau; 14. peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan termasuk integrasi kegiatan posyandu untuk mendukung SPM serta penguatan peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat desa; 15. akselerasi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa; 16. penguatan upaya pengendalian inflasi daerah; 17. optimalisasi produktivitas komoditi sumber daya alam dan jasa lingkungan dengan prinsip keberlanjutan; 18. penguatan kebijakan penerapan inisiatif skema insentif/disinsentif bagi pelaku usaha serta apresiasi untuk masyarakat yang menerapkan praktik berkelanjutan; 19. perluasan upaya dan inisiatif konservasi berbasis masyarakat dengan pendekatan keterpaduan/integrasi pengelolaan lanskap darat dan laut dengan melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat dan dunia usaha;	desa/kelurahan termasuk integrasi kegiatan posyandu untuk mendukung SPM serta penguatan peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat desa; 14. pemantapan tata kelola pemerintahan desa; 15. pemantapan upaya pengendalian inflasi daerah; 16. pemantapan produktivitas komoditi sumber daya alam dan jasa lingkungan dengan prinsip keberlanjutan; 17. pemantapan kebijakan insentif dan disinsentif berbasis kelestarian lingkungan hidup serta apresiasi untuk masyarakat yang menerapkan praktik berkelanjutan; 18. pemantapan kebijakan, sistem dan tata kelola lingkungan yang memungkinkan respon cepat terhadap kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup; 19. pemantapan kebijakan dan penerapan pendanaan hijau untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup; 20. pengembangan infrastruktur hijau dan adaptif terhadap perubahan iklim; 21. pemantapan aksi penurunan emisi gas rumah kaca dan pengembangan nilai ekonomi karbon yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah;	9. pendanaan hijau yang berkontribusi signifikan dalam mendukung kelestarian lingkungan hidup; 10. implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim; 11. reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yang mencakup seluruh rantai layanan yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan; 12. perwujudan ketahanan sumber daya air; 13. perwujudan produktivitas pertambangan dengan penerapan *Good Mining Practice*; 14. ketahanan energi berbasis potensi lokal yang berkelanjutan; 15. pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 16. komitmen menuju universal akses sanitasi air limbah domestik yang dikelola secara aman; 17. komitmen menuju universal akses air minum yang dikelola secara aman dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya air; 18. pemerataan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan; 19. kesesuaian penataan ruang Jawa Tengah; 20. Jawa Tengah sebagai daerah dengan risiko bencana rendah dalam rangka mendukung perekonomian daerah.

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi				
	Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
	22. pemetaan dan pemutakhiran status sumber daya alam strategis- kelembagaan dan regulasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; 23. penguatan inisiatif skema insentif/disinsentif bagi pelaku usaha serta apresiasi untuk masyarakat yang menerapkan praktik berkelanjutan; 24. penguatan upaya dan inisiatif konservasi berbasis masyarakat dengan pendekatan keterpaduan/integrasi pengelolaan lanskap darat dan laut; 25. identifikasi potensi pendanaan hijau-wilayah strategis/aktivitas yang mendukung keberlanjutan lingkungan hidup; 26. penguatan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 27. penguatan ketahanan energi berbasis potensi lokal (utamanya mendukung produktivitas pertanian); 28. peningkatan kapasitas adaptasi perubahan iklim; 29. harmonisasi kebijakan dan tata kelola lintas sektor penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim; 30. penguatan upaya reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yang mencakup seluruh rantai layanan yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan; 31. peningkatan kualitas air melalui pengelolaan limbah industri UMKM;	22. inisiasi penerapan pendanaan hijau untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup; 23. peningkatan ketahanan energi berbasis potensi lokal (utamanya mendukung kawasan pariwisata); 24. akselerasi dan sinergi antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim; 25. peningkatan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yang mencakup seluruh rantai layanan yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan; 26. peningkatan kualitas air melalui pengelolaan limbah industri UMKM; 27. peningkatan infrastruktur sanitasi air limbah domestik; 28. peningkatan akses air minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya air; 29. peningkatan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan; 30. penguatan infrastruktur hijau dan penerapan *zero waste tourism* dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan; 31. peningkatan integrasi rencana tata ruang dan rencana sektoral melalui penyusunan dokumen Sinkronisasi Program Penataan Ruang (SPPR);	20. perluasan sumber dan penerapan pendanaan hijau untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup; 21. peningkatan kapasitas adaptasi perubahan iklim; 22. peningkatan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yang mencakup seluruh rantai layanan yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan; 23. peningkatan kualitas air melalui pengelolaan limbah industri UMKM; 24. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air guna meningkatkan layanan air baku; 25. akselerasi pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 26. akselerasi ketahanan energi berbasis potensi lokal (utamanya mendukung pengembangan kawasan perdesaan); 27. akselerasi akses sanitasi air limbah domestik yang dikelola secara aman; 28. akselerasi penyediaan akses air minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya air; 29. akselerasi penyediaan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan; 30. mendorong percepatan penyusunan dan legalisasi Rencana Tata Ruang Umum dan Detail Kabupaten/Kota;	22. peningkatan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yang mencakup seluruh rantai layanan yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan; 23. peningkatan kualitas air melalui pengelolaan limbah industri UMKM; 24. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air guna meningkatkan ketahanan air; 25. pemantapan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; 26. pemantapan ketahanan energi berbasis potensi lokal yang berkelanjutan; 27. pemantapan penyediaan akses sanitasi air limbah domestik yang dikelola secara aman; 28. pemantapan penyediaan akses air minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya air; 29. pemantapan penyediaan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan; 30. penguatan pengendalian penataan ruang sesuai rencana tata ruang; 31. penguatan kelembagaan dan kapasitas institusi penanggulangan bencana; 32. peningkatan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana; 33. pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk membangun ketahanan masyarakat; 34. pengelolaan data dan informasi untuk pengambilan keputusan;	

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi				
	Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
	32. penguatan infrastruktur sanitasi air limbah domestik; 33. penguatan infrastruktur akses air minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya air; 34. penguatan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan; 35. penguatan perwujudan ruang Jawa Tengah dengan mengintegrasikan rencana pembangunan dengan rencana tata ruang melalui Sinkronisasi Program Penataan Ruang (SPPR); 36. penguatan kelembagaan dan kapasitas institusi penanggulangan bencana; 37. peningkatan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana; 38. pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk membangun ketahanan masyarakat; 39. pengelolaan data dan informasi untuk pengambilan keputusan; 40. pengembangan literasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, dan inklusi sosial dalam penanggulangan bencana; 41. perluasan jejaring kemitraan serta pendanaan alternatif; 42. pengembangan riset dan inovasi kebencanaan serta pemanfaatan teknologi.	32. penguatan kelembagaan dan kapasitas institusi penanggulangan bencana; 33. peningkatan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana; 34. pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk membangun ketahanan masyarakat; 35. pengelolaan data dan informasi untuk pengambilan keputusan; 36. pengembangan literasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, dan inklusi sosial dalam penanggulangan bencana; 37. perluasan jejaring kemitraan serta pendanaan alternatif; 38. pengembangan riset dan inovasi kebencanaan serta pemanfaatan teknologi.	31. penguatan kelembagaan dan kapasitas institusi penanggulangan bencana; 32. peningkatan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana; 33. pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk membangun ketahanan masyarakat; 34. pengelolaan data dan informasi kebencanaan untuk pengambilan keputusan; 35. pengembangan literasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, dan inklusi sosial dalam penanggulangan bencana; 36. perluasan jejaring kemitraan serta pendanaan alternatif; 37. pengembangan riset dan inovasi kebencanaan serta pemanfaatan teknologi.	38. pengembangan literasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, dan inklusi sosial dalam penanggulangan bencana; 39. perluasan jejaring kemitraan serta pendanaan alternatif; 40. pengembangan riset dan inovasi kebencanaan serta pemanfaatan teknologi	

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi				
	Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter	**Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter**	**Peningkatan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter**	**Akselerasi Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter**	**Pemantapan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter**	**Perwujudan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Dan Berkarakter**
	1. pemantapan identifikasi pemetaan SMK dengan potensi lokal, pengembangan dan penguatan kerjasama DUDI serta rintisan SMK Unggulan; 2. pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), evaluasi dan pelaksanaan SMK *Boarding* dan Semi *Boarding* serta pemberian bantuan biaya pendidikan (beasiswa); 3. pemerataan mutu layanan pendidikan dengan pemenuhan biaya operasional sekolah dan revitalisasi prasarana sarana pendidikan; 4. penguatan pendidikan karakter dan inklusi dengan meningkatkan kapasitas guru dalam pencegahan serta penanganan *bullying*; 5. penguatan tata kelola pendidikan berbasis perencanaan, hasil evaluasi serta pemantauan perizinan penyelenggaraan pendidikan; 6. pemetaan kebutuhan prasarana dan sarana di pelayanan kesehatan primer dan lanjutan; 7. pengembangan program pemerataan SDM kesehatan; 8. pengembangan keterampilan kader kesehatan; 9. peningkatan kepesertaan aktif untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); 10. pengembangan sistem informasi kesehatan terintegrasi; 11. pemetaan seluruh faktor risiko dan determinan kesehatan di	1. peningkatan kompetensi siswa SMK, keahlian guru SMK berbasis industri serta revitalisasi alat praktik kejuruan; 2. peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan secara bertahap dengan penyediaan layanan pendidikan pada wilayah *blankspot*, penguatan kerja sama pemerintah-swasta, serta evaluasi strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS); 3. peningkatan mutu pendidikan berbasis literasi-numerasi dan digital, STEAM, kualitas pengajaran guru dan pembelajaran siswa, serta pengelolaan SMK *Boarding* dan Semi *Boarding*; 4. peningkatan pendidikan karakter melalui penanaman nilai agama dan budaya, implementasi kurikulum yang adaptif serta penguatan sekolah inklusi; 5. penguatan tata kelola pendidikan berorientasi kepemimpinan instruksional dan berbasis telaah/analisis; 6. pengembangan prasarana sarana layanan kesehatan primer dan lanjutan; 7. pengembangan kompetensi SDM kesehatan untuk mendukung layanan rujukan berbasis kompetensi; 8. pengembangan keterampilan kader kesehatan; 9. peningkatan cakupan kepesertaan aktif;	1. penguatan dan pengembangan kerja sama SMA dan SMK dengan *stakeholder* (swasta, masyarakat, perguruan tinggi) secara berkelanjutan; 2. peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan secara bertahap dengan penyediaan layanan pendidikan pada wilayah *blankspot*, penguatan kerja sama pemerintah-swasta serta pengembangan strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS); 3. peningkatan mutu pendidikan dengan peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan media pembelajaran berbasis digital serta kurikulum berbasis STEAM (*Science, Technology, Engineering, Mathematics dan Arts*); 4. peningkatan pendidikan karakter siswa berorientasi potensi, minat dan bakat siswa; 5. penguatan tata kelola pendidikan melalui manajemen kelembagaan sekolah dan penguatan refleksi pembelajaran guru; 6. pengembangan prasarana sarana layanan kesehatan primer dan lanjutan; 7. pengembangan kompetensi SDM kesehatan untuk mendukung layanan rujukan berbasis kompetensi dengan model pengampuan; 8. pengembangan keterampilan kader kesehatan;	1. pemanfaatan alternatif layanan pendidikan untuk pencegahan ATS dan penguatan kerja sama pemerintah-swasta-masyarakat dalam pemenuhan biaya personil dan operasional sekolah; 2. pengembangan SMK dan SMA Unggulan berbasis STEAM (*Science, Technology, Engineering, Art dan Mathematic*) Kecakapan Abad 21, digital dan teknologi serta memiliki kearifan lokal; 3. peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan SMA dan SLB dalam implementasi kurikulum adaptif berbasis digital dan teknologi; 4. perluasan kurikulum SMA dan SMK sebagai rujukan serta pusat inovasi dan berorientasi global; 5. perluasan ekosistem kemitraan DUDI berkelanjutan melalui kerja sama dengan DUDI skala nasional dan global; 6. penguatan penguasaan bahasa asing bagi siswa SMA, SMK dan SLB; 7. perluasan prasarana sarana pendidikan SMA, SMK dan SLB berbasis digital dan teknologi sebagai pusat rujukan dan jejaring; 8. pengembangan afirmasi pendidikan bagi siswa SMA, SMK dan SLB berorientasi keberlanjutan jenjang pendidikan; 9. pemantapan pengembangan prasarana sarana layanan kesehatan primer dan lanjutan;	1. Wajib Belajar (WAJAR) 13 Tahun; 2. lulusan SMA dan SMK yang berdaya saing nasional dan global memiliki pengetahuan, ketrampilan, berkarakter, kompetitf, berdaya saing nasional dan global; 3. lulusan SLB dengan kemandirian pribadi dan sosial dasar, *lifeskill* dan kewirausahaan inklusif; 4. guru dan tenaga kependidikan yang berkompeten dan memiliki kapasitas, berintegritas, berkarakter sebagai inovator dan *learning facilitator* serta penggerak komunitas belajar; 5. prasarana sarana pendidikan minimal sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai penopang kualitas pembelajaran serta mendukung ekosistem pembelajaran yang inovatif, inklusi dan berdaya saing global; 6. kurikulum SMA, SMK dan SLB yang holistik, adaptif, kontekstual, relevan, inklusif, selaras kebutuhan lokal dan global; 7. pendidikan karakter berbasis nilai agama dan kearifan lokal *(Think Globally, Act Locally)*; 8. tata kelola pendidikan yang akuntabel, transparansi dan berorientasi mutu; 9. sarana prasarana layanan kesehatan primer dan lanjutan yang inklusif; 10. SDM kesehatan yang kompeten untuk mendukung layanan

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi				
	Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
	setiap kabupaten/kota serta inisiasi penyelesaian faktor risiko; 12. peningkatan dan penguatan literasi masyarakat dibidang kesehatan; 13. peningkatan jejaring pelayanan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional; 14. penyediaan data dan informasi Objek Pemajuan Kebudayaan, cagar budaya yang akurat, serta SDM dan lembaga kebudayaan untuk mewujudkan talenta nasional seni budaya; 15. peningkatan pelindungan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya; 16. peningkatan kapasitas SDM dan lembaga kebudayaan; 17. pemetaan kerja sama lintas sektor dan kemitraan potensial dalam pemajuan kebudayaan; 18. penguatan pondasi pembangunan olahraga melalui partisipasi aktif berolahraga di masyarakat dan satuan pendidikan, mobilisasi olahraga masyarakat dan pendidikan secara masif, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pemetaan atlet potensial, pemetaan prasarana sarana olahraga, serta pemetaan cabang olahraga unggulan; 19. penguatan tata kelola literasi melalui koordinasi antar *stakeholder*; pelibatan komunitas literasi dalam penyadaran gemar membaca masyarakat, peningkatan kapasitas SDM perpustakaan, peningkatan prasarana sarana perpustakaan;	10. pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi kesehatan terintegrasi; 11. pemerataan sumber daya kesehatan daerah serta tenaga cadangan kesehatan; 12. peningkatan dan penguatan literasi masyarakat dibidang kesehatan; 13. peningkatan jejaring pelayanan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional; 14. peningkatan kualitas data dan informasi kebudayaan; 15. peningkatan pengembangan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang berkelanjutan; 16. peningkatan kualitas SDM dan lembaga kebudayaan untuk mewujudkan talenta nasional seni budaya; 17. pengembangan kerja sama lintas sektor dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan; 18. peningkatan kualitas prasarana sarana kebudayaan; 19. peningkatan literasi masyarakat dalam berolahraga, peningkatan penyadaran masyarakat dalam berolahraga, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pembinaan atlet potensial, pembinaan cabang olahraga unggulan, peningkatan prasarana sarana olahraga masyarakat, peningkatan prasarana sarana olahraga cabor unggulan; 20. perluasan literasi melalui pelibatan pemangku kepentingan;	9. peningkatan cakupan pembiayaan kesehatan milik pemerintah dan swasta; 10. pengembangan dan pemanfaatan sistem infromasi kesehatan yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi; 11. peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan daerah serta tenaga cadangan kesehatan; 12. peningkatan dan penguatan literasi masyarakat dibidang kesehatan; 13. penguatan jejaring pelayanan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional; 14. pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi kebudayaan untuk pemajuan kebudayaan; 15. penguatan upaya pelindungan dan pengembangan warisan budaya; 16. peningkatan peran SDM dan lembaga kebudayaan dalam pemajuan kebudayaan; 17. peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga, peningkatan prasarana sarana olahraga masyarakat, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, peningkatan pembinaan atlet potensial, peningkatan prasarana sarana olahraga cabor unggulan; 18. peningkatan literasi masyarakat melalui penguatan komunitas literasi; 19. mengoptimalkan penelusuran sumber sejarah yang tidak terdapat dalam arsip sebagai dukungan mewujudkan memori kolektif bangsa;	10. penguatan kompetensi SDM kesehatan untuk mendukung layanan rujukan berbasis kompetensi dengan model pengampuan; 11. penguatan pengembangan keterampilan kader kesehatan; 12. Peningkatan cakupan pembiayaan kesehatan milik pemerintah dan swasta 13. pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi; 14. peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan daerah serta tenaga cadangan kesehatan; 15. peningkatan dan penguatan literasi masyarakat dibidang kesehatan; 16. penguatan jejaring pelayanan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional; 17. optimalisasi pemanfaatan warisan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; 18. optimalisasi peran SDM/lembaga/komunitas kebudayaan dalam pemajuan kebudayaan; 19. penguatan kerja sama dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan; 20. peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga, pemerataan prasarana sarana olahraga masyarakat, peningkatan kualitas SDM keolahragaan, peningkatan pembinaan atlet potensial;	rujukan berbasis kompetensi dengan model pengampuan; 11. kader kesehatan yang memiliki ketrampilan; 12. cakupan pembiayaan kesehatan milik pemerintah dan swasta yang merata 13. sistem informasi kesehatan yang terintegrasi; 14. kapasitas sumber daya kesehatan daerah serta tenaga cadangan kesehatan yang optimal; 15. penguatan literasi masyarakat dibidang kesehatan; 16. kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional; 17. rencana mitigasi, kontingensi dan rencana operasi berbasis ancaman, kerentanan dan kapasitas masyarakat serta pemerintahan daerah; 18. ekosistem kebudayaan yang sehat dan berkelanjutan; 19. warisan budaya termanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; 20. kebugaran masyarakat, daya saing, dan prestasi olahraga; 21. budaya literasi masyarakat yang maju; 22. daya saing pemuda; 23. fungsi kearsipan sebagai sumber informasi dan jati diri daerah; 24. pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; 25. pembangunan berbasis gender; 26. ketahanan keluarga; 27. kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing tinggi, adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi				
	Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
	21. pemetaan potensi sumber arsip untuk melengkapi khazanah arsip; 22. peningkatan penyadaran, kapasitas pemuda, serta penguatan kewirausahaan pemuda; 23. peningkatan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; 24. peningkatan pembangunan berbasis gender; 25. peningkatan ketahanan keluarga; 26. pemetaan kompetensi tenaga kerja pada sektor unggulan yang memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah, dan penguatan kapasitas lembaga pelatihan dan kualitas instruktur.	21. mengoptimalkan akuisisi arsip secara tematis; 22. peningkatan partisipasi pemuda melalui wirausaha muda kreatif dan inovatif; 23. peningkatan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; 24. peningkatan pembangunan berbasis gender; 25. peningkatan ketahanan keluarga; 26. pelatihan peningkatan produktivitas, sertifikasi kompetensi dan perluasan kemitraan dengan dunia industri dan dunia usaha.	20. peningkatan pemberdayaan pemuda dalam mendukung pembangunan daerah; 21. peningkatan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; 22. peningkatan pembangunan berbasis gender; 23. peningkatan ketahanan keluarga; 24. akselerasi peningkatan produktivitas tenaga kerja dengan adaptasi teknologi tepat guna, dan digitalisasi proses kerja.	21. peningkatan ekosistem literasi masyarakat melalui pemantapan prasarana sarana literasi dan kualitas SDM perpustakaan yang berdaya saing; 22. peningkatan kualitas arsip memori kolektif daerah sebagai sumber informasi dan pengetahuan; 23. peningkatan daya saing pemuda; 24. peningkatan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; 25. peningkatan pembangunan berbasis gender; 26. peningkatan ketahanan keluarga; 27. pemantapan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, memperluas kerjasama dengan dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga riset untuk meningkatkan produktivitas	
Fokus Tematik	**Tema** **Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional**	**Tema** **Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi**	**Tema** **Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau**	**Tema** **Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju Dan Berkelanjutan**	
	1. peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan; 2. penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan yang mendukung kontinuitas produksi pangan; 3. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; 4. penguatan sistem *agroforestry* berbasis potensi lokal; 5. pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam,	1. pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan; 2. penguatan promosi pariwisata berbasis digital; 3. peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis klaster dengan perbaikan prasarana sarana destinasi wisata; 4. penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga berbasis digital;	1. peningkatan dan percepatan kinerja produktivitas sektor-sektor unggulan Jawa Tengah yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa, koperasi dan UMKM, pertanian dalam arti luas secara merata; 2. peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antardaerah dan kewilayahan; 3. penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru; 4. penerapan sirkular ekonomi dan dekarbonisasi industri melalui	1. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter melalui peningkatan akses layanan pendidikan berkualitas, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan kebugaran dan daya saing olahraga, peningkatan budaya literasi masyarakat, peningkatan daya saing pemuda; 2. peningkatan pemerataan layanan dan perlindungan sosial bagi pemerlu kesejahteraan sosial;	

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi				
	Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
	bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan; 6. penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan; 7. peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification*/LSFF); 8. pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*); 9. penguatan kelembagaan pangan agar lebih efektif; 10. peningkatan penyediaan prasarana sarana pendukung pertanian dan ketahanan pangan desa; 11. peningkatan produktivitas tanaman pangan desa berbasis riset dan inovasi; 12. penguatan peran BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya dalam mendukung ketahanan pangan desa; 13. penguatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan desa; 14. penyusunan kebijakan pangan yang berbasis bukti melalui penyediaan arsip pembangunan pangan Jawa Tengah; 15. peningkatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SMK dan SLB dalam bidang keahlian agribisnis, pertanian dan kewirausahaan pangan lokal; 16. reviu dan sinkronisasi kurikulum SMK agribisnis, pertanian selaras	5. peningkatan infrastruktur konektivitas antar destinasi wisata; 6. penguatan integrasi antar destinasi wisata; 7. penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata; 8. penguatan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata; 9. *city beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan; 10. pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, *ancillary service*s, aktivitas, *available packages*) pada kawasan megapolitan/metropolitan (*urban tourism*), serta kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Magelang- Yogyakarta-Surakarta; 11. penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui penguatan halal *value chain*, penguatan keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan penguatan ekonomi digital; 12. penguatan kelembagaan pariwisata dan ekonomi syariah agar lebih efektif; 13. peningkatan pemenuhan prasarana sarana pendukung pariwisata desa; 14. mendorong pengembangan perekonomian desa berbasis potensi pariwisata berkelanjutan;	penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan; 5. penerapan standar industri hijau dan produk ramah lingkungan; 6. peningkatan prasarana sarana pendukung perekonomian desa; 7. mendorong produktivitas perekonomian desa berbasis potensi unggulan yang didukung dengan diversifikasi produk berbasis riset dan inovasi serta hilirisasi pertanian; 8. peningkatan kualitas BUMDes dan lembaga perekonomian desa lainnya sebagai lembaga ekonomi yang maju dan kompeten dalam mengelola hasil produksi desa; 9. peningkatan kerja sama desa dan pengembangan kawasan perdesaan berbasis potensi unggulan dan industri hijau; 10. pengembangan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SLB dan SMK dalam ekonomi hijau dan industri hijau; 11. pengembangan kurikulum SMK yang adaptif pada bidang keahlian agribisnis, agroteknologi, energi dan pertambangan, teknologi konstruksi dan rekayasa, TIK, pariwisata, bisnis dan manajemen berbasis ekonomi dan industri hijau selaras standar DUDI; 12. pengembangan kerja sama dan ekosistem kemitraan DUDI seperti industri perkebunan organik, perusahaan energi terbarukan, industri daur ulang, ekowisata, termasuk dalam rekrutmen lulusan oleh mitra DUDI; 13. penguatan kreativitas dan inovasi berbasis ramah lingkungan bagi siswa SMA, SMK dan SLB;	3. peningkatan pembangunan berbasis gender dan ketahanan keluarga; 4. peningkatan kualitas, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja; 5. pemantapan birokrasi yang berintengritas dan kolaboratif melalui pelayanan publik yang responsif dan inklusif, penguatan SDM ASN yang berdaya saing, transformasi digital, dan perencanaan berbasis data terintegrasi serta inovatif; 6. memaksimalkan sistem ketahanan daerah; 7. memperkokoh kohesi sosial dan kesetaraan di masyarakat; 8. penguatan penerapan ekosistem riset dan inovasi, integrasi IPTEK dalam sektor-sektor prioritas daerah, peningkatan hilirisasi hasil riset, penguatan kolaborasi dalam pengembangan riset dan inovasi; 9. memaksimalkan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional.	

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi				
	Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
	dengan teknologi dan standar industri serta integrasi isu pangan dan pertanian berkelanjutan dalam kurikulum SMA dan SLB; 17. penguatan kerja sama DUDI bidang *agritech*, pangan, koperasi tani/nelayan dan pelaku UMKM serta perguruan tinggi pertanian; 18. peningkatan upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan (OPK) melalui pemetaan potensi, pelindungan dan pengembangan pengetahuan tradisional, adat istiadat, ritus dan lembaga/masyarakat adat terkait sektor dan subsektor pertanian; pemanfaatan karya budaya untuk promosi sekaligus edukasi pangan lokal; pemanfaatan pengetahuan tradisional dan teknologi tradisional untuk produksi pangan lokal; 19. mendorong gaya hidup bugar dan konsumsi pangan bergizi, mendorong *sport tourism* sebagai penggerak ekonomi pangan lokal; 20. mendorong peningkatan peran perpustakaan desa sebagai salah pusat belajar masyarakat khususnya terkait bidang pertanian dan pangan; 21. peningkatan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif agraris Jawa Tengah; 22. mendorong lahirnya wirausaha muda di bidang pangan melalui program inkubasi bisnis, pelatihan pengolahan hasil, dan pemasaran digital produk pertanian.	15. peningkatan peran BUMDes dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam mendukung pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah; 16. mendorong kerja sama pengembangan potensi pariwisata desa dan peningkatan pengembangan kawasan perdesaan; 17. penguatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SLB dan SMK bidang keahlian layanan pariwisata, seni, kriya, kuliner, tata boga, busana, perhotelan, dan perbankan syariah termasuk ekonomi kreatif dan kewirausahaan halal; 18. revitalisasi kurikulum SMK seni, kriya, kuliner, tata boga, busana, perhotelan, layanan pariwisata dan perbankan syariah selaras dengan kebutuhan usaha dan industri; 19. penguatan integrasi tema pariwisata, budaya, ekonomi kreatif dan syariah dalam kurikulum SMA dan SLB berbasis *project* integratif dan lintas; 20. penguatan kemitraan DUDI melalui sinkronisasi kompetensi dan penyusunan (*Memorandum of Agreement*) MoA untuk kegiatan spesifik antara lain dengan perusahaan atau hotel syariah, restoran halal, biro perjalanan haji-umrah, bank syariah, UMKM kriya lokal, desa wisata halal serta perguruan tinggi termasuk dukungan program magang dan sertifikasi halal; 21. peningkatan upaya pelestarian dan pemanfaatan karya budaya dan cagar budaya sebagai salah satu daya tarik wisata melalui	14. pengembangan integrasi kurikulum SMA, SMK dan SLB berbasis lingkungan dengan *project based learning* inovatif dan kolaboratif; 15. peningkatan upaya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya berbasis potensi lokal desa; 16. peningkatan *sport tourism* berbasis potensi desa, dan festival olahraga desa; 17. peningkatan literasi masyarakat melalui penguatan komunitas literasi berbasis desa; 18. mengoptimalkan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif daerah berbasis potensi desa.		

Tujuan/Sasaran	Penahapan Arah Kebijakan dan Strategi				
	Tahap I (2026)	**Tahap II (2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
		pemetaan karya budaya dan cagar budaya potensial, pemeliharaan prasarana sarana kebudayaan, peningkatan upaya diplomasi budaya tingkat nasional/ internasional, serta penguatan SDM/lembaga/komunitas kebudayaan sebagai agen diplomasi budaya; 22. penguatan *event* olahraga pariwisata ramah lingkungan dan berkelanjutan; 23. perluasan literasi berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan dan literasi ekonomi berbasis syariah melalui pelibatan pemangku kepentingan; 24. mengoptimalkan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif berbasis kelestarian lingkungan hidup berkelanjutan; 25. peningkatan partisipasi pemuda dalam bidang pariwisata, wisata kreatif, membangun *startup* berbasis syariah.			

3.3. PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.3.1. Program Prioritas Gubernur Dan Wakil Gubernur

Dalam mewujudkan visi, dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029, Gubernur dan Wakil Gubernur menetapkan kebijakan 11 program prioritas, 22 program intervensi, 61 program aksi, dan 42 program taktis. Seluruh program tersebut berjumlah 136, yang kemudian dijabarkan secara lebih implementatif dalam bentuk strategi, kegiatan, dan aktivitas yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Seluruh program tersebut juga didukung oleh banyak pihak atau *stakeholder* termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.Program tersebut kemudian secara teknokratis menjadi **"136 Program Daerah"** yang harus dilaksanakan selama lima tahun ke depan dalam rangka pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penjabaran 136 Program Daerah diuraikan sebagai berikut.

A. Program Prioritas merupakan program unggulan yang menjadi penopang utama keberhasilan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Program prioritas sebagai berikut:

1. Melahirkan pemerintahan yang *Good Clear Government dan Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN dan perangkat desa;
2. Pesantren Obah melalui penambahan dana pengembangan pesantren;
3. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim;
4. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan *go* internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana;
5. Pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional;
6. Penanggulangan bencana dan keberlanjutan lingkungan melalui Mageri Segoro untuk mengamankan garis pantai;
7. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan *day care* untuk buruh di kawasan industri;
8. Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan;
9. Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin;
10. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja;
11. Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, guru, santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi.

B. Program Intervensi

Program Intervensi merupakan program yang melibatkan berbagai organisasi pemerintah daerah (memungkinkan kolaborasi bersama pemerintah pusat) yang memiliki ruang lingkup dan dampak multidimensional sehingga mampu menjadi penopang keberhasilan pembangunan daerah. Program Intervensi meliputi:

1. Integrasi aplikasi pelayanan ke dalam "*Jateng Ngopeni*";
2. *Smart response* diwujudkan dengan *Call Center* 24 jam "*Jateng Nglakoni*";
3. Kantor Gubernur Rumah Rakyat;
4. Digitalisasi manajemen arsip;
5. Penetapan Zona Integritas/Zona Anti Korupsi di OPD, BUMD, BLUD;
6. Penguatan APIP dengan menambah anggaran dan personil untuk pengawasan mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat desa;
7. Riset potensi daerah secara berkala berbasis potensi wilayah;
8. Pembentukan Kecamatan Berdaya (perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif, dan *sport center*);
9. Membangun 1.000 desa/kampung wisata baru;
10. Pengembangan destinasi wisata alam, budaya dan religi berdasarkan potensi wilayah;
11. Pengembangan destinasi wisata berbasis global dengan prioritas pengembangan Kawasan Borobudur, Kopeng, Rawa Pening;
12. Mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Mas sebagai sentra ekonomi Jawa;
13. Pengembangan kebudayaan dan cagar budaya untuk pertumbuhan ekonomi serta dukungan terhadap kesejahteraan budayawan lokal;
14. Penguatan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
15. Percepatan penanganan *stunting* melalui pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil;
16. Menyediakan paket pendidikan gratis (seragam, buku pembelajaran, akses internet);
17. Peningkatan bantuan keuangan desa;
18. Jambanisasi 100%;
19. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari;
20. Program asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida;
21. Mendorong pembangunan sistem desalinasi khususnya pada Pesisir Utara dan Selatan Jawa Tengah untuk memenuhi suplai air bersih dan mengatasi dampak eksploitasi air tanah (Pekalongan, Demak dan Semarang);
22. Mengembangkan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru.

C. Program Aksi

Program Aksi merupakan program strategis untuk menopang keberhasilan program prioritas yang dilaksanakan oleh satu organisasi perangkat daerah, meliputi:

1. Mengefektifkan kembali Bakorwil sebagai pusat pelayanan publik berbasis wilayah;

2. Pelatihan dan pendidikan anti korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan penyelenggara pemerintah desa bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum, Ombudsman, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK;
3. Mendorong pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di setiap kecamatan;
4. Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan, dan anak;
5. Memastikan lulusan pesantren dapat melakukan penyetaraan ijazah dan mendapatkan pengakuan untuk mudah kerja dan setara lulusan sekolah negeri dan swasta;
6. Pendampingan sertifikasi halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara gratis;
7. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan;
8. Pelatihan 1.000 konten kreator desa wisata;
9. Pemenuhan dan peningkatan akses internet di desa (102 desa *blankspot*);
10. Subsidi modal dan pendampingan UMKM 1 RT 1 kelompok UMKM;
11. Mendorong pembangunan rumah apung kawasan pesisir;
12. Peningkatan kualitas jalan provinsi dengan lebar 7 meter;
13. Modernisasi Trans Jateng (armada bus, sistem, dan halte);
14. Memastikan integrasi jaringan untuk menjamin konektivitas Trans Jateng dengan Trans Kabupaten/Kota berbasis 10 Wilayah Pengembangan Aglomerasi;
15. Optimalisasi pelabuhan dan bandara perintis di Jawa Tengah sebagai generator aktivitas perekonomian global;
16. Mendorong pembangunan *Giant Sea Wall* (tanggul laut untuk mencegah abrasi, banjir rob dan sedimentasi tanah);
17. Normalisasi bantaran muara untuk kapal tradisional;
18. Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dengan mendorong revitalisasi jalur kereta api;
19. Menyiapkan sistem irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak, Pati);
20. Penegakan regulasi daerah terkait air tanah lebih intensif melalui evaluasi setiap 3 bulan sekali;
21. Insentif bagi investor yang menerapkan industri ramah lingkungan;
22. Mendorong pengembangan kawasan industri berorientasi lingkungan (industri hijau);
23. Pemulihan DAS Serayu dan Bengawan Solo dalam mendukung potensi ekonomi sungai lainnya;
24. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa;
25. Penghapusan hutang petani, nelayan, UMKM;
26. Penurunan tarif Trans Jateng menjadi Rp1.000 untuk buruh, lansia, veteran, dan pelajar;
27. Melakukan tata kelola pertanian modern berbasis *integrated farming* dengan menggunakan teknologi dalam pengolahan pertanian;
28. Pendirian Koperasi Buruh;
29. Promosi budaya lokal melalui kegiatan pameran budaya internasional melalui kerja sama dengan diaspora;

30. Mengusulkan lagu Lir Ilir sebagai warisan budaya ke UNESCO;
31. Melanjutkan program bahasa daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
32. Penguatan dan promosi moderasi beragama bagi tokoh agama ke luar negeri;
33. Mendorong penguatan forum kerukunan antarumat beragama dan forum pembauran kebangsaan;
34. Spesialis keliling (Spelling), cek kesehatan gratis (CKG), puskesmas pembantu, dan pelayanan kesehatan di setiap desa;
35. Mendorong penyediaan 1 dokter 1 bidan setiap puskesmas pembantu;
36. Pelayanan tanpa antri lansia dan klinik geriatri, ibu hamil, dan disabilitas, pensiunan di rumah sakit;
37. *Event* olahraga memancing terbesar Asia;
38. Petani milenial gajian;
39. Mendukung dan menjadikan kegiatan tarkam (pertandingan antar kampung) masuk ke dalam kalender olahraga provinsi;
40. BOSDa Madrasah Aliyah;
41. Mendorong pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap kecamatan bekerja sama dengan pihak sekolah swasta;
42. Menyiapkan sistem pendidikan menengah untuk menciptakan kesesuaian pendidikan pra kerja;
43. Transformasi tata kelola tambang galian C;
44. Pengembangan investasi berbasis pada modal infrastruktur padat karya;
45. Penguatan tata kelola CSR untuk pembangunan daerah;
46. Pengembangan peternak lokal berbasis potensi melahirkan bibit ternak khas Jawa;
47. Pemanfaatan aset pemerintah daerah untuk PAD yang optimal;
48. Restrukturisasi proses bisnis dan tata kelola BUMD;
49. Peningkatan status Bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo menjadi bandara internasional;
50. Pengembangan *Sister Province*;
51. Membentuk satuan tugas pengamanan data digital "*Cyber Security* Jawa Tengah' dengan memberdayakan ahli IT di Jawa Tengah dan siswa SMK;
52. Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa;
53. Mendorong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata budaya di wilayah Pantai Selatan Jawa (Banyumas dan Kebumen) dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Desa;
54. Pembentukan badan aglomerasi wilayah pembangunan di Jawa Tengah;
55. Meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga;
56. Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan;
57. Menyusun peraturan daerah dan rencana aksi daerah tentang ekonomi hijau;
58. Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana;
59. Program kerja sama Forkopimda;
60. Pengembangan pertanian yang terintegrasi;
61. Pemberdayaan masyarakat hutan sosial.

D. Program Taktis

Program taktis merupakan bagian dari perencanaan strategis yang lebih rinci, cepat dan jangka pendek, meliputi:

1. Peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas SAMSAT dalam mendukung pelayanan publik prima;
2. Mendorong terciptanya pengarusutamaan gender berkeadilan;
3. Penguatan anggaran dan SDM PPNS dalam penegakan peraturan daerah;
4. Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin;
5. Program ECO-PESANTREN yaitu pesantren olah sampah dan pesantren mandiri energi;
6. Mendorong Program Santri Preneur (Santri Pengusaha);
7. Peningkatan desa mandiri energi melalui pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya;
8. Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan;
9. BUMDes Berdaya (kepastian hukum dan bantuan modal usaha setiap BUMDes di Jawa Tengah);
10. Mendorong pembangunan SPAM Regional dan SPAM industri untuk penyediaan air bersih;
11. Revitalisasi embung;
12. Pendidikan perubahan iklim dan penanggulangan bencana untuk sekolah dan pesantren;
13. Penguatan BPBD dan tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat;
14. Hilirisasi produk unggulan dengan semangat ekonomi hijau;
15. Menghadirkan infrastruktur yang *carbon neutral*;
16. Pengembangan *urban farming* untuk pertanian kawasan perkotaan;
17. Penataan drainase dan pengendalian banjir terutama di Kota Semarang, Pekalongan, dan Kabupaten Demak;
18. Revitalisasi pasar tradisional yang terintegrasi berbasis digital;
19. Subsidi pangan murah;
20. Penguatan dan pembinaan *e-sport* Jawa Tengah;
21. Perlindungan hak buruh melalui fasilitasi peraturan gubernur tentang payung hukum ketenagakerjaan;
22. Penyediaan benih yang berkualitas;
23. Penyediaan alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian;
24. Pegawai BUMD dan BLUD di Jawa Tengah sebanyak 3 persen dapat menerima penyandang disabilitas;
25. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekspresi budaya;
26. Operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok;
27. *Pap smear* gratis (skrining *Ca Serviks*);
28. Peningkatan operasional kader posyandu;
29. Peningkatan kualitas hidup lansia;
30. Mendukung Jawa Tengah bebas peredaran narkoba;
31. Perlindungan dan fasilitasi ODGJ melalui RSJD Jawa Tengah;
32. Penanganan *bullying* yang tuntas menuju Jawa Tengah *Zero Bullying* melalui pembentukan TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan)

satuan pendidikan dan satuan tugas di seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
33. Peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Luar Biasa;
34. Pembangunan kolaboratif mendorong terjalinnya partisipasi berbasis *hexahelix* (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, media, dan lembaga keuangan);
35. Regulasi pengembangan kawasan industri;
36. Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota serta dunia usaha;
37. Penguatan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah;
38. Fasilitas rumah susun untuk MBR bekerja sama dengan BUMN, BUMD, dan swasta;
39. Membangun jaringan pasar (ekspor-supermarket-*market place*) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BUMD (*e-commerce*);
40. Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pembinaan olahraga seperti sponsor acara olahraga, pembangunan fasilitas olahraga melalui pelaksanaan program "PERUSAHAAN ASUH";
41. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pengembangan tempat pembuangan sampah regional;
42. Pemberdayaan masyarakat pesisir tambak ikan.

Dalam rangka pelaksanaan Program Daerah tersebut maka dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Sebanyak 35 Program Daerah didelegasikan kepada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah untuk diselaraskan dengan program daerah kabupaten/kota dan ditetapkan sebagai **"Program Delegasi"** Provinsi ke Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Program Delegasi tersebut yaitu sebagai berikut:

1. PP. Melahirkan pemerintahan yang *Good Clear Government* dan *Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN dan perangkat desa;
2. PP. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim;
3. PP. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan *go* internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana;
4. PP. Pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional;
5. PP. Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan;
6. PP. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja;
7. PI. Pembentukan Kecamatan Berdaya (perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan *sport center*);
8. PI. Membangun 1.000 desa/kampung wisata baru;
9. PI. Mengembangkan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru;

10. PA. Pelatihan dan pendidikan anti korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan penyelenggara pemerintah desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, Ombudsman, Kepolisian, Kejaksanaan, BPK dan KPK;
11. PA. Spesialis keliling (Spelling), puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa;
12. PA. Mendorong pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap kecamatan bekerjasama dengan pihak sekolah swasta;
13. PA. Mendorong pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di setiap kecamatan;
14. PA. Mendorong penyediaan 1 dokter, 1 bidan setiap puskesmas pembantu;
15. PA. Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak;
16. PA. Pendampingan sertifikasi halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara gratis;
17. PA. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan;
18. PA. Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata;
19. PA. Subsidi modal dan pendampingan UMKM 1 RT 1 kelompok UMKM;
20. PA. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa;
21. PA. Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa;
22. PA. Meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga;
23. PA. Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan;
24. PA. Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana;
25. PT. Pemberdayaan masyarakat pesisir tambak ikan nila;
26. PT. BUMDes Berdaya (kepastian hukum dan bantuan modal usaha setiap BUMDes di Jawa Tengah);
27. PT. Penguatan BPBD dan tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat;
28. PT. Cek kesehatan gratis;
29. PT. Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin;
30. PT. Peningkatan desa mandiri energi melalui pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya;
31. PT. Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan;
32. PT. Hilirisasi produk unggulan dengan semangat ekonomi hijau;
33. PA. Mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan;
34. PT. Peningkatan operasional kader posyandu;
35. PT. Peningkatan kualitas hidup lansia.

Tabel 3.5.
Penjabaran Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Daerah	Program Daerah (Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis)	Program Prioritas Pembangunan Daerah
1	2	3	4
Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan	**- Tingkat Kemiskinan - PDRB per Kapita - Indeks Reformasi Birokrasi**		
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	**- Indeks Integritas Nasional - Indeks Demokrasi Indonesia - Otonomi Fiskal Daerah**		
		PP. Melahirkan pemerintahan yang *Good Clear Government* dan *Collaborative Governance* melalui peningkatan kesejahteraan, profesionalitas dan kualitas ASN dan perangkat desa	
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		PI. Integrasi aplikasi pelayanan ke dalam "*Jateng Ngopeni*"	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		PI. *Smart response* diwujudkan dengan *Call Center* 24 jam "*Jateng Nglakoni*"	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		PI. Kantor Gubernur Rumah Rakyat	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		PI. Digitalisasi manajemen arsip	
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Daerah	Program Daerah (Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis)	Program Prioritas Pembangunan Daerah
1	2	3	4
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		PA. Mengefektifkan kembali Bakorwil sebagai pusat pelayanan publik berbasis wilayah	
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
		PA. Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		PA. Pengembangan *sister province*	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
		PA. Membentuk satuan tugas pengamanan data digital "*Cyber Security* Jawa Tengah" dengan memberdayakan ahli IT di Jawa Tengah dan siswa SMK	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
		PA. Program kerja sama Forkopimda	
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
		PT. Peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas SAMSAT dalam mendukung pelayanan publik prima	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		PT. Penguatan anggaran dan SDM PPNS dalam penegakan peraturan daerah	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		PT. Pembangunan kolaboratif mendorong terjalinnya Partisipasi berbasis *hexahelix* (akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, media, dan lembaga keuangan)	
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Daerah	Program Daerah (Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis)	Program Prioritas Pembangunan Daerah
1	2	3	4
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
		PT. Penguatan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
		PI. Penetapan Zona Integritas / Zona Anti Korupsi di OPD, BUMD, BLUD	
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
		PI. Penguatan APIP dengan menambah anggaran dan personil untuk pengawasan mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat desa	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		PA. Pelatihan dan pendidikan anti korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan penyelenggara pemerintah desa bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum, Ombudsman, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		PA. Transformasi tata kelola tambang galian C	
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
		PP. Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
		PA. Mendorong pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di setiap kecamatan	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
		PA. Mengusulkan lagu Lir Ilir sebagai warisan budaya ke UNESCO	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Daerah	Program Daerah (Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis)	Program Prioritas Pembangunan Daerah
1	2	3	4
		PA. Melanjutkan program bahasa daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		PA. Penguatan dan promosi moderasi beragama bagi tokoh agama ke luar negeri	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
		PA. Mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan	
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
		PT. Mendorong terciptanya pengarusutamaan gender yang berkeadilan	
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
		PT. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekspresi budaya	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
		PI. Riset potensi daerah secara berkala berbasis potensi wilayah	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
		PA. Pemanfaatan aset pemerintah daerah untuk PAD yang optimal	
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		PA. Restrukturisasi proses bisnis dan tata kelola BUMD	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		PT. Peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas SAMSAT dalam mendukung pelayanan publik prima	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan	**- Pertumbuhan Ekonomi - Inflasi - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**		
		PP. Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Daerah	Program Daerah (Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis)	Program Prioritas Pembangunan Daerah
1	2	3	4
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
		PP. Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di kawasan industri	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
		PP. Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
		PI. Pembentukan Kecamatan Berdaya (perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan *sport center*)	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		PI. Membangun 1.000 desa/kampung wisata baru	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		PI. Pengembangan destinasi wisata alam, budaya dan religi berdasarkan potensi wilayah	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
		PI. Pengembangan destinasi wisata berbasis global dengan prioritas pengembangan Kawasan Borobudur, Kopeng, Rawa Pening	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Daerah	Program Daerah (Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis)	Program Prioritas Pembangunan Daerah
1	2	3	4
		PI. Mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Mas sebagai sentra ekonomi Jawa	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
		PI. Pengembangan kebudayaan dan cagar budaya untuk pertumbuhan ekonomi serta dukungan terhadap kesejahteraan budayawan lokal	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
		PA. Pendampingan sertifikasi halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara gratis	
			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
		PA. Pemenuhan dan peningkatan akses internet di desa (102 desa *blankspot*)	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
		PA. Subsidi modal dan pendampingan UMKM 1 RT 1 kelompok UMKM	
			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
		PA. Peningkatan kualitas jalan provinsi dengan lebar 7 meter	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		PA. Modernisasi Trans Jateng (armada bus, sistem, dan halte)	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		PA. Memastikan integrasi jaringan untuk menjamin Konektivitas Trans Jateng dengan Trans Kabupaten/Kota berbasis 10 Wilayah Pengembangan Aglomerasi	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Daerah	Program Daerah (Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis)	Program Prioritas Pembangunan Daerah
1	2	3	4
		PA. Optimalisasi pelabuhan dan bandara perintis di Jawa Tengah sebagai generator aktivitas perekonomian global	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		PA. Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dengan mendorong revitalisasi jalur kereta api	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
		PA. Insentif bagi investor yang menerapkan industri ramah lingkungan	
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
		PA. Mendorong pengembangan kawasan industri berorientasi lingkungan (industri hijau)	
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
		PA. Pemulihan DAS Serayu dan Bengawan Solo dalam mendukung potensi ekonomi sungai lainnya	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
		PA. Pengembangan pertanian yang terintegrasi	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		PA. Melakukan tata kelola pertanian modern berbasis *integrated farming* dengan menggunakan teknologi dalam pengolahan pertanian	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		PA. Pendirian Koperasi Buruh	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
		PA. Promosi budaya lokal melalui kegiatan pameran budaya internasional melalui kerja sama dengan diaspora	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
		PA. *Event* olahraga memancing terbesar di Asia	
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
		PA. Mendukung dan menjadikan kegiatan tarkam (pertandingan antar kampung) masuk ke dalam kalender olahraga provinsi	
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Daerah	Program Daerah (Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis)	Program Prioritas Pembangunan Daerah
1	2	3	4
		PA. Pengembangan investasi berbasis padat modal infrastruktur padat karya	
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
		PA. Pengembangan peternak lokal berbasis potensi melahirkan bibit ternak khas Jawa	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		PA. Peningkatan status bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo menjadi bandara internasional	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		PA. Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
		PA. Mendorong Kawasan Ekonomi khusus (KEK) pariwisata budaya di wilayah Pantai Selatan Jawa (Banyumas dan kebumen) dengan Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Desa	
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
		PA. Pembentukan badan aglomerasi wilayah pembangunan di Jawa Tengah	
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI
		PA. Menyusun peraturan daerah dan rencana aksi daerah tentang ekonomi hijau	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		PA. Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
		PT. Program ECO-PESANTREN yaitu pesantren olah sampah dan pesantren mandiri energi	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
		PT. Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Daerah	Program Daerah (Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis)	Program Prioritas Pembangunan Daerah
1	2	3	4
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
		PT. BUMDes Berdaya (kepastian hukum dan bantuan modal usaha setiap BUMDes di Jawa Tengah)	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		PT. Revitalisasi embung	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		PT. Hilirisasi produk unggulan dengan semangat ekonomi hijau	
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
		PT. Pengembangan *urban farming* untuk pertanian kawasan perkotaan	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		PT. Revitalisasi pasar tradisional yang terintegrasi berbasis digital	
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
		PT. Penguatan dan pembinaan *e-sport* Jawa Tengah	
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
		PT. Penyediaan benih yang berkualitas	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Daerah	Program Daerah (Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis)	Program Prioritas Pembangunan Daerah
1	2	3	4
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
		PT. Penyediaan alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		PT. Regulasi pengembangan kawasan industri	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
		PT. Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota serta dunia usaha	
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
		PT. Membangun jaringan pasar (ekspor-supermarket-*marketplace*) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BUMD (*e-commerce*)	
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
		PT. Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam pembinaan olahraga, seperti sponsor acara olahraga, pembangunan fasilitas olahraga melalui pelaksanaan program “PERUSAHAAN ASUH”	
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
		PP. Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan *go* internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
		PP. Pembangunan infrastruktur melalui permukiman layak huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
		PI. Peningkatan bantuan keuangan desa	

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Daerah	Program Daerah (Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis)	Program Prioritas Pembangunan Daerah
1	2	3	4
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		PI. Jambanisasi 100%	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		PI. Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		PI. Program asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		PA. Mendorong pembangunan rumah apung kawasan pesisir	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
		PA. Normalisasi bantaran muara untuk kapal tradisional	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
		PA. Menyiapkan sistem irigasi terintegrasi dan pompanisasi khusus daerah prioritas rawan kekeringan (Grobogan, Demak dan Pati)	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		PA. Penghapusan hutang petani, nelayan, UMKM	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
		PA. Penurunan tarif Trans Jateng menjadi Rp.1000 untuk buruh, lansia, veteran, dan pelajar	
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
		PA. Petani milenial gajian	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		PA. Penguatan tata kelola CSR untuk pembangunan daerah	
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
		PA. Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
		PT. Perlindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Daerah	Program Daerah (Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis)	Program Prioritas Pembangunan Daerah
1	2	3	4
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
		PT. Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya	
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
		PT. Mendorong pembangunan SPAM Regional dan SPAM industri untuk penyediaan air bersih	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		PT. Pendidikan perubahan iklim dan penanggulangan bencana untuk sekolah dan pesantren	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
		PT. Penguatan BPBD dan tagana dalam penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat	
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
		PT. Penataan drainase dan pengendalian banjir terutama di Kota Semarang, Pekalongan dan Kabupaten Demak	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		PT. Fasilitasi rumah susun untuk MBR bekerja sama dengan BUMN, BUMD, dan swasta	
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
		PP. Penanggulangan bencana dan keberlanjutan lingkungan melalui Mageri Segoro untuk mengamankan garis pantai	
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
		PI. Mendorong pembangunan sistem desalinasi khususnya pada Pesisir Utara dan Selatan Jawa Tengah untuk memenuhi suplai air bersih dan mengatasi dampak eksploitasi air tanah (Pekalongan, Demak dan Semarang)	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
		PA. Penegakan regulasi daerah terkait air tanah lebih intensif melalui evaluasi setiap 3 bulan sekali	
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
		PA. Mendorong pembangunan *Giant Sea Wall* (tanggul laut untuk mencegah abrasi, banjir rob dan sedimentasi tanah)	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Daerah	Program Daerah (Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis)	Program Prioritas Pembangunan Daerah
1	2	3	4
		PA. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa	
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
		PT. Menghadirkan infrastruktur yang *carbon neutral*	
			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP
		PT. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pengembangan tempat pembuangan sampah regional	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
		PT. Operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok	
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING
		PT. Subsidi pangan murah	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
		PI. Mengembangkan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru	
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	**- Indeks Modal Manusia - Tingkat Pengangguran Terbuka**		
		PP. Penguatan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
		PA. Memastikan lulusan pesantren dapat melakukan Penyetaraan Ijazah dan mendapatkan pengakuan untuk mudah kerja dan setara lulusan sekolah negeri dan swasta	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
		PA. Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Daerah	Program Daerah (Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis)	Program Prioritas Pembangunan Daerah
1	2	3	4
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
		PA. Menyiapkan sistem pendidikan menengah untuk menciptakan kesesuaian pendidikan pra-kerja	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
		PA. Pemberdayaan masyarakat hutan sosial	
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
		PT. Mendorong Program Santri Preneur (Santri Pengusaha)	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
		PT. Perlindungan hak buruh melalui fasilitasi peraturan gubernur tentang payung hukum ketenagakerjaan	
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
		PT. Pegawai BUMD dan BLUD di Jawa Tengah sebanyak 3 persen dapat menerima penyandang disabilitas	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		PT. Pemberdayaan masyarakat pesisir tambak ikan nila	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
		PP. Pesantren Obah melalui penambahan dana pengembangan pesantren	
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
		PP. Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		PP. Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, guru, santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Daerah	Program Daerah (Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis)	Program Prioritas Pembangunan Daerah
1	2	3	4
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
		PI. Percepatan penanganan *stunting* melalui pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		PI. Menyediakan paket pendidikan gratis (seragam, buku pembelajaran, akses internet)	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		PA. Spesialis keliling (Spelling), cek kesehatan gratis, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		PA. Mendorong penyediaan 1 dokter, 1 bidan setiap puskesmas pembantu	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
		PA. Pelayanan tanpa antri lansia dan klinik geriatri, ibu hamil dan disabilitas, pensiunan di rumah sakit	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		PA. BOSDa Madrasah Aliyah	
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
		PA. Mendorong pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerja sama dengan pihak sekolah swasta	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
		PA. Meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan manajemen olahraga	
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
		PA. Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		PT. *Pap smear* gratis (skrining *Ca serviks*)	

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Daerah	Program Daerah (Program Prioritas/Intervensi/Aksi/Taktis)	Program Prioritas Pembangunan Daerah
1	2	3	4
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		PT. Peningkatan operasional kader posyandu	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
		PT. Peningkatan kualitas hidup lansia	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		PT. Mendukung Jawa Tengah bebas peredaran narkoba	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
		PT. Perlindungan dan fasilitasi ODGJ melalui RSJD Jawa Tengah	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		PT. Penanganan *bullying* yang tuntas menuju Jawa Tengah *Zero Bullying* melalui pembentukan TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) satuan pendidikan dan satuan tugas di seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		PT. Peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Luar Biasa	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

3.3.2. Dukungan dan Keselarasan Rencana Pembangunan Daerah Terhadap Rencana Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2029-2029 disusun dengan tetap memperhatikan kebijakan dalam RPJMN Tahun 2025-2029. RPJMD Tahun 2025-2029 disusun juga dalam rangka menjaga keselarasan dengan kebijakan pembangunan nasional serta mendukung implementasi rencana pembangunan nasional di daerah, dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Keselarasan kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dapat digambarkan dengan keselarasan visi misi sebagai berikut.

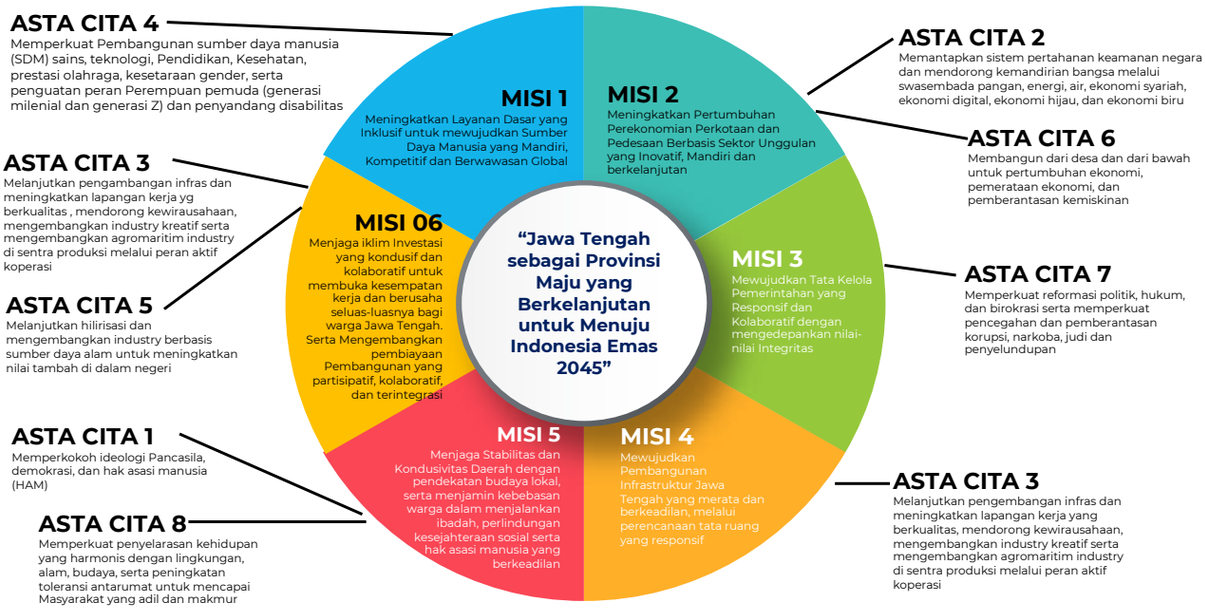

Gambar 3.6.
Keterkaitan Visi Misi Daerah Dengan Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029

Program prioritas pembangunan daerah Jawa Tengah juga mendukung kebijakan dan rencana pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan. Dukungan program prioritas daerah Jawa Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3.6.
Dukungan Program Daerah Jawa Tengah
Terhadap Asta Cita/Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2025-2029

No	RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029
	Prioritas Nasional/ Asta Cita	Program Daerah
1	Asta Cita 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	• Moderasi beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, Pendidikan dan pelatihan; • Mendorong terciptanya pengarusutamaan gender yang berkeadilan; • Penguatan dan promosi moderasi beragama bagi tokoh agama ke luar negeri; • Mendorong penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran kebangsaan;

No	RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029
	Prioritas Nasional/ Asta Cita	**Program Daerah**
		• Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak.
2	Asta Cita 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	• Program Kerjasama Forkopimda; • Pendidikan Perubahan Iklim dan penanggulangan bencana untuk sekolah dan pesantren; • Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat; • Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana; • Penyediaan benih yang berkualitas; • Melakukan Tata Kelola Pertanian Modern berbasis Integrated Farming dengan menggunakan Teknologi dalam Pengolahan Pertanian; • Penyediaan Alsintan di daerah yang memiliki potensi pertanian; • Revitalisasi embung; • Mendorong Pembangunan SPAM Regional dan SPAM Industri untuk Penyediaan Air Bersih; • Mendorong Pembangunan Sistem Desalinasi; • Normalisasi bantaran muara untuk kapal tradisional; • Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri; • Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila; • Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pengembangan tempat pembuangan sampah regional; • Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa; • Program ECO-PESANTREN yaitu pesantren olah sampah dan pesantren mandiri energi; • Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau; • Hilirisasi Produk Unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau; • Revitalisasi Pasar Tradisional yang terintegrasi berbasis Digital; • Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim.
3	Asta Cita 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	• Pengembangan Destinasi Wisata alam, budaya dan religi berdasarkan potensi wilayah;

No	RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029
	Prioritas Nasional/ Asta Cita	**Program Daerah**
	mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	• Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru; • Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis; • Pemberdayaan Masyarakat Hutan Sosial; • Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa; • Pendirian Koperasi Buruh; • Penguatan Pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); • Menyiapkan Sistem Pendidikan Menengah untuk menciptakan Kesesuaian Pendidikan Pra-Kerja; • Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM; • Mendorong Program Santri Preneur (Santri Pengusaha); • Peningkatan kualitas jalan provinsi dengan lebar 7 meter; • Modernisasi Trans Jateng (armada bus, sistem, dan halte); • Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dengan Mendorong revitalisasi jalur kereta api; • Pemulihan DAS Serayu dan Bengawan Solo dalam mendukung Potensi Ekonomi Sungai lainnya; • Optimalisasi Pelabuhan dan Bandara Perintis di Jawa Tengah sebagai Generator Aktivitas Perekonomian Global; • Mendorong pengembangan pelabuhan Tanjung Mas sebagai sentra ekonomi Jawa; • Peningkatan status bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo menjadi bandara internasional
4	Asta Cita 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	• Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, Guru, Santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi; • Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan; • Peningkatan kualitas pendidikan Sekolah Luar Biasa; • Pesantren Obah melalui Penambahan Dana Pengembangan Pesantren; • BOSDa Madrasah Aliyah;

No	RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029
	Prioritas Nasional/ Asta Cita	**Program Daerah**
		• Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta; • Menyediakan Paket Pendidikan Gratis (Seragam, Buku Pembelajaran, Akses Internet) • Pemenuhan dan Peningkatan akses internet di desa (102 desa blankspot); • Pelayanan kesehatan yang paripurna melalui asuransi kesehatan gratis bagi warga miskin; • Spesialis keliling (Spelling), puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa; • Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu; • Percepatan penanganan stunting melalui Pemberian suplemen dan pemenuhan gizi bagi balita dan ibu hamil; • Peningkatan kualitas hidup lansia; • Pelayanan tanpa Antri Lansia dan Klinik Geriatri, Ibu hamil dan Disabilitas, Pensiunan di rumah sakit; • Cek Kesehatan gratis; • Pap smear gratis (skrining Ca serviks); • Peningkatan operasional kader Posyandu; • Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga. • Penanganan Bullying yang tuntas menuju Jawa Tengah Zero Bullying melalui pembentukan TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) Satuan Pendidikan dan Satuan Tugas di seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
5	Asta Cita 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	• Membangun jaringan pasar (ekspor-supermarket-marketplace) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BUMD (E-Commerce); • Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota serta Dunia Usaha; • Regulasi Pengembangan kawasan industri; • Insentif bagi investor yang menerapkan industri ramah lingkungan. • Mendorong Pengembangan Kawasan Industri berorientasi lingkungan (industri hijau);
6	Asta Cita 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	• Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional;

No	RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029
	Prioritas Nasional/ Asta Cita	**Program Daerah**
		• Jambanisasi 100%; • Mendorong Pembangunan Rumah Apung Kawasan Pesisir; • Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center); • Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana; • Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan biogas, hidro, maupun tenaga surya
7	Asta Cita 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	• Melahirkan Pemerintahan yang Good Clear Government dan Collaborative Governance melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa; • Smart Response diwujudkan dengan Call Center 24 jam “Jateng Nglakoni”; • Kantor Gubernur Rumah Rakyat; • Peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas SAMSAT dalam mendukung Pelayanan Publik Prima; • Penetapan Zona Integritas / Zona Anti Korupsi di OPD, BUMD, BLUD; • Transformasi Tata Kelola Tambang Galian C; • Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak; • Penguatan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah; • Pembangunan Kolaboratif mendorong terjalinnya Partisipasi berbasis Hexahelix (Akademisi, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, Media, dan lembaga keuangan); • Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksanaan, BPK dan KPK. • Membentuk satuan tugas pengamanan data digital “Cyber Security Jawa Tengah” dengan memberdayakan ahli IT di Jawa Tengah dan siswa SMK; • Mendukung Jawa Tengah bebas Peredaran Narkoba.
8	Asta Cita 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan,	• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekspresi budaya;

No	RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029
	Prioritas Nasional/ Asta Cita	**Program Daerah**
	alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	• Melanjutkan program bahasa daerah di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; • Pengembangan Kebudayaan dan cagar budaya untuk pertumbuhan ekonomi serta dukungan terhadap Kesejahteraan Budayawan Lokal; • Promosi budaya lokal melalui kegiatan Pameran Budaya Internasional melalui kerja sama dengan Diaspora; • Mengusulkan Lagu Lir Ilir sebagai warisan budaya ke UNESCO; • Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan

Selanjutnya, dukungan program prioritas daerah Jawa Tengah terhadap Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 3.7.
Dukungan Program Prioritas Daerah Jawa Tengah
Terhadap Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029

No	RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029
	Kegiatan Prioritas Utama	**Program Prioritas Daerah**
1	07 - Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	• Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Penanganan Kerawanan Pangan • Program Pengawasan Keamanan Pangan • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian • Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian • Program Penyuluhan Pertanian
2	10 - Pengembangan Pangan Hewani	• Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Penanganan Kerawanan Pangan • Program Pengawasan Keamanan Pangan • Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
3	11 - Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	• Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Penanganan Kerawanan Pangan • Program Pengawasan Keamanan Pangan • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian • Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

No	RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029
	Kegiatan Prioritas Utama	**Program Prioritas Daerah**
		• Program Penyuluhan Pertanian
4	09 - Pengembangan Pangan Akuatik (*Blue Food*)	• Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Penanganan Kerawanan Pangan • Program Pengawasan Keamanan Pangan • Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Program Pengelolaan Perikanan Tangkap • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya • Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan • Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
5	Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau	• Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) • Program Pengolahan Daerah Aliran Sungai (DAS)
6	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	• Program Pengelolaan Persampahan • Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
7	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	• Program Pengelolaan Pendidikan
8	Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru Meliputi Formasi, Rekrutmen, Pengangkatan dan Penempatan, Mobilitas, Pembinaan Karier Profesional (E.G. Pelatihan, InService Training), Perlindungan Hukum, dan Kesejahteraan Berbasis Kinerja	• Program Pengembangan Kurikulum • Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
9	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas (PHTC)	• Program Pengelolaan Pendidikan
10	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pengembangan Kurikulum • Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Program Pengembangan Kebudayaan • Program Pengembangan Kesenian Tradisional • Program Pembinaan Sejarah • Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya • Program Pengelolaan Permuseuman
11	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pengembangan Kurikulum • Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
12	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pengembangan Kurikulum • Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029
	Kegiatan Prioritas Utama	**Program Prioritas Daerah**
		• Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan • Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
13	Pencegahan dan Penurunan Stunting	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • Program Penanganan Kerawanan Pangan
14	Penurunan Kematian Ibu dan Anak	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
15	03 - Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
16	04 - Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
17	02 - Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
18	06 - Pengembangan Hilirisasi Kelapa	• Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Program Penanganan Kerawanan Pangan • Program Pengawasan Keamanan Pangan
19	16 - Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil	• Program Perencanaan dan Pembangunan Industri • Program Pengendalian Izin Usaha Industri • Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional • Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) • Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) • Program Hubungan Industrial
20	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	• Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
21	01 - Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	• Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • Program Pemasaran Pariwisata • Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual • Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

No	RPJMN Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029
	Kegiatan Prioritas Utama	**Program Prioritas Daerah**
22	06 - Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah • Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) • Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
23	05 - Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
24	01 - Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	• Program Pengembangan Perumahan • Program Kawasan Permukiman • Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) • Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman • Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional • Program Pengelolaan Persampahan
25	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	• Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi • Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik • Program Pengelolaan Aplikasi Informatika • Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
26	Penguatan Pers dan Media Massa yang BEJO's	• Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

3.3.3. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Penentuan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dilakukan selama tahun 2026-2030 dirumuskan dengan menggunakan pohon kinerja dan *cascading*. Penjabaran program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.8.
Penjabaran Tujuan dan Sasaran Daerah Dalam Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah

TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR KINERJA DAERAH	RENSTRA PERANGKAT DAERAH				SATUAN
	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	OUTCOME - PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
1	2	3	4	5	6
Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan					
Tingkat Kemiskinan					%
PDRB Per Kapita					Juta Rupiah
Indeks Reformasi Birokrasi					Angka
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah					
Indeks Integritas Nasional					Angka
Indeks Demokrasi Indonesia					Angka
Otonomi Fiskal Daerah					Angka
	Inspektorat				
	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian yang efektif *			Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi *	Angka
		Meningkatnya peran pengawasan dan pengendalian internal **		Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) **	Angka
				Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) **	Angka
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		
			Meningkatnya efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh APIP, APIP Lainnya, dan BPK yang selesai ditindaklanjuti	%
			Meningkatnya kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan tata kelola risiko dan kepatuhan bidang pengawasan khusus	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Khusus	%
			Meningkatnya kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan tata kelola risiko dan kepatuhan bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%
			Meningkatkan kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan tata kelola risiko dan kepatuhan bidang akuntabilitas keuangan daerah	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	%
			Meningkatkan kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan tata kelola risiko dan kepatuhan bidang pengawasan kinerja perangkat daerah	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	%
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pengawasan	Persentase ketercapaian realisasi pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan PKPT	%
			Meningkatnya kapabilitas pengelolaan pengendalian korupsi di perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan IEPK level 3	%
			Meningkatnya penguatan integritas di perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang memperoleh predikat Zona Integritas	%
			Meningkatnya penguatan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Persentase OPD yang mendapatkan nilai RB lebih dari (>) 80	%
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah *			Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) *	Angka
		Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah **		Skor Aspek Sinergi dalam IPPN **	Angka
		Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah **		Skor Aspek Kualitas Perencanaan dalam IPPN **	Angka
		Meningkatnya Keterhubungan Perencanaan Pembangunan Daerah **		Skor Aspek Keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja **	Angka
			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah dengan Nasional	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	%
			Meningkatnya Perencanaan daerah yang berbasis data, hasil evaluasi dan risiko	Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah	%
			Meningkatnya Keterhubungan Kinerja Perangkat Daerah dengan Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Keterhubungan Kinerja Perangkat Daerah Dengan Kinerja Daerah	%
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
			Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Sektoral Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kesesuaian Perencanaan pembangunan sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%
			Meningkatnya keterhubungan kinerja perangkat daerah mendukung kinerja daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Sektoral Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Sektoral Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%
			Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Sektoral Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Kesesuaian Perencanaan pembangunan sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%
			Meningkatnya keterhubungan kinerja perangkat daerah mendukung kinerja daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%

TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR KINERJA DAERAH	RENSTRA PERANGKAT DAERAH				SATUAN
	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	OUTCOME - PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
1	2	3	4	5	6
			Meningkatnya keterhubungan kinerja perangkat daerah mendukung kinerja daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%
			Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Sektoral Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Sektoral Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%
	Badan Riset dan Inovasi Daerah				
	Meningkatkan budaya kreatif dan inovatif *			Kapabilitas Inovasi *	Angka
		Meningkatnya kualitas riset dan inovasi **		Indeks Inovasi Daerah **	Angka
		Meningkatnya kebermanfaatan penelitian **		Persentase Rekomendasi Kebijakan yang ditindaklanjuti **	%
			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH		
			Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan pembangunan daerah	Persentase Pengkajian Kebijakan Pembangunan Riset dan Inovasi sesuai prioritas Daerah	%
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan riset dan inovasi sesuai target	Persentase Pelaksanaan Riset dan Inovasi sesuai target	%
			Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi sesuai target	Persentase Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi sesuai target	%
			Meningkatnya kapasitas SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi sesuai kebutuhan	Persentase Peningkatan SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi sesuai kebutuhan	%
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah				
	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah *			Persentase kualitas pengelolaan keuangan daerah *	%
		Terwujudnya tata kelola keuangan daerah sesuai kaidah perundang-undangan **		Persentase realisasi APBD **	%
				Persentase keselarasan antara dokumen penganggaran dengan dokumen perencanaan **	%
				Persentase laporan pertanggungjawaban yang disusun **	%
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		
			Tersusunnya dokumen belanja transfer APBD Provinsi tepat waktu	Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	%
			Tersusunnya dokumen APBD Provinsi Jawa Tengah	Persentase Penetapan APBD Provinsi Tepat Waktu	%
			Tersusunnya dokumen APBD Kabupaten/Kota tepat waktu	Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu	%
			Tersusunnya LKPD tepat waktu	Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	%
			Terlaksananya pengelolaan perbendaharaan yang profesional dan akuntabel	Persentase pengelolaan perbendaharaan yang profesional dan akuntabel	%
	Meningkatkan Tata Kelola Pengelolaan Aset Daerah *			Indek Pengelolaan Aset (IPA) *	Angka
		Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan BMD berdasarkan peraturan perundang-undangan **		Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola Aset sesuai peraturan perundang-undangan **	%
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
			Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Kenaikan Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif	%
			Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Tingkat Administrasi BMD yang Andal	%
			Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan	%
			Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Penurunan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD dalam rangka Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif	%
	Badan Pengelola Pendapatan Daerah				
	Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah *			Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah *	%
		Tumbuhnya Penerimaan Sektor Pajak Daerah **		Persentase Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah **	%
		Tumbuhnya Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain **		Persentase Pertumbuhan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain **	%
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		
			Tersusunnya Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah	Persentase Tersusunnya Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah	%
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
			Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	%
			Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah	%
			Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	%
			Terlaksananya Pengendalian Kinerja Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lain, dan Pemanfaatan Aset	Persentase Terlaksananya Pengendalian Kinerja Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lain, dan Pemanfaatan Aset	%
			Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah (di wilayah kerja UPPD)	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah (di wilayah kerja UPPD)	%
			Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah (di wilayah kerja UPPD)	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah (di wilayah kerja UPPD)	%
			Terlaksananya pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi	%
	Badan Kepegawaian Daerah				
	Mewujudkan Manajemen ASN Berdasarkan Meritokrasi *			Indeks Sistem Merit *	Angka
		Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN **		Indeks NSPK Manajemen ASN **	Angka

TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR KINERJA DAERAH	RENSTRA PERANGKAT DAERAH				SATUAN
	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	OUTCOME - PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
1	2	3	4	5	6
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		
			Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase peningkatan pengembangan kompetensi ASN	%
			Terpenuhinya Jabatan ASN sesuai dengan Manajemen Talenta	Persentase pemenuhan jabatan ASN melalui Manajemen Talenta	%
			Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan ASN	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	%
			Meningkatnya kinerja ASN	Persentase peningkatan kinerja ASN	%
			Terpenuhinya kebutuhan ASN sesuai formasi	Persentase pemenuhan ASN sesuai formasi	%
			Meningkatnya akurasi data dan dokumen kepegawaian ASN	Persentase peningkatan akurasi data dan dokumen kepegawaian ASN	%
			Terpetakannya kompetensi ASN	Persentase pemetaan kompetensi ASN	%
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah				
	Meningkatkan kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah *			Indeks Kompetensi ASN *	Angka
		Meningkatnya daya saing kompetensi sumber daya manusia ASN **		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya melalui pengembangan kompetensi **	%
		Terpenuhinya kebutuhan sertifikasi kompetensi ASN **		Persentase ASN yang tersertifikasi Kompetensi **	%
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
			Meningkatnya tingkat kelulusan pengembangan kompetensi teknis	Persentase Kelulusan Pengembangan Kompetensi Teknis	%
			Meningkatnya tingkat kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	%
			Meningkatnya tingkat kelulusan pengembangan kompetensi Manajerial, Sosial Kultural dan Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase tingkat kelulusan pengembangan kompetensi manajerial, sosiokultural dan pemerintahan dalam negeri	%
			Terjaganya kualitas mutu pelaksanaan pelatihan (Evaluasi Penyelenggaraan dan Pasca Pelatihan)	Indeks Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pelatihan (Evaluasi Penyelenggaraan dan Pasca Pelatihan)	Angka
			Terjaganya kualitas perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	%
			Terpenuhinya persentase ASN yang lulus Sertifikasi Kompetensi	Persentase ASN lulus dan tersertifikasi kompetensi	%
	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital				
	Meningkatkan Kapabilitas Teknologi Pemerintahan *			Indeks Pemerintahan Digital *	Angka
		Meningkatnya Pemanfaatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK **		Tingkat Kematangan Pemanfaatan Teknologi Digital **	Angka
		Meningkatnya Layanan Tata Kelola Data Terstruktur dan Sistematis **		Tingkat Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi **	Angka
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		
			Meningkatnya Kualitas Informasi Publik	Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik	Angka
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
			Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	Tingkat Pemenuhan Layanan Digital	%
			Meningkatnya Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Pemerintahan Digital	Tingkat Pembangunan/Pengembangan Aplikasi	%
			Meningkatnya Pemanfaatan Pusat Data Provinsi	Tingkat Pemanfaatan Pusat Data Provinsi	%
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		
			Meningkatnya kematangan SDI tingkat provinsi	Indeks Satu Data Indonesia	Indeks
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi	Tingkat Kematangan Keamanan Siber	Angka
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil *			Nilai Kinerja Dukcapil Provinsi Jawa Tengah *	Angka
		Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Jawa Tengah **		Persentase kepemilikan Dokumen Kependudukan di Jawa Tengah **	%
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		
			Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	%
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL		
			Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persentase penduduk usia 0-17 tahun yang terfasilitasi akta kelahiran	%
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		
			Meningkatnya fasilitasi pemanfaatan data kependudukan di Jawa Tengah	Persentase Institusi/Lembaga/ Badan Hukum yang difasilitasi pemanfaatan data kependudukan	%
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		
			Meningkatnya pengelolaan Profil Data Kependudukan Jawa Tengah	Persentase Profil Data Kependudukan Jawa Tengah yang tersusun	%
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
	Meningkatkan Kualitas penyelenggaraan kearsipan Provinsi Jawa Tengah *			Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah *	Angka
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan LKD Prov Jateng **		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi **	Angka
				Persentase arsip bersejarah yang ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB)	%
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan LKD Provinsi, Perangkat Daerah dan LKD Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/ kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	%
			Meningkatnya Kelestarian Arsip Statis sebagai Memori Kolektif Bangsa	Persentase pengelolaan arsip statis provinsi	%

TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR KINERJA DAERAH	RENSTRA PERANGKAT DAERAH				SATUAN
	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	OUTCOME - PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
1	2	3	4	5	6
			Meningkatnya Kualitas Layanan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		
			Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase peningkatan perangkat daerah yang mampu melaksanakan pemusnahan arsip inaktif/masa retensi habis	%
			Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase pemulihan arsip akibat bencana	%
			Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase peningkatan arsip yang diselamatkan melalui alih media	%
	Sekretariat Daerah				
	Meningkatkan kualitas kebijakan daerah *			Indeks Kualitas Kebijakan *	Angka
		Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil **		Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi **	Angka
				Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat **	Angka
				Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan **	Angka
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		
			Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah	Persentase Perangkat Daerah yang Skor Kematangan Organisasinya dalam kategori tinggi	%
			Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%
			Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan hasil Analisis Jabatan secara efektif	%
			Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah	Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A	%
			Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	%
			Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP meningkat	%
			Meningkatnya efektivitas pelaksanaan ketatalaksanan dan pelayanan publik di Jawa Tengah	Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%
			Meningkatnya efektivitas pelaksanaan ketatalaksanan dan pelayanan publik di Jawa Tengah	Persentase UPT yang memperoleh nilai IPP (Indeks Pelayanan Publik) Mandiri A - (Sangat Baik) ke atas	%
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		
			Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan, kerjasama dan otonomi daerah	Persentase pemetaan potensi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	%
			Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan, kerjasama dan otonomi daerah	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	%
			Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan, kerjasama dan otonomi daerah	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%
			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT		
			Meningkatnya kualitas Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan dasar	Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan dasar	%
			Meningkatnya kualitas Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan Non dasar	Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan non dasar	%
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan Fasilitas Keagamaan dalam kondisi baik	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		
			Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Indeks Reformasi Hukum	Angka
			Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Kabupaten/Kota	Persentase Efektifitas Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	%
			Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Penanganan Permasalahan Hukum	Capaian Pemberian Bantuan Hukum	%
			Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Penanganan Permasalahan Hukum	Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Angka
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
			Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan perekonomian makro	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%
			Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan perekonomian mikro	Persentase capaian kinerja program bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup	Persentase capaian kinerja program bidang Lingkungan Hidup	%
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Energi Sumber Daya Mineral	Persentase capaian kinerja program bidang Energi Sumber Daya Mineral	%
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase capaian kinerja program bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	%
			Meningkatnya Capaian Kinerja BUMD Jasa Keuangan	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan	%
			Meningkatnya Capaian Kinerja BUMD Jasa Aneka Usaha	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Aneka Usaha	%
			Meningkatnya capaian kinerja BLUD	Persentase nilai kemandirian BLUD	%
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	%
			Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Persentase Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	%

TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR KINERJA DAERAH	RENSTRA PERANGKAT DAERAH				SATUAN
	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	OUTCOME - PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
1	2	3	4	5	6
			Meningkatnya Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM	Persentase Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ	%
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
			Meningkatnya kualitas kebijakan bidang administrasi pembangunan Kewilayahan	Persentase realisasi bantuan keuangan	%
			Meningkatnya kualitas Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja Perangkat Daerah	%
			Meningkatnya kualitas Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di usulkan	%
			Meningkatnya kualitas kebijakan bidang administrasi pembangunan daerah	Persentase Realisasi Pelaksanaan APBD dan APBN	%
	Sekretariat DPRD				
	Meningkatkan Pelayanan Kedewanan *			Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah *	Angka
		Terwujudnya Hubungan Sekretariat DPRD dengan DPRD Yang baik **		Indeks kemudahan prosedur pelayanan di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah (survei kepuasan DPRD) **	Angka
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang tersedia **		Indeks kualitas sarana dan prasarana (survei kepuasan DPRD) **	Angka
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
			Meningkatnya Fasilitasi Layanan Kehumasan	Nilai survei kepuasan layanan kehumasan	Angka
			Meningkatnya Fasilitasi Layanan Persidangan	Nilai survei kepuasan layanan persidangan	Angka
	Badan Penghubung				
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Penghubung *			Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung *	Angka
		Meningkatnya Pelayanan Publik bagi Pejabat dan Masyarakat Jawa Tengah **		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat **	Angka
			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		
			Tercapainya pelaksanaan pelayanan penghubung	Persentase ketercapaian pelaksanaan pelayanan penghubung	%
	Satuan Polisi Pamong Praja				
	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum *			Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum *	Angka
		Meningkatnya kualitas Penegakan Produk Hukum Daerah **		Skor kinerja penegakan produk hukum daerah **	Angka
		Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat **		Skor kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat **	Angka
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Meningkatnya pengendalian Tibumtranmas di 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah	Persentase Pengendalian Tibumtranmas	%
			Meningkatnya penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah	%
			Meningkatnya Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas	Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas berkategori baik	%
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		
			Meningkatnya Kabupaten/Kota yang melaksanakan penanganan kebakaran sesuai SPM	Persantase Kabupaten/Kota yang melaksanakan penanganan kebakaran sesuai SPM	%
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
	Meningkatkan Ketahanan Wilayah *			Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD *	
		Meningkatnya Stabilitas Politik **		Indeks Ketahanan Politik **	
		Meningkatnya Ketahanan Bangsa **		Indeks Harmoni Indonesia **	
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		
			Meningkatnya pembumian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Indeks Aktualisasi Pancasila	Angka
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		
			Terjaminnya hak-hak sipil dan hak-hak politik	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aspek Kebebasan	Angka
			Meningkatnya kinerja dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Apek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Angka
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		
			Meningkatnya peran strategis ormas dan kemandirian ormas dalam mendukung pembangunan	Indeks Kinerja Ormas	Angka
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		
			Meningkatnya moderasi beragama di masyarakat	Indeks Toleransi	Angka
			Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perekonomian	Indeks ketahanan Ekonomi	Angka
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		

TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR KINERJA DAERAH	RENSTRA PERANGKAT DAERAH				SATUAN
	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	OUTCOME - PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
1	2	3	4	5	6
			Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dan elemen masyarakat dalam rangka penanganan konflik sosial serta menjaga kondusifitas wilayah	Indeks Kewaspadaan Nasional	Angka
	Seluruh Perangkat Daerah				
	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis *			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah *	Angka
		Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah **		Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah **	Angka
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah **		Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah **	Angka
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
			Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%
			Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	%
			Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan rumah sakit	*Cost Recovery Rate* (CRR) Total RSUD/RSJD/RSMD	%
Terwujudnya Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan					
Pertumbuhan Ekonomi					%
Tingkat Inflasi					%
	Dinas Pertanian dan Peternakan				
	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian *			Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sektor pertanian *	%
		Meningkatnya Produksi Pertanian **		Produksi Tanaman Pangan **	Ton
				Produksi Tanaman Perkebunan **	Ton
				Produksi Tanaman Hortikultura **	Ton
				Persentase kenaikan jumlah kelembagaan petani dan peternak yang meningkat kapasitas usahanya **	%
		Meningkatnya Produksi Peternakan **		Produksi Ternak **	Ton
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
			Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Padi	Ton
			Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Jagung	Ton
			Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Kedelai	Ton
			Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Bawang Merah	Ton
			Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Cabai	Ton
			Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Tanaman Buah dan Tanaman Obat	Ton
			Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi Kopi	Ton
			Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi Tebu	Ton
			Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi Kelapa	Ton
			Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi ternak	(ST)/(AU)
			Meningkatnya peredaran obat hewan dan produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	Persentase peredaran obat Hewan dan produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	%
			Meningkatnya Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Persentase layanan sertifikasi benih tanaman pangan	%
			Meningkatnya Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Persentase layanan sertifikasi benih tanaman perkebunan	%
			Meningkatnya Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Persentase layanan sertifikasi benih tanaman hortikultura	%
			Meningkatnya Produksi Benih (di Balai Benih Pertanian)	Persentase ketercapaian target produksi benih (di Balai Benih Pertanian)	%
			Meningkatnya Produksi dan Distribusi Semen Beku	Persentase produksi dan distribusi semen beku	%
			Meningkatnya produksi ternak ruminansia dan non ruminansia penghasil daging	Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia dan non ruminansia penghasil daging	%
			Meningkatnya produksi ternak ruminansia penghasil susu	Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia penghasil susu	%
			Meningkatnya produksi ternak non ruminansia penghasil telur	Persentase peningkatan produksi ternak non ruminansia penghasil telur	%
			Meningkatnya Pengembangan Mekanisasi dan modernisasi Pertanian	Persentase capaian alsintan dan pengelola alsintan yang diawasi	%
			Meningkatnya Pengembangan Mekanisasi dan modernisasi Pertanian	Persentase alsintan yang direkayasa dan dikembangkan	%
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
			Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi prasarana sarana pertanian	%
			Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi prasarana peternakan	%
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
			Menurunnya jumlah wilayah yang mengalami kasus PHMS	Persentase penurunan jumlah wilayah yang mengalami kasus PHMS	%
			Meningkatnya Unit Usaha Yang Bersertifikat NKV	Persentase unit usaha yang bersertifikat NKV	%
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Layanan Veteriner	%
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		
			Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan	%

TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR KINERJA DAERAH	RENSTRA PERANGKAT DAERAH				SATUAN
	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	OUTCOME - PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
1	2	3	4	5	6
			Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Perkebunan	%
			Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan	%
			Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Perkebunan	%
			Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Hortikultura	%
			Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Hortikultura	%
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
			Menguatnya kelembagaan petani	Persentase kelembagaan petani yang terfasilitasi	%
			Menguatnya Kelembagaan Peternak	Persentase peningkatan fasilitasi kelembagaan dan kemitraan peternak	%
			Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan SDM Pertanian	Persentase SDM pertanian yang dilatih	%
	Dinas Kelautan dan Perikanan				
	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan *			Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan *	%
		Meningkatnya Produksi Perikanan **		Produksi Perikanan **	Ton
				Produksi Garam **	Ton
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		
			Meningkatnya Luas Lahan Garam Rakyat dan Lahan Kawasan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang Difasilitasi Teknologi	Persentase luas lahan garam rakyat dan lahan kawasan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang difasilitasi teknologi	%
			Meningkatnya Dokumen IKRL (Informasi Kesesuaian Ruang Laut) yang Diterbitkan	Persentase Peningkatan Dokumen IKRL (informasi kesesuaian ruang laut) yang diterbitkan	%
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton
			Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan (di seluruh pelabuhan)	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan (di seluruh pelabuhan)	%
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
			Meningkatnya Penanganan Hama, Penyakit Ikan dan lingkungan	Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	%
			Meningkatnya Produksi Ikan Konsumsi	Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut	%
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
			Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pengendalian Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	%
			Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan (di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan)	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan (di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan)	%
				Cakupan WPPNRI yang Diawasi Dari IUUFishing (di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan)	%
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		
			Meningkatnya dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	%
			Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun
	Dinas Ketahanan Pangan				
	Mewujudkan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah *			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) *	%
				Indeks Ketahanan Pangan *	Angka
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan **		Angka Ketersediaan Energi (AKE) **	kkal/kapita/hari
		Meningkatnya Keterjangkauan Pangan **		Rata-rata Deviasi Harga Pangan Strategis (Beras) **	%
				Persentase Penanganan Kecamatan Rawan Pangan **	%
		Meningkatnya Pemanfaatan Pangan **		Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Jawa Tengah **	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
			Tercapaianya rata-rata angka ketersediaan pangan	Rata-rata Ketersediaan Pangan	Angka
			Terjaganya cadangan pangan pemerintah daerah sesuai regulasi	Rasio Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD)	Angka
			Terwujudnya Harga Efektif komoditas pangan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	%
			Menurunnya Angka Konsumsi Beras di Provinsi Jawa Tengah	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	kg/kapita/tahun
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		
			Menurunnya daerah rawan pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan	%
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		
			Meningkatnya pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%
			Terjaminnya pangan segar asal tumbuhan melalui sertifikasi dan registrasi	Persentase Capaian Tertimbang Regristasi dan Sertifikasi Pangan Segar	%
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				

TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR KINERJA DAERAH	RENSTRA PERANGKAT DAERAH				SATUAN
	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	OUTCOME - PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
1	2	3	4	5	6
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi sub sektor kehutanan *			Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Kehutanan *	%
		Meningkatnya kapasitas produksi hasil hutan **		Pertumbuhan produksi hasil hutan **	%
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
			Meningkatnya produktivitas hutan dan hasil hutan	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%
			Meningkatnya produktivitas hutan dan hasil hutan (di wilayah CDK)	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (di wilayah CDK)	%
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
			Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%
			Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan (di wilayah CDK)	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (wilayah CDK)	%
	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
	Meningkatkan pembangunan sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif *			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum *	%
				Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional *	%
		Meningkatnya pengeluaran wisatawan **		Pengeluaran Wisatawan **	Rupiah
		Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif **		Nilai Tambah Ekonomi Kreatif **	Juta Rupiah
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		
			Meningkatnya daya tarik pada destinasi pariwisata pada setiap wilayah pengembangan (WP)	Persentase kawasan pariwisata yang dikembangkan	%
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		
			Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		
			Meningkatnya Kabupaten/Kota yang Ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif)	Jumlah Kabupaten/Kota yang DItetapkan sebagai Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif)	Kabupaten/Kota
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		
			Meningkatnya SDM Pariwisata yang Tersertifikasi	Persentase SDM Pariwisata yang Tersertifikasi Kompetensi	%
			Meningkatnya SDM Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi	Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi Kompetensi	%
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
	Meningkatkan Kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap PDRB *			Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB *	%
		Meningkatnya Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB **		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB **	%
		Meningkatnya Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi **		Proporsi Jumlah usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi **	%
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		
			Meningkatnya koperasi berkualitas tingkat provinsi	Persentase Koperasi Berkualitas	%
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		
			Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi	Persentase SDM Koperasi yang berkualitas	%
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		
			Meningkatnya jumlah koperasi provinsi produktif	Persentase Koperasi Produktif	%
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		
			Meningkatnya jumlah UMKM Non Pertanian yang mengalami Peningkatan Usaha	Persentase UMKM non Pertanian yang mengalami peningkatan usaha	%
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan (PE) *			Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan *	%
		Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan **		PDRB Sektor Perdagangan **	Milyar Rupiah
		Meningkatnya Sistem Logistik Daerah **		Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi **	%
	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perindustrian (PE) *			Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian *	%
		Meningkatnya PDRB Sektor Perindustrian **		PDRB Sektor Perindustrian **	Milyar Rupiah
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		
			Meningkatnya pelayanan perijinan sektor perdagangan	Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2)	%
			Meningkatnya Pelaku Usaha (distributor) Bahan Berbahaya Yang Diawasi	Persentase peningkatan pelaku usaha (distributor) bahan berbahaya yang diawasi	%
			Meningkatnya jumlah eksportir pengguna layanan IPSKA Jawa Tengah	Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) Jawa Tengah	%
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi perdagangan	Persentase peningkatan jumlah pengguna sarana distribusi perdagangan	%
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		
			Meningkatnya Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB ADHB	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		
			Meningkatnya Indeks Keberdayaan Konsumen	Persentase kenaikan Indeks Keberdayaan Konsumen	%

TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR KINERJA DAERAH	RENSTRA PERANGKAT DAERAH				SATUAN
	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	OUTCOME - PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
1	2	3	4	5	6
			Meningkatnya layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	%
			Meningkatnya layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	%
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		
			Meningkatnya nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi Pameran Dalam Negeri	Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri	%
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
			Meningkatnya pertumbuhan jumlah pelaku usaha indutri	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Level Provinsi	%
			Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi indutri	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	%
			Meningkatnya pelayanan sektor industri	Persentase Jumlah Peningkatan Pelayanan Sektor Industri	%
			Meningkatnya pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	%
			Meningkatnya pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	%
			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		
			Meningkatnya Industri yang diterbitkan rekomendasi Perijinan dan Dilakukan Pengawasan	Persentase kenaikan industri yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	%
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		
			Meningkatnya industri yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase kenaikan jumlah industri yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING		
			Terjaganya stabilisasi harga dan stok barang di pasar	Inflasi bahan makanan, minuman dan tembakau	%
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
	Meningkatkan Penanaman Modal *			Kontribusi PMTB terhadap PDRB *	%
		Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal **		Pertumbuhan Nilai Penanaman Modal **	%
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		
			Meningkatnya kualitas bahan promosi penanaman modal yang dipublikasikan	Persentase peningkatan pengakses bahan promosi investasi yang telah dipublikasikan	%
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
			Meningkatnya penyelenggaraan promosi penanaman modal yang berkualitas	Persentase kepeminatan yang terealisasi	%
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
			Meningkatnya penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	%
			Meningkatnya kualitas standar layanan dan penyelesaian pengaduan	Persentase standar pelayanan yang ditetapkan	%
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
			Meningkatnya pengawasan penanaman modal	Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui	%
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		
			Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	%
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
	Meningkatkan Desa Mandiri di Jawa Tengah *			Persentase Desa Mandiri *	%
		Meningkatnya Status Kemandirian Desa di Jawa Tengah **		Persentase Jumlah Desa yang meningkat status kemandiriannya di Jawa Tengah **	%
			PROGRAM PENATAAN DESA		
			Meningkatnya fasilitasi penataan desa di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam rangka penataan Desa	%
			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		
			Meningkatnya Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP)	Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP)	%
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
			Meningkatnya fasilitasi evaluasi dan penguatan tata kelola pemerintahan Desa di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan tata kelola pemerintahan Desa	%
			Meningkatnya fasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemerintahan Desa di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemerintahan Desa	%
			Meningkatnya BUMDesma dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	Persentase BUMDesma dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	%
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		
			Meningkatnya BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	%
			Meningkatnya fasilitasi peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatannya di Jawa Tengah	Persentase Daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatannya	%

TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR KINERJA DAERAH	RENSTRA PERANGKAT DAERAH				SATUAN
	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	OUTCOME - PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
1	2	3	4	5	6
			Meningkatnya fasilitasi peningkatan pemanfaatan TTG, Lembaga Adat Desa dan pelaksanaan TNI Manunggal Masuk Desa di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten/Kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan TTG, Lembaga Adat Desa dan pelaksanaan TNI Manunggal Masuk Desa	%
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral				
	Meningkatkan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Efektif, Efisien dan Berkelanjutan *			Kontribusi PDRB sektor pertambangan *	%
				Intensitas Energi Primer *	SBM/Rp Milyar
				Konsumsi Listrik per Kapita *	KWh/Kapita
		Terjaganya ketersediaan daya listrik **		Rasio ketersediaan daya listrik **	Angka
		Meningkatnya porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer **		Porsi EBT dalam bauran energi primer **	%
		Meningkatnya penerapan *Good Mining Practice* (GMP) **		Persentase Penerapan *Good Mining Practice* (GMP) **	%
			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		
			Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah	%
			Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba (di Wilayah Kerja Cabdin ESDM)	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo	%
			Terpenuhinya pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	%
			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN		
			Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Jawa Tengah	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah	SBM
			Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun (di Wilayah Kerja Cabdin ESDM)	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo	SBM
			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN		
			Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	%
			Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) (di Wilayah Kerja Cabdin ESDM)	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) (di Wilayah Kerja Cabdin ESDM)	%
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	Meningkatkan Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang *			Persentase Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor dan Kondisi Mantap *	%
		Terjaganya Kondisi Jalan Mantap **		Persentase Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor **	%
				Persentase Panjang Jalan Provinsi Dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap **	%
				Persentase Panjang Jaian Provinsi Kondisi Permukaan Mantap **	%
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
			Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase pengawasan teknis yang mendukung penyelenggaraan jalan	%
			Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor	Km
			Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Capaian Penyusunan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	%
			Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan yang Dileger	%
			Terpenuhinya ketersediaan peralatan alat berat pendukung kegiatan perangkat daerah yang disediakan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Peralatan	%
			Terpenuhinya jumlah sertifikat hasil uji mutu konstruksi dalam satu tahun terhadap jumlah kumulatif sertifikat hasil uji tahun rencana	Persentase Pengendalian Mutu Pelaksanaan Jasa Konstruksi	%
			Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Kerataan jalan mantap (di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah)	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap (di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah)	%
			Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap (di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah)	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap (di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah)	%
	Dinas Perhubungan				
	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi *			Indeks Pelayanan Transportasi *	Angka
		Meningkatnya Konektivitas Transportasi di Jawa Tengah **		Rasio Konektivitas Provinsi **	Angka
		Meningkatnya Keselamatan Perjalanan Transportasi di Jawa Tengah **		Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi **	%
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
			Meningkatnya Jumlah ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan provinsi	%
			Meningkatnya kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	Persentase kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	%
			Meningkatnya jaringan trayek angkutan jalan	Rasio Trayek Angkutan Jalan	Angka
			Meningkatnya penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru yang menggunakan angkutan umum	Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	%
			Meningkatnya jumlah kunjungan bus di terminal tipe B	Persentase kunjungan Bus pada terminal tipe B	%
			Meningkatnya total implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	Persentase implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	%

TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR KINERJA DAERAH	RENSTRA PERANGKAT DAERAH				SATUAN
	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	OUTCOME - PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
1	2	3	4	5	6
			Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B (di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan)	Persentase pengunjung terminal tipe B (di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan)	%
			Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani (di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan)	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani (di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan)	%
			Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti (pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan)	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti (pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan)	%
			Meningkatnya Jumlah Penduduk Terlayani (Trans Jateng)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum (Trans Jateng)	%
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
			Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	Angka
			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		
			Meningkatnya perlintasan sebidang terpenuhi perlengkapan jalan sesuai standar	Persentase perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	%
	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
	Menurunkan Risiko Bencana *			Indeks Risiko Bencana *	Angka
		Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana alam **		Indeks Ketahanan Daerah (IKD) **	Angka
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
			Meningkatnya kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Persentase wilayah rawan bencana yang ditingkatkan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	%
			Meningkatknya kapasitas sistem informasi dan data kebencanaaan	Persentase data kejadian bencana yang terverifikasi dalam waktu kurang dari 24 jam	%
			Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota dalam pemulihan pasca bencana	Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan provinsi dalam pemulihan pasca bencana	%
			Meningkatkan kapasitas kabupaten/kota dalam penanganan bencana	Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan provinsi dalam penanganan bencana	%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup					Angka
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mendorong pertumbuhan ekonomi sub sektor kehutanan *			Indeks Kualitas Lahan (IKL) *	Angka
				Indiks Kualitas Air (IKA) *	Angka
				Indeks Kualitas Udara (IKU) *	Angka
		Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati **		Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah **	Angka
		Meningkatnya kualitas lahan **		Luas Tutupan Lahan **	Ha
		Menurunnya pencemaran air permukaan **		Indeks Pencemaran Air **	Angka
		Menurunnya pencemaran udara **		Indeks NO2 dan SO2 **	Angka
			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP		
			Meningkatnya integrasi dokumen perencanaan lingkungan hidup ke dalam dokumen perencanaan	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan	%
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	%
			Persentase penurunan emisi GRK sektor limbah dan kehutanan ***	Persentase penurunan emisi GRK sektor limbah dan kehutanan	%
			Meningkatnya pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan hidup	Persentase pemantauan kualitas lingkungan hidup	%
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	%
			Terkelolanya keanekaragaman hayati di Kebun Raya Baturraden	Persentase peningkatan pelestarian kehati di Kebun Raya Baturraden	%
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		
			Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase Limbah B3 Yang Terkelola	%
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		
			Meningkatnya pembinaan terhadap persetujuan lingkungan	Persentase rekomendasi lingkungan hidup yang diterbitkan	%
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	%
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliannya	%
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		
			Meningkatnya penyelesaian aduan lingkungan hidup	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Timbulan sampah yang terkelola	%
			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		
			Meningkatnya penanganan lahan kritis	Persentase lahan kritis tertangani	%
			Meningkatnya perlindungan hutan	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani	%

TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR KINERJA DAERAH	RENSTRA PERANGKAT DAERAH				SATUAN
	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	OUTCOME - PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
1	2	3	4	5	6
			Meningkatnya penanganan lahan kritis (di wilayah CDK)	Persentase lahan kritis tertangani (di wilayah CDK)	%
			Meningkatnya perlindungan hutan (di wilayah CDK)	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani (di wilayah CDK)	%
			Meningkatnya bibit tanaman kehutanan dan MPTS yang terdistribusi	Persentase bibit tanaman kehutanan dan MPTS yang terdistribusi	%
			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		
			Terselenggaranya perlindungan tumbuhan dan satwa liar	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani	%
			Terselenggaranya pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting secara efektif	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif	%
			Terselenggaranya perlindungan tumbuhan dan satwa liar (di wilayah CDK)	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani (di wilayah CDK)	%
			Terselenggaranya pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting secara efektif (di wilayah CDK)	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif (di wilayah CDK)	%
			Terkelolanya Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura dinilai oleh Kementerian Kehutanan	Angka
			Terselenggaranya konservasi sumberdaya alam hayati dan eksosistemnya	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani Balai Kebun Raya Baturraden	%
			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		
			Terkelolanya Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani	%
	Dinas Kelautan dan Perikanan				
	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB dan Kualitas Ekosistem Kelautan dan Perikanan *			Persentase Luasan Mangrove Yang Berkualitas Baik *	%
		Meningkatnya Luasan Mangrove yang Direhabilitasi **		Persentase Luasan Mangrove yang Direhabilitasi **	%
			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		
			Meningkatnya Luas Kawasan Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi (di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan)	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi (di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan)	%
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	Meningkatkan Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang *			Persentase Tingkat Kualitas Pelayanan Sumber Daya Air *	%
				Persentase Keterwujudan Penataan Ruang *	%
				Indeks Pelayanan Keciptakaryaan *	%
		Meningkatnya Pengelolaan SDA **		Persentase Penyediaan Rencana Teknis terhadap Rencana Pembangunan Infrastruktur SDA **	%
				Indeks Kinerja Sistem Irigasi **	Angka
				Persentase Pengelolaan Sungai dan Penampungan Air **	%
		Meningkatnya Pelaksanaan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang **		Persentase ketersediaan rencana tata ruang **	%
				Persentase implementasi pemanfaaatan ruang **	%
				Persentase Tertib Ruang **	%
		Meningkatnya Akses Air Minum dan Sanitasi Aman **		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman **	%
				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman **	%
		Meningkatnya kualitas hasil penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) **		Persentase Jumlah Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) Dalam Kondisi Menuju Berfungsi Baik Sesuai Standar **	%
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
			Tercapainya Penyusunan Perencanaan Teknis dan Pengembangan SDA terhadap kebutuhan Konstruksi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perencanaan Teknis dan Pengembangan Sumber Daya Air	%
			Meningkatnya Kondisi Baik Jaringan Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya	Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya Kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik	%
			Persentase Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi ***	Persentase Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi	%
			Meningkatnya Kondisi Baik Jaringan Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya	Kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya Kewenangan Provinsi	m3
			Meningkatnya kondisi fisik sungai kewenangan provinsi dengan kategori baik	Persentase kondisi fisik sungai kewenangan provinsi dengan kategori baik	%
			Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya (di wilayah kerja BPSDA)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (di wilayah kerja BPSDA)	Angka
			Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya (di wilayah kerja BPSDA)	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya (di wilayah kerja BPSDA)	%
			Terjaganya kondisi sungai kewenangan Provinsi (di wilayah kerja BPSDA)	Persentase kondisi baik sungai (di wilayah kerja BPSDA)	%
			Tersedianya dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air (di BPSDA)	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air (di BPSDA)	%
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
			Meningkatnya kapasitas akses air minum	Persentase Kapasitas Yang Dapat Terlayani Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas Yang Memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	%
			Meningkatnya kapasitas akses air minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	%
			Meningkatnya kapasitas akses air minum	Persentase Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%

TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR KINERJA DAERAH	RENSTRA PERANGKAT DAERAH				SATUAN
	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	OUTCOME - PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
1	2	3	4	5	6
			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		
			Terselenggaranya Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional	Persentase Sarana Prasarana (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS) yang terbangun	%
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
			Meningkatnya kapasitas akses air limbah domestik	Persentase Rumah Tangga yang dapat terlayani IPLT lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan Rumah Tangga di area pelayanan IPLT lintas kabupaten/kota	%
			Meningkatnya kapasitas akses air limbah domestik	Persentase Kelompok Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terhadap kebutuhan pembinaan dan pemberdayaan	%
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
			Terlaksananya Penataan Bangunan Gedung	Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	%
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
			Terselenggaranya Fasilitasi Bidang Jasa Konstruksi	Persentase Fasilitasi Bidang Jasa Konstruksi	%
			Terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Tersertifikasi	%
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
			Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Tata Ruang	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	%
			Meningkatnya Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	%
			Meningkatnya Pelaksanaan Sinkronisasi Program	Persentase Pelaksanaan Sinkronisasi Program	%
			Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang	%
			Meningkatnya Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%
			Meningkatnya Fasilitasi RTR Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi RTR Kabupaten/Kota	%
			Meningkatnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang (di wilayah kerja BPSDA)	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Pemali Comal	%
	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral				
	Meningkatkan Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Efektif, Efisien dan Berkelanjutan *			Indeks Pengelolaan Air Tanah *	Angka
		Meningkatnya ketersediaan air tanah **		Indeks Ketersediaan Air Tanah **	Angka
			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN		
			Menurunnya pengambilan air tanah di Jawa Tengah	Persentase Pengambilan Air Tanah di Jawa Tengah	%
			Menurunnya pengambilan air tanah (di Wilayah Cabding ESDM)	Persentase pengambilan air tanah (di Wilayah Cabdin ESDM)	%
			Terpenuhinya pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah	Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah	%
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
	Meningkatkan Kualitas Permukiman dan Agraria bagi Masyarakat *			Persentase Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan *	%
				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan *	%
				Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi *	%
				Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum *	%
		Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni **		Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni **	%
				Persentase Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Rumah Bagi Masyarakat **	%
		Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman **		Persentase Kawasan Kumuh **	%
		Terlaksananya Penetapan Lokasi dalam rangka Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum **		Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum **	%
		Terlaksananya Reforma Agraria di Jawa Tengah **		Persentase Pelaksanaan Reforma Agraria oleh GTRA **	%
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
			Tertanganinya Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Miskin	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	%
			Tersedianya Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin	Persentase Rumah Layak Huni yang disediakan	%
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		
			Tertangannya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	%
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	%
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		
			Terlaksananya Pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman yang disediakan	%
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
			Terlaksananya Pembinaan kepada Orang/ Badan Hukum dalam rangka Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Orang/ Badan Hukum yang Mendapatkan Pembinaan	%
			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM		

TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR KINERJA DAERAH	RENSTRA PERANGKAT DAERAH				SATUAN
	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	OUTCOME - PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
1	2	3	4	5	6
			Terfasilitasinya Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase Fasilitasi Penetapan Lokasi	%
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		
			Terfasilitasinya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	%
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		
			Terfasilitasinya Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	Persentase Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	%
Terwujudnya Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter					
Indeks Modal Manusia					Angka
Tingkat Pengangguran Terbuka					%
	Dinas Pendidikan				
	Meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi semua *			Harapan Lama Sekolah (HLS) *	Tahun
		Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Menengah dan Khusus **		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Tahun **	%
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas **	%
		Meningkatnya Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus **		Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB yang mencapai standar kompetensi minimum pada assessment nasional untuk literasi dan numerasi **	%
		Meningkatnya Relevansi Pendidikan Menengah Kejuruan **		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK **	%
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
			Meningkatnya pemerataan pendidikan menengah tingkat SMA	APK SMA	%
			Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan tingkat SMA	Angka Putus Sekolah SMA	Angka
			Meningkatnya karakter siswa tingkat SMA	Persentase Prestasi Lomba SMA Tingkat Nasional	%
			Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan tingkat SMA	Nilai Kualitas Pembelajaran SMA	Angka
			Meningkatnya pemerataan pendidikan menengah tingkat SMK	APK SMK	%
			Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan tingkat SMK	Angka Putus Sekolah SMK	Angka
			Meningkatnya karakter siswa tingkat SMK	Persentase Prestasi Lomba SMK Tingkat Nasional	%
			Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan tingkat SMK	Nilai Kualitas Pembelajaran SMK	Angka
			Meningkatnya relevansi pendidikan menengah kejuruan	Nilai Kualitas Pembelajaran selaras dunia kerja	Angka
			Meningkatnya pemerataan pendidikan khusus	APK SLB	%
			Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan khusus	Angka Putus Sekolah SLB	Angka
			Meningkatnya karakter siswa pendidikan khusus	Persentase Prestasi Lomba SLB Tingkat Nasional	%
			Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan khusus	Nilai Kualitas Pembelajaran SLB	Angka
			Meningkatnya kualitas guru	Persentase Guru SMA Bersertifikat Kompetensi	%
			Meningkatnya kualitas guru	Persentase Guru SMK Bersertifikat Kompetensi	%
			Meningkatnya kualitas guru	Persentase Guru SLB Bersertifikat Kompetensi	%
			Meningkatnya kompetensi guru berlisensi	Persentase Guru SMK yang Memiliki Sertifikat keahlian	%
			Meningkatnya digitalisasi pendidikan	Persentase Guru SMA, SMK, dan SLB Bersertifikasi Pelatihan Platform Pendidikan	%
			Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan (di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan)	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding (di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan)	%
			Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan (di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan)	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik (di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan)	%
			Meningkatnya karakter siswa (di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan)	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik (di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan)	%
			Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan (di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan)	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B (di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan)	%
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		
			Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif (di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan)	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan (di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan)	%
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
			Meningkatnya distribusi pemerataan Guru dan Tenaga Kependidikan	Indeks Distribusi Guru SMA dan SMK	Angka
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		
			Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan (di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan)	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah (di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan)	%
			Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan (di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan)	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus (di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan)	%
	Dinas Kesehatan				
	Meningkatkan kualitas kesehatan *			Usia Harapan Hidup (UHH) *	Tahun
		Meningkatnya kesehatan ibu dan anak **		Angka Kematian Ibu **	per 100.000 KH
				Angka Kematian Balita (AKABA) **	per 1000 KH
		Menurunnya penyakit menular (PM) dan penyakit tidak menular (PTM) **		Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM) **	%
				Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) **	%
		Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar **		Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar **	%
		Terkendalinya penyakit akibat kejadian luar biasa (KLB) dan bencana **		Persentase Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Surveilans Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian KLB, Bencana, dan Kesehatan Lingkungan **	%

TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR KINERJA DAERAH	RENSTRA PERANGKAT DAERAH				SATUAN
	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	OUTCOME - PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
1	2	3	4	5	6
		Meningkatnya jaminan pembiayaan kesehatan **		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional **	%
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSUD Dr. Moewardi **		Net Death Rate (NDR) RSUD Dr. Moewardi **	Permil
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo **		Net Death Rate (NDR) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo **	Permil
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSUD dr. ADHYATMA, MPH **		Net Death Rate (NDR) RSUD dr. ADHYATMA, MPH **	Permil
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSUD dr. REHATTA **		Net Death Rate (NDR) RSUD dr. REHATTA **	Permil
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo **		Net Death Rate (NDR) RSJD Dr. Amino Gondohutomo **	Permil
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN **		Net Death Rate (NDR) RSJD dr. ARIF ZAINUDIN **	Permil
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi **		Net Death Rate (NDR) RSJD Dr. RM. Soedjarwadi **	Permil
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan lanjutan di Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam **		Net Death Rate (NDR) Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam **	Permil
	Meningkatkan status gizi *			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita *	%
		Menurunnya kasus stunting **		Persentase Penurunan Kasus Stunting **	%
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
			Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Persentase Kabupaten/Kota yang minimal 10 % institusi dibina, dengan pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	%
			Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Persentase penurunan kasus kematian ibu	%
			Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Angka Kematian Bayi (AKB)	1.000/KH
			Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Persentase lanjut usia yang mandiri	%
			Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Prevalensi wasting balita	%
			Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Fasilitas pelayanan kesehatan Primer dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) kesehatan sesuai Standar	%
			Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasilitas pelayanan kesehatan Primer terakreditasi paripurna	%
			Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Persentase Kabupaten/Kota dengan penyedia dan atau pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar mutu	%
			Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)	%
			Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis	%
			Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis	%
			Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Insidensi Human Immunodeficiency Virus (HIV)	%
			Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Jumlah kabupaten/kota yang eliminasi malaria	Kabupaten/Kota
			Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Jumlah kabupaten/kota dengan Eliminasi Neglected Tropical Diseases (Pengendalian Kasus Filariasis dan Kusta)	Kabupaten/Kota
			Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Angka kematian Dengue	%
			Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Insidensi Hepatitis B	%
			Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase Hipertensi dalam pengendalian	%
			Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase Diabetes Melitus terkendali (DM Terkendali)	%
			Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase merokok penduduk usia 10-21 tahun	%
			Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan skrining 4 kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara,Ca Cerviks)	%
			Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase Kabupaten/ Kota yang Mencapai Target Kekebalan Kelompok	%

TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR KINERJA DAERAH	RENSTRA PERANGKAT DAERAH				SATUAN
	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	OUTCOME - PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
1	2	3	4	5	6
			Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase kabupaten/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/ wabah dan bencana	%
			Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%
			Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	%
			Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan Surveilans Kesehatan	%
			Meningkatnya mutu, sarana, prasarana dan alat di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan kepesertaan aktif asuransi kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit mencapai *Case Fatality Rate Direct Obstetric* (eklampsi dan perdarahan) < 1%	%
			Meningkatnya mutu, sarana, prasarana dan alat di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan kepesertaan aktif asuransi kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dengan Sarana Prasarana dan Alat (SPA) kesehatan sesuai standar	%
			Meningkatnya mutu, sarana, prasarana dan alat di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan kepesertaan aktif asuransi kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan terakreditasi paripurna	%
			Meningkatnya mutu, sarana, prasarana dan alat di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan kepesertaan aktif asuransi kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif	%
			Meningkatnya Standarisasi pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)	Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%
			Meningkatnya Standarisasi pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%
			Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana (di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat)	Persentase Kabupaten/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu (di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat)	%
			Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana (di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat)	Persentase Kabupaten/Kota (wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat) yang melaksanakan skrining kesehatan jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50%	%
			Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana (di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat)	Persentase Kabupaten/Kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% (di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat)	%
			Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana (di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat)	Persentase Kabupaten/Kota (di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat) dengan Posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran	%
			Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana (di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat)	Persentase mutu layanan Balkesmas (Wilayah) sesuai standar	%
			Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana (di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat)	Persentase Kabupaten/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam (di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Masyarakat)	%
			Meningkatnya mutu layanan pengujian di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan serta Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 sesuai standar	Persentase Kabupaten/Kota dengan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 sesuai standar	%
			Meningkatnya mutu layanan pengujian di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan serta Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 sesuai standar	Persentase mutu layanan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan sesuai standar	%
			Meningkatnya mutu layanan pengujian di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan serta Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 sesuai standar	Persentase Kabupaten/Kota yang terlayani pelayanan laboratorium dan kalibrasi diBalai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan	%
			Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD Dr.MOEWARDI	Persentase indikator mutu pelayanan medis yang memenuhi target di RSUD Dr. Moewardi	%
			Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD Dr.MOEWARDI	Persentase indikator mutu pelayanan keperawatan yang memenuhi target di RSUD Dr. Moewardi	%

TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR KINERJA DAERAH	RENSTRA PERANGKAT DAERAH				SATUAN
	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	OUTCOME - PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
1	2	3	4	5	6
			Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD Dr.MOEWARDI	Persentase penyediaan fasilitas, sarana dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan di RSUD Dr. Moewardi	%
			Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD Dr.MOEWARDI	Persentase Penyediaan Prasarana, Obat dan BMHP untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan penunjang di RSUD Dr. Moewardi	%
			Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD Dr.MOEWARDI	Persentase indikator mutu pelayanan penunjang medis dan penunjang prasarana sarana yang sesuai standar di RSUD Dr. Moewardi	%
			Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD Dr.MOEWARDI	Persentase capaian kinerja pelayanan pendidikan dan penelitian yang terintegrasi dengan pelayanan rumah sakit di RSUD Dr. Moewardi	%
			Meningkatnya standarisasi pelayanan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	Persentase pemenuhan fasilitas prasarana, sarana, alat kesehatan, obat-BMHP untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan RS di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%
			Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD dr. Adhyatma, MPH	Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%
			Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD dr. Adhyatma, MPH	Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan, prasarana dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%
			Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD dr. Adhyatma, MPH	Persentase penyediaan layanan dan penunjang layanan rumah sakit di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%
			Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD dr. Rehatta	Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSUD dr. REHATTA	%
			Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD dr. Rehatta	Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSUD dr. REHATTA	%
			Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD dr. Rehatta	Persentase penyediaan layanan dan penunjang layanan rumah sakit di RSUD dr. REHATTA	%
			Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%
			Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Persentase Penyediaan Fasilitas Alat Kesehatan Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%
			Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Persentase penyediaan layanan dan penunjang layanan RS di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%
			Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Persentase pasien jiwa bunuh diri di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%
			Meningkatnya standarisasi pelayanan di RSJD Dr. Arif Zainudin	Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%
			Meningkatnya standarisasi pelayanan di RSJD Dr. Arif Zainudin	Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan/Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%
			Meningkatnya standarisasi pelayanan di RSJD Dr. Arif Zainudin	Persentase penyediaan layanan dan penunjang layanan rumah sakit di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%
			Meningkatnya standarisasi pelayanan di RSJD Dr. Arif Zainudin	Persentase pasien bunuh diri di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%
			Meningkatnya standarisasi pelayanan di RSJD Dr. Arif Zainudin	Persentase Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%
			Meningkatnya standarisasi pelayanan di RSJD Dr. Arif Zainudin	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%
			Meningkatnya Standarisasi Pelayanan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%
			Meningkatnya Standarisasi Pelayanan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Persentase Penyediaan Fasilitas Alat Kesehatan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%
			Meningkatnya Standarisasi Pelayanan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Persentase Penyediaan Layanan dan Penunjang Layanan RS di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%
			Meningkatnya Standarisasi Pelayanan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Persentase Pasien Bunuh Diri di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%
			Meningkatnya Standarisasi pelayanan di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%

TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR KINERJA DAERAH	RENSTRA PERANGKAT DAERAH				SATUAN
	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	OUTCOME - PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
1	2	3	4	5	6
			Meningkatnya Standarisasi pelayanan di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan/alat penunjang medik untuk mendukung layanan unggulan dan layanan rumah sakit di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%
			Meningkatnya Standarisasi pelayanan di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	Persentase pemenuhan layanan dan penunjang layanan Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam sesuai standar	%
			Meningkatnya Standarisasi pelayanan di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	Persentase capaian indikator mutu layanan Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
			Meningkatnya sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%
			Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan pelatihan sesuai Program Prioritas Nasional di Bapelkes Provinsi	Persentase pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang teregestrasi dan berkualitas	%
			Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia kesehatan di RSUD Dr.MOEWARDI	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang meningkat kompetensinya di RSUD Dr. Moewardi	%
			Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang meningkat kompetensinya di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%
			Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia kesehatan di RSUD dr. Adhyatma, MPH	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang meningkat kompetensinya di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%
			Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia kesehatan di RSUD dr. Rehatta	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang meningkat kompetensinya di RSUD dr. REHATTA	%
			Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang meningkat kompetensinya di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%
			Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSJD Dr. Arif Zainudin	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang meningkat kompetensinya di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%
			Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Meningkat Kompetensinya di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%
			Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Meningkat Kompetensinya di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		
			Meningkatnya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dalam rangka peningkatan standarisasi pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
			Meningkatnya kabupaten/kota yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai Rumah Tangga Sehat	%
			Meningkatnya Promosi dan Advokasi masyarakat di RSUD Dr.MOEWARDI	Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dan pemberdayaan dari RSUD Dr. Moewardi	%
			Meningkatnya Promosi dan Advokasi masyarakat di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dan pemberdayaan dari RSUD Prof Dr Margono SoekarjoRSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%
			Meningkatnya Promosi dan Advokasi masayarakat di RSUD dr. Adhyatma, MPH	Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dan pemberdayaan dari RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%
			Meningkatnya Promosi dan Advokasi masayarakat di RSUD dr. Rehatta	Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dan pemberdayaan dari RSUD dr. REHATTA	%
			Meningkatnya Promosi dan Advokasi masyarakat di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Persentase peningkatan masyarakat penerima pemberdayaan dari RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%
			Meningkatnya Promosi dan Advokasi masyarakat di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dari RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%
			Meningkatnya promosi dan advokasi masyarakat di RSJD Dr. Arif Zainudin	Persentase peningkatan masyarakat penerima pemberdayaan dari RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%
			Meningkatnya promosi dan advokasi masyarakat di RSJD Dr. Arif Zainudin	Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dari RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%
			Meningkatnya Promosi dan Advokasi Masyarakat di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Persentase peningkatan masyarakat penerima pemberdayaan dari RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%
			Meningkatnya Promosi dan Advokasi Masyarakat di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dari RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%
			Meningkatnya Promosi dan Advokasi masyarakat di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	Persentase kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat dari Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%
	Dinas Sosial				
	Menurunkan Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) *			Persentase Populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) *	%
		Terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) **		Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM Bidang Sosial **	%
		Menurunnya Populasi PPKS Fakir Miskin **		Persentase Populasi PPKS Fakir Miskin **	%
		Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial **		Persentase PSKS yang meningkat kompetensinya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial **	%
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		

TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR KINERJA DAERAH	RENSTRA PERANGKAT DAERAH				SATUAN
	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	OUTCOME - PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
1	2	3	4	5	6
			Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas bagi PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial	%
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		
			Terfasilitasinya penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	%
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
			Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS dalam panti	%
			Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial (di Panti Pelayanan Sosial)	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial (di Panti Pelayanan Sosial)	%
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		
			Terfasilitasinya penerbitan rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan	Persentase rekomendasi Pengangkatan Anak yang diterbitkan atas Pengajuan Pengangkatan Anak	%
			Terselenggarannya jaminan sosial bagi PPKS yang layak dan tepat sasaran	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) penerima pelayanan jaminan sosial	%
			Meningkatnya kemampuan PPKS Fakir Miskin dalam memenuhi kebutuhannya	Persentase PPKS Fakir miskin yang mendapatkan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	%
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA		
			Terselenggaranya perlindungan sosial bagi korban bencana sesuai standar SPM bidang sosial	Persentase Perlindungan sosial bagi korban bencana sesuai SPM Bidang Sosial	%
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		
			Taman makam pahlawan terkelola dengan baik	Persentase Taman makam pahlawan terkelola	%
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				
	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak Anak serta Perlindungan Perempuan dan Anak *			Indeks Ketimpangan Gender (IKG) *	Angka
		Meningkatnya peran perempuan dalam bidang pembangunan **		Indeks Pembangunan Gender (IPG) **	Angka
		Meningkatnya Perlindungan Anak **		Indeks Perlindungan Anak (IPA) **	Angka
	Meningkatkan Keluarga Berkualitas *			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) *	Angka
		Terkendalinya Jumlah Penduduk **		*Total Fertility Rate* (TFR) **	Angka
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga **		Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) **	
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
			Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Provinsi	Persentase Anggaran Responsif Gender di Perangkat Daerah Provinsi	%
			Meningkatnya Kapasitas Perempuan di Bidang Ekonomi	Persentase Perempuan yang difasilitasi pelatihan menjadi wirausaha	%
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		
			Meningkatnya jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan di tingkat Kabupaten/Kota sesuai standar	Persentase UPTD PPA kabupaten/kota sesuai standar layanan	%
			Meningkatnya pelayanan korban kekerasan perempuan secara komprehensif	Persentase korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		
			Meningkatnya komitmen Kabupaten/Kota dalam pembangunan ketahanan keluarga	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan terkait ketahanan keluarga	%
			Meningkatnya kualitas lembaga Layanan Keluarga yang responsif gender dan hak anak di Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan keluarga yang terlatih	%
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		
			Meningkatnya kualitas Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Angka
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
			Meningkatnya kualitas perlindungan khusus anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka
			Meningkatnya pelayanan korban kekerasan anak secara komprehensif	Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif	%
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		
			Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mengintregasikan GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan	Persentase kabupaten/kota yang mengintregasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan daerah	%
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
			Meningkatnya kesertaan KB	Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	%
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
			Meningkatnya kampung keluarga berkualitas mandiri dan berkelanjutan	Persentase Kampung KB mandiri dan berkelanjutan	%
	Dinas Kepemudaan dan Olahraga				
	Meningkatkan Daya Saing Keolahragaan *			Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) *	Angka
		Meningkatnya Pembangunan Keolahragaan **		Tingkat Prestasi Olahraga Tingkat Nasional **	%
				Tingkat Kebugaran **	%
	Meningkatkan Daya Saing Kepemudaan *			Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) *	Angka
		Meningkatnya Pembangunan Kepemudaan **		Angka Lapangan dan Kesempatan Kerja Pemuda **	Angka
				Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda **	Angka

TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR KINERJA DAERAH	RENSTRA PERANGKAT DAERAH				SATUAN
	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	OUTCOME - PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
1	2	3	4	5	6
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		
			Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi	%
			Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	%
			Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan	%
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN		
			Meningkatnya prestasi olahraga tingkat nasional/ internasional	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	%
			Meningkatnya prestasi olahraga tingkat nasional/ internasional	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional	%
			Meningkatnya prestasi olahraga tingkat nasional/ internasional	Persentase Atlet pelajar dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional	%
			Meningkatnya Tingkat Kebugaran Masyarakat	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	%
	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
	Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan *			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) *	Angka
		Meningkatnya Partisipasi Budaya **		Angka Melek Budaya **	%
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		
			Meningkatnya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Persentase Warisan Budaya Tak Benda berperingkat Nasional	%
			Meningkatnya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang berdayaguna	%
			Meningkatnya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Taman Budaya Jawa Tengah	Persentase kesenian/tradisi budaya yang dilestarikan	%
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		
			Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga Kesenian	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%
			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		
			Meningkatnya pelindungan dan pengembangan tradisi dan kesejarahan	Persentase literasi kesejarahan dan tradisi	%
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		
			Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya berperingkat Nasional	%
			Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya berdayaguna	%
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		
			Meningkatnya Tata Kelola Layanan Museum	Indeks Kepuasan Masyarakat	%
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				
	Meningkatkan literasi masyarakat *			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) *	Angka
		Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat **		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (NTGM) **	Angka
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	%
			Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka
			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		
			Meningkatnya koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Persentase peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah	%
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
	Meningkatkan Penduduk Yang Bekerja *			Rasio Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (EPR) *	%
		Meningkatnya penempatan dan perluasan kesempatan kerja **		Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja **	%
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan **	%
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja **		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja **	Juta Rupiah
		Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja **		Persentase Tenaga Kerja Yang Kompeten **	%
			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		
			Meningkatnya Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	%
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
			Meningkatnya pencari Kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Persentase pencari Kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	%
			Meningkatnya lembaga pelatihan yang terakreditasi	Persentase lembaga pelatihan yang terakreditasi	%
			Meningkatnya perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	Persentase perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	%
			Meningkatnya pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi dibidang industri	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi dibidang industri di Balai Latihan Kerja Industri	%

TUJUAN/SASARAN/INDIKATOR KINERJA DAERAH	RENSTRA PERANGKAT DAERAH				SATUAN
	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	OUTCOME - PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PERANGKAT DAERAH	
1	2	3	4	5	6
			Meningkatnya pencari kerja yang memiliki sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi dibidang pertanian	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi dibidang pertanian di Balai Latihan Kerja Pertanian	%
			Meningkatnya tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan	Persentase tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan di Balai Pengembangan Produktivitas	%
			Meningkatnya pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa dan pekerjaan migran	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa dan pekerjaan migran di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata	%
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
			Meningkatnya penciptaan lapangan kerja di sektor formal	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%
			Meningkatnya tenaga kerja baru di sektor informal	Persentase penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal	%
			Meningkatnya penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	%
			Meningkatnya pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	Pesentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		
			Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%
			Meningkatnya LKS Bipartit yang terbentuk	Persentase LKS Bipartit yang terbentuk	%
			Meningkatnya perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	%
			Meningkatnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%
			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN		
			Menurunnya pelanggaran norma ketenagakerjaan	Persentase kejadian pelanggaran norma ketenagakerjaan	%
			Meningkatnya perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	Persentase perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	%
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		
			Meningkatnya penempatan transmigrasi terhadap animo transmigrasi	Persentase penempatan transmigrasi terhadap animo transmigrasi	%
			Meningkatnya pelatihan transmigrasi terhadap penempatan transmigrasi	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi di Balai Latihan Kerja Pertanian	%
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
	Meningkatkan Kontribusi Koperasi dan UMKM terhadap PDRB *			Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB *	%
		Meningkatnya Jumlah Wirausaha di Jawa Tengah **		Rasio Kewirausahaan Daerah **	%
			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		
			Meningkatnya Pelaku Usaha yang dibantu buruh tetap	Proporsi Pelaku Usaha dibantu buruh tetap terhadap pelaku usaha dibantu buruh	%
			Meningkatnya kualitas SDM UMKM	Persentase SDM UMKM yang berkualitas	%
			Meningkatnya kualitas SDM Wirausaha	Persentase Wirausaha yang berkualitas	%
	Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perindustrian *			Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian *	%
		Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Industri Tekstil dan Alas Kaki **		Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja industri teksil dan alas kaki **	%
			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
			Meningkatnya peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	%

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH

4.1. KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN WILAYAH

a. Kebijakan Pengembangan Wilayah Berdasarkan RTRW Provinsi

Kebijakan pengembangan wilayah Jawa Tengah memedomani Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044, dimana tujuan penataan ruang dalam konteks pengembangan wilayah selama dua puluh tahun ke depan adalah "**Mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang maju, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata dalam keterpaduan pengelolaan alam darat dan laut pesisir**". Guna mewujudkan tujuan tersebut didukung dengan kebijakan penataan ruang meliputi:

1. peningkatan sistem pusat permukiman yang mengintegrasikan pengembangan perkotaan dan perdesaan;
2. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata sebagai pendorong pengembangan wilayah;
3. peningkatan pelestarian kawasan lindung untuk mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim;
4. pemanfaatan kawasan budi daya yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
5. peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
6. pengembangan KSP (Kawasan Strategis Provinsi); dan
7. peningkatan Kawasan Pertahanan Dan Keamanan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044, pengembangan wilayah Jawa Tengah dibagi menjadi 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan (WP). Wilayah pengembangan adalah pengelompokan kabupaten/kota yang memiliki keterkaitan pengembangan dari aspek fisik alam, sosial, ekonomi dan/atau budaya sebagai dasar koordinasi pembangunan dan keterpaduan pengembangan wilayah antar kabupaten/kota. Sepuluh WP di Provinsi Jawa Tengah dengan pembagian wilayah kabupaten/kota sebagai berikut:

1. WP Cibalingmas meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas;
2. WP Wonobanjar meliputi Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara;
3. WP Keburejo meliputi Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo;
4. WP Gelangmanggung meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung;
5. WP Subosukawonosraten meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten;
6. WP Jekuti meliputi Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati;
7. WP Banglor meliputi Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang;

8. WP Kedungsepur meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan;
9. WP Petanglong meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan;
10. WP Bregasmalang meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang.

Pembagian wilayah pengembangan Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.

Sumber: Perda No. 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044

Gambar 4.1.
Pembagian Wilayah Pengembangan (WP) di Provinsi Jawa Tengah

b. Kebijakan Pengembangan Wilayah Berdasarkan RPJPD Provinsi

Kebijakan pengembangan wilayah Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045, dimana visi daerah Jawa Tengah tahun 2025-2045 adalah **"Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan".** Dari 8 misi pembangunan, terdapat 1 Misi yang langsung terkait dengan pembangunan kewilayahan, yaitu Misi ke-6 terkait "**Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan**". Arah pembangunan kewilayahan di Jawa Tengah adalah untuk mengembangkan perekonomian wilayah berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing daerah, dimana pembangunan perekonomian Jawa Tengah berbasis pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata.

Pada Misi ke-7 terkait "**Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**" menjadi salah satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah serta menjadi faktor kunci pengembangan wilayah. Dukungan pembangunan sarana dan prasarana tersebut berkaitan dalam hal pergerakan orang, distribusi barang dan jasa (efisiensi biaya perjalanan dan logistik), serta upaya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Selain itu terdapat sarana prasarana sumber daya air, jaringan listrik, energi, komunikasi dan informasi.

Dalam RPJPD, pembangunan wilayah di Jawa Tengah dibagi menjadi 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan (WP) dengan dengan mempertimbangkan kesatuan geografis, karakteristik dan interaksi wilayah serta sistem permukiman. Pembagian wilayah pengembangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dan kelompok pendapatan, yang dilihat dari tingkat kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi serta berfungsi untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang masih berada pada performa pertumbuhan yang rendah dan mendorong kerja sama antardaerah yang saling menguntungkan pada berbagai sektor.

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Jawa Tengah Pada RPJMN 2025-2029

Dalam RPJMN 2025–2029 terdapat 8 Prioritas Nasional yang terdiri dari 83 Kegiatan Prioritas Utama yang merupakan langkah konkret pencapaian sasaran jangka menengah terutama untuk pencapaian sasaran penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan. Kegiatan Prioritas Utama merupakan kebijakan terintegrasi yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kegiatan Prioritas Utama ini menjadi fokus.

Dalam RPJMN 2025–2029 terdapat Proyek Strategis Nasional (PSN) yang disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis yang utamanya mendukung dan memastikan pelaksanaan. Indikasi PSN di Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Swasembada Pangan: Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat (Nasional), Layanan Irigasi Pendukung;
2. Lumbung Pangan Nasional (Nasional), Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi (Nasional)
3. Swasembada Air: *Giant Sea Wall* Pantai Utara Jawa (DKI, Jawa Barat, Jawa timur, Banten dan Jawa Tengah), Bendungan Jragung (Jawa Tengah), SPAM Regional Wosusokas;
4. Swasembada Energi: Bioetanol (Berbasis Tebu) (Lokasi: Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa tengah, DIY, Jawa timur, Sulawesi Selatan, Papua Selatan, RDMPRU IV Cilacap (*Rescoping), Biorefinery* Cilacap;
5. Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital: Hilirisasi Singkong dan ubi jalar: Penguatan Penyediaan Bahan Baku Hilirisasi Tepung Singkong, Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang.

Pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 dalam Lampiran IV tentang Arah Pembangunan Kewilayahan terdapat 5 pembagian prioritas kawasan dengan total sejumlah 18 Kawasan yang berada di Jawa Tengah, yaitu:

1. Kawasan Pertumbuhan (8 Kawasan): Kawasan Perkotaan Purwokerto, Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Borobudur-Dataran Tinggi Dieng, Kawasan Perkotaan Cilacap dan Kawasan Pengembangan Industri Cilacap, Kawasan Perkotaan Pekalongan-Batang dan Kawasan Pengembangan Industri Batang, WM Semarang dan Kawasan Pengembangan Industri Kendal-Semarang-Demak-Kudus, Kawasan Perkotaan Surakarta, Kawasan Pengembangan Industri Surakarta-Boyolali-Karanganyar-Sukoharjo, Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Solo-Sragen-Karanganyar, Kawasan Perkotaan Rembang;

2. Kawasan komoditas unggulan (2 Kawasan) yaitu komoditas tebu di Pegunungan Kendeng (Rembang, Pati, Blora, dan Sragen) dan Ekonomi Biru di Pati–Rembang, dan Cilacap;
3. Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi (4 Kawasan):
   a. Swasembada Pangan dan Air: Pemali-Comal (Brebes, Kab. Tegal, Pemalang, Kab. Pekalongan dan Batang);
   b. Swasembada Pangan, Air dan Energi: Dieng–Serayu–Bogowonto (Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen dan Purworejo); Jragung–Tuntang–Serang–Lusi–Juwana (Kabupaten Semarang, Demak, Jepara, Pati, Kudus, Rembang, Grobogan); Bengawan Solo (Blora, Sragen, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri).
4. Kawasan Afirmasi (1 Kawasan): Brebes (Percepatan Pengentasan Kemiskinan);
5. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana (3 Kawasan): TN Merbabu-Merapi, TN Karimunjawa dan *Geopark* Kebumen.

Sepuluh WP di Provinsi Jawa Tengah menjadi bagian dalam lokasi prioritas pada masing-masing kawasan sebagaimana gambar berikut.

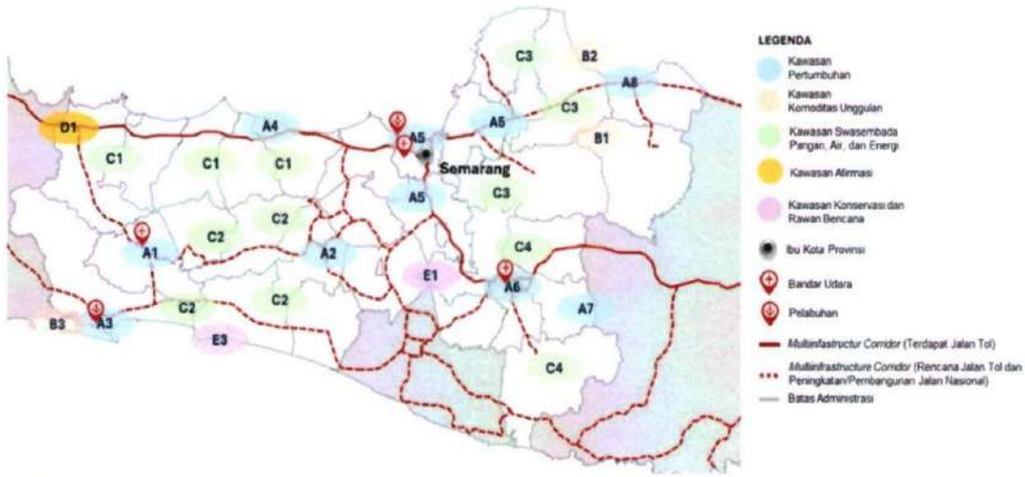

Sumber: RPJMN 2025-2029 (Lampiran IV, Hal. 97), BAPPENAS, 2025

Gambar 4.2.
Pengembangan Kewilayahan di Jawa Tengah Pada RPJMN 2025-2029

4.2. ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PER WILAYAH PENGEMBANGAN TAHUN 2025–2029

Pembangunan wilayah Jawa Tengah tahun 2025–2029 yang terbagi dalam sepuluh wilayah pengembangan diarahkan dengan kebijakan umum **"Pengembangan Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru Berbasis Wilayah Pengembangan"**. Kebijakan tersebut juga dalam rangka untuk peningkatan perekonomian daerah Jawa Tengah serta memberikan kontribusi untuk perwujudan Indonesia Emas 2045. Pengembangan episentrum pertumbuhan ekonomi baru Jawa Tengah berbasis 10 wilayah pengembangan atau 10 titik aglomerasi Jawa Tengah merupakan implementasi atau penjabaran langsung dari RPJMD Tahun 2025-2029 pada Misi 2: Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan; Misi 4 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif; dan Misi 6 Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja

dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Pengembangan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru juga merupakan bagian dari "Fokus Kerja Jateng Makmur", dimana merupakan salah satu langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Jawa Tengah melalui Transformasi Ekonomi yang berfokus pada: Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan; Perencanaan Tata Ruang yang responsif dengan mengoptimalkan Pemerintahan Partisipatif, Kolaboratif dan Integratif serta dukungan Iklim Investasi.

Penjabaran pengembangan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru melalui Pengembangan Program Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Wilayah Pengembangan (WP) meliputi Program Unggulan dan Program Strategis.

Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi adalah program lintas sektor, lintas wilayah dan lintas kewenangan di setiap WP yang dinilai paling prioritas dan siap menjadi penggerak percepatan pertumbuhan ekonomi secara jangka menengah ditingkat Jawa Tengah dan/atau Nasional.

Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi merupakan pendamping Program Unggulan yang juga berpotensi sebagai penggerak perekonomian ditingkat WP dan/atau lintas WP.

Beberapa pertimbangan dalam menentukan Program Unggulan dan Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi di setiap WP adalah sebagai berikut:

1. Merupakan keberlanjutan program-program yang sudah dilakukan utamanya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 terkait Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah;
2. Mempedomani RTRW dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah;
3. Mempedomani Arah Pembangunan Kewilayahan sebagaimana RPJMN Tahun 2025–2029 (Lampiran IV);
4. Memperhatikan Visi, Misi, Fokus Kerja, Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Prioritas, Program Intervensi, Program Aksi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2025–2029;
5. Mempertimbangkan masukan dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Memperhitungkan potensi lokal unggulan per WP yang dapat berdampak positif pada sektor lain, mempunyai rantai nilai (*value chain*) panjang dan paling tinggi pertambahan nilainya (*value added*).

Program Unggulan dan Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi di masing-masing WP sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1.
Program Unggulan dan Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi pada Setiap Wilayah Pengembangan (WP)

No.	WP	Program Penggerak Pertumbuhan Ekonomi
1.	Cibalingmas	**Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:** Pengembangan *integrated ecotourism* Sabuk Gunung Slamet (Baturaden–Serang Purbalingga) dan Kawasan Ekosistem Mangrove Segara Anakan **Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:** • Pengembangan industri Cilacap–Banyumas–Purbalingga (komoditas unggulan: ikan, gula, jamu, minyak atsiri) • Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, kelapa, karet, cabai, durian, sapi perah, kambing, itik, ayam buras, garam, serta perikanan budidaya (sidat) dan tangkap)
2.	Wonobanjar	**Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:** Pengembangan *geotourism* (Kawasan Dieng) yang terintegrasi dengan Kawasan Borobudur **Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:** • Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: teh, tembakau, cabai dan alpukat serta sektor kehutanan (kayu sengon), sapi potong, domba, serta perikanan budidaya) • Pengembangan sektor industri gula, tembakau dan industri kayu dari barang kayu dan gabus
3.	Keburejo	**Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:** Pengembangan *geotourism* (*Geopark* Kebumen dan Pantai) yang terintegrasi dengan Borobudur dan terpadu dengan pariwisata DIY **Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:** • Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: kelapa, tanaman pangan, garam, sapi potong, kambing, ayam buras, perikanan tangkap dan budidaya) • Pengembangan sektor industri garam, gula dan pengolahan ikan
4.	Gelangmanggung	**Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:** Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur (*cultural heritage tourism*) yang terintegrasi dengan Kawasan Dieng dan terpadu dengan pariwisata DIY **Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:** • Pengembangan ekonomi kreatif (kriya) • Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: kopi, tembakau, aren, tanaman perkebunan, sapi potong, kerbau, domba, itik, ayam buras, dan perikanan budidaya)
5.	Subosukawonosraten	**Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:** Pengembangan Solo Raya sebagai MICE (*Event Tourism*) dan wisata alam, serta budaya yang terpadu dengan pengembangan pariwisata DIY **Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:** • Pengembangan Industri Surakarta–Boyolali–Sukoharjo–Karanganyar–Klaten (gula, susu, tembakau, kayu, tekstil dan alas kaki)

No.	WP	Program Penggerak Pertumbuhan Ekonomi
		• Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, ubi, kacang mete, sapi potong, sapi perah, kambing, domba, itik, perikanan budidaya dan tebu)
6.	Jekuti	**Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:** Pengembangan Industri Kudus-Jepara-Pati (*furniture*, tepung, gula, garam dan pengolahan ikan) **Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:** • Pengembangan *marine tourism* dan wisata religi. • Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, tebu, ubi kayu, kelapa kopyor, sapi potong, kerbau, perikanan tangkap, dan budidaya serta garam)
7.	Banglor	**Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:** Optimalisasi kawasan hutan sebagai wanatani dan *ecotourism* **Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:** • Pengembangan sektor industri garam, gula dan pengolahan ikan • Pengembangan *cultural heritage tourism* Kota Pusaka Lasem dan Wisata Pantai • Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: tebu, kelapa kopyor, sapi potong, kambing, ayam buras, perikanan tangkap dan garam)
8.	Kedungsepur	**Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:** Pengembangan Kawasan Industri Kendal–Demak–Semarang (industri prioritas: kimia, mesin, perlengkapan industri, makanan dan minuman, alas kaki, tekstil, daging, jamu, dan pengolahan ikan) **Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:** • Pengembangan Metropolitan Semarang sebagai *Global City* • Pengembangan *cultural heritage tourism* (Kota Lama Semarang, Candi Gedongsongo, Museum Kereta Api dsk) • Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, jagung, bawang merah, tanaman perkebunan, sapi perah, kerbau, kambing, ayam buras, kedelai, garam dan perikanan tangkap)
9.	Petanglong	**Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:** Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) sebagai kawasan industri manufaktur berteknologi tinggi **Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:** • Pengembangan *shopping tourism*, pariwisata alam, budaya dan ekonomi kreatif • Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, teh, kerbau, kambing, itik, ayam buras, dan perikanan tangkap)
10.	Bregasmalang	**Program Unggulan Penggerak Pertumbuhan Ekonomi:** Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, bawang merah, cabai, nanas, kerbau, domba, itik, ayam buras, garam, serta perikanan budidaya dan tangkap)

No.	WP	Program Penggerak Pertumbuhan Ekonomi
		Program Strategis Penggerak Pertumbuhan Ekonomi: • Pengembangan Kluster Industri Kecil dan Menengah Brebes-Tegal-Pemalang (gula, pengolahan ikan, barang anyaman dari bambu dan rotan) • Pengembangan *integrated ecotourism* Sabuk Gunung Slamet (Guci-Kaligua).

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, hasil analisis, 2025

Dalam rangka mengoptimalkan tata kelola implementasi kebijakan ”Pengembangan Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru Berbasis Wilayah Pengembangan” di 10 wilayah pengembangan/wilayah aglomerasi tersebut, maka akan dibentuk kelembagaan pengelolaan 10 wilayah aglomerasi. Kebijakan pembentukan kelembagaan pengelolaan 10 wilayah aglomerasi ini juga merupakan bagian dari 136 Program Daerah yang menjadi arahan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Tengah yaitu ” Pembentukan badan aglomerasi wilayah pembangunan di Jawa Tengah”. Kelembagaan Badan Aglomerasi untuk pengelolaan 10 WP ini diarahkan memiliki tugas dan fungsi untuk:

1. menjamin sinkronisasi kebijakan dan pembangunan lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu wilayah pengembangan;
2. melakukan koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota dalam satu wilayah pengembangan dalam mengimplementasikan program unggulan dan program strategis dalam satu wilayah pengembangan yang telah ditetapkan;
3. melakukan koordinasi dan fasilitasi kerja sama antara pemerintah kabupaten/kota dalam satu wilayah pengembangan dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pihak lainnya dalam mengoptimalkan implementasi program unggulan dan program strategis dalam satu wilayah pengembangan.

Pembentukan Badan Aglomerasi Jawa Tengah ini akan diatur dalam kebijakan dan regulasi lebih lanjut.

Selanjutnya arahan kebijakan per wilayah pengembangan secara rinci diuraikan sebagai berikut.

4.2.1. WP Cibalingmas

Dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Cibalingmas berikut adalah indikasi kebutuhan rencana **program unggulan dan program strategis** selama lima tahun kedepan yang merupakan lintas kewenangan sebagai berikut.

1. **Pengembangan *Integrated Ecotourism* Sabuk Gunung Slamet (Baturaden–Serang Purbalingga) dan Kawasan Ekosistem *Mangrove* Segara Anakan**
   a. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antarmoda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui:
      1) Upaya mendorong pengembangan dan optimalisasi Bandara JB. Soedirman Purbalingga dengan rencana dukungan daerah melalui peningkatan akses kualitas sarana dan prasarana transportasi menuju bandara;

2) Penanganan ruas jalan provinsi yang terhubung dengan jalan nasional serta kawasan *Ecotourism* Baturaden dan Segara Anakan (Buntu-Slarang, Menganti-Kesugihan);
3) Pengembangan transportasi yang terintegrasi antarmoda dan antarkota/ wilayah untuk mempermudah/mendukung akses pariwisata diantaranya melalui penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng Koridor Purwokerto–Purbalingga) yang terkoneksi dengan Trans Banyumas dan moda transportasi kereta api serta angkutan lanjutan lainnya termasuk terintegrasi dengan kawasan pariwisata dan perindustrian;
4) Peningkatan kondisi dan kinerja serta optimalisasi terminal tipe B sebagai simpul perekonomian pada Terminal Purbalingga (simpul layanan Trans Jateng);
5) Pemenuhan fasilitas keselamatan pada ruas Purwokerto–Baturaden dan Adipala-Bodo Karangbolong;
6) Upaya mendorong optimalisasi Bandara Tunggul Wulung salah satunya sebagai *home base flying school*;
7) Upaya mendorong penyediaan infrastruktur perkeretaapian (reaktivasi rel nonaktif Banyumas–Purbalingga–Wonosobo);
8) Upaya mendorong pembangunan jalan tol Cilacap-Pejagan;

b. Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui:
1) Upaya mendorong kerja sama antar*stakeholder* untuk pengembangan pariwisata sabuk Gunung Slamet;
2) Penguatan SDM pariwisata berkualitas melalui pelatihan dan pembinaan guna mendukung pengembangan pariwisata yang berdaya saing;
3) Upaya mendorong pengembangan produk lokal UMKM dan industri kecil menengah mendukung pariwisata;
4) Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis alam terutama pantai dan dataran tinggi dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan;
5) Fasilitasi pengembangan berbagai even kebudayaan untuk pertumbuhan ekonomi antara lain sedekah bumi/laut, festival perahu, Festival Gunung Slamet, festival budaya dan lainnya;
6) Upaya mendorong promosi budaya lokal melalui kegiatan pameran budaya internasional melalui kerja sama dengan diaspora untuk budaya lokal di level global;
7) Mendorong sinergi dan kolaborasi para pihak dalam pengelolaan maupun pemulihan area bernilai keanekaragaman hayati dan/atau jasa ekosistem tinggi khususnya di Gunung Slamet dan Segara Anakan;
8) Upaya mendorong peningkatan Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP) berbasis potensi lokal pariwisata yang didukung oleh pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri kecil dan menangah, serta mendorong pembentukan PKP baru sebagai pusat pertumbuhan perdesaan.

2. Pengembangan Industri Cilacap–Banyumas–Purbalingga (komoditas unggulan: ikan, gula, jamu, minyak atsiri)

a. Menyelaraskan pengembangan industri Cilacap-Banyumas;

b. Pengembangan industri hasil pertanian, perikanan, kehutanan, serta pertambangan dan energi dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam;
c. Mendorong pengembangan prasarana dan sarana Pelabuhan Tanjung Intan dan mendorong revitaliasi pelabuhan darat (*dryport* Banyumas) secara terpadu sebagai pintu ekspor dan impor;
d. Mendorong perwujudan Kawasan Perkotaan Cilacap sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan Kawasan Perkotaan Purwokerto sebagai Pusat Kegiatan Wilayah;
e. Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan Dunia Usaha;
f. Mendorong percepatan investasi di Kawasan Industri Cilacap-Banyumas-Purbalingga melalui upaya promosi dan kemudahan perizinan;
g. Inisiasi rencana penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (pengembangan koridor baru Trans Jateng/Trans Cibalingmas Koridor Cilacap-Banyumas) dengan peningkatan peran serta dan keterlibatan pemerintahan kabupaten, yang terintegrasi dengan moda angkutan lainnya (Trans Jateng Koridor Purwokerto-Purbalingga dan Trans Banyumas) termasuk terintegrasi dengan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan sekaligus mendukung aksesibilitas kawasan pariwisata;
h. Menyiapkan sistem pendidikan menengah untuk menciptakan kesesuaian pendidikan prakerja dengan membangun *link and match* SMK/SMA sederajat dengan dunia industri;
i. Pengembangan pengelolaan kawasan industri berbasis lingkungan;
j. Mendorong pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan industri;
k. Peningkatan dan standarisasi jalan provinsi ruas jalan Adipala-Bodo/Ayah dan Jladri-Karangbolong-Bodo/Ayah untuk mendukung logistik dan aksesibilitas jalur selatan Jawa Tengah;
l. Pengembangan ekspor produk unggulan;
m. Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi SNI dan merek;
n. Pengaktifan kembali Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Cilacap.

3. **Peningkatan Produksi Dan Hilirisasi Sektor Pertanian (komoditas unggulan: padi, kelapa, karet, cabai, durian, sapi perah, kambing, itik, ayam buras, garam, serta perikanan budidaya (sidat) dan tangkap)**
   a. Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas), melalui:
      1) Upaya mendorong pengendalian alih fungsi lahan pertanian serta pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan melalui kebijakan penataan ruang perlindungan lahan pertanian serta pelaksanaan reforma agraria dengan penataan aset dan akses;
      2) Upaya mendorong pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap sebagai sentra pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya;
      3) Upaya mendorong peningkatan perikanan tangkap dengan pelatihan bagi nelayan agar lebih kompeten dalam memanfaatkan teknologi tanpa merusak ekosistem laut;
      4) Upaya mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas jalur distribusi pertanian yang didominasi ruas jalan kabupaten dan desa;

5) Upaya mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam peningkatan hasil panen melalui implementasi Riset Inovasi Teknologi (RIT) di sektor pertanian;
6) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) dan pengembangan kawasan peternakan;
7) Peningkatan pengelolaan, penyediaan, dan pengembangan prasarana sarana pertanian;
8) Peningkatan sistem jaringan irigasi diantaranya rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Banjaran-Banyumas, Serayu, Tajum, Banjarcahyana, Lokbok/Maganti (kewenangan pusat);
9) Peningkatan pasokan sumber air baku pertanian, diantaranya mendorong pembangunan Bendungan Matenggeng dan Waduk Kaliurip Kabupaten Banyumas;
10) Peningkatan saluran irigasi pergaraman;
11) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) dan pengembangan kawasan peternakan;
12) Penyediaan benih/bibit berkualitas;
13) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT);
14) Upaya mendorong pengembangan agropolitan perkotaan (Purwokerto);
15) Pengembangan pelabuhan perikanan;

b. Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), melalui:
1) Penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian; penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan; pemasaran dan *branding* produk; pada sektor perikanan melalui pelatihan diversifikasi produk olahan hasil perikanan; serta fasilitasi kemasan produk dan jejaring pemasaran hasil perikanan;
2) Pengembangan prasarana dan sarana pelabuhan perikanan, *cold storage* dan sentra produksi perikanan untuk meningkatkan pengelolaan hasil laut lebih efisien dan berkelanjutan;
3) Peningkatan promosi produk industri agro melalui fasilitasi pameran.

Selain indikasi kebutuhan rencana program implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru dimaksud, terdapat beberapa indikasi rencana program kewilayahan selama lima tahun kedepan yang juga merupakan lintas kewenangan di WP Cibalingmas, antara lain sebagai berikut.

1. Lingkup Sosial dan Kependudukan

a. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni, fasilitasi rumah susun untuk MBR bekerja sama dengan BUMN, BUMD dan swasta, serta program jambanisasi;
b. Pengembangan SMK Unggulan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pasar/industri, melalui penyesuaian kurikulum, peningkatan kompetensi guru, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan lulusan yang kompeten dan siap kerja;
c. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, *stroke*, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSU provinsi dan kabupaten/kota, khususnya di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan RSUD Cilacap (PHTC);

d. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi yang menyasar kelompok usia sekolah, usia produktif, dan lanjut usia (lansia) sejalan dengan pembudayaan hidup sehat serta perlu diperkuat dengan penekanan pada pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM), khususnya melalui pengendalian konsumsi produk hasil tembakau serta pangan tinggi garam, gula, dan lemak; upaya promotif preventif ini harus didukung oleh program penyehatan lingkungan yang efektif; sedangkan dalam rangka penuntasan *stunting* diarahkan pada aspek pencegahan untuk memastikan anak yang sehat tidak menjadi *stunting*;
e. Pemberian Makan Bergizi Gratis untuk pemenuhan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri termasuk penguatan ekosistem pendukung;
f. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di tingkat kecamatan.

2. Lingkup Perekonomian

a. Mendorong percepatan investasi di Kawasan Industri Cilacap;
b. Penguatan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk mendorong pengembangan UMKM/ industri kecil menengah dan sektor pariwisata;
c. Mendorong peningkatan perikanan tangkap melalui pelatihan bagi nelayan agar lebih kompeten dalam memanfaatkan teknologi tanpa merusak ekosistem laut.

3. Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan

a. Memperpadukan pengembangan koridor Kawasan Perkotaan Cilacap-Purwokerto-Purbalingga;
b. Mendorong pengembangan wilayah Kabupaten Cilacap yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dengan pusat pengembangan di Kawasan Perkotaan Majenang;
c. Mendorong peningkatan pengelolaan Kawasan Strategis Nasional Pacangsanak;
d. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa;
e. Mendorong dan memfasilitasi penanganan/penataan permukiman pada kawasan kumuh secara terpadu;
f. Preservasi jalan ruas Cilacap-Kebumen-Purworejo (Lintas Selatan Jawa Tengah);
g. Rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir selatan;
h. Rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan untuk pemulihan kapasitas daya dukung DAS Serayu;
i. Mendorong pemanfaatan sumber daya hayati (bioprospeksi) dan jasa ekosistem secara adil serta berkelanjutan;
j. Inisiasi pembangunan SPAM Regional Maslancip;
k. Pembangunan IPLT Regional Purbalingga–Banjarnegara;
l. Mendorong dan fasilitasi pengelolaan SPAM, SPAL, dan persampahan berbasis masyarakat;
m. Mendorong dan fasilitasi rencana pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau;
n. Mendorong pengelolaan sampah berbasis wilayah yang berkelanjutan;

o. Mendorong pembangunan Kilang Minyak Bumi Cilacap;
p. Mendorong pembangunan infrastruktur PLTP Baturraden;
q. Mendorong penyusunan *masterplan* penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu dalam rangka pengembangan dan penataan Kawasan Perkotaan Cilacap;
r. Mendorong transformasi sektor energi melalui pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan, penerapan jaringan cerdas (*smart grid*), adopsi teknologi penyimpanan energi, pemanfaatan *Internet of Things* (IoT) untuk pemantauan *real-time*, serta perluasan penggunaan kendaraan listrik guna meningkatkan efisiensi, keterhubungan, dan keberlanjutan pasokan energi.

Dengan rencana program unggulan dan program strategis yang akan dilaksanakan tersebut diharapkan WP Cibalingmas akan mencapai target indikator kinerja makro dalam lima tahun sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.2.
Target Kinerja Makro WP Cibalingmas

Tahun	Kabupaten/Kota					
	Cilacap	**Banyumas**	**Purbalingga**	**Cilacap**	**Banyumas**	**Purbalingga**
	Tingkat Pengangguran Terbuka			**Tingkat Kemiskinan**		
2026	7,73-7,43	5,94-5,75	4,79-4,50	10,34-10,08	10,84-9,50	12,86-11,86
2027	7,62-7,32	5,65-5,35	4,58-4,28	9,17-9,13	10,67-8,90	12,22-11,25
2028	7,42-7,12	5,57-5,27	4,54-4,24	8,69-8,62	10,34-8,57	11,58-10,63
2029	7,11-6,81	5,49-5,19	4,50-4,20	8,21-8,11	10,00-8,24	10,94-10,00
2030	6,82-6,52	5,41-5,11	4,46-4,16	7,72-7,61	9,64-7,92	10,29-9,38
	Indeks Pembangunan Manusia			**Pertumbuhan Ekonomi**		
2026	73,32	76,00	71,96	2,80-3,00	5,88-6,50	5,30-5,70
2027	73,73	76,56	72,35	4,10-5,10	6,50-7,48	6,10-6,61
2028	74,14	77,11	72,73	4,60-5,50	6,90-7,50	6,50-7,37
2029	74,55	77,67	73,12	5,20-6,16	7,40-8,24	7,00-7,78
2030	74,97	78,22	73,51	5,70-6,32	7,90-8,41	7,40-8,11

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah (Hasil Analisis), 2025

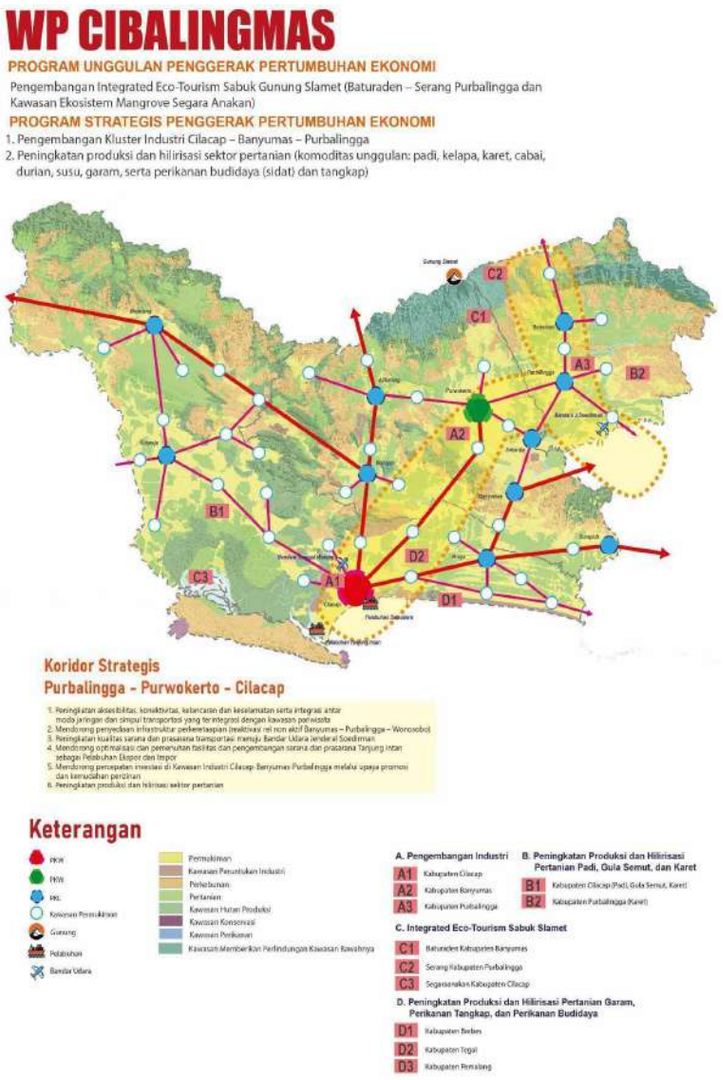

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah (Hasil Analisis), 2025

Gambar 4.3.
Arahan Kebijakan WP Cibalingmas

4.2.2. WP Wonobanjar

Dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Wonobanjar berikut adalah indikasi kebutuhan rencana **program unggulan dan program strategis** selama lima tahun kedepan yang merupakan lintas kewenangan sebagai berikut.

1. **Pengembangan *Geo-Tourism* (Kawasan Dieng) yang Terintegrasi dengan Kawasan Borobudur**
   a. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antarmoda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui:
      1) Pemenuhan fasilitas keselamatan dan peningkatan kondisi jalan pada ruas jalan sabuk Gunung Sumbing penghubung Wonosobo–Banjarnegara;
      2) Upaya mendorong reaktivasi jalur rel kereta api nonaktif lintas Purwokerto–Wonosobo;
      3) Inisiasi rencana penataan transportasi di Kawasan Pariwisata Dieng;
      4) Penanganan jalan provinsi pendukung akses dan konektivitas pengembangan koridor wisata Dieng-Borobudur di antaranya ruas Wonosobo-Dieng;

b. Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui:
   1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dataran tinggi Dieng diantaranya melalui pengendalian risiko kerusakan Daerah Aliran Sungai Serayu;
   2) Peningkatan kualitas destinasi wisata KSPN Dieng dan Geopark Dieng;
   3) Peningkatan upaya promosi keberadaan *Geopark* Dieng diantaranya melalui visibilitas di ruang publik strategis, dukungan teknologi informasi, dan lain-lain;
   4) Pengembangan desa pariwisata;
   5) Pengembangan daya tarik wisata lokal sebagai unggulan provinsi (Budaya Rambut Gimbal Dieng);
   6) Upaya mendorong promosi budaya lokal melalui kegiatan pameran budaya;
   7) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dataran tinggi Dieng dalam rangka pengendalian resiko kerusakan Daerah Aliran Sungai Serayu;
   8) Pengembangan *geopark* melalui jelajah *Geopark* Dieng, peningkatan kapasitas pengelolaan *Geopark* Dieng, serta perkuatan mitra kolaboratif ke jaringan *geopark* global;
   9) Upaya mendorong peningkatan Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP) berbasis potensi lokal pariwisata yang didukung oleh pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri kecil dan menengah, serta mendorong pembentukan PKP baru sebagai pusat pertumbuhan perdesaan.

2. Peningkatan Produksi Dan Hilirisasi Sektor Pertanian (komoditas unggulan: teh, tembakau, cabai, alpukat, sektor kehutanan (kayu sengon), sapi potong, domba, serta perikanan budidaya)

a. Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas), melalui:
   1) Upaya mendorong pengendalian alih fungsi lahan pertanian serta pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan melalui kebijakan penataan ruang perlindungan lahan pertanian serta pelaksanaan reforma agraria dengan penataan aset dan akses;
   2) Upaya mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas jalur distribusi pertanian yang didominasi ruas jalan kabupaten dan desa;
   3) Upaya mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam peningkatan hasil panen melalui implementasi Riset Inovasi Teknologi (RIT) di sektor pertanian;
   4) Pengembangan *Good Agriculture Practice* (GAP) budidaya tanaman kentang yang berkelanjutan salah satunya menggunakan metode teras bangku;
   5) Upaya mendorong pendampingan masyarakat dalam budidaya kentang yang berkelanjutan;
   6) Pengembangan agropolitan untuk mendorong peningkatan produksi dan hilirisasi komoditas agro unggulan dengan tetap mempertim-bangkan kelestarian alam;
   7) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) dan pengembangan kawasan peternakan;

8) Upaya mendorong perbaikan tata kelola pertanian modern berbasis *integrated farming* dengan menggunakan teknologi dalam pengolahan pertanian (sistem kolaborasi pertanian swasta);
9) Pemasangan bangunan sipil teknis pada daerah konservasi DAS yang menjadi sentra pertanian kentang;
10) Upaya mendorong peningkatan kesiapsiagaan dan pelibatan masyarakat pada daerah rawan longsor yang menjadi sentra pertanian kentang;
11) Peningkatan sistem jaringan irigasi kewenangan provinsi, diantaranya rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Watujagir, DI Kalisapi, dan DI Krenceng;
12) Upaya mendorong rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada DI Banjarcahyana, DI Singomerto, DI Serayu;
13) Peningkatan pasokan sumber air baku pertanian, diantaranya melalui rehabilitasi embung;
14) Penyelenggaraan pendidikan pada SMK untuk peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian dan kehutanan dengan jurusan mekanisasi pertanian dan agribisnis pengolahan hasil pertanian;
15) Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana diantaranya alat mesin pertanian (alsintan) di daerah potensi produksi pertanian; penyediaan benih/bibit berkualitas; penjaminan kualitas pakan ternak; pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); peningkatan produksi dan hilirisasi produk perikanan melalui *restocking* benih ikan dan penataan budidaya di Waduk Wadaslintang, pengembangan prasarana dan sarana perikanan budidaya, pelatihan diversifikasi olahan ikan, serta fasilitasi kemasan dan jejaring pemasaran;

b. Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), pada sektor pertanian melalui:
1) Penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian, penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan, pemasaran dan *branding* produk pertanian; sedangkan pada sektor perikanan melalui fasilitasi diversifikasi, kemasan, dan jejaring pemasaran produk olahan ikan;
2) Pengembangan industri hortikultura dan perkebunan yang terintegrasi;
3) Peningkatan promosi produk industri agro melalui fasilitasi pameran;
4) Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi SNI dan merek.

3. Pengembangan Sektor Industri Gula, Tembakau Dan Industri Kayu Dari Barang Kayu Dan Gabus

Dilaksanakan dengan peningkatan daya saing dan produktivitas sektor industri, melalui:

a. Pengembangan industri hasil pertanian, kehutanan dan pengembangan potensi energi terbarukan dalam rangka mendorong pengembangan bagian selatan Wilayah Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara;
b. Pengembangan ekspor produk unggulan;
c. Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi SNI dan merek.

Selain indikasi kebutuhan rencana program implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru dimaksud, terdapat beberapa indikasi rencana program kewilayahan selama lima tahun kedepan yang juga merupakan lintas kewenangan di WP Wonobanjar, antara lain sebagai berikut.

1. **Lingkup Sosial dan Kependudukan**
   a. Pengelolaan dan revitalisasi pendidikan vokasional tematik agrobisnis dan pariwisata, mendorong sekolah inklusif, dan sekolah unggulan;
   b. Pemberian Makan Bergizi Gratis untuk pemenuhan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri termasuk penguatan ekosistem pendukung;
   c. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi yang menyasar kelompok usia sekolah, usia produktif, dan lanjut usia (lansia) sejalan dengan pembudayaan hidup sehat serta perlu diperkuat dengan penekanan pada pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM), khususnya melalui pengendalian konsumsi produk hasil tembakau serta pangan tinggi garam, gula, dan lemak; upaya promotif preventif ini harus didukung oleh program penyehatan lingkungan yang efektif; sedangkan dalam rangka penuntasan *stunting* diarahkan pada aspek pencegahan untuk memastikan anak yang sehat tidak menjadi *stunting*;
   d. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan desa tangguh bencana;
   e. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni, fasilitasi rumah susun untuk MBR bekerja sama dengan BUMN, BUMD dan swasta serta program jambanisasi;
   f. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di tingkat kecamatan.
2. **Lingkup Perekonomian**
   a. Fasilitasi Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Pondok Pesantren dan penguatan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
   b. Mendorong revitalisasi pasar tradisional yang terintegrasi berbasis digital;
   c. Mendorong investasi yang mendukung potensi wilayah yang sejalan kebijakan *geopark*.
3. **Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan**
   a. Pengembangan koridor Kawasan Perkotaan Kertek-Wonosobo–Banjar-negara–Klampok sebagai pusat ekonomi;
   b. Pengembangan wilayah dengan memperhatikan mitigasi bencana alam meliputi erupsi gunung api dan gerakan tanah;
   c. Inisiasi “kajian kelayakan” untuk mempersiapkan rencana penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (pengembangan koridor baru Trans Jateng/Trans Cibalingmas-Wonobanjar Koridor Purbalingga-Banjarnegara) dengan peningkatan peran serta dan keterlibatan pemerintahan kabupaten yang terintegrasi dengan moda angkutan lainnya (Trans Jateng Koridor Purwokerto-Purbalingga dan Trans Banyumas);
   d. Mendorong dan memfasilitasi penanganan/penataan permukiman pada kawasan kumuh secara terpadu;
   e. Rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan untuk pemulihan kapasitas daya dukung DAS Serayu;

f. Mendorong sinergi dan kolaborasi para pihak dalam pengelolaan maupun pemulihan area bernilai keanekaragaman hayati dan/atau jasa ekosistem tinggi;
g. Mendorong pemanfaatan sumber daya hayati (bioprospeksi) dan jasa ekosistem secara adil serta berkelanjutan;
h. Mendorong dan fasilitasi rencana pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau;
i. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa;
j. Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
k. Mendorong pembangunan infrastruktur PLTP Candradimuka dan PLTP Dieng;
l. Mendorong pengembangan pabrik ekstraksi litium dari fluida panas bumi di Dataran Tinggi Dieng;
m. Mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung Waduk Mrica di Kabupaten Banjarnegara;
n. Mendorong dan fasilitasi pengelolaan SPAM, SPAL, dan persampahan berbasis masyarakat;
o. Mendorong transformasi sektor energi melalui pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan, penerapan jaringan cerdas (*smart grid*), adopsi teknologi penyimpanan energi, pemanfaatan *Internet of Things* (IoT) untuk pemantauan *real-time*, serta perluasan penggunaan kendaraan listrik guna meningkatkan efisiensi, keterhubungan, dan keberlanjutan pasokan energi.

Dengan rencana program unggulan dan program strategis yang akan dilaksanakan tersebut diharapkan WP Wonobanjar akan mencapai target indikator kinerja makro dalam lima tahun sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.3.
Target Kinerja Makro WP Wonobanjar

Tahun	Kabupaten/Kota			
	Banjarnegara	Wonosobo	Banjarnegara	Wonosobo
	Tingkat Pengangguran Terbuka		Tingkat Kemiskinan	
2026	5,50-5,00	3,90-3,50	13,92-13,77	14,15-13,38
2027	5,47-5,17	3,87-3,57	12,50-11,78	12,85-12,11
2028	5,43-5,13	3,82-3,52	12,29-11,56	12,17-11,43
2029	5,38-5,08	3,76-3,46	12,07-11,40	11,50-10,76
2030	5,33-5,03	3,71-3,41	11,84-11,17	10,82-10,09
	Indeks Pembangunan Manusia		Pertumbuhan Ekonomi	
2026	70,98	71,58	5,25-6,00	5,20-5,50
2027	71,67	72,05	6,60-7,00	6,10-6,53
2028	72,35	72,52	7,00-7,74	6,70-7,20
2029	73,04	72,99	7,40-8,14	7,40-7,63
2030	73,72	73,46	7,80-8,37	7,90-8,50

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah (Hasil Analisis), 2025

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah (Hasil Analisis), 2025

Gambar 4.4.
Arahan Kebijakan WP Wonobanjar

4.2.3. WP Keburejo

Dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Keburejo berikut adalah indikasi kebutuhan rencana **program unggulan dan program strategis** selama lima tahun kedepan yang merupakan lintas kewenangan sebagai berikut.

1. **Pengembangan *Geo-Tourism* (*Geopark* Kebumen dan Pantai) yang Terintegrasi dengan Borobudur dan Terpadu dengan Pariwisata DIY**
   a. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antarmoda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui:
      1) Penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng Koridor Kutoarjo–Borobudur yang terintegrasi dengan moda transportasi kereta api (Prameks Yogyakarta–Kutoarjo) serta angkutan lanjutan lainnya termasuk terintegrasi dengan kawasan pariwisata (Borobudur) dan perindustrian;
      2) Penyelesaian pembangunan Terminal Tipe B Kutoarjo yang terintegrasi dengan Stasiun Kutoarjo sebagai simpul perekonomian (mendorong dan memfasilitasi optimalisasi terminal sebagai DTW dan sentra oleh-oleh UMKM serta pusat kuliner khas Kebumen dan Purworejo);
      3) Fasilitasi dorongan perpanjangan layanan Kereta Api Prameks dari semula Yogyakarta–Kutoarjo menjadi Yogyakarta–Kutoarjo–Kebumen;
      4) Pemenuhan fasilitas keselamatan pada ruas jalan Mandiraja–Gombong;

5) Penanganan jalan provinsi pendukung akses dan konektivitas untuk pengembangan koridor wisata Kebumen–Purworejo– Borobudur–Magelang; akses ke jalan nasional (JJLS) dan perbatasan dengan Provinsi DIY;
6) Upaya mendorong peningkatan aksesibilitas dan pemenuhan keselamatan jalan wisata Pantai-*Geopark* Kebumen-KSPN Dieng;

b. Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui:
1) Upaya mendorong pengembangan daya tarik wisata *Geopark* Kebumen dan Pantai;
2) Peningkatan upaya promosi keberadaan *Geopark* Kebumen sebagai DTW tingkat internasional diantaranya melalui visibilitas di ruang publik strategis, dukungan teknologi informasi, dan lain-lain;
3) Upaya mendorong promosi budaya lokal melalui kegiatan pameran budaya;
4) Upaya mendorong pengembangan desa wisata *Geopark* Kebumen;
5) Pengembangan koridor wisata Kebumen–Purworejo–Borobudur–Magelang;
6) Pengembangan *geopark* melalui jelajah *Geopark* Kebumen, peningkatan kapasitas pengelolaan *geopark* serta perkuatan mitra kolaboratif ke jaringan *geopark* global;
7) Upaya mendorong peningkatan Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP) yang berbasis potensi lokal pariwisata yang didukung oleh pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri kecil dan menengah, serta mendorong pembentukan PKP baru sebagai pusat pertumbuhan perdesaan.

2. Peningkatan Produksi Dan Hilirisasi Sektor Pertanian (komoditas unggulan: kelapa, tanaman pangan, garam, sapi potong, kambing, ayam buras, perikanan tangkap, dan budidaya)

a. Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas), melalui:
1) Pengembangan pelabuhan perikanan;
2) Upaya mendorong peningkatan perikanan tangkap melalui pelatihan bagi nelayan agar lebih kompeten dalam memanfaatkan teknologi tanpa merusak ekosistem laut;
3) Upaya mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas jalur distribusi pertanian yang didominasi ruas jalan kabupaten dan desa;
4) Upaya mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam peningkatan hasil panen melalui implementasi Riset Inovasi Teknologi (RIT) di sektor pertanian;
5) Upaya mendorong pengendalian alih fungsi lahan pertanian serta pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan melalui kebijakan penataan ruang perlindungan lahan pertanian, serta pelaksanaan reforma agraria dengan penataan aset dan akses;
6) Peningkatan sistem jaringan irigasi kewenangan provinsi diantaranya rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Loning Kragilan–Purworejo;
7) Upaya mendorong rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada DI Serayu, DI Wadaslintang, DI Sempor;

8) Peningkatan pasokan sumber air baku pertanian, diantaranya melalui rehabilitasi Embung DAS Kalong–Kebumen;
9) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) dan pengembangan kawasan peternakan;
10) Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana diantaranya alat mesin pertanian (alsintan) di daerah potensi produksi pertanian; penyediaan benih/bibit berkualitas; penjaminan kualitas pakan ternak; pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); dan pengembangan ternak lokal berbasis potensi melahirkan bibit ternak khas Jawa; dan pengembangan korporasi produksi;
11) Upaya mendorong perbaikan tata kelola pertanian modern berbasis *integrated farming* dengan menggunakan teknologi dalam pengolahan pertanian (sistem kolaborasi pertanian swasta);

b. Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), melalui penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian; penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan; pemasaran dan *branding* produk; pengembangan pelabuhan perikanan, pengelolaan kawasan konservasi, pelatihan diversifikasi olahan ikan, serta fasilitasi kemasan dan jejaring pemasaran.

3. Pengembangan Sektor Industri Garam, Gula Dan Pengolahan Ikan

Dilakukan dengan peningkatan daya saing dan produktivitas sektor industri, melalui:

a. Inisiasi rencana pembangunan Kawasan Industri Kebumen yang terintegrasi dengan Kawasan Otorita Borobudur, diantaranya berupa:
   1) Fasilitasi promosi investasi Kawasan Industri Kebumen;
   2) Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan Dunia Usaha;
b. Pengembangan industri manufaktur dan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam;
c. Pengembangan ekspor produk unggulan;
d. Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi SNI dan merek.

Selain indikasi kebutuhan rencana program implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru dimaksud, terdapat beberapa indikasi rencana program kewilayahan selama lima tahun kedepan yang juga merupakan lintas kewenangan di WP Keburejo, antara lain sebagai berikut.

1. Lingkup Sosial dan Kependudukan

a. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni, fasilitasi rumah susun untuk MBR bekerja sama dengan BUMN, BUMD dan swasta, serta program jambanisasi;
b. Pengelolaan dan revitalisasi pendidikan vokasional berbasis potensi unggulan, mendorong sekolah inklusif, dan mendorong sekolah unggulan;
c. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi yang menyasar kelompok usia sekolah, usia produktif, dan lanjut usia (lansia) sejalan dengan pembudayaan hidup sehat serta perlu diperkuat dengan penekanan pada pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM), khususnya melalui pengendalian konsumsi produk hasil tembakau serta pangan tinggi

garam, gula, dan lemak; upaya promotif preventif ini harus didukung oleh program penyehatan lingkungan yang efektif; sedangkan dalam rangka penuntasan *stunting* diarahkan pada aspek pencegahan untuk memastikan anak yang sehat tidak menjadi *stunting*;

d. Pemberian Makan Bergizi Gratis untuk pemenuhan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri termasuk penguatan ekosistem pendukung;
e. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di tingkat kecamatan.

2. Lingkup Perekonomian

a. Penguatan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
b. Mendorong revitalisasi pasar tradisional yang terintegrasi berbasis digital;
c. Mendorong investasi yang mendukung potensi wilayah yang sejalan kebijakan *geopark*.

3. Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan

a. Upaya mendorong penyelarasan pembangunan Kawasan Perkotaan Purworejo-Kutoarjo dengan Kawasan Bandar Udara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo;
b. Meningkatkan keterwujudan Perkotaan Kebumen sebagai PKW;
c. Pengembangan wilayah dengan memperhatikan mitigasi bencana alam meliputi gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah;
d. Mendorong optimalisasi SPAM Regional Keburejo;
e. Mendorong dan fasilitasi pengelolaan SPAM, SPAL, dan persampahan berbasis masyarakat;
f. Mendorong dan fasilitasi rencana pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau;
g. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa;
h. Mendorong dan memfasilitasi penanganan/penataan permukiman pada kawasan kumuh secara terpadu;
i. Rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan untuk pemulihan kapasitas daya dukung DAS Serayu;
j. Mendorong sinergi dan kolaborasi para pihak dalam pengelolaan maupun pemulihan area bernilai keanekaragaman hayati dan/atau jasa ekosistem tinggi khususnya di di Cagar Biosfer Merapi-Merbabu-Menoreh;
k. Mendorong pemanfaatan sumber daya hayati (bioprospeksi) dan jasa ekosistem secara adil serta berkelanjutan;
l. Rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir selatan;
m. Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
n. Mendukung dan memfasilitasi pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo;
o. Mendorong pengelolaan geologi untuk mendukung keanekaragaman ekosistem khususnya di Kawasan *Geopark* Kebumen;
p. Mendorong transformasi sektor energi melalui pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan, penerapan jaringan cerdas (*smart grid*), adopsi teknologi penyimpanan energi, pemanfaatan *Internet of Things* (IoT) untuk

pemantauan *real-time*, serta perluasan penggunaan kendaraan listrik guna meningkatkan efisiensi, keterhubungan, dan keberlanjutan pasokan energi.

Dengan rencana program unggulan dan program strategis yang akan dilaksanakan tersebut diharapkan WP Keburejo akan mencapai target indikator kinerja makro dalam lima tahun sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.4.

Target Kinerja Makro WP Keburejo

Tahun	Kabupaten/Kota			
	Kebumen	Purworejo	Kebumen	Purworejo
	Tingkat Pengangguran Terbuka		Tingkat Kemiskinan	
2026	4,60	3,10-2,83	14,30-13,40	9,67-8,67
2027	4,73-4,43	2,93-2,63	12,62-11,23	9,25-8,14
2028	4,61-4,31	2,84-2,54	12,19-10,78	8,77-7,68
2029	4,48-4,18	2,75-2,45	11,74-10,38	8,28-7,23
2030	4,36-4,06	2,66-2,36	11,27-9,92	7,80-6,78
	Indeks Pembangunan Manusia		Pertumbuhan Ekonomi	
2026	73,80	76,00	5,80-6,30	5,00-5,80
2027	74,08	76,38	6,50-7,42	6,10-7,10
2028	74,35	76,76	6,90-7,35	6,70-7,70
2029	74,63	77,14	7,40-8,11	7,30-8,19
2030	74,90	77,53	7,90-8,50	7,80-8,50

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah (Hasil Analisis), 2025

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah (Hasil Analisis), 2025

Gambar 4.5.

Arahan Kebijakan WP Keburejo

4.2.4. WP Gelangmanggung

Dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Gelangmanggung berikut adalah indikasi kebutuhan rencana **program unggulan dan program strategis** selama lima tahun kedepan yang merupakan lintas kewenangan sebagai berikut.

1. **Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur (*Cultural Heritage Tourism*) yang Terintegrasi dengan Kawasan Dieng dan Terpadu dengan Pariwisata DIY**
   a. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antarmoda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui:
      1) Penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan Trans Jateng Koridor Borobudur-Kutoarjo yang terhubung dengan moda transportasi kereta api Prameks rute Kutoarjo-Yogyakarta dan inisiasi proses rencana pengembangan koridor baru Trans Jateng Koridor Temanggung-Borobudur dengan peningkatan peran dan keterlibatan pemerintahan kabupaten/kota di WP Gelangmanggung;
      2) Fasilitasi dan pendorongan reaktivasi jalur rel kereta api nonaktif lintas Semarang–Borobudur–Yogyakarta;
      3) Penanganan ruas jalan provinsi diantaranya ruas Magelang-Kaliangkrik dan Wonotunggal-Surjo;
      4) Penyediaan perlengkapan jalan diantaranya pada ruas Magelang-Kaliangkrik, Borobudur-Salaman-Bener (termasuk di dalamnya penanganan Daerah Rawan Kecelakaan/DRK di Kali Jambe perbatasan Purworejo-Magelang);
      5) Upaya mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Jalan Tol Bawen-Magelang-Yogyakarta;
      6) Peningkatan kondisi dan kinerja serta optimalisasi terminal tipe B sebagai simpul perekonomian pada Terminal Madureso Kabupaten Temanggung;
   b. Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui:
      1) Pengembangan wilayah berbasis wisata yang memperhatikan kesesuaian KSPN Borobudur dan sekitarnya, serta risiko bencana erupsi gunung api dan gempa bumi;
      2) Pelestarian Kawasan Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia dan mengembangkan sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia dipadukan dengan wisata alam Gunung Merapi–Merbabu–Telomoyo dan Gunung Sindoro–Sumbing;
      3) Penyelarasan pembangunan perbatasan Kabupaten Magelang dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Kulonprogo;
      4) Pengembangan karakteristik warisan budaya WP Gelangmanggung pada potensi desa-desa wisata baru;
      5) Pengelolaan dan pengembangan sekolah unggulan untuk mendukung hilirisasi agro industri sebagai pemasok kawasan wisata WP Gelangmanggung;
      6) Upaya mendorong pengembangan layanan kesehatan pada kawasan pariwisata *(wellness and health tourism)* diantaranya melalui fasilitasi

peningkatan layanan, alat kesehatan, dan fasilitas pendukung rumah sakit dalam rangka pengembangan ketahanan *biodefense* pada RST Tingkat II dr. Soedjono (Kota Magelang), serta pengembangan layanan intensif terpadu dan layanan *homecare* di RS Muntilan;

7) Upaya mendorong peningkatan Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP) berbasis potensi lokal pariwisata yang didukung oleh pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri kecil dan menengah, serta mendorong pembentukan PKP baru sebagai pusat pertumbuhan perdesaan.

2. Pengembangan Ekonomi Kreatif (Kriya)

a. Pengembangan inovasi pada desa-desa wisata melalui pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas BUMDes dan UMKM guna mendukung ekosistem ekonomi kreatif WP Gelangmanggung;

b. Mendorong kerja sama UMKM dan/atau BUMDes dengan IKM unggulan di WP Gelangmanggung.

3. Peningkatan Produksi Dan Hilirisasi Sektor Pertanian (komoditas unggulan: kopi, tembakau, aren, tanaman perkebunan, sapi potong, kerbau, domba, itik, ayam buras, dan perikanan budidaya)

a. Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas) melalui:

1) Peningkatan produksi hasil pertanian dan kehutanan sebagai penyangga kebutuhan pengembangan wilayah sekitarnya dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam;

2) Upaya mendorong pengendalian alih fungsi lahan pertanian serta pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan melalui kebijakan penataan ruang perlindungan lahan pertanian serta pelaksanaan reforma agraria dengan penataan aset dan akses;

3) Upaya mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas jalur distribusi pertanian yang didominasi ruas jalan kabupaten dan desa;

4) Upaya mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam peningkatan hasil panen melalui implementasi Riset Inovasi Teknologi (RIT) di sektor pertanian;

5) Fasilitasi prasarana dan sarana pertanian (alsintan) di daerah potensi produksi pertanian; penyediaan benih/bibit berkualitas; penjaminan kualitas pakan ternak; pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); pengembangan *broodstock* ikan lele dan gurami, serta domestikasi ikan endemik lokal (ikan beong) di Magelang pada sektor perikanan;

6) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) dan pengembangan kawasan peternakan;

7) Peningkatan sistem jaringan irigasi (DI Soropadan);

8) Peningkatan pasokan sumber air baku pertanian, diantaranya melalui rehabilitasi Embung Geblok dan mendorong pembangunan Bendungan Pasuruhan;

b. Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), pada sektor pertanian melalui:

1) Penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian, penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol

Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan, pemasaran dan *branding* produk pertanian; fasilitasi diversifikasi, kemasan, dan jejaring pemasaran produk olahan ikan pada sektor perikanan;
2) Pengembangan industri hortikultura dan perkebunan yang terintegrasi;
3) Perluasan tujuan ekspor dengan meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor unggulan.

Selain indikasi kebutuhan rencana program implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru dimaksud, terdapat beberapa indikasi rencana program kewilayahan selama lima tahun kedepan yang juga merupakan lintas kewenangan di WP Gelangmanggung, antara lain sebagai berikut.

1. **Lingkup Sosial dan Kependudukan**
   a. Peningkatan kesiapsiagaan risiko bencana erupsi gunung api dan gempa bumi;
   b. Pengelolaan dan revitalisasi sekolah unggulan untuk mendukung hilirisasi agroindustri dan sektor pendukung pariwisata sebagai pemasok kawasan wisata WP Gelangmanggung;
   c. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi yang menyasar kelompok usia sekolah, usia produktif, dan lanjut usia (lansia) sejalan dengan pembudayaan hidup sehat serta perlu diperkuat dengan penekanan pada pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM), khususnya melalui pengendalian konsumsi produk hasil tembakau serta pangan tinggi garam, gula, dan lemak; upaya promotif preventif ini harus didukung oleh program penyehatan lingkungan yang efektif; sedangkan dalam rangka penuntasan *stunting* diarahkan pada aspek pencegahan untuk memastikan anak yang sehat tidak menjadi *stunting*;
   d. Pemberian Makan Bergizi Gratis untuk pemenuhan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri termasuk penguatan ekosistem pendukung;
   e. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di tingkat kecamatan.
2. **Lingkup Perekonomian**
   a. Mendorong peningkatan produktivitas komoditas unggulan di seluruh Kabupaten/Kota WP Gelangmanggung;
   b. Mendorong perluasan tujuan ekspor antarwilayah pengembangan dengan meningkatkan nilai tambah komoditas ekspor, utamanya pada komoditas agro WP Gelangmanggung;
   c. Mendorong pengembangan inovasi pada desa-desa wisata melalui pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan kapasitas BUMDes dan UMKM guna mendukung ekosistem ekonomi kreatif WP Gelangmanggung, sekaligus kerja sama dengan IKM unggulan di WP Gelangmanggung.
3. **Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan**
   a. Mengembangkan koridor Kawasan Perkotaan Muntilan–Kawasan Perkotaan Mungkid-Kota Magelang–Kawasan Perkotaan Secang–Kawasan Perkotaan Temanggung;
   b. Mendorong optimalisasi konektivitas antarwilayah dalam WP Gelang-manggung dengan memperhatikan risiko bencana erupsi gunung api dan gempa bumi;
   c. Penyediaan perlengkapan jalan Parakan-Secang;

d. Fasilitasi pembangunan TPST Regional Magelang;
e. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa;
f. Mendorong dan memfasilitasi penanganan/penataan permukiman pada kawasan kumuh secara terpadu;
g. Mendorong sinergi dan kolaborasi para pihak dalam pengelolaan maupun pemulihan area bernilai keanekaragaman hayati dan/atau jasa ekosistem tinggi khususnya di Cagar Biosfer Merapi-Merbabu-Menoreh;
h. Mendorong pemanfaatan sumber daya hayati (bioprospeksi) dan jasa ekosistem secara adil serta berkelanjutan;
i. Fasilitasi pengelolaan dan pengembangan usaha perhutanan sosial;
j. Mendorong dan fasilitasi pengelolaan SPAM, SPAL, dan persampahan berbasis masyarakat;
k. Mendorong transformasi sektor energi melalui pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan, penerapan jaringan cerdas (*smart grid*), adopsi teknologi penyimpanan energi, pemanfaatan *Internet of Things* (IoT) untuk pemantauan *real-time*, serta perluasan penggunaan kendaraan listrik guna meningkatkan efisiensi, keterhubungan, dan keberlanjutan pasokan energi.

Dengan rencana program unggulan dan program strategis yang akan dilaksanakan tersebut diharapkan WP Gelangmanggung akan mencapai target indikator kinerja makro dalam lima tahun sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.5.
Target Kinerja Makro WP Gelangmanggung

Tahun	Kabupaten/Kota					
	Magelang	Temanggung	Kota Magelang	Magelang	Temanggung	Kota Magelang
	Tingkat Pengangguran Terbuka			Tingkat Kemiskinan		
2026	3,55-3,20	2,20-2,00	4,40-4,04	9,93-9,07	7,90-7,85	5,28-5,11
2027	3,45-3,15	2,03-1,73	4,29-3,99	9,55-8,70	8,15-7,83	5,17-4,50
2028	3,41-3,11	1,96-1,66	4,23-3,93	9,05-8,22	7,72-7,40	4,91-4,25
2029	3,32-3,02	1,88-1,58	4,17-3,87	8,55-7,74	7,29-6,96	4,64-4,00
2030	3,29-2,99	1,81-1,51	4,11-3,81	8,05-7,25	6,87-6,53	4,38-3,75
	Indeks Pembangunan Manusia			Pertumbuhan Ekonomi		
2026	73,01	73,30	83,40	5,20-5,65	5,10-5,50	5,50-5,70
2027	73,64	73,72	83,79	6,50-7,12	6,10-7,01	6,70-7,18
2028	74,27	74,15	84,17	6,90-7,76	6,50-7,35	7,30-7,76
2029	74,89	74,57	84,56	7,40-8,21	7,00-7,98	7,70-8,13
2030	75,52	74,99	84,94	7,90-8,50	7,40-8,16	7,80-8,38

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah (Hasil Analisis), 2025

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah (Hasil Analisis), 2025

Gambar 4.6.
Arahan Kebijakan WP Gelangmanggung

4.2.5. WP Subosukawonosraten

Dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Subosukawonosraten, berikut adalah indikasi kebutuhan rencana **program unggulan dan program strategis** selama lima tahun kedepan yang merupakan lintas kewenangan sebagai berikut.

1. **Pengembangan Solo Raya Sebagai MICE (*Event Tourism*) dan Wisata Alam dan Budaya yang Terpadu dengan Pengembangan Pariwisata DIY**
   a. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antarmoda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui:
      1) Upaya mendorong peningkatan dan/atau pemantapan status Bandara Adi Soemarmo menjadi bandara internasional (pengembangan sebagai bandara umrah dan haji) dan sebagai generator aktivitas perekonomian global;
      2) Upaya mendorong percepatan penyelesaian pembangunan jalan tol ruas Solo–Yogyakarta *International Airport* (YIA) Kulon Progo;
      3) Upaya mendorong pengembangan fasilitas integrasi transportasi antarmoda di Terminal Tipe A Tirtonadi Surakarta;
      4) Upaya mendorong peningkatan layanan perkeretaapian, diantaranya KRL *Commuter Line* Surakarta–Yogyakarta, KA Wisata Bhatara Kresna

(Surakarta–Wonogiri), KA Bandara Adi Soemarmo (BIAS), KA Joglosemarkerto (*loop*), serta memfasilitasi perencanaan dan persiapan potensi pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya (menyesuaikan dinamika penetapan rute/lintasan jaringan rel oleh Pemerintah Pusat);

5) Penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) koridor Surakarta–Sumberlawang via Sangiran dan Surakarta–Sukoharjo–Wonogiri yang terkoneksi dengan Batik Solo Trans (BST) dan moda transportasi kereta api termasuk dengan kawasan pariwisata (pengembangan program integrasi edutrip dengan daya tarik wisata dan desa wisata), serta perindustrian;
6) Peningkatan kondisi dan kinerja serta optimalisasi terminal tipe B sebagai simpul perekonomian diantaranya pada Terminal Sukoharjo dan Tawangmangu;
7) Pemenuhan perlengkapan jalan provinsi pada ruas pendukung kawasan pariwisata Tawangmangu dan *Geopark* Wonogiri;

b. Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui:
1) Upaya mendorong koordinasi dan kerja sama antar daerah dalam hal pengembangan sektor ekonomi daerah yang saling menguntungkan termasuk di dalamnya pengelolaan dan pengembangan pariwisata;
2) Upaya mendorong pengembangan Daya Tarik Wisata (DTW) strategis regional dan nasional diantaranya Sangiran, Umbul, *Geopark* Gunung Sewu, Tawangmangu, Candi Cetho-Sukuh;
3) Fasilitasi penyelenggaraan even nasional dan internasional seni budaya, festival dan olahraga;
4) Pengembangan pola perjalanan yang mendukung perpanjangan tema wilayah pengembangan untuk mendukung pre dan *post tour event*;
5) Upaya menciptakan aktivitas wisata yang unik dalam MICE *itineraries*;
6) Kolaborasi dengan industri kreatif untuk menciptakan penawaran yang unik untuk mendukung kegiatan even yang berbeda dengan pesaing;
7) Fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dan cagar budaya (*urban renewal* Kota Tua Surakarta, Keraton Surakarta dan Puri Mangkunegaran) untuk peningkatan daya saing sektor pariwisata;
8) Fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam ekspresi budaya dan mendorong promosi budaya lokal dengan kegiatan pameran budaya/sejenisnya;
9) Upaya mendorong pembangunan dan pengembangan desa wisata;
10) Digitalisasi promosi pariwisata dan penguatan sistem komunikasi berbasis teknologi informasi;
11) Pengembangan *geopark* melalui jelajah *Geopark* Gunung Sewu, peningkatan kapasitas pengelolaan *geopark*, serta perkuatan mitra kolaboratif ke jaringan *geopark* global;
12) Pendampingan pengembangan *Geoheritage* Klaten;
13) Peningkatan upaya promosi keberadaan *Geopark* Gunung Sewu sebagai DTW tingkat internasional diantaranya melalui visibilitas di ruang publik strategis, dukungan teknologi informasi, dan lain-lain;

14) Upaya mendorong peningkatan Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP) berbasis potensi lokal pariwisata yang didukung oleh pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri kecil dan menengah, serta mendorong pembentukan PKP baru sebagai pusat pertumbuhan perdesaan.

2. **Pengembangan Industri Surakarta-Boyolali-Sukoharjo-Karanganyar-Klaten (gula, susu, tembakau, kayu, tekstil dan alas kaki)**
   a. Pengembangan fasilitas logistik dalam rangka mendorong kemudahan pergerakan barang hasil industri dan peningkatan prasarana dan sarana pendukung pengembangan sektor perindustrian, berupa:
      1) Pemantapan jaringan jalan Nasional pada ruas Boyolali-Surakarta-Palur-Sragen sampai dengan batas Jawa Timur;
      2) Penyediaan perlengkapan jalan diantaranya pada ruas Wonogiri-Perbatasan (DIY dan Jatim), Geyer-Surakarta-Sukoharjo–Wonogiri;
      3) Penanganan ruas jalan provinsi diantaranya ruas jalan akses ke perbatasan provinsi (DIY dan Jatim); akses langsung ke jalan nasional (JJLS) dan penghubung antar jalan nasional (Boyolali-Klaten);
      4) Upaya mendorong revitalisasi/optimalisasi *Dry-port* Jebres dan Kalijambe Sragen;
   b. Pengembangan industri ekonomi kreatif dan industri pengolahan hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam, serta peningkatan daya saing dan produktivitas sektor industri, berupa:
      1) Pengembangan sentra industri hijau;
      2) Pengembangan ekspor produk unggulan;
      3) Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi SNI dan merek;
      4) Pengaktifan kembali Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Surakarta.

3. **Peningkatan Produksi Dan Hilirisasi Sektor Pertanian (komoditas unggulan: padi, ubi, kacang mete, sapi potong, sapi perah, kambing, domba, itik, perikanan budidaya dan tebu)**
   a. Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas), melalui:
      1) Upaya mendorong pengendalian alih fungsi lahan pertanian serta pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan melalui kebijakan penataan ruang perlindungan lahan pertanian serta pelaksanaan reforma agraria dengan penataan aset dan akses;
      2) Upaya mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas jalur distribusi pertanian yang didominasi ruas jalan kabupaten dan desa;
      3) Upaya mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam peningkatan hasil panen melalui implementasi Riset Inovasi Teknologi (RIT) di sektor pertanian;
      4) Upaya mendorong peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) dan pengembangan kawasan peternakan;
      5) Fasilitasi prasarana dan sarana pertanian (alsintan) di daerah potensi produksi pertanian;
      6) Upaya mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas perkebunan tebu di Sragen;

7) Upaya mendorong pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (tebu);
8) Upaya mendorong/fasilitasi penyediaan benih/bibit berkualitas;
9) Fasilitasi penjaminan kualitas pakan ternak;
10) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
11) Penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan;
12) Fasilitasi kampung tematik perikanan (Kampung Lele Boyolali, Kampung Patin Sragen);
13) Pengembangan *broodstock* center ikan nila di Klaten;
14) Upaya mendorong pemanfaatan lahan perkotaan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian di perkotaan (*urban farming*) dan pengembangan agropolitan di perkotaan (Surakarta);
15) Peningkatan sistem jaringan irigasi kewenangan provinsi, diantaranya rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Kepoh, Kwangsan dan Padakslorot Kabupaten Karanganyar; Klego Kabupaten Boyolali, Bapang dan Catgawen Kabupaten Sragen; Pundung dan Sidopangus Kabupaten Klaten;
16) Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian berupa peningkatan pasokan sumber air baku pertanian, diantaranya melalui rehabilitasi Embung Tirtosworo, Bangkan, Kedokan, Selur dan Salam (di Kabupaten Wonogiri) dan Embung Guworejo Sragen;

b. Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), melalui:
1) Penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian;
2) Penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan; pemasaran dan *branding* produk;
3) Pelatihan diversifikasi produk olahan hasil perikanan; diversifikasi usaha nelayan Perairan Umum Daratan (PUD); serta fasilitasi kemasan produk dan jejaring pemasaran hasil perikanan;
4) Kontak bisnis jalinan rantai pasok antara UMKM multiproduk dengan konsumen dari pemerintah, BUMN/D, swasta;
5) Pelatihan keterampilan usaha produktif berbasis potensi lokal;
6) Penguatan kelembagaan koperasi bagi kelompok masyarakat produktif:
7) Magang peningkatan kualitas dan kapasitas produk UMKM sektor susu;
8) Peningkatan promosi produk industri agro melalui fasilitasi pameran;
9) Pemberdayaan aspek produksi koperasi (FGD KUD di Solo Raya, Bulog dan MBG tentang hilirisasi dan ketahanan pangan);
10) Penyediaan perlengkapan jalan diantaranya pada ruas Gemolong-Sragen-Karanganyar, Karangwuni-Perbatasan DIY.

Selain indikasi kebutuhan rencana program implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru dimaksud, terdapat beberapa indikasi rencana program kewilayahan selama lima tahun ke depan yang juga merupakan lintas kewenangan di WP Subosukawonosraten, antara lain sebagai berikut.

1. **Lingkup Sosial dan Kependudukan**
   a. Mendorong koordinasi dan kerja sama antardaerah dalam hal penanganan bencana;
   b. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni, fasilitasi rumah susun untuk MBR bekerja sama dengan BUMN, BUMD dan swasta, serta program jambanisasi untuk mendukung penanganan kemiskinan di Subosukawonosraten;
   c. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas serta mendorong sekolah inklusif di tingkat kecamatan;
   d. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi yang menyasar kelompok usia sekolah, usia produktif, dan lanjut usia (lansia) sejalan dengan pembudayaan hidup sehat serta perlu diperkuat dengan penekanan pada pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM), khususnya melalui pengendalian konsumsi produk hasil tembakau serta pangan tinggi garam, gula, dan lemak; upaya promotif preventif ini harus didukung oleh program penyehatan lingkungan yang efektif; sedangkan dalam rangka penuntasan *stunting* diarahkan pada aspek pencegahan untuk memastikan anak yang sehat tidak menjadi *stunting*;
   e. Pemberian Makan Bergizi Gratis untuk pemenuhan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri termasuk penguatan ekosistem pendukung;
   f. Pengelolaan dan revitalisasi pendidikan vokasional berbasis potensi lokal dan mendorong sekolah inklusif.
2. **Lingkup Perekonomian**
   a. Mendorong revitalisasi pasar tradisional yang terintegrasi berbasis digital;
   b. Optimalisasi keberadaan pintu tol yang cukup dan peningkatan daya tarik untuk mengurangi dampak jalan tol terhadap perekonomian serta meningkatkan fungsi pengendalian pemanfaatan ruang.
3. **Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan**
   a. Menyelaraskan pengembangan Kota Surakarta dan kabupaten disekitarnya;
   b. Mendorong koordinasi dan kerja sama antardaerah dalam hal:
      1) koordinasi dan pengelolaan pengembangan kawasan permukiman di perbatasan kabupaten/kota;
      2) penyediaan prasarana dan sarana di bidang transportasi, air minum, persampahan, drainase dan pengelolaan limbah;
      3) penyediaan ruang terbuka hijau Kota Surakarta dengan kabupaten lain yang berbatasan;
   c. Memadukan pengembangan wilayah perbatasan Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Timur;
   d. Mengoptimalkan persebaran dan pertumbuhan kawasan PKW dan PKL yang persebarannya cukup merata untuk mengurangi ketimpangan wilayah;
   e. Mendorong dan memfasilitasi penanganan/penataan permukiman pada kawasan kumuh secara terpadu;
   f. Mendorong dan memfasilitasi kajian kelayakan inisiasi rencana pembangunan TPST Regional di Solo Raya;
   g. Mendorong dan memfasilitasi penanganan banjir di wilayah Solo Raya;
   h. Pengembangan SPAM Regional Wososukas;

i. Mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana salah satunya dengan penuntasan penanganan jalan evakuasi;
j. Rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan untuk pemulihan kapasitas daya dukung DAS Bengawan Solo khususnya pada *cachtment area* terutama pada Sub-DAS Bengawan Solo Hulu;
k. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa;
l. Pemantauan dan pengawasan Sungai Bengawan Solo;
m. Mendorong dan fasilitasi rencana pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau;
n. Mendorong sinergi dan kolaborasi para pihak dalam pengelolaan maupun pemulihan area bernilai keanekaragaman hayati dan/atau jasa ekosistem tinggi khususnya di Gunung Lawu dan Cagar Biosfer Merapi-Merbabu-Menoreh;
o. Mendorong peran serta dan kepedulian para pihak dalam penerapan inisiatif imbal jasa lingkungan (*payment for environmental services*) khususnya jasa ekosistem air;
p. Mendorong dan fasilitasi pengelolaan SPAM, SPAL, dan persampahan berbasis masyarakat;
q. Mendorong pembangunan infrastruktur PLTP Jenawi;
r. Mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung Waduk Wonogiri atau Gajah Mungkur di Wonogiri;
s. Mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung Waduk Kedung Ombo di Sragen, Boyolali, dan Grobogan;
t. Mendorong transformasi sektor energi melalui pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan, penerapan jaringan cerdas (*smart grid*), adopsi teknologi penyimpanan energi, pemanfaatan *Internet of Things* (IoT) untuk pemantauan *real-time*, serta perluasan penggunaan kendaraan listrik guna meningkatkan efisiensi, keterhubungan, dan keberlanjutan pasokan energi.

Dengan rencana program unggulan dan program strategis yang akan dilaksanakan tersebut diharapkan WP Subosukawonosraten akan mencapai target indikator kinerja makro dalam lima tahun sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.6.
Target Kinerja Makro WP Subosukawonosraten

Tahun	Kabupaten/Kota						
	Boyolali	Klaten	Sukoharjo	Wonogiri	Karang-anyar	Sragen	Kota Surakarta
	Tingkat Pengangguran Terbuka						
2026	3,08-2,80	3,70-3,00	3,60-3,30	2,20-1,98	3,35-3,35	3,41-3,11	4,20-4,00
2027	3,04-2,74	3,76-3,46	3,57-3,27	1,74-1,44	3,24-2,94	3,30-3,00	4,38-4,08
2028	2,97-2,67	3,64-3,34	3,54-3,24	1,69-1,39	3,12-2,82	3,18-2,88	4,27-3,97
2029	2,91-2,61	3,53-3,23	3,50-3,20	1,65-1,35	3,00-2,70	3,06-2,76	4,15-3,85
2030	2,85-2,55	3,42-3,12	3,46-3,16	1,61-1,31	2,88-2,58	2,95-2,65	4,04-3,74
	Indeks Pembangunan Manusia						
2026	77,00	79,47	79,75	73,99	79,26	76,71	85,50
2027	77,43	80,18	79,87	74,43	79,97	77,19	85,86
2028	77,86	80,89	79,99	74,87	80,68	77,67	86,22
2029	78,28	81,59	80,10	75,31	81,38	78,15	86,58
2030	78,71	82,30	80,22	75,75	82,09	78,63	86,94

Tahun	Kabupaten/Kota						
	Boyolali	Klaten	Sukoharjo	Wonogiri	Karang-anyar	Sragen	Kota Surakarta
	Tingkat Kemiskinan						
2026	9,27-9,09	11,32-11,21	7,20-7,15	9,25-9,18	8,84	11,50-11,18	7,58-7,37
2027	8,22-7,72	10,56-10,11	6,60-6,39	8,99-8,56	8,17-7,56	10,92-10,49	7,20-6,19
2028	7,79-7,29	10,36-9,89	6,26-6,04	8,52-8,08	8,04-7,42	10,35-9,90	6,96-5,95
2029	7,35-6,86	10,15-9,67	5,91-5,68	8,05-7,61	7,90-7,32	9,77-9,32	6,71-5,75
2030	6,92-6,43	9,93-9,44	5,56-5,33	7,58-7,13	7,76-7,17	9,20-8,74	6,46-5,51
	Pertumbuhan Ekonomi						
2026	5,80-6,00	5,70-6,50	5,30-6,00	5,36-6,00	6,2	5,50-6,00	6,06-6,70
2027	6,00-6,90	6,60-7,20	6,20-6,64	6,50-7,25	6,80-7,65	6,50-7,08	6,70-7,49
2028	6,60-7,40	7,00-7,80	6,70-7,73	6,90-7,75	7,30-8,00	7,10-7,63	7,10-7,99
2029	7,30-7,90	7,40-8,00	7,30-7,71	7,40-8,24	7,70-8,20	7,60-8,12	7,50-8,34
2030	7,80-8,30	7,90-8,30	7,70-7,99	7,70-8,20	7,90-8,30	7,90-8,34	7,90-8,40

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah (Hasil Analisis), 2025

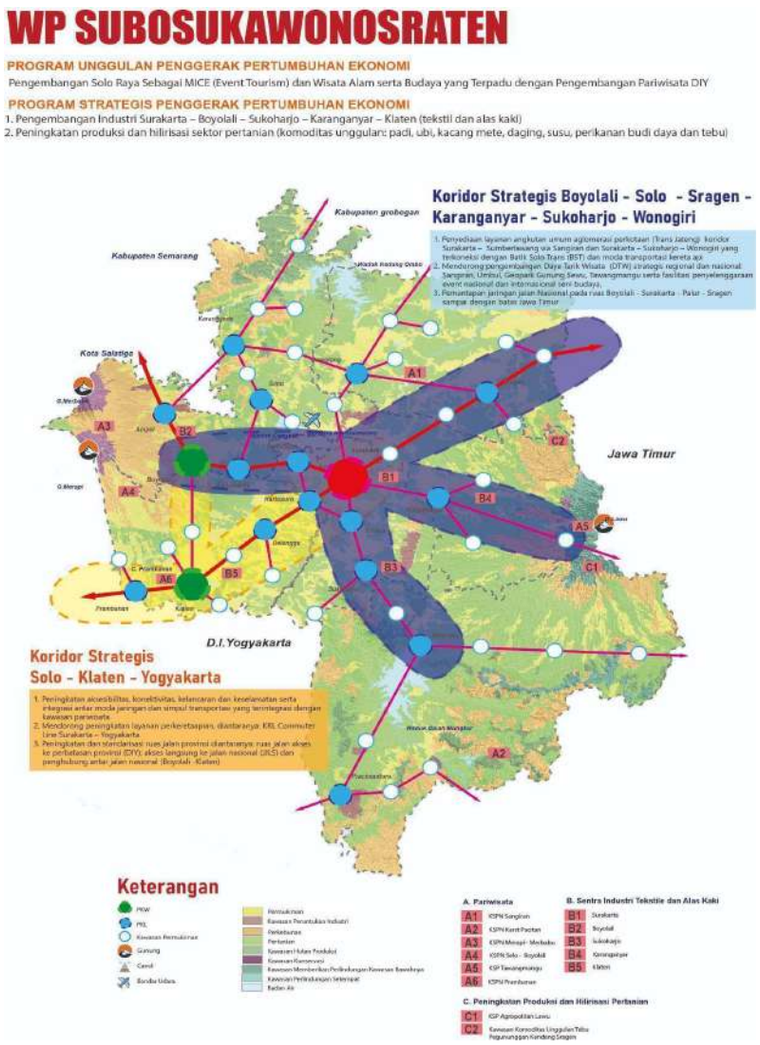

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah (Hasil Analisis), 2025

Gambar 4.7.
Arahan Kebijakan WP Subosukawonosraten

4.2.6. WP Jekuti

Dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Jekuti berikut adalah indikasi kebutuhan rencana **program unggulan dan program strategis** selama lima tahun kedepan yang merupakan lintas kewenangan sebagai berikut.

1. **Pengembangan Industri Kudus-Jepara-Pati (*furniture*, tepung, gula, garam dan pengolahan ikan)**
   a. Inisiasi rencana penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (pengembangan koridor baru Trans Jateng/Trans Jekuti) dengan peningkatan peran serta dan keterlibatan pemerintahan kabupaten di WP Jekuti yang terintegrasi dengan angkutan lanjutan lainnya termasuk terintegrasi dengan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan sekaligus mendukung aksesibilitas kawasan pariwisata;
   b. Mendorong reaktivasi jalur rel kereta api nonaktif lintas Semarang–Demak–Kudus–Pati–Rembang–Tuban;
   c. Penanganan jalan provinsi pendukung akses sentra industri di Jepara, Kudus, dan Pati;
   d. Pemenuhan fasilitas keselamatan pada ruas Jepara-Kudus;
   e. Mendorong dan mendukung pembangunan jalan tol Demak-Kudus-Pati-Rembang–Tuban;
   f. Mendorong peningkatan pengelolaan industri kerajinan di Kabupaten Jepara;
   g. Mendorong peningkatan pengelolaan industri pengolahan tembakau di Kabupaten Kudus;
   h. Mendorong peningkatan pengelolaan industri pengolahan tapioka di Kabupaten Pati;
   i. Mendorong pengembangan industri hasil pertanian, perikanan, kehutanan, dan energi dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam;
   j. Mendorong pengembangan ekspor produk unggulan;
   k. Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi SNI dan merek;
   l. Peningkatan promosi produk industri agro melalui fasilitasi pameran.
2. **Pengembangan *Marine Tourism* dan Wisata Religi**
   a. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antarmoda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, dengan:
      1) Mendorong penyediaan layanan penerbangan komersial ke Karimunjawa dan mendorong pengembangan Bandara Dewadaru Karimunjawa sebagai generator aktivitas perekonomian nasional;
      2) Mendorong pengembangan pelabuhan umum (Jepara, Legonbajak dan Karimunjawa);
      3) Mendorong peningkatan layanan penyeberangan ke Karimunjawa;
      4) Peningkatan dan standarisasi ruas jalan provinsi di antaranya ruas Kudus–Margoyoso;
   b. Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, dengan:
      1) Mendorong pengembangan potensi wisata keunikan geologi dan pantai;
      2) Mendorong pengembangan Cagar Biosfer Karimunjawa-Muria;
      3) Mendorong pembangunan *Waterfront City* di Kepulauan Karimunjawa;

4) Mendorong *event sport tourism* berskala internasional;
5) Peningkatan pasokan sumber air baku, diantaranya melalui rehabilitasi Embung Legonlele dan Pulau Parang;
6) Mendorong pengembangan DTW Religi (Menara Kudus dan Gunung Muria) serta DTW Alam (Pesisir Pantai Jepara);
7) Mendorong promosi budaya lokal melalui penyelenggaraan even budaya (Barikan Kubro) dan even ziarah (Haul Sunan Muria dan Kudus);
8) Pengembangan desa wisata di Koridor Jepara-Kudus–Pati;
9) Mendorong sinergi dan kolaborasi para pihak dalam pengelolaan maupun pemulihan area bernilai keanekaragaman hayati dan/atau jasa ekosistem tinggi khususnya di Gunung Muria dan Cagar Biosfer Karimunjawa-Jepara–Muria;
10) Mendorong peningkatan Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP) berbasis potensi lokal pariwisata yang didukung oleh pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri kecil dan menengah, serta mendorong pembentukan PKP baru sebagai pusat pertumbuhan perdesaan.

3. **Peningkatan Produksi Dan Hilirisasi Sektor Pertanian (komoditas unggulan: padi, tebu, ubi kayu, kelapa kopyor, sapi potong, kerbau, perikanan tangkap dan budidaya, serta garam)**
   a. Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas), melalui:
      1) Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo;
      2) Upaya mendorong peningkatan perikanan tangkap melalui pelatihan bagi nelayan agar lebih kompeten dalam memanfaatkan teknologi tanpa merusak ekosistem laut;
      3) Upaya mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas jalur distribusi pertanian yang didominasi ruas jalan kabupaten dan desa;
      4) Upaya mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam peningkatan hasil panen melalui implementasi Riset Inovasi Teknologi (RIT) di sektor pertanian;
      5) Upaya mendorong pengendalian alih fungsi lahan pertanian serta pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan melalui kebijakan penataan ruang perlindungan lahan pertanian serta pelaksanaan reforma agraria dengan penataan aset dan akses;
      6) Peningkatan sistem jaringan irigasi kewenangan provinsi diantaranya rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Bakalan;
      7) Upaya mendorong rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain di DI Gununggrowo;
      8) Upaya mendiri peningkatan kerja sama penanganan bencana (banjir, tanah longsor, dan kekeringan), serta fasilitasi upaya mitigasi dan penanggulangan bencana di wilayah Jekuti;
      9) Fasilitasi prasarana dan sarana pertanian (alsintan) di daerah potensi produksi pertanian; penyediaan benih/bibit berkualitas; pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); pengembangan pelabuhan perikanan, pengembangan budidaya ikan nila salin dan Keramba Jaring Apung (KJA), pengelolaan kawasan konservasi, peningkatan kualitas SDM dan prasarana sarana pergaraman,

pelatihan diversifikasi olahan ikan, fasilitasi kemasan dan jejaring pemasaran;

10) Upaya mendorong peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) dan pengembangan kawasan peternakan;

b. Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), melalui penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian; penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan; pemasaran dan *branding* produk; pada sektor perikanan melalui pelatihan diversifikasi produk olahan hasil perikanan; diversifikasi usaha nelayan Perairan Umum Daratan (PUD); serta fasilitasi kemasan produk dan jejaring pemasaran hasil perikanan.

Selain indikasi kebutuhan rencana program implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru dimaksud, terdapat beberapa indikasi rencana program kewilayahan selama lima tahun kedepan yang juga merupakan lintas kewenangan di WP Jekuti, antara lain sebagai berikut.

1. **Lingkup Sosial dan Kependudukan**
   a. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni; fasilitasi rumah susun untuk MBR bekerja sama dengan BUMN, BUMD dan swasta, serta program jambanisasi dalam mendukung penanganan kemiskinan di Jekuti;
   b. Pengelolaan dan revitalisasi pendidikan vokasional berbasis potensi unggulan, mendorong sekolah inklusif dan sekolah unggulan;
   c. Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui pelibatan lintas sektor;
   d. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi yang menyasar kelompok usia sekolah, usia produktif, dan lanjut usia (lansia) sejalan dengan pembudayaan hidup sehat serta perlu diperkuat dengan penekanan pada pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM), khususnya melalui pengendalian konsumsi produk hasil tembakau serta pangan tinggi garam, gula, dan lemak; upaya promotif preventif ini harus didukung oleh program penyehatan lingkungan yang efektif; sedangkan dalam rangka penuntasan *stunting* diarahkan pada aspek pencegahan untuk memastikan anak yang sehat tidak menjadi *stunting*;
   e. Pemberian Makan Bergizi Gratis untuk pemenuhan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri termasuk penguatan ekosistem pendukung;
   f. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas serta mendorong sekolah inklusif di tingkat kecamatan.
2. **Lingkup Perekonomian**
   a. Pengembangan dan fasilitasi perizinan berusaha yang sesuai dengan program konservasi dan peruntukan penataan ruang;
   b. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UMKM dan kewirausahaan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah.
3. **Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan**
   a. Memperpadukan pembangunan Kawasan Perkotaan Kudus-Jepara-Pati-Juwana;

b. Mendorong dan memfasilitasi penanganan/penataan permukiman pada kawasan kumuh secara terpadu;
c. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa;
d. Rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan untuk pemulihan kapasitas daya dukung DAS khususnya di DAS Serang dan DAS Juana;
e. Mendorong dan memfasilitasi pembangunan SPAM Regional Dadimuria;
f. Mendorong dan fasilitasi pengelolaan SPAM, SPAL, dan persampahan berbasis masyarakat;
g. Peningkatan infrastruktur jalan menuju mantap dalam rangka meningkatkan keterhubungan antardaerah (Jepara-Keling; Pati-Kayen-Sukolilo; Pati-Tayu; Jepara-Kedungmalang-Pecangan; Jati-Klambu);
h. Mendorong transformasi sektor energi melalui pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan, penerapan jaringan cerdas (*smart grid*), adopsi teknologi penyimpanan energi, pemanfaatan *Internet of Things* (IoT) untuk pemantauan *real-time*, serta perluasan penggunaan kendaraan listrik guna meningkatkan efisiensi, keterhubungan, dan keberlanjutan pasokan energi.

Dengan rencana program unggulan dan program strategis yang akan dilaksanakan tersebut diharapkan WP Jekuti akan mencapai target indikator kinerja makro dalam lima tahun sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.7.
Target Kinerja Makro WP Jekuti

Tahun	Kabupaten/Kota					
	Pati	Kudus	Jepara	Pati	Kudus	Jepara
	Tingkat Pengangguran Terbuka			Tingkat Kemiskinan		
2026	3,74-3,44	2,87-2,57	3,15-2,97	8,51-8,40	6,56-5,47	5,59-5,34
2027	3,62-3,32	2,78-2,48	3,01-2,71	8,23-7,98	6,12-5,18	5,52-5,01
2028	3,53-3,23	2,69-2,39	2,92-2,62	7,98-7,72	5,80-4,89	5,24-4,73
2029	3,49-3,19	2,61-2,31	2,83-2,53	7,73-7,45	5,47-4,60	4,95-4,46
2030	3,40-3,10	2,52-2,22	2,75-2,45	7,37-7,19	5,15-4,31	4,66-4,18
	Indeks Pembangunan Manusia			Pertumbuhan Ekonomi		
2026	75,62	78,31	75,33	5,50-6,50	3,00-3,70	4,82-5,62
2027	76,22	78,83	75,65	6,60-7,44	3,90-4,90	5,60-6,70
2028	76,82	79,35	75,98	7,30-8,00	4,50-5,50	6,00-7,28
2029	77,43	79,86	76,30	7,60-8,20	5,00-5,86	6,60-7,69
2030	78,03	80,38	76,62	7,90-8,40	5,40-6,12	7,10-7,94

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah (Hasil Analisis), 2025

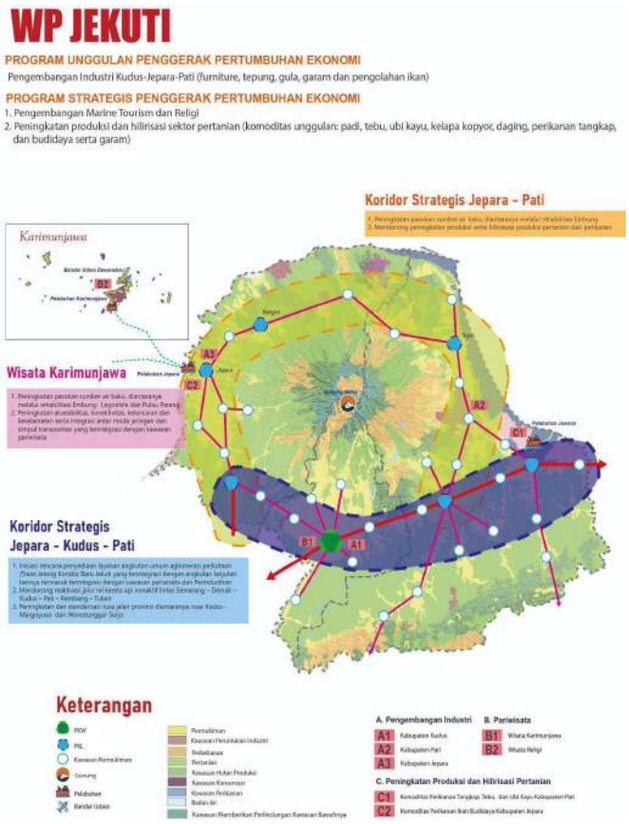

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah (Hasil Analisis), 2025

Gambar 4.8.
Arahan Kebijakan WP Jekuti

4.2.7. WP Banglor

Dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Banglor berikut adalah indikasi kebutuhan rencana **program unggulan dan program strategis** selama lima tahun kedepan yang merupakan lintas kewenangan sebagai berikut.

1. **Optimalisasi Kawasan Hutan sebagai Wanatani dan *Ecotourism***
   a. Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, dengan:
      1) Upaya mendorong pengembangan kawasan destinasi pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat (melibatkan pokdarwis, BUMDes, Lembaga Masyarakat Desa Hutan/LMDH, dan lain-lain);
      2) Fasilitasi peningkatan pemasaran daya tarik wisata daerah/lokal menjadi unggulan dan penguatan kelembagaan pengelola pariwisata;
      3) Rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan untuk pemulihan kapasitas daya dukung DAS khususnya di DAS Serang, DAS Capluk dan DAS Lasem diantaranya melalui penguatan perhutanan sosial (kelompok usaha perhutanan sosial) dengan penerapan *agroforestry*;
      4) Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP) berbasis potensi kehutanan dan perkebunan utamanya dalam mendukung pengembangan kawasan wanatani/agrobisnis, wanawisata, wisata alam, dan eduwisata;
      5) Pendampingan dalam penetapan *Geoheritage* Blora;
   b. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antarmoda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, dengan:

1) Upaya mendorong pengembangan dan optimalisasi Bandara Ngloram Cepu Blora sebagai pintu masuk Jawa Tengah dari sisi timur dan sebagai generator aktivitas perekonomian;
2) Upaya mendorong integrasi angkutan umum di Bandara Ngloram dan Stasiun Kapuhan termasuk mendorong inisiasi penyediaan layanan kereta api komuter yang terpadu dengan wilayah Jawa Timur;
3) Penanganan ruas jalan provinsi yang menghubungkan Rembang-Blora (Todaan-Ngawen) dan Blora-Grobogan (Singget-Doplang-Cepu).

2. Pengembangan Sektor Industri Garam, Gula Dan Pengolahan Ikan

a. Mendorong keterpaduan pengembangan industri di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora;
b. Mendorong pengembangan pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan di Kabupaten Rembang;
c. Pengembangan sentra industri hijau;
d. Pengembangan ekspor produk unggulan;
e. Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi SNI dan merek;
f. Peningkatan promosi produk industri agro melalui fasilitasi pameran;
g. Mempersiapkan sistem pendidikan menengah untuk menciptakan kesesuaian pendidikan prakerja melalui *link and match* dengan dunia industri;
h. Pengembangan potensi lokal daerah berbasis *teaching factory* pengolahan hasil pertanian.

3. Pengembangan *Cultural Heritage Tourism* Kota Pusaka Lasem dan Wisata Pantai

a. Upaya mendorong pengembangan kawasan Kota Pusaka Lasem, fasilitasi peningkatan pemasaran daya tarik wisata lokal menjadi unggulan dan penguatan kelembagaan pengelola pariwisata;
b. Mendorong pengembangan potensi wisata keunikan bentang alam dan pantai;
c. Mendorong rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir;
d. Mendorong pengembangan ekowisata secara berkelanjutan di Kawasan Konservasi Karang Jahe;
e. Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP) berbasis potensi wisata religi, wisata pantai, dan kawasan pusaka;
f. Standarisasi ruas jalan penghubung Rembang–Blora;
g. Pemenuhan fasilitas keselamatan pada ruas jalan penghubung Rembang–Blora;
h. Mendorong reaktivasi jalur rel kereta api nonaktif lintas Semarang–Demak–Kudus–Pati–Rembang–Tuban;
i. Mendorong pemenuhan fasilitas dan peningkatan hierarki Pelabuhan Sluke dari pelabuhan pengumpan regional menjadi pelabuhan pengumpul;
j. Mendorong dan memfasilitasi inisiasi rencana pengembangunan jalan tol Demak-Kudus-Rembang-Pati-Tuban.

4. Peningkatan Produksi Dan Hilirisasi Sektor Pertanian (komoditas unggulan: padi, tebu, tembakau, kelapa kopyor, sapi potong, kambing, ayam buras, perikanan tangkap dan budidaya, serta garam)

a. Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas), melalui:

1) Upaya mendorong pengendalian alih fungsi lahan pertanian serta pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan melalui kebijakan penataan ruang perlindungan lahan pertanian serta pelaksanaan reforma agraria dengan penataan aset dan akses;
2) Upaya mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas jalur distribusi pertanian yang didominasi ruas jalan kabupaten dan desa;
3) Upaya mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam peningkatan hasil panen melalui implementasi Riset Inovasi Teknologi (RIT) di sektor pertanian;
4) Fasilitasi prasarana dan sarana pertanian (alsintan) di daerah potensi produksi pertanian; penyediaan benih/bibit berkualitas; pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); pengembangan pelabuhan perikanan, pengembangan budidaya udang vaname di Rembang dan ikan lele di Blora, pengelolaan kawasan konservasi, peningkatan kualitas SDM dan prasarana sarana pergaraman, pelatihan diversifikasi olahan ikan, fasilitasi kemasan dan jejaring pemasaran;
5) Upaya mendorong peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) dan pengembangan kawasan peternakan;
6) Upaya mendorong peningkatan saluran irigasi pergaraman;
7) Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tasik Agung;
8) Upaya mendorong peningkatan perikanan tangkap melalui pelatihan bagi nelayan agar lebih kompeten dalam memanfaatkan teknologi tanpa merusak ekosistem laut;
9) Peningkatan pasokan sumber air baku pertanian, diantaranya melalui rehabilitasi Embung Pasedan, Trenggulunan, Kaliombo di Kabupaten Rembang, dan Embung Karangjati di Kabupaten Blora;
10) Pembangunan *Long Storage* Waru Gunung, Ranggamulyo, Sungai Pang Kabupaten Rembang;
11) Upaya mendukung dan memfasilitasi pembangunan Bendungan Karangnongko dan Bendungan Cabean di Kabupaten Blora;
12) Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area*, terutama pada DAS Jragung, DAS Tuntang, DAS Serang, DAS Juana, DAS Capluk, DAS Lasem, Danau Rawapening, Waduk Kedungombo;
13) Upaya mendorong pengembangan kota agropolitan (Rembang);

b. Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), melalui penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian; penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan; pemasaran dan *branding* produk; pada sektor perikanan melalui pelatihan diversifikasi produk olahan hasil perikanan; diversifikasi usaha nelayan Perairan Umum Daratan (PUD); serta fasilitasi kemasan produk dan jejaring pemasaran hasil perikanan.

Selain indikasi kebutuhan rencana program implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru dimaksud, terdapat beberapa indikasi rencana

program kewilayahan selama lima tahun kedepan yang juga merupakan lintas kewenangan di WP Banglor, antara lain sebagai berikut.

1. **Lingkup Sosial dan Kependudukan**
   a. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni, fasilitasi rumah susun untuk MBR bekerja sama dengan BUMN, BUMD dan swasta, serta program jambanisasi dalam mendukung penanganan kemiskinan di Banglor;
   b. Pengelolaan dan revitalisasi pendidikan vokasional berbasis potensi unggulan, mendorong sekolah inklusif, dan sekolah unggulan;
   c. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, *stroke*, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang (PHTC);
   d. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi yang menyasar kelompok usia sekolah, usia produktif, dan lanjut usia (lansia) sejalan dengan pembudayaan hidup sehat serta perlu diperkuat dengan penekanan pada pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM), khususnya melalui pengendalian konsumsi produk hasil tembakau serta pangan tinggi garam, gula, dan lemak; upaya promotif preventif ini harus didukung oleh program penyehatan lingkungan yang efektif; sedangkan dalam rangka penuntasan *stunting* diarahkan pada aspek pencegahan untuk memastikan anak yang sehat tidak menjadi *stunting*;
   e. Pemberian Makan Bergizi Gratis untuk pemenuhan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri termasuk penguatan ekosistem pendukung;
   f. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas di tingkat kecamatan.
2. **Lingkup Perekonomian**
   a. Penguatan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
   b. Mendorong revitalisasi pasar tradisional yang terintegrasi berbasis digital.
3. **Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan**
   a. Mendorong peningkatan aksesibilitas pusat ekonomi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora;
   b. Mendorong Kawasan Perkotaan Cepu dan sekitarnya sebagai Pusat Bisnis Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Skala Internasional;
   c. Mendorong pengembangan Kawasan Perkotaan Rembang menjadi PKW;
   d. Memperpadukan pembangunan wilayah perbatasan dengan Provinsi Jawa Timur;
   e. Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
   f. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa;
   g. Mendorong pengembangan kawasan perkotaan Rembang melalui penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang;
   h. Inisiasi pembangunan SPAM Regional Randugunting;
   i. Mendorong dan fasilitasi pengelolaan SPAM, SPAL, dan persampahan berbasis masyarakat;
   j. Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah;
   k. Mendorong dan memfasilitasi penanganan/penataan permukiman kumuh bersanitasi baik di kawasan perkotaan Rembang;

l. Mendorong transformasi sektor energi melalui pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan, penerapan jaringan cerdas (*smart grid*), adopsi teknologi penyimpanan energi, pemanfaatan *Internet of Things* (IoT) untuk pemantauan *real-time*, serta perluasan penggunaan kendaraan listrik guna meningkatkan efisiensi, keterhubungan, dan keberlanjutan pasokan energi.

Dengan rencana program unggulan dan program strategis yang akan dilaksanakan tersebut diharapkan WP Banglor akan mencapai target indikator kinerja makro dalam lima tahun sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.8.
Target Kinerja Makro WP Banglor

Tahun	Kabupaten/Kota			
	Blora	Rembang	Blora	Rembang
	Tingkat Pengangguran Terbuka		Tingkat Kemiskinan	
2026	3,40-2,85	2,50-2,20	10,89-10,28	13,39-12,94
2027	2,90-2,60	2,47-2,17	9,83-8,82	11,87-11,41
2028	2,84-2,54	2,43-2,13	9,71-8,69	11,25-10,78
2029	2,79-2,49	2,40-2,10	9,59-8,61	10,63-10,14
2030	2,74-2,44	2,36-2,06	9,45-8,47	10,01-9,51
	Indeks Pembangunan Manusia		Pertumbuhan Ekonomi	
2026	72,61	73,20	3,25-4,05	5,20-6,00
2027	73,02	73,69	4,20-5,20	5,50-6,50
2028	73,43	74,17	4,70-5,70	5,70-6,70
2029	73,84	74,66	5,10-6,00	6,70-7,70
2030	74,25	75,15	5,60-6,35	7,60-8,30

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah (Hasil Analisis), 2025

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah (Hasil Analisis), 2025

Gambar 4.9.
Arahan Kebijakan WP Banglor

4.2.8. WP Kedungsepur

Dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Kedungsepur berikut adalah indikasi kebutuhan rencana **program unggulan dan program strategis** selama lima tahun kedepan yang merupakan lintas kewenangan sebagai berikut.

1. **Pengembangan Kawasan Industri Kendal–Demak–Semarang (industri prioritas: kimia, mesin, perlengkapan industri, makanan dan minuman, alas kaki, tekstil, daging, jamu, dan pengolahan ikan)**
   a. Mendorong keterpaduan pengembangan industri di WP Kedungsepur;
   b. Mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas dan pelabuhan darat (*dryport*) secara terpadu sebagai pintu ekspor dan impor, serta sebagai sentra ekonomi Jawa melalui optimalisasi pelabuhan sebagai generator aktivitas perekonomian global (mendorong percepatan revitalisasi alur pelayaran);
   c. Mendorong fasilitasi pembangunan Pelabuhan Kendal dan didorong peningkatan hierarki dari pelabuhan regional menjadi terminal dari Pelabuhan Tanjung Mas untuk mendukung KEK Kendal dan percepatan investasi swasta untuk pengembangan Kendal *Sea Port;*
   d. Mendorong pengembangan fasilitas logistik dalam rangka mendorong kemudahan pergerakan barang hasil industri;

e. Mendorong pengembangan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam;
f. Upaya mendorong peningkatan investasi dan ekosistem industri antarkawasan industri di Kota Semarang, Kabupaten Demak dan Semarang, Kawasan Industri Kendal (KIK), dan KI *Seafer* (Kabupaten Kendal);
g. Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan Dunia Usaha;
h. Menyiapkan sistem pendidikan menengah untuk menciptakan kesesuaian pendidikan prakerja dengan membangun *link and match* SMK/SMA sederajat dengan dunia industri;
i. Mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak dan inisiasi proses rencana penyiapan rencana pembangunan Jalan Tol Demak-Kudus-Pati-Rembang-Perbatasan Jawa Timur;
j. Mendorong integrasi antarmoda kereta api dan kapal (peningkatan efisiensi logistik);
k. Penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (koridor Semarang-Kendal, Semarang-Bawen dan Semarang-Grobogan) dan inisiasi rencana pengembangan koridor baru Trans Jateng rute Semarang-Demak (didahului dengan kajian kelayakan teknis utamanya dari aspek kerawanan banjir dan sosial) dengan peningkatan peran serta dan keterlibatan pemerintah kabupaten, yang terkoneksi dengan Trans Semarang dan moda transportasi kereta api serta angkutan lanjutan lainnya termasuk terintegrasi dengan kawasan perindustrian (KEK Kendal dan KPI Kabupaten Semarang, Grobogan, dan Demak);
l. Peningkatan kondisi dan kinerja serta optimalisasi terminal tipe B sebagai simpul perekonomian di Terminal Penggaron (simpul integrasi Trans Jateng, Trans Semarang dan *feeder* Trans Semarang), serta mendorong revitalisasi terminal tipe C yang dilalui koridor angkutan umum aglomerasi perkotaan;
m. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas melalui peningkatan dan standarisasi jalan provinsi yang terhubung dengan jalan nasional dan menghubungkan Kendal-Kota Semarang-Grobogan-Kabupaten Semarang;
n. Kajian evaluasi zona konservasi pada cekungan air tanah Kendal;
o. Mendorong pengembangan sentra industri hijau;
p. Mendorong pengembangan ekspor produk unggulan;
q. Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi SNI dan merek.

2. Pengembangan Metropolitan Semarang sebagai *Global City*

a. Mendorong peningkatan peran Kota Semarang sebagai ibukota provinsi dan pusat ekonomi dalam mendorong perkembangan wilayah di sekitarnya;
b. Mendorong pembentukan kelembagaan pengelolaan perkotaan serta peningkatan kerja sama antardaerah dalam lingkup WP Kedungsepur, terutama dalam hal:
    1) pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan;
    2) koordinasi dan pengelolaan pengembangan kawasan permukiman di perbatasan kabupaten/kota;
    3) penyediaan prasarana dan sarana di bidang transportasi, air minum, persampahan, drainase, dan pengelolaan limbah;
    4) penanganan bencana dan kawasan terdampak rob;

c. Mendorong pemantapan Bandara Ahmad Yani menjadi bandara internasional dan sebagai generator aktivitas perekonomian global;
d. Mendorong dan memfasilitasi perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya (menyesuaikan dinamika penetapan rute/lintasan jaringan rel oleh Pemerintah Pusat);
e. Mendorong inisiasi pengembangan dan penguatan sistem perkotaan berorientasi transit (TOD) yang menggabungkan sistem transportasi dan integrasi moda dengan kawasan permukiman;
f. Mendorong pembangunan ekosistem *Smart City* dan digitalisasi layanan publik;
g. Mendorong perencanaan tata ruang serta tata bangunan dan lingkungan yang baik utamanya untuk mengantisipasi *urban sprawl* serta kekumuhan;
h. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan dan industri maupun wilayah desa.

3. **Pengembangan *Cultural Heritage Tourism* (Kota Lama Semarang, Candi Gedongsongo, Museum Kereta Api dsk)**
   a. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antarmoda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui:
      1) Penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng koridor Semarang-Kabupaten Semarang) yang terkoneksi dengan Trans Semarang dan moda transportasi kereta api serta angkutan lanjutan lainnya yang menghubungkan dengan kawasan pariwisata termasuk pengembangan program integrasi edutrip dengan daya tarik wisata dan desa wisata;
      2) Penanganan ruas jalan provinsi diantaranya ruas jalan Semarang-Purwodadi, Salatiga-Kedungjati-Gubug;
      3) Penyediaan perlengkapan jalan diantaranya pada ruas Salatiga-Kopeng, Semarang-Bandungan-Kaloran, dan Semarang-Cangkiran-Boja;
      4) Upaya mendorong penataan transportasi kawasan Kota Lama Semarang yang lebih ramah lingkungan (*low emission zone*);
   b. Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui:
      1) Upaya mendorong kerja sama antardaerah dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata;
      2) Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis sejarah dan budaya melalui penyediaan paket pariwisata yang terintegrasi dalam skala regional;
      3) Upaya mendorong pengembangan daya tarik wisata religi Masjid Demak dan penataan Kawasan Kompleks Makam Sunan Kalijogo Kadilangu Demak;
      4) Upaya mendorong promosi budaya lokal melalui penyelenggaraan even budaya dan even ziarah (Haul Sunan Demak dan Kalijogo);
      5) Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis alam terutama pantai dan dataran tinggi dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan;
      6) Penyusunan pola perjalanan dan *itinerary* wisata *heritage*;
      7) Upaya mendorong peningkatan Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP) yang berbasis potensi lokal wisata budaya, wisata religi, dan wisata alam yang didukung oleh sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, serta

mendorong pembentukan PKP baru sebagai pusat pertumbuhan perdesaan.

4. **Peningkatan Produksi Dan Hilirisasi Sektor Pertanian (komoditas unggulan: padi, jagung, bawang merah, tanaman perkebunan, sapi perah, kerbau, kambing, ayam buras, kedelai, garam dan perikanan tangkap)**
   a. Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas), melalui:
      1) Pengembangan pelabuhan perikanan;
      2) Upaya mendorong peningkatan perikanan tangkap melalui pelatihan bagi nelayan agar lebih kompeten dalam memanfaatkan teknologi tanpa merusak ekosistem laut;
      3) Upaya mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas jalur distribusi pertanian yang didominasi ruas jalan kabupaten dan desa;
      4) Upaya mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam peningkatan hasil panen melalui implementasi Riset Inovasi Teknologi (RIT) di sektor pertanian;
      5) Upaya mendorong pengendalian alih fungsi lahan pertanian serta pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan melalui kebijakan penataan ruang perlindungan lahan pertanian serta pelaksanaan reforma agraria dengan penataan aset dan akses;
      6) Fasilitasi prasarana dan sarana pertanian di daerah potensi produksi pertanian; penyediaan benih/bibit berkualitas; penjaminan kualitas pakan ternak; pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); korporasi pertanian; pemanfaatan *urban farming*; pengembangan pelabuhan perikanan; bantuan prasarana sarana penangkapan ikan dan garam; serta pengelolaan kawasan konservasi;
      7) Upaya mendorong peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) dan pengembangan kawasan peternakan;
      8) Peningkatan sistem jaringan irigasi (DI Parean) dan peningkatan saluran irigasi pergaraman;
      9) Upaya mendorong rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain di DI Glapan, DI Sedadi, DI Klambu, DI Jragung, DI Dumpil, DI Sidorejo, DI Gemblong;
      10) Peningkatan pasokan sumber air baku pertanian, diantaranya melalui rehabilitasi Embung Triharjo-Kendal;
   b. Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), melalui:
      1) Upaya mendorong hilirisasi tebu, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar tebu, yaitu *raw sugar*, GKP, *molase*, *bagasse*, serta produk hilirisasi lanjutan tebu, yaitu bioetanol, sirup glukosa, dan bioplastik;
      2) Upaya mendorong pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri garam di Demak;
      3) Upaya mendorong penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian;
      4) Upaya mendorong pemasaran dan *branding* produk;
      5) Penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan;

6) Fasilitasi diversifikasi, kemasan, dan jejaring pemasaran produk olahan ikan, serta pengembangan pojok UMKM hasil olahan ikan;
7) Upaya mendorong pengembangan Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari di Kabupaten Kendal;
8) Peningkatan promosi produk industri agro melalui fasilitasi pameran.

Selain indikasi kebutuhan rencana program implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru dimaksud, terdapat beberapa indikasi rencana program kewilayahan selama lima tahun kedepan yang juga merupakan lintas kewenangan di WP Kedungsepur, antara lain sebagai berikut.

1. **Lingkup Sosial dan Kependudukan**
   a. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni vertikal untuk MBR, Gen Z dan Milenial bekerja sama dengan BUMN, BUMD dan swasta, serta program jambanisasi dan penyediaan rumah apung/adaptif banjir di pesisir utara Kabupaten Demak;
   b. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi yang menyasar kelompok usia sekolah, usia produktif, dan lanjut usia (lansia) sejalan dengan pembudayaan hidup sehat serta perlu diperkuat dengan penekanan pada pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM), khususnya melalui pengendalian konsumsi produk hasil tembakau serta pangan tinggi garam, gula, dan lemak; upaya promotif preventif ini harus didukung oleh program penyehatan lingkungan yang efektif; sedangkan dalam rangka penuntasan *stunting* diarahkan pada aspek pencegahan untuk memastikan anak yang sehat tidak menjadi *stunting*;
   c. Pemberian Makan Bergizi Gratis untuk pemenuhan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri termasuk penguatan ekosistem pendukung;
   d. Pengembangan sekolah menengah unggulan terintegrasi dan pengelolaan dan revitalisasi pendidikan vokasional berbasis potensi lokal;
   e. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas serta mendorong sekolah inklusif di tingkat kecamatan.
2. **Lingkup Perekonomian**
   a. Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan salah satunya melalui penguatan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
   b. Peningkatan prasarana dan sarana pelabuhan perikanan.
3. **Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan**
   a. Mendorong dan memfasilitasi percepatan pengamanan pesisir utara melalui pembangunan tanggul pantai/laut Kendal-Semarang-Demak dan pengembangan kawasan pesisir Semarang-Demak secara berkelanjutan serta peningkatan ketangguhan terhadap banjir periode kala-ulang 25-50 tahunan;
   b. Pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir yang mengalami penurunan tanah dan peningkatan banjir rob;
   c. Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi pesisir utara (Betahwalang);
   d. Rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir;
   e. Inisiasi pembangunan SPAM Regional Jragung;

f. Mendorong dan fasilitasi pengelolaan SPAM, SPAL, dan kajian kelayakan inisiasi rencana pembangunan TPST Regional di Kedungsepur;
g. Mendorong dan memfasilitasi pembangunan Bendungan Bodri di Kabupaten Kendal dan Bendungan Dolog di Kabupaten Semarang;
h. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah perdesaan;
i. Rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan untuk pemulihan kapasitas daya dukung DAS khususnya di *catchment area*, terutama pada DAS Jragung, DAS Tuntang, DAS Serang, Danau Rawapening, Waduk Kedungombo;
j. Mendorong sinergi dan kolaborasi para pihak dalam pengelolaan maupun pemulihan area bernilai keanekaragaman hayati dan/atau jasa ekosistem tinggi khususnya di Gunung Ungaran dan Cagar Biosfer Merapi-Merbabu-Menoreh;
k. Mendorong pemanfaatan sumber daya hayati (bioprospeksi) dan jasa ekosistem secara adil serta berkelanjutan;
l. Fasilitasi pengelolaan dan pengembangan usaha perhutanan sosial;
m. Mendorong peningkatan kualitas jalan (ruas Batas Kota Salatiga–Kedungjati/Batas Kabupaten Grobogan dan ruas jalan Brigjen Sudiarto (Semarang)) dan jembatan (jembatan Blandongan) sebagai penghubung kegiatan perekonomian;
n. Mendorong pembangunan pipa gas bumi Cirebon–Semarang dan pipa gas bumi Kalija (Kalimantan-Jawa);
o. Mendorong pembangunan infrastruktur PLTP Ungaran;
p. Mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung Waduk Kedung Ombo di Sragen, Boyolali, dan Grobogan;
q. Mendorong transformasi sektor energi melalui pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan, penerapan jaringan cerdas (*smart grid*), adopsi teknologi penyimpanan energi, pemanfaatan *Internet of Things* (IoT) untuk pemantauan *real-time*, serta perluasan penggunaan kendaraan listrik guna meningkatkan efisiensi, keterhubungan, dan keberlanjutan pasokan energi.

Dengan rencana program unggulan dan program strategis yang akan dilaksanakan tersebut diharapkan WP Kedungsepur akan mencapai target indikator kinerja makro dalam lima tahun sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.9.
Target Kinerja Makro WP Kedungsepur

Tahun	Kabupaten/Kota					
	Grobogan	Demak	Semarang	Kendal	Kota Salatiga	Kota Semarang
	Tingkat Pengangguran Terbuka					
2026	3,20-2,90	4,64-4,34	3,71-3,41	4,99-4,69	3,84-3,54	5,40-5,10
2027	3,17-2,87	4,53-4,23	3,62-3,32	4,94-4,64	3,82-3,52	5,23-4,93
2028	3,13-2,83	4,41-4,11	3,59-3,299	4,87-4,57	3,80-3,50	5,04-4,74
2029	3,09-2,79	4,30-4,00	3,47-3,17	4,80-4,50	3,78-3,48	4,85-4,55
2030	3,05-2,75	4,19-3,89	3,35-3,05	4,74-4,44	3,76-3,46	4,66-4,36
	Indeks Pembangunan Manusia					
2026	73,19	75,61	76,37	76,15	86,43	86,25

Tahun	Kabupaten/Kota					
	Grobogan	Demak	Semarang	Kendal	Kota Salatiga	Kota Semarang
2027	73,68	76,44	76,84	76,77	86,74	86,42
2028	74,17	77,28	77,32	77,4	87,05	86,59
2029	74,66	78,11	77,79	78,02	87,36	86,75
2030	75,15	78,94	78,26	78,64	87,67	86,92
	Tingkat Kemiskinan					
2026	10,70-10,30	11,38-10,04	6,68-6,55	8,82-8,73	4,34-4,30	3,86-3,74
2027	9,86-9,36	9,97-9,35	6,15-5,59	8,04-7,68	4,09-3,82	3,60-3,37
2028	9,35-8,84	9,44-8,83	5,83-5,28	7,62-7,25	3,87-3,60	3,42-3,18
2029	8,83-8,32	8,92-8,31	5,51-4,97	7,20-6,82	3,66-3,39	3,23-2,99
2030	8,31-7,80	8,40-7,79	5,19-4,66	6,77-6,40	3,44-3,18	3,04-2,81
	Pertumbuhan Ekonomi					
2026	5,40-6,20	5,10-6,00	4,90-5,90	5,70-6,50	5,56-6,56	5,90-6,30
2027	6,90-7,47	6,50-7,10	6,10-7,10	6,90-7,40	6,60-7,60	6,90-7,49
2028	7,30-7,87	7,00-7,80	6,50-7,20	7,50-7,85	7,00-7,80	7,50-7,98
2029	7,70-8,29	7,50-8,00	6,90-7,90	7,70-8,34	7,40-8,00	7,70-8,36
2030	7,90-8,50	7,90-8,30	7,30-8,00	7,90-8,40	7,80-8,30	7,90-8,50

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah (Hasil Analisis), 2025

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah (Hasil Analisis), 2025

Gambar 4.10.
Arahan Kebijakan WP Kedungsepur

4.2.9. WP Petanglong

Dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Petanglong, berikut adalah indikasi kebutuhan rencana **program unggulan dan program strategis** selama lima tahun kedepan yang merupakan lintas kewenangan sebagai berikut.

1. **Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) sebagai Kawasan Industri Manufaktur Berteknologi Tinggi**
   a. Mendorong pengembangan wilayah dan prasarana Kawasan Industri Terpadu Batang dengan daerah sekitarnya;
   b. Mendorong pengembangan fasilitas logistik dalam rangka mendorong kemudahan pergerakan barang hasil industri;
   c. Mendorong pengembangan pelabuhan umum;
   d. Mendorong percepatan investasi di KITB melalui upaya promosi dan kemudahan perizinan;
   e. Mendorong penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan Dunia Usaha;
   f. Menyiapkan sistem pendidikan menengah untuk menciptakan kesesuaian pendidikan prakerja dengan membangun *link and match* SMK/SMA sederajat dengan dunia industri;
   g. Mendorong pengembangan SPAM industri;
   h. Mendorong inisiasi pengembangan dan penguatan sistem perkotaan berorientasi transit (TOD) yang menggabungkan sistem transportasi umum yang terkoneksi dengan KITB dan dengan kawasan pariwisata;
   i. Mendorong pengembangan layanan angkutan umum perkeretaapian (jarak jauh dan komuter) yang terintegrasi dengan KITB;
   j. Inisiasi proses rencana penyediaan layanan angkutan umum aglomerasi perkotaan (Trans Jateng) dengan peningkatan peran dan keterlibatan pemerintahan kabupaten/kota di WP Petanglong yang terintegrasi dengan KITB dan moda transportasi lainnya;
   k. Peningkatan kondisi dan kinerja serta optimalisasi terminal tipe B sebagai simpul perekonomian pada Terminal Banyuputih Batang sebagai simpul rencana layanan Trans Jateng Petanglong;
   l. Penyediaan perlengkapan jalan diantaranya pada ruas Banyuputih-Plantungan;
   m. Mendorong perencanaan tata ruang serta tata bangunan dan lingkungan yang baik utamanya pada kawasan penyangga KIT Batang untuk mengantisipasi *urban sprawl* serta kekumuhan;
   n. Mendorong pemenuhan RTH kawasan industri;
   o. Kajian evaluasi zona konservasi pada cekungan air tanah Subah dan Pekalongan-Pemalang.
2. **Pengembangan *Shopping Tourism*, Pariwisata Alam, Budaya dan Ekonomi Kreatif**
   a. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antarmoda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui:
      1) Penanganan ruas jalan provinsi diantaranya ruas Wiradesa-Kajen-Kalibening dan Wonotunggal-Surjo;

2) Upaya mendorong peningkatan aksesibilitas koridor pariwisata Bandar-Dieng;
3) Penyediaan perlengkapan jalan diantaranya pada ruas Kajen-Wonotunggal-Surjo;

b. Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui:
1) Upaya mendorong kerja sama antardaerah dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata;
2) Upaya menciptakan *brand* wisata belanja;
3) Penyusunan basis data industri lokal yang dapat dijadikan sebagai destinasi wisata belanja;
4) Upaya mendorong pengembangan kawasan tematik sebagai lokasi belanja yang representatif, kreatif dan inovatif;
5) Mendorong pengembangan pasar-pasar tradisional sebagai destinasi wisata belanja;
6) Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis alam terutama pantai dan dataran tinggi dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan;
7) Pengembangan kampung/desa wisata utamanya pada koridor Bandar-Dieng serta Linggoasri-Petungkriyono dan sekitarnya;
8) Fasilitasi pengembangan berbagai even kebudayaan untuk pertumbuhan ekonomi antara lain syawalan, balon festival, festival kesenian;
9) Upaya mendorong promosi budaya lokal melalui kegiatan pameran budaya internasional melalui kerja sama dengan diaspora untuk budaya lokal di level global;
10) Bimbingan teknik produksi dan pengelolaan usaha bagi wirausaha baru industri komoditas;
11) Upaya mendorong peningkatan Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP) yang berbasis potensi lokal pariwisata yang didukung sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan serta mendorong pembentukan PKP baru sebagai pusat pertumbuhan perdesaan.

3. Peningkatan Produksi Dan Hilirisasi Sektor Pertanian (komoditas unggulan: padi, teh, kerbau, kambing, itik, ayam buras, dan perikanan tangkap)

a. Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas), melalui:
1) Upaya mendorong pengendalian alih fungsi lahan pertanian serta pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan melalui kebijakan penataan ruang perlindungan lahan pertanian serta pelaksanaan reforma agraria dengan penataan aset dan akses;
2) Upaya mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas jalur distribusi pertanian yang didominasi ruas jalan kabupaten dan desa;
3) Upaya mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam peningkatan hasil panen melalui implementasi Riset Inovasi Teknologi (RIT) di sektor pertanian;
4) Pengembangan pelabuhan perikanan;
5) Upaya mendorong peningkatan perikanan tangkap melalui pelatihan bagi nelayan agar lebih kompeten dalam memanfaatkan teknologi tanpa merusak ekosistem laut;

6) Upaya mendorong pengembangan agropolitan untuk mendorong peningkatan produksi dan hilirisasi komoditas agro unggulan didukung fasilitasi penyediaan prasarana sarana; peningkatan kompetensi; korporasi pertanian; penyediaan benih/bibit berkualitas; pengembangan minapolitan untuk mendorong produksi dan hilirisasi komoditas perikanan tangkap didukung pengembangan pelabuhan perikanan, bantuan prasarana sarana penangkapan ikan, fasilitasi diversifikasi, kemasan, dan jejaring pemasaran produk olahan ikan;
7) Fasilitasi prasarana sarana di daerah potensi produksi pertanian; penyediaan benih/bibit berkualitas; penjaminan kualitas pakan ternak; pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
8) Upaya mendorong peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) dan pengembangan kawasan peternakan;
9) Peningkatan sistem irigasi melalui rehabilitasi daerah irigasi Sudikampir;
10) Upaya mendorong rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain di DI Comal, DI Kupang Krompeng, DI Sragi, dan DI Kaliwadas;
11) Peningkatan pasokan sumber air baku pertanian, diantaranya mendorong pembangunan Waduk Kedunglanggar, Wonotunggal, Gondang Hilir, Karanggondang, Kradegan, Sidoharjo, Mesoyi, Wonodadi dan Candi;

b. Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), melalui:
1) Upaya mendorong pengembangan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam;
2) Upaya mendorong penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian;
3) Upaya mendorong pemasaran dan *branding* produk;
4) Pelatihan diversifikasi produk olahan hasil perikanan (perikanan tangkap);
5) Fasilitasi kemasan produk dan jejaring pemasaran hasil perikanan;
6) Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi SNI dan merek.

Selain indikasi kebutuhan rencana program implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru dimaksud, terdapat beberapa indikasi rencana program kewilayahan selama lima tahun kedepan yang juga merupakan lintas kewenangan di WP Petanglong, antara lain sebagai berikut.

1. Lingkup Sosial dan Kependudukan

a. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni, fasilitasi rumah susun untuk MBR, Gen Z dan Milenial bekerja sama dengan BUMN, BUMD dan swasta, serta penyediaan rumah apung/adaptif banjir di pesisir utara Pekalongan;
b. Pengembangan layanan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, *stroke* dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya pada RSUD Kraton;
c. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi yang menyasar kelompok usia sekolah, usia produktif, dan lanjut usia (lansia) sejalan

dengan pembudayaan hidup sehat serta perlu diperkuat dengan penekanan pada pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM), khususnya melalui pengendalian konsumsi produk hasil tembakau serta pangan tinggi garam, gula, dan lemak; upaya promotif preventif ini harus didukung oleh program penyehatan lingkungan yang efektif; sedangkan dalam rangka penuntasan *stunting* diarahkan pada aspek pencegahan untuk memastikan anak yang sehat tidak menjadi *stunting*;

d. Pemberian Makan Bergizi Gratis untuk pemenuhan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri termasuk penguatan ekosistem pendukung;
e. Mendorong pemenuhan puskesmas terutama di daerah terisolir di Kabupaten Pekalongan dan Batang;
f. Pengelolaan dan revitalisasi pendidikan vokasional berbasis potensi lokal dan mendorong sekolah inklusif;
g. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas serta mendorong sekolah inklusif di tingkat kecamatan.

2. Lingkup Perekonomian

a. Mendorong kerja sama antardaerah dalam pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan;
b. Mendorong revitalisasi pasar tradisional yang terintegrasi berbasis digital;
c. Pengembangan kawasan pertumbuhan pada simpul-simpul transportasi.

3. Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan

a. Mendorong keterpaduan pengembangan permukiman perkotaan Kota Pekalongan dan kabupaten di sekitarnya diantaranya melalui optimalisasi persebaran dan pertumbuhan kawasan PKW dan PKL yang persebarannya cukup merata untuk mengurangi ketimpangan wilayah;
b. Mendorong kerja sama antardaerah dalam hal:
    1) koordinasi dan pengelolaan pengembangan kawasan permukiman di perbatasan kabupaten/kota;
    2) penyediaan prasarana dan sarana di bidang transportasi, air minum, persampahan, drainase, dan pengelolaan limbah;
    3) penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Pekalongan dengan kabupaten lain yang berbatasan;
    4) penanganan bencana dan kawasan terdampak rob;
c. Mendorong pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir yang mengalami penurunan tanah dan peningkatan banjir rob serta peningkatan pengamanan pesisir utara Petanglong secara berkelanjutan;
d. Mendorong pengembangan dan penyelesaian sistem pengendali banjir di Pekalongan;
e. Mendorong rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir;
f. Mendorong dan memfasilitasi upaya peningkatan pengelolaan limbah industri/kerajinan batik;
g. Mendorong dan memfasilitasi perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya;
h. Mendorong pembangunan waduk sumber air baku SPAM Regional Petanglong;
i. Pengembangan SPAM Regional Petanglong;

j. Mendorong dan fasilitasi rencana pembangunan TPST Regional Petanglong, serta pengelolaan SPAM, SPAL, dan persampahan berbasis masyarakat;
k. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa;
l. Rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan untuk pemulihan kapasitas daya dukung DAS khususnya di *catchment area*, terutama pada DAS Comal, DAS Sragi, DAS Sengkarang dan DAS Kupang;
m. Mendorong sinergi dan kolaborasi para pihak dalam pengelolaan maupun pemulihan area bernilai keanekaragaman hayati dan/atau jasa ekosistem tinggi;
n. Mendorong pemanfaatan sumber daya hayati (bioprospeksi) dan jasa ekosistem secara adil serta berkelanjutan;
o. Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi pegunungan Dieng dan rehabilitasi kawasan pesisir utara (Ujungnegoro);
p. Mendorong peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana salah satunya dengan penuntasan penanganan jalan evakuasi;
q. Mendorong pembangunan pipa gas bumi Cirebon–Semarang;
r. Mendorong transformasi sektor energi melalui pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan, penerapan jaringan cerdas (*smart grid*), adopsi teknologi penyimpanan energi, pemanfaatan *Internet of Things* (IoT) untuk pemantauan *real-time*, serta perluasan penggunaan kendaraan listrik guna meningkatkan efisiensi, keterhubungan, dan keberlanjutan pasokan energi.

Dengan rencana program unggulan dan program strategis yang akan dilaksanakan tersebut diharapkan WP Petanglong akan mencapai target indikator kinerja makro dalam lima tahun sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.10.
Target Kinerja Makro WP Petanglong

Tahun	Kabupaten/Kota					
	Batang	Pekalongan	Kota Pekalongan	Batang	Pekalongan	Kota Pekalongan
	Tingkat Pengangguran Terbuka			Tingkat Kemiskinan		
2026	5,54-5,10	3,05-2,75	4,91-4,40	8,30-8,21	8,09-7,98	6,50-6,14
2027	5,41-5,11	2,98-2,68	4,63-4,33	7,55-7,44	8,28-7,20	6,06-5,64
2028	5,38-5,08	2,93-2,63	4,56-4,26	7,15-7,03	7,84-6,80	5,74-5,33
2029	5,28-4,98	2,88-2,58	4,49-4,19	6,75-6,62	7,41-6,40	5,42-5,02
2030	5,15-4,85	2,83-2,53	4,42-4,12	6,36-6,20	6,97-6,00	5,10-4,70
	Indeks Pembangunan Manusia			Pertumbuhan Ekonomi		
2026	71,20	73,00	78,21	6,35-6,50	5,30-6,00	5,70-6,20
2027	71,79	73,61	78,62	7,30-7,87	6,10-6,97	6,20-7,20
2028	72,37	74,21	79,03	7,70-8,23	6,60-7,60	6,70-7,70
2029	72,96	74,82	79,44	7,80-8,20	7,00-8,00	7,10-8,10
2030	73,54	75,43	79,85	7,90-8,40	7,40-8,40	7,60-8,36

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah (Hasil Analisis), 2025

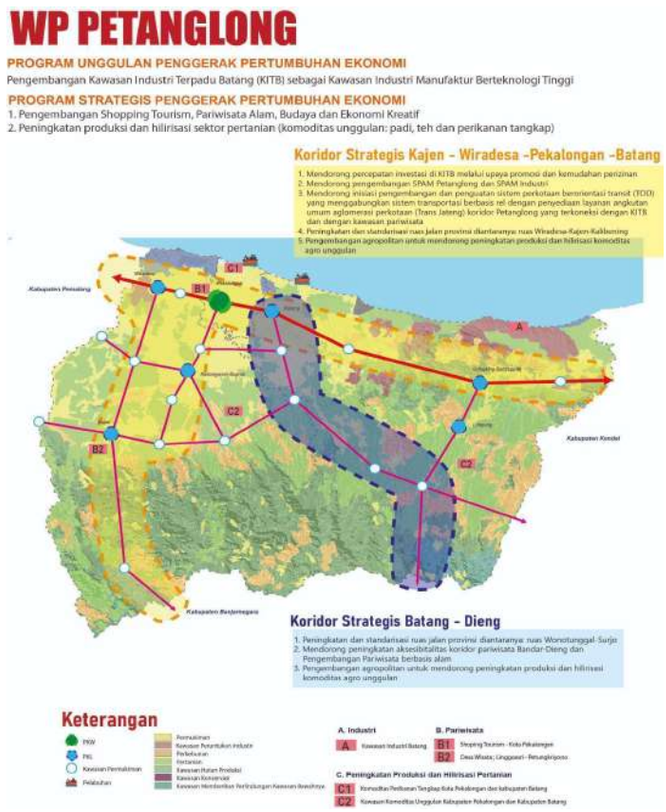

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah (Hasil Analisis), 2025

Gambar 4.11.
Arahan Kebijakan WP Petanglong

4.2.10. WP Bregasmalang

Dalam mengimplementasikan episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Bregasmalang berikut adalah indikasi kebutuhan rencana **program unggulan dan program strategis** selama lima tahun kedepan yang merupakan lintas kewenangan sebagai berikut.

1. **Peningkatan Produksi Dan Hilirisasi Sektor Pertanian (komoditas unggulan: padi, bawang merah, cabai, nanas, kerbau, domba, itik, ayam buras, garam, serta perikanan budidaya dan tangkap)**
   a. Peningkatan produksi pertanian (dalam arti luas), melalui:
      1) Upaya mendorong pengendalian alih fungsi lahan pertanian serta pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan melalui kebijakan penataan ruang perlindungan lahan pertanian serta pelaksanaan reforma agraria dengan penataan aset dan akses;
      2) Upaya mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas jalur distribusi pertanian yang didominasi ruas jalan kabupaten dan desa;
      3) Upaya mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam peningkatan hasil panen melalui implementasi Riset Inovasi Teknologi (RIT) di sektor pertanian;
      4) Upaya mendorong peningkatan perikanan tangkap melalui pelatihan bagi nelayan agar lebih kompeten dalam memanfaatkan teknologi tanpa merusak ekosistem laut;
      5) Upaya mendorong peningkatan pengelolaan, penyediaan, dan pengembangan prasarana sarana pertanian;
      6) Upaya mendorong peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi) dan pengembangan kawasan peternakan;

7) Peningkatan sistem jaringan irigasi kewenangan provinsi, diantaranya rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Beji-Brebes, Mejagong-Pemalang;
8) Upaya mendorong rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain di DI Waduk Malahayu, DI Kumisik, DI Pemali Bawah, DI Cacaban, DI Cipero, DI Gung, DI Sungapan;
9) Peningkatan pasokan sumber air baku pertanian, diantaranya mendorong pembangunan Waduk Bantarkawung (Pemali) Kabupaten Brebes;
10) Pengendalian banjir sistem Sungai Cisanggarung, Sungai Tanjung, Sungai Kabuyutan, Sungai Babakan dan Sungai Kluwut Kabupaten Brebes;
11) Upaya mendorong penanganan abrasi Pantai Losari–Brebes;
12) Fasilitasi prasarana dan sarana pertanian (alsintan) di daerah potensi produksi pertanian;
13) Upaya mendorong penyediaan benih/bibit berkualitas;
14) Upaya mendorong penjaminan kualitas pakan ternak;
15) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
16) Pengembangan pelabuhan perikanan;
17) Upaya mendorong pengembangan budidaya rumput laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir tambak dalam budidaya nila salin;

b. Hilirisasi pertanian (dalam arti luas), melalui:
1) Upaya mendorong pengembangan industri pengolah hasil pertanian, kehutanan, perikanan dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam;
2) Penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian; penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan; pemasaran dan *branding* produk; pada sektor perikanan melalui pelatihan diversifikasi produk olahan hasil perikanan; serta fasilitasi kemasan produk dan jejaring pemasaran hasil perikanan;
3) Pengembangan prasarana dan sarana pelabuhan perikanan, *cold storage* dan sentra produksi perikanan untuk meningkatkan pengelolaan hasil laut lebih efisien dan berkelanjutan;
4) Peningkatan promosi produk industri agro melalui fasilitasi pameran.

2. Pengembangan Klaster Industri Kecil dan Menengah Brebes-Tegal-Pemalang (gula, pengolahan ikan, barang anyaman dari bambu dan rotan)

a. Mendorong percepatan investasi klaster industri Brebes-Tegal-Pemalang melalui upaya promosi dan kemudahan perizinan;
b. Mendorong penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan Dunia Usaha;
c. Menyiapkan sistem pendidikan menengah untuk menciptakan kesesuaian pendidikan prakerja dengan membangun *link and match* SMK/SMA sederajat dengan dunia industri;
d. Pengembangan pengelolaan kawasan industri berbasis lingkungan;
e. Mendorong pemenuhan RTH klaster kawasan industri;

f. Mendorong revitalisasi dan optimalisasi Pelabuhan Pengumpul Tegal sebagai pelabuhan umum;
g. Mendorong pengembangan ekspor produk unggulan;
h. Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi SNI dan merek.

3. Pengembangan *Integrated Ecotourism* Sabuk Gunung Slamet (Guci-Kaligua)

a. Peningkatan aksesibilitas, konektivitas, kelancaran dan keselamatan serta integrasi antarmoda jaringan dan simpul transportasi yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata, melalui:
   1) Penanganan jalan provinsi pendukung akses wisata Guci (Morongso-Tuwel);
   2) Penyediaan perlengkapan jalan ruas Randudongkal–Jatinegara;
   3) Mendorong peningkatan aksesibilitas (jalan kabupaten) menuju pariwisata Guci dan Kaligua;
   4) Mendorong peningkatan frekuensi layanan angkutan umum massal berbasis rel kereta api (fasilitasi peningkatan layanan KA Komuter Kaligung dan Kereta Api Regional Joglosemarkerto);
   5) Peningkatan kondisi dan kinerja serta optimalisasi terminal tipe B sebagai simpul perekonomian di Terminal Bumiayu Kabupaten Brebes;
b. Peningkatan daya saing sektor pariwisata untuk menarik lebih banyak wisatawan mancanegara dan nusantara, melalui:
   1) Upaya mendorong kerja sama antardaerah dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata;
   2) Upaya mendorong pengembangan desa/kampung wisata baru, serta daya tarik dan even wisata;
   3) Upaya mendorong kerja sama antar*stakeholder* untuk pengembangan pariwisata Sabuk Gunung Slamet (Guci-Kaligua);
   4) Penguatan SDM pariwisata berkualitas melalui pelatihan dan pembinaan serta pendidikan kejuruan (SMK) mendukung pengembangan pariwisata yang berdaya saing;
   5) Upaya mendorong pengembangan produk lokal UMKM dan industri kecil menengah mendukung pariwisata;
   6) Fasilitasi pengembangan pariwisata berbasis alam terutama pantai dan dataran tinggi dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan;
   7) Fasilitasi pengembangan dan penyelenggaraan even kebudayaan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi antara lain pekan kebudayaan daerah, festival budaya pantura, Tegal Pesisir Karnival, karawitan, kirab budaya dan sebagainya;
   8) Upaya mendorong promosi budaya lokal melalui kegiatan pameran budaya internasional melalui kerja sama dengan diaspora untuk budaya lokal di level global;
   9) Pendampingan dalam penetapan *Geoheritage* Bumiayu;
   10) Upaya mendorong peningkatan Pengembangan Kawasan Perdesaan (PKP) yang berbasis potensi pariwisata yang didukung oleh sektor pertanian, perkebunan, dan industri kecil dan menengah, serta mendorong pembentukan PKP baru sebagai pusat pertumbuhan perdesaan.

Selain indikasi kebutuhan rencana program implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru dimaksud, terdapat beberapa indikasi rencana program kewilayahan selama lima tahun kedepan yang juga merupakan lintas kewenangan di WP Bregasmalang, antara lain sebagai berikut.

1. **Lingkup Sosial dan Kependudukan**
   a. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni, fasilitasi rumah susun untuk MBR bekerja sama dengan BUMN, BUMD dan swasta, serta program jambanisasi;
   b. Mendorong sekolah inklusif;
   c. Pengembangan SMK Unggulan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pasar/industri, melalui penyesuaian kurikulum, peningkatan kompetensi guru, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan lulusan yang kompeten dan siap kerja;
   d. Mendorong peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi yang menyasar kelompok usia sekolah, usia produktif, dan lanjut usia (lansia) sejalan dengan pembudayaan hidup sehat serta perlu diperkuat dengan penekanan pada pengendalian faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM), khususnya melalui pengendalian konsumsi produk hasil tembakau serta pangan tinggi garam, gula, dan lemak; upaya promotif preventif ini harus didukung oleh program penyehatan lingkungan yang efektif; sedangkan dalam rangka penuntasan *stunting* diarahkan pada aspek pencegahan untuk memastikan anak yang sehat tidak menjadi *stunting*;
   e. Pemberian Makan Bergizi Gratis untuk pemenuhan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa, dan santri termasuk penguatan ekosistem pendukung;
   f. Mendorong dan memfasilitasi pembentukan rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas serta mendorong sekolah inklusif di tingkat kecamatan.
2. **Lingkup Perekonomian**
   a. Mendorong kerja sama antardaerah dalam pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan;
   b. Penguatan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) untuk mendorong pengembangan UMKM/ industri kecil menengah dan sektor pariwisata;
   c. Mendorong peningkatan perikanan tangkap melalui pelatihan bagi nelayan agar lebih kompeten dalam memanfaatkan teknologi tanpa merusak ekosistem laut.
3. **Lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan**
   a. Memperpadukan pengembangan permukiman perkotaan Kota Tegal dan kabupaten di sekitarnya;
   b. Mendorong kerja sama antardaerah dalam hal:
      1) koordinasi dan pengelolaan pengembangan kawasan permukiman di perbatasan kabupaten/kota;
      2) penyediaan prasarana dan sarana di bidang transportasi, air minum, persampahan, drainase, dan pengelolaan limbah;
      3) penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota Tegal dengan kabupaten lain yang berbatasan;
      4) penanganan bencana dan kawasan terdampak rob;

c. Mendorong keterpaduan pembangunan wilayah perbatasan Kabupaten Brebes dengan Provinsi Jawa Barat;
d. Pengembangan SPAM Regional Bregas;
e. Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di kawasan perkotaan maupun wilayah desa;
f. Mendorong dan memfasilitasi penanganan/penataan permukiman pada kawasan kumuh secara terpadu;
g. Rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan untuk pemulihan kapasitas daya dukung DAS khususnya di *catchment area*, terutama pada DAS Pemali, dan DAS Comal;
h. Mendorong sinergi dan kolaborasi para pihak dalam pengelolaan maupun pemulihan area bernilai keanekaragaman hayati dan/atau jasa ekosistem tinggi khususnya di wilayah Gunung Slamet;
i. Mendorong pemanfaatan sumber daya hayati (bioprospeksi) dan jasa ekosistem secara adil serta berkelanjutan;
j. Rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir;
k. Mendorong dan fasilitasi pengelolaan SPAM, SPAL, dan persampahan berbasis masyarakat;
l. Mendorong pengelolaan sampah berbasis wilayah yang berkelanjutan;
m. Mendorong pembangunan pipa gas bumi Cirebon–Semarang;
n. Mendorong transformasi sektor energi melalui pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan, penerapan jaringan cerdas (*smart grid*), adopsi teknologi penyimpanan energi, pemanfaatan *Internet of Things* (IoT) untuk pemantauan *real-time*, serta perluasan penggunaan kendaraan listrik guna meningkatkan efisiensi, keterhubungan, dan keberlanjutan pasokan energi.

Dengan rencana program unggulan dan program strategis yang akan dilaksanakan tersebut diharapkan WP Bregasmalang akan mencapai target indikator kinerja makro dalam lima tahun sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4.11.
Target Kinerja Makro WP Bregasmalang

Tahun	Kabupaten/Kota			
	Pemalang	**Tegal**	**Brebes**	**Kota Tegal**
	Tingkat Pengangguran Terbuka			
2026	6,33-6,04	7,41-7,11	8,16-7,97	5,73-5,43
2027	6,05-5,75	7,32-7,02	7,96-7,66	5,62-5,32
2028	5,76-5,46	7,20-6,90	7,77-7,47	5,51-5,21
2029	5,61-5,31	7,09-6,79	7,58-7,28	5,41-5,11
2030	5,47-5,17	6,88-6,58	7,38-7,08	5,30-5,00
	Indeks Pembangunan Manusia			
2026	70,13	72,37	71,13	78,25
2027	70,90	72,91	72,09	78,84
2028	71,67	73,45	73,06	79,44
2029	72,43	74,00	74,02	80,03
2030	73,20	74,54	74,99	80,62
	Tingkat Kemiskinan			
2026	13,90-13,22	6,62-6,05	14,41-13,78	7,32-6,91
2027	12,94-12,28	6,06-5,76	12,98-12,56	6,37-5,96
2028	12,26-11,59	5,74-5,44	12,29-11,87	6,33-5,91

Tahun	Kabupaten/Kota			
	Pemalang	Tegal	Brebes	Kota Tegal
2029	11,57-10,91	5,43-5,12	11,61-11,17	6,28-5,89
2030	10,89-10,23	5,11-4,80	10,93-10,47	6,22-5,83
	Pertumbuhan Ekonomi			
2026	5,21-6,00	5,62-6,42	5,60-6,40	5,53-6,50
2027	6,60-6,99	6,10-7,10	6,40-7,13	6,50-7,50
2028	7,10-7,57	6,50-7,50	6,90-7,58	6,90-7,90
2029	7,50-7,96	6,90-7,90	7,40-8,01	7,30-8,30
2030	7,80-8,29	7,30-8,10	7,90-8,49	7,70-8,50

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah (Hasil Analisis), 2025

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah (Hasil Analisis), 2025

Gambar 4.12.
Arahan Kebijakan WP Bregasmalang

BAB V
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

5.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di Jawa Tengah tahun 2025–2029 didukung dengan program perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025–2029. Rencana program perangkat daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, dimana rencana tahun 2030 menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2026-2030 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

A. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada peningkatan daya tampung SMA-SMK-SLB, bantuan pembiayaan pendidikan dan penyediaan perlengkapan bagi siswa miskin SMA-SMK-SLB, penyediaan sarana mobilitas bagi siswa SLB, peningkatan prasarana sarana pendidikan, pengembangan potensi siswa SMA-SMK-SLB, penyediaan layanan pencegahan dan penanganan kekerasan dalam satuan pendidikan SMA-SMK-SLB, pemanfaatan *platform* pendidikan untuk digitalisasi pendidikan, peningkatan sertifikasi kompetensi guru dan tenaga kependidikan SMA-SMK-SLB, peningkatan manajemen pengelolaan SMA-SMK-SLB, peningkatan kompetensi guru berlisensi industri serta peningkatan kualitas pembelajaran selaras DUDI dan berbasis *Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics* (STEAM).

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada pengembangan kurikulum adaptif berbasis karakter, *soft skill* dan potensi lokal melalui penyusunan dan implementasi kurikulum muatan lokal pilihan.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada distribusi pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan berbasis data dan analisis dalam bentuk rekomendasi teknis.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan dan primer sesuai standar; deteksi dini bagi ibu hamil, bayi baru lahir, usia remaja, usia produktif dan lansia; peningkatan posyandu siklus hidup yang aktif; pemberian PMT bagi balita *wasting, underweight, stunting* dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK); pemberian suplemen bagi ibu hamil anemia dan lansia; peningkatan implementasi kesehatan kerja di sektor formal dan informal; pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi balita, anak usia sekolah, usia dewasa dan lansia; deteksi dini penyakit tidak menular prioritas (hipertensi, *diabetus melitus*, kanker); skrining narkoba untuk pengemudi, anak sekolah, dan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; peningkatan penemuan dan pengobatan penyakit menular (TB, HIV, Malaria); pengawasan kualitas air dan udara; peningkatan implementasi STBM (Sanitasi Total Berbasis Mayarakat) 5 pilar; pengadaan obat, BHP, BMHP di RSUD/RSJD dan UPT milik Dinas Kesehatan; pengintegrasian sistem kesehatan nasional; peningkatan balkesmas menjadi rumah sakit tipe D; peningkatan mutu BALABKES PAK menjadi BALABKESMAS Tingkat III; peningkatan cakupan imunisasi lengkap 14 antigen dan imunisasi rutin lengkap; peningkatan cakupan kepesertaan aktif jaminan pembiayaan kesehatan; penguatan kluster kesehatan dalam penanggulangan dampak krisis kesehatan dan penanganan gizi saat bencana, serta pengembangan sarana dan prasarana di RSUD/RSJD dan UPT milik Dinas Kesehatan.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan, peningkatan kemitraan dengan perguruan tinggi untuk penanganan kesehatan prioritas dan penguatan implementasi perencanaan kebutuhan dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada peningkatan akses, kemandirian dan mutu kefarmasian serta alat kesehatan; serta pembinaan pengawasan industri farmasi.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; memperkuat jejaring kemitraan dan peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesehatan, serta pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka promotif preventif serta pelaksanaan program pemeriksaan spesialis keliling (spelling) di masyarakat.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada pembangunan dan rehabilitasi prasarana sarana Sumber Daya Air (SDA) kewenangan provinsi; normalisasi/restorasi sungai kewenangan provinsi; operasi dan pemeliharaan prasarana sarana SDA kewenangan provinsi; penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi prasarana sarana SDA, evaluasi dan rekomendasi teknis (rekomtek) pemanfaatan SDA, pola dan rencana pengelolaan SDA; pengelolaan hidrologi dan kualitas air; peningkatan *Flood Forecasting And Warning System (FFWS)*; koordinasi, sinkronisasi, peningkatan kapasitas, pembinaan serta pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA; serta pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi berbasis partisipatif dengan didukung inisiasi modernisasi irigasi.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada inisiasi, pembangunan dan pengembangan SPAM regional (lintas kabupaten/kota); pembangunan SPAM perdesaan; pembangunan SPAM desalinasi; dan peningkatan kapasitas pengelolaan SPAM di kabupaten/kota.

c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini diarahkan pada fasilitasi pembangunan TPST regional (lintas kabupaten/kota) dan pembangunan prasarana sarana pengelolaan sampah di kabupaten/kota.

d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada penyediaan prasarana sarana Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) skala regional (lintas kabupaten/kota); pembangunan prasarana sarana SPALD-S komunal; dan peningkatan kapasitas pengelolaan prasarana sarana sanitasi berbasis masyarakat di kabupaten/kota.

e. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah; bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara untuk kepentingan strategis provinsi; dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung negara.

f. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan jalan provinsi meliputi peningkatan jalan menuju lebar 7 (tujuh) meter dengan MST 8 ton, rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, dan penggantian jembatan terutama pada koridor strategis pendukung konektivitas antar wilayah di antaranya pada koridor Sabuk Gunung Sumbing Wonosobo - Banjarnegara, Pemalang - Banyumas, Brebes - Tegal, Pemalang - Batang, Semarang - Purwodadi, Rembang - Blora; serta antisipasi dan penanganan kerusakan akibat bencana pada ruas-ruas di daerah rawan bencana; pemeliharaan rutin, pembangunan talud dan drainase jalan terutama pada lokasi rawan longsor dan banjir; penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengembangan jalan; pengawasan

pelebaran jalan menuju standar; serta pengadaan tanah untuk jalan dan jembatan.

g. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi melalui pembinaan, peningkatan kapasitas kelembagaan jasa konstruksi, dan pelatihan tenaga ahli konstruksi; serta penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi dan peningkatan pelayanan informasi konstruksi.

h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada penyusunan kajian kewilayahan, kawasan strategis provinsi, dan tematik, fasilitasi penyusunan rencana tata ruang kabupaten/ kota, Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KPPR), serta pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas urusan perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada upaya pemberian stimulan bantuan untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) dalam rangka pencapaian 1 KK 1 rumah layak huni, pemberian stimulan bantuan untuk pembangunan baru (PB), peningkatan kualitas (PK) rumah masyarakat terdampak bencana utamanya penyediaan rumah adaptif banjir di pesisir utara, bantuan pembangunan baru rumah sederhana layak huni utamanya bagi masyarakat miskin (PB *backlog*), bantuan pembangunan rumah sederhana sehat relokasi program pemerintah provinsi, serta fasilitasi penyediaan rumah susun.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan, pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman kumuh, serta penataan permukiman di kawasan pesisir.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan prasarana sarana permukiman, dan penyusunan dokumen pembangunan prasarana sarana utilitas umum perumahan.

d. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam upaya mewujudkan optimalnya perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan lingkup perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan melalui penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan data, penyusunan kebijakan dan strategi serta upaya pembinaan dan pengendalian program.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penegakan produk hukum daerah, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan satgas linmas.

b. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada pada peningkatan kapasitas masyarakat di daerah rawan bencana melalui desa/kelurahan tangguh bencana (destana), pemasangan sistem peringatan dini (*Early Warning System*/EWS) dan rambu jalur evakuasi di daerah rawan bencana, pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), pembentukan Unit Layanan Inklusi Disabilitas (Unit LIDi), penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), penyusunan rencana kontijensi (renkon); penanganan darurat dan pemenuhan logistik penyelamatan korban bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; penghitungan kajian kebutuhan pasca bencana (Jitupasna), serta Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P).

c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada penyediaan informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran serta meningkatkan pembinaan terkait pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran.

6. Sosial

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS), dan koordinasi/sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah, serta pengumpulan uang atau barang lintas kabupaten/kota.

b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota asal.

c. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar/pemenuhan kebutuhan dasar dalam panti untuk penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta fasilitasi rujukan penanganan HIV/AIDS secara berjenjang.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, serta penyaluran bantuan sosial Kartu Jateng Ngopeni dan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE).

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada penyediaan logistik pada masa tanggap darurat bagi korban bencana alam/sosial (pengungsi), penyediaan tempat penampungan, penanganan khusus bagi kelompok rentan, serta layanan psikososial.

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial, serta pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan taman makam pahlawan nasional provinsi.

B. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja, termasuk memfasilitasi kabupaten/kota dalam penyusunan rencana tenaga kerja.

b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri (kejuruan las, listrik, otomotif, bangunan dan mesin), pelatihan kerja di bidang pertanian (kejuruan pertanian, perikanan, peternakan, dan pengolahan hasil pertanian), Pelatihan *housekeeping, tour guide, waiters*, barista, pelatihan SSW (*Specified Skilled Worker*), pemagangan dalam dan luar negeri, uji kompetensi, pelatihan *digital marketing*, konsultansi produktivitas pada perusahaan menengah, pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada pengelolaan informasi pasar kerja melalui bursa kerja *online e-makaryo*, pelayanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota berupa orientasi pra pemberangkatan calon tenaga kerja antar kerja antar daerah (TK AKAD); penyebarluasan informasi peluang, mekanisme dan prosedur kerja; *job canvassing*, perluasan kesempatan kerja melalui program padat karya produktif; peningkatan kapasitas wirausaha baru binaan; pemberdayaan tenaga kerja mandiri, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik pra maupun purna penempatan di daerah provinsi, penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan dan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi.

d. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah provinsi melalui pembinaan pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, peningkatan kapasitas serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan kelembagaan hubungan industrial, dan koordinasi dan konsolidasi hubungan industrial; penetapan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK), serta peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja. Selain itu, juga diarahkan pada pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota melalui

pengesahan peraturan perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja bersama terkait hubungan industrial dan penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan melalui pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan, penegakan hukum ketenagakerjaan di perusahaan, dan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan provinsi; dan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan provinsi.

b. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota; serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada advokasi kebijakan dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak; serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak.

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha; serta penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup provinsi dan lintas kabupaten/kota; serta penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi anak korban kekerasan.

3. Pangan

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan, pengelolaan cadangan pangan pemerintah, pengembangan pangan lokal, serta promosi penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA).

b. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan ketidakcukupan konsumsi pangan pada daerah rawan pangan dan penanggulangan *stunting* pada daerah prioritas *stunting*, serta implementasi pengelolaan dan pencegahan pemborosan pangan *(food loss and waste)*.

c. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi keamanan pangan, penyediaan dan kalibrasi alat uji keamanan mutu pangan.

4. Pertanahan

Rencana program prioritas urusan pertanahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Program ini diarahkan pada fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui penetapan lokasi.

b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

c. Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee

Program ini diarahkan pada fasilitasi pelaksanaan reforma agraria oleh Gugus Tugas Reforma Agraria.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup seperti penyusunan dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD), Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) provinsi, Evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) provinsi, serta fasilitasi dan validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/kota.

b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada pengendalian dan pencemaran kualitas air dan udara melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambien, pembangunan IPAL UMKM, serta dalam rangka penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon dan peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim.

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini diarahkan pada pengelolaan keanekaragaman hayati melalui pengelolaan Ruang Terbuka Hijau/RTH, peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan pengelolaan Kebun Raya Baturraden.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan pengelolaan limbah B3.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan melalui peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, serta fasilitasi penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan/UKL-UPL, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup/DELH, Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup/DPLH, dan dokumen lingkungan lainnya).

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan lingkungan serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan termasuk juga penguatan program sekolah adiwiyata, peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat dan peningkatan kapasitas penyuluh lingkungan hidup.

g. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

h. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada penyediaan prasarana dan sarana persampahan dan pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Regional, koordinasi pengelolaan sampah, gerakan desa mandiri sampah, serta fasilitasi sarana prasarana pengelolaan sampah kepada kelompok masyarakat.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk di kabupaten/kota melalui bimtek peningkatan kapasitas aparatur pendaftaran penduduk, rapat koordinasi admindukcapil, sosialisasi kebijakan admindukcapil, penyediaan portal pelayanan *online* admindukcapil kabupaten/kota, *monitoring* ketersediaan blanko KTP-el di kabupaten/kota, dan upaya peningkatan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil di kabupaten/kota antara lain melalui bimtek aparatur pencatatan sipil, rapat koordinasi pencatatan sipil, dan sosialisasi kebijakan pencatatan sipil yang diantaranya adalah cakupan kepemilikan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, dan dokumen pencatatan sipil lainnya

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam koordinasi, pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan di kabupaten/kota, dan penyajian data kependudukan berskala provinsi melalui peningkatan aparatur dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan, peningkatan kualitas pelayanan adminduk dan pemanfaatan data, promosi pemanfaatan data kependudukan dan dukungan teknis kerusakan *server* di kabupaten/kota.

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini diarahkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi provinsi dalam mengelola data kependudukan dalam rangka memudahkan pengelolaan data kependudukan secara efisien, memastikan validitas data, serta menggunakan data kependudukan secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan oleh pemerintah maupun pihak terkait lainnya.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui kegiatan fasilitasi penatausahaan penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa dan desa adat, serta fasilitasi terhadap usulan penataan desa.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini diarahkan pada inventarisasi data kerja sama desa, inventarisasi data kawasan perdesaan, fasilitasi kerjasama antar desa melalui fasilitasi kerjasama desa dan pengembangan kawasan perdesaan, serta fasilitasi kerjasama antar kawasan perdesaan di Jawa Tengah.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembaharuan data profil desa/kelurahan, penguatan manajemen pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga desa, fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa, fasilitasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa, fasilitasi penetapan batas desa, melakukan pembinaan pelaksanaan pilkades serentak, monitoring perkembangan desa, fasilitasi penyusunan produk hukum desa, fasilitasi penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta fasilitasi penguatan kapasitas lembaga kerjasama ekonomi antar desa.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, penguatan sinergi peran pendamping masyarakat antar sektor, serta pengembangan BUMDes dan penguatan lembaga ekonomi masyarakat di desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi pengendalian penduduk dan keluarga berencana; pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan layanan dan pembinaan kesertaan KB.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada pengelolaan pelaksanaan program pembangunan keluarga; serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi.

9. Perhubungan

Rencana program prioritas urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi berupa operasionalisasi dan pengembangan Trans Jateng meliputi keberlanjutan operasionalisasi 7 koridor Trans Jateng eksisting, peningkatan integrasi jaringan konektivitas Trans Jateng dengan "Trans Kabupaten/Kota" dan moda transportasi lainnya, modernisasi layanan (peremajaan armada bus, sistem pemantauan operasional dan pembayaran secara digital serta halte/ruang tunggu penumpang), pengembangan kapasitas kelembagaan (PPK BLUD), peningkatan kerjasama pembiayaan (CSR BUMN/BUMD) dalam penyediaan sarana prasarana Trans Jateng, dan inisiasi rencana penyiapan koridor baru untuk mendukung pemerataan pembangunan dengan peningkatan peran dan keterlibatan kabupaten/kota) serta inisiasi rencana penyediaan layanan Trans Jateng "*Executive*"; kegiatan pengelolaan terminal penumpang Tipe B berupa penyelesaian pembangunan (Terminal Kutoarjo Kabupaten Purworejo) dan peningkatan terminal (diprioritaskan pada Terminal Tawangmangu, Sukoharjo, Penggaron, Purbalingga, Banyuputih, Madureso, dan Bumiayu); kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi utamanya berupa pemenuhan fasilitas keselamatan melalui pengadaan dan pemasangan LPJU dan perlengkapan jalan lainnya (APILL, RPPJ, rambu, dan *warning light*) di jalan provinsi diprioritaskan pada ruas pendukung sentra produksi pertanian, pariwisata (*Geopark*, Borobudur, Dieng, Tawangmangu dan Sabuk Gunung Slamet), perindustrian dan kawasan perbatasan, serta pembangunan halte dan modernisasi/peningkatan ruang tunggu penumpang Trans Jateng yang dilengkapi *Public Transport Information System*/PTIS; kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi berupa Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK), pemasangan ZOSS SMA/SMK termasuk peningkatan pemahaman anak sekolah penggantian serta pemeliharaan lampu penerangan jalan umum (LPJU); dan kegiatan

penetapan rencana induk LLAJ provinsi berupa fasilitasi optimalisasi bandara sebagai generator aktivitas perekonomian nasional dan/atau global.

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi berupa pembangunan dermaga sungai (plengsengan) dan pengadaan/pemasangan lampu penerangan, rambu sungai, dan fasilitas keselamatan lainnya pada penyeberangan sungai lintas kabupaten/kota; pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional di pesisir utara (antisipasi pelimpahan aset), dan fasilitasi optimalisasi pelabuhan utama (pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas sebagai sentra ekonomi Jawa) dan pelabuhan pengumpul; penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, *tally* mandiri, dan depo peti kemas berupa penerbitan rekomendasi teknis ijin baru/perubahan perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan perairan.

c. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana induk perkeretaapian berupa pemasangan fasilitas keselamatan perlintasan kereta api serta fasilitasi pendorongan implementasi kebijakan pusat terkait pengembangan jaringan perkeretaapian di Jawa Tengah, utamanya mendorong reaktivasi jaringan jalan rel kereta api non aktif dan peningkatan kualitas dan jangkauan layanan kereta api komuter.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas urusan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas layanan informasi dan komunikasi publik melalui peningkatan perluasan informasi publik dengan melibatkan berbagai pihak dan komunitas di masyarakat; peningkatan kualitas dan kuantitas konten informasi publik yang disebarluaskan; penguatan relasi dan komunikasi aktif dengan berbagai media media dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi dan komunikasi publik; monitoring informasi kebijakan, opini dan aspirasi publik; serta peningkatan pengelolaan media komunikasi publik secara menyeluruh.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada upaya sinergi dan integrasi aplikasi melalui pengembangan aplikasi terintegrasi “Jateng Ngopeni”, pemakaian aplikasi berbagi pakai dan bimbingan pengembangan aplikasi yang terpadu untuk mendukung perwujudan *smart province*; peningkatan kualitas layanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi melalui layanan jaringan intra, penyediaan akses internet, peningkatan integrasi jaringan intra pemerintah daerah sampai ke kabupaten/kota; serta layanan pusat data Jawa Tengah (*data center*).

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana program prioritas urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pengurus/pengelola koperasi dalam hal tata kelola dan akuntabilitas baik koperasi simpan pinjam maupun koperasi sektor riil, serta pemeriksaan dan pengawasan koperasi dalam rangka peningkatan kepatuhan koperasi dan peningkatan kualitas pengelolaan koperasi dalam aspek koperasi bagi koperasi simpan pinjam serta unit simpan pinjam di Jawa Tengah.

b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian pengurus/pengelola koperasi melalui pelatihan teknis, kompetensi, manajerial, dan berjenjang.

c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kelembagaan, perluasan akses pembiayaan, penguatan faktor produksi, serta pengembangan jaringan pemasaran dan kerjasama antar koperasi dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas koperasi.

d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha mikro kecil melalui layanan pendampingan usaha, kemitraan usaha, sertifikasi produk dan legalitas usaha, peningkatan literasi keuangan dalam perluasan akses pembiayaan serta penumbuhan jiwa wirausaha.

e. Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada penguatan kapasitas produksi melalui penerapan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas dan kapasitas produksi, peningkatan partisipasi UMKM dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah, serta pengembangan akses pemasaran bagi produk-produk unggulan daerah lewat berbagai promosi dan pameran.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas urusan penanaman modal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan kebijakan penanaman modal, penyusunan peta potensi dan peluang usaha yang berkualitas, dan dukungan kemudahan dan fasilitas untuk kemudahan berusaha.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan promosi peluang dan potensi di Jawa Tengah dengan dukungan strategi promosi yang menyesuaikan perkembangan dunia usaha, pengawalan kepeminatan berusaha hingga terjadi realisasi penanaman modal, dan memfasilitasi kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, pemantauan pemenuhan komitmen perizinan, fasilitasi penyelesaian pengaduan, serta peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana pelayanan.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan melakukan koordinasi dan sinkronisasi, pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pengembangan aplikasi sistem informasi, pengelolaan data dan informasi, serta publikasi data dan informasi penanaman modal.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan.

b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada peningkatan daya saing olahraga.

14. Statistik

Rencana program prioritas urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**, yang diarahkan pada perwujudan *big data* melalui penerapan portal data menuju layanan data terbuka, peningkatan wawasan dan kesepahaman antara pembina wali data dan produsen data dalam rangka perbaikan tatakelola statistik sektoral di instansi pemerintah, serta penyediaan data berbasis geospasial yang dapat dimanfaatkan untuk proses pembangunan daerah.

15. Persandian

Rencana program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah **Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**, yang diarahkan pada ketangguhan layanan keamanan informasi pemerintah daerah melalui asesmen aplikasi, digital forensik, pemantapan kinerja tim *Computer Security Response Team* (CSRT), dan layanan *penetration testing* sertifikasi elektronik, kontra penginderaan, dan *jamming*. Upaya peningkatan keamanan informasi melalui penerapan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi di Provinsi Jawa Tengah.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas urusan kebudayaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada pengembangan kebudayaan melalui pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan lembaga kebudayaan.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada pembinaan kesenian kepada masyarakat berupa fasilitasi ruang ekspresi budaya dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesenian.

c. Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan pada pelestarian sejarah lokal.

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada peningkatan pelindungan, pengelolaan dan pemanfaatan cagar budaya.

e. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan pada peningkatan tata kelola layanan permuseuman.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas urusan perpustakaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai SNP, serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas urusan kearsipan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) provinsi dan perangkat daerah, serta Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) kabupaten/kota, peningkatan kelestarian arsip sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB), peningkatan kualitas layanan kearsipan Provinsi Jawa Tengah

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan dan penyelamatan arsip.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana prasarana usaha ekonomi bagi masyarakat pesisir; pengelolaan kawasan konservasi melalui penenggelaman Terumbu Karang Buatan/TKB, penanaman bibit mangrove, serta cemara laut; dan fasilitasi teknologi usaha garam rakyat.

b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana penangkapan ikan ramah lingkungan dan teknologi penangkapan ikan; rehabilitasi/pembangunan fasilitas pokok atau penunjang atau fungsional Pelabuhan Perikanan Pantai;

koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan pelabuhan perikanan dan kenelayanan; peningkatan sarana prasarana pelayanan pelabuhan; inisiasi korporasi pelaku usaha perikanan; fasilitasi pemberdayaan usaha nelayan; peningkatan kapasitas nelayan dalam penanganan ikan di atas kapal; asuransi nelayan; dan gerai perijinan kapal perikanan.

c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi sarana prasarana budidaya ikan, pendampingan sertifikasi CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dan CPPIB (Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik); penebaran ikan di perairan umum; rehabilitasi sarana prasarana loka budidaya; dan penanganan hama penyakit ikan.

d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan operasi pengawasan penangkapan ikan, usaha budidaya perikanan, pelaku usaha pengolahan; dan pemberian stimulan usaha ekonomi bagi kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas).

e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan Angka Konsumsi Ikan di Jawa Tengah melalui Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) melalui kerja sama dengan *stakeholder*, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran dengan pendampingan rekomendasi SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan), rekomendasi SNI dan sertifikat hasil uji (CAT/*Certificate* of *Analysis*), diversifikasi produk hasil kelautan dan perikanan, penguatan promosi produk hasil kelautan dan perikanan melalui jejaring pemasaran dan fasilitasi *e-commerce*.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas urusan pariwisata yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan daya tarik wisata provinsi; kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; kegiatan penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pemasaran pariwisata ke dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis provinsi melalui penguatan promosi dan fasilitasi *event*.

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan sarana dan prasarana kab/kota kreatif; dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan; pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui antara lain pelatihan/bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pelaku ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Rencana program prioritas urusan pertanian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi produk pertanian potensial ekspor; pembentukan korporasi; subsidi suku bunga kredit; asuransi petani; pembentukan *food estate;* optimalisasi fungsi kartu tani sebagai *database* petani dan lahan; peningkatan ekonomi petani gurem dan buruh tani melalui pemanfaatan lahan bawah tegakan; revitalisasi kebun benih; penyediaan alsintan yang mendukung efisiensi usaha tani, dan peningkatan kapasitas *startup* wirausaha pertanian. Program ini juga diarahkan pada kegiatan peningkatan produksi ternak berkualitas, fasilitasi Cara Produksi Pakan yang Baik (CPPB), fasilitasi *Good Breeding Practices* (GBP), fasilitasi *Good Farming Practices* (GFP).

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, dan pendampingan petani tembakau. Program ini juga diarahkan pada kegiatan pemberian stimulan ternak untuk penanggulangan kemiskinan, fasilitasi alat dan mesin pengolahan hasil produk ternak, dan fasilitasi inovasi peternakan.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), pengawasan obat hewan dan keamanan produk hewan, serta fasilitasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman/OPT tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura; pengawasan mutu, penyediaan, dan peredaran benih tanaman melalui perbanyakan benih padi dan revitalisasi kebun benih; serta perbanyakan/pengembangan benih buah-buahan dan sayuran.

e. Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan SDM penyuluh. Program ini juga diarahkan pada kegiatan pembentukan dan penguatan kelembagaan korporasi peternak, peningkatan kapasitas SDM peternak melalui sekolah usaha peternakan rakyat (SUPRA).

4. Kehutanan

Rencana program prioritas urusan kehutanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Hutan

Program ini diarahkan pada pelaksanaan reviu/penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi, penataan/registrasi hutan rakyat, pengolahan hasil hutan bukan kayu/HHBK dan jasa lingkungan; pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; pelaksanaan pengolahan hasil hutan dengan kapasitas produksi <6000 m^3/tahun; penyusunan RTnRL, pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis melalui pembangunan/ pengembangan hutan rakyat, penghijauan lingkungan, rehabilitasi ekosistem mangrove dan

pembuatan bangunan konservasi tanah dan air; penanganan kerusakan hutan dan kebakaran hutan dan lahan; perlindungan dan pengamanan hutan dan perbenihan tanaman hutan.

b. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan Taman Hutan Raya Mangkunegoro I, pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam melalui perencanaan dan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting, pendampingan masyarakat penyangga kawasan konservasi; inisiasi kawasan konservasi baru melalui peningkatan/perubahan fungsi kawasan hutan; perlindungan tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*appendix*) CITES melalui penanganan konflik satwa liar dan pengendalian pemanfaatan TSL, serta pengendalian kerusakan dan pemeliharaan ekosistem mangrove dan karst.

c. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Program ini diarahkan pada penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat berupa penguatan dan pendampingan kelompok tani hutan, penyiapan dan pengembangan usaha perhutanan sosial, serta penguatan pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS), monitoring dan evaluasi perhutanan sosial, Peningkatan kapasitas SDM kehutanan.

d. Program Pengolahan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program ini diarahkan pada pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan DAS dalam satu kabupaten/kota melalui peningkatan peran, partisipasi dan kapasitas masyarakat dan seluruh pihak terkait dalam pengelolaan DAS, gerakan rehabilitasi/pemulihan kapasitas daya dukung DAS, penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan DAS serta pengembangan kelembagaan pengelola DAS.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program prioritas urusan energi dan sumber daya mineral yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan konservasi air tanah melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian implementasi nilai perolehan air tanah untuk menjaga ketersediaan air tanah; kajian evaluasi zona konservasi pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi; mengidentifikasi zona pemanfaatan dan konservasi pada kawasan non CAT; sinergi dengan *stakeholder* lainnya dalam penegakan regulasi daerah terkait air tanah, dan monitoring terjadinya *land subsidence*/amblesan tanah; penyusunan studi kelayakan perizinan air tanah pada wilayah sungai dalam daerah provinsi; penyusunan regulasi pengelolaan air tanah di Jawa Tengah; pengembangan Sistem Aplikasi Geologi dan Air Tanah. Program ini juga ditujukan untuk mendukung terwujudnya kelestarian warisan geologi/*Geoheritage* di Jawa Tengah sebagai upaya perlindungan kawasan geologi melalui pelaksanaan jelajah *geopark/ geoheritage*, pendampingan dalam penetapan *Geoheritage*, peningkatan kapasitas pengelolaan *geopark* serta perkuatan mitra dan kolaboratif ke jaringan *geopark* global. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk

meningkatkan pelayanan informasi geologi dalam hal mitigasi bencana dan pengembangan wilayah, sehingga diharapkan dapat mengurangi risiko akibat dampak kejadian bencana geologi (*geological hazard*).

b. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

Program ini diarahkan pada peningkatan transformasi tata kelola kegiatan usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan menerapkan *good mining practice* melalui optimalisasi sinergi Tim Terpadu Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan MBLB di Jawa Tengah, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan, penyusunan persetujuan teknis izin usaha pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem layanan pertambangan minerba melalui *updating* sistem SILUP (Sistem Informasi Laporan Usaha Pertambangan), pemberian penghargaan *good mining practice* sebagai bentuk pembinaan dan apresiasi terhadap pelaku usaha pertambangan yang telah memenuhi kategori *good mining practice*, kegiatan penertiban PETI (Pertambangan Tanpa Izin) bersama aparat penegak hukum dan *stakeholder* terkait lainnya; serta peningkatan kompetensi SDM pada bidang pertambangan dengan melaksanakan bimbingan teknis kepada mahasiswa kebumian dan evaluasinya. Program ini juga diarahkan untuk terwujudnya keseimbangan neraca sumber daya mineral melalui kegiatan penyusunan dokumen neraca sumber daya mineral; pengawasan pelaksanaan harga patokan mineral bukan logam dan batuan; intensifikasi potensi opsen pajak mineral bukan logam dan batuan di Jawa Tengah, serta pelaksanaan rekonsiliasi data produksi di Jawa Tengah.

c. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Program ini diarahkan untuk mewujudkan konservasi energi dan transisi energi daerah dengan peningkatan desa mandiri energi melalui kegiatan pembangunan maupun pengembangan prasarana sarana EBT utamanya pengembangan biogas, hidro, gas rawa, dan tenaga surya; meningkatkan akses energi bagi masyarakat terutama EBT; monitoring tingkat pemanfaatan energi di Jawa Tengah melalui kegiatan evaluasi bauran energi; penyusunan regulasi daerah Rencana Umum Energi Daerah (RUED); meningkatkan edukasi dan peluang *green jobs* kepada masyarakat terhadap pemanfaatan energi alternatif dengan kegiatan pendamping energi; identifikasi Desa Mandiri Energi dengan pemberian penghargaan DME (Desa Mandiri Energi) sebagai bentuk apresiasi terhadap desa yang telah memenuhi kategori DME inisiatif, DME berkembang, dan DME mapan; dukungan terhadap Program Eco-Pesantren melalui pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan di pondok pesantren. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk mendorong upaya konservasi energi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada gedung pemerintah dan dunia usaha bersama *stakeholder* terkait, sosialisasi pelaksanaan konservasi energi serta pemberian penghargaan Hemat Energi dan Air (HEA) sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah kabupaten/kota, sekolah (SMA/SMK), dan sektor industri yang telah menerapkan perilaku budaya hemat energi dan air.

d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Program ini diarahkan untuk mewujudkan ketahanan energi daerah dengan meningkatkan kehandalan pasokan listrik dan meningkatkan konsumsi tenaga

listrik per kapita. Perwujudan ketahanan energi tersebut melalui pemerataan dan keterjangkauan akses energi listrik untuk masyarakat miskin yang belum berlistrik; evaluasi regulasi dan/atau kebijakan ketenagalistrikan daerah; serta sosialisasi penerapan gaya hidup dengan menggunakan peralatan berbasis listrik atau *electrifying lifestyle*. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk meningkatkan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) melalui kegiatan inspeksi keselamatan ketenagalistrikan; koordinasi K2 bersama *stakeholder* terkait di Jawa Tengah; pendampingan pemantauan pelaksanaan usaha ketenaga-listrikan, serta fasilitasi peningkatan kompetensi bagi tenaga teknis ketenagalistrikan dalam rangka mendukung K2 dan evaluasinya di Jawa Tengah.

6. Perdagangan

Rencana program prioritas urusan perdagangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan potensi ekspor melalui fasilitasi penerbitan dokumen pendukung ekspor yaitu SKA serta mendorong penertiban legalitas berusaha sektor perdagangan melalui penerbitan rekomendasi teknis untuk usaha perdagangan minuman beralkohol dan bahan berbahaya. Program ini diarahkan pada penerbitan surat keterangan asal (SKA) bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit SKA, pengendalian usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB) bagi distributor dan pengendalian usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini bertujuan untuk optimalisasi sarana-sarana perdagangan yang ada sehingga dapat meningkatkan efisiensi rantai perdagangan. Program ini diarahkan pada pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas melalui bimbingan teknik peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat, monitoring dan verifikasi pasar rakyat, sertifikasi SNI pasar rakyat, perluasan pemasaran produk UKM melalui *e-commerce*, fasilitasi pasar lelang komoditas agro secara *online* dan terpadu di daerah, dan kemitraan pemasaran komoditas agro, serta fasilitasi sertifikasi gudang Sistem Resi Gudang (SRG).

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan stok barang pokok penting (bapokting) yang beredar. Program ini diarahkan pada pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan melalui penyediaan informasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang pokok penting di Jawa Tengah, fasilitasi sembako murah, dan monitoring bahan penting, bahan berbahaya serta minuman beralkohol.

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diharapkan dapat memperluas pasar internasional produk-produk unggulan Jawa Tengah yang potensial ekspor. Program ini diarahkan pada

penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam provinsi dan penguatan ekspor Jawa Tengah dengan pemberdayaan sumber daya produk substitusi impor, *Export Coaching Program* (ECP), *Coaching Program For New Exporters* (CPNE), pemetaan potensi desa ekspor, perluasan jejaring promosi dan kerjasama, penilaian eksportir tangguh dan forum informasi pasar, serta *One On One Meeting* dengan Atase Perdagangan (Atdag)/*Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC).

e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepedulian serta keamanan bagi konsumen dan dapat membantu mengurai permasalahan yang mungkin terjadi antara konsumen dan pelaku usaha perdagangan. Program ini diarahkan pada pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pemberdayaan konsumen/edukasi konsumen, edukasi standarisasi industri dan fasilitasi bimbingan serta sertifikasi SNI/sistem manajemen mutu/lingkungan bagi pelaku usaha, fasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK dan kelembagaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM; pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengawasan barang beredar/jasa, pengawasan perizinan bidang perdagangan dan diseminasi kebijakan pengawasan barang wajib SNI dan ketentuan lainnya; dan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk di seluruh daerah kabupaten/kota melalui pengembangan layanan kalibrasi, pengujian dan sertifikasi.

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini diharapkan mampu meningkatkan citra sekaligus memperluas pasar dalam negeri untuk produk dalam negeri. Program ini diarahkan pada pelaksanaan promosi produk dalam negeri melalui fasilitasi promosi produk UKM/IKM dan pesona produk kriya Jawa Tengah.

7. Perindustrian

Rencana program prioritas urusan perindustrian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diharapkan mampu mendorong produktivitas sektor industri melalui pengembangan SDM, sarana prasarana dan perluasan pasar produk hasil industri. Program ini diarahkan pada penyusunan, penerapan, dan evaluasi rencana pembangunan industri provinsi melalui peningkatan SDM industri agro melalui pelatihan berkelanjutan, fasilitasi sarana produksi bagi kelompok industri, peningkatan pemasaran produk melalui pemasaran *online-offline* dan jejaring kemitraan, serta peningkatan mutu produk melalui pendampingan bagi IKM.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri melalui penumbuhan dan perluasan berusaha sektor industri. Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi melalui Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan

terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi dan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA).

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diharapkan dapat mendorong ketersediaan informasi industri yang lebih akurat dan akuntabel sehingga dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan yang lebih implementatif. Program ini diarahkan pada penyediaan informasi industri untuk Izin Usaha Industri/IUI, Izin Perluasan Usaha Industri/IPUI, Izin Usaha Kawasan Industri/IUKI, dan Izin Perluasan Kawasan Industri/IPKI kewenangan provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) melalui pengembangan sistem informasi daerah dan pendukung SIINas, klinik dan pelayanan SIINas, pengawasan dan pendampingan industri, serta kajian pada sektor industri.

8. Transmigrasi

Rencana program prioritas urusan transmigrasi yang akan dilaksanakan adalah **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**, yang diarahkan pada penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi melalui koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi antar pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Organisasi

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi, evaluasi dan penataan kelembagaan; fasilitasi penyusunan analisis jabatan; evaluasi jabatan dan analisis beban kerja; pengelolaan tata laksana pemerintahan; penyusunan standar kompetensi jabatan; fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan publik; pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi; serta manajemen akuntabilitas kinerja.

b. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerjasama antar pemerintah dengan memperluas jejaring internasional dan meningkatkan konektivitas global; fasilitasi kerjasama lembaga, badan usaha, dan swasta; pemetaan potensi kerjasama daerah baik didalam negeri maupun luar negeri; evaluasi pelaksanaan kerjasama; pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan termasuk fasilitasi dan koordinasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan kelurahan; fasilitasi penataan wilayah; fasilitasi pelaksanaan pemerintahan umum; fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD; serta evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

c. Program Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pembinaan mental spiritual dengan pengelolaan sarana prasarana spiritual, dan fasilitasi kelembagaan bina

spiritual; fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar melalui fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial; serta fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang urusan non pelayanan dasar.

d. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyusunan perundang-undangan melalui penataan produk hukum daerah agar sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan, dan fasilitasi bantuan hukum melalui kegiatan fasilitasi penyelesaian masalah hukum, penyelesaian masalah *Non Litigasi* dan HAM.

e. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada pada kegiatan kebijakan dan koordinasi perekonomian melalui fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan mikro, pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam, serta pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD.

f. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui pengelolaan strategi, fasilitasi pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; kegiatan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa; serta kegiatan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa melalui pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan, serta pendampingan dan konsultasi permasalahan pengadaan barang dan jasa.

g. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian APBD, APBN, dan wilayah; pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah meliputi analisis capaian kinerja pembangunan daerah; pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah; dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas pada unsur pendukung urusan pemerintahan sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**. Program ini diarahkan pada kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD, pelaksanaan dan pengawasan kode etik, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kapasitas DPRD, fasilitasi tugas pimpinan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerjasama daerah.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas pada unsur perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan pendanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, serta analisis data dan informasi bidang perencanaan pembangunan daerah.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keselarasan, kesesuaian, dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; keselarasan, kesesuaian, dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja lingkup bidang perekonomian dan SDA; keselarasan, kesesuaian, dan keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan. Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam), dan koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

2. Keuangan

Rencana program prioritas pada unsur keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada penyusunan dokumen evaluasi APBD kabupaten/kota, penyusunan dokumen belanja transfer dan belanja tidak terduga, penyusunan dokumen rencana anggaran daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pembinaan rencana anggaran kabupaten/kota, pembinaan implementasi sistem informasi pemerintah daerah kabupaten/kota dan perangkat daerah, penyusunan dokumen manajemen kas, pembinaan manajemen kas kabupaten/kota dan perangkat daerah, serta penyusunan dokumen laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan jumlah aset yang dimanfaatkan untuk menghasilkan PAD, pengamanan aset, peningkatan penyelesaian kasus/sengketa aset daerah, penyusunan laporan barang milik daerah tepat waktu, serta penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan pencapaian realisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak alat berat, opsen mineral bukan logam dan batuan (MBLB) serta retribusi daerah.

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas unsur kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah **Program Kepegawaian Daerah**, yang diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen ASN melalui upaya pemenuhan kebutuhan ASN sesuai dengan formasi, pemetaan dan peningkatan kompetensi ASN, pengisian jabatan ASN sesuai dengan manajemen talenta, peningkatan akurasi data dan kelengkapan dokumen ASN, peningkatan kedisiplinan dan kesejahteraan

ASN serta peningkatan kinerja ASN dalam mendukung tujuan pembangunan daerah.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**, yang diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis dan manajerial yang komprehensif bagi ASN termasuk pemerintah desa ditandai dengan penjaminan mutu dan tersertifikasi untuk mengurangi kesenjangan kompetensi ASN.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas unsur penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah **Program Riset dan Inovasi Daerah**, yang diarahkan pada kegiatan penyusunan kajian kebijakan pembangunan daerah, pelaksanaan riset dan inovasi, fasilitasi kerjasama dan kemitraan riset dan inovasi, serta fasilitasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur riset dan inovasi.

6. Pengelolaan Penghubung

Rencana program prioritas unsur pengelolaan penghubung yang akan dilaksanakan adalah **Program Pelayanan Penghubung**, yang diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelayanan penghubung melalui peningkatan kualitas pelayanan publik bagi aparatur dan masyarakat, dan peningkatan fasilitasi promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya.

F. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Rencana program prioritas pada unsur pengawasan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan dan meningkatkan kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan tata kelola risiko dan kepatuhan.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pengawasan, penguatan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah, penguatan kapabilitas pengelolaan risiko korupsi dan penerapan strategi pencegahan korupsi, dan penguatan implementasi zona integritas.

G. Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas pada unsur pemerintahan umum yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi pemahaman ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan kepada masyarakat dalam rangka mitigasi ekstremisme, terorisme, dan radikalisme; serta pembentukan kader bela negara.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada kegiatan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi dengan memfasilitasi pemenuhan atas aspek

kesetaraan dan kebebasan, serta pemantauan situasi politik guna menjaga stabilitas daerah.

c. **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**
   Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.
d. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**
   Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi dan peningkatan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam rangka mitigasi potensi konflik yang disebabkan permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya.
e. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**
   Program ini diarahkan pada kegiatan edukasi tentang kewaspadaan nasional dan meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam meminimalisasi konflik dan penanganan konflik sosial kepada masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.** Rincian seluruh program perangkat daerah beserta *outcome*, target, dan pagu indikatifnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.
Program Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NON URUSAN						**10.616.536.361.296**		**10.790.375.258.964**		**11.089.995.725.200**		**11.634.443.482.199**		**12.276.440.433.975**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						**10.616.536.361.296**		**10.790.375.258.964**		**11.089.995.725.200**		11.634.443.482.199		12.276.440.433.975	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						**10.616.536.361.296**		**10.790.375.258.964**		**11.089.995.725.200**		**11.634.443.482.199**		**12.276.440.433.975**	
	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Pendidikan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pendidikan	%	100	100	21.500.000.000	100	21.300.000.000	100	21.500.000.000	100	22.500.000.000	100	22.500.000.000	Dinas Pendidikan - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Pendidikan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pendidikan	%	100	100	5.265.255.756.000	100	5.329.935.789.000	100	5.455.981.865.000	100	5.718.649.818.000	100	5.903.402.069.000	Dinas Pendidikan - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran	%	100	100	2.884.500.000	100	2.631.050.000	100	2.594.285.000	100	3.144.005.000	100	3.428.901.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	100	100	1.619.000.000	100	1.451.000.000	100	1.451.000.000	100	1.591.000.000	100	1.371.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	100	100	1.531.890.000	100	1.546.890.000	100	1.381.890.000	100	1.381.890.000	100	1.381.890.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	100	100	2.471.000.000	100	2.261.000.000	100	2.261.000.000	100	3.146.000.000	100	3.331.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	100	100	1.272.000.000	100	1.782.000.000	100	1.282.000.000	100	1.292.000.000	100	1.302.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	100	100	2.142.000.000	100	1.145.000.000	100	1.152.000.000	100	1.152.000.000	100	1.152.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	100	100	1.472.400.000	100	1.642.400.000	100	1.042.400.000	100	1.217.400.000	100	1.042.400.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	100	100	2.097.000.000	100	2.063.500.000	100	2.207.000.000	100	2.373.500.000	100	2.537.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	100	100	2.001.250.000	100	1.801.250.000	100	2.262.250.000	100	2.450.500.000	100	2.454.500.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	100	100	1.659.500.000	100	1.639.500.000	100	1.499.500.000	100	1.439.500.000	100	1.489.500.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	100	100	1.513.000.000	100	1.375.000.000	100	1.475.000.000	100	1.415.000.000	100	1.525.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	100	100	2.502.000.000	100	1.940.750.000	100	2.167.775.000	100	2.008.403.000	100	2.247.993.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabdin XIICabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	100	100	4.428.300.000	100	1.308.300.000	100	1.337.300.000	100	1.863.300.000	100	1.377.300.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Kesehatan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kesehatan	%	90	94	1.394.000.000	96	1.191.000.000	98	1.257.000.000	100	1.399.000.000	100	1.473.000.000	Dinas Kesehatan - Sekretariat

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Kesehatan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kesehatan	%	90	90,5	94.947.189.000	90,75	95.257.451.000	91	101.146.780.000	91,25	104.378.975.000	91,5	110.884.082.000	Dinas Kesehatan - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Ambarawa	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Ambarawa	%	100	100	3.801.200.000	100	4.423.500.000	100	4.557.700.000	100	4.747.850.000	100	4.978.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Magelang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Magelang	%	100	100	2.606.800.000	100	2.724.300.000	100	24.650.800.000	100	27.933.800.000	100	13.019.800.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Klaten	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Klaten	%	100	100	2.324.200.000	100	2.684.200.000	100	2.890.500.000	100	3.106.700.000	100	3.271.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Pati	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balkesmas Wilayah Pati	%	100	100	5.139.000.000	100	5.996.000.000	100	6.594.000.000	100	7.190.000.000	100	7.777.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	%	100	100	9.628.500.000	100	9.938.000.000	100	10.026.000.000	100	10.143.000.000	100	10.218.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pelatihan Kesehatan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelatihan Kesehatan	%	100	100	5.236.800.000	100	4.565.800.000	100	4.665.800.000	100	4.800.800.000	100	4.725.800.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A
	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di RSUD Dr.Moewardi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja RSUD Dr. Moewardi	%	100	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	RSUD Dr. Moewardi - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSUD Dr.Moewardi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan RSUD Dr. Moewardi	%	100	100	201.221.027.000	100	211.396.506.000	100	219.226.642.000	100	231.804.207.950	100	242.008.877.000	RSUD Dr. Moewardi - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan rumah sakit di RSUD Dr.MOEWARDI	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD Dr. Moewardi	%	82	82,2	1.062.866.366.000	82,4	1.053.773.907.000	82,6	1.058.625.905.000	82,8	1.060.357.294.050	83	1.179.673.075.000	RSUD Dr. Moewardi - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan rumah sakit di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	N/A	91	624.999.996.000	92	675.000.000.000	93	710.000.000.000	94	717.481.715.000	95	793.047.030.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	N/A	100	96.981.851.000	100	65.588.798.000	100	37.996.435.000	100	37.996.435.000	100	37.996.435.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Persentase tingkat ketercapaian kinerja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	N/A	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo - Sekretariat
	Meningkatnya kinerja pelayanan rumah sakit di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%	52,91	49,19	185.033.918.000	50,4	180.030.000.000	56,26	183.975.000.000	52,38	188.011.000.000	51,47	192.130.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%	100	100	113.882.211.000	100	117.159.424.000	100	119.628.354.000	100	122.609.593.000	100	125.665.361.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	Persentase tingkat ketercapaian kinerja RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH - Sekretariat
	Meningkatnya kinerja pelayanan rumah sakit di RSUD dr. REHATTA	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSUD dr. REHATTA	%	35	52	65.500.000.000	53	67.812.340.000	54	71.777.625.000	55	76.017.681.000	56	81.500.000.000	RSUD dr. REHATTA - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSUD dr. REHATTA	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSUD dr. REHATTA	%	100	100	45.930.000.000	100	46.155.800.000	100	46.140.000.000	100	46.245.000.000	100	46.350.000.000	RSUD dr. REHATTA - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di RSUD dr. REHATTA	Persentase tingkat ketercapaian kinerja RSUD dr. REHATTA	%	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	RSUD dr. REHATTA - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan rumah sakit di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	37	37	60.474.000.000	37	61.811.000.000	38	63.281.000.000	38	64.793.000.000	38	66.341.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	10.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	100	83.957.292.000	100	84.235.295.000	100	84.125.448.000	100	84.153.903.000	100	84.183.993.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo - Sekretariat

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan rumah sakit di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	33	33,01	52.393.000.000	33,02	57.789.000.000	33,03	63.741.000.000	33,04	70.307.000.000	33,05	77.548.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	100	100	80.794.159.000	100	83.478.937.000	100	80.909.307.000	100	76.204.836.000	100	83.227.482.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	27.000.000	100	20.000.000	100	30.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan rumah sakit di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Cost Recovery Rate (CRR) Total RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	47,71	40,88	59.240.000.000	43,92	63.900.000.000	41,04	65.600.000.000	42,49	68.000.000.000	43,94	70.250.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	100	51.560.000.000	100	52.265.000.000	100	52.770.000.000	100	53.275.000.000	100	53.980.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	N/A	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	%	N/A	100	52.338.799.000	100	59.178.559.000	100	63.606.487.000	100	64.615.952.000	100	72.441.347.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam	%	N/A	100	60.000.000	100	80.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	120.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	100	100	1.945.000.000	100	1.945.000.000	100	1.945.000.000	100	2.040.000.000	100	1.945.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	100	100	207.396.801.000	100	178.969.146.000	100	172.648.786.000	100	168.269.711.000	100	165.336.958.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat Berat	%	100	100	2.106.487.000	100	2.240.049.000	100	2.386.249.000	100	2.546.315.000	100	2.721.597.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Jasa Konstruksi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Jasa Konstruksi	%	100	100	899.540.000	100	977.450.000	100	1.062.850.000	100	1.157.050.000	100	1.260.250.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI JASA KONSTRUKSI
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian Konstruksi dan Pengelolaan Alat BeratBalai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	%	100	100	1.776.750.000	100	1.858.350.000	100	1.839.950.000	100	1.821.550.000	100	1.902.150.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLA AN JALAN WILAYAH SEMARANG
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	%	100	100	1.879.250.000	100	1.942.250.000	100	1.991.250.000	100	2.042.750.000	100	2.025.250.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PATI
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	%	100	100	2.927.241.000	100	3.159.610.000	100	3.405.515.000	100	3.709.830.000	100	3.981.679.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PURWODADI
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	%	100	100	1.485.650.000	100	1.641.536.000	100	1.700.640.000	100	1.875.460.000	100	2.004.900.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH SURAKARTA
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	%	100	100	2.519.040.000	100	2.659.850.000	100	2.805.660.000	100	2.951.410.000	100	3.117.250.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH MAGELANG
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	%	100	100	1.342.014.000	100	1.366.247.000	100	1.406.004.000	100	1.460.737.000	100	1.520.943.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH WONOSOBO
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	%	100	100	2.767.750.000	100	2.680.750.000	100	2.892.750.000	100	3.121.750.000	100	3.307.250.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	%	100	100	3.580.227.000	100	3.759.183.000	100	3.928.033.000	100	4.128.268.000	100	4.291.508.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPSDA Pemali Comal	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Pemali Comal	%	100	100	1.348.120.000	100	1.348.120.000	100	1.348.120.000	100	1.348.120.000	100	1.348.120.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPSDA Jratun Seluna	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Jratun Seluna	%	100	100	2.041.579.000	100	2.421.579.000	100	2.041.579.000	100	2.041.579.000	100	2.041.579.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPSDA Bengawan Solo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Bengawan Solo	%	100	100	903.436.000	100	903.436.000	100	903.436.000	100	903.436.000	100	903.443.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di BPSDA Serayu Bogowonto	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah BPSDA Serayu Bogowonto	%	100	100	2.424.963.000	100	2.824.963.000	100	2.424.963.000	100	2.424.963.000	100	2.424.963.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO
	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	%	108,08	100	990.000.000	100	1.105.000.000	100	1.150.000.000	100	1.165.000.000	100	1.210.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	%	119,5	100	20.032.812.000	100	21.358.480.000	100	22.905.700.000	100	23.841.070.000	100	24.939.597.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja	%	100	100	260.000.000	100	310.000.000	100	360.000.000	100	410.000.000	100	460.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja	%	100	100	20.669.908.000	100	21.020.807.000	100	21.249.615.000	100	21.481.211.000	100	21.715.623.000	Satuan Polisi Pamong Praja - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	%	100	100	260.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	100	260.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	%	100	100	14.258.518.000	100	14.307.466.000	100	14.456.890.000	100	14.223.309.000	100	14.775.475.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Sosial	Meningkatnya layanan administrasi keuangan perangkat daerah Dinas Sosial	%	100	100	156.470.820.000	100	167.864.645.000	100	167.512.107.000	100	175.542.790.000	100	189.932.252.000	Dinas Sosial - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Sosial	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Sosial	%	100	100	1.300.000.000	100	1.300.000.000	100	1.300.000.000	100	1.300.000.000	100	1.300.000.000	Dinas Sosial - Sekretariat
	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	%	N/A	100	718.600.000	100	718.600.000	100	718.600.000	100	718.600.000	100	718.600.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	N/A	100	612.500.000	100	612.500.000	100	612.500.000	100	612.500.000	100	612.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	N/A	100	539.000.000	100	539.000.000	100	539.000.000	100	539.000.000	100	539.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede
	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	N/A	100	510.000.000	100	510.000.000	100	510.000.000	100	510.000.000	100	510.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo
	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	N/A	100	434.000.000	100	434.000.000	100	434.000.000	100	434.000.000	100	434.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo
	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	N/A	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	N/A	100	675.500.000	100	675.500.000	100	675.500.000	100	675.500.000	100	675.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	N/A	100	694.500.000	100	694.500.000	100	694.500.000	100	694.500.000	100	694.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha
	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	N/A	100	855.000.000	100	855.000.000	100	855.000.000	100	855.000.000	100	855.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera
	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	N/A	100	504.000.000	100	504.000.000	100	504.000.000	100	504.000.000	100	504.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo
	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	N/A	100	766.500.000	100	766.500.000	100	766.500.000	100	766.500.000	100	766.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata
	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	N/A	100	847.000.000	100	847.000.000	100	847.000.000	100	847.000.000	100	847.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo
	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	N/A	100	644.500.000	100	644.500.000	100	644.500.000	100	644.500.000	100	644.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti
	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	N/A	100	740.250.000	100	740.250.000	100	740.250.000	100	740.250.000	100	740.250.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata
	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	N/A	100	528.000.000	100	528.000.000	100	528.000.000	100	528.000.000	100	528.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	N/A	100	646.940.000	100	646.940.000	100	646.940.000	100	646.940.000	100	646.940.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	100	100	620.500.000	100	620.500.000	100	620.500.000	100	620.500.000	100	620.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra
	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	%	N/A	100	693.500.000	100	693.500.000	100	693.500.000	100	693.500.000	100	693.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo
	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	N/A	100	928.000.000	100	928.000.000	100	928.000.000	100	928.000.000	100	928.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
	Meningkatnya pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan daerah di Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	%	N/A	100	445.000.000	100	445.000.000	100	445.000.000	100	445.000.000	100	445.000.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono
	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	100	100	703.260.000	100	703.260.000	100	703.260.000	100	731.392.000	100	804.532.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	100	100	85.277.641.000	100	85.736.914.000	100	86.341.375.000	100	87.046.107.000	100	95.327.426.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Industri	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Industri	%	100	100	1.702.178.000	100	1.788.720.000	100	1.815.120.000	100	1.944.847.000	100	12.139.337.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok	%	100	100	1.536.513.000	100	1.625.041.000	100	1.639.944.000	100	1.763.976.000	100	10.937.263.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Produktivitas	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Produktivitas	%	100	100	853.598.000	100	907.446.000	100	987.799.000	100	1.066.411.000	100	6.173.059.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)	%	100	100	920.130.000	100	961.990.000	100	982.280.000	100	1.059.310.000	100	3.665.244.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata	%	100	100	954.533.000	100	1.036.093.000	100	1.063.396.000	100	1.146.855.000	100	10.261.544.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	%	45	55	272.000.000	60	272.000.000	62	315.000.000	65	400.000.000	67	400.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	%	90	100	15.521.917.000	100	15.499.840.000	100	16.126.532.000	100	21.409.427.000	100	21.450.002.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	%	90	100	588.200.000	100	598.000.000	100	642.000.000	100	890.000.000	100	890.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Ketahanan Pangan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan	%	86	87	23.916.793.000	87,5	19.714.722.000	88	19.699.842.000	88,5	19.689.167.000	89	20.028.701.000	Dinas Ketahanan Pangan - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Ketahanan Pangan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Ketahanan Pangan	%	80	90	1.000.000.000	90	1.000.000.000	95	1.000.000.000	95	1.000.000.000	95	1.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan	%	86	87	1.816.000.000	87,5	1.086.000.000	88	1.086.000.000	88,5	1.086.000.000	89	1.406.000.000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan
	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	100	100	780.000.000	100	900.000.000	100	920.000.000	100	1.140.000.000	100	1.462.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	100	100	123.397.635.000	100	126.402.621.000	100	129.126.755.000	100	132.090.000.000	100	134.820.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup	%	100	100	463.500.000	100	772.000.000	100	2.197.000.000	100	2.456.000.000	100	2.818.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK I	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK I	%	100	100	618.000.000	100	927.000.000	100	927.000.000	100	1.999.000.000	100	2.271.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK II	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK II	%	100	100	501.000.000	100	912.000.000	100	912.000.000	100	1.158.000.000	100	1.309.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK III	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK III	%	100	100	519.000.000	100	737.000.000	100	820.000.000	100	883.000.000	100	978.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK IV	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK IV	%	100	100	567.200.000	100	819.000.000	100	901.500.000	100	984.000.000	100	1.082.500.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK V	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK V	%	100	100	482.500.000	100	770.000.000	100	873.000.000	100	948.000.000	100	1.031.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK VI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VI	%	100	100	528.000.000	100	887.000.000	100	969.000.000	100	1.036.000.000	100	1.119.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK VIII	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VIII	%	100	100	458.000.000	100	675.000.000	100	747.000.000	100	799.000.000	100	882.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK IX	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK IX	%	100	100	384.000.000	100	567.500.000	100	638.000.000	100	670.000.000	100	732.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK X	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK X	%	100	100	493.000.000	100	651.000.000	100	689.000.000	100	702.000.000	100	746.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I	%	100	100	786.387.000	100	973.000.000	100	1.079.000.000	100	1.309.035.000	100	1.281.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Kebun Raya Baturraden	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kebun Raya Baturraden	%	100	100	828.200.000	100	1.098.000.000	100	4.973.040.000	100	5.409.000.000	100	5.846.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan	%	100	100	580.000.000	100	870.000.000	100	1.205.500.000	100	1.448.500.000	100	1.695.500.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK XI	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK XI	%	100	100	437.000.000	100	685.000.000	100	724.000.000	100	743.000.000	100	793.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di wilayah CDK VII	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah CDK VII	%	100	100	464.000.000	100	773.000.000	100	901.000.000	100	973.000.000	100	1.076.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	71,43	100	480.000.000	100	535.000.000	100	1.050.000.000	100	1.250.000.000	100	1.400.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	100	100	18.533.933.000	100	19.107.709.000	100	25.935.154.000	100	25.555.162.000	100	27.235.678.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Perhubungan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perhubungan	%	100	100	416.600.000	100	416.600.000	100	470.000.000	100	470.000.000	100	470.000.000	Dinas Perhubungan - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Perhubungan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perhubungan	%	100	100	64.590.971.000	100	68.597.099.000	100	74.274.349.000	100	74.724.349.000	100	70.424.349.000	Dinas Perhubungan - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	100	100	170.340.000	100	200.340.000	100	200.340.000	100	200.340.000	100	200.340.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	100	100	136.112.000	100	166.112.000	100	166.112.000	100	166.112.000	100	161.112.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	100	100	259.600.000	100	285.100.000	100	289.600.000	100	289.600.000	100	284.600.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	100	100	177.200.000	100	207.200.000	100	207.200.000	100	207.200.000	100	202.200.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	100	100	162.275.000	100	192.275.000	100	192.275.000	100	192.275.000	100	187.275.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	100	100	183.900.000	100	213.900.000	100	213.900.000	100	213.900.000	100	208.900.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A	%	100	100	312.000.000	100	512.000.000	100	712.000.000	100	512.000.000	100	507.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	%	N/A	100	400.000.000	100	404.000.000	100	419.000.000	100	434.000.000	100	517.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Sekretariat

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	Persentase tingkat pelayaan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Digital	%	78	79,5	30.027.033.319	80	29.866.579.564	80,5	31.853.412.100	81	34.904.721.588	81,5	41.869.861.719	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di UPT Pusat Data	Persentase tingkat pelayaan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah UPT Pusat Data	%	N/A	100	555.510.977	100	1.070.000.000	100	1.085.000.000	100	1.085.000.000	100	1.095.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data
	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	%	100	100	480.000.000	100	795.000.000	100	895.000.000	100	995.000.000	100	1.095.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	%	100	100	19.940.000.000	100	21.350.000.000	100	21.520.000.000	100	21.720.000.000	100	22.123.500.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan	%	100	100	4.435.000.000	100	4.835.000.000	100	4.935.000.000	100	4.935.000.000	100	5.135.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A
	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	100	100	266.660.000	100	303.385.000	100	475.884.000	100	514.000.000	100	580.150.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	%	100	100	20.497.508.000	100	20.929.557.000	100	29.424.535.000	100	31.627.542.000	100	34.067.541.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga	%	N/A	100	980.000.000	100	1.180.000.000	100	1.180.000.000	100	1.180.000.000	100	1.180.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga	%	N/A	86	33.610.860.000	87	36.105.707.000	88	37.979.765.000	89	38.687.466.000	90	39.230.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar	%	N/A	100	4.299.000.000	100	4.335.000.000	100	4.594.000.000	100	4.623.000.000	100	4.878.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A
	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	%	100	100	661.000.000	100	727.650.000	100	731.125.000	100	840.793.000	100	966.910.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	%	100	100	33.498.549.000	100	36.014.945.000	100	36.275.138.000	100	57.167.218.000	100	53.011.230.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	%	100	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	100	900.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Kelautan dan Perikanan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan	%	100	100	54.066.032.000	100	54.178.072.000	100	55.063.156.000	100	61.178.072.000	100	88.904.970.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	%	100	100	372.180.000	100	372.180.000	100	372.180.000	100	372.180.000	100	372.180.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong	%	100	100	154.900.000	100	154.900.000	100	154.900.000	100	154.900.000	100	154.900.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	%	100	100	106.500.000	100	106.500.000	100	106.500.000	100	106.500.000	100	106.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	%	100	100	240.922.000	100	240.922.000	100	240.922.000	100	240.922.000	100	240.922.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	%	100	100	128.400.000	100	128.400.000	100	128.400.000	100	128.400.000	100	128.400.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	%	100	100	144.950.000	100	144.950.000	100	144.950.000	100	144.950.000	100	144.950.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Juwana	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Juwana	%	100	100	164.240.000	100	164.240.000	100	164.240.000	100	164.240.000	100	164.240.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	%	100	100	571.433.000	100	571.433.000	100	571.433.000	1001	571.433.000	100	571.433.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	%	100	100	190.500.000	100	190.500.000	100	190.500.000	100	190.500.000	100	190.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	%	100	100	164.064.500	100	164.064.500	100	164.064.500	100	164.064.500	100	164.064.500	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan	%	100	100	480.355.000	100	480.355.000	100	480.355.000	100	480.355.000	100	480.355.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengembangan Perikanan Budidaya	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengembangan Perikanan Budidaya	%	100	100	641.500.000	100	641.500.000	100	641.500.000	100	641.500.000	100	641.500.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	%	100	100	119.430.000	100	119.430.000	100	119.430.000	100	119.430.000	100	119.430.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	100	100	193.973.000	100	193.973.000	100	193.973.000	100	193.973.000	100	193.973.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	100	100	134.506.000	100	134.506.000	100	134.506.000	100	134.506.000	100	134.506.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	100	100	190.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000	100	190.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	N/A	100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	100	850.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	N/A	86	28.856.138.000	87	28.856.138.000	88	28.856.138.000	89	28.856.138.000	90	28.856.138.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Taman Budaya Jawa Tengah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Taman Budaya Jawa Tengah	%	100	100	6.474.672.000	100	4.484.922.000	100	3.735.142.000	100	5.704.112.000	100	5.154.896.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita	%	100	100	4.325.330.000	100	4.711.750.000	100	4.022.500.000	100	5.025.770.000	100	5.100.550.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Pertanian dan Peternakan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Pertanian dan Peternakan	%	100	100	149.200.312.000	100	162.058.862.000	100	164.261.758.000	100	173.763.109.000	100	182.409.246.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Pertanian dan Peternakan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Pertanian dan Peternakan	%	100	100	1.388.713.000	100	1.492.858.000	100	1.513.859.000	100	3.634.858.000	100	5.261.858.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih	%	100	100	712.950.000	100	969.122.000	100	976.971.000	100	1.182.134.000	100	1.758.757.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	%	100	100	1.861.677.000	100	2.879.697.000	100	2.918.823.000	100	3.865.142.000	100	4.629.841.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta	%	100	100	1.436.110.000	100	2.013.726.000	100	2.063.105.000	100	2.496.361.000	100	2.845.852.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas	%	100	100	1.280.500.000	100	1.701.480.000	100	1.714.453.000	100	2.053.487.000	100	2.326.976.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Perlidungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelidungan Tanaman	%	100	100	799.400.000	100	1.087.184.000	100	1.095.990.000	100	1.326.147.000	100	1.511.807.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pelatihan Pertanian	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelatihan Pertanian	%	100	100	903.000.000	100	956.080.000	100	1.238.027.000	100	1.498.012.000	100	1.707.733.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah	%	100	100	1.910.316.000	100	2.224.252.000	100	2.319.657.000	100	2.668.036.000	100	2.653.143.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah	%	100	100	3.566.336.000	100	5.713.628.000	100	5.713.629.000	100	6.680.385.000	100	7.637.050.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian	%	N/A	100	1.491.000.000	100	1.491.000.000	100	1.491.000.000	100	1.491.000.000	100	2.170.375.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah	%	100	100	2.342.650.000	100	3.016.210.000	100	3.046.454.000	100	3.512.214.000	100	3.936.442.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A
	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	%	100	100	964.421.000	100	1.050.013.000	100	1.260.015.000	100	1.512.017.000	100	1.734.854.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	%	100	100	42.729.292.000	100	45.060.007.000	100	47.901.926.000	100	50.759.562.000	100	53.908.875.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo	%	100	100	1.327.580.000	100	1.028.743.000	100	1.363.412.000	100	1.456.519.000	100	1.572.990.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria	%	100	100	912.830.000	100	902.035.000	100	1.220.433.000	100	1.306.615.000	100	1.411.984.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara	%	100	100	860.080.000	100	868.490.000	100	1.171.507.000	100	1.336.862.000	100	1.351.956.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan	%	100	100	822.292.000	100	844.448.000	100	1.145.113.000	100	1.259.623.000	100	1.355.222.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara	%	100	100	831.185.000	100	843.305.000	100	1.143.935.000	100	1.258.327.000	100	1.364.111.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan	%	100	100	849.280.000	100	877.350.000	100	1.221.248.000	100	1.343.372.000	100	1.474.586.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan	%	100	100	808.605.000	100	792.457.000	100	1.094.347.000	100	1.234.707.000	100	1.309.942.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral	%	100	100	1.768.838.000	100	1.482.788.000	100	1.791.592.000	100	1.866.914.000	100	2.049.965.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	%	100	100	1.120.440.000	100	1.000.770.000	100	1.268.594.000	100	1.395.452.000	100	1.554.606.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	%	100	100	868.952.000	100	841.149.000	100	1.149.855.000	100	1.264.839.000	100	1.333.723.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	%	100	100	766.773.000	100	772.512.000	100	1.101.069.000	100	1.180.247.000	100	1.250.335.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	%	100	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan	%	100	100	46.629.807.000	100	46.629.807.000	100	46.629.807.000	100	49.198.955.000	100	48.948.955.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK)	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK)	%	100	100	2.754.074.000	100	2.754.074.000	100	2.754.074.000	100	2.754.074.000	100	2.754.074.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	%	100	100	2.499.589.000	100	2.499.589.000	100	2.499.589.000	100	2.499.589.000	100	2.499.589.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	%	100	100	2.345.390.000	100	2.345.390.000	100	2.345.390.000	100	2.345.390.000	100	2.345.390.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)	%	100	100	3.100.380.000	100	3.100.380.000	100	3.100.380.000	100	3.100.380.000	100	3.100.380.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada BIKDK Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)	%	100	100	1.717.952.000	100	1.717.952.000	100	1.717.952.000	100	1.717.952.000	100	1.717.952.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Hukum	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum	%	100	100	387.694.000	100	466.790.000	100	717.136.000	100	723.189.000	100	740.163.000	BIRO HUKUM
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Administrasi Pembangunan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pembangunan Daerah	%	100	100	420.524.000	100	420.524.000	100	420.480.000	100	447.255.000	100	447.255.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Sekretariat Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja Sekretariat Daerah	%	N/A	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	335.000.000	100	345.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Perekonomian	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	%	N/A	100	245.000.000	100	245.000.000	100	245.000.000	100	245.000.000	100	245.000.000	BIRO PEREKONOMIAN
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Kesejahteraan Rakyat	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	%	N/A	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, dan kepegawaian Perangkat Daerah di Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%	N/A	100	642.169.000	100	855.982.000	100	955.982.000	100	1.003.732.000	100	1.036.982.000	BIRO ORGANISASI
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan keuangan di Biro Umum dan Sekretariat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	%	100	100	218.430.804.000	100	237.635.913.000	100	261.399.505.000	100	287.539.455.000	100	316.293.400.000	BIRO UMUM
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan keuangan di Biro Umum dan Sekretariat Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%	100	100	8.611.000.000	100	9.472.100.000	100	10.419.310.000	100	11.461.241.000	100	12.607.366.000	BIRO UMUM
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan keuangan di Biro Umum dan Sekretariat Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%	100	100	25.760.000.000	100	28.336.000.000	100	31.169.600.000	100	34.286.560.000	100	37.715.216.000	BIRO UMUM

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	%	N/A	100	929.526.000	100	1.022.000.000	100	1.121.956.000	100	1.058.031.000	100	1.083.000.000	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	%	N/A	100	225.426.000	100	284.420.000	100	288.627.000	100	305.036.000	100	335.618.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Persentase tingkat pelayanan umum Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	%	N/A	100	655.000.000	100	718.000.000	100	730.030.000	100	742.351.000	100	794.418.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
	Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi, dan keuangan perangkat daerah di Sekretariat DPRD	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Sekretariat DPRD	%	100	100	187.050.027.000	100	191.066.496.000	100	195.066.496.000	100	199.066.496.000	100	209.280.820.000	Sekretariat DPRD - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah di Sekretariat DPRD	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Sekretariat DPRD	%	100	100	44.822.390.000	100	41.323.990.000	100	41.114.786.000	100	40.981.400.000	100	43.772.196.000	Sekretariat DPRD - Bagian Umum
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	600.000.000	100	620.000.000	100	640.000.000	100	660.013.000	100	680.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	33.439.825.000	100	37.082.080.000	100	38.448.151.000	100	41.024.000.000	100	42.991.397.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah	%	95	95	194.129.451.000	95	185.954.412.000	95	194.415.736.000	95	266.003.591.000	95	289.450.246.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengelola Pendapatan Daerah	%	90	90	374.757.000	90	598.766.000	90	436.967.000	90	595.114.000	90	647.580.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Semarang I	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang I	%	95	95	2.088.509.000	95	2.318.244.000	95	2.435.203.000	95	3.316.951.000	95	3.609.377.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Semarang II	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang II	%	95	95	1.554.814.000	95	1.725.846.000	95	1.812.913.000	95	2.460.309.000	95	2.677.212.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Semarang III	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Semarang III	%	95	95	1.800.908.000	95	1.999.009.000	95	2.099.858.000	95	2.859.843.000	95	3.111.970.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Ungaran	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Ungaran	%	95	95	2.252.569.000	95	2.499.908.000	95	2.626.495.000	95	3.576.444.000	95	3.891.748.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Salatiga	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Salatiga	%	95	95	1.188.765.000	95	1.319.530.000	95	1.386.100.000	95	1.887.760.000	95	2.054.185.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Kendal	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kendal	%	95	95	1.382.691.000	95	1.534.786.000	95	1.612.219.000	95	2.195.714.000	95	2.389.288.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Demak	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Demak	%	95	95	1.359.630.000	95	1.509.191.000	95	1.585.329.000	95	2.158.614.000	95	2.348.921.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Purwodadi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purwodadi	%	95	95	1.436.160.000	95	1.594.137.000	95	1.674.563.000	95	2.280.624.000	95	2.481.685.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Surakarta	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Surakarta	%	95	95	1.534.551.000	95	1.703.352.000	95	1.789.286.000	95	2.436.073.000	95	2.650.840.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Klaten	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Klaten	%	95	95	2.351.284.000	95	2.609.925.000	95	2.741.597.000	95	3.728.455.000	95	4.057.161.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Sragen	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sragen	%	95	95	1.250.410.000	95	1.387.955.000	95	1.457.977.000	95	1.985.312.000	95	2.160.343.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Sukoharjo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Sukoharjo	%	95	95	1.551.724.000	95	1.722.414.000	95	1.809.311.000	95	2.463.376.000	95	2.680.550.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Wonogiri	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonogiri	%	95	95	2.082.781.000	95	2.311.887.000	95	2.428.522.000	95	3.306.884.000	95	3.598.423.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Karanganyar	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Karanganyar	%	95	95	1.494.523.000	95	1.658.921.000	95	1.742.613.000	95	2.373.302.000	95	2.582.536.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Boyolali	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Boyolali	%	95	95	1.410.417.000	95	1.565.564.000	95	1.644.547.000	95	2.239.742.000	95	2.437.202.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Pati	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pati	%	95	95	1.539.123.000	95	1.708.428.000	95	1.794.618.000	95	2.444.128.000	95	2.659.605.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Blora	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Blora	%	95	95	1.683.620.000	95	1.868.820.000	95	1.963.102.000	95	2.673.587.000	95	2.909.295.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Rembang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Rembang	%	95	95	1.092.063.000	95	1.212.191.000	95	1.273.346.000	95	1.733.623.000	95	1.886.461.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Kudus	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kudus	%	95	95	1.466.520.000	95	1.627.838.000	95	1.709.962.000	95	2.314.066.000	95	2.518.079.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Jepara	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Jepara	%	95	95	1.566.253.000	95	1.738.542.000	95	1.826.251.000	95	2.486.735.000	95	2.705.968.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Pekalongan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pekalongan	%	95	95	1.405.028.000	95	1.559.582.000	95	1.638.263.000	95	2.218.796.000	95	2.414.411.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Kajen	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kajen	%	95	95	1.410.145.000	95	1.565.263.000	95	1.644.229.000	95	2.238.833.000	95	2.436.212.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Batang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Batang	%	95	95	1.433.513.000	95	1.591.200.000	95	1.671.476.000	95	2.264.430.000	95	2.464.065.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Pemalang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Pemalang	%	95	95	1.525.397.000	95	1.693.192.000	95	1.778.615.000	95	2.422.329.000	95	2.635.888.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Tegal	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Tegal	%	95	95	1.570.282.000	95	1.743.013.000	95	1.830.950.000	95	2.493.133.000	95	2.712.927.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Slawi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Slawi	%	95	95	1.468.001.000	95	1.629.483.000	95	2.677.753.000	95	2.319.275.000	95	2.523.747.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Brebes	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Brebes	%	95	95	2.123.775.000	95	2.357.391.000	95	2.476.321.000	95	3.372.080.000	95	3.669.364.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Purwokerto	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purwokerto	%	95	95	1.977.558.000	95	2.195.090.000	95	2.305.833.000	95	3.140.364.000	95	3.417.222.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Cilacap	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Cilacap	%	95	95	2.013.265.000	95	2.234.726.000	95	2.347.467.000	95	3.196.588.000	95	3.478.404.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Purbalingga	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purbalingga	%	95	95	1.323.588.000	95	1.469.182.000	95	1.543.302.000	95	2.101.383.000	95	2.286.642.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Banjarnegara	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Banjarnegara	%	95	95	1.396.299.000	95	1.549.894.000	95	1.628.087.000	95	2.200.648.000	95	2.394.661.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Magelang	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Magelang	%	95	95	1.052.441.000	95	1.168.211.000	95	1.227.147.000	95	1.670.958.000	95	1.818.272.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Mungkid	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Mungkid	%	95	95	1.616.101.000	95	1.793.873.000	95	1.884.376.000	95	2.561.128.000	95	2.786.920.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Kebumen	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Kebumen	%	95	95	1.368.864.000	95	1.519.439.000	95	1.596.095.000	95	2.173.249.000	95	2.364.845.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Purworejo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Purworejo	%	95	95	1.609.200.000	95	1.786.213.000	95	1.876.326.000	95	2.555.409.000	95	2.780.697.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Temanggung	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Temanggung	%	95	95	1.368.192.000	95	1.518.693.000	95	1.595.311.000	95	2.160.304.000	95	2.350.758.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di UPPD Wonosobo	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah UPPD Wonosobo	%	95	95	1.251.000.000	95	1.388.609.000	95	1.458.665.000	95	1.986.144.000	95	2.161.245.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi	%	95	95	485.000.000	95	538.350.000	95	565.509.000	95	770.180.000	95	838.080.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	%	100	100	993.405.000	100	1.043.073.000	100	1.188.203.000	100	1.313.614.000	100	1.380.294.250	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	%	100	100	41.607.160.000	100	44.893.582.000	100	48.371.323.000	100	51.381.696.000	100	55.830.910.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Unit Pengelolaan Asrama Donohudan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Pengelolaan Asrama Donohudan	%	81	81,5	6.102.402.000	82	7.161.716.000	82,5	7.988.766.000	83	8.388.205.000	83,5	9.071.175.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Unit Pengelolaan Asrama Donohudan Kelas B
	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Badan Kepegawaian Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah	%	100	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	Badan Kepegawaian Daerah - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Kepegawaian Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kepegawaian Daerah	%	100	100	32.933.109.000	100	32.596.211.000	100	33.425.103.000	100	33.830.839.000	100	34.605.747.000	Badan Kepegawaian Daerah - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Unit Penilaian Kompetensi ASN	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Unit Penilaian Kompetensi ASN	%	100	100	60.000.000	100	441.165.000	100	415.000.000	100	415.000.000	100	415.000.000	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A
	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	%	100	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	%	100	100	45.883.000.000	100	61.364.262.000	100	65.757.940.000	100	69.668.426.000	100	77.287.354.050	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di Badan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah	%	100	100	555.000.000	100	678.000.000	100	690.000.000	100	750.000.000	100	795.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Riset dan Inovasi Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah	%	100	100	15.616.348.000	100	15.955.995.000	100	15.355.716.000	100	17.148.648.000	100	17.357.598.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Badan Penghubung	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Penghubung	%	93,7	96	170.187.000	97	186.941.700	98	205.371.870	99	225.645.057	100	247.945.563	Badan Penghubung - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Penghubung	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Penghubung	%	100	100	21.641.394.500	100	23.539.195.200	100	25.085.365.730	100	26.693.196.054	100	33.601.149.893	Badan Penghubung - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah di INSPEKTORAT	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah INSPEKTORAT	%	N/A	100	208.334.000	100	208.334.000	100	208.334.000	100	705.000.000	100	795.000.000	INSPEKTORAT - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di INSPEKTORAT	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah INSPEKTORAT	%	N/A	100	31.114.680.000	100	31.513.156.000	100	35.025.456.000	100	42.869.305.000	100	45.501.707.000	INSPEKTORAT - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	%	100	100	1.742.927.000	100	1.756.744.000	100	2.050.000.000	100	2.050.000.000	100	2.136.962.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	%	100	100	16.463.771.000	100	16.315.667.000	100	17.397.527.000	100	17.176.082.000	100	17.531.082.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Sekretariat
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						**4.840.855.013.000**		**5.035.826.617.000**		**5.201.619.416.000**		**5.582.271.557.000**		**6.009.039.626.000**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						**3.446.103.850.000**		**3.422.895.709.000**		**3.418.155.528.000**		3.525.519.438.000		3.644.101.201.000	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						**3.444.461.861.000**		**3.421.085.721.000**		**3.416.265.006.000**		**3.523.304.775.000**		**3.641.791.539.000**	
	Meningkatnya pemerataan pendidikan menengah tingkat SMA	APK SMA	%	30,27	30,32	21.540.000.000	30,35	18.700.000.000	30,36	4.700.000.000	30,37	5.700.000.000	30,38	5.700.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA
	Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan tingkat SMA	Angka Putus Sekolah SMA	Angka	0,011	0,011	22.112.000.000	0,011	18.800.000.000	0,011	18.800.000.000	0,011	22.102.000.000	0,01	22.102.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA
	Meningkatnya karakter siswa tingkat SMA	Persentase Prestasi Lomba SMA Tingkat Nasional	%	35,82	35,89	5.000.000.000	35,92	5.000.000.000	35,96	5.000.000.000	35,98	10.000.000.000	36,1	10.000.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA
	Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan tingkat SMA	Nilai Kualitas Pembelajaran SMA	Angka	63,85	64,45	720.147.060.000	64,95	719.763.045.000	65	719.863.045.000	65,23	719.863.045.000	65,25	723.247.060.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMA
	Meningkatnya pemerataan pendidikan menengah tingkat SMK	APK SMK	%	53,7	53,75	12.000.000.000	53,78	12.000.000.000	53,8	17.500.000.000	53,81	17.500.000.000	53,82	17.500.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK
	Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan tingkat SMK	Angka Putus Sekolah SMK	Angka	0,027	0,026	31.101.200.000	0,026	31.000.000.000	0,025	31.000.000.000	0,024	31.101.200.000	0,024	31.101.200.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK
	Meningkatnya karakter siswa tingkat SMK	Persentase Prestasi Lomba SMK Tingkat Nasional	%	28,82	57	5.000.000.000	58,5	2.300.000.000	59	2.300.000.000	59	6.000.000.000	60	6.000.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK
	Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan tingkat SMK	Nilai Kualitas Pembelajaran SMK	Angka	61,96	60,86	1.347.324.495.000	60,98	1.347.374.495.000	61,03	1.347.424.495.000	61,05	1.347.474.495.000	64,5	1.350.524.495.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK
	Meningkatnya relevansi pendidikan menengah kejuruan	Nilai Kualitas Pembelajaran selaras dunia kerja	Angka	63,85	67,77	76.400.000.000	67,89	76.400.000.000	68,01	76.400.000.000	68,13	76.400.000.000	68,25	76.400.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan SMK
	Meningkatnya pemerataan pendidikan khusus	APK SLB	%	91,54	91,74	4.152.270.000	91,84	4.152.270.000	91,94	5.152.270.000	92,04	5.152.270.000	92,14	5.152.270.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus
	Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan khusus	Angka Putus Sekolah SLB	Angka	0,045	0,043	3.530.000.000	0,042	3.250.000.000	0,041	3.250.000.000	0,039	3.530.000.000	0,038	3.530.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus
	Meningkatnya karakter siswa pendidikan khusus	Persentase Prestasi Lomba SLB Tingkat Nasional	%	53,85	54,05	2.000.000.000	54,45	2.100.000.000	54,9	2.200.000.000	55,1	2.300.000.000	55,65	2.400.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus
	Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan khusus	Nilai Kualitas Pembelajaran SLB	Angka	67,51	65,61	85.896.835.000	65,91	86.996.835.000	66,21	88.096.835.000	66,51	89.196.835.000	66,81	90.296.835.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Diksus
	Meningkatnya kualitas guru	Persentase Guru SMA Bersertifikat Kompetensi	%	70,44	76,84	1.036.188.000	78,84	309.687.000	80,84	335.536.000	82,84	1.113.969.000	84,84	1.145.246.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
	Meningkatnya kualitas guru	Persentase Guru SMK Bersertifikat Kompetensi	%	57,94	62,13	318.661.000	64,13	235.027.000	66,13	253.157.000	68,13	273.032.000	70,13	294.895.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
	Meningkatnya kualitas guru	Persentase Guru SLB Bersertifikat Kompetensi	%	52,24	57,72	223.666.000	59,72	241.163.000	61,72	258.809.000	63,72	276.620.000	65,72	294.612.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
	Meningkatnya kompetensi guru berlisensi	Persentase Guru SMK yang Memiliki Sertifikat keahlian	%	1,1	1,74	2.500.000.000	2,06	2.500.000.000	2,38	2.500.000.000	2,7	2.500.000.000	3,03	2.500.000.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
	Meningkatnya digitalisasi pendidikan	Persentase Guru SMA, SMK, dan SLB Bersertifikasi Pelatihan Platform Pendidikan	%	10	25	3.017.000.000	32,5	2.800.000.000	40	3.025.000.000	47,5	3.175.000.000	55	3.325.000.000	Dinas Pendidikan - Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan dan Mutu Pembelajaran Kelas A
	Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	N/A	76,67	1.822.300.000	80	1.822.300.000	83,33	1.822.300.000	86,67	1.822.300.000	90	1.822.300.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
	Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	61,63	65,71	17.118.152.000	67,75	3.685.000.000	69,79	2.920.000.000	71,83	5.705.000.000	73,87	5.320.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
	Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	66,21	65,21	70.000.000	67,7	70.000.000	68,9	70.000.000	70,05	250.000.000	71,25	250.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
	Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	83,1	83,1	74.583.145.000	83,2	75.879.145.000	83,2	75.879.145.000	83,22	80.464.250.000	83,22	90.409.358.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
	Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	69,22	71,78	-	73,07	-	74,35	-	75,64	-	76,92	-	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
	Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	85,94	73,3	70.000.000	75,14	70.000.000	76,78	70.000.000	78,95	40.900.000	79,15	40.900.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
	Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	83,3	83,8	106.378.373.000	84,3	107.890.373.000	84,7	107.890.373.000	84,7	114.562.830.000	85	129.036.095.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
	Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	77,8	77,9	12.000.000.000	78,8	12.000.000.000	79,7	12.000.000.000	80,5	12.000.000.000	81,4	12.000.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	68,21	70,89	10.143.848.000	72,23	1.170.000.000	73,58	2.370.000.000	74,92	3.370.000.000	76,26	3.370.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
	Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	81,11	74,41	70.000.000	76,21	70.000.000	77,51	230.000.000	78,77	255.000.000	80,1	280.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
	Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	70,41	70,5	82.072.204.000	70,55	83.368.204.000	70,6	83.368.204.000	70,7	88.197.373.000	70,8	98.671.865.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
	Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	N/A	76,39	8.000.000.000	77,78	8.000.000.000	80,56	8.000.000.000	83,33	8.000.000.000	90,28	8.000.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
	Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	53,04	57,82	1.861.500.000	60,53	2.650.000.000	63,72	1.480.000.000	66,91	7.900.000.000	70,09	6.680.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
	Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	66,1	50,5	70.000.000	55,76	40.000.000	58,89	40.000.000	60,89	40.000.000	70,77	40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
	Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	70,56	70,56	66.703.659.000	71,12	69.345.659.000	71,68	69.345.659.000	72,24	72.902.822.000	72,8	74.079.072.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
	Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	N/A	73,33	5.466.900.000	76,67	5.466.900.000	80	5.466.900.000	83,33	5.466.900.000	86,67	5.466.900.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
	Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	57,35	61,24	1.494.370.000	63,89	1.050.000.000	66,54	1.200.000.000	69,19	1.200.000.000	71,84	1.200.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V
	Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	72,87	60,1	70.000.000	62,9	70.000.000	65,8	170.000.000	70,31	170.000.000	71,79	170.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V
	Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	78,9	79	70.250.459.000	79,21	71.978.459.000	79,57	71.978.459.000	79,88	76.349.063.000	80,13	85.828.905.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V
	Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	N/A	73,33	1.822.300.000	76,67	1.822.300.000	80	1.822.300.000	83,33	1.822.300.000	86,67	1.822.300.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V
	Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	89,52	89,9	1.440.000.000	90,09	610.000.000	90,28	610.000.000	90,47	610.000.000	90,66	610.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
	Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	77,6	68,2	70.000.000	70,65	70.000.000	72,77	30.000.000	76,89	15.000.000	80,03	30.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
	Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	79,82	83,05	81.388.191.000	83,27	82.684.191.000	83,44	82.684.191.000	83,62	87.623.076.000	83,89	98.335.515.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
	Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	57,14	68,49	3.644.600.000	69,33	3.644.600.000	71,79	3.644.600.000	72,6	3.644.600.000	73,33	3.644.600.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
	Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	100,9	68	800.000.000	68,25	800.000.000	70	1.200.000.000	72,5	800.000.000	75	800.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
	Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	81,82	70,34	70.000.000	75,58	70.000.000	77,77	121.000.000	80,56	133.100.000	81,89	146.410.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
	Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	85,55	86,2	53.648.573.000	86,8	54.512.573.000	87,4	54.512.573.000	88	58.108.764.000	88,6	65.041.299.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
	Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	64,11	68,28	1.790.000.000	70,67	1.330.000.000	73,06	2.336.000.000	75,44	3.455.000.000	77,83	3.700.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	86,14	81,8	70.000.000	83,3	70.000.000	85,65	90.000.000	87,84	105.000.000	88,75	120.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII
	Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	76,12	76,3	52.398.868.000	76,5	55.272.868.000	76,8	55.422.868.000	76,9	58.341.437.000	77	64.671.817.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII
	Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	67,62	70,06	5.687.900.000	71,45	1.000.000.000	72,84	2.250.000.000	74,23	3.750.000.000	75,63	3.750.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
	Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	86,94	79,3	70.000.000	80,12	100.000.000	84,45	100.000.000	85,98	100.000.000	86,75	100.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
	Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	88,13	88,15	104.922.636.000	88,16	109.896.786.000	88,17	109.896.786.000	88,18	116.027.901.000	88,19	129.326.293.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
	Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	N/A	69,17	7.289.200.000	72,5	7.289.200.000	75	7.289.200.000	78,33	7.289.200.000	80,83	7.289.200.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
	Meningkatnya kualitas sarpras Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	65,52	67,59	8.565.278.000	68,78	3.246.000.000	69,97	3.600.000.000	71,15	4.640.000.000	72,34	2.250.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
	Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	88,12	79,13	70.000.000	80,12	70.000.000	83,56	159.000.000	84,71	159.000.000	86,88	175.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
	Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	N/A	77,52	118.291.330.000	77,78	124.339.330.000	78,03	124.339.330.000	78,31	130.938.094.000	78,58	145.250.836.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
	Meningkatnya keterjangkauan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	N/A	71,15	12.644.600.000	73,72	12.644.600.000	75,64	12.644.600.000	78,85	12.644.600.000	83,33	12.644.600.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
	Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	66,34	68,98	4.303.450.000	70,49	5.380.840.000	72	1.850.000.000	73,51	13.598.450.000	75,02	11.260.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
	Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	77,87	65,78	70.000.000	70,34	65.000.000	74,45	87.500.000	77,89	87.500.000	80,34	87.500.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
	Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	75,32	79,25	83.008.732.000	80,62	84.736.732.000	82,5	84.736.732.000	83,75	89.195.378.000	85,62	98.866.190.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
	Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	N/A	43,33	1.822.300.000	50	1.822.300.000	56,66	1.822.300.000	63,33	1.822.300.000	76,66	1.822.300.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
	Meningkatnya kualitas sarpras pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase Sarpras Pendidikan Menengah dan Khusus dalam kondisi baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	78,86	83,72	14.155.779.000	86,15	2.720.000.000	88,58	4.326.000.000	91,01	13.116.000.000	93,44	13.091.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
	Meningkatnya karakter siswa di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB dengan capaian karakter baik di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	85,38	80,41	70.000.000	82,25	80.000.000	83,45	70.000.000	85,11	120.000.000	86,11	120.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
	Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase Sekolah SMA, SMK dan SLB Minimal Akreditasi B di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	80	80,15	82.981.539.000	80,2	86.437.539.000	80,25	86.437.539.000	80,3	90.980.871.000	80,35	100.835.371.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
	Meningkatnya keterjangkauan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Tingkat Kebekerjaan Lulusan SMK Boarding dan Semi Boarding di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	N/A	70	1.822.300.000	72	1.822.300.000	75	1.822.300.000	77	1.822.300.000	79	1.822.300.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM						**480.000.000**		**576.000.000**		**588.285.000**		**752.610.000**		**770.610.000**	
	Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
	Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	31.875.000	100	31.875.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	115.000.000	100	125.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
	Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	100	100	40.000.000	100	65.000.000	100	40.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
	Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V
	Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	N/A	100	40.000.000	100	40.000.000	100	34.735.000	100	34.735.000	100	34.735.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
	Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	75	75	40.000.000	77	40.000.000	77	50.000.000	80	50.000.000	80	50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
	Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	89,03	75	40.000.000	77	40.000.000	77	33.550.000	80	36.000.000	80	36.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII
	Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	100	75	40.000.000	77	60.000.000	77	60.000.000	80	60.000.000	80	60.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
	Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	N/A	100	40.000.000	100	91.000.000	100	95.000.000	100	95.000.000	100	103.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
	Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	100	55	40.000.000	60	40.000.000	64,38	40.000.000	70,63	85.000.000	75	85.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
	Meningkatnya implementasi kurikulum adaptif dan inovatif di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK dan SLB yang melaksanakan muatan lokal pilihan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						**681.989.000**		**743.988.000**		**805.987.000**		**867.986.000**		**929.985.000**	
	Meningkatnya distribusi pemerataan Guru dan Tenaga Kependidikan	Indeks Distribusi Guru SMA dan SMK	Angka	0,41	0,43	681.989.000	0,44	743.988.000	0,45	805.987.000	0,46	867.986.000	0,47	929.985.000	Dinas Pendidikan - Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN						**480.000.000**		**490.000.000**		**496.250.000**		**594.067.000**		**609.067.000**	
	Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	93,75	94	30.000.000	94,2	30.000.000	94,5	30.000.000	94,8	40.000.000	95	40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
	Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan I	%	N/A	74,2	10.000.000	74,3	10.000.000	74,4	10.000.000	74,5	15.000.000	74,8	15.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN I
	Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	70	70,36	30.000.000	70,71	30.000.000	71,63	30.000.000	71,97	17.300.000	72,35	17.300.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
	Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan II	%	N/A	2,57	10.000.000	2,93	10.000.000	3	10.000.000	3,21	5.517.000	3,63	5.517.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN II
	Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	25,81	75,2	30.000.000	75,4	30.000.000	75,6	30.000.000	75,8	80.000.000	76	90.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
	Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan III	%	N/A	75,2	10.000.000	75,4	10.000.000	75,6	10.000.000	75,8	30.000.000	76	35.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN III
	Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	30	35	30.000.000	40	40.000.000	45	30.000.000	50	40.000.000	50	40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
	Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IV	%	N/A	35	10.000.000	40	10.000.000	45	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IV
	Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	11,9	12,4	10.000.000	12,6	10.000.000	12,8	25.000.000	12,9	25.000.000	13	25.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan V	%	11,9	17,4	30.000.000	22,3	30.000.000	26,7	50.000.000	28,9	50.000.000	30,2	50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WIAYAH PENDIDIKAN V
	Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	N/A	68,7	10.000.000	69,2	10.000.000	69,7	5.000.000	70,2	5.000.000	70,7	5.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
	Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VI	%	92,3	70,8	30.000.000	71,2	30.000.000	71,5	20.000.000	71,9	20.000.000	72,3	20.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VI
	Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	N/A	25	10.000.000	35	10.000.000	35	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
	Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VII	%	N/A	60	30.000.000	65	30.000.000	65	40.000.000	70	40.000.000	70	40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VII
	Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	N/A	25	10.000.000	35	10.000.000	35	5.250.000	50	5.250.000	50	5.250.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII
	Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan Pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah Cabang Dinas Wilayah Pendidikan VIII	%	N/A	60	30.000.000	65	30.000.000	65	21.000.000	70	21.000.000	70	21.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN VIII
	Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	1	25	10.000.000	35	10.000.000	35	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
	Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan IX	%	1	60	30.000.000	65	20.000.000	65	20.000.000	70	20.000.000	70	20.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN IX
	Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	N/A	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
	Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan X	%	N/A	100	30.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN X
	Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	100	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
	Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XI	%	100	50	30.000.000	50	30.000.000	50	30.000.000	50	40.000.000	50	40.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XI
	Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Khusus di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
	Meningkatnya pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	Persentase Rekomendasi Teknis Perijinan Pendidikan Menengah di Cabang Dinas Wilayah Pendidikan XII	%	45,45	85	30.000.000	88	30.000.000	90	30.000.000	92	30.000.000	95	30.000.000	Dinas Pendidikan - CABANG DINAS WILAYAH PENDIDIKAN XII
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						**766.191.716.000**		**779.240.810.000**		**823.230.946.000**		860.017.829.000		982.205.500.000	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						**754.020.416.000**		**764.290.810.000**		**808.181.957.000**		**844.613.711.000**		**964.028.133.000**	
	Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Persentase Kabupaten/Kota yang minimal 10 % institusi dibina, dengan pekerja mendapatkan pelayanan kesehatan kerja	%	N/A	54,28	400.000.000	60	510.000.000	65,71	620.000.000	71,42	730.000.000	77,14	840.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
	Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Persentase penurunan kasus kematian ibu	%	2	2	554.500.000	2	660.450.000	2	702.995.000	2	739.294.000	2	780.523.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
	Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Angka Kematian Bayi (AKB)	1.000/KH	7,57	7,5	172.000.000	7,39	172.000.000	7,33	180.000.000	7,28	188.000.000	7,23	195.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
	Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Persentase lanjut usia yang mandiri	%	90,22	77	30.000.000	79	40.000.000	81	50.000.000	83	60.000.000	85	70.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
	Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Prevalensi wasting balita	%	N/A	6,7	732.853.000	6,5	845.953.000	6,3	935.000.000	6,1	1.030.000.000	6	1.080.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
	Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Fasilitas pelayanan kesehatan Primer dengan Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) kesehatan sesuai Standar	%	N/A	51,19	35.000.000	51,76	50.000.000	52,33	85.000.000	52,89	100.000.000	53,46	140.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
	Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasilitas pelayanan kesehatan Primer terakreditasi paripurna	%	N/A	85,71	165.000.000	88,57	220.000.000	91,43	250.000.000	100	280.000.000	100	330.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Persentase Kabupaten/Kota dengan penyedia dan atau pelayanan kesehatan tradisional sesuai standar mutu	%	N/A	37,14	75.000.000	48,57	100.000.000	57,14	125.000.000	71,42	150.000.000	82,85	175.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
	Meningkatnya kualitas kesehatan sesuai siklus hidup	Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)	%	N/A	40	534.000.000	50	564.000.000	60	564.000.000	70	584.000.000	80	584.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
	Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis	%	90	95	105.000.000	95	155.000.000	95	205.000.000	95	250.000.000	95	300.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit
	Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis	%	86	91	105.000.000	92	155.000.000	93	205.000.000	94	250.000.000	95	305.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit
	Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Insidensi Human Immunodeficiency Virus (HIV)	%	7	8	100.000.000	8	120.000.000	9	140.000.000	9	145.000.000	9	160.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit
	Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Jumlah kabupaten/kota yang eliminasi malaria	Kabupaten /Kota	34	35	100.000.000	35	100.000.000	35	120.000.000	35	100.000.000	35	100.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit
	Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Jumlah kabupaten/kota dengan Eliminasi Neglected Tropical Diseases (Pengendalian Kasus Filariasis dan Kusta)	Kabupaten /Kota	17	20	165.000.000	23	193.000.000	25	220.000.000	26	247.000.000	28	275.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit
	Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Angka kematian Dengue	%	1,3	0,5	100.000.000	0,4	125.000.000	0,4	125.000.000	0,3	100.000.000	0,3	100.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit
	Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Insidensi Hepatitis B	%	1,18	1,1	60.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	0,95	80.000.000	0,95	85.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit
	Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase Hipertensi dalam pengendalian	%	30	35	145.400.000	37	190.610.000	39	215.340.000	41	239.616.000	43	255.828.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit
	Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase Diabetes Melitus terkendali (DM Terkendali)	%	30	35	81.660.000	37	94.450.000	39	109.275.000	41	128.934.000	43	139.463.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit
	Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase merokok penduduk usia 10-21 tahun	%	N/A	14,4	83.660.000	13,4	94.450.000	12,4	109.275.000	11,4	128.934.000	10,4	139.463.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit
	Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan skrining 4 kanker prioritas (paru, kolorektal, payudara,Ca Cerviks)	%	14,28	25,71	81.660.000	31,43	94.450.000	37,14	109.275.000	42,86	128.934.000	48,57	139.463.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit
	Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase Kabupaten/ Kota yang Mencapai Target Kekebalan Kelompok	%	100	100	350.000.000	100	400.000.000	100	475.000.000	100	525.000.000	100	600.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit
	Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase kabupaten/kota dengan pengendalian kejadian luar biasa (KLB)/ wabah dan bencana	%	48	50	550.000.000	60	625.000.000	65	675.000.000	70	725.000.000	75	750.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%	N/A	25	62.620.000	25	71.040.000	25	81.835.000	25	98.582.000	25	105.783.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit
	Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota memenuhi kualitas kesehatan lingkungan	%	N/A	8,57	310.000.000	11,42	380.000.000	14,28	440.000.000	17,14	500.000.000	20	560.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit
	Menurunnya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya deteksi dini, kualitas kesehatan lingkungan dan surveilans kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan Surveilans Kesehatan	%	40	50	625.000.000	60	750.000.000	65	850.000.000	70	975.000.000	70	1.075.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Penanggulangan Penyakit
	Meningkatnya mutu, sarana, prasarana dan alat di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan kepesertaan aktif asuransi kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit mencapai Case Fatality Rate Direct Obstetric (eklampsi dan perdarahan) < 1%	%	N/A	68,57	190.000.000	71,42	250.000.000	74,28	310.000.000	77,14	370.000.000	80	450.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Lanjutan
	Meningkatnya mutu, sarana, prasarana dan alat di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan kepesertaan aktif asuransi kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dengan Sarana Prasarana dan Alat (SPA) kesehatan sesuai standar	%	N/A	41,27	1.060.000.000	55,55	1.080.000.000	69,84	1.020.000.000	84,13	1.120.000.000	100	1.110.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Lanjutan
	Meningkatnya mutu, sarana, prasarana dan alat di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan kepesertaan aktif asuransi kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase kabupaten/kota dengan fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan terakreditasi paripurna	%	N/A	57,14	175.000.000	60	190.000.000	60	200.000.000	62,86	220.000.000	62,86	225.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Lanjutan
	Meningkatnya mutu, sarana, prasarana dan alat di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar dan kepesertaan aktif asuransi kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat memiliki asuransi kesehatan aktif	%	60	74,28	400.300.000.000	82,85	400.543.000.000	91,42	411.954.000.000	100	412.305.000.000	100	462.258.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Lanjutan
	Meningkatnya Standarisasi pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)	Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	80	85	47.300.000.000	88	47.850.000.000	92	48.400.000.000	95	48.950.000.000	96	49.500.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan
	Meningkatnya Standarisasi pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)	Persentase Fasilitas Kesehatan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	59,12	63,05	382.000.000	66,02	390.000.000	68,08	400.000.000	70,01	420.000.000	72,07	450.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan
	Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	Persentase Kabupaten/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	%	28,57	28,57	45.740.000	42,85	50.314.000	51,74	55.345.000	71,4	60.879.000	85,86	66.966.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	Persentase Kabupaten/Kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa yang melaksanakan skrining kesehatan jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50%	%	28,57	28,57	146.000.000	42,85	160.600.000	57,14	176.680.000	71,4	194.348.000	85,86	213.782.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	Persentase Kabupaten/Kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	%	14,28	28,57	146.070.000	42,85	160.619.000	57,14	176.680.000	71,4	194.148.000	86,86	213.782.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	Persentase Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa dengan Posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran	%	N/A	28,57	145.740.000	42,85	155.000.000	57,14	165.000.000	71,4	170.000.000	85,86	175.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	Persentase mutu layanan Balkesmas Wilayah Ambarawa sesuai standar	%	100	100	55.013.000.000	100	5.540.000.000	100	33.325.000.000	100	19.425.000.000	100	14.525.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	Persentase Kabupaten/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa	%	100	100	45.740.000	100	50.314.000	100	55.345.000	100	60.879.000	100	66.967.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
	Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Magelang	Persentase Kabupaten/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	%	28,57	28,57	75.000.000	42,85	150.000.000	57,14	200.000.000	57,14	200.000.000	57,14	250.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Magelang	Persentase kabupaten/kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang yang melaksanakan skrining Kesehatan Jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50%	%	57,14	71,42	125.000.000	71,42	150.000.000	85,71	200.000.000	85,71	225.000.000	85,71	250.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Magelang	Persentase Kabupaten Kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	%	14,28	28,57	100.000.000	28,57	150.000.000	42,85	150.000.000	57,14	200.000.000	71,42	250.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Magelang	Persentase Kabupaten/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	%	100	100	50.000.000	100	62.000.000	100	67.000.000	100	72.000.000	100	75.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Magelang	Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang sesuai standar	%	100	100	2.640.000.000	100	3.230.000.000	100	3.490.000.000	100	3.910.000.000	100	29.860.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Magelang	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang dengan Posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran	%	N/A	28,57	147.800.000	28,57	159.000.000	42,85	166.000.000	57,14	175.000.000	71,42	182.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
	Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Klaten	Presentase Kabupaten/Kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	%	N/A	28,57	75.000.000	42,86	100.000.000	57,14	125.000.000	57,14	125.000.000	71,42	150.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Klaten	Persentase kabupaten/kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten yang melaksanakan skrining Kesehatan jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50%	%	N/A	57,14	162.500.000	71,42	150.000.000	85,71	162.500.000	85,71	200.000.000	85,71	200.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Klaten	Persentase Kabupaten/Kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	%	N/A	28,57	162.500.000	28,57	150.000.000	42,86	162.500.000	42,86	200.000.000	57,14	200.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Klaten	Persentase Kabupatan/Kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan Kejadian Luar Biasa/Wabah serta penanganan Bencana <24 jam di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	%	100	100	50.000.000	100	62.000.000	100	67.000.000	100	72.000.000	100	75.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Klaten	Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten sesuai standar	%	N/A	60	6.080.000.000	65	6.700.000.000	70	7.925.000.000	75	12.650.000.000	80	14.825.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Klaten	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten dengan Posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran	%	N/A	71,42	149.700.000	71,42	159.000.000	85,71	169.000.000	85,71	175.000.000	85,71	186.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
	Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Pati	Persentase kabupaten/kota dengan penurunan kasus kematian ibu di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	%	10	20	40.000.000	25	50.000.000	30	60.000.000	35	70.000.000	40	80.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Pati	Persentase kabupaten/kota wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati yang melaksanakan skrining kesehatan jiwa dan Penyakit Tidak Menular (PTM) Prioritas dengan cakupan minimal 50%	%	28,57	28,57	175.000.000	28,57	188.000.000	28,57	191.000.000	42,8	192.500.000	42,8	192.500.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Pati	Persentase kabupaten/kota dengan Treatment Coverage (TC) dan Treatment Success Rate (TSR) >= 92% di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	%	28,57	28,57	175.000.000	28,57	188.000.000	28,57	191.000.000	42,8	192.500.000	42,8	192.500.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Pati	Persentase kabupaten/kota dengan respon cepat pengendalian dan pencegahan kejadian luar biasa/wabah serta penanganan bencana <24 jam di Wilayah Kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati	%	100	100	50.000.000	100	62.000.000	100	69.000.000	100	72.500.000	100	74.500.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Pati	Persentase mutu layanan Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati sesuai standar	%	100	100	7.000.000.000	100	97.800.000.000	100	93.400.000.000	100	144.692.647.000	100	159.300.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Meningkatnya mutu layanan; kualitas kesehatan ibu dan anak; menurunnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta dampak kesehatan akibat bencana di Wilayah kerja Balkesmas Pati	Persentase kabupaten/kota di wilayah kerja Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati dengan posyandu yang melakukan kunjungan rumah kepada minimal 50% sasaran	%	N/A	28,57	130.000.000	42,85	140.000.000	57,14	150.000.000	71,42	160.000.000	85,71	170.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
	Meningkatnya mutu layanan pengujian di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan serta Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 sesuai standar	Persentase Kabupaten/Kota dengan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 sesuai standar	%	14	54	725.000.000	68	725.000.000	82	725.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan
	Meningkatnya mutu layanan pengujian di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan serta Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat 2 sesuai standar	Persentase mutu layanan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan sesuai standar	%	70	72	29.295.000.000	73	6.810.000.000	78	7.570.000.000	83	8.305.000.000	83	9.340.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan
	Meningkatnya mutu layanan kalibrasi di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan	Persentase Kabupaten/Kota yang terlayani pelayanan laboratorium dan kalibrasi diBalai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan	%	20	25	5.000.000.000	25	4.500.000.000	30	4.000.000.000	30	3.600.000.000	35	3.600.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan
	Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD Dr.MOEWARDI	Persentase indikator mutu pelayanan medis yang memenuhi target di RSUD Dr. Moewardi	%	N/A	25	2.000.000	37	2.000.000	50	2.000.000	87	2.000.000	100	2.000.000	RSUD Dr. Moewardi - Sekretariat
	Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD Dr.MOEWARDI	Persentase indikator mutu pelayanan keperawatan yang memenuhi target di RSUD Dr. Moewardi	%	N/A	28	2.000.000	42	2.000.000	57	2.000.000	85	2.000.000	100	2.000.000	RSUD Dr. Moewardi - Sekretariat
	Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD Dr.MOEWARDI	Persentase penyediaan fasilitas, sarana dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan di RSUD Dr. Moewardi	%	100	90	2.000.000.000	90	2.000.000.000	90	2.000.000.000	90	2.000.000.000	90	2.000.000.000	RSUD Dr. Moewardi - Sekretariat
	Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD Dr.MOEWARDI	Persentase Penyediaan Prasarana, Obat dan BMHP untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan penunjang di RSUD Dr. Moewardi	%	N/A	90	1.010.000.000	90	1.010.000.000	90	1.010.000.000	90	1.010.000.000	90	1.010.000.000	RSUD Dr. Moewardi - Sekretariat
	Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD Dr.MOEWARDI	Persentase indikator mutu pelayanan penunjang medis dan penunjang prasarana sarana yang sesuai standar di RSUD Dr. Moewardi	%	N/A	33	4.000.000	50	4.000.000	67	4.000.000	83	4.000.000	100	4.000.000	RSUD Dr. Moewardi - Sekretariat

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD Dr.MOEWARDI	Persentase capaian kinerja pelayanan pendidikan dan penelitian yang terintegrasi dengan pelayanan rumah sakit di RSUD Dr. Moewardi	%	N/A	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000	RSUD Dr. Moewardi - Sekretariat
	Meningkatnya standarisasi pelayanan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	Persentase pemenuhan fasilitas prasarana, sarana, alat kesehatan, obat-BMHP untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan RS di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	N/A	75	9.155.000.000	80	105.000.000	85	105.000.000	90	105.000.000	95	105.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo - Sekretariat
	Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD dr. Adhyatma, MPH	Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%	100	100	15.413.440.000	100	17.363.440.000	100	19.363.440.000	100	21.363.440.000	100	23.363.440.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH - Sekretariat
	Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD dr. Adhyatma, MPH	Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan, prasarana dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%	100	100	62.591.284.000	100	63.599.300.000	100	59.050.392.000	100	53.936.825.000	100	60.167.192.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH - Sekretariat
	Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD dr. Adhyatma, MPH	Persentase penyediaan layanan dan penunjang layanan rumah sakit di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%	100	100	7.000.000.000	100	7.000.000.000	100	7.000.000.000	100	7.000.000.000	100	7.000.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH - Sekretariat
	Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD dr. Rehatta	Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSUD dr. REHATTA	%	100	100	8.366.908.000	100	7.116.231.000	100	5.167.000.000	100	4.171.000.000	100	11.175.000.000	RSUD dr. REHATTA - Sekretariat
	Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD dr. Rehatta	Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSUD dr. REHATTA	%	100	100	4.250.000.000	100	3.300.000.000	100	3.286.740.000	100	3.037.697.000	100	3.713.016.000	RSUD dr. REHATTA - Sekretariat
	Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSUD dr. Rehatta	Persentase penyediaan layanan dan penunjang layanan rumah sakit di RSUD dr. REHATTA	%	100	100	5.000.000.000	100	5.500.000.000	100	4.800.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	RSUD dr. REHATTA - Sekretariat
	Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	100	2.200.000.000	100	2.200.000.000	100	2.200.000.000	100	2.200.000.000	100	8.600.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo - Sekretariat
	Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Persentase Penyediaan Fasilitas Alat Kesehatan Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	6.000.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo - Sekretariat
	Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Persentase penyediaan layanan dan penunjang layanan RS di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	100	100	2.100.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	2.000.000.000	100	5.500.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo - Sekretariat
	Meningkatnya Standarisasi pelayanan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Persentase pasien jiwa bunuh diri di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	N/A	0	300.000.000	0	300.000.000	0	360.000.000	0	360.000.000	0	380.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo - Sekretariat
	Meningkatnya standarisasi pelayanan di RSJD Dr. Arif Zainudin	Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	100	100	6.748.968.000	100	1.000.000.000	100	50.000.000	100	25.000.000	100	50.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN - Sekretariat
	Meningkatnya standarisasi pelayanan di RSJD Dr. Arif Zainudin	Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan/Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	100	100	1.500.000.000	100	500.000.000	100	50.000.000	100	25.000.000	100	50.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN - Sekretariat
	Meningkatnya standarisasi pelayanan di RSJD Dr. Arif Zainudin	Persentase penyediaan layanan dan penunjang layanan rumah sakit di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	100	100	1.500.000.000	100	403.098.000	100	50.000.000	100	25.000.000	100	50.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN - Sekretariat
	Meningkatnya standarisasi pelayanan di RSJD Dr. Arif Zainudin	Persentase pasien bunuh diri di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	N/A	0	15.000.000	0	15.000.000	0	20.000.000	0	15.000.000	0	20.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN - Sekretariat
	Meningkatnya standarisasi pelayanan di RSJD Dr. Arif Zainudin	Persentase Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	N/A	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN - Sekretariat

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya standarisasi pelayanan di RSJD Dr. Arif Zainudin	Persentase pemenuhan pelayanan dan penunjang pelayanan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	95	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN - Sekretariat
	Meningkatnya Standarisasi Pelayanan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	100	14.000.000.000	100	9.000.000.000	100	15.000.000.000	100	12.000.000.000	100	8.000.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi - Sekretariat
	Meningkatnya Standarisasi Pelayanan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Persentase Penyediaan Fasilitas Alat Kesehatan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan untuk mendukung peningkatan layanan unggulan rumah sakit di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	100	829.673.000	100	920.351.000	100	6.154.340.000	100	6.570.054.000	100	6.762.965.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi - Sekretariat
	Meningkatnya Standarisasi Pelayanan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Persentase Penyediaan Layanan dan Penunjang Layanan RS di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	100	100	10.800.000.000	100	11.363.140.000	100	11.740.000.000	100	11.810.000.000	100	12.680.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi - Sekretariat
	Meningkatnya Standarisasi Pelayanan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Persentase Pasien Bunuh Diri di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	N/A	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi - Sekretariat
	Meningkatnya Standarisasi pelayanan di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	Persentase penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pelayanan unggulan dan layanan rumah sakit di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%	N/A	60	2.000.000.000	70	2.250.000.000	75	2.000.000.000	80	2.000.000.000	85	2.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam - Sekretariat
	Meningkatnya Standarisasi pelayanan di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	Persentase penyediaan fasilitas alat kesehatan/alat penunjang medik untuk mendukung layanan unggulan dan layanan rumah sakit di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%	N/A	60	22.900.000.000	70	30.200.000.000	75	31.070.000.000	80	31.125.000.000	85	32.500.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam - Sekretariat
	Meningkatnya Standarisasi pelayanan di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	Persentase pemenuhan layanan dan penunjang layanan Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam sesuai standar	%	N/A	100	6.200.000.000	100	7.200.000.000	100	7.500.000.000	100	7.562.000.000	100	8.100.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam - Sekretariat
	Meningkatnya Standarisasi pelayanan di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	Persentase capaian indikator mutu layanan Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%	N/A	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	100	3.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam - Sekretariat
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						**9.491.300.000**		**12.165.000.000**		**12.133.989.000**		**12.459.118.000**		**14.867.967.000**	
	Meningkatnya sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	2,84	2,85	876.300.000	2,85	940.000.000	2,86	995.500.000	2,86	1.051.000.000	2,87	1.106.500.000	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan
	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan pelatihan sesuai Program Prioritas Nasional di Bapelkes Provinsi	Persentase pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang teregestrasi dan berkualitas	%	98	99	2.700.000.000	99	3.225.000.000	99	3.250.000.000	99	3.775.000.000	99	4.300.000.000	Dinas Kesehatan - Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A
	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia kesehatan di RSUD Dr.MOEWARDI	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang meningkat kompetensinya di RSUD Dr. Moewardi	%	30	34	10.000.000	51	10.000.000	68	10.000.000	85	10.000.000	100	10.000.000	RSUD Dr. Moewardi - Sekretariat
	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang meningkat kompetensinya di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	N/A	65	450.000.000	70	30.000.000	75	30.000.000	80	30.000.000	85	30.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo - Sekretariat
	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia kesehatan di RSUD dr. Adhyatma, MPH	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang meningkat kompetensinya di RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%	34,88	86,95	1.000.000.000	87,12	1.000.000.000	87,32	1.000.000.000	87,51	1.000.000.000	87,75	1.000.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH - Sekretariat
	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia kesehatan di RSUD dr. Rehatta	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang meningkat kompetensinya di RSUD dr. REHATTA	%	30	40	100.000.000	45	105.000.000	50	110.000.000	55	115.000.000	60	120.000.000	RSUD dr. REHATTA - Sekretariat
	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang meningkat kompetensinya di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	20,67	86,72	325.000.000	86,76	325.000.000	86,8	375.000.000	87	375.000.000	87	425.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo - Sekretariat
	Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSJD Dr. Arif Zainudin	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang meningkat kompetensinya di RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	100	60	530.000.000	60	530.000.000	60	363.489.000	60	103.118.000	60	376.467.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN - Sekretariat
	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Meningkat Kompetensinya di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	98	98,5	500.000.000	98,5	500.000.000	99	500.000.000	99	500.000.000	99	500.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi - Sekretariat
	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Meningkat Kompetensinya di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%	N/A	30	3.000.000.000	40	5.500.000.000	50	5.500.000.000	60	5.500.000.000	70	7.000.000.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam - Sekretariat

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						**170.000.000**		**180.000.000**		**200.000.000**		**220.000.000**		**240.000.000**	
	Meningkatnya sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dalam rangka peningkatan standarisasi pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%	N/A	91	170.000.000	92	180.000.000	93	200.000.000	94	220.000.000	95	240.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Sumber Daya Kesehatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						**2.510.000.000**		**2.605.000.000**		**2.715.000.000**		**2.725.000.000**		**3.069.400.000**	
	Meningkatnya kabupaten/kota yang menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai Rumah Tangga Sehat	%	N/A	34,28	800.000.000	40	800.000.000	45,71	800.000.000	51,42	800.000.000	57,14	800.000.000	Dinas Kesehatan - Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas
	Meningkatnya Promosi dan Advokasi masyarakat di RSUD Dr.MOEWARDI	Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dan pemberdayaan dari RSUD Dr. Moewardi	%	90	3	10.000.000	3,5	10.000.000	4	10.000.000	4,5	10.000.000	5	10.000.000	RSUD Dr. Moewardi - Sekretariat
	Meningkatnya Promosi dan Advokasi masyarakat di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dan pemberdayaan dari RSUD Prof Dr Margono SoekarjoRSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	%	40	50	50.000.000	55	10.000.000	60	10.000.000	65	10.000.000	70	10.000.000	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo - Sekretariat
	Meningkatnya Promosi dan Advokasi masayarakat di RSUD dr. Adhyatma, MPH	Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dan pemberdayaan dari RSUD dr. ADHYATMA, MPH	%	100	5,24	250.000.000	5,43	250.000.000	5,58	250.000.000	5,69	250.000.000	5,77	250.000.000	RSUD dr. ADHYATMA, MPH - Sekretariat
	Meningkatnya Promosi dan Advokasi masayarakat di RSUD dr. Rehatta	Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dan pemberdayaan dari RSUD dr. REHATTA	%	100	31	180.000.000	32	190.000.000	33	200.000.000	34	210.000.000	35	220.000.000	RSUD dr. REHATTA - Sekretariat
	Meningkatnya Promosi dan Advokasi masyarakat di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Persentase peningkatan masyarakat penerima pemberdayaan dari RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	5	10	125.000.000	15	125.000.000	20	175.000.000	25	175.000.000	30	225.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo - Sekretariat
	Meningkatnya Promosi dan Advokasi masyarakat di RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dari RSJD Dr. Amino Gondohutomo	%	5	10	15.000.000	15	15.000.000	20	25.000.000	25	30.000.000	30	35.000.000	RSJD Dr. Amino Gondohutomo - Sekretariat
	Meningkatnya promosi dan advokasi masyarakat di RSJD Dr. Arif Zainudin	Persentase peningkatan masyarakat penerima pemberdayaan dari RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	100	100	50.000.000	100	60.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN - Sekretariat
	Meningkatnya promosi dan advokasi masyarakat di RSJD Dr. Arif Zainudin	Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dari RSJD dr. ARIF ZAINUDIN	%	100	100	130.000.000	100	145.000.000	100	125.000.000	100	65.000.000	100	125.000.000	RSJD dr. ARIF ZAINUDIN - Sekretariat
	Meningkatnya Promosi dan Advokasi Masyarakat di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Persentase peningkatan masyarakat penerima pemberdayaan dari RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	N/A	4,44	500.000.000	6,38	550.000.000	8	600.000.000	9,26	650.000.000	10	700.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi - Sekretariat
	Meningkatnya Promosi dan Advokasi Masyarakat di RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Persentase peningkatan masyarakat penerima promosi dari RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	%	N/A	5,58	100.000.000	5,74	100.000.000	5,91	100.000.000	5,96	100.000.000	6,07	100.000.000	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi - Sekretariat
	Meningkatnya Promosi dan Advokasi masyarakat di Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	Persentase kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat dari Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam	%	N/A	100	300.000.000	100	350.000.000	100	370.000.000	100	375.000.000	100	544.400.000	Rumah Sakit Mata Seopardjo Rustam - Sekretariat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**381.699.167.000**		**578.469.818.000**		**699.231.062.000**		922.240.760.000		1.100.877.270.000	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						**152.200.690.000**		**234.372.671.000**		**284.680.165.000**		**377.582.977.000**		**452.000.522.000**	
	Tercapainya Penyusunan Perencanaan Teknis dan Pengembangan SDA terhadap kebutuhan Konstruksi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Perencanaan Teknis dan Pengembangan Sumber Daya Air	%	N/A	100	7.790.800.000	100	7.571.160.000	100	13.486.007.000	100	17.665.000.000	100	18.419.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG BINA TEKNIK
	Meningkatnya Kondisi Baik Jaringan Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya	Persentase Embung dan Penampung Air Lainnya Kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik	%	64,31	66,07	4.750.000.000	66,33	4.642.651.000	66,58	6.250.000.000	66,83	14.534.427.000	67,09	15.275.625.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU
	Meningkatnya Kondisi Baik Jaringan Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya	Persentase Kondisi Baik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi	%	69,11	70,44	15.527.316.000	70,74	18.545.840.000	71,04	40.491.175.000	71,34	79.422.246.000	71,64	105.467.808.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU
	Meningkatnya Kondisi Baik Jaringan Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya	Kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya Kewenangan Provinsi	m3	2501470,78	2688058,55	5.825.000.000	2698058,55	5.825.000.000	2708058,55	5.825.000.000	2718058,55	20.866.250.000	2728058,55	20.909.563.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG IRIGASI DAN AIR BAKU
	Meningkatnya kondisi fisik sungai kewenangan provinsi dengan kategori baik	Persentase kondisi fisik sungai kewenangan provinsi dengan kategori baik	%	52,37	52,42	52.488.851.000	52,46	126.988.851.000	52,5	144.288.851.000	52,54	157.263.294.000	52,58	199.704.671.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG SUNGAI, BENDUNGAN DAN PANTAI
	Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	Angka	62,68	64,65	7.631.399.000	64,95	8.012.969.000	65,25	8.413.618.000	65,55	13.440.202.000	65,85	14.112.213.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	%	34,78	35,08	1.530.000.000	35,38	2.065.694.000	35,68	2.168.979.000	35,98	2.065.694.000	36,28	2.168.979.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
	Terjaganya kondisi sungai kewenangan Provinsi di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	Persentase kondisi baik sungai di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	%	53,26	53	5.408.928.000	53,04	5.679.375.000	53,08	5.963.344.000	53,12	11.753.438.000	53,16	12.341.110.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
	Tersedianya dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Pemali Comal	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Pemali Comal	%	100	100	3.880.986.000	100	4.075.036.000	100	4.278.788.000	100	4.492.728.000	100	4.717.365.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
	Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	Angka	67,33	68,4	11.401.789.000	68,7	11.971.879.000	69	12.570.473.000	69,3	13.198.997.000	69,6	13.858.947.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
	Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	%	52,3	56,98	1.668.020.000	57,14	2.386.151.000	57,3	2.505.459.000	57,49	2.386.151.000	57,62	2.505.459.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
	Terjaganya kondisi sungai kewenangan Provinsi di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	Persentase kondisi baik sungai di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	%	50,04	50,14	3.399.819.000	50,18	4.114.057.000	50,2	4.319.760.000	50,22	4.666.263.000	50,24	4.899.576.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
	Tersedianya dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Jratun Seluna	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Jratun Seluna	%	100	100	4.360.792.000	100	4.578.832.000	100	4.807.774.000	100	5.048.163.000	100	5.300.572.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA
	Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	Angka	67,35	68,99	8.596.296.000	69,29	9.026.111.000	69,56	9.477.417.000	69,89	9.954.925.000	70,19	10.452.672.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO
	Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	%	77,78	78,08	1.335.881.000	78,38	1.469.469.000	78,68	1.542.943.000	78,98	1.620.091.000	79,28	1.701.096.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO
	Tersedianya dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Bengawan Solo	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Bengawan Solo	%	100	100	2.422.500.000	100	2.543.625.000	100	2.670.807.000	100	2.804.348.000	100	2.944.566.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO
	Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	Indeks Kinerja Sistem Irigasi di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	Angka	72,65	73,45	9.868.000.000	73,75	10.361.400.000	74,05	10.879.470.000	74,35	11.423.444.000	74,65	11.994.617.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO
	Terjaganya Kinerja Sistem Irigasi dan kapasitas tampungan air pada embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	%	76,5	76,5	873.103.000	77,1	901.300.000	77,4	946.365.000	77,7	993.684.000	78	1.043.369.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO
	Tersedianya dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Serayu Bogowonto	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan sumber daya air di BPSDA Serayu Bogowonto	%	100	100	3.441.210.000	100	3.613.271.000	100	3.793.935.000	100	3.983.632.000	100	4.182.814.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						**8.660.675.000**		**33.696.625.000**		**41.535.320.000**		**67.527.015.000**		**108.498.635.000**	
	Meningkatnya kapasitas akses air minum	Persentase Kapasitas Yang Dapat Terlayani Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota Terhadap Kebutuhan Pemenuhan Kapasitas Yang Memerlukan Pelayanan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	N/A	100	1.197.000.000	100	21.871.250.000	100	26.127.120.000	100	48.535.990.000	100	89.507.610.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA
	Meningkatnya kapasitas akses air minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan	%	26,59	31,02	6.963.675.000	33,24	11.325.375.000	35,47	14.908.200.000	37,69	18.491.025.000	39,92	18.491.025.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA
	Meningkatnya kapasitas akses air minum	Persentase Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	N/A	42,6	500.000.000	45,73	500.000.000	48,87	500.000.000	52	500.000.000	55,13	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						**105.000.000**		**252.748.000**		**252.748.000**		**303.942.000**		-	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Terselenggaranya Sistem dan Pengelolaan Sampah Regional	Persentase Sarana Prasarana (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS) yang terbangun	%	N/A	100	105.000.000	100	252.748.000	100	252.748.000	100	303.942.000	100	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						**1.060.000.000**		**1.060.000.000**		**1.060.000.000**		**33.983.712.000**		**7.363.928.000**	
	Meningkatnya kapasitas akses air limbah domestik	Persentase Rumah Tangga yang dapat terlayani IPLT lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan Rumah Tangga di area pelayanan IPLT lintas kabupaten/kota	%	N/A	0	-	0	-	0	-	11,43	32.661.212.000	23	6.303.928.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA
	Meningkatnya kapasitas akses air limbah domestik	Persentase Kelompok Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terhadap kebutuhan pembinaan dan pemberdayaan	%	N/A	100	1.060.000.000	100	1.060.000.000	100	1.060.000.000	100	1.322.500.000	100	1.060.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						**730.000.000**		**41.524.980.000**		**480.000.000**		**32.823.318.000**		**123.999.567.000**	
	Terlaksananya Penataan Bangunan Gedung	Persentase Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis	%	N/A	6,41	730.000.000	7,96	41.524.980.000	4,76	480.000.000	5,63	32.823.318.000	3,4	123.999.567.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						**207.138.702.000**		**255.635.094.000**		**358.848.779.000**		**397.463.496.000**		**396.081.118.000**	
	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase pengawasan teknis yang mendukung penyelenggaraan jalan	%	N/A	100	1.419.272.000	100	1.744.600.000	100	2.316.593.000	100	2.875.067.000	100	3.538.943.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG BINA MARGA
	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor	Km	N/A	1176,63	10.050.000.000	1180,63	40.200.000.000	1188,63	136.680.000.000	1197,23	167.232.000.000	1208,73	174.395.037.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG BINA MARGA
	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Capaian Penyusunan Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	%	N/A	100	5.075.000.000	100	5.450.000.000	100	6.450.000.000	100	5.950.000.000	100	4.950.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG BINA TEKNIK
	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jalan yang Dileger	%	N/A	59,76	120.000.000	60,88	110.000.000	62,33	120.000.000	63,88	125.000.000	65,25	115.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG BINA TEKNIK
	Terpenuhinya ketersediaan peralatan alat berat pendukung kegiatan perangkat daerah yang disediakan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Peralatan	%	N/A	99,81	4.589.888.000	100	9.355.003.000	100	8.060.645.000	100	7.693.887.000	100	9.103.696.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT
	Terpenuhinya jumlah sertifikat hasil uji mutu konstruksi dalam satu tahun terhadap jumlah kumulatif sertifikat hasil uji tahun rencana	Persentase Pengendalian Mutu Pelaksanaan Jasa Konstruksi	%	N/A	19,67	8.573.000.000	39,61	9.003.000.000	59,7	9.454.000.000	79,78	9.930.000.000	100	4.220.900.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGUJIAN KONSTRUKSI DAN PENGELOLAAN ALAT BERAT
	Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	%	93,31	94,62	1.503.193.000	94,79	3.513.193.000	94,95	5.523.193.000	95,12	11.553.193.000	95,28	3.513.193.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLA AN JALAN WILAYAH SEMARANG
	Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dengan Nilai Keratаan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang	%	N/A	64,26	19.324.200.000	64,42	19.264.200.000	64,59	19.204.200.000	64,75	19.024.200.000	64,92	19.264.200.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLA AN JALAN WILAYAH SEMARANG
	Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	%	88,11	91,23	3.437.696.000	91,43	3.437.696.000	91,63	5.447.696.000	91,83	5.447.696.000	92,03	5.447.696.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PATI
	Terjaganya jalan provinsi dengan nilai keratаan jalan mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Keratаan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati	%	N/A	69,73	15.885.600.000	69,93	15.885.600.000	70,13	15.825.600.000	70,33	15.825.600.000	70,53	15.825.600.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PATI
	Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	%	89,6	90,74	5.132.253.000	90,87	7.882.203.000	91	6.137.253.000	91,13	6.137.253.000	91,26	8.147.253.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PURWODADI
	Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Keratаan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi	%	N/A	50,21	24.040.400.000	50,34	24.001.400.000	50,47	23.941.400.000	50,6	24.031.400.000	50,73	23.971.400.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PURWODADI
	Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	%	91,57	92,01	4.851.995.000	92,13	4.851.994.000	92,25	6.861.994.000	92,37	6.861.995.000	92,49	6.861.995.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH SURAKARTA

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Keratаan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta	%	N/A	65,3	25.866.600.000	65,42	25.866.600.000	65,54	25.806.600.000	65,66	25.806.600.000	65,78	25.806.600.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH SURAKARTA
	Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	%	92,29	93,98	1.244.760.000	94,17	3.254.760.000	94,36	3.254.760.000	94,36	3.254.760.000	94,55	3.254.760.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH MAGELANG
	Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Keratаan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang	%	N/A	73,21	17.064.800.000	73,4	17.004.800.000	73,59	17.004.800.000	73,59	17.004.800.000	73,78	17.004.800.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH MAGELANG
	Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	%	92,5	93,71	1.002.610.000	93,91	3.012.610.000	94,11	5.022.610.000	94,32	3.012.610.000	94,52	5.022.610.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH WONOSOBO
	Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Keratаan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo	%	N/A	58,71	16.313.600.000	58,91	16.253.600.000	59,12	16.193.600.000	59,32	16.253.600.000	59,52	16.193.600.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH WONOSOBO
	Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	%	91,86	94,89	2.079.746.000	95,13	4.089.746.000	95,37	4.089.746.000	95,62	6.099.746.000	95,86	6.099.746.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
	Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Keratаan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap	%	N/A	74,93	13.243.400.000	75,17	13.183.400.000	75,41	13.183.400.000	75,65	13.123.400.000	76,9	13.123.400.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH CILACAP
	Terjaganya Kondisi Permukaan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	%	93,65	94,9	2.363.089.000	95,04	4.373.089.000	95,17	4.373.089.000	95,3	6.383.089.000	95,44	6.383.089.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL
	Terjaganya jalan provinsi dengan nilai Keratаan jalan mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Keratаan Jalan Mantap di Wilayah Kerja Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal	%	N/A	58,71	23.957.600.000	58,84	23.897.600.000	58,97	23.897.600.000	59,1	23.837.600.000	59,24	23.837.600.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH TEGAL
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						**4.994.100.000**		**5.317.700.000**		**5.764.050.000**		**5.946.300.000**		**6.323.500.000**	
	Terselenggaranya Fasilitasi Bidang Jasa Konstruksi	Persentase Fasilitasi Bidang Jasa Konstruksi	%	N/A	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG CIPTA KARYA
	Terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Tersertifikasi	%	N/A	51,45	4.794.100.000	51,82	5.117.700.000	52,12	5.564.050.000	52,33	5.746.300.000	52,48	6.123.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI JASA KONSTRUKSI
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						**6.810.000.000**		**6.610.000.000**		**6.610.000.000**		**6.610.000.000**		**6.610.000.000**	
	Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Tata Ruang	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang	%	55	75	2.100.000.000	85	1.400.000.000	90	1.400.000.000	95	1.400.000.000	100	1.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG PENATAAN RUANG
	Meningkatnya Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Ruang	%	100	100	440.000.000	100	440.000.000	100	440.000.000	100	440.000.000	100	440.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG PENATAAN RUANG
	Meningkatnya Pelaksanaan Sinkronisasi Program	Persentase Pelaksanaan Sinkronisasi Program	%	28	58,86	620.000.000	64,86	620.000.000	70,86	620.000.000	76,86	620.000.000	82,86	620.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG PENATAAN RUANG
	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penataan Ruang	%	17	77	700.000.000	80	700.000.000	83	700.000.000	86	700.000.000	89	700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG PENATAAN RUANG
	Meningkatnya Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	%	31	41	1.200.000.000	46	1.700.000.000	54	1.700.000.000	59	1.700.000.000	63	1.700.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG PENATAAN RUANG
	Meningkatnya Fasilitasi RTR Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi RTR Kabupaten/Kota	%	70,71	45,34	1.250.000.000	53,7	1.250.000.000	62,06	1.250.000.000	70,42	1.250.000.000	77,17	1.250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BIDANG PENATAAN RUANG
	Meningkatnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kerja BPSDA Pemali Comal	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Pemali Comal	%	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PEMALI COMAL
	Meningkatnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kerja BPSDA Jratun Seluna	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Jratun Seluna	%	100	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR JRATUN SELUNA

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kerja BPSDA Bengawan Solo	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Bengawan Solo	%	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BENGAWAN SOLO
	Meningkatnya pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kerja BPSDA Serayu Bogowonto	Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah BPSDA Serayu Bogowonto	%	100	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SERAYU BOGOWONTO
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						**29.557.000.000**		**30.067.000.000**		**31.493.600.000**		32.621.000.000		34.716.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						**21.342.000.000**		**21.754.000.000**		**22.788.000.000**		**23.551.000.000**		**25.330.000.000**	
	Tertanganinya Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Miskin	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	%	4,2	20,3	12.142.000.000	27,02	12.144.000.000	33,74	12.068.000.000	40,48	13.401.000.000	47,18	13.470.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan
	Tersedianya Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin	Persentase Rumah Layak Huni yang disediakan	%	0,48	0,69	9.200.000.000	0,97	9.610.000.000	1,28	10.720.000.000	1,57	10.150.000.000	1,91	11.860.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perumahan
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						**4.915.000.000**		**4.917.000.000**		**5.143.000.000**		**5.340.000.000**		**5.517.000.000**	
	Tertangannya Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	%	35,87	14,9	3.990.000.000	27,32	4.107.000.000	39,73	4.293.000.000	52,15	4.470.000.000	64,56	4.630.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman
	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	N/A	100	925.000.000	100	810.000.000	100	850.000.000	100	870.000.000	100	887.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						**2.900.000.000**		**2.984.000.000**		**3.130.000.000**		**3.270.000.000**		**3.386.000.000**	
	Terlaksananya Pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman	Persentase Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman yang disediakan	%	40	16,92	2.900.000.000	35,38	2.984.000.000	55,38	3.130.000.000	76,92	3.270.000.000	100	3.386.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Kawasan Permukiman
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						**400.000.000**		**412.000.000**		**432.600.000**		**460.000.000**		**483.000.000**	
	Terlaksananya Pembinaan kepada Orang/ Badan Hukum dalam rangka Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Orang/ Badan Hukum yang Mendapatkan Pembinaan	%	100	6,84	400.000.000	10,04	412.000.000	13,24	432.600.000	16,43	460.000.000	19,63	483.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						**10.225.000.000**		**11.925.000.000**		**11.975.000.000**		12.410.000.000		12.875.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						**5.000.000.000**		**5.550.000.000**		**5.550.000.000**		**5.550.000.000**		**5.550.000.000**	
	Meningkatnya pengendalian Tibumtranmas di 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah	Persentase Pengendalian Tibumtranmas	%	N/A	80,71	1.500.000.000	82,14	1.700.000.000	83,57	1.700.000.000	85	1.700.000.000	86,43	1.700.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja - Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	Meningkatnya penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah	%	N/A	85,71	2.500.000.000	85,71	2.700.000.000	92,86	2.700.000.000	92,86	2.700.000.000	100	2.700.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja - Bidang Penegakan Hukum Daerah
	Meningkatnya Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas	Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas berkategori baik	%	N/A	8,57	1.000.000.000	8,57	1.150.000.000	11,43	1.150.000.000	14,29	1.150.000.000	17,14	1.150.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja - Bidang Pelindungan Masyarakat
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						**4.325.000.000**		**5.375.000.000**		**5.425.000.000**		**5.860.000.000**		**6.325.000.000**	
	Meningkatnya kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	Persentase wilayah rawan bencana yang ditingkatkan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana	%	N/A	6,3	2.025.000.000	9,6	2.500.000.000	13,4	2.500.000.000	17,2	2.700.000.000	20,6	2.700.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	Meningkatnya kapasitas sistem informasi dan data kebencanaaan	Persentase data kejadian bencana yang terverifikasi dalam waktu kurang dari 24 jam	%	N/A	90	325.000.000	92	350.000.000	94	375.000.000	96	435.000.000	100	425.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Pengendalian Operasi dan Pengelolaan Data Informasi

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota dalam pemulihan pasca bencana	Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan provinsi dalam pemulihan pasca bencana	%	N/A	100	275.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	325.000.000	100	350.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	Meningkatkan kapasitas kabupaten/kota dalam penanganan bencana	Persentase kabupaten/kota yang mendapat pendampingan provinsi dalam penanganan bencana	%	2,85	100	1.700.000.000	100	2.225.000.000	100	2.250.000.000	100	2.400.000.000	100	2.850.000.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Bidang Penanganan Darurat dan Logistik
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						**900.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**		**1.000.000.000**	
	Meningkatnya Kabupaten/Kota yang melaksanakan penanganan kebakaran sesuai SPM	Persantase Kabupaten/Kota yang melaksanakan penanganan kebakaran sesuai SPM	%	N/A	29	900.000.000	43	1.000.000.000	57	1.000.000.000	71	1.000.000.000	86	1.000.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja - Bidang Penanganan Kebakaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						**207.078.280.000**		**213.228.280.000**		**217.533.280.000**		229.462.530.000		234.264.655.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						**11.907.948.000**		**11.907.948.000**		**11.907.948.000**		**11.907.948.000**		**11.907.948.000**	
	Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas bagi PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial	%	N/A	8,88	11.907.948.000	8,88	11.907.948.000	8,88	11.907.948.000	8,88	11.907.948.000	8,88	11.907.948.000	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**		**200.000.000**	
	Terfasilitasinya penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang mendapatkan penanganan	%	N/A	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						**83.439.457.000**		**83.439.457.000**		**83.439.457.000**		**85.063.707.000**		**86.175.832.000**	
	Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar PPKS dalam panti	%	N/A	100	9.921.250.000	100	9.921.250.000	100	9.921.250.000	100	11.545.500.000	100	12.657.625.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
	Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo	%	N/A	100	4.833.280.000	100	4.833.280.000	100	4.833.280.000	100	4.833.280.000	100	4.833.280.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Utomo
	Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu	%	N/A	100	4.906.576.000	100	4.906.576.000	100	4.906.576.000	100	4.906.576.000	100	4.906.576.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Ngudi Rahayu
	Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Turusgede	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Turusgede	%	N/A	100	2.367.920.000	100	2.367.920.000	100	2.367.920.000	100	2.367.920.000	100	2.367.920.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Turusgede
	Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo	%	N/A	100	2.800.180.000	100	2.800.180.000	100	2.800.180.000	100	2.800.180.000	100	2.800.180.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pangrukti Mulyo
	Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Pendowo	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Pendowo	%	N/A	100	1.638.031.000	100	1.638.031.000	100	1.638.031.000	100	1.638.031.000	100	1.638.031.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Pendowo
	Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Potroyudan	%	N/A	100	2.772.500.000	100	2.772.500.000	100	2.772.500.000	100	2.772.500.000	100	2.772.500.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Potroyudan
	Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama	%	N/A	100	3.781.050.000	100	3.781.050.000	100	3.781.050.000	100	3.781.050.000	100	3.781.050.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Wanodyatama
	Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha	%	N/A	100	4.208.624.000	100	4.208.624.000	100	4.208.624.000	100	4.208.624.000	100	4.208.624.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Taruna Yodha
	Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera	%	N/A	100	2.734.054.000	100	2.734.054.000	100	2.734.054.000	100	2.734.054.000	100	2.734.054.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dharma Putera
	Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo	%	N/A	100	2.593.760.000	100	2.593.760.000	100	2.593.760.000	100	2.593.760.000	100	2.593.760.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Adi Yuswo

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Dewanata	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Dewanata	%	N/A	100	4.976.992.000	100	4.976.992.000	100	4.976.992.000	100	4.976.992.000	100	4.976.992.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Dewanata
	Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Raharjo	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Raharjo	%	N/A	100	4.728.466.000	100	4.728.466.000	100	4.728.466.000	100	4.728.466.000	100	4.728.466.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Raharjo
	Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti	%	N/A	100	3.564.326.000	100	3.564.326.000	100	3.564.326.000	100	3.564.326.000	100	3.564.326.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Samekto Karti
	Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata	%	N/A	100	4.145.860.000	100	4.145.860.000	100	4.145.860.000	100	4.145.860.000	100	4.145.860.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Bojong Bata
	Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Penganthi	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosia di Panti Pelayanan Sosial Penganthi	%	N/A	100	3.314.470.000	100	3.314.470.000	100	3.314.470.000	100	3.314.470.000	100	3.314.470.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Penganthi
	Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo	%	N/A	100	4.186.454.000	100	4.186.454.000	100	4.186.454.000	100	4.186.454.000	100	4.186.454.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
	Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra	%	N/A	100	3.441.864.000	100	3.441.864.000	100	3.441.864.000	100	3.441.864.000	100	3.441.864.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Kasih Mesra
	Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo	%	N/A	100	4.191.720.000	100	4.191.720.000	100	4.191.720.000	100	4.191.720.000	100	4.191.720.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Suko Mulyo
	Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso	%	N/A	100	6.301.750.000	100	6.301.750.000	100	6.301.750.000	100	6.301.750.000	100	6.301.750.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso
	Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti sesuai SPM Bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	Persentase PPKS dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sesuai SPM bidang Sosial di Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono	%	N/A	100	2.030.330.000	100	2.030.330.000	100	2.030.330.000	100	2.030.330.000	100	2.030.330.000	Dinas Sosial - Panti Pelayanan Sosial Mardi Yuwono
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						**104.700.000.000**		**110.850.000.000**		**115.155.000.000**		**125.460.000.000**		**129.150.000.000**	
	Terfasilitasinya penerbitan rekomendasi pengangkatan anak yang diterbitkan	Persentase rekomendasi Pengangkatan Anak yang diterbitkan atas Pengajuan Pengangkatan Anak	%	N/A	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	Dinas Sosial - Bidang Rehabilitasi Sosial
	Terselenggarannya jaminan sosial bagi PPKS yang layak dan tepat sasaran	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) penerima pelayanan jaminan sosial	%	N/A	100	62.700.000.000	100	68.850.000.000	100	73.155.000.000	100	77.460.000.000	100	81.150.000.000	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Meningkatnya kemampuan PPKS Fakir Miskin dalam memenuhi kebutuhannya	Persentase PPKS Fakir miskin yang mendapatkan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	%	N/A	0,27	41.700.000.000	0,27	41.700.000.000	0,27	41.700.000.000	0,27	47.700.000.000	0,27	47.700.000.000	Dinas Sosial - Bidang Penanganan Fakir Miskin
PROGRAM PENANGANAN BENCANA						**6.510.875.000**		**6.510.875.000**		**6.510.875.000**		**6.510.875.000**		**6.510.875.000**	
	Terselenggaranya perlindungan sosial bagi korban bencana sesuai standar SPM bidang sosial	Persentase Perlindungan sosial bagi korban bencana sesuai SPM Bidang Sosial	%	N/A	100	6.510.875.000	100	6.510.875.000	100	6.510.875.000	100	6.510.875.000	100	6.510.875.000	Dinas Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						**320.000.000**		**320.000.000**		**320.000.000**		**320.000.000**		**320.000.000**	
	Taman makam pahlawan terkelola dengan baik	Persentase Taman makam pahlawan terkelola	%	100	100	320.000.000	100	320.000.000	100	320.000.000	100	320.000.000	100	320.000.000	Dinas Sosial - Bidang Pemberdayaan Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						**449.594.990.704**		**497.583.268.436**		**565.193.932.900**		**611.355.719.412**		**730.730.290.281**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						**14.486.837.000**		**14.740.631.000**		**15.042.983.000**		18.859.795.000		35.035.904.000	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA						**246.740.000**		**246.740.000**		**246.740.000**		**256.610.000**		**282.273.000**	
	Meningkatnya Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah	%	62,85	85,71	246.740.000	91,42	246.740.000	94,28	246.740.000	97,14	256.610.000	100	282.273.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Sekretariat
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						**9.469.888.000**		**9.547.910.000**		**9.787.662.000**		**13.090.902.000**		**27.701.109.000**	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya pencari Kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Persentase pencari Kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	%	8,36	9,28	424.346.000	9,34	425.832.000	9,66	427.324.000	10	770.057.000	10,67	847.064.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Meningkatnya lembaga pelatihan yang terakreditasi	Persentase lembaga pelatihan yang terakreditasi	%	14	14,29	108.505.000	15,56	108.885.000	16	109.267.000	17,31	170.194.000	17,78	187.214.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Meningkatnya perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	Persentase perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	%	62,2	68	747.043.000	70	749.648.000	71,85	749.648.000	72,26	894.312.000	73,64	983.744.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Meningkatnya pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi dibidang industri	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi dibidang industri di Balai Latihan Kerja Industri	%	70	83,68	1.559.283.000	83,87	1.942.796.000	84,05	2.717.155.000	84,21	3.615.306.000	84,36	7.451.729.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Industri Kelas A
	Meningkatnya pencari kerja yang memiliki sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi dibidang pertanian	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikasi pelatihan berbasis kompetensi dibidang pertanian di Balai Latihan Kerja Pertanian	%	9	10	2.667.870.000	10,67	1.659.060.000	11,2	1.905.103.000	12,27	2.511.980.000	12,67	7.851.245.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
	Meningkatnya tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan	Persentase tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas dan atau kewirausahaan di Balai Pengembangan Produktivitas	%	70	73	1.778.391.000	74	1.457.285.000	75	1.634.170.000	76	2.161.562.000	76	4.374.726.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Pengembangan Produktivitas Kelas A
	Meningkatnya pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa dan pekerjaan migran	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa dan pekerjaan migran di Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata	%	21	23,38	2.184.450.000	23,7	3.204.404.000	24	2.244.995.000	24,28	2.967.491.000	25,38	6.005.387.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Jasa dan Pariwisata Kelas A
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						**1.645.081.000**		**1.710.571.000**		**1.762.502.000**		**1.884.347.000**		**2.061.787.000**	
	Meningkatnya penciptaan lapangan kerja di sektor formal	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	40,36	44,05	876.290.000	46,1	929.360.000	48,15	967.862.000	50,2	1.050.878.000	52,25	1.155.969.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatnya tenaga kerja baru di sektor informal	Persentase penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal	%	68,1	68,5	596.003.000	68,77	598.091.000	69,03	600.187.000	69,39	624.197.000	70,01	686.618.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatnya penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal	%	14,24	21,75	78.000.000	23,5	88.000.000	25,25	99.000.000	27	110.000.000	28,75	110.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatnya pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	Pesentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	61,6	67,71	94.788.000	68,52	95.120.000	69,34	95.453.000	70,15	99.272.000	70,47	109.200.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						**1.191.461.000**		**1.294.973.000**		**1.298.848.000**		**1.372.306.000**		**1.509.540.000**	
	Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	38,59	51,03	173.250.000	53,64	173.858.000	56,38	174.468.000	59,26	181.448.000	62,4	199.593.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
	Meningkatnya LKS Bipartit yang terbentuk	Persentase LKS Bipartit yang terbentuk	%	49,75	49,8	496.868.000	51,13	498.608.000	5,59	500.355.000	52,06	520.371.000	52,53	572.409.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
	Meningkatnya perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	%	8,35	43,26	332.139.000	43,39	433.303.000	43,52	434.821.000	43,65	462.362.000	43,77	508.600.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
	Meningkatnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	96,15	96,75	189.204.000	96,79	189.204.000	96,84	189.204.000	96,88	208.125.000	96,91	228.938.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN						**1.933.667.000**		**1.940.437.000**		**1.947.231.000**		**2.255.630.000**		**3.481.195.000**	
	Menurunnya pelanggaran norma ketenagakerjaan	Persentase kejadian pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	81,53	80,8	1.469.705.000	80,67	1.474.851.000	80,53	1.480.015.000	80,27	1.596.625.000	80	1.756.289.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
	Meningkatnya perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	Persentase perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	%	26,41	27,06	463.962.000	27,49	465.586.000	27,91	467.216.000	28,32	659.005.000	28,74	1.724.906.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**3.595.441.000**		**3.745.000.000**		**3.972.000.000**		7.460.000.000		7.825.000.000	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						**1.085.000.000**		**1.140.000.000**		**1.256.000.000**		**2.310.000.000**		**2.360.000.000**	
	Meningkatnya Anggaran Responsif Gender di Provinsi	Persentase Anggaran Responsif Gender di Perangkat Daerah Provinsi	%	10,37	12	45.000.000	13	50.000.000	14	56.000.000	15	490.000.000	16	510.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
	Meningkatnya Kapasitas Perempuan di Bidang Ekonomi	Persentase Perempuan yang difasilitasi pelatihan menjadi wirausaha	%	80	80	1.040.000.000	90	1.090.000.000	90	1.200.000.000	90	1.820.000.000	90	1.850.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						**1.458.140.000**		**1.518.000.000**		**1.585.000.000**		**2.720.000.000**		**2.781.600.000**	
	Meningkatnya jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan di tingkat Kabupaten/Kota sesuai standar	Persentase UPTD PPA kabupaten/kota sesuai standar layanan	%	14	85	1.306.000.000	95	1.352.000.000	100	1.408.000.000	100	2.410.000.000	100	2.500.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
	Meningkatnya pelayanan korban kekerasan perempuan secara komprehensif	Persentase korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	152.140.000	100	166.000.000	100	177.000.000	100	310.000.000	100	281.600.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						**94.000.000**		**97.000.000**		**100.000.000**		**320.000.000**		**370.000.000**	
	Meningkatnya komitmen Kabupaten/Kota dalam pembangunan ketahanan keluarga	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan terkait ketahanan keluarga	%	10	20	33.000.000	25	34.000.000	30	35.000.000	35	100.000.000	40	120.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
	Meningkatnya kualitas lembaga Layanan Keluarga yang responsif gender dan hak anak di Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan keluarga yang terlatih	%	4,25	24	61.000.000	34	63.000.000	44	65.000.000	54	220.000.000	64	250.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						**601.301.000**		**606.000.000**		**611.000.000**		**1.015.000.000**		**1.070.000.000**	
	Meningkatnya kualitas Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	Angka	60,76	61,5	601.301.000	62	606.000.000	62,5	611.000.000	63	1.015.000.000	63,5	1.070.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						**357.000.000**		**384.000.000**		**420.000.000**		**1.095.000.000**		**1.243.400.000**	
	Meningkatnya kualitas perlindungan khusus anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Angka	77,86	79	207.000.000	79,4	226.000.000	79,9	253.000.000	80,5	825.000.000	81	945.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya pelayanan korban kekerasan anak secara komprehensif	Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100	150.000.000	100	158.000.000	100	167.000.000	100	270.000.000	100	298.400.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						**47.438.420.000**		**39.817.670.000**		**39.917.670.000**		40.717.670.000		56.307.420.000	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						**24.882.500.000**		**28.132.500.000**		**28.232.500.000**		**29.032.500.000**		**39.017.500.000**	
	Tercapaianya rata-rata angka ketersediaan pangan	Rata-rata Ketersediaan Pangan	Angka	2	1,21	200.000.000	1,22	200.000.000	1,23	200.000.000	1,24	200.000.000	1,25	200.000.000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
	Terjaganya cadangan pangan pemerintah daerah sesuai regulasi	Rasio Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD)	Angka	0,65	0,47	6.000.000.000	0,48	8.000.000.000	0,49	8.000.000.000	0,5	8.000.000.000	0,51	12.000.000.000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
	Terwujudnya Harga Efektif komoditas pangan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku	Persentase komoditas pangan strategis dengan harga efektif sesuai ketentuan yang berlaku	%	84	62,5	14.190.000.000	65	15.440.000.000	67,5	15.490.000.000	70	16.290.000.000	72,5	21.050.000.000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
	Menurunnya Angka Konsumsi Beras di Provinsi Jawa Tengah	Angka konsumsi beras Provinsi Jawa Tengah	kg/kapita/tahun	87,8	87,3	4.492.500.000	87	4.492.500.000	86,6	4.542.500.000	86,3	4.542.500.000	86	5.767.500.000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						**7.650.000.000**		**7.650.000.000**		**7.650.000.000**		**7.650.000.000**		**10.638.000.000**	
	Menurunnya daerah rawan pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan	%	N/A	14,6	7.650.000.000	13,6	7.650.000.000	12,6	7.650.000.000	11,6	7.650.000.000	11	10.638.000.000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						**14.905.920.000**		**4.035.170.000**		**4.035.170.000**		**4.035.170.000**		**6.651.920.000**	
	Meningkatnya pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	N/A	90,1	3.155.920.000	90,2	2.635.170.000	90,3	2.635.170.000	90,4	2.635.170.000	90,5	5.251.920.000	Dinas Ketahanan Pangan - Bidang Keamanan Pangan
	Terjaminnya pangan segar asal tumbuhan melalui sertifikasi dan registrasi	Persentase Capaian Tertimbang Regristasi dan Sertifikasi Pangan Segar	%	N/A	40	11.750.000.000	40	1.400.000.000	40	1.400.000.000	40	1.400.000.000	40	1.400.000.000	Dinas Ketahanan Pangan - Balai Mutu dan Sertifikasi Pangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						**1.600.000.000**		**1.656.000.000**		**1.716.000.000**		1.802.000.000		1.869.000.000	
PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM						**400.000.000**		**410.000.000**		**430.000.000**		**450.000.000**		**470.000.000**	
	Terfasilitasinya Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase Fasilitasi Penetapan Lokasi	%	100	100	400.000.000	100	410.000.000	100	430.000.000	100	450.000.000	100	470.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						**630.000.000**		**650.000.000**		**674.000.000**		**720.000.000**		**745.000.000**	
	Terfasilitasinya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	%	100	100	630.000.000	100	650.000.000	100	674.000.000	100	720.000.000	100	745.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE						**570.000.000**		**596.000.000**		**612.000.000**		**632.000.000**		**654.000.000**	
	Terfasilitasinya Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	Persentase Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria	%	100	100	570.000.000	100	596.000.000	100	612.000.000	100	632.000.000	100	654.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - Bidang Pertanahan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						**7.355.000.000**		**9.118.280.000**		**35.093.000.000**		39.865.000.000		46.480.000.000	
PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP						**660.000.000**		**800.000.000**		**1.120.000.000**		**1.415.000.000**		**1.702.000.000**	
	Meningkatnya integrasi dokumen perencanaan lingkungan hidup ke dalam dokumen perencanaan	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan	%	100	100	660.000.000	100	800.000.000	100	1.120.000.000	100	1.415.000.000	100	1.702.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						**2.820.000.000**		**3.668.280.000**		**5.170.000.000**		**6.200.000.000**		**8.128.000.000**	
	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	%	4,76	4,76	400.000.000	4,76	468.280.000	4,76	470.000.000	4,76	600.000.000	4,76	750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Menurunnya emisi GRK sektor limbah dan kehutanan	Persentase penurunan emisi GRK sektor limbah dan kehutanan	%	2,04	3,26	870.000.000	29,09	1.200.000.000	28,59	1.900.000.000	28,29	2.100.000.000	28,23	2.353.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
	Meningkatnya pemantauan dan pengujian kualitas lingkungan hidup	Persentase pemantauan kualitas lingkungan hidup	%	100	100	1.550.000.000	100	2.000.000.000	100	2.800.000.000	100	3.500.000.000	100	5.025.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						**1.370.000.000**		**1.685.000.000**		**2.268.000.000**		**2.900.000.000**		**3.600.000.000**	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase lokasi pelestarian kehati yang ditangani	%	2,02	2,02	820.000.000	2,02	1.110.000.000	2,02	1.420.000.000	2,02	1.850.000.000	2,02	2.100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
	Terkelolanya keanekaragaman hayati di Kebun Raya Baturraden	Persentase peningkatan pelestarian kehati di Kebun Raya Baturraden	%	2,6	3	550.000.000	3	575.000.000	3	848.000.000	3	1.050.000.000	3	1.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						**35.000.000**		**45.000.000**		**55.000.000**		**250.000.000**		**300.000.000**	
	Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase Limbah B3 Yang Terkelola	%	80	80	35.000.000	80	45.000.000	80	55.000.000	80	250.000.000	80	300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						**630.000.000**		**850.000.000**		**1.100.000.000**		**1.250.000.000**		**1.450.000.000**	
	Meningkatnya pembinaan terhadap persetujuan lingkungan	Persentase rekomendasi lingkungan hidup yang diterbitkan	%	100	100	300.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	600.000.000	100	700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap ijin lingkungan	%	50	50	330.000.000	50	300.000.000	50	550.000.000	50	650.000.000	50	750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						**930.000.000**		**1.270.000.000**		**1.330.000.000**		**1.600.000.000**		**1.850.000.000**	
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase pelaku Lingkungan Hidup yang meningkat kepeduliannya	%	100	100	930.000.000	100	1.270.000.000	100	1.330.000.000	100	1.600.000.000	100	1.850.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Tata Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						**170.000.000**		**200.000.000**		**400.000.000**		**500.000.000**		**650.000.000**	
	Meningkatnya penyelesaian aduan lingkungan hidup	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	%	100	100	170.000.000	100	200.000.000	100	400.000.000	100	500.000.000	100	650.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						**740.000.000**		**600.000.000**		**23.650.000.000**		**25.750.000.000**		**28.800.000.000**	
	Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase Timbulan sampah yang terkelola	%	60,27	63	740.000.000	64	600.000.000	65	23.650.000.000	66	25.750.000.000	67	28.800.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**610.000.000**		**700.000.000**		**1.125.000.000**		1.275.000.000		1.350.000.000	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						**210.000.000**		**240.000.000**		**375.000.000**		**425.000.000**		**450.000.000**	
	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki KTP-el	%	99,04	99,07	210.000.000	99,1	240.000.000	99,14	375.000.000	99,19	425.000.000	99,25	450.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENCATATAN SIPIL						**200.000.000**		**220.000.000**		**350.000.000**		**400.000.000**		**425.000.000**	
	Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Persentase penduduk usia 0-17 tahun yang terfasilitasi akta kelahiran	%	99	99,12	200.000.000	99,13	220.000.000	99,14	350.000.000	99,15	400.000.000	99,16	425.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						**200.000.000**		**210.000.000**		**350.000.000**		**400.000.000**		**425.000.000**	
	Meningkatnya fasilitasi pemanfaatan data kependudukan di Jawa Tengah	Persentase Institusi/Lembaga/ Badan Hukum yang difasilitasi pemanfaatan data kependudukan	%	100	100	200.000.000	100	210.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	100	425.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						**-**		**30.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**		**50.000.000**	
	Meningkatnya pengelolaan Profil Data Kependudukan Jawa Tengah	Persentase Profil Data Kependudukan Jawa Tengah yang tersusun	%	N/A	100	-	100	30.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						**5.930.000.000**		**7.000.000.000**		**10.990.000.000**		12.975.000.000		15.175.000.000	
PROGRAM PENATAAN DESA						**20.000.000**		**40.000.000**		**50.000.000**		**75.000.000**		**75.000.000**	
	Meningkatnya fasilitasi penataan desa di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam rangka penataan Desa	%	N/A	100	20.000.000	100	40.000.000	100	50.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Penataan dan Regulasi Desa
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA						**550.000.000**		**630.000.000**		**875.000.000**		**1.050.000.000**		**1.150.000.000**	
	Meningkatnya Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP)	Persentase Kawasan Perdesaan di Jawa Tengah yang terverifivikasi dalam Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP)	%	27,4	57,05	550.000.000	67,11	630.000.000	80,54	875.000.000	90,6	1.050.000.000	100	1.150.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						**2.270.000.000**		**2.830.000.000**		**4.790.000.000**		**5.850.000.000**		**7.050.000.000**	
	Meningkatnya fasilitasi evaluasi dan penguatan tata kelola pemerintahan Desa di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam evaluasi dan penguatan tata kelola pemerintahan Desa	%	100	100	990.000.000	100	1.225.000.000	100	2.140.000.000	100	2.425.000.000	100	2.850.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Penataan dan Regulasi Desa
	Meningkatnya fasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemerintahan Desa di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi Pemerintahan Desa	%	100	100	1.205.000.000	100	1.495.000.000	100	2.400.000.000	100	3.150.000.000	100	3.900.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Bina Pemerintahan Desa
	Meningkatnya BUMDesma dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	Persentase BUMDesma dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	%	N/A	82,02	75.000.000	82,58	110.000.000	83,71	250.000.000	84,27	275.000.000	85,39	300.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						**3.090.000.000**		**3.500.000.000**		**5.275.000.000**		**6.000.000.000**		**6.900.000.000**	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	Persentase BUMDesa dengan klasifikasi berkembang dan maju di Jawa Tengah	%	36,19	45,96	550.000.000	46,46	650.000.000	46,96	1.200.000.000	47,46	1.500.000.000	47,96	1.650.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Fasilitasi Kerjasama dan Ekonomi Desa
	Meningkatnya fasilitasi peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatannya di Jawa Tengah	Persentase Daerah yang terfasilitasi peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatannya	%	100	100	1.925.000.000	100	2.075.000.000	100	2.825.000.000	100	3.100.000.000	100	3.375.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat
	Meningkatnya fasilitasi peningkatan pemanfaatan TTG, Lembaga Adat Desa dan pelaksanaan TNI Manunggal Masuk Desa di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten/Kota yang terfasilitasi peningkatan pemanfaatan TTG, Lembaga Adat Desa dan pelaksanaan TNI Manunggal Masuk Desa	%	100	100	615.000.000	100	775.000.000	100	1.250.000.000	100	1.400.000.000	100	1.875.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**839.700.000**		**959.000.000**		**1.072.000.000**		1.610.000.000		1.730.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						**114.700.000**		**129.000.000**		**145.000.000**		**235.000.000**		**285.000.000**	
	Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mengintregasikan GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan	Persentase kabupaten/kota yang mengintregasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen perencanaan daerah	%	68	75	114.700.000	80	129.000.000	85	145.000.000	90	235.000.000	95	285.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						**477.000.000**		**520.000.000**		**557.000.000**		**730.000.000**		**730.000.000**	
	Meningkatnya kesertaan KB	Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	%	69,46	69,48	477.000.000	69,49	520.000.000	69,5	557.000.000	69,51	730.000.000	69,52	730.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						**248.000.000**		**310.000.000**		**370.000.000**		**645.000.000**		**715.000.000**	
	Meningkatnya kampung keluarga berkualitas mandiri dan berkelanjutan	Persentase Kampung KB mandiri dan berkelanjutan	%	30,3	34	248.000.000	36	310.000.000	38	370.000.000	40	645.000.000	42	715.000.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						**142.811.886.000**		**160.438.983.000**		**200.749.755.000**		229.993.702.000		277.577.027.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						**139.492.485.000**		**156.486.037.000**		**196.506.079.000**		**225.674.421.000**		**274.702.901.000**	
	Meningkatnya Jumlah ruas jalan yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan provinsi	%	5,78	6,94	4.759.428.000	7,51	6.073.329.000	8,09	11.003.218.000	8,67	12.546.323.000	9,25	28.619.613.000	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan
	Meningkatnya kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	Persentase kendaraan laik jalan di Jawa Tengah	%	97,98	98,03	300.000.000	98,05	300.000.000	98,08	300.000.000	98,1	300.000.000	98,12	300.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Lalu Lintas Jalan
	Meningkatnya jaringan trayek angkutan jalan	Rasio Trayek Angkutan Jalan	Angka	42,08	46,74	1.033.478.000	48,28	1.043.478.000	49,83	958.478.000	51,39	913.478.000	52,43	983.478.000	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan
	Meningkatnya penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru yang menggunakan angkutan umum	Persentase penumpang pada masa angkutan lebaran, nataru menggunakan angkutan umum	%	67,05	69,85	1.030.000.000	70,55	1.100.000.000	71,26	1.100.000.000	71,97	1.100.000.000	72,69	1.100.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Angkutan Jalan
	Meningkatnya jumlah kunjungan bus di terminal tipe B	Persentase kunjungan Bus pada terminal tipe B	%	69,85	70,14	6.073.500.000	70,28	6.905.000.000	70,43	3.515.000.000	70,58	6.560.000.000	70,72	25.905.000.000	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
	Meningkatnya total implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	Persentase implementasi penetapan simpul dan jaringan transportasi strategis	%	47,69	52,95	378.190.000	55,58	378.190.000	58,21	1.078.190.000	60,83	378.190.000	63,46	378.190.000	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
	Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	19,98	22,04	105.000.000	23,15	105.000.000	24,32	105.000.000	25,53	105.000.000	26,83	105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	3	3	543.418.000	3	1.457.253.000	3	2.149.773.000	3	2.172.543.000	3	2.186.513.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
	Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	52,43	57,12	210.625.000	59,3	210.625.000	61,36	210.625.000	63,32	210.625.000	65,19	210.625.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
	Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	3,66	3,99	105.000.000	4,16	105.000.000	4,41	105.000.000	4,66	105.000.000	4,91	105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A
	Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	3	3	562.345.000	3	1.198.870.000	3	2.142.520.000	3	2.405.530.000	3	2.395.190.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A
	Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A	%	84,62	86,2	115.950.000	86,92	115.950.000	87,63	115.950.000	88,26	115.950.000	88,9	115.950.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas A
	Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	40,87	45,11	525.000.000	47,37	525.000.000	49,74	525.000.000	52,23	525.000.000	54,86	525.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
	Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	3	3	738.455.000	3	1.285.990.000	3	2.209.070.000	3	2.387.820.000	3	2.401.460.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
	Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	79,85	81,84	404.650.000	82,76	404.650.000	83,63	404.650.000	84,45	404.650.000	85,24	404.650.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
	Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	7,28	8,04	105.000.000	8,43	105.000.000	8,86	105.000.000	9,3	105.000.000	9,77	105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
	Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	3	3	581.205.000	3	1.333.230.000	3	2.258.840.000	3	2.567.280.000	3	2.331.220.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
	Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	92,05	92,83	197.800.000	93,19	197.800.000	93,54	197.800.000	93,87	197.800.000	94,19	197.800.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
	Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	39,45	43,53	105.000.000	45,74	105.000.000	48,02	105.000.000	50,44	105.000.000	52,99	105.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A
	Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	3	3	594.505.000	3	1.360.170.000	3	2.380.490.000	3	2.352.110.000	3	2.342.980.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A
	Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A	%	85,68	87,09	195.500.000	87,74	195.500.000	88,37	195.500.000	88,97	195.500.000	89,53	195.500.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas A
	Meningkatnya jumlah pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Persentase pengunjung terminal tipe B di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	25,5	28,16	210.000.000	29,58	210.000.000	31,05	210.000.000	32,67	210.000.000	34,3	210.000.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
	Berkurangnya kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Persentase penurunan kejadian kecelakaan pada DRK di ruas jalan provinsi yang tertangani di wilayah kerja Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	3	3	560.997.000	3	1.254.060.000	3	2.350.390.000	3	2.219.270.000	3	2.526.280.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	Persentase Hasil rekomendasi ramp check yang ditindak lanjuti pada Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	87,43	88,66	251.990.000	89,23	251.990.000	89,77	251.990.000	90,29	251.990.000	90,77	251.990.000	Dinas Perhubungan - Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
	Meningkatnya Jumlah Penduduk Terlayani (Trans Jateng)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum (Trans Jateng)	%	4,29	4,42	119.805.449.000	4,47	130.264.952.000	4,51	162.528.595.000	4,57	187.240.362.000	4,62	200.701.462.000	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah Kelas A
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN						**1.126.390.000**		**1.479.890.000**		**1.382.890.000**		**1.276.890.000**		**762.890.000**	
	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	Angka	0,381	0,472	1.126.390.000	0,534	1.479.890.000	0,596	1.382.890.000	0,652	1.276.890.000	0,715	762.890.000	Dinas Perhubungan - Bidang Pelayaran
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN						**2.193.011.000**		**2.473.056.000**		**2.860.786.000**		**3.042.391.000**		**2.111.236.000**	
	Meningkatnya perlintasan sebidang terpenuhi perlengkapan jalan sesuai standar	Persentase perlintasan sebidang Kereta Api yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan	%	4	28	2.193.011.000	36	2.473.056.000	60	2.860.786.000	88	3.042.391.000	92	2.111.236.000	Dinas Perhubungan - Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**18.600.089.298**		**18.704.786.000**		**17.166.713.464**		16.633.581.976		21.983.402.000	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						**7.894.813.780**		**7.929.261.000**		**7.969.054.000**		**8.154.801.752**		**9.041.945.000**	
	Meningkatnya Kualitas Informasi Publik	Nilai Survey Kepuasan Komunikasi Publik	Angka	85	85	7.894.813.780	86	7.929.261.000	87	7.969.054.000	88	8.154.801.752	89	9.041.945.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Komunikasi Publik dan Media
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						**10.705.275.518**		**10.775.525.000**		**9.197.659.464**		**8.478.780.224**		**12.941.457.000**	
	Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	Tingkat Pemenuhan Layanan Digital	%	N/A	25	4.492.547.558	40	4.537.472.000	60	4.583.747.422	80	4.811.988.000	100	5.922.588.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Infrastruktur Teknologi Digital
	Meningkatnya Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Pemerintahan Digital	Tingkat Pembangunan/Pengembangan Aplikasi	%	N/A	12	2.532.531.960	22	2.557.857.000	35	2.583.436.000	47	2.712.608.000	59	3.338.673.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Aplikasi Pemerintah Digital
	Meningkatnya Pemanfaatan Pusat Data Provinsi	Tingkat Pemanfaatan Pusat Data Provinsi	%	N/A	65	3.680.196.000	68	3.680.196.000	70	2.030.476.042	72	954.184.224	75	3.680.196.000	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - UPT Pusat Data
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						**9.357.143.000**		**14.661.531.000**		**16.373.608.000**		18.259.788.000		19.851.777.000	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						**1.404.628.000**		**2.140.016.000**		**2.482.093.000**		**2.618.273.000**		**2.810.262.000**	
	Meningkatnya koperasi berkualitas tingkat provinsi	Persentase Koperasi Berkualitas	%	25,02	27,1	1.404.628.000	27,85	2.140.016.000	28,05	2.482.093.000	28,75	2.618.273.000	28,9	2.810.262.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						**431.856.000**		**681.856.000**		**981.856.000**		**681.856.000**		**881.856.000**	
	Meningkatnya Kualitas SDM Koperasi	Persentase SDM Koperasi yang berkualitas	%	N/A	91	431.856.000	92	681.856.000	93	981.856.000	94	681.856.000	95	881.856.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						**1.967.582.000**		**2.667.582.000**		**2.367.582.000**		**3.967.582.000**		**4.067.582.000**	
	Meningkatnya jumlah koperasi provinsi produktif	Persentase Koperasi Produktif	%	52,55	53,3	1.967.582.000	53,56	2.667.582.000	53,59	2.367.582.000	53,85	3.967.582.000	54	4.067.582.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Bina Usaha Koperasi
PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						**2.994.495.000**		**5.854.495.000**		**6.824.495.000**		**6.874.495.000**		**8.014.495.000**	
	Meningkatnya Pelaku Usaha yang dibantu buruh tetap	Proporsi Pelaku Usaha dibantu buruh tetap terhadap pelaku usaha dibantu buruh	%	N/A	17,15	2.229.503.000	17,36	4.659.503.000	17,56	4.459.503.000	17,78	4.709.503.000	17,99	5.349.503.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Pemberdayaan dan Pembiayaan UKM
	Meningkatnya kualitas SDM UMKM	Persentase SDM UMKM yang berkualitas	%	N/A	91	514.992.000	92	794.992.000	93	1.414.992.000	94	1.214.992.000	95	1.414.992.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A
	Meningkatnya kualitas SDM Wirausaha	Persentase Wirausaha yang berkualitas	%	N/A	85	250.000.000	86	400.000.000	87	950.000.000	88	950.000.000	89	1.250.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Kewirausahaan Kelas A
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						**2.558.582.000**		**3.317.582.000**		**3.717.582.000**		**4.117.582.000**		**4.077.582.000**	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya jumlah UMKM Non Pertanian yang mengalami Peningkatan Usaha	Persentase UMKM non Pertanian yang mengalami peningkatan usaha	%	N/A	30	2.558.582.000	32	3.317.582.000	34,5	3.717.582.000	37	4.117.582.000	39	4.077.582.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Bidang Pengembangan dan Daya Saing UKM
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						**4.161.219.000**		**4.503.605.000**		**7.724.891.000**		8.482.280.000		9.329.969.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						**719.514.000**		**791.465.000**		**1.173.342.000**		**1.290.677.000**		**1.419.706.000**	
	Meningkatnya kualitas bahan promosi penanaman modal yang dipublikasikan	Persentase peningkatan pengakses bahan promosi investasi yang telah dipublikasikan	%	N/A	10	719.514.000	10	791.465.000	10	1.173.342.000	10	1.290.677.000	10	1.419.706.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						**1.215.000.000**		**1.322.420.000**		**1.863.702.000**		**2.050.072.000**		**2.255.080.000**	
	Meningkatnya penyelenggaraan promosi penanaman modal yang berkualitas	Persentase kepeminatan yang terealisasi	%	N/A	62	1.215.000.000	66	1.322.420.000	70	1.863.702.000	72	2.050.072.000	72	2.255.080.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						**1.193.390.000**		**1.262.560.000**		**2.195.800.000**		**2.415.280.000**		**2.656.408.000**	
	Meningkatnya penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	%	99,8	91,5	681.890.000	92	728.000.000	92,5	1.064.800.000	93	1.171.280.000	93	1.288.408.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan
	Meningkatnya kualitas standar layanan dan penyelesaian pengaduan	Persentase standar pelayanan yang ditetapkan	%	100	100	511.500.000	100	534.560.000	100	1.131.000.000	100	1.244.000.000	100	1.368.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pelayanan Perizinan, Pengaduan dan Peningkatan Palayanan
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						**632.500.000**		**650.160.000**		**1.760.000.000**		**1.921.000.000**		**2.113.000.000**	
	Meningkatnya pengawasan penanaman modal	Persentase proyek penanaman modal yang memiliki nilai investasi dari LKPM yang disetujui	%	42,38	25	632.500.000	27	650.160.000	30	1.760.000.000	32	1.921.000.000	32	2.113.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						**400.815.000**		**477.000.000**		**732.047.000**		**805.251.000**		**885.775.000**	
	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	Persentase peningkatan pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	%	10	10	400.815.000	10	477.000.000	10	732.047.000	10	805.251.000	10	885.775.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Bidang Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal Dan Pengelola Data Informasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						**166.300.000.000**		**195.925.000.000**		**193.468.000.000**		176.125.000.000		197.389.013.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						**26.450.000.000**		**35.750.000.000**		**28.300.000.000**		**28.450.000.000**		**28.689.013.000**	
	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan organisasi	%	N/A	8,6	16.000.000.000	8,8	19.200.000.000	8,95	17.750.000.000	9,1	17.900.000.000	9,3	17.439.013.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pelayanan Kepemudaan
	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	%	N/A	80,6	2.200.000.000	80,81	7.250.000.000	81,3	2.250.000.000	81,6	2.250.000.000	81,81	2.250.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pelayanan Kepemudaan
	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan	%	N/A	20,85	8.250.000.000	20,75	9.300.000.000	20,65	8.300.000.000	20,55	8.300.000.000	20,45	9.000.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pengembangan Kepemudaan
PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						**139.850.000.000**		**160.175.000.000**		**165.168.000.000**		**147.675.000.000**		**168.700.000.000**	
	Meningkatnya prestasi olahraga tingkat nasional/ internasional	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	%	N/A	10	76.200.000.000	15	86.500.000.000	20	102.500.000.000	25	68.500.000.000	30	84.250.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
	Meningkatnya prestasi olahraga tingkat nasional/ internasional	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional	%	N/A	79	26.850.000.000	80	34.850.000.000	81	23.343.000.000	82	36.350.000.000	83	37.600.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Tingkat Kebugaran Masyarakat	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	%	N/A	0,34	21.000.000.000	0,345	22.000.000.000	0,35	21.500.000.000	0,355	24.000.000.000	0,36	25.500.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Bidang Pembudayaan Olahraga
	Meningkatnya prestasi olahraga pelajar tingkat nasional/ internasional	Persentase Atlet pelajar dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang berprestasi di Tingkat Nasional/Internasional	%	N/A	79	15.800.000.000	80	16.825.000.000	81	17.825.000.000	82	18.825.000.000	83	21.350.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Balai Pembinaan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas A
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						**531.110.970**		**536.422.000**		**541.785.000**		568.872.000		700.169.845	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						**531.110.970**		**536.422.000**		**541.785.000**		**568.872.000**		**700.169.845**	
	Meningkatnya kematangan SDI tingkat provinsi	Indeks Satu Data Indonesia	Indeks	N/A	86	531.110.970	87	536.422.000	88	541.785.000	89	568.872.000	90	700.169.845	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Pengelolaan Data dan Statistik
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						**1.524.754.436**		**1.573.096.436**		**1.610.522.436**		1.684.079.436		1.910.334.436	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						**1.524.754.436**		**1.573.096.436**		**1.610.522.436**		**1.684.079.436**		**1.910.334.436**	
	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi	Tingkat Kematangan Keamanan Siber	Angka	N/A	3,59	1.524.754.436	3,6	1.573.096.436	3,61	1.610.522.436	3,62	1.684.079.436	3,63	1.910.334.436	Dinas Komunikasi dan Informasi Digital - Bidang Persandian dan Keamanan Siber
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						**21.283.390.000**		**19.543.014.000**		**14.056.395.000**		29.289.694.000		29.019.032.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						**13.863.383.000**		**13.147.650.000**		**9.128.669.000**		**19.742.033.000**		**19.572.657.000**	
	Meningkatnya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK)	Persentase Warisan Budaya Tak Benda berperingkat Nasional	%	22,09	26,1	6.183.349.000	28,11	4.296.584.000	30,12	4.015.965.000	32,13	6.503.182.000	34,14	6.892.671.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pelindungan Kebudayaan
	Meningkatnya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan & pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang berdayaguna	%	19,76	27,11	5.080.034.000	30,79	6.251.066.000	34,46	2.512.704.000	38,13	10.638.851.000	41,81	10.079.986.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan
	Meningkatnya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan di Taman Budaya Jawa Tengah	Persentase kesenian/tradisi budaya yang dilestarikan	%	N/A	72	2.600.000.000	76	2.600.000.000	80	2.600.000.000	84	2.600.000.000	88	2.600.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**		**100.000.000**	
	Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga Kesenian	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	N/A	1,12	100.000.000	2,23	100.000.000	3,35	100.000.000	4,46	100.000.000	5,58	100.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						**700.007.000**		**611.238.000**		**454.722.000**		**925.152.000**		**980.562.000**	
	Meningkatnya pelindungan dan pengembangan tradisi dan kesejarahan	Persentase literasi kesejarahan dan tradisi	%	52,9	53,55	700.007.000	53,89	611.238.000	54,22	454.722.000	54,56	925.152.000	54,9	980.562.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pelindungan Kebudayaan
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						**3.120.000.000**		**3.210.954.000**		**1.916.735.000**		**5.144.168.000**		**5.611.467.000**	
	Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya berperingkat Nasional	%	13,16	13,6	1.950.000.000	14,04	1.702.306.000	14,47	1.266.405.000	14,91	2.576.560.000	15,35	2.730.876.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pelindungan Kebudayaan
	Meningkatnya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya berdayaguna	%	12,81	16,12	1.170.000.000	17,77	1.508.648.000	19,42	650.330.000	21,07	2.567.608.000	22,73	2.880.591.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						**3.500.000.000**		**2.473.172.000**		**2.456.269.000**		**3.378.341.000**		**2.754.346.000**	
	Meningkatnya Tata Kelola Layanan Museum	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90,08	90,1	3.500.000.000	90,12	2.473.172.000	90,13	2.456.269.000	90,15	3.378.341.000	90,16	2.754.346.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Museum Jawa Tengah Ranggarwarsita Kelas A
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						**2.120.000.000**		**2.543.250.000**		**2.799.110.000**		3.533.384.000		4.418.154.000	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						**1.975.000.000**		**2.360.500.000**		**2.595.587.000**		**3.278.983.000**		**4.100.156.000**	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase penyelenggaraan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	%	43,49	45,27	835.000.000	46,15	1.052.000.000	47,04	1.224.100.000	47,93	1.532.125.000	48,82	1.916.655.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengembangan Perpustakaan
	Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	85	85,2	1.140.000.000	85,3	1.308.500.000	85,4	1.371.487.000	85,5	1.746.858.000	85,6	2.183.501.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						**145.000.000**		**182.750.000**		**203.523.000**		**254.401.000**		**317.998.000**	
	Meningkatnya koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Persentase peningkatan koleksi daerah dan lokal konten pada perpustakaan umum Provinsi Jawa Tengah	%	6,92	9,43	145.000.000	9,65	182.750.000	9,9	203.523.000	10,15	254.401.000	10,39	317.998.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan Perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						**1.050.000.000**		**1.417.000.000**		**1.774.500.000**		2.220.873.000		2.779.088.000	
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						**1.000.000.000**		**1.354.000.000**		**1.695.250.000**		**2.121.811.000**		**2.654.261.000**	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kearsipan LKD Provinsi, Perangkat Daerah dan LKD Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kearsipan daerah provinsi/kabupaten/ kota dan perangkat daerah provinsi yang meningkat kualitas penyelenggaraan kearsipannya	%	38,15	44,74	455.000.000	47,37	573.000.000	50	717.750.000	52,63	898.687.000	55,26	1.123.858.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan
	Meningkatnya Kelestarian Arsip Statis sebagai Memori Kolektif Bangsa	Persentase pengelolaan arsip statis provinsi	%	66,82	79,15	245.000.000	85,17	405.000.000	91,19	507.500.000	97,22	635.124.000	100	794.403.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	85,5	85,7	300.000.000	85,8	376.000.000	85,9	470.000.000	86	588.000.000	86,1	736.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						**50.000.000**		**63.000.000**		**79.250.000**		**99.062.000**		**124.827.000**	
	Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase peningkatan perangkat daerah yang mampu melaksanakan pemusnahan arsip inaktif/masa retensi habis	%	47,6	66,67	15.000.000	76,19	19.000.000	85,71	24.000.000	95,24	30.000.000	100	38.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
	Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase pemulihan arsip akibat bencana	%	8,34	20,34	15.000.000	26,34	19.000.000	32,34	24.000.000	38,34	30.000.000	44,34	38.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
	Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase peningkatan arsip yang diselamatkan melalui alih media	%	5,95	11,4	20.000.000	11,76	25.000.000	12,58	31.250.000	12,99	39.062.000	13,65	48.827.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						**390.876.243.500**		**441.982.254.500**		**447.023.311.500**		**551.820.198.500**		**616.215.078.500**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						**77.872.551.500**		**30.363.243.500**		**30.372.551.500**		31.329.193.500		33.472.551.500	
PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL						**3.878.427.000**		**2.878.427.000**		**2.878.427.000**		**2.878.427.000**		**3.178.427.000**	
	Meningkatnya Luas Lahan Garam Rakyat dan Lahan Kawasan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang Difasilitasi Teknologi	Persentase luas lahan garam rakyat dan lahan kawasan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang difasilitasi teknologi	%	49,39	50,17	846.289.000	50,73	846.289.000	51,32	846.289.000	51,94	846.289.000	52,54	1.046.289.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Meningkatnya Dokumen IKRL (Informasi Kesesuaian Ruang Laut) yang Diterbitkan	Persentase Peningkatan Dokumen IKRL (informasi kesesuaian ruang laut) yang diterbitkan	%	N/A	25	521.071.000	40	521.071.000	54	521.071.000	68	521.071.000	82	621.071.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
	Meningkatnya Luas Kawasan Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	N/A	0,07	567.558.000	0,1	567.558.000	0,13	567.558.000	0,17	567.558.000	0,2	567.558.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
	Meningkatnya Luas Kawasan Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	N/A	0,16	397.839.000	0,26	397.839.000	0,36	397.839.000	0,47	397.839.000	0,6	397.839.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
	Meningkatnya Luas Kawasan Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Persentase Luas Ekosistem Pesisir yang Direhabilitasi di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	N/A	0,19	1.545.670.000	0,27	545.670.000	0,35	545.670.000	0,44	545.670.000	0,54	545.670.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						**45.291.427.500**		**14.382.119.500**		**14.391.427.500**		**14.391.427.500**		**15.491.427.500**	
	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	410642	354029	26.684.586.000	364649,9	4.084.586.000	375589,4	4.084.586.000	386857,1	4.084.586.000	398462,8	4.384.586.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Perikanan Tangkap

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPN Tegalsari Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari	%	72	100	1.199.130.000	100	1.199.130.000	100	1.199.130.000	100	1.199.130.000	100	1.199.130.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kelas A
	Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Asemdoyong Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong	%	72,72	100	788.189.000	100	788.189.000	100	788.189.000	100	788.189.000	100	788.189.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong Kelas B
	Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Wonokerto Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	%	100	100	838.323.000	100	838.323.000	100	838.323.000	100	838.323.000	100	838.323.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
	Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan PPP Klidanglor Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	%	70	100	881.261.000	100	881.261.000	100	881.261.000	100	881.261.000	100	881.261.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
	Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Tawang Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	%	100	100	928.813.000	100	928.813.000	100	928.813.000	100	928.813.000	100	928.813.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
	Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Morodemak Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	%	81	91	8.718.117.000	100	1.208.809.000	100	1.218.117.000	100	1.218.117.000	100	1.218.117.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
	Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Juwana	%	100	100	1.307.791.000	100	1.107.791.000	100	1.107.791.000	100	1.107.791.000	100	1.307.791.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Juwana Kelas A
	Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPN Tasikagung Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung	%	100	100	1.335.766.000	100	1.035.766.000	100	1.035.766.000	100	1.035.766.000	100	1.335.766.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kelas A
	Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Karimunjawa Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	%	90,9	100	837.122.000	100	537.122.000	100	537.122.000	100	537.122.000	100	837.122.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B
	Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Lohgending Kelas A	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	%	63	100	1.080.716.500	100	1.080.716.500	100	1.080.716.500	100	1.080.716.500	100	1.080.716.500	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kelas A
	Tercapainya Pelayanan Kepelabuhanan di PPP Larangan Kelas B	Persentase Ketercapaian Pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	%	72	100	691.613.000	100	691.613.000	100	691.613.000	100	691.613.000	100	691.613.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						**23.462.603.000**		**8.162.603.000**		**8.162.603.000**		**9.119.245.000**		**9.462.603.000**	
	Meningkatnya Penanganan Hama, Penyakit Ikan dan lingkungan	Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	%	100	100	863.640.000	100	863.640.000	100	863.640.000	100	863.640.000	100	863.640.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A
	Meningkatnya Produksi Ikan Konsumsi	Persentase Produksi Ikan Konsumsi Air Laut	%	5	5	20.634.743.000	5	5.634.743.000	5	5.634.743.000	5	6.591.385.000	5	6.634.743.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Kelas A
	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	554810,13	600000	1.964.220.000	605000	1.664.220.000	610000	1.664.220.000	615000	1.664.220.000	620000	1.964.220.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						**2.852.984.000**		**2.852.984.000**		**2.852.984.000**		**2.852.984.000**		**2.952.984.000**	
	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Pengendalian Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	%	70	70	729.221.000	71	729.221.000	73	729.221.000	74	729.221.000	75	829.221.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	N/A	17	178.061.000	19	178.061.000	21	178.061.000	23	178.061.000	25	178.061.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	Cakupan WPPNRI yang Diawasi Dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat	%	N/A	72	483.620.000	72	483.620.000	72	483.620.000	100	483.620.000	100	483.620.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	N/A	50	342.989.000	50	342.989.000	52	342.989.000	55	342.989.000	55	342.989.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	Cakupan WPPNRI yang diawasi dari IUUFishing di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan	%	N/A	50	300.000.000	50	300.000.000	50	300.000.000	50	300.000.000	50	300.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Cakupan WPPNRI yang Diawasi dari IUUFishing di WIlayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	N/A	61	494.056.000	61	494.056.000	61	494.056.000	61	494.056.000	61	494.056.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	Persentase kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan di Wilayah Kerja Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur	%	N/A	17	325.037.000	19	325.037.000	21	325.037.000	23	325.037.000	25	325.037.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						**2.387.110.000**		**2.087.110.000**		**2.087.110.000**		**2.087.110.000**		**2.387.110.000**	
	Meningkatnya dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	Persentase dokumen kelayakan mutu yang diterbitkan	%	4	4	879.583.000	4	879.583.000	4	879.583.000	4	879.583.000	4	879.583.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Balai Kesehatan Ikan dan Kelayakan Hasil Perikanan Kelas A
	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	40,12	17,71	1.507.527.000	18,12	1.207.527.000	18,53	1.207.527.000	18,94	1.207.527.000	19,02	1.507.527.000	Dinas Kelautan dan Perikanan - Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						**12.258.609.000**		**38.883.104.000**		**18.028.953.000**		34.671.681.000		33.631.550.000	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						**2.750.000.000**		**7.368.104.000**		**4.050.000.000**		**6.800.000.000**		**6.800.000.000**	
	Meningkatnya daya tarik pada destinasi pariwisata pada setiap wilayah pengembangan (WP)	Persentase kawasan pariwisata yang dikembangkan	%	13,04	20	2.750.000.000	20	7.368.104.000	20	4.050.000.000	20	6.800.000.000	20	6.800.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						**5.508.609.000**		**17.000.000.000**		**7.673.953.000**		**15.036.681.000**		**13.996.550.000**	
	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	69480726	75348282	5.508.609.000	78522371	17.000.000.000	81827426	7.673.953.000	85275186	15.036.681.000	88740079	13.996.550.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Pemasaran Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						**1.635.000.000**		**3.745.000.000**		**2.310.000.000**		**3.995.000.000**		**3.995.000.000**	
	Meningkatnya Kabupaten/Kota yang Ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif)	Jumlah Kabupaten/Kota yang DItetapkan sebagai Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif)	Kabupaten /Kota	1	1	1.635.000.000	1	3.745.000.000	1	2.310.000.000	1	3.995.000.000	1	3.995.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						**2.365.000.000**		**10.770.000.000**		**3.995.000.000**		**8.840.000.000**		**8.840.000.000**	
	Meningkatnya SDM Pariwisata yang Tersertifikasi	Persentase SDM Pariwisata yang Tersertifikasi Kompetensi	%	20,58	20	1.265.000.000	20	6.620.000.000	20	2.100.000.000	20	6.620.000.000	20	6.620.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Destinasi Pariwisata
	Meningkatnya SDM Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi	Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang Tersertifikasi Kompetensi	%	7,16	16	1.100.000.000	16	4.150.000.000	16	1.895.000.000	16	2.220.000.000	16	2.220.000.000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Bidang Ekonomi Kreatif
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						**256.523.028.000**		**313.205.911.000**		**315.444.384.000**		360.474.598.000		396.709.555.000	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						**98.890.302.000**		**118.256.520.000**		**119.291.373.000**		**133.988.548.000**		**146.817.867.000**	
	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Padi	Ton	8891297	9380811	6.899.028.000	9474619	9.079.090.000	9569366	9.147.201.000	9665059	10.927.354.000	9761710	12.363.345.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Jagung	Ton	3282384	3301024	2.753.630.000	3314594	3.502.164.000	3328191	3.525.550.000	3341814	4.136.774.000	3355463	4.629.828.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Kedelai	Ton	74956	52790	1.722.292.000	52815	2.270.341.000	52868	2.287.463.000	52921	2.734.978.000	52974	3.095.973.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Bawang Merah	Ton	607897	617015	1.257.625.000	626270	1.697.793.000	635664	1.561.545.000	645199	1.970.969.000	654877	2.160.904.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Cabai	Ton	449873	456621	2.780.998.000	463471	3.503.200.000	470423	3.675.763.000	477479	4.215.485.000	484641	4.791.194.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Produksi Tanaman Buah dan Tanaman Obat	Ton	378793	392201	496.225.000	399086	669.904.000	406094	675.332.000	413227	817.153.000	420488	931.555.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi Kopi	Ton	26758	26875	1.640.000.000	26960	2.214.000.000	27078	2.231.933.000	27183	2.700.638.000	27287	3.078.727.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Perkebunan
	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi Tebu	Ton	3666897	3674236	34.711.673.000	3677911	34.921.673.000	3681590	35.271.673.000	3685273	35.676.673.000	3688959	35.676.673.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Perkebunan
	Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi Kelapa	Ton	166788	166955	881.551.000	167038	1.176.593.000	167122	1.186.123.000	167205	1.435.208.000	167289	1.636.137.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Perkebunan
	Meningkatnya Populasi Ternak	Jumlah Populasi ternak	(ST)/(AU)	5865763	6203898	14.469.855.000	6297389	18.659.961.000	6392548	18.841.776.000	6493653	21.734.090.000	6586419	24.395.134.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Peternakan
	Meningkatnya peredaran obat hewan dan produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	Persentase peredaran obat Hewan dan produk hewan yang memenuhi persyaratan teknis	%	N/A	81	846.382.000	82	1.562.770.000	83	1.612.770.000	84	1.612.770.000	85	3.113.567.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Veteriner
	Meningkatnya Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Persentase layanan sertifikasi benih tanaman pangan	%	100	100	1.536.075.000	100	1.721.000.000	100	1.731.000.000	100	2.315.000.000	100	2.465.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
	Meningkatnya Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Persentase layanan sertifikasi benih tanaman perkebunan	%	100	100	96.160.000	100	130.600.000	100	130.600.000	100	150.500.000	100	150.500.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
	Meningkatnya Pengawasan dan Sertifikasi Benih	Persentase layanan sertifikasi benih tanaman hortikultura	%	100	100	867.405.000	100	1.548.400.000	100	1.565.940.000	100	1.681.823.000	100	1.701.323.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
	Meningkatnya Produksi Benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman pangan di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	%	100	100	2.167.823.000	100	2.167.823.000	100	2.167.823.000	100	2.167.823.000	100	2.167.823.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
	Meningkatnya Produksi Benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman hortikultura di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	%	100	100	850.000.000	100	1.149.000.000	100	1.158.306.000	100	1.401.522.000	100	1.597.766.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
	Meningkatnya Produksi Benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	Persentase ketercapaian target produksi benih tanaman perkebunan di Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang	%	100	100	2.209.690.000	100	2.308.070.000	100	2.311.080.000	100	2.389.760.000	100	2.447.228.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Semarang Kelas A
	Meningkatnya Produksi Benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta	%	100	100	3.279.967.000	100	4.460.755.000	100	4.463.820.000	100	5.401.222.000	100	6.157.393.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Surakarta Kelas A
	Meningkatnya Produksi Benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas	Persentase ketercapaian target produksi benih di Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas	%	100	100	3.495.267.000	100	4.789.563.000	100	4.829.167.000	100	5.864.291.000	100	6.699.290.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Benih Pertanian Wilayah Banyumas Kelas A
	Meningkatnya Produksi dan Distribusi Semen Beku	Persentase produksi dan distribusi semen beku	%	0,53	1	5.682.568.000	1	7.567.340.000	1	7.567.340.000	1	8.736.667.000	1	10.147.913.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Inseminasi Buatan Jawa Tengah Kelas A
	Meningkatnya produksi ternak ruminansia dan non ruminansia penghasil daging	Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia dan non ruminansia penghasil daging	%	N/A	1	6.266.640.000	1	7.279.200.000	1	7.390.215.000	1	8.460.000.000	1	9.396.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya produksi ternak ruminansia penghasil susu	Persentase peningkatan produksi ternak ruminansia penghasil susu	%	N/A	1	783.518.000	1	909.900.000	1	923.769.000	1	1.057.500.000	1	1.174.500.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
	Meningkatnya produksi ternak non ruminansia penghasil telur	Persentase peningkatan produksi ternak non ruminansia penghasil telur	%	N/A	1	1.653.930.000	1	1.920.900.000	1	1.950.194.000	1	2.232.500.000	1	2.479.500.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pembibitan Ternak Jawa Tengah Kelas A
	Meningkatnya Pengembangan Mekanisasi dan modernisasi Pertanian	Persentase capaian alsintan dan pengelola alsintan yang diawasi	%	N/A	3	700.000.000	3	981.910.000	3	974.833.000	3	1.179.547.000	3	1.344.684.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
	Meningkatnya Pengembangan Mekanisasi dan modernisasi Pertanian	Persentase alsintan yang direkayasa dan dikembangkan	%	N/A	100	842.000.000	100	2.064.570.000	100	2.110.157.000	100	2.988.301.000	100	3.015.910.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Mekanisasi dan Modernisasi Pertanian Kelas A
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						**121.169.497.000**		**152.211.760.000**		**153.141.120.000**		**178.018.160.000**		**198.290.238.000**	
	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi prasarana sarana pertanian	%	1	1	116.135.497.000	1	145.241.760.000	1	146.151.120.000	1	169.918.160.000	1	189.090.238.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Prasarana dan Sarana
	Meningkatnya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan sasaran yang terfasilitasi prasarana peternakan	%	5	5	5.034.000.000	5	6.970.000.000	5	6.990.000.000	5	8.100.000.000	5	9.200.000.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Prasarana dan Sarana
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						**10.167.362.000**		**12.641.220.000**		**12.728.761.000**		**14.930.150.000**		**15.459.850.000**	
	Menurunnya jumlah wilayah yang mengalami kasus PHMS	Persentase penurunan jumlah wilayah yang mengalami kasus PHMS	%	N/A	1	5.734.415.000	2	6.981.195.000	3	7.033.736.000	3	8.033.736.000	3	8.033.736.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Veteriner
	Meningkatnya Unit Usaha Yang Bersertifikat NKV	Persentase unit usaha yang bersertifikat NKV	%	N/A	30	1.580.025.000	30,8	1.980.025.000	32,8	1.980.025.000	33,3	2.611.254.000	33,5	2.611.254.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Veteriner
	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Layanan Veteriner	%	N/A	100	2.852.922.000	100	3.680.000.000	100	3.715.000.000	100	4.285.160.000	100	4.814.860.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelayanan Veteriner Jawa Tengah Kelas A
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						**6.351.907.000**		**7.251.907.000**		**7.279.447.000**		**7.999.230.000**		**8.579.855.000**	
	Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan	%	24,89	20	1.500.000.000	15	2.050.000.000	15	2.066.607.000	15	2.500.596.000	15	2.850.680.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
	Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Perkebunan	%	12,45	10	4.351.907.000	8	4.526.907.000	8	4.532.374.000	8	4.675.272.000	8	4.790.543.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
	Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan	%	1,98	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
	Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Perkebunan	%	1,98	5	100.000.000	5	135.000.000	5	136.093.000	5	164.672.000	5	187.726.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
	Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase luasan penanganan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Hortikultura	%	12,45	10	300.000.000	8	405.000.000	8	408.280.000	8	494.018.000	8	563.180.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
	Meningkatnya pengendalian terhadap organisme pengganggu tanaman untuk Pengamanan Produksi pertanian	Persentase penurunan luasan dampak perubahan iklim (DPI) Hortikultura	%	1,98	5	100.000.000	5	135.000.000	5	136.093.000	5	164.672.000	5	187.726.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelindungan Tanaman Kelas A
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						**19.943.960.000**		**22.844.504.000**		**23.003.683.000**		**25.538.510.000**		**27.561.745.000**	
	Menguatnya kelembagaan petani	Persentase kelembagaan petani yang terfasilitasi	%	N/A	0,2	11.706.355.000	0,2	13.663.555.000	0,2	13.724.703.000	0,2	15.322.876.000	0,2	16.612.068.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Kelembagaan
	Menguatnya Kelembagaan Peternak	Persentase peningkatan fasilitasi kelembagaan dan kemitraan peternak	%	N/A	1,25	2.149.050.000	1,3	2.352.394.000	1,37	2.433.901.000	1,56	2.738.685.000	2	2.994.353.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Bidang Kelembagaan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Pengetahuan dan Ketrampilan SDM Pertanian	Persentase SDM pertanian yang dilatih	%	100	100	6.088.555.000	100	6.828.555.000	100	6.845.079.000	100	7.476.949.000	100	7.955.324.000	Dinas Pertanian dan Peternakan - Balai Pelatihan Pertanian Kelas A
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						**13.395.000.000**		**18.277.470.000**		**29.482.050.000**		32.974.202.000		51.044.074.000	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN						**8.675.000.000**		**10.795.470.000**		**20.087.050.000**		**21.324.202.000**		**35.839.074.000**	
	Meningkatnya produktivitas hutan dan hasil hutan	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	13,7	21,96	400.000.000	26,1	710.000.000	30,23	1.286.000.000	34,37	1.520.000.000	38,5	1.823.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan
	Meningkatnya penanganan lahan kritis	Persentase lahan kritis tertangani	%	0,84	0,78	120.000.000	0,82	130.000.000	0,85	230.000.000	0,89	260.000.000	0,93	300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam
	Meningkatnya perlindungan hutan	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani	%	100	100	160.000.000	100	200.000.000	100	550.000.000	100	650.000.000	100	750.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penaatan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
	Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK I	Persentase lahan kritis tertangani di wilayah CDK I	%	0,04	0,05	685.000.000	0,05	722.770.000	0,05	1.776.250.000	0,06	1.790.250.000	0,06	2.755.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I
	Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK I	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani di wilayah CDK I	%	100	100	30.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I
	Meningkatnya produktivitas hutan dan hasil hutan di wilayah CDK I	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan di wilayah CDK I	%	1,38	2,24	50.000.000	2,67	130.000.000	3,1	130.000.000	3,53	150.000.000	3,96	160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I
	Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK II	Persentase lahan kritis tertangani CDK 2	%	0,15	0,06	555.000.000	0,06	607.770.000	0,06	1.279.020.000	0,07	1.293.020.000	0,07	3.645.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
	Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK II	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 2	%	100	100	30.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
	Meningkatnya produktivitas hutan dan hasil hutan di wilayah CDK II	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan CDK 2	%	1,29	2,15	50.000.000	2,58	130.000.000	3,01	130.000.000	3,45	150.000.000	3,88	160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
	Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK III	Persentase lahan kritis tertangani CDK 3	%	0,12	0,09	635.000.000	0,09	792.770.000	0,1	1.359.020.000	0,1	1.373.020.000	0,11	3.350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
	Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK III	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 3	%	100	100	30.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
	Meningkatnya produktivitas hutan dan hasil hutan di wilayah CDK III	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan CDK 3	%	1,38	2,41	50.000.000	2,93	130.000.000	3,45	130.000.000	3,96	150.000.000	4,48	160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
	Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK IV	Persentase lahan kritis tertangani CDK 4	%	0,02	0,05	615.000.000	0,05	617.770.000	0,06	1.264.020.000	0,06	1.278.020.000	0,06	2.365.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
	Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK IV	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 4	%	100	100	30.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
	Meningkatnya produktivitas hutan dan hasil hutan di wilayah CDK IV	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan CDK 4	%	1,21	1,89	50.000.000	2,24	130.000.000	2,58	130.000.000	2,96	150.000.000	3,27	160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
	Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK V	Persentase lahan kritis tertangani CDK 5	%	0,01	0,08	625.000.000	0,08	577.770.000	0,09	1.249.020.000	0,09	1.263.020.000	0,09	2.365.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
	Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK V	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 5	%	100	100	30.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
	Meningkatnya produktivitas hutan dan hasil hutan di wilayah CDK V	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan CDK 5	%	1,29	1,98	50.000.000	2,33	130.000.000	2,67	130.000.000	3,01	150.000.000	3,36	160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
	Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK VI	Persentase lahan kritis tertangani CDK 6	%	0,18	0,11	595.000.000	0,11	582.770.000	0,12	1.254.020.000	0,13	1.268.020.000	0,13	2.365.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
	Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK VI	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 6	%	100	100	30.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
	Meningkatnya produktivitas hutan dan hasil hutan di wilayah CDK VI	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan CDK 6	%	1,38	2,24	50.000.000	2,67	130.000.000	3,1	130.000.000	3,53	150.000.000	3,96	160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK VIII	Persentase lahan kritis tertangani CDK 8	%	0,04	0,05	565.000.000	0,06	612.770.000	0,06	1.284.020.000	0,06	1.298.020.000	0,06	2.365.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
	Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK VIII	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 8	%	100	100	30.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
	Meningkatnya produktivitas hutan dan hasil hutan di wilayah CDK VIII	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan CDK 8	%	1,03	1,55	50.000.000	1,81	130.000.000	2,07	130.000.000	2,33	150.000.000	2,58	160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
	Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK IX	Persentase lahan kritis tertangani CDK 9	%	0,04	0,09	495.000.000	0,09	582.770.000	0,1	1.254.020.000	0,1	1.268.020.000	0,1	1.965.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
	Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK IX	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 9	%	100	100	30.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
	Meningkatnya produktivitas hutan dan hasil hutan di wilayah CDK IX	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan CDK 9	%	1,29	2,15	50.000.000	2,58	130.000.000	3,01	130.000.000	3,45	150.000.000	3,88	160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
	Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK X	Persentase lahan kritis tertangani CDK 10	%	0,02	0,07	515.000.000	0,08	532.770.000	0,08	1.164.020.000	0,09	1.178.020.000	0,09	1.965.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
	Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK X	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 10	%	100	100	30.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
	Meningkatnya produktivitas hutan dan hasil hutan di wilayah CDK X	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan CDK 10	%	1,03	1,55	50.000.000	1,81	130.000.000	2,07	130.000.000	2,33	150.000.000	2,58	160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
	Meningkatnya bibit tanaman kehutanan dan MPTS yang terdistribusi	Persentase bibit tanaman kehutanan dan MPTS yang terdistribusi	%	100	100	810.000.000	100	890.000.000	100	1.599.600.000	100	1.988.752.000	100	3.266.074.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
	Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK XI	Persentase lahan kritis tertangani CDK 11	%	0,11	0,05	535.000.000	0,05	582.770.000	0,06	1.214.020.000	0,06	1.228.020.000	0,06	1.965.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
	Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK XI	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 11	%	100	100	30.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
	Meningkatnya produktivitas hutan dan hasil hutan di wilayah CDK XI	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan CDK 11	%	1,12	1,81	50.000.000	2,15	130.000.000	2,5	130.000.000	2,84	150.000.000	3,19	160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
	Meningkatnya penanganan lahan kritis di wilayah CDK VII	Persentase lahan kritis tertangani CDK 7	%	0,11	0,08	485.000.000	0,08	517.770.000	0,08	1.189.020.000	0,09	1.203.020.000	0,09	1.965.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
	Meningkatnya perlindungan hutan di wilayah CDK VII	Persentase pengendalian gangguan dan keamanan hutan (gukamhut) yang ditangani CDK 7	%	100	100	30.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
	Meningkatnya produktivitas hutan dan hasil hutan di wilayah CDK VII	Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan CDK 7	%	1,29	1,98	50.000.000	2,33	130.000.000	2,67	130.000.000	3,01	150.000.000	3,36	160.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA						**1.610.000.000**		**2.227.000.000**		**3.045.000.000**		**3.275.000.000**		**3.820.000.000**	
	Terselenggaranya perlindungan tumbuhan dan satwa liar	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani	%	5	5	50.000.000	5	100.000.000	5	270.000.000	5	280.000.000	5	300.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam
	Terselenggaranya pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting secara efektif	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif	%	100	100	270.000.000	100	300.000.000	100	500.000.000	100	600.000.000	100	700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam
	Terselenggaranya perlindungan tumbuhan dan satwa liar di wilayah CDK I	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 1	%	5	5	25.000.000	5	65.000.000	5	65.000.000	5	75.000.000	5	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I
	Terselenggaranya pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting secara efektif di wilayah CDK I	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif CDK 1	%	100	100	25.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I
	Terselenggaranya pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting secara efektif di wilayah CDK II	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif CDK 2	%	100	100	25.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Terselenggaranya perlindungan tumbuhan dan satwa liar di wilayah CDK II	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 2	%	5	5	25.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	40.000.000	5	45.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
	Terselenggaranya perlindungan tumbuhan dan satwa liar di wilayah CDK III	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 3	%	5	5	25.000.000	5	65.000.000	5	65.000.000	5	75.000.000	5	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
	Terselenggaranya pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting secara efektif wilayah CDK III	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif CDK 3	%	100	100	25.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III
	Terselenggaranya perlindungan tumbuhan dan satwa liar di wilayah CDK IV	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 4	%	5	5	25.000.000	5	45.000.000	5	45.000.000	5	75.000.000	5	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
	Terselenggaranya pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting secara efektif di wilayah CDK IV	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif CDK 4	%	100	100	25.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
	Terselenggaranya perlindungan tumbuhan dan satwa liar di wilayah CDK V	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 5	%	5	5	25.000.000	5	65.000.000	5	65.000.000	5	75.000.000	5	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
	Terselenggaranya pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting secara efektif di wilayah CDK V	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif CDK 5	%	100	100	25.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
	Terselenggaranya perlindungan tumbuhan dan satwa liar di wilayah CDK VI	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 6	%	5	5	25.000.000	5	65.000.000	5	65.000.000	5	75.000.000	5	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
	Terselenggaranya pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting secara efektif di wilayah CDK VI	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif CDK 6	%	100	100	25.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
	Terselenggaranya perlindungan tumbuhan dan satwa liar di wilayah CDK VIII	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 8	%	5	5	25.000.000	5	65.000.000	5	65.000.000	5	75.000.000	5	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
	Terselenggaranya pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting secara efektif di wilayah CDK VIII	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif CDK 8	%	100	100	25.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
	Terselenggaranya perlindungan tumbuhan dan satwa liar di wilayah CDK IX	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 9	%	5	5	25.000.000	5	65.000.000	5	65.000.000	5	75.000.000	5	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
	Terselenggaranya pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting secara efektif di wilayah CDK IX	Persentase kawasan bernilai ekosistem penting yang dikelola secara efektif CDK 9	%	100	100	25.000.000	100	65.000.000	100	65.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
	Terselenggaranya perlindungan tumbuhan dan satwa liar di wilayah CDK X	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 10	%	5	5	25.000.000	5	65.000.000	5	65.000.000	5	75.000.000	5	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
	Terkelolanya Taman Hutan Raya (Tahura) KGPAA Mangkunagoro I	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi tahura dinilai oleh Kementerian Kehutanan	Angka	73	73	695.000.000	75	572.000.000	75	845.000.000	75	655.000.000	75	865.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
	Terselenggaranya konservasi sumberdaya alam hayati dan eksosistemnya	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani Balai Kebun Raya Baturraden	%	100	100	120.000.000	100	125.000.000	100	300.000.000	100	400.000.000	100	500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B
	Terselenggaranya perlindungan tumbuhan dan satwa liar di wilayah CDK XI	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 11	%	5	5	25.000.000	5	65.000.000	5	65.000.000	5	75.000.000	5	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
	Terselenggaranya perlindungan tumbuhan dan satwa liar di wilayah CDK VII	Persentase jenis tumbuhan dan satwa liar yang ditangani CDK 7	%	5	5	25.000.000	5	65.000.000	5	65.000.000	5	75.000.000	5	80.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						**2.740.000.000**		**4.635.000.000**		**5.230.000.000**		**7.025.000.000**		**9.633.000.000**	
	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	2,5	2,5	430.000.000	2,5	655.000.000	2,5	1.250.000.000	2,5	1.450.000.000	2,5	1.700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Penataan, Pemanfaatan dan Penyuluhan Kehutanan
	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK I	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 1	%	0,3	0,3	210.000.000	0,3	380.000.000	0,3	380.000.000	0,3	775.000.000	0,3	1.033.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH I
	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK II	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 2	%	0,2	0,2	210.000.000	0,2	360.000.000	0,2	360.000.000	0,2	480.000.000	0,2	690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH II
	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK III	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 3	%	0,2	0,2	210.000.000	0,2	360.000.000	0,2	360.000.000	0,2	480.000.000	0,2	690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH III

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK IV	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 4	%	0,2	0,2	210.000.000	0,2	360.000.000	0,2	360.000.000	0,2	480.000.000	0,2	690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IV
	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK V	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 5	%	0,3	0,3	210.000.000	0,3	360.000.000	0,3	360.000.000	0,3	480.000.000	0,3	690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH V
	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK VI	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 6	%	0,2	0,2	210.000.000	0,2	360.000.000	0,2	360.000.000	0,2	480.000.000	0,2	690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VI
	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK VIII	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 8	%	0,2	0,2	210.000.000	0,2	360.000.000	0,2	360.000.000	0,2	480.000.000	0,2	690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VIII
	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK IX	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 9	%	0,2	0,2	210.000.000	0,2	360.000.000	0,2	360.000.000	0,2	480.000.000	0,2	690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH IX
	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK X	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 10	%	0,2	0,2	210.000.000	0,2	360.000.000	0,2	360.000.000	0,2	480.000.000	0,2	690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH X
	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK XI	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 11	%	0,2	0,2	210.000.000	0,2	360.000.000	0,2	360.000.000	0,2	480.000.000	0,2	690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH XI
	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di bidang kehutanan di wilayah CDK VII	Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat CDK 7	%	0,3	0,3	210.000.000	0,3	360.000.000	0,3	360.000.000	0,3	480.000.000	0,3	690.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - CDK WILAYAH VII
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)						**370.000.000**		**620.000.000**		**1.120.000.000**		**1.350.000.000**		**1.752.000.000**	
	Terkelolanya Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase jumlah daerah aliran sungai (DAS) prioritas yang tertangani	%	10	10	370.000.000	10	620.000.000	10	1.120.000.000	10	1.350.000.000	10	1.752.000.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						**9.183.962.000**		**13.839.876.000**		**25.411.686.000**		34.981.912.000		43.699.516.000	
PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN						**1.647.531.000**		**2.095.245.000**		**3.347.400.000**		**4.819.800.000**		**5.457.600.000**	
	Menurunnya pengambilan air tanah di Jawa Tengah	Persentase Pengambilan Air Tanah di Jawa Tengah	%	27,5	27,58	577.131.000	27,56	1.031.845.000	27,54	1.350.000.000	27,52	1.700.000.000	27,5	2.200.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Geologi dan Air Tanah
	Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Solo	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	%	1,33	2,98	71.000.000	2,98	70.300.000	2,97	154.400.000	2,97	259.400.000	2,96	267.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
	Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Kendeng Muria	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	%	2,55	3,3	43.000.000	3,28	39.500.000	3,27	125.000.000	3,26	234.200.000	3,25	242.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
	Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Serayu Utara	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	%	1,43	1,58	89.200.000	1,57	91.300.000	1,57	172.600.000	1,56	281.800.000	1,56	295.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
	Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Serayu Selatan	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	%	1,94	1,98	43.000.000	1,97	39.500.000	1,96	123.600.000	1,95	228.600.000	1,95	239.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
	Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Slamet Utara	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	%	3,83	3,95	89.200.000	3,94	92.700.000	3,93	176.800.000	3,92	281.800.000	3,92	285.400.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
	Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Kendeng Selatan	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	%	2,22	2,27	43.000.000	2,26	39.500.000	2,26	125.000.000	2,25	230.000.000	2,25	239.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
	Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Slamet Selatan	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	%	2,5	2,6	43.000.000	2,59	39.500.000	2,58	125.000.000	2,58	234.200.000	2,57	242.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
	Terpenuhinya pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah	Persentase pelayanan pengujian air tanah di Jawa Tengah	%	100	100	450.000.000	100	450.000.000	100	550.000.000	100	600.000.000	100	650.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A
	Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Semarang - Demak	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	%	2,18	6,99	113.000.000	6,98	119.300.000	6,97	200.600.000	6,96	308.400.000	6,95	323.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Merapi	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	%	2,48	2,65	43.000.000	2,64	39.500.000	2,63	120.800.000	2,62	230.000.000	2,62	235.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
	Menurunnya pengambilan air tanah di Wilayah Serayu Tengah	Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	%	1,47	1,49	43.000.000	1,48	42.300.000	1,48	123.600.000	1,47	231.400.000	1,47	239.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA						**2.031.349.000**		**2.472.466.000**		**5.314.913.000**		**7.704.844.000**		**9.087.200.000**	
	Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Jawa Tengah	%	72,79	72,9	800.000.000	73	1.039.800.000	73,1	1.800.000.000	73,2	2.000.000.000	73,3	2.500.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Mineral dan Batubara
	Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo	%	60	72,9	120.733.000	73	154.000.000	73,1	354.083.000	73,2	575.400.000	73,3	662.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
	Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria	%	68,34	72,9	77.333.000	73	74.200.000	73,1	279.870.000	73,2	463.400.000	73,3	553.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
	Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara	%	62,35	72,9	73.133.000	73	70.000.000	73,1	270.070.000	73,2	453.600.000	73,3	540.400.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
	Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan	%	62,8	72,9	77.333.000	73	77.000.000	73,1	277.070.000	73,2	463.400.000	73,3	550.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
	Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara	%	60,46	72,9	77.333.000	73	77.000.000	73,1	277.070.000	73,2	476.000.000	73,3	569.800.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
	Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan	%	79,52	72,9	113.737.000	73	127.400.000	73,1	323.270.000	73,2	523.600.000	73,3	604.800.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
	Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Slamet Selatan	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan	%	73,39	72,9	168.333.000	73	198.800.000	73,1	389.070.000	73,2	621.600.000	73,3	708.400.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
	Terpenuhinya pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	Persentase pelayanan pengujian mekanika tanah dan batuan di Jawa Tengah	%	100	100	159.815.000	100	252.466.000	100	320.000.000	100	450.644.000	100	500.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A
	Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang - Demak	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang Demak	%	63,29	72,9	123.533.000	73	138.600.000	73,1	335.870.000	73,2	561.400.000	73,3	655.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
	Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi	%	62,18	72,9	159.933.000	73	186.200.000	73,1	408.670.000	73,2	652.400.000	73,3	690.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
	Meningkatnya kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah	Tingkat kepatuhan tertib administrasi usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah	%	71,29	72,9	80.133.000	73	77.000.000	73,1	279.870.000	73,2	463.400.000	73,3	553.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN						**2.912.031.000**		**4.265.943.000**		**7.750.800.000**		**11.976.668.000**		**15.747.340.000**	
	Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Jawa Tengah	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Jawa Tengah	SBM	1014117,39	782,5	630.631.000	1432,65	1.073.500.000	2423,21	1.500.000.000	4063,48	1.800.000.000	5867,75	2.300.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
	Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Solo	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Solo	SBM	41915,22	57,46	233.800.000	144,25	321.200.000	286,95	926.800.000	377,25	983.800.000	651,29	1.809.800.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
	Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Muria	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Muria	SBM	90948,94	16,42	87.200.000	109,86	224.200.000	75,44	274.200.000	372,17	779.600.000	567,26	1.125.740.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
	Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Utara	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Utara	SBM	132503,5	98,38	333.000.000	120,8	238.200.000	184,21	466.000.000	288,11	728.000.000	560,2	1.279.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
	Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Selatan	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Selatan	SBM	289,74	54,73	164.200.000	163,41	394.400.000	268,97	562.400.000	330,73	1.236.000.000	474,98	1.108.600.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Slamet Utara	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Utara	SBM	91068,05	42,61	148.000.000	191,81	403.200.000	285,25	557.400.000	526,85	711.800.000	559,16	1.134.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
	Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Kendeng Selatan	SBM	182071,71	54,73	164.200.000	120,8	237.000.000	190,77	719.800.000	312,61	860.600.000	447,62	1.216.800.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
	Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Slamet Selatan	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Slamet Selatan	SBM	151285,79	120,8	239.000.000	120,8	237.000.000	256,85	517.400.000	461,3	1.064.200.000	582,1	1.155.400.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
	Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Semarang - Demak	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Semarang - Demak	SBM	41516,02	175,53	467.400.000	178,27	472.600.000	306,74	868.000.000	511,73	1.331.200.000	652,59	1.731.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
	Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Merapi	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Merapi	SBM	91206,48	41,05	175.400.000	134,48	319.400.000	255,28	577.200.000	421,43	1.249.734.000	643,86	1.493.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
	Meningkatnya energi yang dihasilkan dari infrastruktur EBT terbangun di Wilayah Serayu Tengah	Jumlah energi yang dihasilkan dari infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) terbangun di Wilayah Serayu Tengah	SBM	41403,35	120,8	269.200.000	148,17	345.243.000	312,75	781.600.000	461,3	1.231.734.000	728,69	1.393.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN						**2.593.051.000**		**5.006.222.000**		**8.998.573.000**		**10.480.600.000**		**13.407.376.000**	
	Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Jawa Tengah	%	N/A	43,02	630.000.000	53,65	811.250.000	64,28	1.050.000.000	74,5	1.500.000.000	74,9	2.000.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Bidang Ketenagalistrikan
	Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Solo	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Solo	%	N/A	43,11	287.896.000	53,7	369.672.000	64,3	607.600.000	74,5	557.100.000	74,8	919.600.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
	Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Kendeng Muria	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Kendeng Muria	%	N/A	43,13	121.987.000	53,75	418.200.000	64,38	647.100.000	74,5	608.700.000	75	964.600.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
	Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Serayu Utara	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Utara	%	N/A	43,11	238.196.000	53,71	494.850.000	64,32	684.500.000	74,9	928.800.000	74,92	1.221.700.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
	Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Serayu Selatan	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Selatan	%	N/A	43,13	173.596.000	53,75	323.700.000	64,38	625.100.000	74,5	929.400.000	75	1.073.300.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
	Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Slamet Utara	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Slamet Utara	%	N/A	43,07	187.896.000	53,67	340.200.000	64,27	646.000.000	74,5	1.106.300.000	74,87	1.250.200.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
	Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Kendeng Selatan	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Kendeng Selatan	%	N/A	43,1	166.996.000	53,7	463.200.000	64,3	977.700.000	74	1.060.100.000	74,9	1.192.576.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
	Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Slamet Selatan	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Slamet Selatan	%	N/A	43,11	180.196.000	53,71	367.150.000	64,31	776.700.000	74,5	929.400.000	74,91	1.218.300.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
	Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Semarang - Demak	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Semarang - Demak	%	N/A	42,31	257.292.000	53,26	555.300.000	64,22	870.200.000	75,1	951.500.000	75,14	1.225.000.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
	Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Merapi	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Merapi	%	N/A	43,03	182.000.000	53,62	402.800.000	64,21	1.066.700.000	73,7	1.001.900.000	74,7	1.218.300.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
	Meningkatnya akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Tengah	Persentase akses listrik untuk masyarakat sesuai keselamatan ketenagalistrikan (K2) di Wilayah Serayu Tengah	%	N/A	43,07	166.996.000	53,64	459.900.000	64,21	1.046.973.000	74,7	907.400.000	74,79	1.123.800.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						**10.867.256.000**		**13.705.670.000**		**13.705.670.000**		28.767.256.000		29.017.256.000	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						**398.365.000**		**398.365.000**		**398.365.000**		**398.365.000**		**398.365.000**	
	Meningkatnya pelayanan perijinan sektor perdagangan	Persentase peningkatan jumlah penerbitan rekomendasi distributor terdaftar minuman beralkohol (DT MB) dan bahan berbahaya (DT B2)	%	N/A	3	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	6	50.000.000	6	50.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Pelaku Usaha (distributor) Bahan Berbahaya Yang Diawasi	Persentase peningkatan pelaku usaha (distributor) bahan berbahaya yang diawasi	%	N/A	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri
	Meningkatnya jumlah eksportir pengguna layanan IPSKA Jawa Tengah	Persentase kenaikan jumlah eksportir pengguna layanan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) Jawa Tengah	%	N/A	9	348.365.000	9,5	348.365.000	10	348.365.000	10,5	348.365.000	10,5	348.365.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Luar Negeri
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						**451.100.000**		**1.451.100.000**		**1.351.100.000**		**2.701.100.000**		**2.701.100.000**	
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana distribusi perdagangan	Persentase peningkatan jumlah pengguna sarana distribusi perdagangan	%	N/A	3	451.100.000	5	1.451.100.000	5	1.351.100.000	6	2.701.100.000	6	2.701.100.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING						**5.431.100.000**		**5.431.100.000**		**5.431.100.000**		**8.831.100.000**		**8.831.100.000**	
	Terjaganya stabilisasi harga dan stok barang di pasar	Inflasi bahan makanan, minuman dan tembakau	%	0,6	0,52	5.431.100.000	0,51	5.431.100.000	0,4	5.431.100.000	0,38	8.831.100.000	0,38	8.831.100.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						**1.041.041.000**		**2.579.455.000**		**2.479.455.000**		**9.541.041.000**		**9.541.041.000**	
	Meningkatnya Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDRB ADHB	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	10,74	11,12	1.041.041.000	11,33	2.579.455.000	11,66	2.479.455.000	12,14	9.541.041.000	12,62	9.541.041.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Luar Negeri
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						**2.595.650.000**		**2.895.650.000**		**3.095.650.000**		**3.345.650.000**		**3.595.650.000**	
	Meningkatnya Indeks Keberdayaan Konsumen	Persentase kenaikan Indeks Keberdayaan Konsumen	%	N/A	1,05	931.808.000	1,07	1.231.808.000	1,08	1.431.808.000	1,09	1.681.808.000	1,09	1.931.808.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri
	Meningkatnya layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta	%	N/A	2,5	1.024.262.000	3	1.024.262.000	3,5	1.024.262.000	4	1.024.262.000	4	1.024.262.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Surakarta Kelas A
	Meningkatnya layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang	%	N/A	10	639.580.000	10	639.580.000	10	639.580.000	10	639.580.000	10	639.580.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Semarang Kelas A
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						**950.000.000**		**950.000.000**		**950.000.000**		**3.950.000.000**		**3.950.000.000**	
	Meningkatnya nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi Pameran Dalam Negeri	Persentase peningkatan nilai omset pelaku usaha yang difasilitasi pameran dalam negeri	%	N/A	10	950.000.000	10	950.000.000	10	950.000.000	10	3.950.000.000	10	3.950.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Perdagangan Dalam Negeri
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						**10.629.164.000**		**13.559.898.000**		**14.430.525.000**		28.429.164.000		28.429.164.000	
PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						**10.163.036.000**		**13.093.770.000**		**13.964.397.000**		**27.963.036.000**		**27.963.036.000**	
	Meningkatnya pertumbuhan jumlah pelaku usaha indutri	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah Pada Level Provinsi	%	N/A	6,23	3.370.876.000	6,45	4.170.876.000	6,67	4.570.876.000	6,89	7.170.876.000	7,12	7.170.876.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pemberdayaan Industri
	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi indutri	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri	%	N/A	2,1	1.495.500.000	2,3	1.495.500.000	2,4	1.495.500.000	2,5	4.495.500.000	2,6	4.495.500.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pembangunan Sumber Daya dan Perwilayahan Industri
	Meningkatnya pelayanan sektor industri	Persentase Jumlah Peningkatan Pelayanan Sektor Industri	%	N/A	10	656.432.000	12	856.432.000	14	656.432.000	16	4.156.432.000	18	4.156.432.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri
	Meningkatnya pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	%	N/A	6,98	2.136.789.000	7,07	2.136.789.000	7,11	2.136.789.000	7,58	2.636.789.000	7,93	2.636.789.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Logam Dan Kayu (BILK) Kelas A
	Meningkatnya peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	%	N/A	86	1.603.439.000	87	3.534.173.000	88	4.204.800.000	89	8.603.439.000	89	8.603.439.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A (BIPTAK)
	Meningkatnya pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	%	N/A	4,4	900.000.000	4,43	900.000.000	4,47	900.000.000	4,5	900.000.000	4,5	900.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A (BIKDK)
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						**145.376.000**		**145.376.000**		**145.376.000**		**145.376.000**		**145.376.000**	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Industri yang diterbitkan rekomendasi Perijinan dan Dilakukan Pengawasan	Persentase kenaikan industri yang diterbitkan rekomendasi perizinan dan dilakukan pengawasan	%	N/A	6,5	145.376.000	7	145.376.000	7,5	145.376.000	8,5	145.376.000	9	145.376.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						**320.752.000**		**320.752.000**		**320.752.000**		**320.752.000**		**320.752.000**	
	Meningkatnya industri yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase kenaikan jumlah industri yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional	%	N/A	6	320.752.000	7	320.752.000	8	320.752.000	9	320.752.000	10	320.752.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Bidang Pengembangan Sarana Prasarana, Pengawasan dan Pengendalian Industri
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						**146.673.000**		**147.082.000**		**147.492.000**		192.192.000		211.412.000	
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI						**146.673.000**		**147.082.000**		**147.492.000**		**192.192.000**		**211.412.000**	
	Meningkatnya penempatan transmigrasi terhadap animo transmigrasi	Persentase penempatan transmigrasi terhadap animo transmigrasi	%	4,44	2,06	116.673.000	5,11	117.082.000	7,14	117.492.000	8,08	122.192.000	10,02	134.412.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatnya pelatihan transmigrasi terhadap penempatan transmigrasi	Persentase penempatan transmigran terhadap calon transmigran yang di fasilitasi di Balai Latihan Kerja Pertanian	%	4,44	1,2	30.000.000	1,28	30.000.000	1,37	30.000.000	1,5	70.000.000	1,6	77.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Balai Latihan Kerja Pertanian Klampok
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						**706.367.750.000**		**703.816.534.000**		**709.162.271.000**		**711.222.372.000**		**727.066.638.000**	
SEKRETARIAT DAERAH						**357.354.186.000**		**354.802.970.000**		**360.148.707.000**		362.208.808.000		364.419.941.000	
PROGRAM PENATAAN ORGANISASI						**1.739.028.000**		**2.144.018.000**		**2.344.018.000**		**2.461.268.000**		**2.601.268.000**	
	Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah	Persentase Perangkat Daerah yang Skor Kematangan Organisasinya dalam kategori tinggi	%	66	71	257.352.000	72	322.352.000	73	347.352.000	74	364.102.000	75	384.102.000	BIRO ORGANISASI
	Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%	85,71	91,43	207.400.000	91,43	272.400.000	91,43	297.400.000	91,43	314.150.000	91,43	334.150.000	BIRO ORGANISASI
	Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah	Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan hasil Analisis Jabatan secara efektif	%	92	92	207.800.000	92	272.800.000	92	297.800.000	92	314.550.000	92	334.550.000	BIRO ORGANISASI
	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah	Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A	%	N/A	59,52	140.000.000	66,66	155.000.000	64,28	180.000.000	69,04	196.750.000	73,8	216.750.000	BIRO ORGANISASI
	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah	Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	%	N/A	71,42	155.860.000	74,28	155.860.000	77,14	180.860.000	80	180.860.000	82,85	180.860.000	BIRO ORGANISASI
	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP meningkat	%	64,28	70	235.160.000	70	300.150.000	70	325.150.000	70	341.900.000	70	361.900.000	BIRO ORGANISASI
	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan ketatalaksanan dan pelayanan publik di Jawa Tengah	Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	57,7	93	271.140.000	94	336.140.000	95	361.140.000	96	377.890.000	97	397.890.000	BIRO ORGANISASI
	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan ketatalaksanan dan pelayanan publik di Jawa Tengah	Persentase UPT yang memperoleh nilai IPP (Indeks Pelayanan Publik) Mandiri A - (Sangat Baik) ke atas	%	N/A	39,21	264.316.000	45,75	329.316.000	52,28	354.316.000	58,82	371.066.000	65,35	391.066.000	BIRO ORGANISASI
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH						**2.715.000.000**		**3.390.000.000**		**3.990.000.000**		**4.092.925.000**		**4.568.956.000**	
	Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan, kerjasama dan otonomi daerah	Persentase pemetaan potensi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	%	N/A	100	1.035.000.000	100	1.450.000.000	100	1.740.000.000	100	1.707.925.000	100	1.786.000.000	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
	Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan, kerjasama dan otonomi daerah	Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang tindaklanjuti	%	N/A	100	900.000.000	100	1.040.000.000	100	1.180.000.000	100	1.200.000.000	100	1.220.000.000	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
	Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan, kerjasama dan otonomi daerah	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%	N/A	100	780.000.000	100	900.000.000	100	1.070.000.000	100	1.185.000.000	100	1.562.956.000	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA
PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT						**340.259.994.000**		**334.905.700.000**		**337.315.700.000**		**338.265.700.000**		**339.215.700.000**	
	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan dasar	Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan dasar	%	N/A	85	825.000.000	86	825.000.000	87	825.000.000	88	825.000.000	89	825.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan Non dasar	Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan non dasar	%	N/A	85	1.725.000.000	86	1.725.000.000	87	1.725.000.000	88	1.725.000.000	89	1.725.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Fasilitas Keagamaan dalam kondisi baik	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%	N/A	63	337.709.994.000	64	332.355.700.000	65	334.765.700.000	66	335.715.700.000	67	336.665.700.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM						**2.312.898.000**		**2.955.302.000**		**4.914.772.000**		**5.190.315.000**		**5.469.017.000**	
	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Indeks Reformasi Hukum	Angka	91,4	92	843.129.000	92,5	1.065.401.000	93	1.727.843.000	93,5	1.820.974.000	94	1.961.744.000	BIRO HUKUM
	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Kabupaten/ Kota	Persentase Efektifitas Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota	%	N/A	96	490.313.000	97	637.884.000	98	1.042.438.000	99	1.088.466.000	100	1.159.389.000	BIRO HUKUM
	Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Penanganan Permasalahan Hukum	Capaian Pemberian Bantuan Hukum	%	N/A	100	827.916.000	100	1.058.616.000	100	1.815.052.000	100	1.941.588.000	100	1.959.804.000	BIRO HUKUM
	Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Penanganan Permasalahan Hukum	Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Angka	99,8	86	151.540.000	87	193.401.000	88	329.439.000	89	339.287.000	90	388.080.000	BIRO HUKUM
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						**4.722.952.000**		**5.520.000.000**		**5.632.000.000**		**5.709.000.000**		**5.865.000.000**	
	Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan perekonomian makro	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%	N/A	80	347.000.000	80	485.000.000	80	500.000.000	80	515.000.000	80	520.000.000	BIRO PEREKONOMIAN
	Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan perekonomian mikro	Persentase capaian kinerja program bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	%	N/A	85	797.000.000	85	1.000.000.000	85	1.050.000.000	85	1.065.000.000	85	1.080.000.000	BIRO PEREKONOMIAN
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup	Persentase capaian kinerja program bidang Lingkungan Hidup	%	N/A	85	338.000.000	85	430.000.000	85	435.000.000	85	445.000.000	85	460.000.000	BIRO PEREKONOMIAN
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Energi Sumber Daya Mineral	Persentase capaian kinerja program bidang Energi Sumber Daya Mineral	%	N/A	85	347.000.000	85	465.000.000	85	475.000.000	85	480.000.000	85	490.000.000	BIRO PEREKONOMIAN
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase capaian kinerja program bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	%	N/A	87	818.952.000	87	955.000.000	87	970.000.000	87	985.000.000	87	1.000.000.000	BIRO PEREKONOMIAN
	Meningkatnya Capaian Kinerja BUMD Jasa Keuangan	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan	%	N/A	1,95	875.000.000	2	915.000.000	2,05	922.000.000	2,08	930.000.000	2,1	955.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
	Meningkatnya Capaian Kinerja BUMD Jasa Aneka Usaha	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Aneka Usaha	%	N/A	2,3	800.000.000	2,5	840.000.000	2,65	850.000.000	2,85	857.000.000	3	900.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
	Meningkatnya capaian kinerja BLUD	Persentase nilai kemandirian BLUD	%	N/A	55	400.000.000	55,25	430.000.000	55,6	430.000.000	55,75	432.000.000	56	460.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						**2.279.314.000**		**2.562.950.000**		**2.587.217.000**		**2.714.600.000**		**2.835.000.000**	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	%	N/A	92	1.112.084.000	93	1.226.300.000	94	1.236.725.000	95	1.290.500.000	96	1.345.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Persentase Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	%	N/A	85	556.900.000	86	654.350.000	88	658.700.000	90	695.900.000	91	735.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	Meningkatnya Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM	Persentase Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ	%	N/A	83	610.330.000	85	682.300.000	86	691.792.000	88	728.200.000	90	755.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						**3.325.000.000**		**3.325.000.000**		**3.365.000.000**		**3.775.000.000**		**3.865.000.000**	
	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang administrasi pembangunan Kewilayahan	Persentase realisasi bantuan keuangan	%	85	86	1.000.000.000	87	1.000.000.000	88	1.000.000.000	89	1.100.000.000	90	1.110.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Meningkatnya kualitas Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja Perangkat Daerah	%	N/A	86,5	300.000.000	87	300.000.000	87,5	300.000.000	88	325.000.000	88,5	335.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Meningkatnya kualitas Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di usulkan	%	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	550.000.000	100	560.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang administrasi pembangunan daerah	Persentase Realisasi Pelaksanaan APBD dan APBN	%	N/A	90	1.525.000.000	91	1.525.000.000	92	1.565.000.000	93	1.800.000.000	94	1.860.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DPRD						**349.013.564.000**		**349.013.564.000**		**349.013.564.000**		349.013.564.000		362.646.697.000	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						**349.013.564.000**		**349.013.564.000**		**349.013.564.000**		**349.013.564.000**		**362.646.697.000**	
	Meningkatnya Fasilitasi Layanan Kehumasan	Nilai survei kepuasan layanan kehumasan	Angka	N/A	75	248.034.589.000	75,5	248.034.589.000	76	248.034.589.000	76,5	248.034.589.000	77	261.667.722.000	Sekretariat DPRD - Bagian Hubungan Masyarakat
	Meningkatnya Fasilitasi Layanan Persidangan	Nilai survei kepuasan layanan persidangan	Angka	N/A	75	100.978.975.000	75,5	100.978.975.000	76	100.978.975.000	76,5	100.978.975.000	77	100.978.975.000	Sekretariat DPRD - Bagian Persidangan
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						**7.373.979.780.500**		**7.635.849.117.100**		**8.317.614.375.400**		**8.970.306.354.889**		**9.612.870.590.244**	
PERENCANAAN						**12.536.000.000**		**13.885.000.000**		**12.985.000.000**		14.005.000.000		14.415.000.000	
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						**4.900.000.000**		**5.740.000.000**		**5.040.000.000**		**6.040.000.000**		**6.440.000.000**	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah dengan Nasional	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	N/A	80,31	270.000.000	81,52	500.000.000	82,74	300.000.000	83,98	600.000.000	85,24	1.000.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
	Meningkatnya Perencanaan daerah yang berbasis data, hasil evaluasi dan risiko	Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah	%	N/A	87,29	1.630.000.000	88,6	2.240.000.000	89,93	1.740.000.000	91,28	1.940.000.000	92,56	1.940.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
	Meningkatnya Keterhubungan Kinerja Perangkat Daerah dengan Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase Keterhubungan Kinerja Perangkat Daerah Dengan Kinerja Daerah	%	N/A	98,74	3.000.000.000	98,86	3.000.000.000	98,98	3.000.000.000	99,1	3.500.000.000	99,22	3.500.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						**7.636.000.000**		**8.145.000.000**		**7.945.000.000**		**7.965.000.000**		**7.975.000.000**	
	Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Sektoral Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kesesuaian Perencanaan pembangunan sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	N/A	89,08	490.000.000	90,42	750.000.000	91,77	650.000.000	93,15	650.000.000	94,55	650.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	Meningkatnya keterhubungan kinerja perangkat daerah mendukung kinerja daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	N/A	99,07	200.000.000	99,19	200.000.000	99,31	200.000.000	99,43	200.000.000	99,55	200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Sektoral Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	N/A	80,49	2.041.000.000	81,71	2.200.000.000	82,93	2.150.000.000	84,17	2.150.000.000	85,43	2.150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Sektoral Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	N/A	76,59	1.220.000.000	77,75	1.300.000.000	78,91	1.240.000.000	80,1	1.250.000.000	81,3	1.250.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Sektoral Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Kesesuaian Perencanaan pembangunan sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	N/A	85,76	1.100.000.000	87,05	1.100.000.000	88,35	1.100.000.000	89,68	1.100.000.000	91,02	1.100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	Meningkatnya keterhubungan kinerja perangkat daerah mendukung kinerja daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	%	N/A	97,84	200.000.000	97,96	200.000.000	98,08	200.000.000	98,2	200.000.000	98,32	200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	Meningkatnya keterhubungan kinerja perangkat daerah mendukung kinerja daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	N/A	99,29	200.000.000	99,41	200.000.000	99,53	200.000.000	99,65	200.000.000	99,77	200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Sektoral Pembangunan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	N/A	87,03	585.000.000	88,34	595.000.000	89,66	605.000.000	91,01	615.000.000	92,38	625.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Sektoral Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tingkat Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	N/A	83,84	1.600.000.000	85,11	1.600.000.000	86,38	1.600.000.000	87,67	1.600.000.000	88,99	1.600.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
KEUANGAN						**7.315.115.225.000**		**7.582.242.432.000**		**8.263.008.894.000**		8.913.870.187.000		9.553.233.630.750	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						**7.270.161.584.000**		**7.532.612.312.000**		**8.210.864.884.000**		**8.843.843.726.000**		**9.477.252.763.000**	
	Tersusunnya dokumen belanja transfer APBD Provinsi tepat waktu	Persentase belanja transfer dan belanja tidak terduga yang tersusun tepat waktu	%	100	100	7.253.508.065.000	100	7.514.486.815.000	100	8.191.833.114.000	100	8.822.199.477.000	100	9.454.061.296.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Sekretariat
	Tersusunnya dokumen APBD Provinsi Jawa Tengah	Persentase Penetapan APBD Provinsi Tepat Waktu	%	100	100	8.059.228.000	100	8.745.590.000	100	9.182.869.000	100	9.642.014.000	100	10.124.116.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran
	Tersusunnya dokumen APBD Kabupaten/Kota tepat waktu	Persentase evaluasi APBD kabupaten/kota tepat waktu	%	N/A	100	556.435.000	100	584.255.000	100	613.467.000	100	1.000.000.000	100	1.230.000.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Anggaran
	Tersusunnya LKPD tepat waktu	Persentase penyampaian LKPD tepat waktu	%	100	100	4.534.521.000	100	5.028.217.000	100	5.279.628.000	100	6.153.227.000	100	6.550.890.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Akuntansi
	Terlaksananya pengelolaan perbendaharaan yang profesional dan akuntabel	Persentase pengelolaan perbendaharaan yang profesional dan akuntabel	%	100	100	3.503.335.000	100	3.767.435.000	100	3.955.806.000	100	4.849.008.000	100	5.286.461.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						**4.826.533.000**		**5.089.018.000**		**5.343.645.000**		**6.304.615.000**		**6.641.218.750**	
	Tersusunnya Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah	Persentase Tersusunnya Kebijakan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah	%	N/A	100	352.707.000	100	391.505.000	100	411.256.000	100	560.099.000	100	609.478.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah
	Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Kenaikan Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif	%	N/A	50,5	1.330.745.000	51	1.397.282.000	51,5	1.467.145.000	52	1.740.672.000	52,5	1.827.705.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah
	Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Tingkat Administrasi BMD yang Andal	%	N/A	70,5	1.057.256.000	71	1.110.118.000	71,5	1.165.624.000	72	1.223.905.000	72,5	1.285.100.750	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah
	Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-Undangan	%	N/A	100	1.329.575.000	100	1.396.052.000	100	1.465.855.000	100	1.727.410.000	100	1.813.780.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah
	Meningkatnya pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Penurunan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD dalam rangka Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif	%	N/A	9	756.250.000	8,5	794.061.000	8	833.765.000	7,5	1.052.529.000	7	1.105.155.000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Bidang Aset Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						**40.127.108.000**		**44.541.102.000**		**46.800.365.000**		**63.721.846.000**		**69.339.649.000**	
	Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	%	N/A	100	2.146.365.000	100	2.382.465.000	100	2.502.661.000	100	3.408.428.000	100	3.708.919.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan
	Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah	%	N/A	100	2.659.260.000	100	2.951.778.000	100	3.100.697.000	100	4.222.905.000	100	4.595.202.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
	Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	Persentase Tersusunnya Kebijakan Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain	%	N/A	100	355.291.000	100	394.373.000	100	414.269.000	100	564.202.000	100	613.943.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah, Pendapatan Lain dan Pemanfaatan Aset Daerah
	Terlaksananya Pengendalian Kinerja Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lain, dan Pemanfaatan Aset	Persentase Terlaksananya Pengendalian Kinerja Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lain, dan Pemanfaatan Aset	%	N/A	100	418.918.000	100	464.999.000	100	488.458.000	100	665.241.000	100	723.890.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Bidang Pengendalian dan Evaluasi
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang I	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang I	%	N/A	100	535.400.000	100	594.294.000	100	624.276.000	100	850.216.000	100	925.172.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang I	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang I	%	N/A	100	245.465.000	100	272.466.000	100	286.212.000	100	389.798.000	100	424.164.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang I
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang II	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang II	%	N/A	100	305.549.000	100	339.159.000	100	356.270.000	100	485.211.000	100	527.989.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang II	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang II	%	N/A	100	231.300.000	100	256.743.000	100	269.695.000	100	367.304.000	100	399.686.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang II
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang III	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Semarang III	%	N/A	100	220.281.000	100	244.512.000	100	256.847.000	100	349.807.000	100	380.645.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang III	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Semarang III	%	N/A	100	212.158.000	100	235.496.000	100	247.376.000	100	336.907.000	100	366.609.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Semarang III
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Ungaran	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Ungaran	%	N/A	100	370.643.000	100	411.414.000	100	432.169.000	100	588.581.000	100	640.471.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Ungaran	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Ungaran	%	N/A	100	210.201.000	100	233.324.000	100	245.094.000	100	333.799.000	100	363.227.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Ungaran
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Salatiga	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Salatiga	%	N/A	100	169.643.000	100	188.304.000	100	197.804.000	100	269.394.000	100	293.143.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Salatiga	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Salatiga	%	N/A	100	166.678.000	100	185.012.000	100	194.346.000	100	264.685.000	100	288.019.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Salatiga

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kendal	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kendal	%	N/A	100	416.753.000	100	462.596.000	100	485.934.000	100	661.803.000	100	720.149.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kendal	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kendal	%	N/A	100	197.044.000	100	218.719.000	100	229.753.000	100	312.906.000	100	340.492.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kendal
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Demak	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Demak	%	N/A	100	370.551.000	100	411.312.000	100	432.062.000	100	588.435.000	100	640.312.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Demak	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Demak	%	N/A	100	254.127.000	100	282.081.000	100	296.312.000	100	403.554.000	100	439.132.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Demak
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwodadi	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwodadi	%	N/A	100	532.360.000	100	590.920.000	100	620.732.000	100	845.387.000	100	919.918.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwodadi	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwodadi	%	N/A	100	160.650.000	100	178.322.000	100	187.318.000	100	255.112.000	100	277.603.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purwodadi
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Surakarta	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Surakarta	%	N/A	100	498.595.000	100	553.441.000	100	581.362.000	100	791.769.000	100	861.572.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Surakarta	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Surakarta	%	N/A	100	209.886.000	100	232.973.000	100	244.727.000	100	333.299.000	100	362.683.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Surakarta
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Klaten	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Klaten	%	N/A	100	459.525.000	100	510.073.000	100	535.806.000	100	729.726.000	100	794.060.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Klaten	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Klaten	%	N/A	100	201.314.000	100	223.458.000	100	234.733.000	100	319.687.000	100	347.870.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Klaten
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sragen	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sragen	%	N/A	100	421.213.000	100	467.547.000	100	491.134.000	100	668.886.000	100	727.856.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sragen	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sragen	%	N/A	100	215.586.000	100	239.301.000	100	251.374.000	100	342.351.000	100	372.533.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sragen
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sukoharjo	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Sukoharjo	%	N/A	100	375.499.000	100	416.804.000	100	437.832.000	100	596.292.000	100	648.862.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sukoharjo	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Sukoharjo	%	N/A	100	181.976.000	100	201.993.000	100	212.184.000	100	288.978.000	100	314.455.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Sukoharjo
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonogiri	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonogiri	%	N/A	100	439.587.000	100	487.942.000	100	512.559.000	100	698.065.000	100	759.607.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonogiri	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonogiri	%	N/A	100	201.295.000	100	223.437.000	100	234.710.000	100	319.656.000	100	347.838.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonogiri
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Karanganyar	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Karanganyar	%	N/A	100	384.701.000	100	427.018.000	100	448.561.000	100	610.905.000	100	664.763.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Karanganyar	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Karanganyar	%	N/A	100	180.418.000	100	200.264.000	100	210.368.000	100	286.503.000	100	311.762.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Karanganyar
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Boyolali	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Boyolali	%	N/A	100	380.454.000	100	422.304.000	100	443.609.000	100	604.161.000	100	657.425.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Boyolali	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Boyolali	%	N/A	100	158.775.000	100	176.241.000	100	185.131.000	100	252.135.000	100	274.364.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Boyolali
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pati	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pati	%	N/A	100	458.960.000	100	509.446.000	100	535.147.000	100	728.828.000	100	793.083.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pati	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pati	%	N/A	100	195.400.000	100	216.894.000	100	227.836.000	100	310.295.000	100	337.651.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pati

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Blora	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Blora	%	N/A	100	419.720.000	100	465.890.000	100	489.394.000	100	666.516.000	100	725.277.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Blora	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Blora	%	N/A	100	175.230.000	100	194.505.000	100	204.318.000	100	278.265.000	100	302.797.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Blora
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Rembang	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Rembang	%	N/A	100	282.681.000	100	313.775.000	100	329.607.000	100	448.898.000	100	488.473.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Rembang	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Rembang	%	N/A	100	224.425.000	100	249.112.000	100	261.680.000	100	356.387.000	100	387.807.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Rembang
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kudus	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kudus	%	N/A	100	377.862.000	100	419.427.000	100	440.587.000	100	600.045.000	100	652.946.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kudus	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kudus	%	N/A	100	153.876.000	100	170.803.000	100	179.419.000	100	244.355.000	100	265.897.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kudus
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Jepara	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Jepara	%	N/A	100	426.710.000	100	473.648.000	100	497.544.000	100	677.616.000	100	737.355.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Jepara	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Jepara	%	N/A	100	198.215.000	100	220.019.000	100	231.119.000	100	314.765.000	100	342.516.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Jepara
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pekalongan	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pekalongan	%	N/A	100	220.880.000	100	245.177.000	100	257.546.000	100	350.757.000	100	381.681.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pekalongan	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pekalongan	%	N/A	100	178.382.000	100	198.005.000	100	207.994.000	100	283.271.000	100	308.244.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pekalongan
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kajen	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kajen	%	N/A	100	335.605.000	100	372.522.000	100	391.315.000	100	532.941.000	100	579.925.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kajen	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kajen	%	N/A	100	196.197.000	100	217.779.000	100	228.766.000	100	311.561.000	100	339.028.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kajen
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Batang	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Batang	%	N/A	100	362.962.000	100	402.888.000	100	423.214.000	100	576.383.000	100	627.198.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Batang	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Batang	%	N/A	100	179.911.000	100	199.701.000	100	209.776.000	100	285.699.000	100	310.886.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Batang
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pemalang	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Pemalang	%	N/A	100	548.290.000	100	608.603.000	100	639.307.000	100	870.685.000	100	947.445.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pemalang	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Pemalang	%	N/A	100	208.264.000	100	231.174.000	100	242.836.000	100	330.724.000	100	359.881.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemalang
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Tegal	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Tegal	%	N/A	100	321.368.000	100	356.719.000	100	374.715.000	100	510.332.000	100	555.324.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Tegal	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Tegal	%	N/A	100	187.082.000	100	207.661.000	100	218.138.000	100	297.086.000	100	323.278.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Tegal
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Slawi	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Slawi	%	N/A	100	571.206.000	100	634.040.000	100	579.759.000	100	907.075.000	100	987.044.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Slawi	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Slawi	%	N/A	100	167.387.000	100	185.800.000	100	293.599.000	100	265.810.000	100	289.245.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Slawi
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Brebes	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Brebes	%	N/A	100	597.074.000	100	662.752.000	100	696.188.000	100	948.154.000	100	1.031.743.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Brebes	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Brebes	%	N/A	100	185.288.000	100	205.670.000	100	216.046.000	100	294.237.000	100	320.178.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Brebes
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwokerto	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purwokerto	%	N/A	100	407.889.000	100	452.756.000	100	475.599.000	100	647.728.000	100	704.832.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwokerto	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purwokerto	%	N/A	100	215.750.000	100	239.483.000	100	251.564.000	100	342.611.000	100	372.816.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banyumas
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Cilacap	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Cilacap	%	N/A	100	387.574.000	100	430.207.000	100	451.911.000	100	615.468.000	100	669.728.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Cilacap	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Cilacap	%	N/A	100	176.865.000	100	196.321.000	100	206.224.000	100	280.861.000	100	305.622.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Cilacap
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purbalingga	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purbalingga	%	N/A	100	472.954.000	100	524.980.000	100	551.464.000	100	751.050.000	100	817.265.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purbalingga	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purbalingga	%	N/A	100	184.270.000	100	204.540.000	100	214.859.000	100	292.621.000	100	318.419.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purbalingga
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Banjarnegara	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Banjarnegara	%	N/A	100	284.725.000	100	316.044.000	100	331.989.000	100	452.144.000	100	492.005.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Banjarnegara	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Banjarnegara	%	N/A	100	185.574.000	100	205.987.000	100	216.380.000	100	294.692.000	100	320.672.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Banjarnegara
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Magelang	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Magelang	%	N/A	100	387.928.000	100	430.600.000	100	452.324.000	100	616.030.000	100	670.340.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Magelang	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Magelang	%	N/A	100	184.581.000	100	204.885.000	100	215.221.000	100	293.114.000	100	318.956.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Magelang
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Mungkid	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Mungkid	%	N/A	100	458.186.000	100	508.587.000	100	534.245.000	100	727.599.000	100	791.746.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Mungkid	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Mungkid	%	N/A	100	185.309.000	100	205.693.000	100	216.070.000	100	294.270.000	100	320.214.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Mungkid
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kebumen	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Kebumen	%	N/A	100	369.847.000	100	410.530.000	100	431.242.000	100	587.317.000	100	639.096.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kebumen	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Kebumen	%	N/A	100	199.372.000	100	221.303.000	100	232.468.000	100	316.603.000	100	344.515.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebumen
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purworejo	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Purworejo	%	N/A	100	305.817.000	100	339.457.000	100	356.583.000	100	485.637.000	100	528.452.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purworejo	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Purworejo	%	N/A	100	174.020.000	100	193.162.000	100	202.908.000	100	276.343.000	100	300.706.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Purworejo
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Temanggung	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Temanggung	%	N/A	100	334.753.000	100	371.576.000	100	390.322.000	100	531.588.000	100	578.454.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Temanggung	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Temanggung	%	N/A	100	167.593.000	100	186.028.000	100	195.413.000	100	266.137.000	100	289.601.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Temanggung
	Tercapainya Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonosobo	Persentase Capaian Pendapatan Pajak Daerah UPPD Wonosobo	%	N/A	100	250.384.000	100	277.926.000	100	291.947.000	100	397.610.000	100	432.664.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo
	Tercapainya Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonosobo	Persentase Capaian Pendapatan Retribusi Daerah UPPD Wonosobo	%	N/A	100	177.233.000	100	196.729.000	100	206.654.000	100	281.446.000	100	306.258.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Wonosobo

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Terlaksananya pemanfaatan sistem informasi pendapatan daerah Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi	%	100	100	12.956.048.000	100	14.381.213.000	100	15.106.753.000	100	20.574.204.000	100	22.388.051.000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - Unit Pengelolaan Basis Data Pajak dan Retribusi Kelas A
KEPEGAWAIAN						**8.200.520.000**		**8.304.800.000**		**9.304.800.000**		9.304.800.000		9.304.800.000	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						**8.200.520.000**		**8.304.800.000**		**9.304.800.000**		**9.304.800.000**		**9.304.800.000**	
	Meningkatnya kompetensi ASN	Persentase peningkatan pengembangan kompetensi ASN	%	N/A	85	2.626.000.000	100	2.651.000.000	100	3.651.000.000	100	3.651.000.000	100	3.651.000.000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi
	Terpenuhinya Jabatan ASN sesuai dengan Manajemen Talenta	Persentase pemenuhan jabatan ASN melalui Manajemen Talenta	%	N/A	92	1.090.000.000	94	1.215.000.000	96	1.215.000.000	98	1.215.000.000	100	1.215.000.000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Mutasi dan Promosi
	Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan ASN	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	%	N/A	10	845.000.000	10	852.800.000	10	852.800.000	10	852.800.000	10	852.800.000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja
	Meningkatnya kinerja ASN	Persentase peningkatan kinerja ASN	%	N/A	85	275.000.000	87,5	250.000.000	90	250.000.000	92,5	250.000.000	95	250.000.000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pembinaan dan Penilaian Kinerja
	Terpenuhinya kebutuhan ASN sesuai formasi	Persentase pemenuhan ASN sesuai formasi	%	100	100	1.600.000.000	100	1.455.000.000	100	1.455.000.000	100	1.455.000.000	100	1.455.000.000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
	Meningkatnya akurasi data dan dokumen kepegawaian ASN	Persentase peningkatan akurasi data dan dokumen kepegawaian ASN	%	N/A	70	743.520.000	80	860.000.000	90	860.000.000	100	860.000.000	100	860.000.000	Badan Kepegawaian Daerah - Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
	Terpetakannya kompetensi ASN	Persentase pemetaan kompetensi ASN	%	100	100	1.021.000.000	100	1.021.000.000	100	1.021.000.000	100	1.021.000.000	100	1.021.000.000	Badan Kepegawaian Daerah - Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						**27.797.005.000**		**20.459.200.000**		**21.174.195.000**		21.577.815.000		23.018.510.950	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**27.797.005.000**		**20.459.200.000**		**21.174.195.000**		**21.577.815.000**		**23.018.510.950**	
	Meningkatnya tingkat kelulusan pengembangan kompetensi teknis	Persentase Kelulusan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	100	95,5	1.600.000.000	96	1.750.000.000	96,5	1.900.000.000	97	2.050.000.000	97,5	2.200.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
	Meningkatnya tingkat kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	Persentase kelulusan pengembangan kompetensi jabatan fungsional	%	100	95,5	1.200.000.000	96	1.350.000.000	96,5	1.500.000.000	97	1.650.000.000	97,5	1.800.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
	Meningkatnya tingkat kelulusan pengembangan kompetensi Manajerial, Sosial Kultural dan Pemerintahan Dalam Negeri	Persentase tingkat kelulusan pengembangan kompetensi manajerial, sosiokultural dan pemerintahan dalam negeri	%	100	95,5	23.300.000.000	96	15.500.000.000	96,5	15.800.000.000	97	15.800.000.000	97,5	16.800.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural dan Pemerintahan Dalam Negeri
	Terjaganya kualitas mutu pelaksanaan pelatihan (Evaluasi Penyelenggaraan dan Pasca Pelatihan)	Indeks Penjaminan Mutu Pelaksanaan Pelatihan (Evaluasi Penyelenggaraan dan Pasca Pelatihan)	Angka	3,5	3,5	334.500.000	3,5	390.250.000	3,5	439.500.000	3,5	483.750.000	3,5	534.500.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
	Terjaganya kualitas perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	Persentase perencanaan bangkom yang ditindaklanjuti dokumen perencanaan	%	100	100	391.500.000	100	468.950.000	100	510.695.000	100	546.065.000	100	612.010.950	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
	Terpenuhinya persentase ASN yang lulus Sertifikasi Kompetensi	Persentase ASN lulus dan tersertifikasi kompetensi	%	100	50	971.005.000	50	1.000.000.000	50	1.024.000.000	50	1.048.000.000	50	1.072.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah - Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						**6.400.000.000**		**6.790.000.000**		**6.905.000.000**		7.300.000.000		7.500.000.000	
PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH						**6.400.000.000**		**6.790.000.000**		**6.905.000.000**		**7.300.000.000**		**7.500.000.000**	
	Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan pembangunan daerah	Persentase Pengkajian Kebijakan Pembangunan Riset dan Inovasi sesuai prioritas Daerah	%	100	100	1.735.000.000	100	1.800.000.000	100	1.830.000.000	100	1.960.000.000	100	2.010.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan riset dan inovasi sesuai target	Persentase Pelaksanaan Riset dan Inovasi sesuai target	%	100	100	1.790.000.000	100	1.925.000.000	100	1.955.000.000	100	2.085.000.000	100	2.135.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Pelaksanaan Riset dan Inovasi
	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pemanfaatan riset dan inovasi sesuai target	Persentase Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi sesuai target	%	100	100	1.775.000.000	100	1.875.000.000	100	1.905.000.000	100	1.985.000.000	100	2.035.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi
	Meningkatnya kapasitas SDM IPTEK dan infrastruktur riset dan inovasi sesuai kebutuhan	Persentase Peningkatan SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi sesuai kebutuhan	%	100	100	1.100.000.000	100	1.190.000.000	100	1.215.000.000	100	1.270.000.000	100	1.320.000.000	Badan Riset dan Inovasi Daerah - Bidang SDM IPTEK dan Infrastruktur Riset dan Inovasi
PENGELOLAAN PENGHUBUNG						**3.931.030.500**		**4.167.685.100**		**4.236.486.400**		4.248.552.889		5.398.648.544	
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG						**3.931.030.500**		**4.167.685.100**		**4.236.486.400**		**4.248.552.889**		**5.398.648.544**	
	Tercapainya pelaksanaan pelayanan penghubung	Persentase ketercapaian pelaksanaan pelayanan penghubung	%	100	100	3.931.030.500	100	4.167.685.100	100	4.236.486.400	100	4.248.552.889	100	5.398.648.544	Badan Penghubung - Sekretariat
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						**8.524.520.000**		**8.524.520.000**		**9.524.520.000**		**13.829.520.000**		**17.154.520.000**	
INSPEKTORAT DAERAH						**8.524.520.000**		**8.524.520.000**		**9.524.520.000**		13.829.520.000		17.154.520.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						**6.799.520.000**		**6.799.520.000**		**7.799.520.000**		**9.879.520.000**		**10.979.520.000**	
	Meningkatnya efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan oleh APIP, APIP Lainnya, dan BPK yang selesai ditindaklanjuti	%	95,79	96,23	240.000.000	96,58	240.000.000	96,82	240.000.000	97	320.000.000	97,1	420.000.000	INSPEKTORAT - Sekretariat
	Meningkatnya kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan tata kelola risiko dan kepatuhan bidang pengawasan khusus	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Khusus	%	N/A	100	1.296.020.000	100	1.296.020.000	100	1.546.020.000	100	2.046.020.000	100	2.296.020.000	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS
	Meningkatnya kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan tata kelola risiko dan kepatuhan bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	N/A	100	1.877.120.000	100	1.877.120.000	100	2.127.120.000	100	2.627.120.000	100	2.877.120.000	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
	Meningkatnya kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan tata kelola risiko dan kepatuhan bidang akuntabilitas keuangan daerah	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	%	N/A	100	1.495.940.000	100	1.495.940.000	100	1.745.940.000	100	2.245.940.000	100	2.495.940.000	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH
	Meningkatnya kualitas rekomendasi hasil pengawasan terhadap perbaikan tata kelola risiko dan kepatuhan bidang pengawasan kinerja perangkat daerah	Persentase Laporan Eksekutif kepada Gubernur Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	%	N/A	100	1.890.440.000	100	1.890.440.000	100	2.140.440.000	100	2.640.440.000	100	2.890.440.000	INSPEKTORAT - INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						**1.725.000.000**		**1.725.000.000**		**1.725.000.000**		**3.950.000.000**		**6.175.000.000**	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pengawasan	Persentase ketercapaian realisasi pelaksanaan pengawasan dibandingkan dengan PKPT	%	N/A	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	300.000.000	100	475.000.000	INSPEKTORAT - Sekretariat
	Meningkatnya kapabilitas pengelolaan pengendalian korupsi di perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan IEPK level 3	%	N/A	35,71	950.000.000	42,86	950.000.000	50	950.000.000	57,14	2.000.000.000	64,29	3.000.000.000	INSPEKTORAT - Sekretariat
	Meningkatnya penguatan integritas di perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang memperoleh predikat Zona Integritas	%	N/A	42,85	350.000.000	52,38	350.000.000	69,05	350.000.000	76,19	400.000.000	100	450.000.000	INSPEKTORAT - Sekretariat
	Meningkatnya penguatan reformasi birokrasi di perangkat daerah	Persentase OPD yang mendapatkan nilai RB lebih dari (>) 80	%	N/A	61,9	350.000.000	69,05	350.000.000	76,19	350.000.000	83,33	1.250.000.000	90,48	2.250.000.000	INSPEKTORAT - Sekretariat
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						**128.175.000.000**		**129.773.104.000**		**131.565.000.000**		**131.940.000.000**		**136.365.000.000**	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**128.175.000.000**		**129.773.104.000**		**131.565.000.000**		131.940.000.000		136.365.000.000	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						**1.160.000.000**		**1.510.000.000**		**1.800.000.000**		**1.875.000.000**		**2.250.000.000**	
	Meningkatnya pembumian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Indeks Aktualisasi Pancasila	Angka	N/A	76,31	1.160.000.000	77,09	1.510.000.000	77,87	1.800.000.000	78,65	1.875.000.000	78,66	2.250.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						**95.915.000.000**		**96.265.000.000**		**96.515.000.000**		**96.590.000.000**		**97.215.000.000**	
	Terjaminnya hak-hak sipil dan hak-hak politik	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aspek Kebebasan	Angka	N/A	88,11	500.000.000	88,11	750.000.000	88,11	900.000.000	88,11	975.000.000	88,11	1.400.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Politik Dalam Negeri

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	OUTCOME/KINERJA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					2026		2027		2028		2029		2030		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya kinerja dan kapasitas lembaga demokrasi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Apek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Angka	N/A	80,47	95.415.000.000	80,71	95.515.000.000	80,96	95.615.000.000	81,99	95.615.000.000	81,99	95.815.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Politik Dalam Negeri
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						**3.850.000.000**		**4.200.000.000**		**4.700.000.000**		**4.775.000.000**		**5.500.000.000**	
	Meningkatnya peran strategis ormas dan kemandirian ormas dalam mendukung pembangunan	Indeks Kinerja Ormas	Angka	80	78,26	3.850.000.000	78,91	4.200.000.000	79,34	4.700.000.000	81	4.775.000.000	82	5.500.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						**750.000.000**		**1.048.104.000**		**1.350.000.000**		**1.425.000.000**		**2.000.000.000**	
	Meningkatnya moderasi beragama di masyarakat	Indeks Toleransi	Angka	76,76	75,4	500.000.000	76,5	798.104.000	77,6	900.000.000	78,7	975.000.000	79	1.400.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
	Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perekonomian	Indeks ketahanan Ekonomi	Angka	N/A	2,89	250.000.000	2,9	250.000.000	2,91	450.000.000	2,92	450.000.000	2,92	600.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						**26.500.000.000**		**26.750.000.000**		**27.200.000.000**		**27.275.000.000**		**29.400.000.000**	
	Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dan elemen masyarakat dalam rangka penanganan konflik sosial serta menjaga kondusifitas wilayah	Indeks Kewaspadaan Nasional	Angka	N/A	74	26.500.000.000	74,5	26.750.000.000	75	27.200.000.000	75,5	27.275.000.000	76	29.400.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

5.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan indikator yang dipilih dari indikator tujuan dan/atau sasaran pembangunan daerah. IKU pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut.

Tabel 5.2.
Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja	Perangkat Daerah Koordinator
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tingkat Kemiskinan [1)]	%	9,58	9,66-9,00	8,70-8,53	8,51-8,17	8,38-7,81	8,20-7,48	8,00-7,13	8,00-7,13	Sekretariat Daerah
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	91,28	91,50	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00	94,00	Sekretariat Daerah
3	Indeks Integritas Nasional [1)]	Angka	79,47	80,97	80.97	82,25	82,25	84,23	84,23	84,23	Sekretariat Daerah
4	Indeks Demokrasi Indonesia [1)]	Angka	n/a	85,81–89,07	86,46-89,50	86,80-90,22	86,91-91,95	87,20–90,45	88,61-90,82	88,61-90,82	Sekretariat Daerah
5	Otonomi Fiskal Daerah [2)]	%	66,91	63,56	65,72	66,80	67,89	68,90	69,84	69,84	Sekretariat Daerah
6	Pertumbuhan Ekonomi [1)]	%	4,95	4,80 - 5,60	5,00 - 6,00	5,30 - 7,00	5,60 - 7,30	6,20 - 7,70	6,40 - 8,00	6,40 - 8,00	Sekretariat Daerah
7	Indeks Modal Manusia [1)]	Angka	0,59	0,62	0,62	0,63	0,64	0,65	0,65	0,65	Sekretariat Daerah
8	Tingkat Pengangguran Terbuka [1)]	%	4,78	4,81 - 4,42	4,71 - 4,27	4,65 - 4,08	4,57 - 3,90	4,49 - 3,73	4,41 - 3,56	4,41 - 3,56	Sekretariat Daerah

Keterangan: [1)] IUP RPJPD/Indikator Sasaran Visi RPJPD

[2)] Indikator Mandatori Lainnya (Indikator mandatori Blue Print Gubernur/Wakil Gubernur, hasil evaluasi Raperda Kemendagri, dan/atau mandatori Pusat lainnya)

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari seluruh indikator tujuan dan sasaran daerah dan perangkat daerah. Indikator kinerja daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	**Aspek Geografi dan Demografi**									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup[1)4)]	Angka	69,46	75,68	75,73	75,78	75,83	75,87	75,92	75,92
2	Penurunan Intensitas Emisi GRK[1)]	%	n/a	0,32	5,32	6,69	14,03	20,30	27,64	27,64
3	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah[1)3)]	Angka	n/a	0,482	0,487	0,492	0,497	0,502	0,507	0,507
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman [1)3)]	%	9,72	13,78	17,83	21,89	25,94	30,00	32,05	32,05
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah [1)3)]	%	n/a	22,00	23,00	24,00	26,00	28,00	30,00	30,00
6	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah[1)]	% RT	n/a	25,00	29,00	30,50	32,00	35,00	36,00	36,00
7	Konsumsi Listrik per Kapita[1)3)]	kWh/ Kapita	802,05	826,11	883,94	945,82	1.040,40	1.169,00	1.250,83	1.250,83
8	Intensitas Energi Primer[1)3)]	SBM/Rp miliar	131,00	212,71	203,21	192,72	182,5	172,56	162,86	162,86
9	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) [1)3)]	%	8,63	8,23	7,83	7,43	7,03	6,64	6,25	6,25
10	Indeks Ketahanan Pangan [1)3)]	Angka	85,34	85,47	85,60	85,85	86,10	86,34	86,57	86,57
11	Kapasitas Air Baku[1)]	m^3/detik	5,20	5,20	5,82	6,45	7,07	7,70	8,32	8,32
12	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan [1)3)]	%	n/a	39,46	42,60	45,73	48,87	52,00	55,13	55,13
13	Persentase Kondisi Baik Infrastruktur Tampungan Air Kewenangan Provinsi[1)]	%	64,31	64,31	64,61	64,91	65,21	65,51	65,81	65,81
14	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi [1)3)]	Angka	67,50	68,45	69,03	69,17	69,47	69,77	70,07	70,07

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Persentase Sungai Kondisi Baik Kewenangan Provinsi [1)3)]	%	52,37	52,38	52,42	52,46	52,50	52,54	52,58	52,58
16	Indeks Risiko Bencana [1)3)]	Angka	99,61	96,18	94,75	93,33	91,90	90,48	89,05	89,05
17	Persentase Penurunan Emisi GRK[1)]									
	- Kumulatif	%	n/a	5,65	6,57	7,27	7,99	8,74	9,51	9,51
	- Tahunan	%	n/a	12,35	15,84	17,05	18,86	20,68	22,51	22,51
B	**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**									
1	Tingkat Kemiskinan[1)]	%	9,58	9,66 - 9,00	8,70 - 8,53	8,51 - 8,17	8,38 - 7,81	8,20 - 7,48	8,00 - 7,13	8,00 - 7,13
2	PDRB per Kapita[1)]	Juta Rp	47,97	49,3 - 51,1	52,0 - 55,0	56,0 - 59,8	61,0 - 65,3	67,0 - 71,8	73,0 - 78,4	73,0 - 78,4
3	Pertumbuhan Ekonomi[1)]	%	4,95	4,80 - 5,60	5,00 - 6,00	5,30 - 7,00	5,60 - 7,30	6,20 - 7,70	6,40 - 8,00	6,40 - 8,00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka[1)]	%	4,78	4,81 - 4,42	4,71 - 4,27	4,65 - 4,08	4,57 - 3,90	4,49 - 3,73	4,41 - 3,56	4,41 - 3,56
5	Rasio Gini[1)]	Angka	0,364	0,362 - 0,367	0,360 - 0,365	0,358 - 0,363	0,356 - 0,361	0,355 - 0,360	0,354 - 0,359	0,354 - 0,359
6	Indeks Modal Manusia[1)]	Angka	0,59	0,62	0,62	0,63	0,64	0,65	0,65	0,65
7	Usia Harapan Hidup (UHH) [1)3)]	Tahun	74,93	75,24	75,46	75,68	75,90	76,12	76,50	76,50
8	Angka Kematian Ibu [1)3)4)]	per 100.000 KH	74,70	79,31	78,27	77,21	76,32	75,60	74,87	74,87
9	Prevalensi *Stunting* (pendek dan sangat pendek) pada Balita [1)3)4)]	%	17,10	17,00	17,00	16,00	15,00	13,60	13,00	13,00
10	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) [1)]	%	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
11	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) [1)]	%	86,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00
12	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional [1)3)]	%	98,83	99,03	99,23	99,43	99,63	99,83	99,90	99,90
13	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca[1)]	%	85,71	85,71 - 88,57	87,86 - 90,71	90,00 - 92,86	92,15 - 95,00	94,29 - 97,14	94,76 - 97,63	94,76 - 97,63

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi[1)]	%	20,00	28,57 - 34,29	34,29 - 39,29	40,00 - 44,29	45,72 - 49,29	51,43 - 54,29	52,42 - 55,22	52,42 - 55,22
15	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca[1)]	%	68,50	71,28 - 73,78	72,49 - 74,99	73,69 - 76,19	74,90 - 77,40	76,10 - 78,60	76,35 - 78,82	76,35 - 78,82
16	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi[1)]	%	62,69	64,75 - 67,25	65,65 - 68,15	66,55 - 69,05	67,45 - 69,95	68,35 - 70,85	69,03 - 71,56	69,03 - 71,56
17	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun[1)]	Tahun	8,47	8,58 - 8,60	8,69 - 8,71	8,80 - 8,81	8,90 - 8,92	9,01 - 9,02	9,14 - 9,15	9,14 - 9,15
18	Harapan Lama Sekolah [1)3)]	Tahun	12,86	12,97 - 13,00	13,03 - 13,06	13,09 - 13,11	13,15 - 13,17	13,21 - 13,22	13,29 - 13,30	13,29 - 13,30
19	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi[1)]	%	7,82	8,18	8,43	8,67	8,92	9,17	9,41	9,41
20	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi [1)3)]	%	61,60	66,89	67,71	68,52	69,34	70,15	70,47	70,47
21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi [1)3)]	%	38,59	47,56	51,03	53,64	56,38	59,26	62,40	62,40
22	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal [1)3)]	%	14,24	20,00	21,75	23,50	25,25	27,00	28,75	28,75
23	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) [1)3)]	Angka	60,89 (2023)	62,31	62,86	63,40	63,95	64,69	65,04	65,04
24	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga [1)3)]	Angka	74,80	76,10	77,06	77,79	78,37	78,84	79,25	79,25
25	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) [1)3)4)]	Angka	0,308	0,306	0,304	0,301	0,300	0,297	0,296	0,296
26	Indeks Kesejahteraan Sosial [2)]	Angka	n/a	57,23	58,81	61,38	63,95	66,52	68,52	68,52

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C	**Aspek Daya Saing Daerah**									
1	Tingkat Inflasi[1)]	%	1,67	1,50 - 3,50	1,50 - 3,50	1,50 - 3,50	1,50 - 3,50	1,50 - 3,50	1,50 - 3,50	1,50 - 3,50
2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia[1)]	Angka	n/a	57,59	61,40	65,46	69,79	74,41	79,34	79,34
3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan[1)]	%	33,84	33,88 - 34,06	34,65 - 34,83	35,24-35,89	35,83 - 36,93	36,42 - 37,95	37,31 - 37,86	37,31 - 37,86
4	Kontribusi PDRB Provinsi[1)]	%	8,20	8,20	8,20	8,00	8,00	7,90	7,90	7,90
5	Rasio PDRB Industri Pengolahan[1)]	%	33,84	33,88 - 34,06	34,65-34,83	35,24-35,89	35,83 - 36,93	36,42 - 37,95	37,31 - 37,86	37,31 - 37,86
6	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum [1)3)]	%	3,56	3,50	3,60	3,72	3,84	3,94	4,04	4,04
7	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara [1)3)]	Ribu Orang	99,58	66,81	70,79	74,76	78.74	82,77	86,69	86,69
8	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional [1)3)]	%	n/a	12,61	13,08	13,54	14,01	14,47	14,26	14,26
9	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi [1)3)]	%	n/a	10,39	10,49	10,59	10,71	10,82	10,91	10,91
10	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi [1)3)]	%	n/a	6,01	6,23	6,45	6,67	6,89	7,12	7,12
11	Rasio Kewirausahaan Daerah [1)3)]	%	n/a	3,21	3,53	3,85	4,23	4,77	5,05	5,05
12	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB [1)3)]	%	n/a	2,00	2,16	2,34	2,53	2,74	2,88	2,88
13	*Return on Aset* (RoA) BUMD[1)]	%	n/a	1,44	1,62	1,82	2,00	2,19	2,38	2,38
14	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal [1)3)]	%	40,36	42,00	44,05	46,10	48,15	50,20	52,25	52,25
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan [1)3)]	%	61,82	62,49	63,15	63,82	64,48	65,15	65,81	65,81
16	Kapabilitas Inovasi [1)3)]	Angka	4,64	4,65	4,66	4,67	4,68	4,69	4,70	4,70
17	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal [2)]	Produk	413.797	557.897	557.267	556.618	556.001	555.485	554.968	554.968
18	Aset Perbankan Syariah/PDRB [2)]	%	2,85	2,97	3,14	3,32	3,55	3,69	3,85	3,85
19	Indeks Zakat Nasional (Provinsi) [2)]	Angka	0,59	0,62	0,65	0,68	0,71	0,74	0,75	0,75

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Indeks Ekonomi Hijau [1)]	Angka	n/a	43,10	45,57	48,50	51,53	53,74	56,40	56,40
21	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer [1)3)]	%	18,55	21,32	21,60	21,87	22,17	22,38	22,55	22,55
22	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi [1)]	Angka	n/a	6,00	6,12	6,24	6,39	6,47	6,56	6,56
23	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi [1)3)]	Angka	n/a	6,70	6,60	6,50	6,40	6,30	6,20	6,20
24	Pembentukan Modal Tetap Bruto [1)3)]	% PDRB	30,53	30,55	30,63	30,75	30,86	30,94	31,00	31,00
25	Ekspor Barang dan Jasa [1)3)]	% PDRB	10,74	10,97	11,12	11,33	11,66	12,14	12,62	12,62
26	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional[1)]	%	n/a	2,41	2,45	2,49	2,53	2,57	2,62	2,62
27	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan [1)3)]	%	71,76	72,99	74,54	76,08	77,63	79,18	80,72	80,72
28	Persentase Desa Mandiri [1)3)]	%	19,59	25,86	27,27	28,68	30,09	31,50	32,97	32,97
29	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap [1)3)]	%	91,46	93,08	93,12	93,29	93,45	93,59	93,76	93,76
30	Indeks Pelayanan Transportasi [1)3)]	Angka	6,614	6,660	6,788	6,904	7,019	7,126	7,242	7,242
31	Persentase Keterwujudan Penataan Ruang [1)3)]	%	62,29	56,90	63,65	69,29	74,69	79,50	83,84	83,84
32	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB[1)]	%	1,23	1,38	1,38	1,39	1,40	1,41	1,42	1,42
33	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB[1)]	%	40,89	23,66	24,11	24,84	26,15	28,32	28,32	28,32
34	Aset Dana Pensiun/PDRB[1)]	%	0,39	0,39	0,39	0,39	0,40	0,41	0,43	0,43
35	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi[1)]	Nilai	3.287.253	3.700.540	3.846.660	4.354.768	4.987.435	5.752.446	8.811.843	8.811.843
36	Total Kredit/PDRB[1)]	%	25,58	23,20	25,14	27,15	29,33	31,74	34,31	34,31
37	Inklusi Keuangan[1)]	%	75,02	92,06	92,74	93,37	93,91	94,34	94,68	94,68

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D	**Aspek Pelayanan Umum**									
1	Indeks Reformasi Birokrasi [2)]	Angka	91,28	91,50	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00	94,00
2	Indeks Integritas Nasional [1)]	Angka	79,47	80,97	80,97	82,25	82,25	84,23	84,23	84,23
3	Indeks Demokrasi Indonesia [1)]	Angka	n/a	85,81 – 89,07	86,46 - 89,50	86,80 - 90,22	86,91 - 91,95	87,20 – 90,45	88,61 - 90,82	88,61 - 90,82
4	Otonomi Fiskal Daerah [2)]	%	66,91	63,56	65,72	66,80	67,89	68,90	69,84	69,84
5	Kapasitas Institusi [1)]	Angka	4,71	4,72	4,73	4,74	4,75	4,76	4,77	4,77
6	Indeks Reformasi Hukum [1)3)]	Angka	91,40	91,50	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00	94,00
7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik [1)]	Angka	4,42	4,50	4,55	4,59	4,62	4,65	4,69	4,69
8	Indeks Pelayanan Publik [1)]	Angka	n/a	4,55	4,56	4,57	4,58	4,60	4,62	4,62
9	Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM [1)3)]	Angka	99,80	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00
10	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya[1)]	%	n/a	79,50	79,50	79,50	79,50	82,50	82,50	82,50
11	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah [1)]	Kategori	n/a	n/a	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
12	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah [1)]	Kategori	n/a	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh
13	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) [1)]	Angka	78,98	79,28 - 79,30	79,65 - 79,69	80,03 - 80,09	80,40 - 8,48	80,78 - 80,88	81,15 - 81,27	81,15 - 81,27
14	Manajemen Risiko Indeks [2)]	Angka	3,378	3,379	3,380	3,382	3,384	3,386	3,388	3,388
E	**Indikator Kinerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**									
	Urusan Wajib Yang Berkaitan Pelayanan Dasar									
I	**Pendidikan**									
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 Tahun [3)4)]	%	71,60	72,24	72,88	73,53	74,16	74,80	75,45	75,45

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas [3)4)]	%	56,70	65,36	74,02	75,11	76,20	77,29	78,38	78,38
3	Persentase Satuan Pendidikan SMA, SMK, SLB yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Assesment Nasional Untuk Literasi Dan Numerasi [3)6)]	%	61,09	62,95	64,95	66,95	68,45	69,95	70,95	70,95
4	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK [3)6)]	%	89,88	90,38	90,88	91,38	91,88	92,38	92,88	92,88
II	**Kesehatan**									
1	Angka Kematian Balita (AKABA) [2)3)]	per 1.000 KH	8,57	8,75	8,66	8,57	8,48	8,40	8,32	8,32
2	Persentase Penurunan Kasus *Stunting* [2)3)]	%	0,22	0,15	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,35
3	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) [2)3)]	%	n/a	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00	60,00
4	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM) [2)3)]	%	22,80	28,50	34,30	40,00	45,70	51,40	57,10	57,10
5	Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar [2)3)]	%	n/a	22,86	28,57	34,28	40,00	45,71	51,43	51,43
6	Persentase Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Surveilans Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian KLB, Bencana dan Kesehatan Lingkungan [2)3)]	%	n/a	71,00	77,00	82,00	88,00	94,00	100	100
7	*Net Death Rate* (NDR) RSUD Dr. Moewardi [3)6)]	permil	46,17	56	55,80	55,60	55,50	55,30	55,10	55,10
8	*Net Death Rate* (NDR) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo [3)6)]	permil	30,14	30,135	30,13	30,125	30,12	30,115	30,11	30,11
9	*Net Death Rate* (NDR) RSUD dr. Adhyatma, MPH [3)6)]	permil	33,34	33,20	33,10	33,00	32,90	32,80	32,70	32,70
10	*Net Death Rate* (NDR) RSUD dr. Rehatta [3)6)]	permil	11,00	10,90	10,80	10,70	10,60	10,50	10,40	10,40

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	*Net Death Rate* (NDR) RSJD Dr. Amino Gondohutomo [3)6)]	permil	4,07	4,06	4,02	3,98	3,96	3,92	3,90	3,90
12	*Net Death Rate* (NDR) RSJD dr. Arif Zainudin [3)6)]	permil	3,09	3,05	2,98	2,96	2,94	2,92	2,90	2,90
13	*Net Death Rate* (NDR) RSJD Dr. RM. Soedjarwadi [3)6)]	permil	13,19	13,10	13,05	13,00	12,95	12,90	12,85	12,85
14	*Net Death Rate* (NDR) Rumah Sakit Mata Soepardjo Roestam [3)6)]	permil	33,34	33,20	33,10	33,00	32,90	32,80	32,70	32,70
15	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana [4)5)]	%	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi [4)5)]	%	100	100	100	100	100	100	100	100
III	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									
1	Persentase Panjang Jalan Provinsi dengan Nilai Kerataan Jalan Mantap [3)6)]	%	61,56	63,17	63,22	63,38	63,55	63,69	63,85	63,85
2	Persentase Panjang Jalan Provinsi Sesuai Standar Jalan Kolektor [3)6)]	%	47,09	48,18	48,22	48,38	48,71	49,06	49,54	49,54
3	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman [3)6)]	%	19,20 (SKAM-RT 2023)	36,50	41,20	45,90	50,60	55,30	57,35	57,35
4	Persentase Jumlah Komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam Kondisi Menuju Berfungsi Baik Sesuai Standar [3)6)]	%	49,42	61,65	68,06	76,02	80,78	86,41	89,81	89,81
5	Persentase Tingkat Kualitas Pelayanan Sumber Daya Air [3)6)]	%	66,53	67,41	67,69	67,78	67,92	68,06	68,19	68,19
6	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir [4)]	%	22,96	23,81	24,65	25,5	26,35	27,19	28,04	28,04

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi [4)]	%	100	100	100	100	100	100	100	100
IV	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**									
1	Persentase Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Berkelanjutan [3)6)]	%	63,60	60,58	62,66	64,73	66,81	68,88	70,96	70,96
2	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni [4)]	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni [4)]	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani [4)]	%	35,87	49,49	14,90	27,32	39,73	52,15	64,56	64,56
V	**Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**									
1	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum [2)3)]	Angka	84,07	84,25	84,50	84,75	85,00	85,25	85,50	85,50
2	Skor kinerja penegakan produk hukum daerah [3)6)]	Angka	6,09	6,10	6,15	6,157	6,20	6,25	6,257	6,257
3	Skor kinerja penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat [3)6)]	Angka	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20
4	Persentase Penegakan Produk Hukum Daerah [4)]	%	80,00	80,00	85,71	85,71	92,86	92,86	100	100
5	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan [4)]	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Indeks Ketahanan Daerah [2)3)]	Angka	0,75	0,76	0,77	0,78	0,79	0,80	0,81	0,81

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Persentase penanganan pra bencana[4)]	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase penanganan tanggap darurat bencana [4)]	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100
VI	**Sosial**									
1	Persentase Populasi PPKS [3)6)]	%	10,67	10,13	10,01	9,70	9,44	8,70	8,36	8,36
2	Persentase PPKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Sesuai SPM Bidang Sosial [3)5)]	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Populasi PPKS Fakir Miskin [3)6)]	%	9,96	9,60	9,48	9,17	8,91	8,59	8,27	8,27
4	Persentase PSKS yang Meningkat Kompetensinya Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial [3)6)]	%	n/a	n/a	8,88	17,76	26,64	35,52	44,40	44,40
5	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan Rehabsos Dasar Dalam Panti [4)5)]	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan Rehabsos Dasar Dalam Panti [4)5)]	%	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Lansia Terlantar yang mendapatkan Rehabsos Dasar Dalam Panti [4)5)]	%	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Rehabsos Dasar Dalam Panti [4)5)]	%	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase korban bencana daerah provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat [4)5)]	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar									
I	**Tenaga Kerja**									
1	Rasio Penduduk Bekerja terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja (EPR/*Employment to Population Ratio*) [2)3)]	%	70,21	69,06	69,54	70,03	70,55	71,08	71,40	71,40
2	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja [3)6)]	%	73,76	74,07	74,39	74,70	75,02	75,34	75,65	75,65
3	Persentase Tenaga Kerja yang Kompeten [3)4)]	%	9,03	9,54	10,00	10,47	11,00	11,53	12,05	12,05
4	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja [3)4)]	Juta Rp	55,47	56,00	56,40	56,90	57,20	57,60	58,00	58,00
5	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja [3)4)]	%	62,85	68,57	85,71	91,42	94,28	97,14	100	100
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) [4)]	%	19,07	19,25	19,43	19,62	19,80	19,98	20,17	20,17
7	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi [4)]	%	73,76	73,80	73,85	73,90	73,95	74,00	74,05	74,05
8	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan [4)]	%	9,96	10,00	10,51	10,93	11,12	11,71	12,20	12,20
II	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**									
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) [2)3)4)]	Angka	93,44	93,45	93,47	93,49	93,50	93,52	93,55	93,55
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA) [2)3)]	Angka	n/a	65,00	65,35	66,70	66,95	67,20	67,50	67,50
3	Persentase Anggaran Responsif Gender di OPD Provinsi [3)4)]	%	10,37	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	16,00

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Persentase korban kekerasan perempuan yang mendapat layanan komprehensif [4)]	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif [4)]	%	100	100	100	100	100	100	100	100
III	**Pangan**									
1	Persentase cadangan pangan [4)]	%	65,43	30,00	31,00	32,00	33,00	34,00	35,00	35,00
2	Skor PPH (Pola Pangan Harapan) Jawa Tengah [3)4)]	Angka	93,60	94,20	94,50	94,55	94,58	94,60	94,63	94,63
3	Persentase Daerah Rawan Pangan [3)4)]	%	n/a	15,60	14.60	13,60	12,60	11,60	11,00	11,00
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan [3)4)]	%	n/a	90,00	90,10	90,20	90,30	90,40	90,50	90,50
IV	**Pertanahan**									
1	Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum [3)6)]	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi [3)6)]	%	100	100	55,50	58,30	61,10	63,80	66,60	66,60
3	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan [4)]	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu [4)]	%	100	100	100	100	100	100	100	100
V	**Lingkungan Hidup**									
1	Indeks Kualitas Air (IKA) [2)3)]	Angka	52,03	68,71	68,82	68,92	69,02	69,13	69,23	69,23
2	Indeks Kualitas Udara (IKU) [2)3)]	Angka	87,73	84,91	84,93	84,94	84,96	84,98	84,99	84,99
3	Indeks SO2 dan NO2 [2)3)]	Angka	0,32	0,3238	0,3234	0,323	0,3226	0,3222	0,3219	0,3219
4	Indeks Pencemaran Air [2)3)]	Angka	3,35	3,35	3,34	3,34	3,33	3,33	3,32	3,32

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi [4)]	%	53,85	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
VI	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**									
1	Nilai Kinerja Dukcapil Provinsi Jawa Tengah [3)6)]	Angka	60,85	85,00	85,50	86,00	86,50	87,00	87,50	87,50
2	Persentase kepemilikan Dokumen Kependudukan di Jawa Tengah [3)6)]	%	60,85	86,30	86,53	86,76	87,03	87,31	87,59	87,59
VII	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**									
1	Persentase Jumlah Desa yang meningkat status kemandiriannya di Jawa Tengah [3)6)]	%	n/a	5,93	11,69	17,46	23,23	29,00	35,03	35,03
VIII	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**									
1	*Total Fertility Rate* (TFR) [2)3)4)]	Angka	2,03	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) [2)3)4)]	Angka	63,90	64,25	64,50	64,75	65,00	65,30	65,50	65,50
3	Persentase *Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR [2)3)4)]	%	69,46	69,50	69,75	70,00	70,25	70,50	70,60	70,60
4	*Unmetneed* KB [2)3)4)]	%	7,79	9,50	9,25	9,00	8,75	8,50	8,40	8,40
5	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR) [2)3)4)]	Per 1000 WUS 15-19 Tahun	17,30	17,00	16,00	15,00	14,00	13,00	12,00	12,00
IX	**Perhubungan**									
1	Rasio Konektivitas Provinsi [3)6)]	Angka	0,264	0,274	0,302	0,327	0,352	0,375	0,401	0,401
2	Persentase Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan Provinsi [3)6)]	%	99,9830	99,9836	99,9838	99,9842	99,9846	99,9850	99,9853	99,9853
3	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan provinsi [3)4)]	%	9,25	10,4	10,98	11,56	12,14	12,72	13,29	13,29

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Persentase kendaraan laik jalan di Jawa Tengah [3)4)]	%	97,981	98,01	98,03	98,05	98,08	98,1	98,12	98,12
X	**Komunikasi dan Informatika**									
1	Indeks Pemerintahan Digital [2)3)]	Angka	n/a	2,00	2,10	2,30	2,70	3,00	3,10	3,10
XI	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**									
1	Persentase kontribusi koperasi dan UMKM terhadap PDRB [3)6)]	%	14,90	12,99	13,52	13,68	13,87	14,08	14,23	14,23
XII	**Penanaman Modal**									
1	Pertumbuhan Nilai Penanaman Modal [3)4)]	%	14,83	10,09	10,13	10,32	10,46	10,61	10,75	10,75
XIII	**Kepemudaan dan Olahraga**									
1	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) [2)3)]	Angka	0,385	0,387	0,389	0,390	0,391	0,392	0,393	0,393
2	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) [3)4)]	Angka	56,43 (2023)	59,00	60,25	61,05	61,55	62,15	62,60	62,60
XIV	**Statistik**									
1	Indeks Pembangunan Statistik [2)]	Angka	2,61	2,61	2,81	2,81	3,01	3,01	3,16	3,16
XV	**Persandian**									
1	Indeks Keamanan Sandi dan Siber [2)]	Angka	n/a	3,58	3,59	3,60	3,61	3,62	3,63	3,63
XVI	**Kebudayaan**									
1	Angka Melek Budaya [3)]	%	52,61	53,82	55,32	56,82	58,32	59,82	61,32	61,32
XVII	**Perpustakaan**									
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) [3)4)]	Angka	15,14	15,45	15,76	15,99	16,32	16,73	17,16	17,16
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (NTGM) [3)4)]	Angka	73,91	75,10	76,70	78,50	80,50	83,00	85,60	85,60
XVIII	**Kearsipan**									
1	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Provinsi Jawa Tengah [3)4)]	Angka	96,07	96,17	96,27	96,37	96,47	96,57	96,67	96,67

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Persentase Arsip Bersejarah yang Ditetapkan sebagai Memori Kolektif Bangsa (MKB) 3)6)	%	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00
3	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi (LKD Provinsi) 3)6)	Angka	97,09	97,19	97,29	97,39	97,49	97,59	97,69	97,69
	Urusan Pilihan									
I	**Kelautan dan Perikanan**									
1	Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan 3)6)	%	1,00	1,00	2,00	2,10	2,20	2,20	2,40	2,40
2	Persentase Luasan Mangrove yang Direhabilitasi 3)6)	%	0,75	0,79	0,84	0,88	0,92	0,96	1,00	1,00
3	Produksi Perikanan 3)4)	Ton	968.353,80	952.717,50	954.029	969.649,90	985.589,40	1.001.857,10	1.018.462,80	4.929.588,20
4	Produksi Garam 3)4)	Ton	629.952,95	539.293,69	541.775,75	544.457,81	547.139,84	549.821,93	552.503,98	2.735.699,31
II	**Pariwisata**									
1	Pengeluaran Wisatawan 3)6)	Rp	7.510.765	7.642.320	8.243.954	8.645.935	8.798.697	8.957.262	9.121.890	9.121.890
2	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif 3)6)	Juta Rp	66.344.465	84.344.465	102.344.465	120.344.465	138.344.465	156.344.465	174.344.465	174.344.465
III	**Pertanian**									
1	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Sektor Pertanian 3)6)	%	1,17	1,04	1,05	1,06	1,07	1,08	1,09	1,09
2	Produksi Tanaman Pangan 3)4)	Ton	12.248.637	12.651.433	12.905.515	13.016.619	13.129.453	13.242.885	13.348.196	65.642.668
3	Produksi Tanaman Hortikultura 3)4)	Ton	1.357.743	1.455.879	1.478.779	1.501.992	1.519.237	1.549.531	1.566.600	7.616.139
4	Produksi Tanaman Perkebunan 3)6)	Ton	3.860.443	3.864.207	3.867.976	3.871.747	3.875.523	3.879.303	3.883.086	19.377.635
5	Produksi Ternak 3)4)	Ton	1.908.389	1.922.605	1.936.930	1.951.366	1.965.913	1.980.571	1.995.343	1.995.343
IV	**Kehutanan**									
1	Indeks Kualitas Lahan (IKL) 2)3)	Angka	48,37	59,46	59,47	59,48	59,49	59,5	59,51	59,51
2	Luas Tutupan Lahan 2)3)	Ha	1.022.457	1.022.457	1.022.457	1.022.457	1.022.457	1.022.457	1.022.457	1.022.457
3	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Kehutanan 2)3)	%	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi [3)4)]	%	1,04	0,21	0,78	0,81	0,85	0,89	0,93	5,51
V	**Energi dan Sumber Daya Mineral**									
1	Indeks Pengelolaan Air Tanah [3)6)]	Angka	516	351	360	365	370	375	380	380
2	Indeks Ketersediaan Air Tanah [3)6)]	Angka	3,65	3,66	3,67	3,68	3,69	3,70	3,71	3,71
3	Kontribusi PDRB Sektor Pertambangan [3)6)]	%	2,19	2,00	2,01	2,02	2,03	2,04	2,05	2,05
4	Persentase Penerapan *Good Mining Practice* (GMP) [3)6)]	%	63,37	63,40	63,50	63,60	63,70	63,80	63,90	63,90
5	Rasio Ketersediaan Daya Listrik [3)6)]	Angka	1,494	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda [4)]	%	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Rasio Elektrifikasi [2)]	%	99,99	99,99	~100	~100	~100	~100	~100	~100
VI	**Perdagangan**									
1	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan [3)6)]	%	4,16	4,20	4,30	4,50	4,70	4,90	5,10	5,10
2	PDRB Sektor Perdagangan [3)6)]	Milyar Rupiah	230.872,97	261.315,00	272.562,00	284.793,00	297.723,00	311.426,00	325.997,00	325.997,00
3	Pertumbuhan nilai ekspor non migas [4)]	%	9,086	4,05	4,10	4,20	4,30	4,40	4,50	4,50
4	Persentase penanganan pengaduan konsumen [4)]	%	100	100	100	100	100	100	100	100
VII	**Perindustrian**									
1	Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian [3)6)]	%	3,52	3,80	3,95	4,10	4,25	4,40	4,55	4,55
2	PDRB Sektor Perindustrian [3)6)]	Milyar Rupiah	615.195,96	649.000,00	675.350,00	703.086,00	732.387,00	763.373,00	796.183,00	796.183,00
4	Persentase peningkatan jumlah tenaga kerja industri tekstil dan alas kaki [3)6)]	%	n/a	0,32	0,32	0,34	0,37	0,39	0,44	0,44
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini [4)]	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan									
I	**Sekretariat Daerah**									
1	Indeks Kualitas Kebijakan [3)6)]	Angka	66,32	66,35	66,40	66,40	66,60	66,60	66,80	66,80
II	**Sekretariat DPRD**									
1	Indeks Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah [3)6)]	Angka	90,00	91,00	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00	94,00
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
I	**Perencanaan**									
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) [2)3)]	Angka	93,89	93,91	94,19	94,44	94,64	94,84	95,20	95,20
2	Skor Aspek Sinergi dalam IPPN [3)6)]	Angka	27,53	27,55	27,75	28,00	28,20	28,40	28,60	28,60
3	Skor Aspek Kualitas Perencanaan dalam IPPN [3)6)]	Angka	56,36	56,36	56,44	56,44	56,44	56,44	56,60	56,60
4	Skor Aspek Keterhubunngan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja [3)6)]	Angka	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
II	**Keuangan**									
1	Persentase Pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah [3)4)]	%	11,64	1,64	5,41	12,07	19,35	26,79	34,36	34,36
2	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah [3)6)]	%	97,75	97,80	97,85	97,90	97,95	98,00	98,05	98,05
3	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) [2)3)]	Angka	3,24	3,08	3,12	3,16	3,20	3,24	3,28	3,28
III	**Kepegawaian**									
1	Indeks Sistem Merit [2)3)]	Angka	0,86	0,865	0,87	0,875	0,88	0,885	0,89	0,89
2	Indeks NSPK Manajemen ASN [3)4)]	Angka	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00	94,50	95,00	95,00
IV	**Pendidikan dan Pelatihan**									
1	Indeks Kompetensi ASN [3)6)]	Angka	3,07	3,08	3,10	3,15	3,18	3,20	3,25	3,25

No	Indikator	Satuan	*Baseline*		Target Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
			2024 (R)	2025 (T)	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V	**Penelitian dan Pengembangan**									
1	Indeks Inovasi Daerah [2)3)]	Angka	72,85	73,00	73,50	74,00	74,50	75,00	75,50	75,50
2	Persentase Rekomendasi Kebijakan yang Ditindaklanjuti [3)6)]	%	100	100	100	100	100	100	100	100
VI	**Pengelolaan Penghubung**									
1	Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung [3)6)]	Angka	86,00	85,00	86,00	86,25	86,50	86,75	87,00	87,00
	Unsur Pengawasan									
1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi [3)4)]	Angka	3,471	3,50	3,52	3,54	3,56	3,58	3,60	3,60
2	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) [3)4)]	Angka	3,02	3,20	3,40	3,60	3,70	3,80	4,00	4,00
3	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) [2)3)]	Angka	3,096	3,146	3,196	3,246	3,296	3,346	3,396	3,396
	Unsur Pemerintahan Umum									
1	Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUD [3)6)]	Angka	3,01	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	3,06	3,06
2	Indeks Harmonisasi Indonesia [2)3)]	Angka	n/a	6,40	6,50	6,60	6,70	6,80	6,90	6,90
3	Indeks Ketahanan Politik [3)6)]	Angka	3,11	3,11	3,12	3,13	3,14	3,15	3,16	3,16

Keterangan:

[1)] IUP RPJPD/Indikator Sasaran Visi RPJPD

[2)] Indikator Mandatori Lainnya (Indikator mandatori Blue Print Gubernur/Wakil Gubernur, hasil evaluasi Raperda Kemendagri, dan/atau mandatori Pusat lainnya)

[3)] Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan Perangkat Daerah

[4)] Indikator Kinerja Kunci (IKK)

[5)] Indikator SPM

[6)] Indikator Mandiri/Lokal Daerah

BAB VI
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi, dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2029-2029 yang menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah Jawa Tengah secara tahunan dalam lima tahun ke depan. RPJMD Tahun 2025-2029 ini juga merupakan penjabaran tahap pertama RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045. RPJMD Tahun 2025-2029 ini disusun dengan tetap memperhatikan kebijakan dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, dan kebijakan lainnya yang berlaku. RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan harapan akan dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis daerah Jawa Tengah dalam lima tahun ke depan.

RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD ini juga menjadi panduan bagi kabupaten/kota untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan dunia usaha maupun masyarakat dalam ikut serta bersama membangun Jawa Tengah. Seluruh pihak diharapkan dapat mendukung implementasi rencana pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah tahun 2025-2029 yaitu "Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan", yang dijabarkan dalam tiga sasaran daerah yaitu: 1) terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegritas dan kolaboratif serta stabilitas pembangunan daerah, 2) terwujudnya perekonomian yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis lingkungan, 3) terwujudnya sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter.

Guna menjaga kesinambungan pembangunan berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029, maka pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 memperhatikan **kaidah pelaksanaan** meliputi:

1. **konsistensi perencanaan dan pendanaan**, disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level keluaran dan memastikan pelaksanaanya, serta penguatan mekanisme proses utamanya yang dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan termasuk memperhatikan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusi sosial;
2. **keterkaitan perencanaan pembangunan** daerah dengan nasional yang digambarkan dengan keterkaitan RPJMD dengan dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, dan RPJMD akan dijabarkan dalam dokumen RKPD setiap

tahunnya mulai dari RKPD Tahun 2026 sampai dengan RKPD Tahun 2030, serta menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah;

3. **penerapan *cascading*** dalam penyusunan RPJMD dengan tetap menerapkan prinsip kerangka kerja logis, dimana penjabaran tujuan dan sasaran daerah berdasarkan visi dengan tetap memperhatikan misi, yang disusun dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, disertai indikator kinerja pembangunan yang disusun dengan memenuhi kriteria *specific, measureable, achievable, result oriented/relevant*, dan *time-bound* (SMART), dimana seluruh indikator RPJMD akan dijabarkan dalam Renstra PD;
4. **kerangka pengendalian** yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan, dengan ruang lingkup meliputi: (a) pengendalian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah mencakup penjabaran dokumen RPJMD ke dokumen Renstra PD, penetapan ukuran keberhasilan, konsistensi perencanaan dan penganggaran, identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya, serta mencakup penjabaran dokumen RPJMD ke dokumen RKPD, integrasi RKPD ke Renja PD, (b) pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko, serta (c) hasil evaluasi dilaporkan kepada Gubernur dan DPRD serta dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas;
5. **mekanisme perubahan** yang dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan melalui pemutakhiran target dalam RKPD dan Renja PD; penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan, dimana sistem elektronik terpadu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJMD, dan tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama;
6. **komunikasi publik** untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan, dimana komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama yaitu kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk pihak swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia.
7. **pengarusutamaan kebijakan** dalam pembangunan daerah sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional meliputi kebijakan gender dan inklusi sosial, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), transformasi digital, pembangunan rendah karbon, dan pembangunan berketahanan iklim.

Pada akhirnya, perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD ini akan dapat diwujudkan dengan baik dengan dukungan komitmen yang tinggi para penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan, dan peran serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah. Hal ini juga menjadi wujud kolaborasi untuk bersama membangun Jawa Tengah dalam kerangka "**Ngopeni Nglakoni Jateng**", dalam rangka mewujudkan "**Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045"**.

Demikian semoga bermanfaat bagi kita bersama.

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Haerudin, S.H., M.H.
Kepala Biro Hukum
197007291996031001

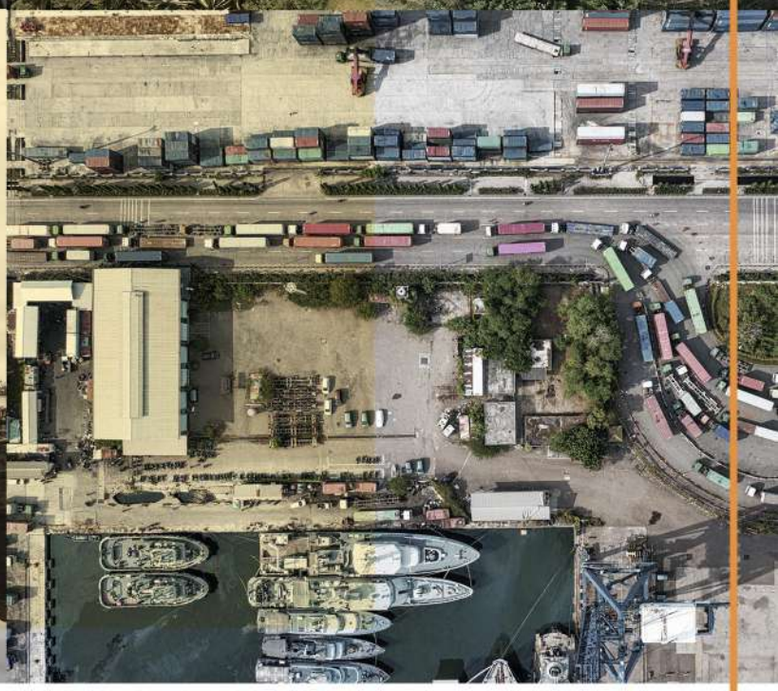

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NGOPENI. NGLAKONI. Jateng

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Jl. Pahlawan No.9, Mugassari, Semarang Selatan,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50249
E-Mail ppid@jatengprov.go.id
Telepon 024-8415548 / 024-8453676